

PROSIDING

SEMINAR HASIL-HASIL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2015

Bidang :

Sosial Politik, Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan,
Kajian Budaya, dan Pengabdian Kepada Masyarakat



Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

PROSIDING

**SEMINAR HASIL-HASIL PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**Bidang :
Sosial Politik, Ekonomi, Kesehatan,
Pendidikan, Kajian Budaya, dan Pengabdian
kepada Masyarakat**

**Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Ponoroo**

Penerbit : UNMUH Ponorogo Press

SUSUNAN TIM PENYUSUN

- Pengarah : 1. Titi Rapini, SE, MM.
(Dekan Fakultas Ekonomi Unmuh Ponorogo)
2. Dra. Hj. Khusnatul Zulfa W., MM., Ak, CA.
(Wakil Dekan Bidang Akademik Unmuh Ponorogo)
3. Heri Wijayanto, ST., MM., M.Kom.
(Kepala Divisi Penelitian dan Kajian Ilmiah LPPM Unmuh Ponorogo)
- Ketua Editor : Slamet Santoso, SE, M.Si.
- Anggota Editor : 1. Choirul Hamidah, SE., MM.
2. Dwiati Marsiwi, SE., M.Si, AK, CA
3. Khoirurrosyidin, M.Ip.
4. Saiful Nurhidayat, S.Kep, M.Kep, Ners.
5. Wijianto, SE., MM.
6. Edy Kurniawan, ST., MT.
7. Munaji, M.Si.
- Tim Teknis : 1. Muhibuddin Fadhli, M.Pd.
2. Ika Farida Ulfah, S.Pd., M.Si
3. Dra. Umi Farida, MM.
4. Alip Sugianto, S.Pd., M.Hum.
5. Edy Santoso, SE., MM.
6. Sri Hartono, SE., MM.
- Desain Sampul : 1. Eka Dwi N, MT.
2. Syarul Ulum, S.Kom.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur selayaknya kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Agung yang tanpa henti mengucurkan rahmat, Taufiq dan karuniaNya, sehingga dengan ijinNya Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan PKM, dengan Tema “Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Dalam Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ”, dapat kami terbitkan.

Tema tersebut dipilih, karena kami berpendapat bahwa dalam menghadapi MEA Indonesia harus menjadi pemain di kancah internasional bukan sebagai penonton. Untuk itulah Fakultas Ekonomi menggagas sebuah seminar Nasional dan *call for paper* hasil-hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dalam rangka persiapan menjadi petarung di kancah MEA.

Saat ini banyak hasil penelitian dan PKM yang tersebar di berbagai Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian di seluruh pelosok tanah air, namun banyak yang belum didesiminasikan dan disosialisasikan secara optimal. Untuk itu tujuan seminar ini adalah:

1. Sebagai sarana para peneliti untuk mempresentasikan hasil penelitian dan PKM, sekaligus melakukan pertukaran informasi, pendalaman masalah-masalah di berbagai bidang keahliannya, serta mempererat dan mengembangkan kerjasama akademik yang saling menguntungkan secara berkelanjutan.
2. Sebagai sumbang saran kepada pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah berupa hasil-hasil penelitian dan penerapan sains dan teknologi bagi perkembangan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Seminar ini diikuti oleh peneliti-peneliti dari berbagai bidang ilmu dari seluruh Indonesia, yang telah membahas berbagai bidang kajian sains, kesehatan, sosial, ekonomi, budaya, serta bidang lainnya. Prosiding ini berisi 55 makalah sebagai tindak lanjut dari seminar, dan kami berharap adanya pengembangan konsep-konsep dan aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan oleh pemerintah dan industri dalam menghadapi MEA.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada panitia pengarah, panitia pelaksana, para Sponsorship, dan Pimpinan yang telah menyediakan fasilitas untuk persiapan-persiapan, serta pihak-pihak lain yang belum kami sebut, tetapi banyak membantu atas terselenggaranya seminar serta terwujudnya prosiding ini. Semoga Allah SWT meridhoi semua langkah dan perjuangan kita, serta berkenan mencatatnya sebagai amal ibadah. Amin.

Ponorogo, 21 Nopember 2015

Panitia,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SUSUNAN TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv

Bidang ekonomi

1. <i>Eksistensi Direksi Asing Dalam Hubungan Komite Audit Terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal</i> Oleh: Totok Dewayanto	1-9
2. <i>Potret Usaha Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Ponorogo Pasca Pembinaan</i> Oleh: Titi Rapini ¹⁾ , Umi Farida ²⁾ , Setyo Adji ³⁾	10-19
3. <i>Muhammadiyah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat: Kajian Tentang Penyertaan Modal Organisasi Dalam Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT)</i> Oleh: Sugeng Wibowo	20-28
4. <i>Knowledge Management Pada Kinerja Dengan Strategi Observasi Bisnis Sebagai Variabel Moderasi: Perspektif Mahasiswa Indonesia</i> Oleh: Asep Rokhyadi ¹⁾ , Tutut Dewi Astuti ²⁾	29-36
5. <i>Kepuasan Kerja Dan Prestasi Kerja Karyawan Rumah Sakit Umum 'Aisyiyah Ponorogo</i> Oleh: Umi Farida ¹⁾ , Titi Rapini ²⁾	37-45
6. <i>Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Penumpang Kereta Api Madiun Jaya di Stasiun Sragen</i> Oleh: Aris Tri Haryanto ¹⁾ , Septiana Novita Dewi ²⁾	46-53
7. <i>Analisis Akses Kredit Usaha Sektor Informal Di Kota Ponorogo</i> Oleh: Khusnatul Zulfa Wafirotni ¹⁾ , Asis Riat Winanto ²⁾	54-61
8. <i>The Competitive Advantage of family firm Chinese ethic: Case Study in chinatown in small city Indonesia</i> Oleh: Hadi Sumarsono ¹⁾ , Titi Rapini ²⁾	62-75
9. <i>Upaya Peningkatan Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Syariah</i> Oleh: Dwiati Marsiwi ¹⁾ , Arif Hartono ²⁾	76-84
10. <i>Penerapan Metode Activity Based Costing Sebagai Penentuan Harga Pokok Produksi di Klinik Wirausaha Madiun</i> Oleh: Diyah Santi Hariyani ¹⁾ , Juli Murwani ²⁾	85-93

11. <i>Pengaruh Management Accounting System Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Ketidakpastian Sebagai Variabel Moderating (Studi Di Koperasi Kabupaten Ponorogo)</i> Oleh: David Efendi.....	94-108
12. <i>An Investigation On Balanced Scorecard Implementation In Evaluating And Developing Character Building Program: A Case Study In Internatonal Program Universitas Islam Indonesia</i> Oleh: Budi Tiara Novitasari	109-118
13. <i>Pengaruh Gender Terhadap Keputusan Konsumsi Dan Investasi Keluarga Tki</i> Oleh: Choirul Hamidah.....	119-126
14. <i>Peran Gaya Kepemimpinan Transformasional Pejabat Struktural Terhadap Kinerja Karyawan</i> Oleh: Heri Wijayanto.....	127-138
15. <i>Pengakuan dan Pengukuran Transaksi Mudharabah; Kajian Psak 105 Dalam Bingkai Ilmu Sosial Profetik</i> Oleh: Arif Hartono.....	139-159
16. <i>Informasi Akuntansi Untuk Menunjang Keberhasilan Usaha Kecil Dalam Menghadapi MEA</i> Oleh: Ika Farida Ulfah.....	160-169
17. <i>Pengaruh Dorongan Keluarga Dan Pendidikan Formal Terhadap Keputusan Berwirausaha Dengan Motivasi Berwirausaha Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Pencari Kerja di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sragen)</i> Oleh: Septiana Novita Dewi ¹⁾ , Aris Tri Haryanto ²⁾	170-179
18. <i>Sikap Manajer Tingkat Menengah Dan Penerapan International Standart Organization serta Hubungannya Dengan Kinerja Manajerial</i> Oleh: Syaiful ¹⁾ , Anwar Hariyono ²⁾	180-203

Bidang sosial Politik

19. <i>Opinion Leader Dan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (Studi Di Desa Nglumpang Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)</i> Oleh: Niken Lestarini ¹⁾ , Muhammad Amir ¹⁾	204-214
20. <i>Pemetaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan</i> Oleh: Muhaimin.....	215-222
21. <i>MEA : Saatnya Ponorogo Mencuri Perhatian</i> Oleh: Jusuf Harsono.....	223-226
22. <i>Optimalisasi Peran Knpi Dalam Problematika Sampah Sebagai Perwujudan Terciptanya Kota Sehat Dan Berwawasan Lingkungan</i> Oleh: Didik Aribowo ¹⁾ , Endi Permata ²⁾ , Putro Ferro Ferdinant ³⁾	227-233

23. <i>Profil Sektor Informal Di Kabupaten Ponorogo</i> Oleh: Asis Riat Winanto ¹⁾ , Khusnatul Zulva Wafirotn ²⁾	234-243
24. <i>Peran Tim Penggerak Pkk Dalam Mengantisipasi Pekerja Anak Pada Daerah Miskin Di Kabupaten Ponorogo</i> Oleh: Naning Kristiyana.....	244-253
25. <i>Redesign Campaign Strategy Melalui Perpaduan Political Marketing Dan Pemikiran Tan Malaka Untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi Dalam Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Di Jawa Timur (Pilkada)</i> Oleh: Bagus Ananda Kurniawan	254-271
26. <i>Faktor-Faktor Karakteristik Pemerintah daerah Yang Mempengaruhi Belanja Operasi</i> Oleh: Ardyan Firdausi Mustoffa.....	272-283
27. <i>Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Penggalan Potensi Retribusi Parkir Di Kabupaten Ponorogo</i> Oleh: Slamet Santoso ¹⁾ , Choirul Hamidah ²⁾ , Edy Kurniawan ³⁾	284-290

Bidang Kesehatan

28. <i>Analisis Komitmen Penerapan Pesan Gizi Seimbang Pada Keluarga Di Daerah Endemi Down Syndrom</i> Oleh: Sugeng Mashudi	291-294
29. <i>Perilaku Ibu Hamil Dalam Senam Gerakan Tari Jathilan Ponorogo Di Wilayah Puskesmas Balong Kabupaten Ponorogo</i> Oleh: Sriningsih ¹⁾ , Sujiono ²⁾	295-300
30. <i>Faktor Risiko Penyakit Hipertensi Berbasis Pedesaan</i> Oleh: Saiful Nurhidayat ¹⁾ , Taufiq Harjono ²⁾	301-310
31. <i>Hubungan Antara Pendidikan Ibu Dan Status Ekonomi Keluarga Dengan Status Gizi Balita Di Puskesmas Sukorejo Kabupaten Ponorogo</i> Oleh: Siti Faridah ¹⁾ , Inna Sholicha Fitriani ²⁾	311-317
32. <i>Persepsi Pasien TB Paru Kepada Pmo Dalammenunjang Kepatuhan Pelaksanaan Program Pengobatan Di GHS (Government Health Service) Ponorogo</i> Oleh: Nurul Sri Wahyuni ¹⁾ , Andy Triyanto Pujo Raharjo ²⁾	318-326
33. <i>Evaluasi Perilaku Keluarga Sadar Gizi di Ponorogo</i> Oleh: Metti Verawati ¹⁾ , Ririn Nasriati ²⁾	327-336
34. <i>Perempuan Rentan Dengan Gangguan Jiwa di Desa Keniten Kabupaten Ponorogo</i> Oleh: Eky Okviana Armyati ¹⁾ , Sri Susanti ²⁾	337-341
35. <i>The Differences Cardiovascular Disease Risk Factors In Rural And Urban Population In District Ponorogo</i> Oleh: Cholik Harun Rosjidi ¹⁾ , Laily Isro'in ²⁾ , Nurul Sri Wahyuni ³⁾	342-355

36. *Penyakit Tuberkulosis Paru Dan Implikasi Terhadap Beban Pendapatan Ekonomi Keluarga*
Oleh: Sulistyo Andarmoyo356-361
37. *Efektifitas Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) Terhadap Pengetahuan, Keterampilan, Dan Sikap Bidan di Puskesmas Jambon Kabupaten Ponorogo*
Oleh: Yayuk Dwirahayu362-368

Kajian Budaya

38. *Budaya Mbecok Dalam Perspektif Agama, Sosial Dan Ekonomi di Kabupaten Ponorogo*
Oleh: Sunarto369-379
39. *Interaksi Simbolik Dalam Komunikasi Budaya (Studi Analisis Fasilitas Publik Di Kabupaten Ponorogo)*
Oleh: Oki Cahyo Nugroho380-396
40. *Pagelaran Wayang Krucil Dan Mitos Gagal Panen (Studi Terhadap Masyarakat Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo)*
Oleh: Dian Suluh Kusuma Dewi¹⁾, Pinaryo²⁾397-405
41. *Variasi Leksikal Hantu Dalam Bahasa Jawa Dan Bahasa Inggris: Analisis Kontrastif Perspektif Etnolinguistik*
Oleh: Alip Sugianto406-414
42. *Telaah Nilai-Nilai Islami Dalam “Seni Badut Sinampurna” di Desa Ploso Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Dalam Perspektif Kosmologi Jawa- Islam*
Oleh: Imam Mahfud415-422
43. *Tinjauan Tayangan Sinetron Pada Program Prime Time Televisi Dari Sudut Pandang Moral Khususnya Bagi Penonton Wanita Dan Remaja Putri*
Oleh: Firda Djuita¹⁾, H. Hardono²⁾, Agustina Srihandari³⁾423-433

Bidang Pendidikan

44. *Reyog Ponorogo Berbasis Sekolah; Strategi Pengembangan Seni Reyog Ponorogo Menuju Masyarakat Ekonomi Asia*
Oleh: Rido Kurnianto¹⁾, Niken Lestari²⁾434-446
45. *Pengembangan Model Pendidikan Karakter Berbasis Musik*
Oleh: Rudianto¹⁾, Sugeng Wibowo²⁾, Sumaji³⁾447-465
46. *Wanita Sebagai Nadzir (Model Manajemen Wakaf Pengurus Daerah Aisyiah (PDA) Ponorogo Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ummat)*
Oleh: Nurul Iman466-472

47. *Materi Otentik Dalam Penelitian Tindakan Kelas Bahasa Inggris Pada Program Studi Manajemen*
Oleh: Niken Reti Indriastuti473-476
48. *Peningkatan Kemampuan Siswa Membuat Model Matematika Dari Soal Cerita Dengan Bantuan 'Keyword'*
Oleh: Jumadi477-480
49. *Pergeseran Peran Dan Fungsi Suami Terhadap Pendidikan Anak Dalam Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Tkw) Di Luar Negeri*
Oleh: Ekapti Wahjuni Dj.¹⁾, Slamet Santoso²⁾481-488
50. *Pengembangan Komik Elektronik Sebagai Media Pendidikan Karakter di Sekolah Agar Mampu Bersaing Di Dunia Pendidikan Internasional*
Oleh: Edi Sunjayanto Masykuri489-494

Pengabdian Kepada Masyarakat

51. *Peningkatan Produktivitas Home Industry Krupuk Dengan Menggunakan Mesin Produksi Tepung Tapioka*
Oleh: Sudarno¹⁾, Fadelan²⁾495-505
52. *Air Bersih Sebagai Sarana Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat Dusun Jurugan Desa Karang Patihan Pulung Ponorogo*
Oleh: Nurul Sri Wahyuni¹⁾, Andy Triyanto Pujo Raharjo²⁾506-512
53. *Ipteks Bagi Masyarakat (Ibm) Petani Lele Makmur Melalui Pembuatan Probiotik Di Desa Sidoharjo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten*
Oleh: Muh.Waskito Ardhi¹⁾, Pujiati²⁾, Mislan Sasono³⁾513-518
54. *Ibm Desa Tambakmas Dalam Penyediaan Pakan Lele Mandiri Melalui Budidaya Cacing Sutera (tubifex sp.) Dengan Media Limbah Air Kolam Lele*
Oleh: Farida Huriawati¹⁾, Nurul Kusuma Dewi²⁾, Wachidatul Linda Yuhanna³⁾519-524
55. *Pengaruh Filter Bensin Unitech Terhadap Emisi Gas Buang*
Oleh: Nanang Suffiadi¹⁾, Moh Muksin²⁾525-529

**EKSISTENSI DIREKSI ASING DALAM HUBUNGAN KOMITE AUDIT TERHADAP
PENGUNGKAPAN PENGENDALIAN INTERNAL**

Oleh :
TOTOK DEWAYANTO

UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
Email : totokdewayanto@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh keberadaan direksi asing terhadap hubungan keahlian komite audit dengan pengungkapan pengendalian internal. Obyek penelitian pada perusahaan public non financial/perbankan yang listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2011, dengan purposive sampling dan regresi berganda untuk menguji hipotesis. Penelitian ini mampu membuktikan pengaruh keahlian komite audit terhadap pengungkapan pengendalian internal secara signifikan, dan mampu secara signifikan menguji variable moderasi keberadaan direksi asing. Dengan demikian keahlian komite audit dan keberadaan direksi asing mampu menjawab peningkatan pengungkapan yang dapat mencerminkan adanya pengendalian internal yang baik, sehingga berimplikasi pada pelaporan keuangan yang lebih reliable dan berkualitas dapat mengurangi risiko atas kepercayaan terhadap informasi keuangan yang salah, sebagaimana yang diterima oleh pemangku kepentingan. Keahlian keuangan dari anggota komite audit itu menunjukkan sesuatu yang penting dalam hubungannya dengan kompleksitas laporan keuangan untuk mengurangi penyajian kembali laporan keuangan. Anggota komite audit yang memiliki pengetahuan tentang pelaporan keuangan lebih banyak dalam bidang keuangan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk dapat menunjukkan dan mendeteksi salah saji material. Anggota komite audit dengan keahlian keuangan juga dapat memainkan peran dalam pengawasan proses pelaporan keuangan secara lebih efektif, seperti mendeteksi adanya salah saji material.

Kata Kunci: *Pengungkapan pengendalian internal, keahlian komite audit, keberadaan direksi asing.*

PENDAHULUAN

Sarbanes-Oxley Act of 2002 berlaku 30 Juli 2002 seiring dengan meningkatnya perhatian para investor terhadap integritas dalam pelaporan keuangan perusahaan. Skandal adanya penyimpangan dalam pelaporan keuangan yang melibatkan beberapa perusahaan besar Amerika Serikat, seperti kasus Enron dan World Com, dan kantor akuntan publik (KAP) *Big Five Arthur Andersen* pada awal abad 21 telah menyadarkan dunia akan pentingnya kejujuran dalam pelaporan keuangan. Skandal akuntansi yang terjadi pada perusahaan Amerika tersebutlah yang akhirnya mendorong diterbitkannya *Sarbanes-Oxley Act*

of 2002 (SOX 2002) (Zhang *et al.*, 2007). Pengungkapan yang diwajibkan dalam SOX 2002 sebagian besar terkait dengan pengendalian internal (Zhang *et al.*, 2007), dalam penelitian tersebut difokuskan pada faktor-faktor yang berkaitan dengan pengungkapan pengendalian internal.

Menurut Bronson *et al.*, (2006) bahwa laporan manajemen tentang pengendalian internal secara sukarela (*voluntary management reports on internal control/MRIC*) lebih banyak terjadi pada perusahaan besar, dimana memiliki keahlian bagi komite audit, yang melakukan pertemuan dengan frekuensi tinggi. Di Indonesia *internal control material weakness disclosure* belum

banyak ditemui karena masih bersifat *voluntary* (sukarela), namun apabila sebuah perusahaan Indonesia telah terdaftar di bursa efek New York Stock Exchange Amerika Serikat, maka perusahaan wajib melakukan *internal control material weakness disclosure*, dikarenakan terikat oleh peraturan dari SOX.

Di Indonesia sendiri terdapat dua perusahaan yang telah terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE) yaitu PT Telkom dan PT Indosat. *Internal control material weakness disclosure* yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut tentu saja akan memotivasi perusahaan lain yang ingin listing di NYSE (*New York Stock Exchange*). Sampai sekarang di Indonesia belum ada regulasi yang mengatur tentang *Internal control material weakness disclosure* seperti SOX 302 dan 404, oleh karena itu penelitian membahas konsep tersebut secara *voluntary*. Walaupun Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-134/BL/2006 diperbaharui dalam dalam Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-431/BL/2012 telah memutuskan kewajiban penyampaian laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik, yang secara *voluntary* mengharapkan mengungkapkan pengendalian intern lebih memadai.

Menurut Zhang *et al.*, (2007) sebuah perusahaan yang memiliki komite audit berkualitas akan memiliki kemungkinan lebih kecil mengalami masalah pada pengendalian internalnya. Temuan Zhang dkk melengkapi Krishnan (2005). Komite audit di Indonesia masih terhitung baru jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia seperti Amerika, Inggris, dan Kanada. Padahal

keberadaan komite audit cukup penting sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan *good corporate governance* (GCG).

Komite audit mulai dikenalkan oleh pemerintah kepada BUMN tertentu pada tahun 1999. Sedangkan Bapepam pada tahun 2000 mulai memberikan anjuran kepada perusahaan yang telah *go public* untuk memiliki komite audit. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka *research problem* penelitian ini adalah: Pentingnya pengungkapan pengendalian internal komprehensif secara sukarela oleh manajemen perusahaan, yang bermanfaat dalam peningkatan kehandalan pelaporan keuangan. Sehingga permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah pengaruh Eksistensi Direksi Asing Dalam Hubungan Komite Audit Terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal.

LANDASAN TEORI & PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan sinergi dari teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori ini pertama kali digunakan oleh Jensen dan Meckling (1976). *Agency theory* inilah yang selama ini dijadikan dasar dalam praktik bisnis yang ada. Prinsip utama dari *agency theory* ini adalah hubungan antara pemberi wewenang (*principal*) dan pihak yang diberi wewenang (*agent*). Goal conflict dari hubungan keagenan (*Agency Relationship*) berupa terjadinya distorsi informasi tentang perusahaan berakibat munculnya masalah

keagenan (agency problem) yang berimplikasi menimbulkan biaya agensi. (Jensen dan Meckling, 1976). Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa pemegang saham substansial diharapkan memiliki kekuatan yang lebih besar dan dorongan untuk memonitor manajemen, karena kekayaan mereka terkait dengan kinerja keuangan perusahaan.

Fama dan Jensen (1983) mengemukakan bahwa penyebaran dalam kepemilikan menimbulkan potensi konflik antara principal dan agen. Masalah keagenan dapat dikurangi dengan melibatkan pemegang saham substansial dalam memonitor atau kegiatan pengendalian atas potensi yang menimbulkan masalah (Shleifer dan Vishny, 1986; Huddart, 1993). Dengan demikian manajer terdorong untuk mengungkapkan informasi lebih lanjut pada laporan tahunan guna mengurangi biaya agensi. Penelitian pengendalian internal telah dilakukan oleh Zhang, et al (2007), yang meneliti kebenaran hubungan antara kualitas komite audit, independensi auditor, dan pengungkapan kelemahan pengendalian internal perusahaan setelah penetapan SOX.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa komite audit dengan keahlian keuangan dan atau keahlian akuntansi keuangan, memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk mengalami masalah pengendalian internal. Selanjutnya perusahaan yang memiliki auditor yang independen memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk mengalami masalah pengendalian internal.

Menurut rekomendasi dari *Blue Ribbon Committee* (BRC)'s (1999), untuk memperbaiki

efektivitas dari komite audit suatu perusahaan, maka setiap komite audit sebaiknya memiliki paling tidak satu ahli keuangan yang menyoroti tentang pentingnya pengetahuan dalam hal keuangan dan keahlian anggota komite audit lainnya. *Section 407* dari SOX menjadikan rekomendasi dari BRC tersebut dan mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkannya dalam laporan periodik. Keahlian keuangan dari anggota komite audit itu menunjukkan sesuatu yang penting dalam hubungannya dengan kompleksitas laporan keuangan (Kalbers dan Fogarty, 1993) dan untuk mengurangi penyajian kembali laporan keuangan (Abbott, et al., 2004).

DeZoort dan Salterio (2001) menemukan bahwa anggota komite audit yang memiliki pengetahuan tentang pelaporan keuangan dan auditing akan lebih dapat memahami *judgment* auditor dan bisa memberikan dukungan kepada auditor apabila terjadi perselisihan antara auditor dan manajemen dibandingkan dengan auditor yang tidak memiliki pengetahuan tersebut. Selain itu, anggota yang memiliki pengetahuan yang lebih banyak dalam bidang keuangan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk dapat menunjukkan dan mendeteksi salah saji material. Anggota komite audit dengan keahlian keuangan juga dapat memainkan peran dalam pengawasan proses pelaporan keuangan secara lebih efektif, seperti mendeteksi adanya salah saji material (Scarbrough, et al., 1998; Raghunandan, et al., 2001).

Abbott, et al., (2004) menemukan hubungan negatif yang signifikan antara

komite audit yang memiliki paling tidak satu anggota dengan keahlian keuangan dan munculnya pelaporan kembali laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Krishnan (2005) menunjukkan bahwa komite audit yang memiliki keahlian keuangan memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk dihubungkan dengan munculnya masalah pengendalian internal. Dari penjelasan di atas, maka dirumuskan sebuah hipotesis 1, yaitu:

H₁: Keahlian Komite Audit berpengaruh positif terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal.

Selanjutnya keberadaan direksi asing pada sebuah perusahaan secara dramatis mengubah keseimbangan pengendalian kepemilikan (Ramaswamy, 2001).

Partisipasi dari direksi asing mengirimkan sinyal niatan perusahaan untuk ekspansi secara global. Secara khusus, perusahaan yang sedang mencari untuk membentuk pasar global, akan mencakup teknologi asing, atau mensejajarkan diri mereka dengan kompetitor asing yang mungkin ingin menginternasionalisasikan struktur governance mereka sebagai suatu sinyal bahwa manajemen serius tentang upaya menginternasionalisasikannya. Direksi asing memiliki pengetahuan yang unik dan memahami berbagai strategi area pasar di luar negeri sebuah perusahaan yang diinginkannya. Pengetahuan dan keahlian mereka mungkin menjadi nilai tambah karena sebuah perusahaan menerapkan hal tersebut dalam pergerakan ekspansi. Top manajer mungkin memiliki informasi yang tidak

dimiliki ataupun tidak dipahami oleh para owner (Chen *et al.*, 1993).

Para ahli biasanya lebih mampu merasakan situasi lingkungan dan efektif berurusan dengan mereka (Day dan Lord, 1992).

Sampai-sampai pemilik atau perwakilan mereka (dalam hal ini direktur asing) memiliki pengetahuan dan keahlian mereka akan lebih mampu memonitor tim manajemen puncak dan mengevaluasi arah strategis manajemen puncak (Fama dan Jensen, 1983).

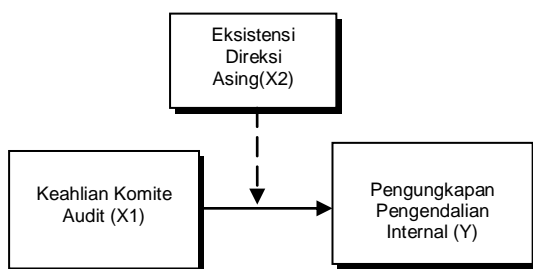
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa para pemegang saham atau wakil mereka dapat menggunakan otoritas mereka, kekuatan dan keahlian untuk meningkatkan kinerja organisasi yang mereka investasikan ke dalam (Kang dan Sorensen, 1999).

Direksi asing dapat memainkan peran monitor yang efektif dengan menggunakan posisi mereka sebagai ahli untuk meredam perubahan penghancuran nilai yang berasal dari kepentingan manajer. Kehadiran direksi asing jelas menawarkan mekanisme yang menghalangi dampak manajerial. Perbedaan utama adalah kemampuan untuk melatih penanganan pengendalian dan menawarkan bimbingan. Dari penjelasan tersebut, maka dirumuskan hipotesis 2:

H₂: Keberadaan Direksi Asing akan memperkuat hubungan Keahlian Komite Audit terhadap Pengungkapan Pengendalian Intern

Mendasarkan pada kerangka pemikiran diatas, maka model secara skematis digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1 : Skema Penelitian



Sumber : Dikembangkan peneliti untuk penelitian ini

METODE PENELITIAN

Populasi penelitian ini adalah semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2011 dan di muat dalam *Indonesia Capital Market Directory* (ICMD) 2009-2011. Hal ini dilakukan karena seluruh industri merupakan perusahaan yang mengungkapkan pengendalian internal. Sampel dipilih menggunakan *purposive sampling*, dengan kriteria: a). Perusahaan non finansial/perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2009-2011. b). Mempublikasikan laporan tahunan lengkap termasuk pengungkapan pengendalian internal dan tersedia untuk publik. c). Perusahaan tersebut mempublikasikan tentang keahlian komite audit dan keberadaan direksi asing. Alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linear berganda.

Operasionalisasi Variabel

Pengungkapan pengendalian internal perusahaan dilihat dari pengungkapan oleh perusahaan tersebut pada laporan tahunannya. Apabila pada tahun yang bersangkutan perusahaan mengungkapkan dengan rinci sesuai aturan COSO (1992), maka perusahaan tersebut diidentifikasi telah

melakukan pengungkapan yang rinci dalam pengendalian internnya. Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan index (*Internal Control Disclosure Index/ICDI*). ICDI ini hampir mirip dengan ICRS (*Internal Control Reporting Score*) yang dikembangkan oleh Deumes(2008).

Pengungkapan pengendalian internal ini dinyatakan sebagai variabel dependen dengan ukuran : integritas dan nilai etika, pemahaman dewan direksi terhadap tanggung jawab dan pengawasan, filosofi manajemen dan gaya operasi, dukungan struktur organisasi perusahaan dalam pengendalian internal yang efektif, kompetensi pelaporan keuangan, kewenangan dan tanggung jawab manajemen/karyawan, kebijakan dan praktik sumber daya manusia didesain, tujuan pelaporan keuangan dan kriteria identifikasi risiko, risiko pelaporan keuangan, risiko kecurangan, integrasi dengan penilaian risiko, pemilihan dan pengembangan aktivitas kegiatan, kebijakan dan prosedur, teknologi informasi, informasi pelaporan keuangan, informasi pengendalian internal Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini, yaitu keahlian komite audit.

Menurut Defond et al. (2005), Krishnan dan Visvanathan (2008), Dhaliwal et al. (2010), bahwa komite audit berkeahlian keuangan adalah komite audit yang memiliki pengalaman sebagai bankir investasi, analis keuangan. pengukuran yang dipakai adalah banyaknya orang yang memiliki peran sebagai komite audit berdasarkan keahlian keuangan. Pengukuran keahlian komite audit menggunakan : keahlian dalam bidang

keuangan diukur dari persentase anggota komite audit yang ahli dalam akuntansi dan atau keuangan. Variabel moderasi merupakan variabel lain di luar variabel bebas yang diduga turut mempengaruhi variabel terikat.

Dalam penelitian ini variabel moderasi yang digunakan adalah keberadaan direksi asing pada perusahaan. pengukurannya dengan menghitung jumlah keberadaan direksi asingnya. Apabila perusahaan menggunakan direksi asing (*foreign directors*), maka akan dihitung jumlah personil direksi asingnya. Metode analisis menggunakan regresi berganda, dengan model persamaan :

$$Y = \alpha + \beta_1 X + \beta_2 X*Z + e$$

Keterangan:

α : constanta,

β : koefisien regresi

Y : Pengungkapan Pengendalian Internal

X : Komite audit

Z : Keberadaan direksi asing

X*Z : Interaksi

e : error atau variabel pengganggu

PEMBAHASAN

Hasil uji normalitas berdasarkan grafik histogram dan *normal probability plot* menunjukkan bahwa data menyebar sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Sedangkan, data pada grafik histogram menunjukkan pola berdistribusi normal. Selanjutnya, uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) menunjukkan bahwa besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,397 dan signifikan pada 0,762. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas data. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai tolerance masing-

masing variabel independen memiliki nilai lebih besar dari 10% (nilai Tolerance >0,1). Sedangkan, nilai VIF masing-masing variabel independen memiliki nilai lebih kecil dari 10 (VIF<10). Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada masing-masing variabel. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda diperoleh persamaan regresi: $Y = 0,605 + 1,542 X + 0,041 XZ + e$

Berdasarkan persamaan di atas dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh positif variabel komite audit (X) dengan interaksi keberadaan direksi asing dan komite audit (X*Z). Hasil analisis regresi untuk uji kelayakan model diperoleh angka probabilitas/signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, sehingga hipotesis 1 dan hipotesis 2 dapat diterima. Artinya variabel independen dan variabel moderasi secara simultan merupakan penjelas yang signifikan pada variabel dependen. Keseluruhan hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang berkaitan antara hubungan keahlian komite audit, keberadaan direksi asing, dan pengungkapan pengendalian internal yang didasarkan pada teori keagenan (*agency theory*). Temuan penelitian ini adalah Keahlian Komite Audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan pengendalian internal. Hasil analisis regresinya menunjukkan bahwa nilai koefisien beta (b_1) adalah 0,656 dengan angka probabilitas/signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, menunjukkan bahwa Keahlian Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan pada pengungkapan pengendalian internal.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Krishnan (2005) yang menunjukan

bahwa komite audit yang memiliki keahlian keuangan memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk dihubungkan dengan munculnya masalah pengendalian internal. Hal ini juga didukung oleh penelitian Abbott, et al., (2004) yang menemukan hubungan negatif yang signifikan antara komite audit yang memiliki paling tidak satu anggota dengan keahlian keuangan dan munculnya penyajian kembali laporan keuangan. Temuan penelitian ini mendorong terciptanya sebuah arah kebijakan tentang persyaratan bagi perusahaan untuk memiliki komite audit yang berkeahlian keuangan, karena terbukti mampu meningkatkan pengungkapan pengendalian internal. Hasil uji hipotesis kedua terbukti signifikan, artinya keberadaan direksi asing akan memperkuat hubungan keahlian komite audit terhadap pengungkapan pengendalian internal.

Hasil analisis regresi dengan nilai koefisien beta (b_2) 0,139 dan probabilitas/signifikansi sebesar $0,046 < 0,05$, menunjukkan bahwa Keahlian Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan pada pengungkapan pengendalian internal. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Ramaswamy (2001) yang menjelaskan bahwa keberadaan direksi asing pada sebuah perusahaan secara dramatis mengubah keseimbangan pengendalian kepemilikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan direksi asing diperlukan karena dengan memiliki jaringan, latar belakang pendidikan, dan pengalaman teknologi akan memberikan pandangan yang lebih luas dan bermanfaat bagi komite audit sehingga

memperkuat pengungkapan pengendalian internal.

SIMPULAN

Penelitian ini mampu membuktikan pengaruh keahlian komite audit terhadap pengungkapan pengendalian internal secara signifikan, dan mampu secara signifikan menguji variable moderasi keberadaan direksi asing. Dengan demikian keahlian komite audit dan keberadaan direksi asing mampu menjawab peningkatan pengungkapan yang dapat mencerminkan adanya pengendalian internal yang baik, sehingga berimplikasi pada pelaporan keuangan yang lebih reliable dan berkualitas dapat mengurangi risiko atas kepercayaan terhadap informasi keuangan yang salah, sebagaimana yang diterima oleh pemangku kepentingan. Keahlian keuangan dari anggota komite audit itu menunjukkan sesuatu yang penting dalam hubungannya dengan kompleksitas laporan keuangan untuk mengurangi penyajian kembali laporan keuangan. Anggota komite audit yang memiliki pengetahuan tentang pelaporan keuangan lebih banyak dalam bidang keuangan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk dapat menunjukkan dan mendeteksi salah saji material. Anggota komite audit dengan keahlian keuangan juga dapat memainkan peran dalam pengawasan proses pelaporan keuangan secara lebih efektif, seperti mendeteksi adanya salah saji material.

KETERBATASAN DAN SARAN PENELITIAN YANG AKAN DATANG

Kelemahan penelitian ini pada pengukuran pengungkapan pengendaaian internal hanya menggunakan ite-item pada COSO 1992, sehingga hasil penelitian kurang mencerminkan keberadaan tentang aturan corporate governance (code) Indonesia. Diharapkan penelitian yang akan datang pengukuran tentang pengungkapan pengendaaian internal menggunakan aturan (code) di Indonesia, agar sesuai dengan regulasi yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, L; S. Parker, and G. Peters. 2004. Audit Committee Characteristics And Restatements. *Auditing: A Journal of Practice and Theory*. 23 (1): 69–87.
- Blue Ribbon Committee (BRC) on Improving the Effectiveness of Corporate Audit Committees. 1999. Stamford, CT.
- Bronson, Scott N; Joseph V. Carcello, and K. Raghunandan. 2006. Firm Characteristics and Voluntary Management Reports on Internal Control. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*. 25(2): 25-39.
- Chen, Ming-Jer; Jiing-Lih Farh and Ian C. MacMillan. 1993. An Exploration of The Expertness of Outside Informants. *Academy of Management Journal*. 36 (6): 1614-1632.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), 1992. Internal Control - Integrated Framework. *American Institute of Certified Public Accountants*.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO), 2004. Enterprise Risk Management – Integrated Framework. *AICPA, Harborside Financial Center, September*.
- Day, D.V. & Lord, R.G. (1992). Expertise and problem categorization: The role of expert processing in organizational sense-making. *Journal of Management Studies*, 29(1): 35-47.
- DeFond, M.; R. Hann, and, X Hu. 2005. Does the Market Value Financial Expertise on Audit Committees of Boards of Directors? *Journal of Accounting Research*. 43 (2): 153–193.
- Deumes, Rogier., and W. R. Knechel. 2008. Economic Incentive for Voluntary Reporting on Internal Risk Management and Control Systems. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*. 27(1): 35-66.
- DeZoort, F, and S. Salterio. 2001. The Effects of Corporate Governance Experience and Financial Reporting and Audit Knowledge on Audit Committee Members' Judgments. *Auditing: A Journal of Practice and Theory*. 20 (2): 31–47.
- Dhaliwal, Dan; Vic Naiker and Farshid Navissi. 2010. The Association Between Accruals Quality and the Characteristics of Accounting Experts and Mix of Expertise on Audit Committee. *Contemporary Accounting Research*. 27 (3): 787-827.
- Fama, Eugene F. and Michael C. Jensen. 1983. Separation of Ownership and Control. *Journal of Law and Economics*, Vol.26(2): 301-325
- Huddart, Steven. 1993. The Effect of a Large Shareholder on Corporate Value. *Management Science*. 39 (11).
- Jensen, Michael C. and William H. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*. 3 (4): 305-360.
- Kalbers, L. and T. Fogarty. 1993. Audit Committee Effectiveness: An Empirical Investigation of the Contribution of Power. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*. 12 (1): 24–49.
- Kang, David L and Aage B. Sorensen. 1999. Ownership Organization and Firm Performance. *Annual Review of Sociology*. 25: 121-144
- Krishnan, Gopal V., and Gnanakumar Visvanathan. 2008. Does the SOX Definition of an Accounting Expert

- Matter? The Association between Audit Committee Directors' Accounting Expertise and Accounting Conservatism. *Contemporary Accounting Research*. **25** (3): 827-841.
- Krishnan, Jayathi, 2005. Audit Committee Financial Expertise and Internal Control: An Empirical Analysis. *The Accounting Review*. **80** (2): 649-675.
- Raghunandan, K; W. Read, and D. Rama. 2001. Audit Committee Composition, "Gray Directors," and Interaction with Internal Auditing. *Accounting Horizons*. **15** (2): 105-118.
- Ramaswamy, Kannan, and Mingfang Li. 2001. Foreign Investors, Foreign Directors and Corporate Diversification : An Empirical Examination of Large Manufacturing Companies in India. *Asia Pasific Journal of Management*. **18**: 207-222
- Sarbanes-Oxley Sections (SOX) 302 & 404. 2003 A White Paper Proposing Practical, Cost Effective Compliance Strategies. Mississauga, Ontario, Canada
- Scarbrough, D.; D.Rama, and K. Raghunandan. 1998. Audit Committee Composition and Interaction with Internal Auditing: Canadian Evidence. *Accounting Horizons*. **12** (1): 51-62.
- Shleifer, Andrei, and Robert W. Vishny. 1986. Large Shareholders and Corporate Control. *The Journal of Political Economy*. **94** (3): 461-488
- Zhang, Yan; Jian Zhou, and Nan Zhou. 2007. Audit Committee Quality, Auditor Independence, and Internal Control Weaknesses. *Journal of Accounting and Public Policy*. **26**: 300-327.

POTRET USAHA KECIL DAN MENENGAH DI KABUPATEN PONOROGO PASCA PEMBINAAN

Oleh :

TITI RAPINI¹⁾

UMI FARIDA²⁾

SETYO ADII³⁾

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

Email: titi.rapini@gmail.com¹⁾

umifarida33@yahoo.com²⁾

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kondisi Usaha Kecil Menengah setelah dilakukannya pembinaan oleh Dinas Indagkop Kabupaten Ponorogo. Dengan mengetahui peningkatannya maka dapat diketahui pula efisiensi dan efektifitas pembinaan yang telah dilakukan. Juga untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh UKM agar dapat dirancang metode /pola pembinaan yang sesuai khususnya pada pengelolaan keuangannya. Ruang lingkup penelitian ini berada Di Kabupaten Ponorogo, dimana UKM yang diteliti adalah UKM yang telah mengikuti Pembinaan oleh Indagkop selama kurun 2009 sampai 2013. Data yang diperlukan yaitu data Primer meliputi data hambatan dan kendala yang dialami UKM, data keuangan. Yang diperoleh dengan wawancara langsung dengan panduan dari kuisioner. Data sekunder meliputi data peserta dan jenis pelatihan - pembinaan yang dilakukan Indagkop Kabupaten Ponorogo. Dari hasil penelitian, diketahui ada 3 jenis pelatihan mulai 2009 sampai dengan 2013. Namun data ini tidak didukung dengan bidang usahanya, maupun nama perusahaannya. Sampel 50 peserta dengan berbagai tahun dan jenis pelatihan. Hasilnya 52% peserta memiliki usaha, 24% belum, dan 24% tidak ditemukan alamatnya. Sedangkan yang memiliki usaha, mereka tidak memiliki data keuangan secara tertulis. Hal ini mengindikasikan bahwa UKM belum memiliki laporan keuangan baku, yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangannya.

Kata Kunci: *Model Pembinaan, Kinerja Keuangan*

PENDAHULUAN

Dalam pembangunan perekonomian di Indonesia UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang memiliki peranan penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, karena berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam perindustrian dan hasil-hasil pembangunan. Sehingga UKM merupakan salah satu pilar utama dalam mengembangkan sistem perekonomian. Namun perkembangannya hingga kini masih tertinggal jika dibandingkan dengan pelaku ekonomi lainnya. Sementara tipe usaha kecil ini terbukti benar-benar kuat serta tahan banting pada krisis ekonomi.

Berdasarkan survei BPS dan Kantor Menteri Negara untuk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Mengkop &UKM) usaha-usaha kecil termasuk usaha-usaha rumah tangga atau mikro (yaitu usaha dengan jumlah total penjualannya(turn over) setahun kurang dari 1 milyar),pada tahun 2000 meliputi 99,9% dari total Usaha yang bergerak di Indonesia. Sedangkan usaha-usaha menengah (yaitu usaha-usaha dengan total penjualan tahunan yang berkisar antara Rp 1 milyar dan Rp 50 milyar) meliputi hanya 0,14% dari jumlah total usaha. Ini berarti potensi UKM sebagai keseluruhan meliputi 99,9 % dari jumlah total usaha yang bergerak di Indonesia. Melihat peranan UKM dalam perekonomian ditinjau

dari segi jumlah usaha, maupun dari segi penciptaan lapangan kerja, maka dibutuhkan lingkungan yang mendukung serta keterlibatan semua pihak dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi. Dengan demikian pengembangan investasi perlu berlangsung berkelanjutan dan berakar dari kemampuan sumber daya nasional dan partisipasi luas masyarakat dan dunia usaha terutama UKM dan koperasi perlu didorong untuk memperluas kesempatan dan pemerataan berusaha bagi seluruh pelaku ekonomi, sehingga terwujud sistem perekonomian kerakyatan. Prospek bisnis UKM dalam era perdagangan bebas dan otonomi daerah sangat bergantung pada upaya yang ditempuh oleh pemerintah dalam mengembangkan bisnis UKM. Di Kabupaten Ponorogo dalam rangka menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah dilakukan melalui pembinaan yang dilakukan dengan beberapa program antara lain : pertama Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif melalui kegiatan sosialisasi Kebijakan tentang UKM. Kedua, program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah melalui Pelatihan Kewirausahaan, Pelatihan AMT, dan Pelatihan Manajemen Pengelolaan UKM. Serta Program monitoring maupun evaluasi, dan sosialisasi lainnya. Dalam rangka evaluasi perlu diketahui apakah pembinaan yang dilakukan tersebut bermanfaat khususnya bagi UKM. Sehingga dapat disusun perencanaan pembinaan yang lebih sesuai, baik modul maupun model pembinaannya. Potensi usaha kecil di Kabupaten Ponorogo menurut data Indakop tahun 2003 tercatat 62 unit usaha .

Sebagaimana umumnya usaha kecil, kelemahan serta hambatan dalam pengelolaan usahanya baik menyangkut internal maupun eksternal(Titi Rapini, 2004, Seminar Pemberdayaan Ekonomi Rakyat) adalah :

- Tidak melakukan analisi kelayakan usaha, pasar, ataupun perputaran kas.
- Tidak memiliki perencanaan jangka panjang, system pembukuan yang memadai, maupun alat-alat kegiatan manajerial lainnya yang umumnya diperlukan oleh suatu bisnis yang profit oriented
- Kekurangan informasi bisnis, hanya mengacu pada intuisi dan ambisi pengelola, serta lemah dalam potensi
- Kurangnya petunjuk pelaksanaan teknis operasional kegiatan dan pengawasan mutu, sehingga sering tidak konsisten dengan ketentuan pesanan
- Tingginya Labou Turnover
- Banyak Biaya diluar pengendalian
- Pembagian kerja tidak profesional sehingga terjadi pekerjaan yang melimpah
- Kesulitan modal kerja dan tidak mengetahui secara tepat berapa kebutuhan modal kerja
- Persediaan terlalu banyak pada produk yang kurang laku/salah
- Mis-manajemen dan ketidakpedulian pengelola terhadap prinsip-prinsip manajerial
- Sumber-sumber modal terbatas pada kemampuan pemilik

Strategi dalam menumbuhkan dan mengembangkan UKM melalui pembinaan dilakukan dengan beberapa program dan kegiatan antara lain pertama, Program Penciptaan Iklim usaha Usaha Kecil Menengah

yang kondusif melalui kegiatan sosialisasi kebijakan tentang UKM, fasilitasi pengembangan UKM. Kedua, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah melalui kegiatan Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan, Pelatihan AMT (Achievement Motivasi Training), Pelatihan manajemen pengelolaan UKM, Sosialisasi HaKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah. Ketiga, Program Pengembangan Sistem pendukung Usaha Bagi Usaha kecil Menengah dengan kegiatan Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan, Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UKM, Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga, Monitoring, evaluasi dan pelaporan sosialisasi dan pelatihan serta pemberian bantuan permodalan dan pemasaran (Ratna Trisuma Dewi,2009).

Dalam pelaksanaan pembinaan tersebut beberapa hambatan yang dialami oleh Indagkop antara lain SDM pengusaha, ketidakmampuan pengusaha mengembalikan pinjaman, keterbatasan jumlah pegawai, keterbatasan informasi . Meskipun disisi lain beberapa Faktor pendukung berupa ketersediaan dana, jalinan kerjasama dengan instansi lain, ketersediaan sarana dan prasarana (Ratna Trisuma Dewi,2009).

Dengan Penelitian ini diharapkan dapat menyusun data base jenis pelatihan dan pembinaan yang telah dilakukan oleh Indagkop,data base kinerja keuangan UKM Pasca Pembinaan yang diukur dari Nilai Likuiditas, Perputaran Modal Kerjanya,Perbandingan Jumlah Hutang terhadap keseluruhan Modalnya, serta dari Profitabilitas ,data hambatan/permasalahan

yang ditemuinya. Data ini kan digunakan sebagai bahan penyusunan model pengelolaan keuangan serta membantu mengaplikasikannya melalui pelatihan dan pendampingan. Sehingga dari hasil penelitian tersebut dapat digunakan sebagai bahan penyusunan model pengelolaan keuangan khususnya bagi UKM, sehingga dapat membuat Laporan Keuangan dengan mudah. Dengan demikian diharapkan perkembangan UKM dapat tumbuh sehingga diharapkan dapat berdampak positif bagi perekonomian masyarakat

KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Usaha Kecil dan Menengah memiliki dua definisi usaha kecil yang dikenal di Indonesia (kumpulan artikel ekonomi-blogsptcom/2009/06) :

1. Definisi usaha kecil menurut Undang-Undang no 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki hasil Penjualan tahunan maksimal Rp.1.000.000.000 (1 milyar) dan memiliki kekayaan bersih,tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, paling banyak Rp. 200.000.000,00
2. Definisi menurut kategori Badan Pusat Statistik (BPS), usaha kecil identik dengan industri kecil dan industri rumah tangga. BPS mengklasifikasikan industri berdasarkan jumlah pekerjanya,yaitu:
 - Industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang
 - Industri kecil dengan pekerja 5-15 orang
 - Industri menengah dengan pekerja 20-99 orang

- Industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih.

UKM merupakan kekuatan strategis dalam mempercepat pembangunan Daerah. Oleh karena UMKM memiliki posisi penting bukan saja dalam penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat di daerah, dalam banyak hal mereka menjadi perekat dan menstabilkan masalah kesenjangan sosial (Abdullah Abidin).

Keberadaan UKM yang demikian sebagai bagian dari keseluruhan entitas Nasional merupakan wujud nyata kehidupan ekonomi yang beragam di Indonesia. Namun masih banyak masalah yang dihadapi oleh UKM tersebut. Sebagaimana hasil Penelitian tentang UKM di daerah Bantul Yogyakarta, diketahui bahwa beberapa masalah yang dihadapi oleh UKM antara lain 1) pemasaran, 2) modal dan pendanaan, 3) inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi, 4) pemakaian bahan baku, 5) peralatan produksi, 6) penyerapan dan pemberdayaan tenaga kerja, 7) rencana pengembangan usaha, 8) kesiapan menghadapi tantangan lingkungan eksternal (Jaka Sriyana, 2010).

Kendala ataupun hambatan yang dialami UKM juga ditegaskan oleh Prihatin Lumbanarja (2011) bahwa dalam pembangunan dan pengembangan UKM banyak strategi dan metode yang telah dilakukan baik langsung maupun tidak langsung. Kendala utama yang dihadapi adalah :

- a) Terbatasnya kemampuan SDM UKM untuk menyerap dan mengaplikasikan kebijakan yang sudah ada.

- b) Kecenderungan iklim politik dan ekonomi yang tidak kondusif juga mempengaruhi upaya pengembangan UKM
- c) Relatif rendahnya tingkat kepedulian pembina dan instansi terkait terhadap upaya pengembangan UKM masing-masing unit kerja
- d) Kondisi perdagangan bebas (arus globalisasi) menuntut UKM tidak hanya sekedar tetap eksis bertahan akan tetapi dituntut mampu meningkatkan pelayanan dan produktivitas usahanya sehingga dapat menghasilkan produk-produk yang berkualitas tinggi
- e) Adanya kesenjangan struktural yang cukup lebar antara UKM dengan usaha besar dalam perekonomian nasional, karena ketidak seimbangan laju pertumbuhan keduanya
- f) Masih ditemukan tumpang tindih pelaksanaan peraturan daerah dan pusat
- g) Masih lemahnya daya saing UKM baik ditingkat lokal, regional, nasional, maupun global
- h) Rendahnya jiwa kewirausahaan pelaku UKM sehingga kemampuan untuk melakukan inovasi dan diversifikasi usaha sangat rendah.

Di kabupaten Ponorogo sendiri hambatan UKM dari hasil penelitian Ratna Trisuma Dewi ditemukan antara lain : SDM pengusaha, ketidakmampuan pengusaha mengembalikan pinjaman, keterbatasan jumlah pegawai, keterbatasan informasi . Meskipun disisi lain beberapa Faktor pendukung berupa ketersediaan dana, jalinan kerjasama dengan instansi lain, ketersediaan sarana dan prasarana (Ratna Trisuma Dewi, 2009).

Berkaitan dengan berbagai kendala yang dihadapi UKM maka diperlukan suatu strategi untuk mengatasinya. Hal ini diperlukan dukungan semua pihak, baik dari asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, dinas/instansi terkait dilingkungan pemerintah kabupaten/kota, dan provinsi. Disamping itu diperlukan kebijakan pemerintah yang mendorong pengembangan UKM (Jaka Sriyana, 2010)

Dalam rangka pengembangan UKM tersebut pemerintah melalui Kementerian Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah menekankan kebijakan pada peningkatan daya saing dengan memberikan perkuatan-perkuatan baik finansial maupun non finansial. Hal ini dilakukan dengan menyusun program operasional berupa kebijakan-kebijakan diantaranya : a) Program penumbuhan iklim usaha yang kondusif, b) Program peningkatan akses kepada sumber daya produktif, c) Program pembinaan kewirausahaan yang berkeunggulan kompetitif, d) Program peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pemberdayaan Koperasi dan UKM secara terpadu (Prihatin Lumbanraja, 2011).

Sedangkan menurut Wisber Wiryanto (2012) bahwa untuk mendorong tumbuhnya UKM maka pemerintah daerah terkait perlu melakukan upaya strategi pemberdayaan UKM melalui pengembangan sumber daya manusia UKM, peningkatan akses UKM terhadap perluasan penyaluran kredit, peningkatan produktivitas dan optimalisasi koordinasi.

Dalam hal ini pemerintah kabupaten Ponorogo. Melalui Indagkop telah melaksanakan pembinaan meliputi : Program

Penciptaan Iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif melalui kegiatan sosialisasi kebijakan tentang UKM, fasilitasi pengembangan UKM. Kedua, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah melalui kegiatan Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan, Pelatihan AMT (Achievement Motivasi Training), Pelatihan manajemen pengelolaan UKM, Sosialisasi HaKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah. Ketiga, Program Pengembangan Sistem pendukung Usaha Bagi Usaha kecil Menengah dengan kegiatan Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan, Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UKM, Peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga, Monitoring, evaluasi dan pelaporan sosialisasi dan pelatihan serta pemberian bantuan permodalan dan pemasaran (Ratna Trisuma Dewi, 2009).

Dari hasil penelitian Ahmad Rifa'i, diketahui dari 30 responden UKM yang dibina oleh PT Jasa Bina Marga melalui program Kemitraan periode 2009/2010 pada 2 bulan setelah pelatihan dan pinjaman tidak ada peningkatan yang diinginkan dari 5 variabel yang diamati (sumberdaya manusia, manajemen produksi, administrasi keuangan, pemasaran, motivasi dan rencana usaha). Namun hasil mulai nampak peningkatan pada periode 2 sampai ke 5 supervisi (bulan ke 3 sampai ke 7) pengamatan.

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini berada Di Kabupaten Ponorogo, dimana UKM yang diteliti adalah UKM yang telah mengikuti Pembinaan oleh Indagkop selama kurun 2011

sampai 2013. Data yang diperlukan adalah data primer maupun sekunder. Data Primer meliputi data-data hambatan dan kendala yang dialami oleh UKM, data keuangan perusahaan/UKM. Untuk memperoleh data dan informasi yang dapat dijadikan bahan dalam penelitian ini, maka peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara langsung dengan panduan dari kuisioner (interview) pada obyek yang diteliti. Sedangkan data sekunder meliputi data jenis pelatihan dan pembinaan yang telah dilakukan oleh Indagkop Kabupaten Ponorogo, serta UKM pesertanya. Data ini diperoleh dari Dinas Indagkop. Serta memanfaatkan dokumen –dokumen yang ada pada obyek yang diteliti yaitu di Indagkop atau UKM yang diteliti.

HASIL PENELITIAN

Dari data diatas tidak terdapat informasi jenis usaha maupun, nama perusahaannya. Kebersertaan mencantumkan nama pesertanya serta alamat tinggal. Daftar peserta pelatihan terdapat pada lampiran 1. Total peserta pelatihan 1020 peserta, terdiri atas 650 merupakan peserta pelatihan Kewirausahaan (63,7%), 195 peserta (19,15%) pelatihan yang berbasis ketrampilan/kerajinan, 150 peserta (14,7%) pelatihan yang diarahkan bagi masyarakat industri tembakau, dan 25 peserta (2,45%) dari koperasi, yaitu Koperasi Wanita. Dari jumlah peserta tersebut diambil 50 peserta dari berbagai tahun pelatihan. Dari hasil pengumpulan data diperoleh informasi bahwa 26 peserta telah memiliki usaha atau 52%. Sedangkan 24% peserta pelatihan (12 orang) sampai saat penelitian dilakukan belum

memiliki usaha. Adapun 24% lainnya alamat yang tertera pada data pelatihan tidak ditemukan, atau telah berpindah alamat (sebanyak 12 peserta). Namun dari 26 peserta yang telah memiliki usaha, belum memiliki catatan pembukuan secara baik. Sehingga belum diperoleh informasi tentang jumlah asset maupun tingkat aktivitas operasional perusahaan . Sehingga belum dapat diukur tingkat kinerja keuangannya. Untuk informasi materi pelatihan atau pedoman pelatihan , yang dapat diperoleh yaitu materi pelatihan yang diterbitkan oleh UPTD Balai Diklat Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi Jawa Timur. Sedangkan materi pelatihan lainnya tidak diperoleh informasi. Adapun beberapa materi yang diberikan meliputi: Pengetahuan Dasar Koperasi Jasa Keuangan, Menghimpun Dana, Menyalurkan Dana, Pengelolaan Dana, Akuntansi Simpan Pinjam dan Analisa Keuangan UKM dan Koperasi, Perpajakan, Sistem Pengendalian Intern, Penilaian Kesehatan UKM dan Koperasi.

PEMBAHASAN

a. Peserta Pelatihan

Pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh Indagkop kabupaten Ponorogo, dimaksudkan untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat pengusaha maupun pengetahuan yang bersifat teoritis dan konseptual. Dengan adanya pembinaan dan pelatihan diharapkan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia di kabupaten Ponorogo. Sebagaimana disampaikan Malayu Hasibuan bahwa Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan

kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan (2003).

Dari hasil penelitian diatas menunjukkan sebagian besar pelatihan adalah tentang Kewirausahaan, yaitu 650 peserta (63,7%). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mengarahkan pembinaan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Pelatihan ini dapat dikategorikan sebagai pengembangan yang bersifat teoritik dan konseptual. Oleh karena itu pelatihan tidak hanya diarahkan kepada masyarakat yang telah memiliki usaha, akan tetapi juga kepada masyarakat yang belum memiliki usaha. Hal ini dapat dilihat bahwa dari sample penelitian diketahui bahwa 24% (12 orang) peserta pelatihan berasal dari masyarakat yang belum memiliki usaha. Diharapkan dengan mengikuti pelatihan nantinya masyarakat terbuka wawasannya, pengetahuannya sehingga yang bersangkutan dapat tumbuh kemauannya untuk memiliki usaha. Sedangkan Pelatihan yang bersifat ketrampilan sebanyak 33,85% atau sebanyak (345 peserta). Pelatihan ini pun juga diarahkan kepada masyarakat yang sudah punya usaha maupun belum. Pelatihan yang bersifat ketrampilan ini bagi masyarakat yang telah memiliki usaha, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan teknis, Sedangkan bagi masyarakat yang belum memiliki usaha, dapat membekali mereka dengan keahlian yang dapat menjadi bekal memulai usaha. Sebagaimana diketahui dari hasil penelitian bahwa 14,7% diantaranya

diarahkan kepada masyarakat dilingkungan industri tembakau, sebanyak 150 orang yang dilakukan dalam 3 tahap. Pembekalan ketrampilan yang diberikan antara lain :

- Seni kerajinan gerabah
- Seni kreasi Clay
- Seni kerajinan cake Towel

Hal ini dimaksudkan untuk membekali masyarakat petani tembakau ketrampilan diluar bidang usaha yang ditekuninya selama ini. Dengan demikian skill ini dapat menjadi modal usaha alternatif untuk menggantikan industri tembakau yang lesu. Pelatihan lainnya yang diberikan kepada masyarakat yaitu Pelatihan Bahan Kerajinan Batik, Bahan Kerajinan Sablon, dan pembuatan Jamu. Dengan adanya pelatihan Batik misalnya, diharapkan masyarakat yang telah memiliki ketrampilan dalam industri Batik, dapat meningkat kemampuannya. Sehingga diharapkan dapat mengembalikan kejayaan industri Batik Ponorogo. Sedangkan bagi masyarakat yang belum memiliki usaha mereka dapat tumbuh kemauannya untuk menekuni bidang usaha yang dilatihkan. Untuk peserta yang berasal dari koperasi, lebih ditekankan kepada Koperasi Wanita. Dimana koperasi ini merupakan pengembangan dari kegiatan PKK di desa-desa. Oleh karena pengurus Kopwan yang sangat heterogen latar belakang profesi maupun tingkat pendidikannya, maka dengan adanya pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperbaiki efektifitas kerja para pengurus. Sehingga pengelolaan koperasi akan berhasil.

Keberadaan Koperasi Wanita yang ada di desa diharapkan dapat ikut membantu menumbuhkan dunia usaha. Karena dengan adanya kopwan diharapkan ibu-ibu rumah tangga dapat berminat untuk memulai usaha dengan adanya lembaga finansial yang lebih dekat dan lebih sederhana didalam proses perolehan dananya. Namun dari data sample yang diperoleh sebanyak 24% peserta pelatihan hingga penelitian ini dilakukan ternyata belum memiliki usaha. Atau dengan kata lain pelatihan ketrampilan maupun kewirausahaan yang diikutinya, hingga saat ini belum dapat direalisasikan. Berbagai kendala yang melatarbelakanginya antara lain: belum memiliki modal belum berminat untuk membuka usaha, dan yang terakhir adalah karena keikutsertaannya sekedar partisipasi program pemerintah. Karena peserta pelatihan biasanya delegasi atau ditunjuk oleh desa ataupun pejabat di wilayah tempat tinggalnya. Bagi peserta yang bersasal dari pengusaha atau pada saat ini telah memiliki usaha sebanyak 26 orang(52%), sayangnya sampai saat ini belum memiliki data informasi keuangan (catatan pembukuan). Sehingga belum dapat dilakukan penilaian hasil kinerja keuangannya. Dengan tidak adanya catatan keuangan, maka kita sulit untuk melakukan evaluasi terhadap perkembangan usaha. Selain hal itu , dengan tidak adanya catatan pembukuan maka usaha inipun belum memiliki laporan keuangan yang memadai. Padahal untuk dapat mengakses lembaga-lembaga keuangan , laporan tersebut sangat

diperlukan. Sedangkan untuk kepentingan internal perusahaan, informasi keuangan diperlukan untuk memahami kondisi keuangan sebelum mengambil keputusan-keputusan penting(Suad Husnan ,2000).

Berbagai kendala yang menjadi alasan belum dimilikinya catatan keuangan, antara lain:

- Pencatatan dianggap pekerjaan yang ribet, dan menyita waktu
- Prinsip bahwa yang penting modal kembali dan dapat diputar lagi sudah dianggap cukup
- Belum ada keinginan untuk meningkatkan /mengembangkan usahanya.
- Tidak memiliki pengetahuan/ketrampilan yang memadai untuk menyusun pembukuan

Dari hasil penelitian juga diperoleh informasi bahwa ada 12 sample yang tidak ditemukan pada alamat yang tertulis didaftar peserta. Ada berbagai hal yang kemungkinan menjadi penyebab, antara lain alamat yang kurang jelas sehingga kami kesulitan menemuinya,. Selain itu ,nama yang bersangkutan sudah tidak berdomisili di alamat yang tertera pada data pelatihan. Karena pelatihan yang kami ambil mulai 2009 hingga 2013.

b. Materi Pelatihan

Mengacu pada teori pengembangan sumber daya manusia (Malayu Hasibuan:2003), ada dua metode yaitu: dengan cara Informal dan Formal. Pengembangan informal,yaitu pengembangan yang dilakukan atas keinginan dan usaha sendiri dengan

melatih dan mengembangkan dirinya, atau dengan membaca buku. Sedangkan cara Formal dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan. Pelatihan yang dilakukan oleh indagkop dapat dikategorikan sebagai pengembangan formal bagi sumber daya para pengusaha dan calon pengusaha di kabupaten Ponorogo. Pelatihan yang diarahkan pada pengelolaan keuangan belum dilakukan secara lebih spesifik. Pelatihan yang terkait pengelolaan keuangan sifatnya sangat luas, dan dibahas secara singkat. Materi ini diberikan sebagai bagian pelatihan kewirausahaan. Sehingga belum mengarah pada bagaimana teknis untuk menyusun sebuah catatan informasi keuangan suatu usaha. Begitu pula dari hasil penelitian terkait informasi bahwa sebagian peserta yang sudah memiliki usaha belum memiliki catatan keuangan, atau pembukuan dikarenakan menyita waktu, serta mereka memang belum memiliki kemampuan di bidang tersebut. Padahal untuk dapat mengakses lembaga-lembaga keuangan, laporan tersebut sangat diperlukan. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan modalnya, para pelaku usaha ini banyak memanfaatkan Lembaga Keuangan Informal (Asis, Titi, 2013). Untuk itu diperlukan suatu panduan sederhana yang dapat digunakan untuk melakukan pencatatan keuangan yang mudah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Ada 3 jenis pelatihan yang dilaksanakan oleh Indagkop yaitu pelatihan Kewirausahaan, Pelatihan yang berbasis ketrampilan, dan pelatihan yang ditujukan untuk Koperasi
2. Peserta pelatihan meliputi UKM/masyarakat yang memiliki usaha, masyarakat yang tidak/belum memiliki usaha, dan Koperasi Wanita
3. Dari peserta yang telah memiliki usaha belum memiliki catatan pembukuan yang memadai/laporan keuangan, sehingga belum dapat diukur kinerja keuangannya
4. Kendala yang dihadapi UKM dalam melakukan pencatatan adalah waktu, dan pengetahuan/ketrampilan dalam melakukan pencatatan

Saran

1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk memetakan UKM yang ada di Kabupaten Ponorogo yang sudah mengikuti pelatihan dan yang belum, yang bukan berbasis data peserta pelatihan
2. Perlu dilakukan pelatihan yang lebih bersifat teknis yang dilakukan diluar waktu produksi (jam kerja)
3. Dilakukan pemetaan jenis pelatihan yang sudah diikuti oleh UKM
4. Perlu disusun jenis Pelatihan yang diperlukan, dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap
5. Perlu peran serta pihak-pihak diluar pemerintah untuk melakukan pembinaan UKM, karena jumlah UKM yang sangat banyak sehingga tidak terjangkau oleh pemerintah seluruhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Abidin, Penelitian "Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sebagai Kekuatan Strategis Dalam Mempercepat Pembangunan Daerah."
- Ahmad Rifa'i, 2013, Penelitian "Peran Pembinaan Manajemen Usaha Terhadap Kemajuan Bisnis UKM (Studi kasus Mitra Binaan PT Jasa Marga Persero)"
- Asis Riat Winanto dan Titi Rapini, 2013, Penelitian " Peran Lembaga Keuangan Informal Terhadap Pemberdayaan Kelompok Sektor Informal"
- Jaka Sriyana, 2010, Penelitian "Strategi Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM): Studi Kasus di Kabupaten Bantul", disampaikan dalam Simposium Nasional Menuju Purworejo Dinamis Dan Kreatif.
- Kumpulan artikel Ekonomi"UKM Dan Pembangunan
Bekelanjutan" kumpulan- Artikel -
ekonomi-blogspot.com/2009/06/ukm-
dan ekonomi-berkelanjutan.html
- Malayu S P Hasibuan, 2003, "Manajemen Sumber Daya Manusia", PT Bumi Aksara, Jakarta
- Prihatin Lumbanraja, 2011, " Bersama UKM Membangun Ekonomi Rakyat Dan Lingkungan Hidup", jurnal Ekonomi, Volume 14, No:2, April 2011
- Ratna Trisuma Dewi, 2009, Skripsi "Strategi Dalam Menumbuhkan Dan Mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah Melalui Pembinaan Oleh dinas Industri, Perdagangan, Koperasi, Dan Penanaman Modal di Kabupaten Ponorogo.
- Suad Husnan, 2000, "Manajemen Keuangan", BPFE Yogyakarta, Yogyakarta.
- Titi Rapini, 2004, seminar Tri Wulan "Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Pembinaan Usaha Kecil, Fakultas Ekonomi Univ Muhammadiyah Ponorogo
- UPTD Balai Diklat Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah, 2006 "Materi Diklat Berbasis Kompetensi Bagi Sumber Daya Manusia ", Pemerintah Propinsi Jawa Timur Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah, Malang
- Wisber Wiryanto, 2012, judul makalah " Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Di Kota Banjarbaru Dalam Rangka Millenium Development Goals 2015", disampaikan dalam Seminar Nasional Demokrasi dan Masyarakat Madani, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka pada Juli 2012.

**Muhammadiyah dan Pemberdayaan Ekonomi Umat:
Kajian Tentang Penyertaan Modal Organisasi Dalam Badan Hukum
Perseroan Terbatas (PT)**

Oleh :
SUGENG WIBOWO

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

ABSTRAK

Persyarikatan Muhammadiyah adalah merupakan organisasi Islam modern yang bergerak dalam bidang dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid yang diwujudkan dalam usaha disegala bidang kehidupan. Sebagai bagian dari organisasi kemasyarakatan keagamaan Muhammadiyah mengembangkan sayap dakwahnya melalui bidang ekonomi kerakyatan dengan mendirikan diantaranya *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT), Swalayan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan lembaga penyiaran publik atau Radio. Dari usaha ekonomi tersebut sebagian berbadan badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Dari aspek hukum terdapat perbedaan regulasi. Keberadaan ormas diatur dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2013, sedangkan kegiatan usaha dalam bentuk PT diatur undang-undang nomor 40 tahun 2007. Dengan demikian maka kepemilikan modal seperti Muhammadiyah pada dasarnya tidak diperbolehkan. Untuk mensiasati perbedaan tersebut dari penelitian ini diketahui penyertaan modal organisasi diatur dengan beberapa mekanisme, yaitu : *pertama*, modal/saham perseorangan yaitu saham yang dimiliki anggota Muhammadiyah dengan hak dan kewajiban yang melekat secara personal. *Kedua*, Modal/Saham Amal Usaha Muhammadiyah adalah pembelian saham yang sumber keuangannya dikeluarkan secara resmi oleh badan/amal usaha atau pegawainya, meskipun secara administrasi perseroan pencatatan sahamnya tetap atas nama pribadi. *Ketiga*, Saham organisasi yaitu kepemilikan saham yang sumber dananya diperoleh dari kas organisasi yaitu Muhammadiyah, 'Aisyiyah dan organisasi otonom (ortom). Kaitan langsung antara penyertaan modal dan kewenangan pengangkatan Direksi serta Dewan Komisaris secara normatif tidak ada kecuali pada awal pendirian. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian telah diatur melalui undang-undang yang sepenuhnya harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Secara organisatoris Muhammadiyah tidak memiliki kewenangan dalam mengatur struktur organisasi, kepentingan organisasi hanya dapat di dukung melalui komitmen pribadi.

Kata Kunci : *Penyertaan Modal Muhammadiyah, Badan Hukum Perseroan Terbatas.*

PENDAHULUAN

Dilihat dari jenisnya kegiatan usaha ekonomi dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk yaitu; Perusahaan Perseorangan, Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer dan Perseroan Terbatas (PT). Perseroan Terbatas (PT) merupakan organisasi bisnis berbadan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. PT didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan

usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang. Perseroan Terbatas (PT) merupakan Badan Usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Kekayaan perusahaan terpisah dari kekayaan pribadi pemilik perusahaan sehingga memiliki harta kekayaan sendiri. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Apabila utang perusahaan melebihi kekayaan

perusahaan, maka kelebihan utang tersebut tidak menjadi tanggung jawab para pemegang saham. Apabila perusahaan mendapat keuntungan maka keuntungan tersebut dibagikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pemilik saham akan memperoleh bagian keuntungan yang disebut **dividen** yang besarnya tergantung pada besar-kecilnya keuntungan yang diperoleh perseroan terbatas. Persyarikatan Muhammadiyah adalah merupakan salah satu organisasi Islam modern dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid yang diwujudkan dalam usaha disegala bidang kehidupan (Pasal 7 AD Muhammadiyah). Muhammadiyah mengembangkan sayap dakwahnya melalui bidang ekonomi kerakyatan dengan mendirikan koperasi, *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT), Swalayan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) dan lembaga penyiaran publik atau Radio dan lain-lain. Dari sekian banyak usaha ekonomi tersebut diatas terdapat empat jenis kegiatan dengan badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT). Dari aspek hukum keberadaan Perseroan Terbatas (PT) di lingkungan ormas Muhammadiyah menarik untuk diteliti. Regulasi yang mengatur keberadaan ormas diatur dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2013. Dalam undang-undang tersebut organisasi kemasyarakatan sangat berbeda dengan kegiatan ekonomi dalam bentuk PT. Organisasi kemasyarakatan lebih banyak mengurus persoalan sosial keagamaan sedangkan perseroan menggeluti kegiatan ekonomi dengan orientasi utama mencari keuntungan. Dalam persepektif undang-undang PT keterlibatan seseorang bersifat personal baik secara fisik maupun

financial. Sedangkan sebagai ormas yang menampung banyak orang secara normatif tidak mungkin bisa mendirikan usaha dengan badan hukum PT. karena merupakan kumpulan banyak orang. Namun demikian kenyataanya Muhammadiyah memiliki badan usaha berbadan hukum perseroan Terbatas, dengan penyertaan modal organisasi.

PERUMUSAN MASALAH

Dari pemaparan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi penyertaan modal organisasi pada Perseroan Terbatas (PT) di Amal Usaha Muhammadiyah ?
2. Bagaimanakah implikasi penyertaan modal organisasi pada pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris di Amal Usaha Muhammadiyah ?

TUJUAN DAN KONTRIBUSI PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran dan memperjelas konsep hukum Perseroan Terbatas (PT) dan implementasinya dalam Amal Usaha yang dimiliki Persyarikatan Muhammadiyah Ponorogo.

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, akan digunakan dua pendekatan penelitian yang berbeda yaitu, penelitian hukum normatif dan penelitian sosio-legal. *Pertama*, Penelitian hukum normatif dilakukan untuk mengidentifikasi konsep dan asas-asas hukum yang digunakan untuk mengatur Perseroan Terbatas (PT) pada umumnya yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas (PT). Cara kerja pendekatan ini menggunakan kerangka logika deduktif. *Kedua*, Penelitian hukum sosio-legal. Oleh karena hukum itu terdiri dari ide-ide dan konsep-konsep yang bersifat abstrak, untuk memperoleh gambaran bagaimana ide-ide tersebut diwujudkan dalam praktek di masyarakat, maka penelitian ini secara proposional menggunakan penelitian sosiolegal. Tujuannya agar dapat memberikan penjelasan bermakna tentang gejala hukum yang diinterpretasi secara faktual. Karena fakta sosial sesungguhnya dapat dijelaskan secara hukum, demikian pula kaidah hukum dapat dijelaskan dengan bantuan fakta-fakta sosial (Johhny Ibrahim, 2005). Dalam kontek penelitian ini, pendekatan sosiolegal terutama untuk mengkaji dan menganalisis sejumlah informasi terkait tata kelola Perseroan Terbatas (PT) yang telah dilakukan oleh badan usaha milik Persyarikatan Muhammadiyah kabupaten Ponorogo.

HASIL PEMBAHASAN

A. Implementasi penyertaan modal organisasi pada Perseroan Terbatas (PT) di Amal Usaha Muhammadiyah

Persyarikatan Muhammadiyah adalah merupakan salah satu organisasi Islam modern yang bergerak dalam bidang dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid yang diwujudkan dalam usaha disegala bidang kehidupan. Sebagai bagian dari organisasi kemasyarakatan keagamaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo mengembangkan sayap dakwahnya melalui bidang ekonomi kerakyatan

dengan mendirikan lembaga penyiaran publik atau Radio tahun 1968, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) tahun 1992, koperasi/ *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) tahun 1997, Swalayan Daya Surya Sejahtera (DSS) tahun 1999 dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) tahun 2007. Dari sekian banyak usaha ekonomi tersebut diatas terdapat empat jenis kegiatan dengan badan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT). Keberadaan Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan diatur melalui Undang-undang nomor 17 tahun 2013 dengan batas wilayah kerja yang telah ditentukan diantaranya berfungsi sebagai bentuk partisipasi sosial dalam bidang kemasyarakatan. Sedangkan perseroan terbatas diatur melalui undang-undang nomor 40 tahun 2007 yang khusus membicarakan segala hal tentang Perseroan Terbatas terutama sebagai bentuk badan hukum untuk kegiatan usaha ekonomi. Oleh karena itu dilihat dari peran dan fungsinya terlihat sangat berbeda sehingga Muhammadiyah tidak dapat memiliki saham dalam perseroan atas nama organisasi. Oleh karena itu masing-masing PT yang pendirian awalnya digagas resmi dan merupakan keputusan organisasi membuat mekanisme dan prosedur sendiri dengan pola sebagai berikut :

1. Saham perseorangan

Sebagaimana pengertian mendasar dari kata Perseroan Terbatas (PT) yang terdiri dari dua kata, yakni "*perseroan*" dan "*terbatas*", maka kepemilikan saham atau *sero*, hanya

sebatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki. Untuk mensiasati perseroan yang dirintis oleh kelompok masyarakat dengan visi utama tidak hanya sekedar mencari keuntungan tetapi misi sosial tertentu, maka perseroan dilingkungan Muhammadiyah mengembangkan model yang berbeda dengan perseroan pada umumnya. Kepemilikan saham tetap bersifat perseorangan yaitu saham dimiliki oleh anggota Muhammadiyah dengan hak dan kewajiban yang melekat secara personal. Setiap tahun pada saat pembagian deviden anggota tersebut berhak mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri, karena memang masing-masing memiliki saham atas namanya sendiri. Agar secara organisasi kepemilikan PT tetap dalam kendali Muhammadiyah, maka setiap anggota dianjurkan untuk membeli saham pribadi dan juga organisasi dengan atas nama pribadi. Sehingga pada saat pembagian deviden setiap anggota yang memiliki saham sebagian diambil sendiri dan sebagian diberikan kepada organisasi meskipun secara administratif tetap atas nama pribadi. Dalam beberapa kasus sebagian Pimpinan Cabang Muhammadiyah yang berfungsi sebagai koordinator dan juga mencari calon pemegang saham

mengembangkan pola penambahan nilai saham dimana kelebihan nilai tersebut *diinfakan* dengan cara membeli saham untuk organisasi. Sebagai gambaran misalnya untuk pendirian Perseroan Terbatas (PT) tahap awal ditawarkan harga saham per-lembarannya senilai Rp. 50.000. Pimpinan Cabang tertentu bersepakat dengan calon pemilik saham dengan menambah nilainya menjadi Rp. 70.000,- Selisih nilai saham sebesar Rp. 20.000,- dikoordinasikan oleh Pimpinan Cabang yang selanjutnya dibelikan saham diatasnamakan pimpinan tertentu atau orang yang ditunjuk dengan beberapa komitmen diantaranya keuntungan yang diperoleh setiap tahun menjadi hak organisasi. Untuk mengamankan saham tersebut sebagai aset organisasi, dibuatlah perjanjian atau surat keterangan yang menjelaskan kepemilikan saham benar-benar miliki organisasi. Untuk saham atas nama organisasi pengelolaanya dilakukan melalui Pimpinan Cabang yang berada pada masing-masing kecamatan dan juga Pimpinan Ranting di desa-desa yang dalam hal tertentu pimpinan tersebut berperan mewakili pemegang saham perseorangan atau menjadi saham pengendali. Gambaran umum pengorganisasian saham yang dikembangkan Muhammadiyah tersebut dalam perkembangannya mengalami dinamika yang berbeda-beda antara satu perseroan dengan perseroan lainnya. Perseroan yang

berkembang baik seringkali memerlukan penambahan modal yang berimplikasi pada kepercayaan masyarakat. Untuk perseroan yang membutuhkan penambahan modal, baik modal dasar, modal ditempatkan maupun modal disetor diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam prakteknya yang sering membutuhkan penambahan modal terutama perseroan perbankan adalah modal disetor. Modal disetor (*paid up capital*) adalah sejumlah modal yang benar-benar ada dalam kas Perseroan Terbatas. Penambahan modal berimplikasi pada keharusan menerbitkan saham baru. Untuk menambah kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, seluruh saham yang dikeluarkan dalam penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham dan harus seimbang dengan kepemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama (*proportionally*). Apabila pemegang saham tidak menggunakan hak untuk membeli saham tersebut setelah lewat waktu 14 (empatbelas) hari terhitung sejak penawaran, maka perseroan berhak menawarkan kepada karyawan sebelum menawarkan kepada orang lain dengan memberi jumlah tertentu atas saham tersebut. Oleh karena itu jajaran pimpinan perseroan biasanya menawarkan dan mensiasatinya dengan menambahkan saham yang sudah ada secara otomatis. Setiap pemilik modal akan mendapatkan

penambahan saham secara otomatis dengan tetap mendapat deviden pada tahun berjalan. Sedang pada tahun berikutnya deviden yang diterima pemilik saham mengalami penambahan karena adanya penambahan kepemilikan saham tersebut. Perkembangan lain terkait dengan kepemilikan saham perseorangan adalah adanya transaksi penjualan saham antar pemilik saham. Cara peralihan hak atas saham sebenarnya telah diatur dalam undang-undang dengan melihat jenis sahamnya Untuk saham atas nama (*op naam*) dilakukan dengan akta pemindahan hak, baik akta notaris maupun akta dibawah tangan. Setiap pemindahan hak atas saham dicatat dalam daftar Pemegang Saham. Untuk saham atas tunjuk (*aan toonder*) dilakukan dengan penyerahan surat saham secara fisik dari tangan ke tangan. Implikasi pengalihan atau jual beli saham tersebut berpengaruh terhadap komposisi kepemilikan saham secara keseluruhan. Apabila ada pemilik saham yang menjual kepada pemilik lain maka akumulasi akhir kepemilikan akan mengerucut pada orang tertentu yang memiliki kemampuan membeli saham dimaksud. Oleh karena itu dilihat dari kepentingan organisasi kecenderungan tersebut sebenarnya kurang menguntungkan Muhammadiyah karena akan mengurangi kepemilikan dan juga pengaruh yang ada dalam perusahaan tersebut.

2. Saham Amal Usaha Muhammadiyah

Muhammadiyah memiliki amal usaha dalam berbagai bidang mulai dari pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Penyertaan dan keterlibatan amal usaha tersebut dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) lebih banyak berorientasi pada bentuk kepedulian, kerjasama dan saling menolong sebagaimana dianjurkan oleh agama. Oleh karena itu setiap ada inisiatif Muhammadiyah untuk mendirikan unit usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) maka amal usaha yang memiliki kemampuan akan selalu berperan dalam penyertaan modal. Sementara bagi yang tidak mampu dengan sendirinya tidak berpartisipasi, namun tidak menutup kemungkinan secara pribadi masing-masing pimpinan memiliki saham pribadi. Pengertian saham amal usaha disini adalah pembelian saham yang sumber keuangannya dikeluarkan secara resmi oleh lembaga atau amal usaha tertentu atau oleh pegawai pada amal usaha tersebut meskipun secara administrasi perseroan sahamnya tetap atas nama pribadi. Untuk menjaga keberlangsungan saham, masing-masing amal usaha memiliki mekanisme sendiri yang menjelaskan tentang kepemilikan tersebut. Diantaranya ada yang secara formal berupa keterangan dengan mendapat legalitas dari notaris atau surat keterangan biasa dari institusi bersangkutan. Sehingga apabila pemegang saham meninggal dunia ahli

waris tidak berhak untuk mengambil alih saham dan deviden. Masing-masing Perseroan Terbatas (PT) dibawah naungan Muhammadiyah Ponorogo memiliki kebijakan sendiri tentang manajemen administrasi pencatatan saham amal usaha, diantaranya : *Pertama*, perseroan menyebut nama perseorangan (biasanya pimpinan) yang mewakili amal usaha dengan segala hak dan kewajiban yang melekat didalamnya. Sehingga dalam penggunaan hak terutama pada forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham luarbiasa (RUPSLub) cukup diwakilkan kepada pimpinan amal usaha tersebut. Dalam menghadapi dinamika perseroan yang memerlukan soliditas memperjuangkan kepentingan organisasi, perseroan dengan model seperti ini cukup rentan terhadap kepentingan tertentu. Amal usaha yang diwakilinya tidak selalu memiliki persepsi dan sikap yang sama dengan kebijakan Pimpinan Daerah. *Kedua*, keterwakilan amal usaha diatasnamakan Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Penggunaan hak terutama pada forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham luarbiasa (RUPSLub) dilekatkan kepada Pimpinan Daerah. Untuk menentukan orang yang akan mewakili diputuskan melalui sidang Pleno yang biasanya diambil dari penanggungjawab Majelis terkait atau langsung Ketua Umumnya. Dengan komposisi modal seperti diatas,

Pimpinan Daerah Muhammadiyah dapat mewarnai jalannya perseroan sesuai dengan visi organisasi. Kebijakan perseroan yang diambil berbasis kepemilikan saham akan selalu menguntungkan organisasi karena memiliki saham mayoritas.

3. Saham organisasi

Selain saham di amal usaha terdapat juga saham organisasi yaitu kepemilikan saham yang sumber dananya diperoleh dari kas organisasi yaitu Muhammadiyah, 'Aisyiyah dan organisasi otonom (ortom). Disamping itu ada juga saham yang diatasnamakan Pimpinan Daerah Muhammadiyah namun didalamnya terdapat kumpulan saham dari berbagai amal usaha. Untuk dapat menentukan arah dan kebijakan perseroan, penyertaan saham organisasi idealnya mencapai 50 + 1% atau mayoritas. Dengan komposisi mayoritas akan mendapat keuntungan lebih banyak dan juga dapat mengontrol jalannya perseroan. Kepemilikan saham organisasi di PT Daya Surya Sejahtera DSS) atas nama organisasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah sebanyak 26,1 %, Pimpinan Daerah 'Aisyiyah 5.0 %. sedangkan sisanya dimiliki Pimpinan Cabang. Jumlah tersebut merupakan saham mayoritas karena yang lain jauh dari jumlah diatas. Mengacu pada laporan Rapat Umum Pemegang Saham Mayoritas dan Pemegang Saham Pengendali PT. BPR Raga Surya Nuansa Ponorogo tahun 2012, perseroan yang

bergerak dalam bidang perbankan konvensional ini memiliki komposisi kepemilikan saham untuk Pimpinan Daerah Muhammadiyah 4,31 % dan Pimpinan Daerah 'Aisyiyah 5,83 %. Kalau hanya mengacu pada prosentase diatas, pendapatan organisasi yang diterima melalui deviden setiap tahunnya termasuk dalam katagori tidak signifikan terutama apabila dibandingkan dengan peran organisasi dalam proses pendirian serta segmentasi pasar yang mengambil warga dan amal usaha Muhammadiyah sebagai pengguna jasa terfavorit. Oleh karena itu ada kebijakan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah serta infaq pemotongan seluruh saham atas persetujuan pemegang saham yang diberikan kepada organisasi. Pada amal usaha bidang perbankan syari'at gagasan tentang pentingnya penguasaan saham mayoritas bagi Muhammadiyah menjadi spirit utama dalam proses pendirian perseroan tersebut sehingga nampak dengan jelas komposisi saham yang sudah ada. Hanya saja karena persoalan ijin yang belum keluar sejak tahun 2007 hingga sekarang ini, bank tersebut belum beroperasi padahal telah menghimpun dana dari warga Muhammadiyah. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo memiliki 44, 29 % (saham mayoritas), Pimpinan Daerah 'Aisyiyah 2,05 % selebihnya dimiliki oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah.

B. Implikasi pada pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris

Kaitan langsung antara penyertaan modal dan kewenangan pengangkatan Direksi serta Dewan Komisaris unit usaha dengan badan hukum Perseroan Terbatas (PT) secara normatif tidak ada kecuali pada awal pendirian. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian telah diatur melalui undang-undang yang sepenuhnya harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh mengurus kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan, serta mewakili perseroan, baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi Perseroan Terbatas bisa terdiri dari satu orang atau lebih tergantung dari kebutuhan operasional Perseroan. Kecuali untuk Perseroan yang usahanya menghimpun dan mengelola dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan hutang, dan Perseroan terbuka (Tbk.), wajib memiliki minimal 2 orang anggota Direksi. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pada saat pendirian, pengangkatan itu untuk pertama kalinya dilakukan oleh Pendiri Perseroan (PT) dan dicantumkan dalam akta pendiriannya. Pengangkatan itu dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelahnya dapat diangkat kembali. Anggaran dasar dapat mengatur tentang tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi, termasuk tata cara pencalonannya. Keputusan RUPS

mengenai pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian tersebut. Jika RUPS tidak menetapkannya, maka mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo secara *de facto* adalah penggagas dan pendiri beberapa perseroan yang ada. Peran yang dapat dilakukan adalah berusaha menempatkan Direksi dan Dewan Komisaris dari kalangan internal Muhammadiyah. Komitmen ini telah menjadi kesepakatan bersama sehingga siklus pergantian pimpinan perusahaan berjalan alamiah. Dalam hal perusahaan memiliki masalah yang serius terhadap pimpinan yang ada, maka sebagai pemegang saham Muhammadiyah berusaha untuk memfasilitasi pergantian pimpinan melalui mekanisme yang sah diatur undang-undang dan anggaran dasar. Perseroan diluar sektor perbankan relatif memiliki sumberdaya insani yang cukup banyak karena kriteria Direksi dan Dewan Komisaris tidak diatur secara *rigid* melalui peraturan lainnya. Sedangkan perseroan sektor perbankan memiliki regulasi sendiri baik berupa Undang-undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Bank Indonesia sendiri. Peraturan tersebut tidak hanya menyangkut jajaran Direksi atau Komisaris melainkan juga pemegang saham pengendali yang diharuskan mengikuti *fit and proper test*. Oleh karena itu Direksi dan Dewan Komisaris

dicalonkan dengan pertimbangan pragmatis yaitu terpenuhinya persyaratan formal yang berlaku di lingkungan Bank Indonesia. Muhammadiyah telah berhasil mengembangkan perusahaan yang dipegang oleh warganya sendiri dengan kompetensi yang memadai. Pertimbangan karakter meliputi sejumlah informasi tentang perilaku, integritas dan komitmen calon Direksi dan Dewan komisaris. *Track record* kepribadian seseorang sangat diperhatikan dalam pemilihan pimpinan. Kultur Muhammadiyah tidak memberikan toleransi terhadap calon pimpinan yang dikenal atau pernah bermasalah dengan keuangan serta perselingkuhan. Norma inilah yang masih dipertahankan dan menjadi penentu keberhasilan pengembangan amal usaha dalam berbagai bidang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penggalan data dan pembahasan yang telah dipaparkan bab terdahulu dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Keberadaan Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan diatur melalui Undang-undang nomor 17 tahun 2013, sedangkan perseroan terbatas diatur melalui undang-undang nomor 40 tahun 2007. Oleh karena itu dilihat dari peran dan fungsinya terlihat sangat berbeda sehingga Muhammadiyah tidak dapat memiliki saham dalam perseroan atas nama organisasi. Untuk mensiasati peraturan perundang-undangan khususnya tentang PT, perseroan dilingkungan Muhammadiyah Ponorogo memiliki tiga mekanisme yang berbeda-beda dalam menata penyertaan modal anggota dan organisasi, yaitu modal atas nama perseorangan, amal usaha dan organisasi.
2. Kaitan langsung antara penyertaan modal dan kewenangan pengangkatan Direksi serta Dewan Komisaris unit usaha dengan badan hukum Perseroan Terbatas secara normatif tidak ada kecuali pada awal pendirian. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian telah diatur melalui undang-undang yang sepenuhnya harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 2000, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung : Citra Aditya
- Laporan Pertanggungjawaban Direksi Atas Kegiatan Operasional PT. BPR Raga Surya Nuansa Ponorogo Tahun Buku 2011.
- Laporan Pertanggungjawaban Tim Pendiri BPR Syari'ah Muhammadiyah Ponorogo tahun 2011.
- Laporan Pertanggungjawaban Direksi PT. Daya Surya Sejahtera Ponorogo tahun 2011.
- M. Yahya Harahap, 2001, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta : Sinar Grafika
- Normin, S. Pakpahan, 1997, Hukum Perusahaan Indonesia, Jakarta: Elips.
- Ery Arifudin, 1999. Pengantar Hukum Dagang Indonesia, Yogyakarta : UII Pers.
- Sugeng Wibowo, 2007, Penguatan Peran Civil Society Dalam Politik Lokal (Telaah Perilaku Politik Warga Muhammadiyah Dalam Pilkada Kabupaten Ponorogo).
- Undang-undang Dasar 1945 hasil amandemen
- Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah

KNOWLEDGE MANAGEMENT PADA KINERJA DENGAN STRATEGI OBSERVASI BISNIS SEBAGAI VARIABEL MODERASI: PERSPEKTIF MAHASISWA INDONESIA

Oleh:

ASEP ROKHYADI¹⁾

TUTUT DEWI ASTUTI²⁾

UNIVERSITAS MERCU BUAYA YOGYAKARTA INDONESIA

Email: asep.rokhyadi@gmail.com¹⁾

tutut.astuti@gmail.com²⁾

ABSTRAK

Penelitian adalah bagian akhir dari proses belajar mengajar di perguruan tinggi di Indonesia. Namun pada kenyataannya banyak para mahasiswa yang melakukan studi penelitian ini mengalami kendala, sehingga berujung pada lamanya melakukan penelitian. Proses *knowledge management* penelitian selama ini dirasa kurang mengakomodir kegiatan penelitian itu sendiri, karena para mahasiswa diberi keleluasaan dalam mengeksplorasi permasalahan namun kurang memahami permasalahan penelitian disekitar mereka dan area spesifikasi penelitian mereka. Untuk itu diperlukan penguatan dalam mempercepat penelitian para mahasiswa dengan melakukan observasi bisnis (kunjungan ke lapangan). Penelitian ini adalah penelitian aksi (*action Research*), yang bertujuan untuk (1) mengetahui bagaimana pengaruh antara *knowledge Management* pada kinerja skripsi, (2) mengetahui bagaimana observasi bisnis memoderasi *knowledge Management* pada kinerja skripsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian aksi pada 234 sampel dari 564 mahasiswa dilingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta (response rate 41.5%). Teknik pengambilan sample purposive random sampling dimana mahasiswa yang mau mengambil matakuliah skripsi. Analisa data yang digunakan adalah *Multiple Regression Analysis (MRA)* dan *Multiple Moderated Regression (MMR)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh antara *knowledge Management* pada kinerja skripsi, dan strategi observasi bisnis memperkuat *knowledge Management* pada kinerja skripsi.

Kata Kunci: *Strategi Observasi Bisnis, Knowledge Management, Kinerja skripsi, skripsi.*

PENDAHULUAN

Menguatkan pertumbuhan ekonomi, perlu aplikasi riil, salah satunya adalah dengan menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul serta tercukupinya SDM itu sendiri dalam berbagai disiplin ilmu. Pemenuhan kebutuhan SDM yang unggul ini tidak terlepas dari dunia pendidikan, termasuk Perguruan Tinggi (PT). Dalam beberapa hal, interen PT belum banyak memberikan terobosan-terobosan yang memunculkan efektifitas sistem pendidikan, dengan tidak mengesampingkan kualitas pendidikan.

Terbukti permasalahan muncul ketika apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan (Marlow, 1972).

Di dunia PT khususnya Universitas Mercu Buana Yogyakarta Fakultas Ekonomi juga didapatkan permasalahan itu, salah satunya adalah masih terlalu lamanya (lebih dari 6 bulan) para mahasiswa melakukan kegiatan proses penelitian/skripsi hingga selesai. Lengkapnya seperti pada tabel berikut:

Tabel 1

Waktu Rerata Penyelesaian Skripsi
Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas
Mercu Buana Yogyakarta

Tahun	Jumlah Mahasiswa Skripsi	Rerata Waktu Penyelesaian (bulan)
2007	67	10,2
2008	83	8,6
2009	72	8,8
2010	77	9,2
2011	69	8,4
2012	71	9,6

Sumber: Data primer, diolah 2014

Melihat fenomena permasalahan seperti pada tabel 1 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa rata-rata waktu mahasiswa menyelesaikan skripsi masih lama, dimana setiap tahun dipastikan dominan para mahasiswa menyelesaikannya lebih dari satu semester atau lebih dari 6 bulan. Padahal biaya atas pembimbingan akan berhenti tatkala mahasiswa telah selesai menyelesaikan skripsi, atau dengan kata lain mahasiswa wajib membayar biaya skripsi selama belum selesai. Gap fenomena sebagai permasalahan yang muncul adalah persepsi mahasiswa tentang skripsi adalah momok yang menakutkan dalam proses akhir memperoleh gelar strata satu (S1). Melihat kesenjangan fenomena (Gap Fenomena) tersebut, sangat layak penelitian ini ditelusuri. Terlepas dari paradigma klasik bahwa “sulit bertemu dosen”, “sulit mendapatkan ide”, “sulit dalam pemahaman penelitian”, tentu pengambilan keputusan kebijakan PT seperti kurikulum dan implementasinya juga turut sebagai penyumbang sulit tidaknya proses penyelesaian skripsi para mahasiswa. Terobosan harus selalu dilakukan sebagai bentuk inovasi dan berujung pada keunggulan bersaing agar tercipta PT menjadi *leader* (Lanoizelée, 2011) dengan tetap berlandaskan undang-undang tentang pendidikan tinggi PT wajib melakukan inovasi agar memiliki kinerja yang baik (Morales *et al*, 2008).

Terobosan ini diperlukan tidak hanya ketika PT memiliki permasalahan yang berhubungan dengan akademik dan non akademik, namun juga sebagai bentuk dinamika perubahan diluar PT tersebut, terobosan tersebut adalah observasi bisnis. Terobosan ini dalam jangka menengah dan panjang akan menciptakan knowledge management observasi bisnis yang makin baik. Sementara itu kesenjangan penelitian (*Research gap*) dalam *Knowledge Management* (KM) juga masih belum konsisten. Hal ini seperti pada telaah eksplorasi hasil penelitian pada table 2 berikut:

Tabel 2

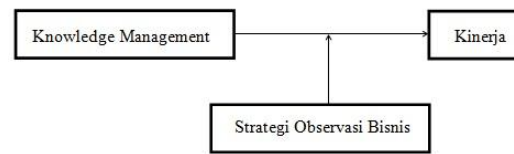
Inkonsistensi Hasil Penelitian *Knowledge Management* pada Kinerja

Hasil penelitian	Peneliti
Berpengaruh Kuat	Johansson (2012); Stainbank, (2005); Tóth, et al, (2013); Bermingham and Abdulhussain, (2007); Kai and Chu, (2008); Navarro, et al., (2005); Toffen (2005).
Berpengaruh Lemah	Wang,G., et al, (2010);
Tidak Berpengaruh	Rowley, (2003); Henry, (2001); Caddy, (2001); Ikhsan, and Fytton, (2004);

Dapatlah kita ketahui bahwa pada tabel 2 masih terdapat peluang penelitian di bidang Knowledge Management ini. Mengingat bidang disiplin ilmu Knowledge Management (KM) ini masih terjadi simpang siur dalam penelitian. Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan penguatan terhadap teori Knowledge Management. Untuk mengatasi *Gap Fenomenon* dan *gap research* tersebut adalah peneliti mengusulkan variabel strategi observasi bisnis sebagai variabel moderasi untuk memperkuat pengaruh antara *Knowledge Management* pada kinerja skripsi.

Penerapan strategi Observasi Bisnis (OB) ini dilakukan sebagai terapan yang

diharapkan mampu mengatasi permasalahan lamanya mahasiswa dalam menyelesaikan proses penelitian atau skripsi. Mengingat model dalam strategi ini melibatkan sumber-sumber penghasil data, baik primer maupun sekunder untuk percepatan pengambilan data dari masyarakat, perusahaan, dan pemerintah, juga akan memberikan dampak sosial dan budaya bagi interaksi PT, mahasiswa dan *stakeholder*. Diharapkan pula dalam jangka menengah dan panjang akan menciptakan model pembelajaran yang efektif bagi mahasiswa, serta menciptakan suasana akademik penelitian yang kondusif dengan meniadakan plagiat dan meminimalkan replikasi penelitian.



Gambar 1. Model Penelitian

Berdasar pada pendahuluan, permasalahan penelitian ini adalah (1) Bagaimana pengaruh knowledge management pada kinerja skripsi, (2) Bagaimana Strategi Observasi Bisnis memperkuat *knowledge Management* pada kinerja skripsi. Adapun *State of the art* dan *novelties* penelitian ini seperti pada tabel 3.

Tabel 3
State of the art dan novelty

No	Peneliti	Sample	Independent variabel	Dependent Variabel	Analisis	Moderasi / Mediasi	Simpulan
1.	Stainbank, (2005	12 mahasiswa	<i>Knowledge Management</i>	Kinerja	Kualitatif	Tidak ada	Signifikan
2.	Navarro,M.M., et al., (2005	245 karyawan	<i>Knowledge Management</i>	Kinerja	Regresi Berganda	Inovasi	Signifikan
3.	Bermingham,C., and E.M.,Abdulhussain (2007	1355 buruh pabrik	<i>Knowledge Management</i>	Kinerja	Regresi Berganda	Tidak ada	Signifikan
4.	Kai,S., and Wah.C., (2008	176 karyawan manufaktur	<i>Knowledge Management</i>	Kinerja	Regresi Berganda	Visi organisasi	Signifikan
5.	Wang,G., et al, (2010	96 CEO pendidikan	<i>Knowledge Management</i>	Kinerja	Regresi Berganda	perpustakaan	Signifikan lemah
6.	Johansson (2012)	15 kelompok siswa	<i>Knowledge Management</i>	Kinerja	Kualitatif dan SEM	Model pengajaran	Signifikan
7.	Tóth,Z.E., et al, (2013)	126 mahasiswa	<i>Knowledge Management</i>	Kinerja	Regresi Berganda	Proses Belajar	Signifikan
8.	Asep R., and Astuti.T.D., (2015)	234 mahasiswa	<i>Knowledge Management</i>	Kinerja	SEM dan Regresi	Observasi Binsis	Signifikan

LITERATUR REVIEW

Latar Belakang Skripsi

Skripsi adalah matakuliah akhir yang wajib dilaksanakan pada setiap mahasiswa sebelum mahasiswa diwisuda. Ketentuan ini tertuang dalam undang-undang pendidikan tinggi di Indonesia yaitu nomer 20 tahun 2003. Dalam undang-undang tersebut juga diisyaratkan bahwa pasal 25 ayat 1 bahwa

karya ilmiah mahasiswa yang dihasilkan dari plagiasi akan dicabut gelar kesarjanaannya. Di tahun 2013, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi mengeluarkan Surat Keputusan nomor III/PPS/2013-01/030-SK tentang Peraturan Publikasi Publikasi Karya Ilmiah. Berdasarkan pada ke dua peraturan tersebut, semua pendidikan tinggi di Indonesia mewajibkan bagi para mahasiswanya melakukan skripsi

atau karya ilmiah sebagai studi di masa akhir pendidikan mereka. Karya ilmiah ini di lingkungan Fakultas ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta Indonesia juga tidak berarti tanpa masalah, mulai dari system, organisasi, sampai eksekusi karya ilmiah bagi mahasiswa menjadi kendala. Strategi observasi bisnis dilakukan sebagai upaya untuk memperkuat khazanah keilmuan bagi terapan terlaksananya karya ilmiah (skripsi) bagi mahasiswa.

Penelitian terdahulu

Davenport Et al. (1998), pengetahuan adalah sumber daya yang sangat berharga, yang siap untuk diterapkan dalam tindakan dan keputusan. Hasil ini merupakan kombinasi dari informasi, pengalaman, konteks, interpretasi dan refleksi. Informasi dianggap sebagai elemen mendasar dalam pengetahuan organisasi (Choo, 1998) karena merupakan dasar untuk produksi pengetahuan manusia dan organisasi. Focus KM adalah memenej ilmu pengetahuan dalam organisasi dan membantu dalam pengambilan keputusan (Randan and Vishal, 2011).

Berkembangnya ilmu pengetahuan akan makin maju jika diikuti oleh lingkungan yang menyenangkan. Lingkungan ini harus didukung oleh kesamaan bahasa dan pengetahuan yang dikembangkan secara intensif dan rasa yang kuat diantara anggota serta iklim sosial yang didominasi oleh keterbukaan dan kepercayaan. Lingkungan yang menyenangkan ini bagi mahasiswa yang melakukan studi akhir (skripsi) tentu makin menguatkan dalam percepatan proses menyelesaikan studinya. Adaptasi lingkungan sebagai salah satu indicator observasi bisnis

juga memegang peran penting dalam penyelesaian penelitian (Davidsson and Delmar, 1998).

Kemampuan mengadaptasi kajian kebaruan teori juga penting dalam meningkatkan analisis penelitian (Zuljan and Vogrinc, 2010).

MATERIAL DAN METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah *Action research*. Populasi dalam penelitian ini adalah para mahasiswa dilingkungan Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Khususnya Fakultas Ekonomi. Menurut besaran ukuran rancangan populasi adalah sebanyak 564 mahasiswa aktif seperti yang termaktub dalam "Direktori Jumlah mahasiswa aktif di Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Khususnya Program studi Manajemen dan akuntansi (Fakultas Ekonomi)". sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 234 responden mahasiswa (responnd rate 41.5%) dengan menggunakan metode Slovin (Sevilla, 2007).

Variabel Penelitian dan Pengukuran

Pengukuran dapat membantu memecahkan permasalahan dan sebagai salah satu jalan untuk membantu komunikasi dalam penelitian (Gooderham, 1997). Variabel Independent, Variabel *Knowledge Management* (KM) ini diadopsi dari Singh dan Vanda, (2011). Variable ini menggunakan dua (2) indikator yaitu: Learning Oranisation (LO), dan Organisation Culture (OC). Variabel dependent, Variabel ini adalah Kinerja Skripsi (K). indikator ini dilakukan dengan melihat dalam jangka enam (6) bulan, apakah terjadi perubahan yang signifikan terhadap efektifitas Observasi Bisnis (OB) dalam

mempercepat penyelesaian skripsi. Variabel Moderasi, variabel ini adalah Observasi Bisnis.

Pengukuran Outcome

Menggunakan skala semantik dengan 7 point, dimana 1 adalah sangat rendah dan 7 adalah sangat tinggi. validitas konstak dengan menggunakan metode Anti Image Correlation dinyatakan valid jika variabel setiap item berada pada $> 0,5$ (Allen dan Kellie, 204, 2010). Uji reliabilitas dapat diukur dengan koefisien Cronbach's alpha. Instrumen penelitian disebut handal bila pengujian

tersebut menunjukkan alpha lebih dari 0,7 (Sekaran, 352, 2010).

Alat analisis

Alat analisis yang digunakan untuk mengatasi permasalahan pertama yaitu multiple regression analysis, dan guna mengatasi permasalahan ke dua yaitu moderated regression analysis. Hasil analisis menunjukkan hipotesa diterima jika P value lebih rendah dari 0.05 ($p < 0.05$). Proses menggunakan software SPSS versi 20.

HASIL PENELITIAN

Tabel 4
Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Variabel Penelitian	Item Penelitian	Validity Using Factor Analysis		Reliability	
		Construct Validity (Anti Image Correlation)	Face Validity (KMO & Bartlett's Test)	(Corrected Item-Total Correlation)	Internal Consistency (cronbach Alfa)
Knowledge Management (KM)	Leaming Organisation	0,750		0,755	
	Culture organisation	0,774	0,844	0,842	0,842
Kinerja (K)	Observasi.	0,702		0,769	
	Analisis.	0,706	0,829	0,780	0,891
	Hasil akhir.	0,802		0,749	
Strategi Observasi Bisnis (OB)	Kemampuan adaptasi lingkungan.	0,753		0,853	
	Kemampuan Eksplorasi data.	0,765	0,865	0,718	0,853
	Kemampuan Pendekatan subjektif.	0,753		0,779	

Terlihat seperti pada tabel 4 menunjukkan bahwa uji validitas dan reliabilitas semua variabel valid dan reliabel.

Tabel 5
Uji Penentuan Variabel Moderasi

Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	3.406	.709		4.804	.000
	Knowledge Management	.226	.203	.334	0.603	.302
	Kinerja	.063	.351	.097	1.864	.581

a. Dependent Variable: OB

Berdasarkan pada Tabel 5 menunjukkan bahwa dengan observation bisnis (OB) sebagai *dependent variabel* ternyata hasilnya tidak signifikan pada kedua variabel yaitu Knowledge Management (KM) $\beta=0,226$; $t=0,603$; $p>10,00$ dan Kinerja (K) $\beta=0,063$; $t=1,864$; $p>10,00$. Ini mengindikasikan bahwa OB adalah variabel moderasi murni atau *pure moderated*.

Tabel 6
Ringkasan Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Model Langsung		ModelPemoderasian Strategi OB	
	β	t	β	t
Knowledge Management (KM) CenteringKMxOB	0,217	2,242**	0,361	3,417**
F test	27,173***		33,276***	
R ²	0,259		0,478	
Adj R ²	0,253		0,361	

Variable Dependent = Kinerja (K)

*** $p<0,01$

** $p<0,05$

Berdasarkan pada tabel 6 diketahui bahwa koefisien Variabel KM adalah $\beta=0,217$ (positif) dan t-hitung adalah 2,242 signifikan dengan nilai probabilitas pada $p<0,05$. Hal ini berarti bahwa variabel Knowledge manangement (KM) berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja (K), sehingga hipotesis pertama yang menyatakan bahwa knowledge management berpengaruh positif dan

signifikan pada kinerja dapat diterima. Pada tabel yang sama, diketahui bahwa koefisien Variabel CenteringKMxOB (interaksi antara KM dan OB) adalah $\beta=0,361$ (positif) dan t-hitung adalah 3,417 signifikan dengan nilai probabilitas pada $p<0,01$. Hal ini berarti bahwa variabel Observasi Binsis (CenteringKMxOB) memperkuat pengaruh knowledge management dan positif pada

kinerja (K), sehingga hipotesis kedua yang menyatakan bahwa strategi observasi bisnis memperkuat knowledge management pada kinerja dapat diterima.

DISKUSI

Dalam penelitian ini knowledge management berpengaruh pada kinerja skripsi para mahasiswa. Keberlanjutan dan inovasi dalam knowledge management harus selalu dilakukan, mengingat para mahasiswa akan termotivasi melakukan kegiatan ilmiah berdasarkan knowledge management serta kajian-kajian yang relevan terhadap studi akhirnya yaitu skripsi. Mengingat pentingnya knowledge management perlu diperhatikan adanya budaya organisasi dan pembelajaran organisasi baik secara individu maupun kelompok (Junco, et al., 2010) agar tercipta kepuasan para mahasiswa (Singh and Vanda, 2011).

Knowledge management ini makin penting dan akan meningkatkan knowledge managementnya jika perusahaan mampu menterjemahkan knowledge management tersebut pada sendi organisasinya, terlebih pada organisasi yang kurang formal, lebih rumit, kurang terintegrasi (Mahmoudsalehi, 2012).

Perhatian penting lainnya pada knowledge management adalah Budaya organisasi yaitu sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya. Sistem makna bersama ini adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi.

Menurut Cushway dan Lodge (1999), budaya organisasi merupakan sistem nilai organisasi dan akan mempengaruhi cara bekerja yang dilakukan para karyawan dan para mahasiswa dalam berperilaku. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan budaya organisasi adalah sistem nilai organisasi yang dianut oleh anggota organisasi, yang kemudian mempengaruhi cara bekerja dan berperilaku dari para anggota organisasi, karenanya Budaya organisasi adalah basis penting dalam menterjemahkan knowledge management. Learning organization juga tidak kalah penting. Diperlukan keterlibatan mahasiswa dalam memajukan learning organization.

Beberapa cara bisa dilakukan seperti pada temuan Chua (2013), melibatkan para mahasiswa pada masukan dan saran melalui media social atau media yang lain, merubah peran pasif para mahasiswa menjadi berperan aktif dalam memberikan kontribusi dan inovasi, dan organisasi menggunakan berbagai macam media yang memungkinkan para mahasiswa menggunakannya sebagai bagian dari interaksi dengan organisasi. Organisasi yang maju adalah organisasi yang mampu meningkatkan knowledge management ke arah pendekatan pada perkembangan jaman. Perubahan eksternal organisasi akan sangat mempengaruhi kinerja organisasi, karena itulah knowledge management perlu ditingkatkan di lingkungan organisasi.

KESIMPULAN

Observasi Bisnis dapat memberikan pemahaman bahkan penguatan pada knowledge manajemen bagi para mahasiswa

tingkat akhir yang akan menulis skripsi atau penelitian. Mengadopsi observasi bisnis ini penting karena para mahasiswa akan mampu mengintegrasikan antara kenyataan dan teori. Terlepas dari keterbatasan, penelitian ini memberikan bukti bahwa Knowledge management berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja, dan Observasi Binsismemperkuat pengaruh knowledge management dan positif pada kinerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Choo, C.W. (1998), *The Knowing Organization: How Organizations Use Information to Construct Meaning, Create Knowledge, and Make Decisions*, Oxford University Press, New York, NY.
- Chua, A.Y.K., and Snehasish, B., (2013) "Customer knowledge management via social media: the case of Starbucks", *Journal of Knowledge Management*, Vol. 17 Iss: 2, pp.237 – 249.
- Cushway, B. & Lodge, D. 1999. *Organizational Behavior and Design*. 2nd ed. United States of America: Kogan Page.
- Davenport, T.H., De Long, D.W. and Beers, M.C. (1998), "Successful knowledge management projects", *Sloan Management Review*, Vol. 39 No. 2, pp. 43-57.
- Davidsson, P., and Delmar, F., (1998), "Some Important Observations Concerning Job Creation by Firm Size and Age¹", Working Paper, Jönköping International Business School, Jönköping, Sweden, pp.1-14.
- Junco, J.G.D., Rafael, D.R.Z., and Juan, G.A.P, (2010), Evidence-based administration for decision making in the framework of knowledge strategic management, *The Learning Organization*, Vol. 17 No. 4, pp. 343-363.
- Mahmoudsalehi, M., Roya, M., and Khalil, S., (2012), How knowledge management is affected by organizational structure, *The Learning Organization*, Vol. 19 No. 6, pp. 518-528.
- Ranjan, J., and Vishal, B., (2011), "Role of knowledge management and analytical CRM in business: data mining based framework", *The Learning Organization* Vol. 18 No. 2, pp. 131-148.
- Sigh, A.K., and Vanda, S., (2011), Knowledge management antecedents and its impact on employee satisfaction A study on Indian telecommunication industries *The Learning Organization*, Vol. 18 No. 2, pp. 115-130.
- Zuljan, M.V., and Vogrinc, J., (2010), "Facilitating Effective Student Learning through Teacher Research and Innovation", pp. 1- 492.

KEPUASAN KERJA DAN PRESTASI KERJA KARYAWAN RUMAH SAKIT UMUM 'AISYIYAH PONOROGO

Oleh :

UMI FARIDA¹⁾

TITI RAPINI²⁾

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAN PONOROGO

Email: umifarida33@yahoo.com¹⁾

titi.rapini@gmail.com²⁾

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kepuasan kerja dengan prestasi kerja karyawan Rumah Sakit Umum 'Aisyiyah Ponorogo. Penelitian ini termasuk penelitian *survei deskriptif kuantitatif* dengan menjelaskan masalah-masalah melalui fakta-fakta. Karena populasi penelitian ini jumlahnya banyak maka dalam penelitian ini menggunakan sampel. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data dengan cara membagikan kuesioner dan observasi pada tempat penelitian. Sedangkan Metode Analisisnya menggunakan analisis Regresi linier sederhana dan Koefisien determinasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Tingkat kepuasan kerja karyawan Rumah Sakit Umum 'Aisyiyah Ponorogo mayoritas pada kategori puas. Tingkat Prestasi kerja karyawan Rumah Sakit Umum 'Aisyiyah Ponorogo mayoritas pada kategori baik dan ada Ada hubungan yang positif dan Signifikan antara Kepuasan kerja karyawan dengan Prestasi kerja karyawan Rumah Sakit Umum 'Aisyiyah Ponorogo. Hal ini ditunjukkan Korelasi, R sebesar 0,872 atau 87 %. , Serta mempunyai pengaruh yang signifikan antara kepuasan kerja dan Prestasi kerja karyawan Rumah Sakit Umum 'Aisyiyah Ponorogo

Kata Kunci : *Kepuasan kerja, prestasi kerja*

PENDAHULUAN

Dalam era kompetisi yang kian ketat saat ini, setiap organisasi bisnis dituntut untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat memenangkan persaingan. Hal itu dapat dilakukan dengan cara meningkatkan prestasi kerja karyawan, melakukan inovasi proses dan produk, serta meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Keberhasilan perusahaan tidak sepenuhnya bergantung pada manajer dan manajemen perusahaan, tetapi juga pada tingkat keterlibatan karyawan terhadap aktivitas dan pencapaian tujuan perusahaan. Sumber daya manusia yang potensial dan berkualitas merupakan modal dasar organisasi yang akan mampu mengantarkan organisasi dalam mencapai tujuannya dengan sukses. Malayu S.P Hasibuan (2005)

menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Manajemen sumber daya manusia dalam organisasi sangatlah penting, karena hal tersebut merupakan pemeran utama pendayagunaan sumber-sumber yang lain. Bagaimanapun lengkapnya sarana dan fasilitas kerja semuanya tidak berarti tanpa ditunjang sumber daya manusia yang ada seperti karyawan yang terampil dan mempunyai dedikasi tinggi dari masing-masing anggota organisasi. Seorang karyawan yang memiliki dedikasi yang tinggi ditunjukkan dengan Prestasi kerja yang tinggi dan baik dalam mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kebutuhan seseorang untuk mencapai prestasi merupakan kunci dalam kepuasan kerja. Jika seseorang bekerja, maka kebutuhan pencapaian prestasi tersebut berubah sebagai dampak dari beberapa faktor dalam organisasi : adanya pengembangan karier, suasana dan lingkungan kerja yang mendukung, pembagian dan jenis tugas yang diberikan, tipe supervisi yang dilakukan, dan lain lain. Sebagai salah satu lembaga kesehatan, Rumah Sakit Umum 'Aisyiyah Ponorogo berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Ponorogo. Peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan yaitu melalui peningkatan Kepuasan kerja Karyawan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Rumah Sakit dituntut lebih keras lagi untuk meningkatkan profesionalisme kinerjanya dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kepercayaan yang diberikan masyarakat dan pemerintah terhadap Rumah Sakit tersebut adalah suatu tugas dan tanggung jawab berat. Oleh sebab itu penelitian terhadap kepuasan kerja karyawan sangatlah penting, dengan mengetahui hal tersebut mempermudah suatu perusahaan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi prestasi kerja karyawan. Karyawan akan bekerja dengan produktif atau tidak tergantung pada motivasi, kepuasan kerja, tingkat stres, kondisi fisik pekerjaan, sistem kompensasi, desain pekerjaan, dan aspek-aspek ekonomis, teknis serta keperilakuan lainnya. Departemen personalia atau manajemen harus senantiasa memonitor

kepuasan kerja, karena hal itu mempengaruhi tingkat absensi, perputaran tenaga kerja, semangat kerja, keluhan-keluhan, dan masalah-masalah personalia vital lainnya.(Sri Handayani,2008) Jadi salah satu factor yang mempengaruhi prestasi kerja karyawan adalah adanya kepuasan kerja karyawan. Berdasarkan pengamatan sementara peneliti, di Rumah Sakit Umum 'Aisyiyah Jl.Dr.Sutomo Ponorogo pada tgl 12 Mei 2015, karyawan menganggap pengembangan karier untuk karyawan dirasakan masih terbatas. Ada karyawan yang menyatakan kurangnya kerja sama dengan rekan sekerja. Rekan kerja yang kurang suportif, sikap pimpinan, maka hal itu semua akan mempengaruhi kepuasan kerja sehingga prestasi kerja mereka kurang baik. Menurut bagian Sumber Daya Insani Rumah Sakit Umum 'Aisyiyah Ponorogo dalam tiga tahun terakhir ada 6 orang karyawan tetap yang tertunda pangkatnya dari jumlah karyawan 311 orang karena prestasi kerjanya yang kurang baik disamping itu ada 5 karyawan kontrak yang tidak diperpanjang kontraknya dari 42 orang. Alasan tertundanya pangkatnya dan tidak diperpanjang kontraknya karena prestasinya jelek, hal ini menandakan salah satu indikator kepuasan kerja karyawan. Kepuasan Kerja adalah suatu perasaan yang menyokong atau tidak menyokong diri pegawai yang berhubungan dengan pekerjaannya maupun dengan kondisi dirinya (Mangkunegara, 2001). Kepuasan kerja karyawan berhubungan erat dengan Prestasi kerja karyawan. Seseorang yang puas dalam pekerjaannya akan memiliki motivasi, Komitmen dalam organisasi dan partisipasi yang tinggi pada pekerjaannya dan pada

akhirnya akan memperbaiki Prestasi kerjanya. Oleh karena Kepuasan kerja karyawan mempunyai hubungan yang erat dengan Prestasi kerja karyawan, hal ini sangat menarik untuk dikaji.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana tingkat kepuasan kerja karyawan Rumah Sakit Umum 'Aisyiyah Ponorogo. 2) Bagaimana tingkat prestasi kerja Karyawan Rumah Sakit Umum 'Aisyiyah Ponorogo. 3) Adakah hubungan kepuasan kerja dengan prestasi kerja karyawan Rumah Sakit Umum 'Aisyiyah Ponorogo.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 1) Mengetahui tingkat kepuasan kerja karyawan Rumah Sakit Umum 'Aisyiyah Ponorogo. 2) Mengetahui tingkat prestasi kerja Karyawan Rumah Sakit Umum 'Aisyiyah Ponorogo. 3) Mengetahui hubungan kepuasan kerja dengan prestasi kerja karyawan Rumah Sakit Umum 'Aisyiyah Ponorogo.

KAJIAN LITERATUR DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

Kepuasan kerja ini merupakan sikap umum individu yang bersifat individual tentang perasaan seseorang terhadap pekerjaannya (Robbins, 1998). Sejalan dengan pandangan Robbins, Luthans (1995) mengemukakan bahwa kepuasan kerja adalah ungkapan kepuasan karyawan tentang bagaimana pekerjaan mereka dapat memberikan manfaat bagi organisasi, yang berarti bahwa apa yang diperoleh dalam bekerja sudah memenuhi apa yang dianggap penting. Kepuasan kerja itu dianggap sebagai

hasil dari pengalaman karyawan dalam hubungannya dengan nilai sendiri seperti apa yang dikehendaki dan diharapkan dari pekerjaannya. Pandangan tersebut dapat disederhanakan bahwa kepuasan kerja merupakan suatu sikap dari individu dan merupakan umpan balik terhadap pekerjaannya. Menurut Smith, Kendall dan Hulin (dalam Gibson, Ivancevich, dan Donnelly, 2000), ada lima karakteristik penting yang mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu :

- a. Pekerjaan, sampai sejauhmana tugas kerja dianggap menarik dan memberikan kesempatan untuk belajar dan menerima tanggung jawab.
- b. Upah atau gaji, yaitu jumlah yang diterima dan keadaan yang dirasakan dari upah atau gaji.
- c. Penyelia atau pengawasan kerja yaitu kemampuan penyelia untuk membantu dan mendukung pekerjaan.
- d. Kesempatan promosi yaitu keadaan kesempatan untuk maju.
- e. Rekan kerja yaitu sejauhmana rekan kerja bersahabat dan berkompeten.

Prestasi kerja adalah hasil pelaksanaan suatu pekerjaan, baik bersifat fisik/material maupun non fisik/non material yang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan deskripsi pekerjaan perlu dinilai hasilnya setelah tenggang waktu tertentu (Nawawi 2005). Menurut Hasibuan (2001) Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas tugas yang dibedakan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Hasibuan juga menerangkan bahwa prestasi kerja

merupakan gabungan dari tiga factor penting yaitu kemampuan dan minat seorang pekerja, kemampuan dan penerimaan atas penjelasan delegasi tugas, serta peran dan tingkat motivasi seorang pekerja. Semakin tinggi ketiga ketiga factor tersebut, maka akan semakin besar prestasi kerja karyawan yang bersangkutan. Bemardin dan Russel diacu dalam Ruky (2006) mendefinisikan prestasi sebagai suatu catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu selama kurun waktu tertentu. Suprihanto (2006) mengatakan bahwa pada dasarnya prestasi kerja adalah hasil kerja seseorang dalam periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan misalnya standar, target/sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.

Beberapa studi empiris membuktikan bahwa menurut **Penelitian Noviyani dkk (2013)**, tentang Hubungan kepuasan kerja dengan prestasi kerja perawat PNS di Instalasi rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan, berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan uji statistic diperoleh nilai $p = 0,000$ atau probabilitas dibawah $0,05$ ($0,000 < 0,05$) dari hasil analisis tersebut menunjukan terdapat hubungan kepuasan kerja perawat dengan prestasi kerja perawat di Instalasi rawat inap Rumah Sakit Umum.

Menurut Penelitian Saputra (2011), tentang Pengaruh kepuasan kerja, Studi Pada Karyawan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur diperoleh hasil ada pengaruh atau hubungan kepuasan kerja dengan prestasi kerja adalah sebesar 69,2 %. Itu artinya kepuasan kerja mempunyai arti penting bagi karyawan maupun perusahaan. Salah satu

factor terpenting dalam meningkatkan dan perbaikan prestasi kerja adalah kepuasan kerja (job Satifications). Karyawan yang memperoleh kepuasan kerja akan cenderung memberikan lebih dari apa yang diharapkan oleh perusahaan dan ia akan terus berusaha memperbaiki kinerjanya sehingga prestasi kerjanya akan meningkat.

Penelitian Sri Hartati dkk, 2008, tentang hubungan kepuasan kerja dengan prestasi kerja perawat di instalasi rawat inap rumah sakit islam Klaten. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang hubungan kepuasan kerja dengan prestasi kerja perawat di Instalasi rawat Inap Rumah Sakit Islam Klaten diperoleh kesimpulan bahwa: 1) Kepuasan kerja perawat di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Islam Klaten mayoritas pada kategori sedang sebanyak 33 responden (63,5%). 2) Prestasi kerja perawat di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Islam Klaten mayoritas pada kategori baik sebanyak 41 responden (78,8%). 3) Ada hubungan yang positif dan signifikan antara kepuasan kerja dengan prestasi kerja perawat di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Islam Klaten. ($r=0,393$ dan $p = 0,004$).

Penelitian Almigo, 2004. Tentang Hubungan antara kepuasan kerja dengan Produktivitas Kerja Karyawan PT Pupuk Sriwidjaja menurut hasil penelitiannya menunjukan adanya hubungan positif yang signifikan antara kepuasan kerja dengan produktivitas pada karyawan yaitu $r = 0,252$; $p= 0,011$). Artinya semakin tinggi kepuasan kerja, maka akan semakin tinggi produktivitas karyawan.

Menurut Penelitian Umi Farida (2014) tentang “Analisis Pengaruh

Kepemimpinan, komunikasi terhadap Kinerja Karyawan ini dilakukan di Rumah Sakit Umum 'Aisyiyah Ponorogo'. Berdasarkan hasil analisis bahwa Kepemimpinan dan Komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Rumah Sakit Umum 'Aisyiyah Ponorogo dan Analisis uji secara serentak yaitu pengaruh secara bersama sama antara variabel bebas (X) Kepemimpinan dan Komunikasi terhadap variabel terikat (Y) kinerja karyawan dimana nilai F hitung sebesar 6,354, dengan nilai signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$, jika dibandingkan dengan nilai F Tabel sebesar 3,124 (dari table F, df; 2, 72) maka F hitung > F table ($3,124 > 6,354$), pengujian hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima artinya kepemimpinan dan komunikasi secara bersama sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja Karyawan Rumah Sakit Umum 'Aisyiyah Ponorogo, sedangkan Kepemimpinan mempunyai pengaruh dominan terhadap kinerja karyawan.

Hipotesis Penelitian ini adalah :

Ha₁ : "Tingkat kepuasan kerja karyawan Rumah Sakit Umum 'Aisyiyah Ponorogo Puas"

Ha₂ : "Tingkat prestasi kerja Karyawan Rumah Sakit Umum 'Aisyiyah Ponorogo baik"

Ha₃ : "Ada hubungan kepuasan kerja dengan prestasi kerja karyawan Rumah Sakit Umum 'Aisyiyah Ponorogo."

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian *survei deskriptif kuantitatif* dengan menjelaskan masalah-masalah melalui fakta-fakta. Karakteristik populasi saat ini secara sistematis, faktual dan akurat yang akhirnya

dapat digunakan sebagai dasar langsung dalam membuat keputusan-keputusan oleh pihak manajemen. Dan penelitian Penjelasan (Explanatory Research) adalah penelitian yang mencoba memberikan penjelasan Hubungan Kepuasan kerja Karyawan dan Prestasi kerja karyawan Rumah Sakit Umum 'Aisyiyah Ponorogo. Lokasi penelitian dilakukan di RSU 'Aisyiyah Ponorogo, Propinsi Jawa timur. Pertimbangan Pemilihan lokasi ini karena Rumah Sakit Umum 'Aisyiyah Ponorogo dianggap Rumah Sakit Milik Muhammadiyah/'Aisyiyah no 2 terbesar di Jawa Timur. Dan Kalau di Ponorogo merupakan RSU Swasta terbesar. Populasi dalam penelitian adalah Seluruh karyawan Rumah Sakit Umum 'Aisyiyah Ponorogo yang berjumlah 312 orang. Menurut Suharsini Arikunto, (2002: 112) mengemukakan bahwa sekedar perkiraan maka apabila subyeknya kurang dari 100 lebih baik diambil semua sehingga penelitian merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subyek besar dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih. Maka dalam penelitian ini sampel yang dapat diambil adalah 25 % dari Populasi jadi 75 orang. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan cara sbb :

- Kuesioner adalah suatu daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan untuk tujuan khusus yang memungkinkan seorang analis sistem untuk mengumpulkan data dan pendapat dari para responden yang telah dipilih.
- Observasi. Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek diteliti

yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

- c. wawancara langsung (Arikunto,2006) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara sistimatik , yaitu dibantu dengan angket yang berisi daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara agar lebih terarah dan menghindari kemungkinan melupakan beberapa persoalan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- a. **Tingkat Kepuasan kerja karyawan Rumah Sakit Umum 'Aisyiyah Ponorogo**
Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa tingkat kepuasan kerja karyawan Rumah Sakit Umum 'Aisyiyah Ponorogo dari 75 responden pada umumnya menyatakan puas , baik pada dimensi adanya pengembangan karier sebanyak 40 %,. Pengembangan karier yang telah dilakukan oleh rumah sakit selalu ada sesuai dengan prestasi yang mereka raih. Kepuasan kerja dimensi suasana dan lingkungan kerja yang mendukung (peralatan dan kebersihan) sebagian besar puas sebesar 44 % berarti suasana dan lingkungan kerja sudah mendukung terhadap pekerjaan mereka. Kepuasan kerja mengenai Rekan kerja yang suportip (mendukung) sebagian besar puas sebanyak 48 %, mengandung arti rekan kerja mereka mendukung dan memberi

perhaatian yang menyenangkan terhadap pekerjaan mereka. Kepuasan kerja mengenai Penempatan sesuai dengan keinginan ,sebagian besar puas sebanyak 41 % dan Kepuasan kerja mengenai kerja sama yang baik dengan teman sejawat mereka menyatakan puas sebesar 46 %. Berati mereka dapat bekerja sama dengan baik sehingga pekerjaan dapat terselesaikan.

b. **Tingkat prestasi kerja karyawan Rumah Sakit Umum 'Aisyiyah Ponorogo.**

Prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa tingkat prestasi kerja karyawan berada pada kategori baik. Dimensi Menyelesaikan pekerjaan diatas standar kerja adalah yang paling banyak menjawab setuju sebanyak 43 % hal ini berarti karyawan sudah menyelesaikan pekerjaan diatas standar kerja yaitu memperhatikan kelengkapan administrasi pekerjaan, tertib saat bekerja dan melakukan perawatan peralatan kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Dimensi Cepat dan tanggap terhadap pekerjaan yang diberikan paling banyak menjawab setuju 61 %. Hal ini menunjukan karyawan cepat , tanggap dan serius terhadap pekerjaan. Dimensi bekerja dengan cekatan dan tepat paling banyak menjawab setuju sebanyak 52 %. Hal ini karyawan bekerja secara cekatan dan tidak pandang bulu terhadap pekerjaannya. Dimensi Rasa loyalitas

terhadap pekerjaan paling banyak menjawab 53 %. Hal ini karyawan loyal /setia terhadap pekerjaan dan Rumah Sakit Umum 'Aisyiyah Ponorogo Demensi Kemampuan inisiatip untuk menyelesaikan pekerjaan paling banyak menjawab 64 %. Hal ini menunjukkan karyawan mampu memberikan usulan atau saran untuk mengatasi permasalahan dan memahami dilingkungan kerja

c. Hubungan kepuasan kerja karyawan dengan Prestasi kerja karyawan Rumah Sakit Umum 'Aisyiyah Ponorogo.

Berdasarkan hasil analisis Korelasi sederhana, menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara kepuasan kerja karyawan dengan prestasi kerja karyawan Rumah Sakit Umum 'Aisyiyah Ponorogo. Hal ini ditunjukkan Korelasi, R sebesar 0,872 atau 87 % yang artinya mempunyai keeratan hubungan antara kepuasan kerja karyawan dan prestasi kerja karyawan, hipotesis tersebut terbukti dan diterima. Hal ini ditunjukkan dengan sigifikan , t sebesar, 0,000 dengan alpha 0,05 ($0,000 < 0.05$) berarti H_0 ditolak dan H_a diterima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Noviyani (2013) yang menyatakan bahwa ada hubungan kepuasan kerja dengan prestasi kerja perawan PNS di Instalasi rawat Inap Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan. Semakin tinggi kepuasan kerja akan mempengaruhi Prestasi kerja perawat.

Penelitian Saputra (2011), tentang Pengaruh kepuasan kerja, Studi Pada Karyawan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur diperoleh hasil ada pengaruh atau hubungan kepuasan kerja dengan prestasi

kerja adalah sebesar 69,2 %. Itu artinya kepuasan kerja mempunyai arti penting bagi karyawan maupun perusahaan. Salah satu factor terpenting dalam meningkatkan dan perbaikan prestasi kerja adalah kepuasan kerja (job Satifications). Karyawan yang memperoleh kepuasan kerja akan cenderung memberikan lebih dari apa yang diharapkan oleh perusahaan dan ia akan terus berusaha memperbaiki kinerjanya sehingga prestasi kerjanya akan meningkat.

Penelitian Sri Hartati dkk, 2008, tentang hubungan kepuasan kerja dengan prestasi kerja perawat di instalasi rawat inap rumah sakit islam Klaten. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang hubungan kepuasan kerja dengan prestasi kerja perawat di Instalasi rawat Inap Rumah Sakit Islam Klaten diperoleh kesimpulan bahwa: 1) Kepuasan kerja perawat di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Islam Klaten mayoritas pada kategori sedang sebanyak 33 responden (63,5%). 2) Prestasi kerja perawat di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Islam Klaten mayoritas pada kategori baik sebanyak 41 responden (78,8%). 3) Ada hubungan yang positif dan signifikan antara kepuasan kerja dengan prestasi kerja perawat di Instalasi Rawat Inap Rumah Sakit Islam Klaten. ($r=0,393$ dan $p = 0,004$).

Penelitian Almigo, 2004 . Tentang Hubungan antara kepuasan kerja dengan Produktivitas Kerja Karyawan PT Pupuk Sriwidjaja menurut hasil penelitiannya menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara kepuasan kerja dengan produktivitas pada karyawan yaitu $r = 0,252$; $p = 0,011$). Artinya semakin tinggi kepuasan

kerja, maka akan semakin tinggi produktivitas karyawan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui :

1. Tingkat kepuasan kerja karyawan ,
2. Tingkat Prestasi kerja karyawan
3. Mengetahui hubungan Kepuasan kerja karyawan dengan Prestasi kerja karyawan Rumah Sakit Umum 'Aisyiyah Ponorogo

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan tentang hubungan kepuasan kerja dengan prestasi kerja karyawan Rumah Sakit Umum 'Aisyiyah Ponorogo disimpulkan sebagai berikut :

1. Tingkat kepuasan kerja karyawan Rumah Sakit Umum 'Aisyiyah Ponorogo mayoritas pada kategori puas.
2. Tingkat Prestasi kerja karyawan Rumah Sakit Umum 'Aisyiyah Ponorogo mayoritas pada kategori baik
3. Ada hubungan yang positif dan Signifikan antara Kepuasan kerja karyawan dengan Prestasi kerja karyawan Rumah Sakit Umum 'Aisyiyah Ponorogo. Hal ini ditunjukkan Korelasi, R sebesar 0,872 atau 87 % yang artinya mempunyai keeratan hubungan antara kepuasan kerja karyawan dan prestasi kerja karyawan, hipotesis tersebut terbukti dan diterima. Hal ini ditunjukkan dengan signifikan , t sebesar, 0,000 dengan alpha 0,05 ($0,000 < 0,05$) berarti H_0 ditolak dan H_a diterima.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diambil , maka diajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi karyawan Rumah Sakit Umum 'Aisyiyah Ponorogo
Mempertahankan Prestasi kerja sesuai dengan harapan Rumah Sakit, antara lain dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Rumah Sakit Umum 'Aisyiyah Ponorogo.
2. Bagi Bagian Sumber Daya Insani
Diharapkan untuk lebih memperhatikan faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan dan prestasi kerja karyawan antara lain dengan menciptakan iklim dan lingkungan kerja yang mendukung prestasi karyawan, memberikan pelatihan sesuai kebutuhan dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan diri agar dapat meningkatkan prestasi kerja karyawan.
3. Bagi direktur Rumah Sakit Umum 'Aisyiyah Ponorogo
Mengupayakan untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan agar karyawan lebih berprestasi . Hal ini dapat diupayakan dengan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk pengembangan sumber daya Insani.
4. Bagi Peneliti lain
Diharapkan dalam penelitian selanjutnya untuk meneliti variabel variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini dan menjelaskan variabel lain yang mempengaruhi kepuasan kerja dan prestasi kerja karyawan

DAFTAR PUSTAKA

- Almigo Nuzsep, 2004. Hubungan Antara Kepuasan Kerja Dengan Produktivitas Kerja Karyawan, *Jurnal Psikologi vol 1, No 1, 2004*, Universitas Bina Darma, Palembang,
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian, suatu Pendekatan Praktek*, Penerbit rineka Cipta, Cetakan ke duabelas, Edisi Revisi V, Jakarta.
- Dessler, G 1997, *Manajemen Sumber Daya Manusia* Jilid 1 Edisi 7 Pt Prenhallindo, Jakarta
- Flippo, E.B. 1994. *Manajemen Personalialia* Jilid 2 Edisi keenam. Editor: Alfonso Sirait. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Hasibuan, M.S.P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi Pt Bumi Aksara. Jakarta
- Istijanto . 2006. *Riset Sumber Daya Manusia. Cara Praktis mendekati Demensi-Demensi Kerja Karyawan*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama
- Mangkuprawira, S. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik* Edisi 2 Ghalia Indonesia Jakarta
- Manullang, M. 2000. *Manajemen Personalialia*. Edisi 3. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta
- Noviyani, Herman, Hendry (2013) *Hubungan Kepuasan kerja dengan Prestasi kerja perawat PNS di Instalasi rawat Inap rumah Sakit Umum Daerah Kota Tidore kepulauan*. E-Jurnal keperawatan (e-KP) Nolume 1 Agustus 20113.
- Robbin, P (2007). *Perilaku Organisasi*. Jakarta. Index
- Ruky, AS, 2006. *Sistem Manajemen Kinerja*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama
- Saputro, J (2011) *Dalam Thesis "Pengaruh Kepuasan Kerja; Studi pada karyawan PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur"* Malang. Brawijaya University Press.
- Suprihanto. 2006. *Ptestasi Kerja*. WWW.Google.Com
- Umi Farida, 2013. " Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap kepuasan keluarga Pasien Rawat inap di rumah Sakit Umum 'Aisyiyah Jl. Dr. Sutomo Ponorogo"

**PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PENUMPANG KERETA API
MADIUN JAYA DI STASIUN SRAGEN**

Oleh:

ARIS TRI HARYANTO¹⁾
SEPTIANA NOVITA DEWI²⁾

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AUB SURAKARTA

Email: Arisharyanto26@yahoo.co.id¹⁾

Septianadewi25@yahoo.co.id²⁾

ABSTRAKSI

Tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan penumpang Kereta Api Madiun Jaya Di Stasiun Sragen. Metode Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: uji validitas, uji realibilitas, uji asumsi klasik, uji analisis regresi linear berganda, uji t dan uji F. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan penumpang KA.Madiun Jaya di Stasiun Sragen pada bulan September 2015 yang berjumlah sekitar ± 650 orang. Sampel diambil dari 10% dari populasi yaitu 65 responden dengan teknik *simple random sampling*. Hasil analisis dapat disampaikan sebagai berikut: Hasil analisis uji F dapat disimpulkan bahwa keandalan, daya tanggap, kepastian, empati dan bukti fisik secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan penumpang KA.Madiun Jaya di Stasiun Sragen. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan keandalan, daya tanggap, kepastian, empati dan bukti fisik secara parsial terhadap kepuasan penumpang KA. Hasil uji R^2 sebesar 0.937 yang berarti variabilitas variabel independen sebesar 93,7% sedangkan sisanya (6,3%) dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak ikut terobservasi, misalnya variabel harga dan reputasi perusahaan.

Kata Kunci : *Keandalan, Daya Tanggap, Kepastian, Empathy, Bukti Fisik, Kepuasan Penumpang*

PENDAHULUAN

Pentingnya meningkatkan kualitas pelayanan adalah untuk menciptakan kepuasan pelanggan dengan menjadikan pelanggan sebagai fokus utamanya. Persoalan kualitas jasa dan kepuasan konsumen kini semakin menjadi hal yang penting bagi perusahaan jasa. Oleh karena itu, perusahaan perlu membangun sistem manajemen kualitas jasa, mengidentifikasi kesenjangan yang mungkin terjadi, serta pengaruhnya bagi kepuasan konsumen dan perilaku konsumen purna layanannya (Kotler, Philip. 2001).

Kualitas layanan mendorong pelanggan untuk komitmen kepada produk dan layanan suatu perusahaan sehingga berdampak kepada peningkatan *market share* suatu produk pelayanan. Kualitas layanan sangat

krusial dalam mempertahankan pelanggan dalam waktu yang lama. Perusahaan yang memiliki layanan yang superior akan dapat memaksimalkan performa keuangan perusahaan (Gilbert, 2006).

Menurut para akademisi, kepuasan pelanggan merupakan konstruk yang berdiri sendiri dan dipengaruhi oleh kualitas layanan (Oliver, 2010). Kualitas layanan juga dapat mempengaruhi loyalitas pelanggan secara langsung (Zeithaml, 2006) dan mempengaruhi loyalitas pelanggan secara tidak langsung melalui kepuasan (Caruana, 2008).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Yulian, Mochamad Rizki, (2013), Moh. Fakhurur Rozi, (2007), Fery dan Susi, (2013), Andrew, Achmad Fauzi dan Sunarti, (2015) yang dapat menghasilkan sebuah

temuan bahwa kualitas pelayanan dapat mempengaruhi tingkat kepuasan seseorang. Fenomena tersebut menjadi sebuah gambaran bahwa terdapat asas – asas pelayanan publik yang tidak diaplikasikan dengan baik oleh penyedia layanan. Terciptanya pelayanan yang baik pada hakikatnya akan menimbulkan kepuasan bagi pihak yang mendapat pelayanan. Pada dasarnya kepuasan merupakan hal yang bersifat pribadi. Setiap individu akan merasakan tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan individu. Kepuasan dalam diri individu mempunyai peranan penting dalam rangka mendukung tercapainya tujuan Perusahaan PT KAI.

Pengertian pelayanan dapat berbeda makna setiap orang, karena kualitas pelayanan memiliki berbagai kriteria dan sangat bergantung pada konteksnya. Banyak pakar bidang kualitas yang mencoba untuk mendefinisikan kualitas berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. Pelayanan publik (*public services*) oleh birokrasi publik adalah merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi penumpang disamping sebagai abdi negara. Pelayanan publik (*public services*) oleh birokrasi publik dimaksudkan dalam mensejahterakan penumpang dari suatu negara kesejahteraan (*welfare state*). Kualitas pelayanan adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan penumpang Kereta Api Madiun Jaya di Sragen. Untuk mengukur kualitas dari pelayanan bisa menggunakan beberapa cara, salah satu cara yang bisa kita gunakan adalah pendapat dari Parasuraman (1988) dimana kualitas pelayanan dapat diukur melalui 5

(lima) dimensi pelayanan yaitu Keakuratan (*Reliability*), Daya Tanggap (*Responsiveness*), Jaminan (*assurance*), Perhatian (*Empaty*), dan Bukti Fisik (*Tangible*). *Reliability* yaitu kemampuan Perusahaan PT KAI dalam memberikan pelayanan yang disajikan secara akurat dan terpercaya. Dalam hal ini Perusahaan PT KAI harus mampu memberi pelayanan yang cepat, tepat dan tidak berbelit-belit, karyawan dapat memberikan pelayanan yang sama terhadap penumpang, karyawan bersikap ramah dan sopan kepada setiap penumpang dan karyawan harus dapat diandalkan dan dipercaya, sehingga penumpang akan tetap loyal kepada penggunaan kereta api Madiun Jaya.

Responsiveness yaitu kemampuan dan kemauan untuk memberikan pelayanan secara cepat (*responsive*) dan tepat kepada Pengguna disertai dengan informasi yang jelas. Dalam hal ini Perusahaan PT KAI harus mampu dan bersedia membantu penumpang, karyawan cepat tanggap terhadap masalah yang dihadapi penumpang, karyawan cepat dan tepat dalam memberikan pelayanan dan meskipun sibuk karyawan dapat menanggapi keinginan penumpang.

Assurance (jaminan) yaitu: pengetahuan kesopan santunan dan kemampuan karyawan untuk menumbuhkan rasa percaya penumpang KA.Madiun Jaya di Stasiun Sragen. Dalam hal ini manajemen harus bertanggung jawab terhadap keamanan penumpang, tiap karyawan memiliki pengetahuan yang sesuai bidangnya, karyawan menjalin hubungan yang efektif dengan penumpang, karyawan memiliki kemampuan yang baik, dan karyawan memiliki ketrampilan yang lebih.

Empaty (perhatian) yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada penumpang, memahami kebutuhan penumpang secara spesifik serta memiliki waktu yang nyaman bagi penumpang. Dalam hal ini setiap karyawan Perusahaan PT KAI harus memberikan perhatian khusus pada penumpangnya, karyawan menerapkan disiplin waktu yang tinggi, karyawan memberikan pelayanan terhadap semua penumpang sesuai dengan urutannya, dan karyawan memberikan pelayanan yang nyaman dan sesuai dengan keinginan penumpang.

Tangibles (fisik) yaitu kemampuan Perusahaan PT KAI dalam menunjukkan eksistensinya pada pihak luar, dalam hal ini Perusahaan PT KAI harus mampu menciptakan lingkungan yang nyaman dan rapi, lingkungan yang bersih, memiliki fasilitas penunjang yang memadai, memiliki perlengkapan menjaga kerapian dan kebersihan penampilan karyawannya. Dalam perkembangan selanjutnya untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada para penumpang di KA. Madiun Jaya di Stasiun Sragen, diharapkan penumpang harus menerima pelayanan yang semakin baik dari karyawannya, untuk itu setiap karyawan PT. KAI harus memahami dan memberikan pelayanan kepada penumpangnya secara *reliability* (handal), *responsiveness* (tanggap), *assurance* (jaminan), *empaty* (perhatian), dan *tangible* sehingga dengan strategi ini KA. Madiun Jaya di Stasiun Sragen dapat menarik dan meningkatkan loyalitas penumpang dan menjaga nama baik lembaga di dalam menggunakan KA. Madiun Jaya di stasiun

Sragen sebagai tujuan utama untuk melakukan perjalanan.

Kepuasan

1. Pengertian Kepuasan

Kepuasan penumpang adalah "*Customer satisfaction is the degree of one's feelings after comparing the perceived performance compared to expectations*". Kepuasan penumpang merupakan tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja yang dirasakan dibanding harapannya. Parasuraman (2005: 45).

Engel, et.,al (1990) dalam Tjiptono (2011:65) mengungkapkan bahwa kepuasan pelanggan merupakan evaluasi purnabeli di mana alternatif yang dipilih sekurang-kurangnya memberikan hasil (*outcome*) sama atau melampaui harapan pelanggan, sedangkan ketidakpuasan timbul apabila hasil yang diperoleh tidak memenuhi harapan pelanggan.

Kualitas Pelayanan

1. Pengertian Kualitas Pelayanan

Parasuraman (2006) menyatakan bahwa kualitas pelayanan publik adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain yang dilakukan guna memenuhi kepentingan orang banyak.

Menurut Garvin (Tjiptono, 2011) ada lima macam perspektif kualitas yang berkembang. Kelima macam perspektif inilah yang dapat menjelaskan mengapa kualitas bisa diartikan beraneka ragam. Adapun lima macam perspektif kualitas tersebut adalah *transcendental approach*, *product based approach*, *User based*

approach, manufacturing based approach, value based approach. Menurut Tjiptono, (2011) terdapat 5 (lima) dimensi kualitas jasa yang dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Bukti langsung (*tangible*), yaitu meliputi fasilitas fisik, perlengkapan pegawai dan sarana komunikasi.
- b. Keandalan (*reliability*), yaitu kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan.
- c. Daya tanggap (*responsiveness*), yaitu keinginan para pegawai untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap.
- d. Jaminan (*assurance*) mencakup pengetahuan, kemampuan kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para pegawai, bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan.
- e. Empati (*emphaty*), yaitu meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan para pelanggan.

Atribut-atribut yang ikut menentukan kualitas pelayanan publik tersebut. Ciri-ciri atau atribut-atribut tersebut yaitu antara lain:

- a. Ketepatan waktu pelayanan, yang meliputi waktu tunggu dan waktu proses;
- b. Akurasi pelayanan, yang meliputi bebas dari kesalahan;
- c. Kesopanan, keramahan, perhatian dan persahabatan dalam memberikan pelayanan;
- d. Kemudahan mendapatkan pelayanan, misalnya banyaknya petugas yang melayani dan banyaknya fasilitas pendukung seperti komputer;
- e. Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruang tempat pelayanan, tempat parkir dan ketersediaan informasi

PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil pengujian regresi linier berganda dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -0,2497 + 0,138 X_1 + 0,447 X_2 + 0,350 X_3 + 0,116 X_4 + 0,112 X_5$$

Model regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstan adalah sebesar -0,2497 artinya kepuasan penumpang walaupun tanpa dipengaruhi oleh variabel keandalan, daya tanggap, kepastian, empathy dan bukti fisik mempunyai pengaruh negatif sebesar -0,2497.
2. Nilai koefisien regresi variabel keandalan adalah sebesar 0,138. Artinya pengaruh variabel keandalan terhadap kepuasan penumpang adalah positif. Artinya semakin tinggi keandalan, maka kepuasan penumpang akan meningkat sebesar 0,138.
3. Nilai koefisien regresi variabel daya tanggap adalah sebesar 0,447. Artinya pengaruh variabel daya tanggap terhadap kepuasan penumpang adalah positif. Artinya semakin tinggi daya tanggap, maka kepuasan penumpang akan meningkat sebesar 0,447.

4. Nilai koefisien regresi variabel kepastian adalah sebesar 0,350. Artinya pengaruh variabel kepastian terhadap kepuasan penumpang adalah positif. Artinya semakin tinggi kepastian, maka kepuasan penumpang akan meningkat sebesar 0,350.
5. Nilai koefisien regresi variabel empathy adalah sebesar 0,116. Artinya pengaruh variabel empathy terhadap kepuasan penumpang adalah positif. Artinya semakin tinggi empathy, maka kepuasan penumpang akan meningkat sebesar 0,116.
6. Nilai koefisien regresi variabel bukti fisik adalah sebesar 0,112. Artinya pengaruh variabel bukti fisik terhadap kepuasan penumpang adalah positif. Artinya semakin tinggi bukti fisik, maka kepuasan penumpang akan meningkat sebesar 0,112
7. Dari kelima variabel tersebut, daya tanggap merupakan variabel paling dominan mempengaruhi kepuasan penumpang, karena nilai koefisiennya paling tinggi yaitu sebesar 0,447.

Uji F

Tabel 1. Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	242.588	5	48.518	175.903	.000 ^b
Residual	16.273	59	.276		
Total	258.862	64			

a. Dependent Variable: kepuasan_masyarakat

b. Predictors: (Constant), Bukti_fisik, kepastian, daya_tanggap, Keandalan, empathy

Sumber: Hasil Olah Data (SPSS 20.0)

Berdasarkan hasil analisis uji F diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 175,903 > 2,37 dengan probabilitas sebesar 0,000 < 0,05 maka H_0

ditolak berarti keandalan, daya tanggap, kepastian, empathy dan bukti fisik secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepuasan penumpang KA.Madiun Jaya di Stasiun Sragen, maka hipotesis 1 terbukti.

Uji t

Tabel 2. Hasil Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-2.497	.927		-2.694	.009
Keandalan	.138	.049	.144	2.820	.007
daya_tanggap	.447	.051	.446	8.816	.000
kepastian	.350	.042	.395	8.297	.000
emphaty	.116	.053	.116	2.380	.006
Bukti_fisik	.112	.040	.132	2.802	.007

a. Dependent Variable: kepuasan_masyarakat

Sumber: Hasil Olah Data (SPSS 20.0)

1. Uji pengaruh keandalan terhadap kepuasan penumpang

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} (2,820) > t_{tabel} (1,993) tingkat signifikansi 0,007 < 0,05, maka H_0 ditolak berarti variabel keandalan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan penumpang, maka hipotesis 2 terbukti.

2. Uji pengaruh daya tanggap terhadap kepuasan penumpang

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} (8,816) > t_{tabel} (1,993) tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak berarti variabel daya tanggap mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan penumpang, maka hipotesis 3 terbukti.

3. Uji pengaruh keastian terhadap kepuasan penumpang

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} (8,297) > t_{tabel} (1,993) tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$, maka H_0 ditolak berarti variabel kepastian mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan penumpang, maka hipotesis 4 terbukti.

4. Uji pengaruh empathy terhadap kepuasan penumpang

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} (2,380) > t_{tabel} (1,993) tingkat signifikansi $0,006 < 0,05$, maka H_0 ditolak berarti variabel empathy mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan penumpang, maka hipotesis 5 terbukti.

5. Uji pengaruh bukti fisik terhadap kepuasan penumpang

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} (2,802) > t_{tabel} (1,993) tingkat signifikansi $0,007 < 0,05$, maka H_0 ditolak berarti variabel bukti fisik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan penumpang, maka hipotesis 6 terbukti.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi yaitu untuk mengukur proporsi atau presentasi sumbangan dari seluruh variabel bebas (X) yang terdapat

dalam model regresi terhadap variabel terikat (Y). Uji R^2 didapatkan hasil sebesar 0.937 yang berarti variabilitas variabel independen sebesar 93,7% sedangkan sisanya (6,3%) dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak ikut terobservasi, misalnya variabel harga, lokasi dan reputasi perusahaan.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya peningkatan keandalan lebih diperhatikan lagi, misalnya dengan cara karyawan dapat bekerja dengan cepat misalnya dalam memberikan pelayanan cepat saat membeli tiket, karyawan tidak berbelit-belit dalam memberikan pelayanan, karyawan mampu menggunakan sarana dan prasarana dengan baik.
2. Sebaiknya daya tanggap lebih ditingkatkan kembali karena mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan penumpang KA.Madiun Jaya di Stasiun Sragen. hal ini dapat dilakukan dengan cara pelayanan yang diberikan KA.Madiun Jaya di Stasiun Sragen cepat dan professional, karyawan bersikap ramah terhadap semua penumpang, karyawan dapat merespon keluhan dengan cepat.
3. Seharusnya kepastian pelayanan lebih ditingkatkan kembali agar kepuasan penumpang KA.Madiun Jaya di Stasiun Sragen dapat meningkat, seperti dengan cara pelayanan yang diberikan kepada penumpang KA.Madiun Jaya di Stasiun

Sragen dapat optimal, pelayanan mudah dan sederhana.

4. Sebaiknya empathy lebih diutamakan kembali, hal ini dapat dilakukan dengan cara karyawan memberikan perhatian khusus pada setiap penumpang KA.Madiun Jaya di Stasiun Sragen dan karyawan memberikan pelayanan tanpa pandang bulu.
5. Sebaiknya bukti fisik lebih ditingkatkan kembali, hal ini dapat dilakukan dengan cara informasi yang disampaikan kepada penumpang dapat tersampaikan dengan jelas, adanya prosedur yang jelas dalam menggunakan pelayanan KA.Madiun Jaya di Stasiun Sragen dan adanya sarana peralatan yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisubrata, 2001. *Pelayanan Publik Yang Baik Dan Profesional*. Jakarta:Salemba Empat.
- Affudin. M, 2009. *Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT (Persero) Angkasa Pura I di Bandar Udara Ahmad Yani Semarang*, Tesis S2, Program MM, Universitas Terbuka, tidak dipublikasikan.
- Andrew, Achmad Fauzi dan Sunarti, 2015. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan (Survei Pada Penumpang Kereta Api Argo Bromo Anggrek Jurusan Surabaya-Jakarta)*. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*/Vol. 21 No. 1 April 2015]
- Arikunto Suharsimi, 2001, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi Rineka Cipta , Jakarta.
- Aryani Dwi Dan Febrina Rosinta. 2010. *Pengaruh Kualitas Layanan terhadap Kepuasan Pelanggan dalam Membentuk Loyalitas Pelanggan*. *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Mei—Agus 2010, hlm. 114-126
- Enggel, J.F ., et.,al (1990), *Marketing* 6 th ad. Chicago: The Dryden Press.
- Fandy Tjiptono dan Gregorius Chandra. 2011.*Service, Quality and Satisfaction*.edisi 3. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Fery dan Susi, 2013. *Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Kredit (Studi kasus BPR Arthaguna Sejahtera)*, Pasca Sarjana Manajemen Perbankan Universitas Gunadarma
- Gilbert, G.R. et.al. 2004. *Measuring Customer Satisfaction in The Fast Food Industry: A cross-national Approach*. *The Journal of Services Marketing*, 18
- Hadi, Sutrisno, 2001. *Metodologi Research*. Yogyakarta : Andi Yogyakarta.
- Harry P. Hatry, 2003. *Pelayanan Publik*. Edisi Revisi Rineka Cipta, Jakarta.
- Imam Ghozali. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*.
- Iqbal Miftakhul Ulum, 2013. *Analisis Pengaruh Harapan Pelanggan Dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan Jasa Transportasi Kereta Api Logawa Pada PT Kereta Api Indonesia Daop IX Jember*. Skripsi. UNIVERSITAS JEMBER – FAKULTAS EKONOMI
- Kotler, Philip. 2000. *Manajemen Pemasaran*. Jilid Pertama. Edisi Milenium. Alih Bahasa : Hendra Teguh, S.E., AK dan Ronny A. Rusli, S.E.,AK. Jakarta : PT Prenhalindo.
- Kotler, Philip. 2001. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Kuncoro, Mudrajad (2003). *Metode Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Edisi 1, AMP YKPN, Yogyakarta
- Lukman, Sampara. 2002. *Karakteristik Dasar Dari Sistem Kualitas Modern*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mahmudi, 2005. *Pelayanan Publik*. Jakarta: PT Prenhalindo.
- Maryam, Siti. *Statistik Induktif*. Islam Batik University Press, Surakarta
- Mega Prasada Putra, 2013. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan*

- Konsumen Dalam Menggunakan Jasa Transportasi Kereta Api Madiun Jaya (Studi Pada PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi VII Madiun). *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang*
- Moh. Fakhrrur Rozi, 2007. Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Pt Kereta Api Indonesia (PT KAI) Terhadap Kepuasan Konsumen (Studi Pada KA Eksekutif Gajayana Di Malang). Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Malang
- Nasution, 2004. *Statistik Induktif*, BPFE UGM, Yogyakarta
- Oliver, Richard L., 2010, "Cognitive, Affective and Attribute Base of the Satisfaction Response", *Journal of Consumer Research*. Vol 20, December 1993. <http://www.uta.edu/faculty/richarme/MARK%205342/Articles/Oliver%201993.pdf> [18 Maret 2013]
- Parasuraman, A, V. A. Zeithaml, dan L.L. Berry., 1988, SERVQUAL: A Multiple-Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality, *Journal of Retailing*, Vol. 64, No. 1
- Parasuraman, A., Valerie A. Zeithaml and Leonard L. Berry (2005), A Conceptual Model of Service Quality and its Implications for future research". *Journal of Marketing* Vol. 49 (Fall), pp. 41-50.
- Rangkuti, Fredy, 2002, *Teknik Mengukur Dan Strategi Meningkatkan Kepuasan Pelanggan Dan Analisis Kasus PLN-JP*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Rustika Atmawati M. Wahyuddi, 2009, Penelitian dengan judul "Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Matahari Departement Store di Solo Grand Mall". Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sudjana, 2001, *Metoda Statistika*, Tarsito, Bandung.
- Sumarmi and Wahyuni, 2006, *Penilaian Berdasarkan Angket atau Kuesioner*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Supranto J, 2001, *Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelanggan*, Rineka Cipta, Jakarta
- Supriatna, 2000. *Kegiatan pelayanan publik*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Susasminto, 2011. *Pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan dan loyalitas konsumen CIRCLEK di Surabaya*. Jurnal sekolah tinggi ilmu ekonomi PERBANAS Surabaya
- Triguno, 2002. *Kualitas Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wasistiono, 2001. *Kebutuhan dan Pelayanan Masyarakat*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Yulian, Mochamad Rizki, (2013), Moh. Fakhrrur Rozi, (2007), Fery dan Susi, (2013), Andrew, Achmad Fauzi dan Sunarti, (2015)
- Yulian, Mochamad Rizki, 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Pt. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) Persero Terhadap Kepuasan Konsumen (Studi kasus KA Eksekutif Argo Parahyangan). Fakultas Bisnis Dan Manajemen Universitas Widyatama
- Zeithaml, Valerie, A. dan Marry Jo Bitner, 2006, *Services Marketing : Integrating Customer Focus Across The Firm*. International Edition, McGraw-Hill Companies Inc, New York

ANALISIS AKSES KREDIT USAHA SEKTOR INFORMAL DI KOTA PONOROGO

Oleh :

KHUSNATUL ZULFA WAFIROTIN¹⁾
ASIS RIAT WINANTO²⁾

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

E-mail : khusnafeump@gmail.com¹⁾

akademik@umpo.ac.id²⁾

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi: a) Sumber modal yang digunakan untuk memulai dan mengembangkan usaha oleh pedagang kakilima di kota Ponorogo serta pengelompokannya. b) Jenis-jenis pinjaman atau kredit yang digunakan oleh pedagang kakilima di kota Ponorogo c) lembaga yang dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan oleh pedagang kakilima di kota Ponorogo. Untuk mencapai tujuan penelitian dilakukan pengumpulan data dengan wawancara secara mendalam (*indepth interview*). Sampel penelitian adalah para pedagang kakilima di alun-alun kota Ponorogo. Sampel diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling* dan dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa mayoritas modal yang digunakan untuk memulai usaha maupun mengembangkan usaha oleh pedagang kakilima yang ada di alun-alun kota Ponorogo berasal dari modal sendiri dan tabungan sendiri sebagian serta kadang-kadang pinjam kepada temannya sesama pedagang kakilima. Mereka tidak berani pinjam ke bank karena takut bunga modal yang menurut mereka sangat tinggi dan sangat membebani. Adapun lembaga yang dimanfaatkan oleh pedagang kakilima di alun-alun kota Ponorogo untuk mendanai modal usahanya mayoritas adalah lembaga keuangan mikro informal seperti arisan dan LSM, kelompok paguyuban serta kredit program.

Kata Kunci: *Akseskredit, ektor*

PENDAHULUAN

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pertumbuhan ekonomi kabupaten Ponorogo tahun 2012 mencapai 6,52%. Peran sektor pertanian mencapai 33,84%, peran sektor perdagangan, hotel dan restoran mencapai 29,42%. Sumbangan sektor perdagangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ponorogo cukup besar dan menduduki urutan kedua setelah sektor Pertanian yang berada pada urutan pertama. Di sisi lain, penduduk dengan mata pencaharian pedagang pada tahun 2012 mencapai 29,42% dan menduduki ranking kedua setelah sektor pertanian dengan proporsi 33,84% (Ponorogo dalam Angka, 2013).

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi: a) Sumber modal yang digunakan untuk memulai dan mengembangkan usaha oleh pedagang kakilima di kota Ponorogo serta pengelompokannya. b) Jenis-jenis pinjaman atau kredit yang digunakan oleh pedagang kakilima di kota Ponorogo c) lembaga yang dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan oleh pedagang kakilima di kota Ponorogo.

KAJIAN LITERATUR

Pecking Order Theory

Model ini mengasumsikan bahwa perusahaan cenderung mempertimbangkan risiko dalam hal pendanaan. Menurut Myers

(1984) dan Myers and Majluf (1984), dalam *pecking order theory*:

1. Perusahaan cenderung memilih sumber pendanaan internal terlebih dulu.
2. Perusahaan akan menyesuaikan target *dividend payout* terhadap *investment opportunity*.
3. Kebijakan dividen bersifat *sticky*, di mana fluktuasi profitabilitas dan peluang investasi berdampak pada aliran kas internal dapat lebih besar atau lebih kecil dari pengeluaran investasi.
4. Bila *external financing* dibutuhkan, perusahaan akan lebih memilih sumber dana hutang yang dinilai lebih aman dan penerbitan ekuitas sebagai alternatif terakhir.

Trade-Off Theory

Teori ini mengasumsikan bahwa struktur modal perusahaan merupakan keseimbangan antara keuntungan penggunaan hutang dengan biaya kebangkrutan dan biaya agensi (Myers, 1984). Penggunaan hutang di samping mempunyai kelemahan, juga memiliki beberapa manfaat bagi perusahaan (Brigham, 1999: 110):

1. Adanya biaya bunga yang mengurangi penghasilan kena pajak sehingga biaya hutang menjadi lebih rendah.
2. Kreditur hanya mendapat biaya bunga yang bersifat relatif tetap, kelebihan keuntungan akan menjadi klaim bagi pemilik perusahaan.
3. *Bondholder* tidak memiliki suara sehingga pemilik perusahaan dapat menjalankan perusahaan tanpa intervensi *bondholder*.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer diperoleh dari pengamatan langsung, wawancara dengan para pedagang di alun-alun kota Ponorogo.

Penggalan data dan informasi menggunakan teknik wawancara secara langsung yang dipandu dengan kuesioner dan metode penentuan responden menggunakan metode *purposive sampling*. Adapun judgment yang digunakan adalah ; 1) pedagang yang berjualan di alun-alun kota Ponorogo mulai sore sampai dengan malam hari 2) Pedagang yang lama berjualan lebih dari lima tahun 3) pedagang yang omzet penjualannya kurang dari Rp 10 juta. Guna mendukung data tersebut, maka sampel atau informan dalam penelitian ini sebanyak dua puluh (20) pedagang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pedagang di alun-alun Kota Ponorogo merupakan salah satu jenis usaha yang termasuk dalam golongan sektor informal pedagang kaki lima. Sesuai dengan pendapat Kartini Kartono dkk. (1980), pedagang warung kaki lima mempunyai ciri dan karakteristik antara lain: a) Mereka umumnya menjajakan barang dagangannya dengan gelaran tikar di pinggir jalan yang dianggap strategis; b) Mereka menjajakan makanan, minuman, dan jajanan serta barang konsumsi lainnya; c) Mereka bermodal kecil, khususnya pada saat memulai usaha tidak membutuhkan modal yang besar; d) Kualitas makanan, minuman dan jajanan yang disajikan tidak ada standarnya; e) Mereka umumnya merupakan usaha "family enterprise" dimana terdapat

anggota keluarga membantu usaha tersebut; f) Mereka menjalankan usaha mulai sore hari sampai tengah malam namun tidak menunjukkan pola yang tetap, yaitu kadang-kadang libur jika kondisi cuaca tidak mendukung; dan g) Mereka mempunyai jiwa entrepreneurship yang kuat, walaupun saling meniru usaha pedagang lain mereka tetap mampu bertahan dalam menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Sesuai dengan pendapat dari Mulyanto (2007), pedagang kakilima dapat digolongkan sebagai bentuk wirausaha karena mulai perencanaan membuka usaha, pengadaan kelengkapan dan kebutuhan usaha, menjalankan usaha, sampai dengan mengontrol dan mengendalikan usaha dilakukan secara mandiri. Selain itu, sesuai dengan pandangan Bromley (Mulyanto, 2007), semakin menjamurnya pedagang kakilima merupakan proses migrasi dari daerah pedesaan ke perkotaan, yaitu ditunjukkan dari adanya pedagang kakilima yang berasal dari luar kota Ponorogo. Kehadiran pedagang kakilima di alun-alun kota Ponorogo sebagai akibat dari situasi pertumbuhan tenaga kerja yang tinggi di kota. Mereka memasuki usaha ini, pada mulanya bertujuan untuk mencari kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan namun secara bertahap usaha mereka bisa berkembang dan menjadi usaha berskala menengah bahkan diharapkan bisa berskala usaha besar. Ada 3 fenomena penting yang perlu disikapi sedang terjadi dalam ketenagakerjaan pada berbagai kota di negara yang sedang berkembang (Asis 2014) yaitu :

(1) Kecenderungan semakin meningkatnya peranan usaha sektor informal dalam ketenagakerjaan dan mampu memberikan

pendapatan bagi pelakunya.(2) Kecenderungan fleksibelnya sektor informal dalam pemberdayaan pada dasarnya merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi dan politik yang merangkum nilai-nilai sosial, menerima tenaga kerja dari berbagai latar belakang yang berbeda (jenis kelamin, umur, pendidikan, ketrampilan/keahlian dan modal); dan (3) Adanya peluang sektor informal untuk berkembang atau produktif sama seperti sektor formal. Pedagang kakilima di alun-alun kota Ponorogo rata-rata membuka usahanya mulai sore hari (sekitar jam 16.00) sampai dengan dini hari (sekitar jam 01.00). Tempat usaha mereka sudah ditandai dengan perlengkapan untuk usaha yang mereka tinggal (tidak dibawa pulang), misalnya meja, tiang penyangga, dan terpal. Mereka sudah percaya bahwa tempat usahanya tidak dipakai orang lain dan perlengkapan yang mereka tinggal juga tidak akan diambil orang lain. Diantara para pedagang kakilima di alun-alun kota Ponorogo tersebut sering saling membantu jika terdapat pedagang yang kekurangan dan membutuhkan bantuan, misalnya pada saat kehabisan air bersih, menukar uang recehan, dan berbarengan pulang dengan satu kendaraan. Saling membangun kepercayaan dan saling bantu diantara pedagang kakilima tersebut dapat menjadi pondasi untuk berjalannya modal sosial diantara mereka. Pedagang kakilima di alun-alun kota Ponorogo mempunyai semangat usaha dan jiwa pantang menyerah. Mereka mayoritas juga berjualan barang di tempat lain baru sore harinya menjual dagangannya di alun-alun kota Ponorogo. Usaha pedagang kakilima di alun-alun kota

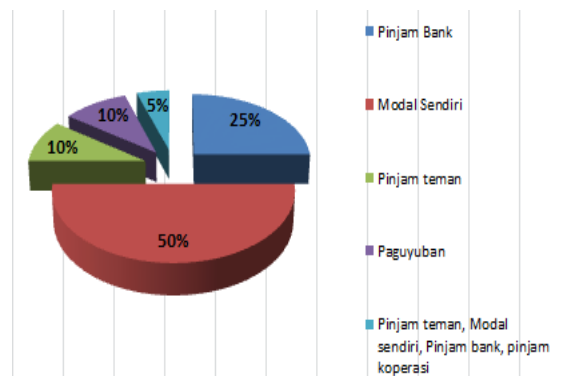
Ponorogo ini mereka tekuni ada yang sudah sampai bertahun-tahun, bahkan sudah ada yang menjalani sampai 10 tahun lebih. Hal ini menunjukkan bahwa usaha pedagang kakilima ini masih mampu bertahan dan telah mampu menghidupi keluarga mereka.

Sumber Modal Usaha

Modal usaha para pedagang kakilima di alun-alun kota Ponorogo mayoritas berasal dari modal sendiri atau tabungan sendiri, dan untuk pengembangan usaha mereka mayoritas tidak pinjam ke bank atau lembaga keuangan formal lainnya, apalagi bank thithil yang identik dengan bunga tinggi, mereka sudah banyak tahu dan mampu berfikir logis tentang bunga utang, sehingga mereka memutuskan untuk tidak pinjam ke bank maupun lembaga keuangan formal lainnya yang menurut mereka cenderung memungut biaya tinggi. Mereka lebih suka memanfaatkan lembaga keuangan informal seperti arisan, paguyuban serta pinjam kepada teman, karena dengan lembaga ini mereka lebih nyaman dan tidak takut dengan beban bunga yang nanti akan membebani mereka dan menjadi mereka tidak nyaman dalam berusaha. Walaupun jumlah dana yang mereka peroleh tidak banyak tetapi cukup untuk bisa menambah modal mereka secara bertahap sesuai dengan kemampuan mereka dalam mengembalikan pinjaman. Hal ini sesuai dengan pendapat/ penelitian Hasil penelitian Timothy Bates(1997) mengenai imigran dari Cina dan Korea yang menjadi wirausahawan di Amerika menunjukkan selain dari lembaga keuangan sumber kredit juga dapat berasal dari keluarga dan teman. Menurut Kadri Cemil Akyqz, at al. (2004) mengenai pembiayaan UMKM disektor

industri produk hasil-hasil hutan di Turkey menunjukkan selain dari lembaga keuangan, keluarga teman dan relasi, kredit juga dapat bersumber dari tabungan pemilik. Sumber modal usaha para pedagang kakilima di alun-alun kota Ponorogo dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar 2.



Modal Sendiri

Menurut Mardiyatmo (2008) mengatakan bahwa modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik usaha itu sendiri. Modal sendiri terdiri dari tabungan, sumbangan, hibah, saudara, dan lain sebagainya.

Kelebihan modal sendiri adalah:

- Tidak ada biaya seperti biaya bunga atau biaya administrasi sehingga tidak menjadi beban perusahaan;
- Tidak tergantung pada pihak lain, artinya perolehan dana diperoleh dari setoran pemilik modal;
- Tidak memerlukan persyaratan yang rumit dan memakan waktu yang relatif lama;
- Tidak ada keharusan pengembalian modal, artinya modal yang ditanamkan pemilik akan tertanam lama dan tidak ada masalah seandainya pemilik modal mau mengalihkan ke pihak lain.

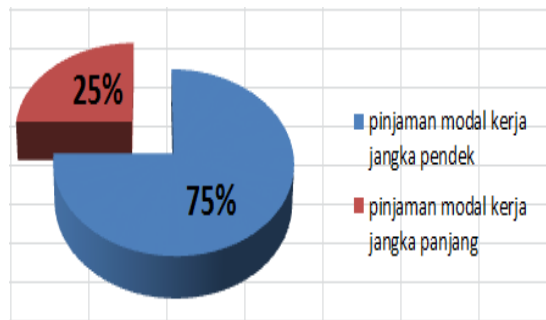
Kekurangan modal sendiri adalah:

- Jumlahnya terbatas, artinya untuk memperoleh dalam jumlah tertentu sangat tergantung dari pemilik dan jumlahnya relatif terbatas;
- Perolehan modal sendiri dalam jumlah tertentu dari calon pemilik baru (calon pemegang saham baru) sulit karena mereka akan mempertimbangkan kinerja dan prospek usahanya ;
- Kurang motivasi pemilik, artinya pemilik usaha yang menggunakan modal sendiri motivasi usahanya lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan modal asing.

Jenis dan Jangka Waktu Pinjaman

Pedagang kakilima di alun-alun kota Ponorogo dalam mengembangkan usaha mayoritas dengan modal sendiri (50%), namun ada yang pinjam ke Bank walaupun hanya 25% dari responden, dan sisanya ada yang pinjam teman dan ada yang dari arisan serta paguyuban maupun koperasi. Mereka yang pinjam ke bank jenis pinjamannya adalah pinjaman modal kerja jangka pendek dan menengah, yaitu kredit modal kerja untuk menambah modal usaha yang jangka waktunya kurang dari satu tahun dan yang menengah kurang dari lima tahun. Mereka pinjam sifatnya hanya santai tidak “ngoyo” yang penting bisa untuk menambah barang dagangan mereka sehingga mereka sesuaikan dengan kemampuan untuk mengembalikan pinjaman. Jangka waktu pinjaman responden dapat dilihat pada gambar 3 berikut.

Gambar 3. Rekapitulasi Jangka waktu pinjaman responden



Modal adalah merupakan faktor penentu utama dalam dunia usaha. Pengusaha khususnya pada usaha sektor informal sering kita jumpai begitu banyak masyarakat yang berpenghasilan rendah masuk pada sektor ini hanya karena masalah modal. Banyak masyarakat yang mempunyai etos kerja yang tinggi tapi tidak memiliki modal yang cukup akhirnya untuk memenuhi keinginannya mereka melakukan pinjaman dengan tingkat bunga yang tinggi. Masyarakat bawah kebanyakan mereka dalam melakukan pinjaman modal (uang) mengalami kesulitan terutama mengenai pengurusan administrasi dan persyaratan yang berbelit-belit.

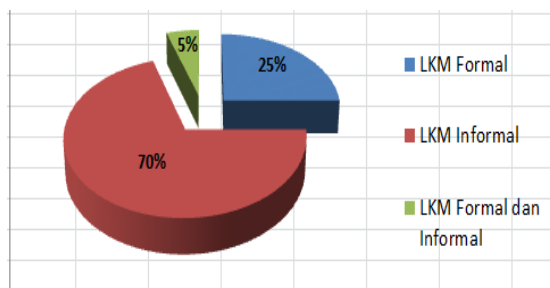
Pedagang di alun-alun kota Ponorogoyang enggan menggunakan jasa bank itu karena takut dengan bunga dan enggan mengurus persyaratan-persyaratan kredit yang harus dipenuhi ketika akan mengajukan kredit.

Lembaga yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan oleh pedagang kakilima di alun-alun kota Ponorogo?

Pedagang kakilima di alun-alun kota Ponorogo merupakan salah satu jenis usaha yang termasuk dalam golongan sektor informal yang mempunyai ciri dan karakteristik tertentu dan juga digolongkan sebagai bentuk wirausaha karena mulai perencanaan membuka usaha, pengadaan kelengkapan dan kebutuhan usaha,

menjalankan usaha, sampai dengan mengontrol dan mengendalikan usaha dilakukan secara mandiri. Pedagang kakilima di alun-alun kota Ponorogo saling membangun kepercayaan dan saling bantu diantara mereka, Selain itu, mereka mempunyai semangat usaha dan jiwa pantang menyerah. Meskipun mereka berjualan di sore sampai malam hari, mereka juga berusaha buka dilain tempat di pagi harinya., mereka tetap bersemangat untuk tetap berusaha dan melihat selalu peluang membuka usaha baru. Usaha oleh pedagang kakilima di alun-alun kota Ponorogo telah ditekuni sampai bertahun-tahun, bahkan sudah ada yang menjalani sampai 10 tahun lebih. Hal ini menunjukkan bahwa usaha pedagang kakilima di alun-alun kota Ponorogo masih mampu bertahan dan telah mampu menghidupi keluarga mereka. Dalam hal pengembangan usaha mereka mayoritas memanfaatkan lembaga keuangan mikro yang informal seperti arisan, paguyuban, dibandingkan dengan yang formal seperti Bank maupun koperasi, hal ini sebagaimana bisa dilihat dalam gambar 4 berikut.

Gambar 4. Lembaga yang dimanfaatkan responden



Hasil usaha pedagang kakilima di alun-alun kota Ponorogo tersebut secara umum mereka gunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, memperbaiki rumah, dan

untuk biaya pendidikan anak. Selain itu, hasil usaha pedagang kakilima ini juga mereka gunakan untuk membeli barang konsumtif lainnya, misalnya televisi, hand phone, baju atau pakaian, dan kendaraan sepeda motor. Sampai saat ini mereka tetap percaya bahwa usaha pedagang kakilima ini masih mampu bertahan dan mampu menghadapi persaingan di masa akan datang. Keyakinan para pedagang tersebut dengan alasan bahwa masyarakat Ponorogo suka santai dan suka jalan-jalan ke alun-alun kota Ponorogo terutama tiap malam hari, karena ke alun-alun adalah bagi pengunjung merupakan tempat rekreasi yang murah meriah.

Harapan Responden terhadap Pemerintah

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Berbagai tanggapan dan persepsi responden mengenai apa dan bagaimana harapan mereka dalam meningkatkan pemberdayaan usaha sektor informal, berikut harapan-harapan yang dimaksud: 1) Pemberian pelatihan dalam meningkatkan pendapatan, 2) bantuan modal usaha, 3) cara-cara pengelolaan usaha dan 4) pendampingan usaha sangat diharapkan dari pemerintah agar usaha mereka bisa lebih eksis dan bisa terus berkembang.

Manurung (2006) mengatakan dalam upaya pembinaan dan pengembangan usaha kecil dapat juga dilakukan dengan menerapkan system pembinaan melalui:

1. Kelembagaan dan manajemen dengan menggunakan system dan prosedur organisasi yang baku.
2. Peningkatan sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan serta memberikan transfer pengetahuan tentang mengelola dunia usaha.
3. Permodalan, hal ini dilakukan dengan cara membantu akses permodalan.
4. Distribusi/pemasaran, dengan memberikan bantuan informasi pasar dan mengembangkan jaringan distribusi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pedagang kakilima di alun-alun Kota Ponorogo merupakan salah satu jenis usaha yang termasuk dalam golongan sektor informal pedagang kaki lima yang mempunyai ciri dan karakteristik tertentu dan juga digolongkan sebagai bentuk wirausaha karena mulai perencanaan membuka usaha, pengadaan kelengkapan dan kebutuhan usaha, menjalankan usaha, sampai dengan mengontrol dan mengendalikan usaha dilakukan secara mandiri. Usaha pedagang kakilima di alun-alun kota Ponorogo ini telah ditekuni sampai bertahun-tahun, bahkan sudah ada yang menjalani sampai 10 tahun lebih. Hal ini menunjukkan bahwa usahanya masih mampu bertahan dan telah mampu menghidupi keluarga mereka.
2. Sumber modal usahapara pedagang kakilima di alun-alun kota Ponorogo mayoritas berasal dari modal sendiri atau tabungan sendiri. Untuk pengembangan usaha mereka mayoritas tidak pinjam ke bank atau lembaga keuangan formal

lainnya, apalagi bank thithil yang identik dengan bunga tinggi, mereka sudah banyak tahu dan mampu berfikir logis tentang bunga utang, sehingga mereka memutuskan untuk tidak pinjam ke bank maupun lembaga keuangan formal lainnya. Mereka lebih suka memanfaatkan lembaga keuangan informal seperti arisan, paguyuban dsb, karena dengan lembaga ini mereka lebih nyaman dan tidak takut dengan beban bunga yang nanti akan membebani mereka dan menjadi mereka tidak nyaman dalam berusaha.

3. Jenis pinjaman yang mereka lakukan adalah pinjaman modal kerja jangka pendek dan jangka menengah.

Saran

1. Pemerintah kabupaten Ponorogo diharapkan memberikan 1) pelatihan dalam meningkatkan pendapatan, 2) bantuan modal usaha, 3) cara-cara pengelolaan usaha dan 4) pendampingan usaha, agar usaha mereka bisa lebih eksis dan bisa terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Asis riat Winanto SE,ME, Pemberdayaan kelompok usaha informal melalui lembaga keuangan mikro
- Bermacam Lembaga Keuangan Mikro, http://www.wirausaha.com/bisnis/uang/bermacam_lembaga_keuangan_mikro.html
- Kartini Kartono, dkk., 1980, "Pedagang Kaki Lima sebagai Realita Urbanisasi dalam Rangka Menuju Bandung Kota Indah", FISIP Universitas Katolik Parahiyangan, Bandung.
- Kompas 06-04-2015.

Mukbar, Deni, *Apakah orang miskin layak dipercaya? Yakinkah memberikan pinjaman terhadap orang miskin?*

<http://dienim.wordpress.com/2008/03/26/1embaga-keuangan-mikro-untuksiapa/>

Mulyanto, 2007, "Pengaruh Motivasi dan Kemampuan Manajerial Terhadap Kinerja Usaha Pedagang Kaki Lima Menetap (Suatu Survei pada Pusat Perdagangan dan Wisata Di Kota Surakarta)", dalam Jurnal BENEFIT, Volume 11, Nomor 1, Juni 2007, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Ponorogo dalam Angka 2012 dan 2013, Badan Pusat Statistik Kota Ponorogo

Shyam-Sunder.Laksmi., Stewart C. Myers, (1999), *Testing Static Trade-Off Against Pecking Order Models of Capital Structure* Journal of Finance, vol51

Thies., Mark Klock., (1992), *Determinant of Capital Structure*, Review of Financial Economics (Spring)

Taswan SE Akuntansi Perbankan YKPN

Titman, S., Roberto Wessels., (1988), *The Determinant of Capital Structure Choice* Journal of Finance, vol 43, March

Wiharty, Dinny., (2002). *Analisis Perilaku Keputusan Pendanaan: Pengujian Pecking Order Theory di Bursa Efek Jakarta (periode Sebelum dan Selama Krisis)*. Tesis S2 tidak dipublikasikan. Program Studi Magister Manajemen. Jurusan Ilmu-Ilmu Sosial. UGM Yogyakarta

Wibowo, P, & Munawar, W., *Studi Kredit Kecil Perkotaan di Kota Yogyakarta*, SMERU, Juni 2002

**THE COMPETITIVE ADVANTAGE OF FAMILY FIRM CHINESE ETHNIC:
CASE STUDY IN CHINATOWN IN SMALL CITY INDONESIA**

Oleh :
HADI SUMARSONO¹⁾
TITI RAPINI²⁾

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

ABSTRACT

This study set on the phenomenon of Chinese ethnic dominance of family business in Ponorogo City. Such dominance is due to the competitive advantage of family firms of Chinese ethnic. Based on the phenomenon exists, this study aims to provide an overview of what they collected from the Chinese ethnic superior and how they manage those resources to gain competitive advantage. Resource-based view theory is used in this study because this theory is very relevant to reveal how resources can be used to create a competitive advantage. This theory is also relevant in explaining why a particular company is superior to any other company. Resource-based view emphasize on internal factors as a source of sustained competitive advantage. The snowball sampling technique is used to determine informants who will be interviewed. Analysis of the data using a qualitative approach and process analysis-interpretation-conceptualization inductive done to produce the results of a study of the theoretical concepts on the phenomenon exists. The result shows that success of the Chinese ethnic is not specified on the expertise and technical skills in the mastery of their fields, but more on the resources that have soft skills required in business trade. Thing that makes them stand out is the excellent attitude and work ethic among Chinese ethnic Ponorogo owned. Attitude and work ethic are formed and embedded in human resources through education and learning in the family. The results are expected to able to provide guidance to small family company in creating competitive advantage of available resources.

Keyword: *Resource Based View, Keunggulan Kompetitif, Etnis Tionghoa, Sosial Capital, Human Capital*

PENDAHULUAN

Etnis Cina atau Tionghoa (selanjutnya disebut etnis Tionghoa)¹ telah memberikan peranan penting terhadap perekonomian Indonesia. Walaupun jumlahnya sekitar 3,5% dari seluruh total populasi penduduk Indonesia, ternyata etnis Tionghoa mampu mengendalikan 73% perekonomian Indonesia (Wulandari dalam Permadi dan Kuswahyono, 2007). Bahkan tidak kurang dari 50 persen GDP Indonesia tahun 1995 disumbangkan

oleh Etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa sangat mendominasi perekonomian Indonesia melalui perdagangan. Hal ini terlihat dari hampir di setiap kota di Indonesia memiliki *pecinan* yang menjadi jantung perdagangan kota. Banyaknya pusat-pusat perbelanjaan, ruko-ruko dan pertokoan di jalan utama di hampir seluruh daerah di Indonesia dimiliki dan dikelola oleh keturunan Tionghoa. Setelah dikurangi aset BUMN, *pecinan* di seluruh Indonesia menguasai 80 persen dari uang yang beredar (Marzali, 1994:40 dalam Harsono, 2002). Sama seperti etnis Tionghoa di wilayah Indonesia lainnya, perdagangan di kota Ponorogo juga dikendalikan oleh etnis Tionghoa. Etnis Tionghoa di Kota Ponorogo

¹ Seringkali terjadi kebingungan untuk menyebut orang Cina dengan sebutan *Cina, Tionghoa, Chinese* atau *Cino*. Di kalangan keturunan Cina ada keinginan kuat untuk mengganti istilah Cina dengan Tionghoa, karena sebutan etnis Cina dirasakan menyakitkan karena stereotype menyangkut pemberontakan PKI tahun 1965. (lihat Susetyo, Krisis Identitas Etnis Cina di Indonesia)

merupakan etnis minoritas dengan jumlah 1.181 jiwa. Dari jumlah tersebut, 155 orang masih merupakan warga negara asing (Ponorogo dalam angka). Walaupun merupakan etnis minoritas, namun etnis Tionghoa sangat mendominasi perdagangan di wilayah perkotaan Ponorogo. Bahkan dominasi perdagangan tersebut dikuasai oleh orang-orang tertentu yang masih mempunyai jalinan sebagai keluarga besar. Hampir sebagian besar toko-toko di jalan utama di Ponorogo dimiliki oleh keluarga tertentu dari etnis Tionghoa. Berdasarkan penelitian Harsono (2002), pengusaha etnis Tionghoa mampu mendominasi perdagangan di perkotaan Ponorogo karena mereka merupakan pengusaha-pengusaha yang tangguh dalam hal pengelolaan pertokoan yang menjual alat-alat elektronik, otomotif, perhiasan emas, toko besi, jasa foto copy-cetak foto dan percetakan. Pengusaha etnis tionghoa di Ponorogo bukan hanya mendominasi perdagangan dalam sisi jumlah tetapi juga penguasaan pasar. Dari jenis perdagangan lain seperti toko pakaian, mebel dan apotik, penguasaan pangsa pasar dimiliki oleh pengusaha etnis tionghoa. Selain mendominasi beberapa toko tertentu, pedagang etnis tionghoa juga menampung hasil-hasil pertanian dan perkebunan mulai dari *beras* sampai dengan *cengkih* dan *tembakau*. Bahkan selama ini ada persepsi dari masyarakat pribumi Ponorogo bahwa pedagang pribumi tidak mampu berdagang "*palenan*" bersaing dengan etnis Tionghoa yang mendominasi. Jika masyarakat pribumi berdagang "*palenan*" maka harganya mahal. (Harsono, 2002). Dalam bidang perdagangan, bisnis keluarga masyarakat pribumi Ponorogo

belum bisa menyaingi bisnis keluarga etnis Tionghoa. Pedagang etnis tionghoa di Ponorogo mempunyai keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki oleh pedagang pribumi. Menurut Chen, Chao dan Tjosvold (2010) strategi pengusaha etnis tionghoa untuk memperoleh keunggulan kompetitif dilakukan melalui kepemilikan sumberdaya perusahaan seperti koneksi, akses untuk memperoleh capital dan lain sebagainya. Strategi tersebut juga dibangun melalui bisnis keluarga dan jejaring bisnis antar etnis tionghoa (Dieleman, 2006). Murdiarta (2009) menemukan bahwa kegagalan pengembangan suatu usaha merupakan akibat dari kurangnya perhatian pada pengaruh jejaring sosial terhadap manfaat ekonomi. Penelitian ini memfokuskan pada kajian sumberdaya bisnis pedagang tionghoa untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam persaingan bisnis dagang. Salah satu teori yang dipercaya dapat memberikan jawaban dalam menciptakan keunggulan kompetitif bagi suatu perusahaan adalah *resource based view*. Pandangan *resource based* menyatakan bahwa sumberdaya yang dimiliki perusahaan penting dalam memperoleh dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Teori *Resource Based View* memberikan kontribusi bagi manajemen strategi dalam analisis internal perusahaan yang dapat digunakan dalam menjelaskan perbedaan kinerja antar perusahaan (Barney, 1991). *Resource based view* berpendapat bahwa perbedaan kinerja dalam suatu perusahaan dikarenakan perbedaan sumber daya yang dimilikinya. Sumber daya perusahaan dapat berupa sumberdaya yang berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*).

Sumberdaya dapat juga diasosiasikan dengan *financial capital*, *social capital* dan *human capital* (Gibb, 2010). *Financial capital* merupakan sumberdaya yang berwujud sedangkan *social capital* dan *human capital* merupakan sumberdaya yang tidak berwujud. Penelitian ini lebih menekankan pada aspek sumberdaya tidak berwujud yang berupa *social capital* dan *human capital* pedagang etnis tionghoa karena kemampuan perusahaan untuk memobilisasi dan mengeksploitasi asset tidak berwujudnya jauh lebih menentukan daripada melakukan investasi dan mengelola aktiva fisik yang berwujud (Kaplan dan D. Norton, 1996 dalam Mulyadi, 2001). Sumber daya tidak berwujud (*intangible resources*) merupakan unsur yang paling berharga bagi suatu perusahaan. Sumberdaya *intangible* dapat mendorong keunggulan kompetitif yang berkelanjutan karena biasaya sumberdaya *intangible* merupakan sumberdaya yang langka, kompleks dan sulit untuk diimitasi atau ditiru oleh pesaing. Konsep *resource-based view* merupakan konsep barat yang banyak diaplikasikan dalam perusahaan modern berskala besar. Masih jarang penelitian yang mengkaji konsep *resource based view* ini dalam kerangka perusahaan kecil menengah khususnya bisnis keluarga etnis tionghoa. Berangkat dari fenomena dominasi bisnis keluarga etnis tionghoa di Ponorogo serta keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki oleh pengusaha pribumi, maka penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sumberdaya yang bernilai, langka, tidak mudah ditiru dan tidak mudah digantikan yang dimiliki oleh pedagang etnis tionghoa yang tidak dimiliki oleh kebanyakan masyarakat pribumi.

Penelitian ini juga bertujuan untuk menjawab bagaimana keluarga etnis tionghoa Ponorogo membangun dan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki tersebut untuk mendapatkan keunggulan kompetitif sehingga mampu mendominasi bisnis dagang di Ponorogo. Penelitian ini diharapkan dapat dalam memberikan gambaran keunggulan kompetitif yang dimiliki pengusaha etnis tionghoa Ponorogo. Hasil penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan kontribusi dalam memperluas konsep *resource based view* dalam konteks bisnis keluarga di bidang perdagangan. Konseptualisasi yang dihasilkan diharapkan memberikan masukan perusahaan keluarga yang berskala kecil dan menengah agar mampu menciptakan keunggulan kompetitif dari sumberdaya yang dimiliki.

METODE PENELITIAN

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Jalan Jendral Sudirman Ponorogo. Alasan pemilihan lokasi ini karena jalan tersebut merupakan jalan utama kota Ponorogo yang berjajar toko-toko milik keluarga etnis tionghoa. Jalan Jendral Sudirman juga merupakan daerah *pecinan* Ponorogo yang hampir seluruh toko yang ada dimiliki oleh etnis tionghoa. Proses pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara. Metode ini dilakukan untuk menggali lebih mendalam mengenai latar belakang keluarga maupun sejarah perusahaan keluarga, riwayat hidup, serta segala aspek mengenai perusahaan, manajemen dan keluarga. Informasi yang digali tidak terbatas pada masa lampau namun juga sekarang maupun gambaran

perusahaan keluarga di masa depan. Agar informasi yang diterima dapat lengkap dan menjawab permasalahan penelitian, proses wawancara dilakukan secara alamiah, obrolan santai sehingga terjadi semacam diskusi dengan subyek penelitian sebagai pemecah masalah dan peneliti menempatkan diri sebagai pemancing timbulnya permasalahan agar muncul informasi lebih detail dari responden. Proses wawancara diharapkan berjalan tidak terstruktur namun masih dalam garis besar yang terstruktur sehingga mengarah pada sumberdaya yang dimiliki dan bagaimana mereka memanfaatkan sumberdaya tersebut untuk mendapatkan keunggulan kompetitif perusahaan. Pengumpulan data juga dilakukan dengan pengamatan langsung dilapangan. Pengamatan mengenai perilaku pengusaha etnis tionghoa dilakukan untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai pengelolaan perusahaan. Studi pustaka juga dilakukan untuk menggali data yang nantinya digunakan untuk memperkuat data yang diperoleh di lapangan. Responden utama dalam penelitian ini adalah pengusaha etnis tionghoa Ponorogo, sebagai anggota keluarga besar yang mempunyai usaha dagang yang bersifat konglomerasi di Ponorogo. Jumlah responden ditetapkan dengan menggunakan teknik *snow-ball*, yang diawali dari pegawai atau orang kepercayaan keluarga tertentu yang mengetahui seluk-beluk bisnis keluarga etnis tionghoa Ponorogo. Tidak menutup kemungkinan wawancara juga dilakukan kepada masyarakat pribumi sebagai narasumber. Teknik *snow-ball* ini dilakukan untuk menggali data dari satu responden ke responden lainnya sampai kepada informan

kunci sehingga peneliti tidak menemukan informasi baru lagi. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yang dijabarkan dengan kajian teori yang digunakan atas data temuan. Analisis data berproses secara induksi-interpretasi-konseptualisasi. Data hasil wawancara yang detail direduksi diinterpretasi dan akhirnya dikonseptualisasikan dalam kerangka teori yang digunakan. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data ke dalam pola-pola tertentu, kemudian melakukan kategorisasi tema dan melakukan interpretasi kategori berdasarkan skema-skema yang didapat. Hasil analisis ini akan memberikan gambaran umum yang luas yang terdiri dari skema-skema spesifik menjadi suatu konsep. Proses ini dilakukan secara simultan sehingga bisa mendapatkan simpulan yang dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bisnis Dagang Etnis Tionghoa di Indonesia

Menurut Naveront (1994) pedagang etnis tionghoa di Indonesia berkembang dan mendominasi perekonomian karena merupakan warisan sejarah masa lalu dan terbawa oleh cara lama. Ketika jaman penjajahan Belanda, etnis Tionghoa sering mendapat perlakuan istimewa dalam menjalankan usaha dagang oleh pemerintah Belanda. Pedagang Tionghoa sering berpartner dengan Pemerintah Belanda dan mendapatkan berbagai fasilitas sehingga perdagangan mereka makin berkembang pesat. Fasilitas dan kemudahan tersebut memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Perdagangan pada tahun 1930-an, pengusaha etnis tionghoa mendominasi

dalam perdagangan eceran, sedangkan pedagang grosir dan ekspor-impor didominasi oleh orang Belanda. Walaupun begitu banyak juga pedagang kecil etnis tionghoa berkeliling menjajakan dagangannya. Kemudian pada tahun 1941-1958 ada sedikit perubahan sejumlah orang tionghoa memasuki bisnis grosir walaupun bisnis ekspor-impor masih didominasi oleh Belanda (Musianto 2003). Pada waktu orde lama terlihat sikap anti pengusaha keturunan Tionghoa. Pemerintah Orde Lama pada waktu itu menjalankan politik benteng untuk merintang gerak pengusaha etnis tionghoa. Pengusaha pribumi banyak diberi fasilitas istimewa untuk mengimpor barang-barang tertentu. Karena belum berpengalaman, pengusaha pribumi tersebut akhirnya tetap menggandeng pengusaha tionghoa untuk memodali dan menjalankannya. Walaupun perusahaan untuk memonopoli banyak bidang namun tidak sedikit etnis Tionghoa yang mengambil alih perusahaan Belanda dan berhasil mengembangkan usahanya. Kebijakan pemerintah masa orde lama tersebut juga menyebabkan pedagang etnis Tionghoa hanya terpusat di daerah tingkat I dan II. Semua modal etnis tionghoa hanya terpusatkan di kota-kota. Ruang gerak etnis tionghoa menjadi terbatas sehingga mereka harus mampu memanfaatkan potensi yang ada di sekitar *Pecinan*. Akhirnya *Pecinan* menjadi pusat kehidupan ekonomi kota, sehingga walaupun tidak dapat melakukan aktivitas bisnis di luar *Pecinan*, penduduk pribumi tetap masuk *Pecinan* untuk melakukan aktivitas ekonomi (Skober, 2006). Setelah orde lama jatuh, terjadi perubahan sikap penguasa pada masa orde baru terhadap etnis

tionghoa di Indonesia. Pada masa orde baru hampir tidak ada perbedaan antara pribumi dan etnis tionghoa dalam berdagang. Banyak pengusaha besar etnis tionghoa memiliki koneksi politik dengan penguasa. Bahkan banyak pengusaha etnis tionghoa yang bekerjasama dengan pemerintah muncul sebagai konglomerat baru (Noveront, 1994). Pengusaha tionghoa menjadi berkembang dan mendominasi sebagian besar toko. Mereka juga sering berpatungan dengan perusahaan - perusahaan transnasional terutama pada perdagangan tingkat tinggi. Skober (2006) yang meneliti siasat etnis tionghoa di Bandung, lebih lanjut mengatakan bahwa etnis tionghoa berusaha mencari peluang-peluang ekonomi yang tidak bersinggungan dengan kebijakan pemerintah yang berkuasa dan berusaha memanfaatkan jejaring sosial etnis tionghoa dengan pribumi.

Gambaran Wilayah Pecinan Ponorogo

Hampir di semua kota/ kabupaten di Indonesia dijumpai wilayah pecinan. Wilayah Pecinan ini sudah ada sejak jaman belanda. Menurut sejarah, wilayah pecinan ini terbentuk karena factor politik jaman belanda. Peraturan pemerintah local mengharuskan masyarakat Tionghoa dikonsentrasikan di wilayah-wilayah tertentu. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah diatur. Pemerintah kolonial melakukan segregasi berdasarkan latar belakang rasial. Di waktu-waktu tertentu, malah diperlukan izin masuk atau keluar dari pecinan. Berdasarkan factor social, wilayah pecinan terbentuk karena masyarakat tionghoa sendiri yang menginginkan hidup berkelompok. Sebagai masyarakat minoritas mereka merasa aman

jika ada rasa bersatu dan saling membantu. Hal inilah yang menjadikan masyarakat tionghoa menjadi terlihat eksklusif dibanding masyarakat pribumi. Wilayah Pecinan Ponorogo terletak di Jalan Jendral Sudirman yang merupakan jalan utama di kota Ponorogo. Dengan jalan sepanjang 800 meter, Area Pecinan Ponorogo tersebut berjejer toko-toko yang serbagian besar dimiliki oleh etnis tionghoa. Awalnya, urat nadi perekonomian kota Ponorogo awalnya berada di Kota Lama (Pasar Pon). Pada jaman Belanda, Jalan Bhatoro Katong dan Jalan Hayamwuruk awalnya merupakan pusat perdagangan atau jalan utama perdagangan kota Ponorogo karena lebih dekat dengan pasar utama (Pasar Legi). Seiring perkembangan jaman, banyak pedagang etnis tionghoa Ponorogo membuka toko-toko di jalan Jendral Sudirman. Awalnya status toko jalan Jendral Sudirman adalah Hak Guna Bangunan, memanfaatkan tanah milik negara untuk mendirikan bangunan toko. Setelah sekian lama, status sertifikat tersebut ditingkatkan menjadi hak milik. Sertifikat Hak Guna Bangunan dimiliki karena sebagian besar etnis tionghoa pendatang belum berstatus warga Negara Indonesia. Sertifikat Hak Milik hanya boleh dimiliki oleh Warga Negara Indonesia. Menjamurnya toko-toko sepanjang jalan Jendral Sudirman, menjadikan kawasan ini semakin ramai. Banyak toko-toko yang dulunya berada di jalan Hayamwuruk pindah atau membuka cabang lagi di jalan Jendral Sudirman. Karena toko-toko yang berada di Jalan tersebut didominasi oleh pedagang etnis tionghoa maka warga Ponorogo menyebut daerah tersebut sebagai pecinan. Berkembangnya wilayah pecinan

Ponorogo semakin menggeser pusat perdagangan dari jalan Hayamwuruk ke wilayah pecinan (Jalan Jendral Sudirman). Dalam tabel 1. disajikan gambaran jenis usaha maupun perkantoran di wilayah Pecinan Ponorogo. Dalam tabel dapat diketahui bahwa disepanjang jalan Jendral Sudirman berjejer sebanyak 85 toko dan kantor. Dari jenis usaha sebanyak itu, sebagian besar status kepemilikannya dimiliki oleh keluarga atau perorangan. Hanya sebanyak 10 jenis usaha yang bukan milik perorangan yaitu 7 kantor dan 2 sekolahan, sedangkan 1 mini market dianggap bukan milik perorangan karena berbentuk waralaba/ *frenchise* yang pengelolannya sudah profesional. Sebagian besar usaha/ toko yang berada di Jl. Jendral Sudirman dimiliki dan dikelola oleh keluarga etnis tionghoa, dengan jenis usaha sebanyak 28 jenis. Berdasarkan jenis usaha dapat diamati bahwa jenis usaha yang diminati oleh etnis tionghoa adalah jenis usaha toko yang menjual barang-barang bermodal besar seperti elektronik, motor, alat pertanian, besi/bangunan, olah raga dan lain sebagainya. Jenis-jenis usaha tersebut sangat sulit ditandingi oleh kalangan pribumi Ponorogo karena harus bermodal dana cukup besar. Warga pribumi ponorogo lebih cenderung memilih usaha-usaha yang mempunyai modal dana yang relative tidak banyak seperti rumah makan atau warung. Sebaliknya, warga tionghoa tidak banyak membuka bisnis keluarga seperti rumah makan karena *stereotype* masyarakat ponorogo. Masih banyak masyarakat Ponorogo yang beranggapan bahwa warung makan etnis tionghoa diragukan kehalalannya karena sering menggunakan minyak babi.

Berdasarkan gambaran tersebut, dapat dikatakan bahwa pengusaha etnis tionghoa Ponorogo sangat mendominasi dalam usaha dagang yang memerlukan modal financial yang relative besar. Jenis-jenis usaha yang dijalankan juga tidak terlalu membutuhkan keahlian maupun ketrampilan yang spesifik. Jenis usaha etnis tionghoa Ponorogo sangat identik dengan toko maupun jual-beli. Sebagian besar bisnis keluarga etnis tionghoa Ponorogo mempunyai karakteristik *family business enterprise (FBE)*. Menurut AB Susanto (2005), family business enterprise ini mempunyai cirri bahwa batas-batas antara keluarga, kepemilikan dan manajerial/pengawasan amat kabur dan tidak jelas. Banyak fungsi menjadi tumpang tindih sehingga sering terjadi ketegangan hubungan antar anggota keluarga. Namun di lain sisi justru banyak hal menunjukkan bahwa kesuksesan bisnis keluarga dimulai dari kaburnya batas-batas tersebut. Menurut Wahjono (2006), perusahaan keluarga etnis

tionghoa mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- Skala kecil dan struktur organisasi sederhana.
- Produk tunggal atau pasarnya terfokus.
- Kendali yang disentralisasi pada satu CEO dominan.
- Kepemilikan dan kendali pada keluarga.
- Kebudayaan organisasi paternalistic.
- Hubungan eksternal ke pemasok dan pelanggan melalui jaringan personal.
- Penghematan biaya dan efisiensi.
- Kemampuan pemasaran lemah terutama promosi citra merk.
- Hambatan pertumbuhan karena enggan berhubungan dengan manajer profesional.
- Fleksibilitas strategis berdasar adaptabilitas pembuat keputusan yang dominan.

Tabel 1

Jenis Usaha Pertokoan di Daerah Pecinan Ponorogo

No	Jenis Usaha/ Toko	Keluarga Tionghoa	Keluarga Pribumi	Bukan Keluarga	Jumlah
1	Sepatu	5			5
2	Palen/ Kelontong	3		1	4
3	Elektronik	4			4
4	Suku cadang/ aksesoris Mobil/ Motor	2			2
5	Bengkel/ Dealer motor	6			6
6	Rumah Makan/ warung	3	6		9
7	Pakaian	1	3		4
8	Alat Pertanian	3			3
9	Besi/ Bangunan	3			3
10	Olah-raga	2			2
11	Optik	1	1		2
12	Hiburan	1			1
13	Fotocopy/ Alat Tulis Kantor	6			6

14	Peralatan Jahit	2			2
15	Perkantoran	5		7	12
16	Sekolahan	1		2	3
17	Jasa Cetak Digital	1			1
18	Jasa Kecantikan	1			1
19	Sepeda	2			2
20	Plastik	1			1
21	Meubel	1			1
22	Telepon Seluler/ HP	2			2
23	Helm		1		1
24	Jajanan	4			4
25	Tas	2			2
26	Jamu	1			1
27	Alat rumah tangga	2			2
28	Apotek	1			1
	JUMLAH	64	11	10	85

Sumber data: Hasil Survei lapangan

Human Capital Sebagai Sumber Keunggulan Kompetitif

Bentuk modal yang dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif perusahaan keluarga salah satunya adalah modal sumberdaya manusia yang meliputi keahlian, ketrampilan, kemampuan, sikap, etos kerja (Gibb, 2010). Ketrampilan menunjukkan tingkat penguasaan terhadap fungsional tertentu maupun ketrampilan penguasaan pasar. etos kerja berkaitan dengan semangat kerja yang berkaitan dengan pandangan seseorang atau suatu kelompok atau etnis. Ketrampilan khusus yang bersifat fungsional tertentu menjadi bekal dalam menentukan bisnis yang dijalani. Ketrampilan ini bukanlah satu-satunya penentu dalam menentukan keberhasilan bisnis yang dijalankan. Sebagai contoh, ketrampilan A-ling sebagai tukang cukur rambut menginspirasi untuk menjalankan bisnis tukang cukur tetapi ketrampilan tersebut tidak dia manfaatkan ketika ada kesempatan baru menjadi "mending". Ketika memutuskan menjadi "mending", pada saat itu beliau tidak mempunyai ketrampilan khusus di bidang itu.

Sama seperti pada saat beliau beralih menjadi tukang kayu. Keahlian membuat mebel dia pelajari ketika sudah menjadi tukang kayu. Muladi (2001) menyatakan bahwa *human capital* terdiri dari dua komponen utama yaitu kapabilitas dan komitmen personel. Kapabilitas merupakan ketrampilan personel dalam mengoptimalkan aktiva perusahaan. Aktiva perusahaan yang dimanfaatkan secara optimal akan menghasilkan kompetensi dalam membangun keunggulan bersaing perusahaan. Kapabilitas ini dapat ditunjukkan dengan ketrampilan fungsional personel dan ketrampilan pemasaran. Ketrampilan fungsional personel merupakan kekuatan perusahaan dalam bidang fungsi utama perusahaan. Ketrampilan pemasaran merupakan kemampuan personel dalam merespon dengan cepat dan efektif terhadap kebutuhan pasar. Kapabilitas personel ini akan menjadi keunggulan jika didukung dengan komitmen yang besar, kecerdasan, kegigihan, etos kerja serta waktu yang lama untuk membangunnya. Bagi etnis tionghoa Ponorogo, pemahaman dan penguasaan berkaitan dengan pekerjaan bukan menjadi

modal awal dalam menentukan bisnis, namun penguasaan dan pemahaman tersebut tetap wajib untuk dimiliki. Ada semacam prinsip “Pokoknya jalan dulu, keahlian bisa dipelajari sambil berjalan” Dalam hal ini, keahlian tertentu bisa dipelajari sambil menjalankan bisnis (*learning by doing*). Justru semangat belajar, ketekunan dan upaya yang terus menerus untuk menguasai bidang yang ditekuni adalah kunci sukses. Bagi mereka, lebih baik memiliki karyawan yang bodoh tetapi rajin dan tekun daripada karyawan pandai tetapi malas. Semangat belajar tersebut tidak akan muncul jika tidak ada semangat untuk mencintai atau menjiwai bisnis yang ditekuni. Bagi etnis tionghoa Ponorogo, penjiwaan, kesenangan dan kecintaan merupakan modal utama dalam bisnis yang ditekuninya. Sikap kecintaan, kesenangan serta penjiwaan ini mendorong munculnya karakter manusia yang energik, focus, kerja keras, rajin, tekun, teliti, disiplin, tanggung jawab, serta karakter-karakter lainnya yang positif. Karakter manusia seperti inilah yang sangat dibutuhkan dalam mengoptimalkan asset yang dimiliki perusahaan sehingga mempunyai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Sulistyowati dan Hadi (2010) etos kerja merupakan karakter dasar nilai-nilai budaya yang dianutnya sebagai motivasi yang menggerakkan, spirit dasar, pikiran dasar, kode etik, kode moral, kode perilaku, sikap-sikap, aspirasi-aspirasi, keyakinan-keyakinan, prinsip-prinsip, dan standar-standar. Beberapa etos kerja etnis tionghoa ada kaitan dengan motto dan semboyan filsafat Tao dan Kong Hu Cu. Sikap

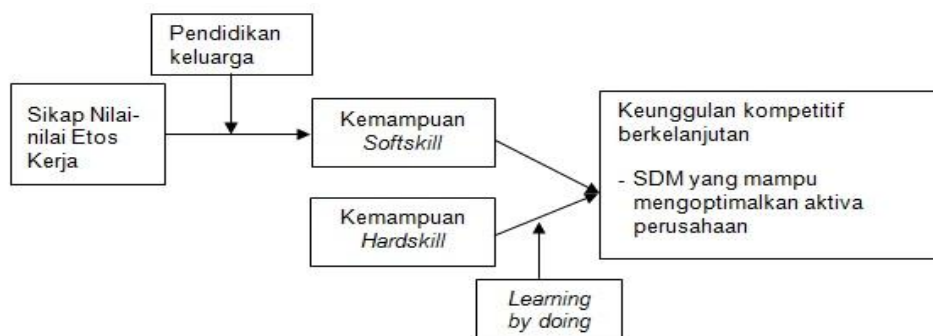
dan nilai-nilai yang mempengaruhi etos kerja tersebut antara lain:

- Kerja adalah rahmat, bekerja tulus penuh syukur;
- Kerja adalah Amanah, bekerja benar penuh tanggung-jawab;
- Kerja adalah panggilan, bekerja tuntas penuh integritas;
- Kerja adalah aktualisasi, bekerja keras penuh semangat;
- Kerja adalah ibadah, bekerja serius penuh kecintaan;
- Kerja adalah seni, bekerja cerdas penuh kreativitas;
- Kerja adalah kehormatan, bekerja tekun penuh keunggulan;
- Kerja adalah pelayanan, bekerja tuntas penuh kerendahan hati

Semua sifat dan sikap atau etos kerja yang dapat menjadi keunggulan kompetitif tersebut tidak begitu saja dimiliki, namun berkaitan dengan sistem pendidikan keluarga yang diwarisi secara turun-temurun. Proses pembelajaran dan penanaman nilai nilai tidak dilakukan secara formal, *teks book* yang sekedar menyentuh aspek kognitif, namun dengan proses pemberian contoh dalam kehidupan sehari-hari sehingga memunculkan sikap positif. Sebagai contoh, kadang anak-anak mereka ajari strategi bisnis melalui permainan kartu. Etnis tionghoa memandang permainan kartu hampir sama dengan praktek bisnis, dimana dalam bisnis ada “*gambling*”, permainan-permainan “curang”, pengambilan keputusan, persaingan serta hal-hal lain yang menjadi cerminan bisnis dagang. Kerja keras dan kecintaan terhadap bisnis ditanamkan orang tua semenjak kecil dengan cara mengajak anak untuk ikut menjadi

penjaga toko (karyawan). Mereka diajari bagaimana menghadapi pelanggan dan menentukan harga jual. Namun demikian, orang tua masih belum sepenuhnya mempercayakan pengelolaan keuangan kepada anak. Anak harus berusaha membuktikan kepada orang tua bahwa mereka mampu mengelola keuangan. Etnis tionghoa sulit mempercayai orang lain, namun mereka sangat berusaha untuk bisa dipercaya oleh orang lain bahkan dengan keluarga sendiri. Nilai-nilai kesederhanaan ditanamkan dengan tidak memanjakan anak serta sikap kesederhanaan orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Mengajak anak untuk berhemat dan rajin menabung. Mereka tidak enggan atau malu memakai “motor buntut” atau handpone lama walaupun sebenarnya bisa membeli yang jauh lebih baik. Jika membeli sesuatu, etnis tionghoa memilih membeli ketika harga sudah turun/ murah. Seperti yang diungkapkan responden “kalau musim mangga, belilah mangga, kalau musim durian belilah durian karena saat itulah harga buah paling murah”. Sebagian besar masyarakat etnis tionghoa Ponorogo membeli sesuai didasarkan pada kegunaan dan bukan prestise bahkan mereka sangat enggan jika dikatakan orang kaya. Dari gambaran tersebut

dapat dikatakan bahwa keberhasilan pedagang etnis tionghoa Ponorogo dikarenakan bukan keahlian atau ketrampilan yang bersifat *hardskills* namun lebih pada *softskills*. Ketrampilan *softskill* yang dibangun dari sikap, nilai-nilai serta etos kerja seperti sifat disiplin, efisien, energik, fokus, gesit, jeli, kerja keras, kreatif, rajin, ramah, sabar, semangat, tanggungjawab, tekun, teliti, tepat waktu, teratur, terkendali, dan ulet adalah yang paling utama dalam mendorong keberhasilan mereka dalam berdagang. Semua sifat-sifat ini tidak begitu saja dimiliki, tetapi sangat berkaitan dengan sistem pendidikan panjang sejak lahir (pembudayaan) yang diwarisi secara turun-temurun dalam keluarga. Sedangkan kemampuan *hardskill* yang berupa ketrampilan dan keahlian teknis diperoleh dengan cara *learning by doing*. Dengan mengasah dan terus belajar melalui pengalaman dan praktek langsung dapat mendorong sumberdaya manusia yang unggul yang mampu mengoptimalkan aset perusahaan. Secara ringkas model sumber daya manusia sebagai keunggulan kompetitif bisnis keluarga etnis tionghoa ponorogo digambarkan dalam gambar 1.



Gambar 1. Sumber Daya Manusia sebagai Keunggulan Kompetitif Bisnis Keluarga Etnis Tionghoa

Social Capital Sebagai Sumber Keunggulan Kompetitif

Social capital (modal social) merupakan sumberdaya yang dapat diakses maupun dimobilisasi melalui ikatan dalam suatu jejaring (Batjagal, 2005). Modal sosial dapat diartikan sebagai sumber daya yang timbul dari adanya interaksi antara orang-orang dalam suatu komunitas. Modal sosial merupakan hasil dari jejaring social yang dibangun ketika individu belajar dan mau mempercayai individu lain sehingga mereka mau membuat komitmen yang dapat dipertanggung jawabkan untuk mengembangkan bentuk-bentuk hubungan yang saling menguntungkan. Ada tiga elemen penting dalam modal sosial yaitu kepercayaan, norma-norma dan jejaring. Dalam hal kepercayaan, etnis tionghoa Ponorogo sangat menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan. Mereka sadar bahwa kepercayaan adalah modal yang sangat penting dalam membangun dan mengembangkan bisnis. Oleh karena itu mereka berusaha untuk membangun kepercayaan orang lain, bukan hanya kepada pelanggan, supplier, namun juga terhadap karyawan dan keluarga. Sebaliknya, etnis tionghoa sangat sulit mempercayai orang lain. Bahkan, orang tua tidak akan mempercayakan pengelolaan keuangan perusahaan kepada anaknya sendiri sebelum sang anak dapat membuktikan bahwa mereka benar-benar dapat dipercaya. Seorang anak harus bekerja keras membuktikan diri dan menumbuhkan kepercayaan orang tua sebelum mereka mendapatkan modal bisnis, mengelola keuangan atau meneruskan bisnis keluarga. Sebagai etnis minoritas, etnis tionghoa

Ponorogo sadar bahwa mereka harus membangun kepercayaan masyarakat dari etnis mayoritas. Bagi etnis tionghoa, masyarakat pribumi adalah konsumen mereka. Keberhasilan ekonomi yang mereka peroleh tidak mereka tunjukkan secara nyata dan mencolok. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya rumah mewah kalangan etnis tionghoa Ponorogo yang berada dibelakang toko. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk tidak menunjukkan kekayaan kepada masyarakat umum. Mereka beranggapan bahwa kekayaan yang ditunjukkan ke masyarakat dapat memunculkan kesenjangan social yang tajam. Dalam hati kecil mereka tetap sebagai etnis minoritas, sehingga sangat berhati-hati menjaga perasaan etnis mayoritas. Pengusaha etnis tionghoa ponorogo sangat mengutamakan dan memegang teguh nilai kepercayaan. Hal inilah yang menyebabkan mereka mereka lebih mudah dalam membangun jejaring bisnis. Jejaring bisnis ini mereka bangun melalui perkawinan, pertemanan maupun keterikatan dalam keluarga besar. Menikahkan putra-putri mereka dengan keluarga yang mempunyai status ekonomi yang sama ataupun lebih tinggi dapat meningkatkan jejaring usaha. Keberhasilan bisnis keluarga diperkuat dengan menikahkan anak-anak mereka dengan pengusaha-pengusaha yang sama-sama sukses secara financial. Jejaring keluarga dimanfaatkan untuk saling memberikan dukungan dalam bisnis masing-masing. Jejaring keluarga tersebut diikat dalam norma-norma yang saling dimengerti antar keluarga. Salah satu norma-norma dalam bisnis keluarga adalah tidak mencampuri bisnis anggota keluarga lain jika tidak diminta.

Urusan keluarga berbeda dengan urusan bisnis. Bisnis adalah bisnis dan urusan keluarga tidak bisa dikaitkan dengan urusan bisnis atau urusan bisnis tidak bisa dikaitkan dalam urusan keluarga. Kerjasama bisnis antar anggota keluarga bukan karena pertimbangan keluarga tetapi karena pertimbangan bisnis. Sama seperti yang diungkapkan oleh Permadi dan Kuswahyono (2007). Sikap kooperatif terhadap sesama keluarga etnis tionghoa tidak mengurangi sikap kompetitif. Justru sikap kompetitif yang masih tetap terpelihara tersebut semakin memperkuat kinerja bisnis mereka. Jika ada krisis atau tantangan besar dari luar jejaring keluarga, sikap kompetitif akan semakin berkurang dan sikap kooperatif (kebersamaan) yang sudah mereka miliki akan semakin menguat. Bisnis yang sama dengan bisnis anggota keluarga dapat menyebabkan persaingan bisnis antar anggota keluarga sehingga memicu perpecahan dalam keluarga. Oleh karena itu etnis tionghoa Ponorogo lebih memilih berbagai jenis usaha yang berbeda antar anggota keluarga. Strategi bisnis diversifikasi bidang usaha dalam keluarga inilah akhirnya menjadikan etnis tionghoa Ponorogo banyak merambah berbagai jenis usaha. Selama barang dagangan laku dijual dan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat, maka etnis tionghoa akan menjualnya. Seiring bertambahnya jenis usaha serta tetap konsisten dalam menjaga kepercayaan jejaring sebelumnya, maka bertambah pula luas jejaring yang dimilikinya. Hasil temuan ini sesuai dengan Ram dan Smallbone (2001) yang mengatakan bahwa jejaring bisnis merupakan instrument dalam mendapatkan

pengetahuan, distribusi informasi, memperoleh modal dan tenaga kerja serta meningkatkan hubungan yang kuat dengan klien atau supplier. Jejaring bisnis terbentuk karena adanya rasa saling tahu, saling menginformasikan, saling mengingatkan dan saling membantu dalam melaksanakan atau mengatasi sesuatu. Menurut Kiong, (1996), besarnya jaringan bisnis dapat saling mensubsidi di antara perusahaan-perusahaan anggota sehingga mampu meningkatkan kemampuan masing-masing perusahaan untuk menggerogoti saingan. Berkat saling subsidi, laba dari satu produk bisa dipindah ke produk lain dengan demikian mengalahkan saingan dengan harga yang lebih rendah. Sikap dapat dipercaya yang selalu dijaga dan dipelihara dengan norma-norma menjadikan jejaring bisnis keluarga semakin luas. Bukan hanya menjadikan konsumen semakin loyal, tetapi juga kepercayaan dari supplier sehingga mendapat barang dagangan yang lebih murah. Hal inilah yang menjadikan bisnis keluarga etnis tionghoa Ponorogo memberikan keunggulan kompetitif untuk bisa bersaing dengan bisnis lainnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Sebagian besar etnis tionghoa Ponorogo telah memberikan bukti bahwa mereka banyak yang berhasil dalam dunia bisnis. Rata-rata masih mampu bersaing dan unggul walaupun sudah lebih dari tiga generasi. Bahkan generasi penerus sebagian besar mampu memperluas bisnis usaha keluarga yang mereka geluti. Salah satu factor keberhasilan tersebut adalah kemampuan menggunakan sumberdaya yang mereka miliki. Teori *resource based view* berpendapat

bahwa keunggulan kompetitif dan berkelanjutan bersumber dari sumberdaya yang dimiliki, yang langka, kompleks dan sulit untuk diimitasi atau ditiru oleh pesaing. Sumberdaya yang dimaksud adalah sumberdaya manusia dan sumberdaya social. Keberhasilan etnis tionghoa ponorogo bukanlah ditentukan pada keahlian maupun ketrampilan teknis dalam penguasaan bidang yang mereka geluti, namun lebih pada sumberdaya yang mempunyai *softskill* yang dibutuhkan dalam bisnis dagang. Hal yang menonjol yang menjadikan mereka unggul adalah sikap dan etos kerja yang dimiliki kalangan etnis tionghoa ponorogo. Etos kerja yang mencerminkan sumberdaya manusia yang unggul mampu menjadikan bisnis keluarga mampu bersaing dan bertahan sampai tiga generasi. Sikap dan etos kerja terbentuk dan tertanam dalam sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pembelajaran dalam keluarga. Sumberdaya social yang menonjol pada kalangan etnis tionghoa ponorogo adalah luasnya jejaring yang diikat dengan norma-norma serta kepercayaan yang terus dijaga. Hal ini menghasilkan mereka bukan saja dipercaya oleh konsumen sebagai pasar tetapi juga kepercayaan dari supplier dalam memperoleh barang dagangan yang lebih murah dibanding pesaing. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa untuk berhasil dalam bisnis keluarga dan mampu bertahan dari generasi ke generasi dibutuhkan sumberdaya yang unggul yang mampu digunakan untuk mengoptimalkan aktiva perusahaan keluarga. Sumberdaya manusia yang utama adalah sikap dan etos kerja dalam menjalankan bisnis keluarga serta didukung dengan

perluasan jejaring yang dijaga dengan norma-norma serta kepercayaan yang terus dipelihara.

DAFTAR PUSTAKA

- Barney, J. B., 1991, Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17, 99-120.
- Batjargal, B., 2005, *Comparative Social Capital: Network of Entrepreneurs and Investors in China and Russia*, William Davidson Institute Working Paper., Number 783 June.
- Chen, Nancy Y. F., Chao, Mike C., dan Tjosvold, D., 2010, Developing the strategic resources of Chinese entrepreneurial firms, *Leadership & Organization Development Journal* Vol. 31 No. 3, pp. 213-22
- Gibb Dyer JR. W., 2010, Are You The Right Type of Family Business?, *Organizational Dynamic* Vol. 39, No. 3 pp 269-278.
- Harsono, Jusuf, 2002. *Etos Kerja Pengusaha Muslim Perkotaan di Ponorogo*. Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang
- Keng, Shu B. A., 2001, *Making Markets Work in Rural China: The Transformation of Local Networks in a Chinese Town, 1979-1999*, Disertasi The University of Texas at Austin.
- Kiong, Tong Chee., 1996, *Perusahaan Cina di Singapura: Jaringan Beragam, Wewenang Terpusat, Menguak Jaringan Bisnis Cina di Asia Timur dan Tenggara*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Lin, Nan, 2005, A Network Theory of Social Capital, in *Handbook on Social Capital*, edited by Dario Castiglione, Jan van Deth and Guglielmo Wolleb, Oxford University Press
- Mulyadi, 2001, *Balance Scorecard*, Penerbit Salemba Empat, Bekasi.
- Murdiarta, Ketut G., 2009, Jaringan Sosial (Network) Dalam Pengembangan Sistem dan Usaha Agribisnis: Perspektif Teori Dan Dinamika Studi Kapital Sosial. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Volume 27, No. 1, Juli, 1-12.

- Musianto, Lukas S., 2003, Peran Orang Tionghoa dalam Perdagangan dan Hidup Perekonomian dalam Masyarakat: Studi Kepustakaan dan Studi Kasus tentang Interaksi Etnik Tionghoa dan Pribumi di Bidang Perekonomian di Surabaya, *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan* Vol. 5, No. 2, September 2003: 193 - 206
- Noveront. Jhon. K., 1994, *Jaringan Masyarakat China*, Golden Terayon Press, Jakarta.
- Permadi. Iwan dan Kuswahyono. Imam, 2007, Penerapan Etika Bisnis Etnis Cina dalam Kompleksitas Persaingan Usaha: Perspektif Antropologi Hukum, *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Volume 5, Nomor 1, April.
- Purnomo R., (1991), *Resource-Based View dan Keunggulan Bersaing Berkelanjutan: Sebuah Telaah Kritis Terhadap Pemikiran Jay Barney*, Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman diakses dari <http://www.jp.fe.unsoed.ac.id/>
- Ram, Monder dan Smallbone, David, 2001, *Ethnic Minority Enterprise: Policy in Practice, Final report prepared for The Small Business Service*, June
- Salam, Suryawati, 2010, Perilaku Bisnis Pengusaha Cina Dan Bugis Makassar Dalam Agribisnis Di Makasar, *e-journal*, diakses dari <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal>
- Skober, Tanti, R., 2006, *Orang cina di Bandung, 1930-1960: Merajut Geliat Siasat Minoritas Cina.*, Konferensi Nasional Sejarah VIII, Hotel Millenium, Jakarta.
- Sulistawati dan Hadi C. W., 2010, Meneladani Etos Kerja Warga Tionghoa, diakses dari <http://profsuli.files.wordpress.com/>
- Susanto, AB., 2005, *World Class Family Business: Membangun Perusahaan Keluarga Berkelas Dunia*. Quantum Bisnis dan Manajemen (PT Mizan Pustaka), Jakarta.
- Susetyo, B., 2002, Krisis Identitas Etnis Cina di Indonesia, *Jurnal Psikomensia* vol. 2. No. 2 diakses dari <http://budisusetyo-inside.blogspot.com>
- Tjoe, Thomas Liem, 2008, *Rahasia Sukses Bisnis Etnis Tionghoa di Indonesia*, MedPress, Yogyakarta.
- Wahjono, Sentot I., 2009, Suksesi dalam perusahaan Keluarga, *Jurnal Balance* Vol 3, No 1 diakses dari <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal>

UPAYA PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BERBASIS SYARIAH

Oleh:

DWIATI MARSIWI¹⁾

ARIF HARTONO²⁾

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

Email: dwiati223@yahoo.co.id¹⁾

arifhrtm@yahoo.co.id²⁾

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menilai kinerja Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Syari'ah di Kabupaten Ponorogo. Penilaian kinerja yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan *balanced scorecard*. Pendekatan ini memandang kinerja dari empat sudut pandang, yaitu keuangan, pelanggan, bisnis internal, serta pertumbuhan dan pembelajaran. Dengan pendekatan ini diharapkan lembaga keuangan mikro berbasis syari'ah lebih berkompeten dalam mengelola lembaga dan memberikan pelayanan prima kepada pengusaha kecil dan menengah. Data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada pimpinan dan karyawan lembaga keuangan mikro berbasis syari'ah. Termasuk dalam kategori lembaga ini adalah Baitul Maal Wat Tamwil dan koperasi berbasis syari'ah. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa *Balanced Scorecard* yang terdiri dari perspektif keuangan, pelanggan, bisnis internal dan belajar dan tumbuh berpengaruh signifikan terhadap kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah.

Kata Kunci : Lembaga keuangan Mikro Berbasis Syari'ah, *balanced scorecard*, kinerja

PENDAHULUAN

Pemberdayaan perekonomian rakyat adalah upaya pemerintah Indonesia untuk mengentaskan permasalahan perekonomian di Indonesia akibat dari krisis multi dimensi. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan akses rakyat kecil terhadap perekonomian dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Pemerintah juga mendorong komitmen perbankan dan perusahaan sektor swasta untuk mendorong dan mengembangkan keberadaan usaha kecil, menengah, dan koperasi. Selain itu pemerintah juga melakukan reformasi struktural untuk meningkatkan efisiensi perekonomian. Sektor keuangan perbankan menjadi sangat berperan dalam menggerakkan roda perekonomian. Namun perbankan nasional pun tidak luput dari imbas krisis ekonomi. Bahkan perbankan nasional mengalami *non*

performing loan yang tinggi yang berakibat pada memburuknya *net interest margin* serta kesulitan dalam hal likuiditas (Satrio Wibowo dan Gunawan 1998:57). Lebih lanjut dijelaskan kondisi tersebut kemudian memicu terhambatnya penyaluran kredit kepada masyarakat, sehingga diperlukan peran lembaga keuangan lain sebagai *complementary institutions*. Di luar dugaan kita, ketika para pengusaha menengah ke atas yang kesulitan menghadapi krisis, ternyata usaha kecil dan menengah mampu bertahan (Dwiati : 2007).

Hal inilah yang menjadi dasar bagi pemerintah untuk melirik UKM sebagai sektor yang mampu menunjang perekonomian dan diharapkan dapat menanggulangi masalah pengangguran di Indonesia. Bahkan pemerintah pun memberikan *policy* agar pihak perbankan memberikan kredit lunak

bagi para pengusaha kecil dan menengah. Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Syariah (LKMS) merupakan lembaga keuangan yang diharapkan mampu mendukung perkembangan usaha kecil menengah. Baitul Maal Wat Tamwil dan Kopersai Syariah merupakan lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang diharapkan mampu membantu mengatasi permasalahan para usaha kecil menengah. Hambatan yang dihadapi BMT terutama pada aspek pengelolaan dan sistem manajemen BMT yang masih kurang profesional serta minimnya kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan BMT. Kedua, belum banyak masyarakat yang memanfaatkan keberadaan BMT untuk mengembangkan usahanya. Sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah, BMT harus mampu bertahan dan bersaing dengan lembaga keuangan lainnya, seperti koperasi simpan pinjam. Padahal BMT dan lembaga keuangan mikro lain memiliki kemungkinan besar untuk dikembangkan sebagai basis/dasar bagi lembaga keuangan syariah yang lebih tinggi, seperti Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), BankSyariah, maupun Bank Muamalat Indonesia (BMI). Lembaga keuangan mikro berbasis syariah seperti BMT dan koperasi syariah menjadi alternatif bagi pengusaha kecil untuk memperoleh pendanaan yang bebas riba dengan prosedur yang diharapkan lebih mudah dibandingkan bank konvensional. Namun sangat disayangkan perkembangan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro yang berdasar syariah pada kenyataannya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Secara umum, masih belum adanya *gh irah*

atau semangat pendirian lembaga keuangan syariah sebagai sebuah gerakan yang profesional (Datin dan Ahmad: 2006).

Di beberapa daerah, BMT memang telah mampu mendorong kegiatan perekonomian. Namun pergerakan dan pertumbuhan BMT masih sangat kurang. Di sisi lain telah banyak perusahaan perbankan konvensional yang mengembangkan sayapnya kepada bisnis berbasis syariah. Agar perbankan mampu menyerap potensi pengusaha kecil maka dibutuhkan lembaga keuangan mikro untuk menyalurkan dana. Saat ini BMT dan BPRS masih sangat membutuhkan dana untuk mendorong pertumbuhan UKM dengan tingkat return yang dihasilkan lebih kompetitif. Sehingga perkembangan UKM justru akan berdampak secara positif pada efek berlipat (*multiplier effect*) bagi perbaikan ekonomi nasional (Republika : 2007).

Kabupaten Ponorogo merupakan kabupaten yang memiliki pondok pesantren yang cukup banyak. Dengan lingkungan pondok pesantren yang baik, seharusnya keberadaan BMT dan kopresai syariah di Kabupaten Ponorogo juga berkembang baik. Beberapa waktu terakhir menurut Indakop Ponorogo BMT di Kabupaten Ponorogo menunjukkan penurunan, dan sebagian beralih nama menjadi koperasi syariah. Hal ini di karenakan di sisi masyarakat sendiri kurang memahami BMT. Sesuai dengan uraian di atas, maka dapat diuraikan permasalahan yang muncul, yaitu seberapa tingkat kinerja yang dicapai BMT sebagai salah satu lembaga keuangan mikro berbasis syariah. Ukuran kinerja yang digunakan dengan pendekatan *Balance Scorecard*. Pendekatan *balance*

scorecard memiliki kelebihan dibandingkan kinerja keuangan, yaitu dengan melihat dari sisi non finansial, seperti internal bisnis, pelayanan pelanggan dan pertumbuhan organisasi dan pembelajaran.

KAJIAN LITERTUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) terdiri dari berbagai lembaga diantaranya BPRS (Bank Perkreditan Mikro Syariah), BMT (Baitul Mal Wat Tamwil), serta Koperasi Syariah. Ketiga lembaga tersebut mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi satu sama lain dan berhubungan erat dengan lembaga syariah lainnya yang lebih besar.

Baitul Mal Wat Tamwil

Baitul Maal Wat Tamsil merupakan lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil. Kegiatan Baitut tamwil mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi sedangkan kegiatan Baitul Maal adalah menerima penitipan basis yang berupa zakat, infak dan shadaqah (Santoso, 2005).

BMT memiliki ciri-ciri sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi untuk anggota dan lingkungannya. Walaupun bukan lembaga sosial, namun BMT tetap dimanfaatkan untuk efektifitas pengelolaan zakat, amal dan shadaqah. BMT lebih mengutamakan gerakan menabung. Unsur-unsur kinerja dan tingkat kesehatan BMT (Ramli, 2002; Hisyam, 2002; Munawir, 1997; Eriska dan Ahmad, 2006) terdiri dari ukuran *capital* yang dimiliki BMT. Komponen ini diukur dengan cara membagi total modal

dengan simpananya. Kedua, mengukur asset produktif yang substansinya didominasi dalam komponen biaya. Ketiga, tingkat efisiensi dalam penggunaan asset BMT. Keempat, mengenai tingkat kemampuan BMT dalam menghasilkan profit (*earning*) yang diukur dengan analisis rentabilitas. Dan terakhir tolok ukurnya adalah kemampuan BMT dalam mencapai likuiditasnya.

Balanced Scorecard

Dalam pengukuran kinerja dengan perspektif tradisional lebih mengedepankan perspektif keuangan. Akan tetapi perspektif keuangan memiliki beberapa kelemahan, antara lain : 1) tidak semua dimensi keuangan relevan, 2) akuntansi berusaha menyatakan dengan harga taksiran, sehingga fungsi biaya ekonomi jarang bahkan sulit untuk diketahui, 3) akuntansi menunjukkan hasil kegiatan namun tidak menunjukkan hasil dari proses kegiatan, 4) laporan keuangan seringkali mengevaluasi prestasi dalam jangka pendek tanpa mempertimbangkan pengaruh dalam jangka panjang. *Balanced scorecard* muncul untuk meminimalkan kelemahan tolok ukur keuangan. (Dwiati, 2007)

Sedangkan menurut Absah (2001) sasaran dan tolok ukur *scorecard* berasal atau turunan dari visi dan strategi organisasi. *Balanced Scorecard* berusaha untuk menyeimbangkan antara kepentingan individu dengan kepentingan kelompok dalam satu langkah bersama (Susbiyani, 2004), sehingga dapat digunakan sebagai sarana komunikasi, informasi, dan proses belajar. Metode *Balanced Scorecard* merupakan gagasan peningkatan kinerja yang menyeimbangkan aspek keuangan dan non keuangan (*non financial*).

Norton dan Kaplan (1996) membahas *balance scorecard* dalam empat perspektif pengukuran, yaitu : keuangan, pelanggan, proses internal bisnis dan proses belajar dan berkembang. *Perspektif financial* menjadi fokus yang penting bagi ukuran kinerja suatu perusahaan. Perspektif Keuangan menunjukkan hasil pencapaian dari fungsi perencanaan dan pelaksanaan strategi yang telah digariskan perusahaan.

Norton dan Kaplan (1996) mengidentifikasi sasaran keuangan dalam tiga tahap yaitu pada tahap pertumbuhan, tahap bertahan dan Panen. Dalam perspektif pelanggan, perusahaan harus mengidentifikasi segmen pasar dan pelanggan yang dimasuki untuk mencapai tujuan keuangan. Dalam hal ini perusahaan harus menjaga *link* antara konsumen dan pemasok.

Tolok ukur yang digunakan dalam mengukur kepuasan pelanggan harus diterjemahkan dengan tolok ukur internal bisnis. Proses internal bisnis memahami tolok ukurnya dari kemampuan perusahaan memberikan pelayanan yang tepat waktu dengan standar kualitas pelanggan. Selain itu juga dibutuhkan keputusan dan tindakan manajemen yang tepat dan efektif serta efisien. Proses belajar dan berkembang terdiri dari 3 (tiga) pihak, yaitu *people*, *system* dan *organizational procedure*. Proses belajar dan berkembang dapat meminimalkan kesenjangan (*gap*) antara kemampuan yang dimiliki seseorang, sistem dan prosedur organisasi. Manajemen sendiri dalam hal ini perlu memperhatikan kepuasan pekerja, retensi pekerja, dan produktivitas pekerja. *Balanced Scorecard* adalah sebuah sistem instrumentasi bagi pelaku usaha untuk

mengimplementasikan dalam pengukuran strategis pada setiap perspektif yang komparatif. Pada akhirnya *Blanced Scorecard* akan menciptakan daya saing yang berkelanjutan (Junaidi, 2002).

HIPOTESIS

Penelitian yang dilakukan oleh Eriska dan Ahmad (2006) mengukur kinerja BMT di Kabupaten Banyumas dengan ukuran kinerja keuangan, yang menunjukkan kondisi perkembangan yang baik. Sedangkan untuk perbedaan kinerja setiap BMT dianalisis dengan tolok ukur pendayagunaan dana, pengelolaan administrasi, pelaksanaan fungsi manajemen, dan usaha sosialisasi. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Mabrurroh yang menggunakan perspektif keuangan untuk menilai kinerja perbankan.

Sementara Wardhana (1999) meneliti ukuran kinerja *balance scorecard* hanya menggunakan pespektif internal bisnis dan ternyata internal bisnis sangat berpengaruh terhadap perspektif konsumen. Sejalan dengan Wardhana, penelitian yang dilakukan Absah (2001) bahwa proses internal bisnis berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pada radio siaran swasta FM di Surabaya.

Maryati (1999) dalam penelitiannya menggunakan empat perspektif *balance scorecard* pada sebuah rumah sakit. Dari hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa keempat perspektif *balance scorecard* secara signifikan berpengaruh pada kinerja rumah sakit tersebut. Hal yang sama juga dibuktikan dari penelitian Junaidi (2002) dengan menggunakan smapel perusahaan asuransi.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang sudah disampaikan, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

H1 = Terdapat pengaruh penerapan *balanced scorecard* terhadap kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah

METODE PENELITIAN

Sampel dalam penelitian ini adalah manajemen dan pengelola Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Syariah yang aktif selama tahun 2011-2013. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuisisioner kepada sampel yang diambil secara *cluster random sampling*. Dalam penelitian ini data diperoleh dari penyebaran kuisisioner yang harus diisi oleh responden. Kuisisioner yang digunakan berupa kuisisioner tertutup, dimana peneliti telah menyediakan jawaban yang dapat dipilih oleh responden. Wawancara kepada beberapa responden juga dilakukan untuk mendukung hasil penelitian. Berdasarkan hasil kuisisioner yang disebarkan, dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan program SPSS 16.00 untuk diketahui bagaimana persepsi pengelola Lembaga Keuangan Mikro Syariah atas penerapan Balance Scorecard terhadap kinerja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang terdaftar pada Dinas Indakop dan UKM Kabupaten Ponorogo sebanyak 9 BMT dan 11 Koperasi Syari'ah dengan jumlah keseluruhan koperasi di Kabupaten Ponorogo sebanyak 950 unit. Beberapa BMT telah berubah menjadi Koperasi Syari'ah. Namun pada kenyataannya BMT dan Koperasi Syari'ah di

Kabupaten Ponorogo banyak yang sudah tidak beroperasi lagi, karena minat masyarakat terhadap lembaga berbasis syari'ah masih sangat kurang. Kurangnya kepercayaan masyarakat disebabkan pengetahuan tentang model pembiayaan dan simpanan yang sesuai dengan shar'i masih kurang. Dari jumlah BMT dan Koperasi yang masih aktif disebarkan 50 kuisisioner. Kuisisioner yang kembali sebanyak 40 dengan jumlah yang tidak lengkap atau rusak 2, sehingga data yang bisa diolah sebanyak 38. Jumlah responden yang mengisi kuisisioner secara merata dilakukan oleh responden pria dan wanita . Adapun usia responden sebanyak 47,4 % berada pada usia 20-30 tahun dan yang berusia 30-40 tahun sebanyak 12 orang atau 31,6 %, serta usia lebih dari 50 tahun hanya sejumlah 5,3 %. Hasil uji validitas untuk setiap item pertanyaan telah terpenuhi tingkat validitasnya.

Pada setiap instrumen pertanyaan yang mencakup keempat perspektif *Blanced Scorecard*. Memiliki nilai *r* hitung lebih besar dari *r* tabel. Demikian halnya dengan hasil uji reliabilitas, untuk seluruh instrument pertanyaan memiliki koefisien alpha lebih besar dari 0,60 yang berarti telah memenuhi persyaratan reliabilitas.

Tabel 1
Instrumen Penelitian

Variabel	Instrumen pertanyaan	Hasil Uji Validitas	Koef. alpha	Hasil
Kinerja (Y)	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya pengukuran kinerja keuangan disertai tindakan inisiatif. - Peningkatan kinerja pelanggan akan meningkatkan strategi akuisisi pelanggan baru - Peningkatan ukuran proses bisnis dapat meningkatkan atktivitas yang memberikan nilai tambah. - Peningkatan kinerja pembelajaran dan pertumbuhan dapat meningkatkan kapabilitas 	Valid Valid Valid Valid	0,834	Reliabel
Perspektif Keuangan (X1)	<ul style="list-style-type: none"> - Efisiensi Biaya - Penggunaan Asset Perusahaan - Pengukuran dan target 	Valid Valid Valid	0,623	Reliabel
Perspektif Pelanggan (X2)	<ul style="list-style-type: none"> - Kepercayaan - Kepuasan Pelanggan - Citra/Image Perusahaan - Responsiveness 	Valid Valid Valid Valid	0,797	Reliabel
Perspektif Internal Bisnis (X3)	<ul style="list-style-type: none"> - LKM perlu meningkatkan inovasi produk dan pelayanan - Upaya peningkatan dan pengembangan kualitas produk dan jasa - Melakukan aktivitas pembuatan produk/jasa secara efisien 	Valid Valid Valid	0,946	Reliabel
Perspektif Tumbuh dan Belajar (X4)	<ul style="list-style-type: none"> - Perusahaan memiliki kemampuan mempertahankan karyawan - Karyawan yang kompeten akan meningkatkan produktifitas kerja - Perusahaan selalu memberikan motivasi dan memberdayakan karyawan dalam berbagai aktivitas 	Valid Valid Valid	0,806	Reliabel

Hasil pengujian menunjukkan persamaan regresi berganda yang dibentuk dalam penelitian ini adalah :

$$Y = - 0,201 + 0,285 X1 + 0,038 X2 + 0,044 X3 + 0,655 X4 + \epsilon$$

Nilai konstanta sebesar - 0,201 menyatakan bahwa jika variabel bebas dianggap konstan, maka kinerja akan berkurang sebesar 20,1 % (lihat tabel 2). Masing-masing variabel bebas, terlihat berpengaruh positif terhadap kinerja LKMS. Hal ini berarti jika terdapat peningkatan penerapan *Balanced Scorecard*, akan

meningkatkan kinerja LKMS. Proporsi pengaruh peningkatan untuk variabel perspektif keuangan (X1) sebesar 28,5 % , variabel pelanggan (X2) menyumbang 3,8 % atas peningkatan kinerja LKMS, serta 4,4 % peningkatan kinerja LKMS dipengaruhi oleh perspektif bisnis internal. Indikasinya adalah Perspektif pelanggan dan bisnis internal bukan merupakan faktor kuat yang dapat mempengaruhi kinerja LKMS. Proporsi pengaruh terkuat pada variabel perspektif tumbuh dan belajar (X4), dengan prosentase pengaruhnya sebesar 65,5 %. Perusahaan

yang memiliki kemampuan mempertahankan karyawannya dan aktif mendorong karyawan untuk melakukan kreatifitas dan inisiatif, dapat menjadikan sumber daya manusia yang efektif dalam bekerja. Jadi dibutuhkan pengalaman dan inovasi karyawan sehingga kinerja LKMS meningkat secara bertahap.

Proses tumbuh dan berkembang, juga dipengaruhi dari keandalan sistem informasi akuntansi. Pengalaman dan lamanya usaha serta kompetensi karyawan dapat mendorong penerapan sistem akuntansi dan pengendalian internal yang handal.

Tabel 2
Hasil Uji Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.201	.733		-.274	.786
X1	.285	.181	.224	1.573	.125
X2	.038	.155	.037	.245	.808
X3	.044	.065	.087	.676	.504
X4	.655	.180	.540	3.640	.001

a. Dependent Variable: Y

Tabel 3
F hitung

ANOVA ^b					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	4,014	4	1,003	9,284	,000 ^a
Residual	3,567	33	,108		
Total	7,581	37			

a, Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2
b, Dependent Variable: Y

Tabel 4
Koefisien Detrminasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.728 ^a	.529	.472	.32877	1.737

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2
b. Dependent Variable: Y

Sesuai dengan hasil olah SPSS 16.00 disajikan pada tabel 5.3 dapat diketahui nilai F hitung sebesar 9,284 dengan tingkat signifikan 0,000. Nilai signifikasi yang diperoleh dari uji data lebih kecil dari 0,05, sehingga H_0 dinyatakan ditolak dan H_a diterima. Dengan kata lain bahwa perspektif *balance scorecard* secara keseluruhan berpengaruh pada peningkatan kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah. Nilai R^2 sebesar 0,529 menunjukkan besarnya sumbangan variabel keuangan, pelanggan, internal bisnis, serta tumbuh dan berkembang sebesar 52,9 % terhadap tingkat kinerja LKMS. Adapun nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0,728 mengindikasikan bahwa variabel bebas memiliki hubungan kuat positif terhadap variabel terikat.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Jumlah Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kabupaten Ponorogo masih sedikit dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah.
2. Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro masih dianggap tabu, sehingga tidak bisa digunakan berbagai pihak untuk mengukur kinerja.
3. Variabel-variabel yang membentuk model *Balanced Scorecard* berpengaruh secara simultan terhadap kinerja. Apabila model *balanced Scorecard* meningkat, maka kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah akan meningkat.
4. Variabel perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, dan perspektif tumbuh dan berkembang

memiliki hubungan yang kuat dan positif terhadap kinerja.

5. Penelitian ini hanya menggunakan kuesioner untuk mendapatkan data yang akan diolah. Sehingga hasil pengisian kuesioner tergantung dari tingkat pengetahuan responden.
6. Penelitian ini masih terbatas di satu Kabupaten.
7. Penelitian ini hanya melihat persepsi pengelola Lembaga Keuangan Syari'ah atas konsep *Balanced Scorecard*, namun Lembaga Keuangan Syari'ah belum menerapkan konsep tersebut dalam aktifitasnya.

B. SARAN

1. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah diupayakan merubah mindset, bahwa laporan keuangan adalah penting dan wajib dipertanggungjawabkan secara transparan.
2. Perlunya dukungan lembaga terkait, seperti Dinas Indakop agar perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah lebih baik.
3. Perlunya kesadaran masyarakat bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah adalah salah satu alternatif disamping lembaga keuangan dan telah sesuai dengan syariat Islam.
4. Penelitian selanjutnya hendaknya menggunakan parameter lain untuk mengukur kinerja.
5. Diharapkan penelitian lanjutan menggunakan obyek yang luas sehingga mendapatkan hasil yang baik.
6. Penelitian selanjutnya hendaknya menilai kinerja pada lembaga atau organisasi yang

telah mengimplementasikan *Balanced Scorecard*.

Volume 5, No.1, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Yuniarti, Sari, Mei 2005, *Balanced Scorecard sebagai Alternatif Pengukuran Customer Value*, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Volume IX, No. 2, Program Studi Keuangan dan Perbankan, Universitas Merdeka Malang.

DAFTAR PUSTAKA

- Absah, Yeni, September 2001, *Analisis Pengaruh Proses Bisnis Internal terhadap Kinerja Keuangan pada Stasiun Radio Siaran Swata FM Surabaya dan sekitarnya*, Volume 1, No. 1, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Surabaya.
- Mardiah dan Listianingsih, 2006, *Pengaruh Sistem Pengukuran Kinerja, Sistem Reward, dan profit Center terhadap Hubungan Antara Total Quality Management dengan Kinerja Manajerial*, Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang.
- Marsiwi, Dwiati, Maret 2007, *Perspektif Akuntansi Manajemen di Tengah Perubahan Lingkungan, Ekuilibrium*, Volume 2 No.2, fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Marsiwi, Dwiati, 2007, *Tantangan Akuntansi dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Syariah*, Makalah, Tidak Dipublikasikan.
- Martowijoyo, Sumantoro, Maret 1999, *Kinerja Keuangan Mikro dan Perilaku Masyarakat Pedesaan, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Volume 1 No. 2, Bank Indonesia.
- Mubruroh, Juni 2004, *Manfaat dan Pengaruh rasio Keuangan dalam Analisis Kinerja Keuangan Perbankan*, Volume 8, No.1, Balai Penerbitan dan Pengembangan Ekonomi Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Santoso, Edi, Januari 2005, *Pengaruh Pemberian Kredit Usaha BMT Surya Mandiri terhadap Perkembangan Usaha Kecil di Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*, Fenomena, Volume 2, No. 1, LPPM Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Utami, Datien E dan Setiawan, Ahmad I, April 2006, *Analisis Kinerja Keuangan dan Pengelolaan Internal BMT (Survey pada BMT-BMT Se-Kabupaten Banyumas)*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan ,

PENERAPAN METODE *ACTIVITY BASED COSTING* SEBAGAI PENENTUAN HARGA POKOK PRODUKSI DI KLINIK WIRAUSAHA MADIUN

DIYAH SANTI HARIYANI¹⁾

JULI MURWANI²⁾

STIE DHARMA ISWARA MADIUN¹⁾

IKIP PGRI MADIUN²⁾

Email: dyarth@yahoo.com¹⁾

Email: jmurwani@yahoo.com²⁾

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan pada Klinik Wirausaha Madiun dengan tujuan untuk mengetahui perhitungan harga pokok produksi dengan *activity based costing system*, dan untuk mengetahui perbedaan besarnya harga pokok produksi pada perusahaan dengan menggunakan metode tradisional dan *activity based costing system*. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi yaitu teknik dengan cara mengumpulkan data melalui dokumen-dokumen perusahaan mengenai data yang terkait dengan harga pokok produksi. Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah harga pokok produksi pada mesin potong kerupuk konfeyor dan mesin pencacah (*coper*) di Klinik Wirausaha Madiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode tradisional biaya *overhead* pada masing-masing produk hanya dibebankan pada satu *cost driver* saja yaitu jumlah unit produksi sedangkan *activity based costing system* biaya *overhead* pada masing-masing produk dibebankan pada beberapa *cost driver* sehingga *activity based costing system* mampu mengalokasikan biaya aktivitas ke setiap produk secara tepat berdasar konsumsi masing-masing aktivitas sehingga harga pokok produksi lebih rendah.

Kata kunci : *activity based costing system*, *harga pokok produksi*

PENDAHULUAN

Manajemen yang berhasil mengalokasikan biaya secara efektif akan berdampak baik kepada profitabilitas suatu perusahaan. Semakin baik profitabilitas perusahaan maka daya saing perusahaan juga akan berkembang. Salah satu usaha yang dapat ditempuh oleh perusahaan adalah dengan mengendalikan faktor-faktor dalam perusahaan, seperti mengurangi dan mengendalikan biaya, tanpa harus mengurangi kualitas dan kuantitas produk yang telah ditetapkan. Pengendalian biaya akan lebih efektif bila biaya-biaya diklasifikasikan dan dialokasikan dengan tepat. Perhitungan biaya produksi yang selama ini menggunakan metode akuntansi biaya konvensional dapat menimbulkan

distorsi biaya produksi, yang dikarenakan metode tersebut hanya mempergunakan satu macam basis pembebanan biaya untuk pemakaian sumber daya yang berbeda dapat saja dikonsumsi berdasarkan basis yang berbeda pula. Untuk mengatasi keterbatasan pada metode akuntansi biaya konvensional maka dikembangkan sistem biaya yang didasarkan pada aktivitas yang disebut Sistem *activity based costing* (selanjutnya disebut *ABC*), yang didasari oleh asumsi bahwa aktivitas mengkonsumsi biaya dan produk mengkonsumsi aktivitas. Lanang (2013)

Harga pokok mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan harga jual produk. Penetapan biaya yang lebih tepat akan menghasilkan harga pokok produksi/jasa yang lebih akurat. Oleh karena

itu, perusahaan harus benar-benar serius menangani harga pokok produksinya. Dalam perhitungan biaya produk untuk menentukan harga pokok produksi/ jasa masih banyak perusahaan yang menggunakan sistem tradisional, yaitu metode *full costing* dan *variable costing* Mulyadi (2007:85)

Dalam sistem akuntansi tradisional, pembebanan biaya produksi dilakukan atas biaya langsung dan tidak langsung yang berhubungan dengan produk. Secara tradisional, pembebanan biaya atas biaya tidak langsung dilakukan dengan menggunakan dasar pembebanan secara menyeluruh atau per departemen. Hal ini akan menimbulkan banyak masalah karena produk yang dihasilkan tidak dapat mencerminkan biaya yang sebenarnya diserap untuk menghasilkan produk tersebut. Inilah yang mendasari dikembangkannya metode *activity based costing (ABC)*. Metode *activity based costing (ABC)* adalah suatu metode perhitungan yang sederhana untuk menentukan harga pokok produk/jasa dengan dasar bahwa aktivitaslah yang menyebabkan biaya itu timbul, bukan dari produk dan produklah yang mengkonsumsi aktivitas. Dalam *activity based costing (ABC)*, biaya-biaya dapat langsung ditentukan melalui aktivitas yang dilaluinya dan biaya untuk masing-masing aktivitas tersebut kemudian dibebankan produk atas dasar konsumsi masing-masing produk pada aktivitas. Klinik Wirausaha Madiun adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi mesin pertanian, mesin peternakan serta mesin produksi industri kecil menengah. Perusahaan ini terletak di jalan raya Madiun-Ponorogo Km.12, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun.

Produk dari Klinik Wirausaha Madiun telah dipasarkan hingga ke luar pulau diantaranya Kalimantan, Aceh, serta Riau. Bahan utama dari mesin-mesin yang dihasilkan adalah besi dan baja serta komponen mesin yang dirangkai sedemikian rupa hingga menghasilkan produk mesin yang di inginkan. Untuk membantu proses produksi, perusahaan menggunakan mesin serta peralatan canggih sehingga menyerap biaya yang banyak. Sehingga memerlukan perhitungan yang akurat agar pengalokasian biaya dapat dilakukan secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan pembuatan produk. Pengalokasian yang akurat serta pembebanan yang sesuai kebutuhan akan berdampak terhadap besar kecilnya biaya pokok produksi suatu produk dan penentuan harga jual produk serta dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Selama perusahaan ini berdiri, dalam penentuan harga pokok produksi masih menggunakan metode tradisional. Selain itu, sistem tradisional dapat menimbulkan distorsi biaya. Distorsi tersebut dalam bentuk pembebanan biaya yang terlalu tinggi (*cost overstate atau cost overrun*) untuk produk bervolume banyak dan pembebanan biaya yang terlalu rendah untuk (*cost understate atau cost underrun*) untuk produk yang bervolume sedikit. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat betapa pentingnya menggunakan *activity-based costing system* dalam perhitungan harga pokok produksi sebagai pengganti sistem tradisional. Melalui penerapan *activity based costing* ini juga dapat meminimalisasikan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah bagi produk, yang pada akhirnya akan dapat menghasilkan produk bernilai tinggi dengan biaya

seminimal mungkin. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan metode *activity based costing* untuk menghitung harga pokok produksi Klinik Wirausaha Madiun?.

LANDASAN TEORI

Pengertian *Activity Based Costing*

Daljono (2011) mendefinisikan *Activity Based Costing System (ABC System)* adalah BOP yang disebabkan oleh aktivitas dapat diurut ke unit produk individual berdasarkan frekuensi pemakaian (pengonsumsi) sumber daya overhead oleh setiap produk. Gorrison dan Noreen (2006) mendefinisikan *Activity Based Costing System (ABC System)* adalah metode costing yang dirancang untuk menyediakan informasi biaya bagi manajer untuk keputusan dan keputusan lainnya yang mungkin akan mempengaruhi kapasitas dan juga biaya tetap. Horngren (2008) mendefinisikan *Activity Based Costing System (ABC System)* adalah menghitung biaya setiap aktivitas serta membebankan biaya ke objek biaya seperti produk dan jasa berdasarkan aktivitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan tiap produk dan jasa.

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sistem ABC merupakan suatu metode mengenai sistem perencanaan

biaya yang dikembangkan untuk mengantisipasi kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam sistem akuntansi biaya tradisional.

Konsep Dasar *Activity Based Cost System*

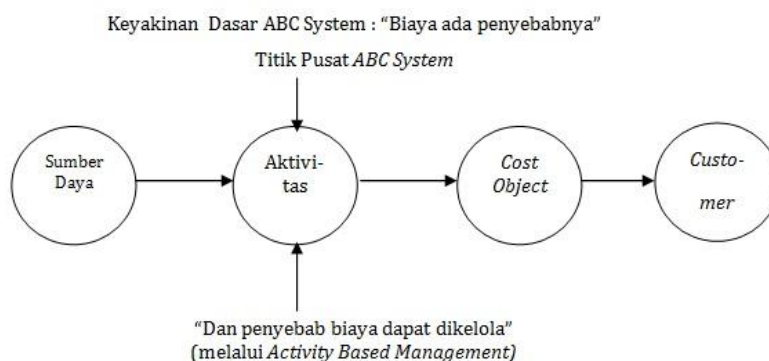
Mulyadi (2007: 52) mengungkapkan dua falsafah yang melandasi *Activity-Based Costing System* yaitu:

1) *Cost is caused*

Biaya ada penyebabnya dan penyebab biaya adalah aktivitas. Pemahaman tentang aktivitas yang menjadi penyebab timbulnya biaya akan menempatkan personel perusahaan pada posisi dapat mempengaruhi biaya. *Activity-Based Costing System* berawal dari keyakinan dasar bahwa sumber daya menyediakan kemampuan untuk melaksanakan aktivitas, bukan sekedar menyebabkan timbulnya biaya yang harus dialokasikan.

2) *The causes of cost can be managed*

Penyebab terjadinya biaya (yaitu aktivitas) dapat dikelola. Melalui pengelolaan terhadap aktivitas yang menjadi penyebab terjadinya biaya, personel perusahaan dapat mempengaruhi biaya. Pengelolaan terhadap aktivitas memerlukan berbagai informasi tentang aktivitas.



Gambar 2: Falsafah yang Melandasi *ABC System* (Mulyadi, 2007)

Dalam *Activity-Based Costing System* produk diartikan sebagai barang atau jasa yang dijual perusahaan. Produk-produk yang dijual perusahaan misalnya pelayanan kesehatan, asuransi, pelayanan konsultasi, buku, baju dan sebagainya. Semua produk tersebut dihasilkan melalui aktivitas perusahaan. Aktivitas-aktivitas tersebut yang mengkonsumsi sumber daya. Biaya yang tidak dibebankan secara langsung pada produk akan dibebankan pada aktivitas yang menyebabkan timbulnya biaya tersebut. Biaya untuk setiap aktivitas ini kemudian dibebankan pada produk yang bersangkutan. perusahaan misalnya pelayanan kesehatan, asuransi, pelayanan konsultasi, buku, baju dan sebagainya. Semua produk tersebut dihasilkan melalui aktivitas perusahaan. Aktivitas-aktivitas tersebut yang mengkonsumsi sumber daya. Biaya yang tidak dibebankan secara langsung pada produk akan dibebankan pada aktivitas yang menyebabkan timbulnya biaya tersebut. Biaya untuk setiap aktivitas ini kemudian dibebankan pada produk yang bersangkutan.

Sistem Perhitungan Biaya Berdasarkan *Activity Based Costing*

Para akademisi memiliki definisi yang beragam mengenai *Activity Based Costing*. Diataranya menurut Hansen dan Mowen (2009:122) metode *activity based costing* adalah sistem akumulasi biaya dan pembebanan biaya ke produk dengan menggunakan berbagai *cost driver*, dilakukan dengan menelusuri biaya dari aktivitas dan setelah itu menelusuri biaya aktivitas dan kemudian ke produk Dengan langkah mengidentifikasi biaya aktivitas dan

kemudian ke produk dalam menyusun *activity based costing*. Menurut Mulyadi (2009) menyatakan bahwa *activity based costing* adalah sistem informasi yang berorientasi pada penyediaan informasi lengkap tentang aktivitas untuk memungkinkan perusahaan melakukan pengelolaan terhadap aktivitas. Menurut Kamarudin Ahmad (2014:13) *Activity Based Costing* adalah suatu prosedur yang menghitung biaya objek seperti produk, jasa dan pelanggan. Sedangkan menurut Sofia P. Dewi dan Septian B. Kristanto (2013:49) *Activity Based Costing* merupakan suatu sistem akuntansi yang berfokus pada aktivitas yang dilakukan untuk memproduksi suatu produk. Dari beberapa definisi tersebut dapat dijabarkan bahwa suatu produk memerlukan aktivitas-aktivitas dalam mengkonsumsi sumber daya. Aktivitas merupakan tindakan yang berulang-ulang untuk memenuhi fungsi bisnis. Dalam hal ini, aktivitas menjadi titik akumulasi biaya yang fundamental. Biaya ditelusuri ke aktivitas dan aktivitas ditelusuri ke produk berdasarkan pemakaian aktivitas dari setiap produk.

Activity based costing menitik beratkan penentuan harga pokok produk pada semua fase pembuatan produk yang terdiri dari fase desain dan pengembangan produk yaitu fase awal dimana produk yang akan diproduksi dirancang sedemikian rupa agar tercipta suatu produk yang baik serta efisien dari segi biaya. Yang termasuk dalam fase ini meliputi biaya desain produk dan biaya pengujian. Fase produksi adalah fase dimana bahan awal diproses dan diolah untuk menciptakan produk yang telah didesain sebelumnya. Yang termasuk dalam fase ini adalah *Unit Level Activity Cost* (biaya aktivitas unit) adalah

aktivitas yang berkaitan dengan jumlah unit yang diproduksi seperti jam buruh dan jam mesin.

Batch Level Activity Cost (biaya aktivitas batch) merupakan aktivitas yang tingkatnya berkaitan dengan jumlah produksi batch seperti setup mesin dan sebagainya. *Product Sustaining Activity Cost* (biaya aktivitas mempertahankan produk) yaitu aktivitas yang dibentuk untuk mendukung produksi individual seperti administrasi dan penagihan.

Yang terakhir adalah *Facility Sustaining Activity Cost* (biaya aktivitas mempertahankan fasilitas) yaitu aktivitas yang dibentuk untuk mendukung infrastruktur manajemen dan mendukung fasilitas seperti pemeliharaan, asuransi dan pajak. Di Klinik Wirausaha Madiun terdapat beberapa biaya dalam fase ini diantaranya adalah biaya iklan, biaya distribusi serta biaya garansi produk. Biaya tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel kategori aktivitas

Kategori aktivitas	Aktivitas	Driver Activity Cost
Mempertahankan fasilitas	Manajemen <i>plan</i> Akuntansi dan Personalia Perawatan Sewa dan Penyusutan	Meter persegi ruangan Jumlah pekerja
Mempertahankan produk	Desain produk Administrasi <i>part</i> Pengiriman produk	Jumlah produk Jumlah <i>part</i>
Hubungan <i>batch</i>	Setup mesin Inspeksi pertama Order pembelian Handle bahan Skedul produksi	Jam setup Jam inspeksi Jumlah <i>order</i> Jumlah perpindahan bahan Jumlah produksi
Hubungan unit	Inspeksi setiap <i>item</i> Supervisi jam kerja Penggunaan listrik Oli untuk menjalankan mesin	Jumlah unit Jumlah jam kerja Jam mesin

Pengidentifikasian pemicu biaya

Pada saat perusahaan memakai penentuan biaya dasar aktivitas, pemicu biaya merupakan dasar untuk pembebanan biaya. Pemicu biaya (*cost driver*) adalah setiap aktivitas yang menyebabkan suatu biaya dikeluarkan. Terdapat dua faktor yang perlu dipertimbangkan manakala memilih pemicu biaya :

- 1) Kemudahan pencarian data yang berkaitan dengan pemicu biaya.
- 2) Kadar terhadapnya pemicu biaya mengukur konsumsi aktual oleh produk dari aktivitas yang terlibat.

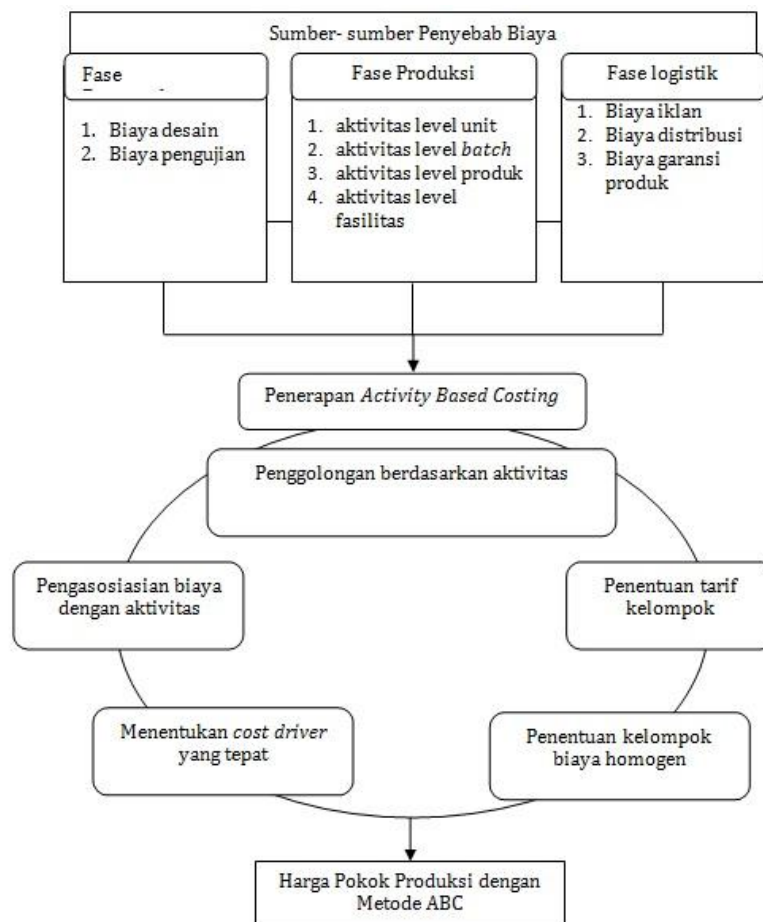
Informasi rinci mengenai pemicu biaya tertentu mungkin sukar dicari. Anggaph suatu perusahaan ingin membentuk suatu pusat aktivitas yang bernama penanganan bahan baku. Setelah melalui analisis yang cermat, manajemen menetapkan bahwa banyaknya frekwensi penanganan merupakan pemicu biaya yang tepat untuk dipakai dalam pembebanan biaya penanganan bahan baku ke produk-produk. Namun manajemen menemukan bahwa tidak ada alat yang efektif untuk mencatat berapa kali suatu jenis bahan baku ditangani selama satu periode sehingga membuat penggunaan pusat aktivitas yang

baru tadi menjadi tidak laik secara ekonomis. Hambatan kelaikan ekonomis kerap kali menjadi kendala untuk penggunaan *activity based costing*. Dalam memilih suatu pemicu biaya untuk suatu pusat aktivitas, manajer-manajer, seharusnya memastikan bahwa pemicu biaya tersebut mengukur secara

akurat konsumsi aktivitas aktual oleh berbagai produk perusahaan. Apabila tidak terdapat kadar korelasi yang tinggi antara pemicu biaya dengan konsumsi aktual, hal tersebut akan mengakibatkan penentuan biaya yang tidak akurat.

Kerangka Berpikir

Berikut merupakan gambaran kerangka pemikiran dari penelitian ini:



METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Klinik Wirausaha Madiun yang terletak terletak di jalan raya Madiun - Ponorogo Km.12, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis dan studi komparatif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber data yang

digunakan dalam penelitian ini terdiri atas: data primer dan data sekunder. Adapun prosedur pengumpulan data meliputi: penelitian lapangan dengan wawancara, observasi dan penelitian kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan untuk menghitung harga pokok produksi dengan menggunakan *activity-based costing system* dengan tahapan sebagai berikut:

1) Tahap pertama

Tahap pertama menentukan harga pokok berdasar aktivitas adalah menelusuri biaya dari sumber daya ke aktivitas yang mengkonsumsinya. Tahap ini terdiri dari mengidentifikasi dan menggolongkan aktivitas ke dalam empat level aktivitas, menghubungkan berbagai biaya dengan berbagai aktivitas, menentukan *cost driver* yang tepat untuk masing-masing aktivitas, penentuan kelompok-kelompok biaya yang homogen (*homogeneous cost pool*), penentuan tarif kelompok (*pool rate*). Menurut Supriyono (2007:227), dalam menentukan tarif kelompok atau *pool rate* menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Tarif BOP per kelompok aktivitas} = \frac{\text{BOP kelompok aktivitas tertentu}}{\text{Driver biayanya}}$$

2) Tahap kedua

Membebankan tarif kelompok berdasarkan *cost driver* yang digunakan untuk menghitung biaya *overhead* pabrik yang dibebankan. Biaya untuk setiap kelompok biaya *overhead* pabrik dilacak ke berbagai jenis produk. Menurut Supriyono (2007:227), Biaya *overhead* pabrik ditentukan dari setiap kelompok biaya ke setiap produk dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{BOP dibebankan} = \text{tarif kelompok} \times \text{unit cost driver yang digunakan}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Harga pokok produksi dapat dihitung dengan sistem tradisional dan *activity-based costing system*. Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh suatu penjelasan bahwa Klinik Wirausaha Madiun belum menerapkan *activity based costing* dan masih menggunakan sistem yang sangat sederhana dalam menentukan harga pokok produksi. Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan didapatkan keterangan bahwa pihak manajemen perusahaan tidak terlalu mempermasalahkan metode dalam penentuan harga pokok. Bagi Klinik Wirausaha tidak begitu penting menentukan metode atau cara dalam menentukan harga pokok produksi. Dalam menentukan harga jual, pihak internal hanya menjumlahkan semua pengeluaran selama pembuatan produk kemudian menambahkan dengan prosentase laba yang ingin diperoleh perusahaan.

Berdasarkan pembebanan biaya *overhead* pabrik yang telah dilakukan, maka perhitungan harga pokok produksi dengan menggunakan *activity-based costing system* pada Klinik Wirausaha Madiun Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Perhitungan HPP dengan menggunakan ABC Sistem

Keterangan	Mesin Potong Kerupuk Konfeyor	Mesin Pencacah (<i>coper</i>)
BBB	Rp. 93.720.000	Rp. 12.480.000
BTKL	Rp. 102.960.000	Rp. 28.800.000
BOP (pembulatan)	Rp. 122.483.000	Rp. 86.346.000
HPP	Rp. 319.163.000	Rp. 127.626.000
Unit produk	12	24
HPP Per Unit (pembulatan)	Rp. 26.596.916	Rp. 5.317.750

Sumber : Data sekunder yang telah diolah

Hasil perhitungan Harga Pokok Produksi per unit pada tahun 2014 menggunakan *activity-based costing system* diperoleh hasil harga pokok produksi untuk mesin potong kerupuk konfeyor sebesar

Rp.26.596.916 dan untuk mesin pencacah (*coper*) sebesar 5.317.750. Perbandingan harga pokok produksi sistem tradisional dengan *activity based costing system* dapat disajikan pada Tabel berikut:

Perbandingan sistem tradisional dengan sistem ABC

Jenis Produk	Sistem Tradisional (Rp)	Sistem ABC (Rp)	Selisih (Rp)
Mesin Potong Kerupuk Konfeyor	35.000.000	26.596.916	8.403.084
Mesin Pencacah (<i>coper</i>)	5.500.000	5.317.750	182.250

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa *activity-based costing system* memberikan hasil yang lebih kecil untuk kedua jenis mesin yang diteliti. Perbedaan yang terjadi antara harga pokok produksi berdasar sistem tradisional dan *activity-based costing system* disebabkan karena pembebanan biaya *overhead* pabrik pada masing-masing produk. Pada sistem tradisional biaya *overhead* pabrik pada masing-masing produk hanya dibebankan pada satu *Cost Driver* saja yaitu jumlah unit produksi. Pada *activity-based costing system* biaya *overhead* pabrik pada masing-masing produk dibebankan dalam beberapa *cost driver* sehingga *activity based costing system* mampu mengalokasikan biaya aktivitas ke setiap produk secara tepat berdasar konsumsi masing-masing aktivitas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dengan melakukan analisis data biaya pada Klinik Wirausaha Madiun kemudian dilanjutkan dengan perancangan dan perhitungan kembali data biaya yang terkumpul guna

melakukan analisis penerapan sistem *activity based costing (abc)* dalam penetapan harga pokok produksi pada mesin potong kerupuk konfeyor dan mesin pencacah (*coper*) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perhitungan harga pokok produksi dengan sistem *activity based costing (abc)* lebih rendah dibandingkan dengan sistem tradisional

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan tersebut, maka disarankan kepada Klinik Wirausaha Madiun melakukan perhitungan biaya produksi dan perhitungan harga jual dengan menggunakan sistem *activity based costing (abc)* sehingga menghasilkan biaya produksi yang lebih akurat dan harga jual yang lebih rendah yang mampu bersaing tanpa mengurangi tingkat keuntungan yang diperolehnya. Sedangkan untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk benar-benar memahami konsep dasar dari sistem *activity based costing (abc)* dan menerapkannya pada perusahaan yang memiliki biaya *overhead* dalam jumlah yang besar dalam akumulasi biaya produksi dan memiliki beragam jenis produk yang menggunakan fasilitas yang sama sehingga

penerapan sistem *activity based costing (abc)* dapat membantu manajemen dalam pembebanan biaya pada masing-masing produk yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Kamarudin, 2014, *Akuntansi Manajemen : Dasar-dasar Konsep Biaya dan Pengambilan Keputusan, Edisi Revisi 9*. Jakarta : Rajawali Pers
- Arikunto, Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. Edisi revisi cetakan 14*. Jakarta : Rineka Cipta
- Daljono. 2011. *Akuntansi Biaya*. Edisi tiga, Semarang : Badan Penerbit Semarang.
- Garrison, Ray H., Eric W. Noreen, dan Peter C. Brewer. (2006). *Akuntansi Manajerial*. Jilid 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Harnanto, 2001. *Akuntansi Biaya Perhitungan Harga Pokok Produksi*. Edisi 4. BPEF Yogyakarta.
- Hansen, Don R dan Maryanne M. Mowen. 2009. *Akuntansi Manajerial*. Buku dua Edisi delapan, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Horngren, dkk. 2008. *Akuntansi Biaya*. Jakarta: Erlangga. Moh. Pabundu Tika. (2006). *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara
- Lanang Sadewa, 2013 *Design Penerapan Activity Based Costing untuk menentukan harga pokok produksi pada Perusahaan Autobody Manufaktur dan Komponen Otomotif di CV Delima Mandiri.Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Mulyadi, 2007, *Activity Based Cost System*. Edisi Enam, Yogyakarta, UPP STIM YKPN Yogyakarta
- Mulyadi, 2007, *Activity Based Cost System: Sistem Informasi Biaya untuk Pengurangan Biaya*. Edisi ke-6. Yogyakarta, UPP AMP YKPN
- Simbolon, Maropen R.. 2008. *Sistem Activity Based Costing Sebagai Alternatif Pembebanan Biaya Overhead Pada Perusahaan Manufactur*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol.2 No. 2, Oktober.
- Sekaran, Uma. 2009. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Edisi Empat. Jakarta:Salemba Empat.
- Subhi, Ramadhan 2006. *Penerapan Sistem ABC (Activity Based Costing) Dalam Perusahaan*. Media Infotama Vol I, No. 2, Bln 2. Bengkulu : STIE Dehasen.
- Sumarsid. 2011. *Pendekatan Metoda Activity Based Costing Pada Perencanaan Harga Pokok Produksi Untuk Memperoleh Keunggulan Bersaing*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen dan Kewirausahaan "Optimal". Vol 5, No. 1, Maret.
- Supriyono, 2002. *Akuntansi Biaya dan Akuntansi Manajemen Untuk Teknologi Maju dan Globalisasi*. Edisi Dua, Yogyakarta: Penerbit BPFE Yogyakarta.
- Supriyono, 2007. *Akuntansi Biaya*. Edisi Dua, Yogyakarta: Penerbit BPFE Yogyakarta.

PENGARUH *MANAGEMENT ACCOUNTING SYSTEM-BROADSCOPE* TERHADAP KINERJA MANAJERIAL DENGAN KETIDAKPASTIAN TUGAS SEBAGAI VARIABEL MODERATING (STUDI DI KOPERASI KABUPATEN PONOROGO)

Oleh:

DAVID EFENDI¹⁾

SETYO ADJI²⁾

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

ABSTRAK

Peran MAS belum berfungsi terhadap kinerja manajerial. Meskipun studi Mia dan Chenhall (1994) memperoleh temuan yang menunjukkan adanya hubungan *management accounting system* terhadap kinerja manajerial. Namun demikian beberapa studi memperoleh temuan adanya kecenderungan variabel kontinjensi yang melemahkan peran *management accounting system* disaat situasi ketidakpastian rendah. Situasi rendahnya ketidakpastian cenderung membuat *management accounting system* tidak berfungsi. Rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) Apakah ketidakpastian tugas mempengaruhi besar kecilnya hubungan *broadscope* terhadap kinerja manajerial? Dan (2) Apakah ketidakpastian tugas mempengaruhi besar kecilnya hubungan *broadscoper* terhadap kinerja manajerial? Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pemilihan sampel random acak. Ukuran sampel menggunakan rumus Rao (1996) diketahui besarnya sampel sebanyak 55 manajer. Teknik analisis data yang digunakan, statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas dan analisis regresi. Ketidakpastian tugas memperkuat hubungan *management accounting system* untuk *broadscope* terhadap kinerja manajerial. Dengan demikian *management accounting system* (MAS) dapat dijadikan alat dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja manajerial.

Kata Kunci: *management accounting system, ketidakpastian tugas, kinerja manajerial*

PENDAHULUAN

Informasi yang relevan dibutuhkan dalam pengambilan keputusan (Harrison 1996) salah satunya adalah informasi akuntansi.

Informasi akuntansi dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan (Chung 2011) dan mendukung setiap perencanaan (Israelsen 2011). Dengan demikian ketersediaan informasi akuntansi di organisasi membantu dalam pengambilan keputusan (Siyanbola dan Tunji 2012).

Lebih dari itu informasi akuntansi merupakan salah satu mekanisme kontrol perusahaan yang penting dan juga digunakan mempromosikan dan mengukur kinerja manajemen dan karyawan (Sugijanto 2013).

Management accounting system (MAS)

merupakan fenomena dan topik perdebatan di kalangan akademik dan praktisi (Zoni dkk. 2012).

Gordon dan Narayanan (1984) melakukan studi yang bertujuan melihat keberadaan MAS yang memfasilitasi pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Temuan studi memperlihatkan bahwa (1) MAS berhubungan dengan struktur organisasi; (2) MAS tidak berhubungan struktur organisasi saat variabel dikendalikan ketidakpastian lingkungan. Temuan Gordon dan Narayanan (1984) ini memperlihatkan bahwa ketidakpastian memiliki kekuatan mempengaruhi situasi di organisasi. Kemampuan ketidakpastian dalam mempengaruhi organisasi dibuktikan oleh

studi Bastian dan Muchlish (2012) yang menemukan bahwa ketidakpastian lingkungan memiliki signifikansi positif terhadap strategi bisnis dan kinerja organisasi. Temuan lain juga didapatkan Agbejule (2005) yang menyatakan bahwa peran MAS terhadap kinerja tergantung pada ketidakpastian lingkungan. Studi beberapa peneliti menunjukkan bahwa peran ketidakpastian mempengaruhi peran MAS dalam memfasilitasi pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja manajerial. Seperti studi Gul (1991) yang mendapatkan temuan bahwa kinerja manajerial tergantung pada ketidakpastian lingkungan. Temuan studi lain menunjukkan bahwa ketidakpastian begitu dominan terhadap MAS dalam mempengaruhi kinerja manajerial (Chong 1996; Chong dan Chong 1997; Agbejule 2005; Chiou 2011).

Ketidakmampuan MAS berkontribusi terhadap kinerja manajerial pada kondisi ketidakpastian lingkungan rendah menarik minat peneliti melakukan studi MAS terhadap kinerja manajerial. Seperti studi yang dilakukan Gul dan Chia (1994), Chia (1995), Chong (1996; 1998; 2004); Chong dan Eggleton (2003), Agbejule (2005, 2011); Chung dkk. (2012); Hammad dkk. (2013).

Gul (1991) dalam studinya mengajukan pertanyaan apakah hubungan MAS dan kinerja tetap sama di saat terlepas dari ketidakpastian. Studi yang dilakukan pada perusahaan kecil yang memiliki kategori 10 sampai 100 karyawan ini memperoleh temuan bahwa dampak MAS terhadap kinerja tergantung pada ketidakpastian lingkungan. Temuan Gul (1991) menunjukkan bahwa ketidakpastian lingkungan dominan terhadap

MAS ini juga ditemukan oleh Chong dan Chong (1997), Agbejule (2005) dan Chiou (2011). Artinya beberapa studi memperoleh temuan bahwa peran MAS tidak berfungsi karena ada ketidakpastian. Meskipun demikian ada beberapa studi yang memperoleh temuan bahwa MAS berperan sesuai dengan teori yaitu meningkatkan kinerja manajerial.

Temuan ini didapatkan Mia dan Chenhall (1994), Chia (1995) dan Mia dan Patiar (2001). Koperasi merupakan salah satu organisasi yang melakukan perubahan terhadap struktur untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan ekonomi yang cepat berubah yang ditandai meningkatnya globalisasi dan industrialisasi pertanian (Royer 1999). Koperasi telah lama mewakili organisasi ekonomi yang di rancang untuk melayani anggotanya dan bukan menghasilkan keuntungan bagi investor (Valentinov 2004).

Namun demikian Helmberger dan Hoos (1962) memberikan pernyataan berbeda yang menyatakan bahwa koperasi adalah institusi yang sepenuhnya mempertahankan diri dengan mencari keuntungan. Pernyataan tersebut menguatkan bahwa koperasi secara teoritis ekonomi merupakan organisasi bisnis (Robotka 1947) meskipun koperasi bukan sebagai perusahaan (Philips 1953).

Koperasi merupakan alternatif ekonomi dan layak di bentuk dari ketidakberdayaan (Bello dan Zaria 2005). Dinegara maju atau di barat koperasi lahir sebagai gerakan melawan ketidakadilan pasar oleh karenanya koperasi tumbuh dan berkembang dalam suasana persaingan pasar (Soetrisno 2003). Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa kelahiran koperasi di

seluruh dunia disebabkan tidak dapat dipecahkannya masalah kemiskinan atas dasar semangat individualisme (Masngudi 1990). Lebih lanjut Masngudi (1990) menambahkan bahwa koperasi lahir sebagai alat untuk memperbaiki kepincangan dan kelemahan dari perekonomian yang kapitalis. Dengan demikian koperasi di pandang sarana penting untuk pengembangan masyarakat (Zeuli dkk. 2004).

Dalam situasi krisis, koperasi mampu bertahan bahkan berkembang (Birchall dan Ketilson 2009). Dewasa ini banyak yang berpandangan bahwa koperasi itu identik dengan badan usaha marginal yang hanya bisa hidup bila mendapat bantuan pemerintah (Hutasuhut 2011). Lebih dari itu koperasi sering disejajarkan dengan suatu usaha yang tidak efisien (Soetrisno 2001). Namun demikian dilain pihak koperasi ditempatkan sebagai sebuah usaha yang efisien dan sejajar dengan badan-badan usaha non koperasi (Soetrisno 2001). Keefisienan dan kesejajaran koperasi dengan badan – badan usaha non koperasi tidak lepas dari kondisi keuangan koperasi. Terkait dengan hal tersebut maka peran manajer yang memiliki pemahaman kondisi keuangan dan kemampuan manajer dalam mengambil keputusan (Adzim 2011).

Hal ini menunjukkan bahwa peran manajer dalam koperasi merupakan hal penting salah satunya dengan pengambilan keputusan yang diambilnya untuk menghasilkan kinerja. Dari uraian yang dipaparkan terlihat bahwa peran MAS belum berfungsi terhadap kinerja manajerial. Meskipun studi Mia dan Chenhall (1994) memperoleh temuan yang menunjukkan adanya hubungan *management accounting*

system terhadap kinerja manajerial. Namun demikian beberapa studi memperoleh temuan adanya kecenderungan variabel kontinjensi yang melemahkan peran *management accounting system* disaat situasi ketidakpastian rendah. Situasi rendahnya ketidakpastian cenderung membuat *management accounting system* tidak berfungsi. Hasil temuan studi terdahulu dan peran koperasi perlu dilakukan penelitian untuk melihat hubungan *management accounting system* dan kinerja manajerial di koperasi.

Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat diberikan masalah penelitian ini, yaitu: Bagaimana peran MAS meningkatkan kinerja manajerial yang di moderasi oleh ketidakpastian tugas? Dari masalah penelitian tersebut maka dapat diberikan rumusan masalah penelitian: Apakah ketidakpastian tugas mempengaruhi besar kecilnya peran *management accounting system-brandscope* terhadap kinerja manajerial?

Management accounting system

Management accounting system (MAS) memberikan informasi internal kepada manajemen berkenaan dengan pengambilan keputusan (Watts dkk. 2014). Lebih jauh lagi Watts dkk. (2014) menambahkan dalam posisi taktis manajemen bergantung pada *management accounting system* (MAS) selain itu juga *management accounting system* berkemampuan untuk menentukan perubahan dalam organisasi.

MAS sebagai subsistem informasi formal dalam organisasi menjamin utilitas sebagai alat layanan untuk manajer (Moliner dan Ruiz 2004). MAS yang merupakan gabungan multidimensi perencanaan dan

subsistem pengendalian (J.Williams dan Seaman† 2002) ini memberikan informasi yang diperlukan manajer untuk pengambilan keputusan (Jerman dkk. 2012).

Menurut Zimmerman (2001) dalam studinya, MAS suatu perusahaan bertujuan menyediakan informasi tepat waktu dan relevan dalam memfasilitasi pengambilan keputusan. Bahkan lebih dari itu MAS dapat digunakan untuk memotivasi karyawan mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian MAS menyediakan informasi bagi manajemen dan pengguna internal lainnya (Alikhani dkk. 2013). Dalam pembagian sistem informasi dalam suatu perusahaan terbagi menjadi dua, yakni: (1) *management information system* (MIS) dan *accounting information system* (AIS). Kedua sistem memiliki perbedaan MIS memiliki informasi transaksi keuangan dan non keuangan sedangkan AIS hanya pada transaksi keuangan (Tokic dkk. 2011). Ada banyak pengertian diberikan terhadap MAS namun disini hanya diberikan dua pengertian yaitu:

Fleischman dkk. (2010):

MAS adalah layanan informasi, saran dan melaporkan kepada akuntan manajemen dan pengguna akhir untuk mendukung pengambilan keputusan.

Ajibolade (2013):

MAS didefinisikan dari persepektif tradisional sebagai prosedur dan siklus sistem pelaporan keuangan yang ada di organisasi yang relevan untuk perencanaan dan pengendalian. MAS ini sebagai sistem yang berusaha meningkatkan kinerja dengan penggunaan sumberdaya yang efektif dan efisien.

Chenhall dan Morris (1986) membagi MAS sebagai informasi kepada manajer menjadi empat karakteristik, yaitu: *broadscope*, *timeliness*, *aggregation* dan *integration*. Terkait dengan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut mengenai *broadscope*:

Broadscope adalah salah satu dari *scope*, *scopes*nya adalah *narrow scope* (Bouwens dan Abernethy 2000). *Broadscope* yang merupakan salah satu karakteristik MAS ini yang memberikan keragaman kebutuhan informasi untuk pengambilan keputusan (Chia 1995).

Chia (1995) keragaman dimaksud terdiri dari informasi ekonomi (Seperti: total penjualan dan pangsa pasar), non ekonomi (kemajuan teknologi, perubahan perkembangan lingkungan) dan aspek lingkungan. *Broadscope* ini mengacu pada dimensi fokus, kuantifikasi dan waktu yang membantu keputusan manajerial (Chenhall dan Morris 1986). Lebih lanjut Chenhall dan Morris (1986) menjelaskan bahwa *broadscope* meliputi informasi eksternal, informasi non keuangan dan informasi yang berorientasi ke depan. Dengan demikian *broadscope* ini menyediakan informasi internal dan eksternal organisasi untuk pengambilan keputusan (Chia 1995).

Ketidakpastian Tugas

Ketidakpastian didefinisikan sebagai ketidaksempurnaan hubungan antara informasi dan lingkungan (Palmer 2005). Pengolahan sistem informasi merupakan salah satu upaya mengurangi ketidakpastian, untuk itu diperlukan mengumpulkan informasi untuk pencapaian tujuan (Anselme 2010). Lebih dalam Anselme (2010)

menyatakan bahwa sistem informasi salah satu organik di organisasi untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mengenai peristiwa ke depan yang signifikan dengan psikologis. Dengan demikian, ketidakpastian itu bukan hanya pada atribut peristiwa itu sendiri namun juga berkenaan dengan keadaan psikologis individu yang menghadapinya (Anselme 2010).

Ketidakpastian yang merupakan kunci kontinjensi antara kinerja karyawan dan kesejahteraan (Leach dkk. 2013) yang juga sebagai mekanisme mediasi yang menjelaskan perilaku komunikasi. Berdasarkan sumbernya, ketidakpastian ada tiga jenis, yaitu: (1) tugas (*task*), (2) lingkungan (*environment*) dan (3) saling ketergantungan (*interdependence*) (Daft dan Lengel 1986). beberapa definisi ketidakpastian tugas diberikan sebagai berikut:

(1) Hirst (1983)

Ketidakpastian tugas didefinisikan sebagai ketidakpastian dari kompleksitas dan keragaman tugas dari manajer. Keragaman tugas manajer.

(2) Chenhall (2003)

Ketidakpastian didefinisikan sebagai ketidakpastian yang disebabkan kompleksitas dan keragaman tugas yang dilakukan manajer. Batasan ini sama dengan batasan yang diberikan oleh Hirst (1983).

(3) Chang dkk. (2003)

Ketidakpastian tugas didefinisikan sebagai perbedaan antara jumlah informasi dengan informasi yang dimiliki untuk keperluan penyelesaian masalah.

Keragaman definisi terhadap ketidakpastian tugas oleh Chong dan Eggleton

(2003) disimpulkan bahwa ketidakpastian tugas akan meningkatkan kompleksitas keputusan yang dihadapi manajer.

Kinerja manajerial

Kinerja manajerial menjadi topik menarik dan penelitian sejak Fayol menerbitkan karyanya pada tahun 1916 (Borman dan Brush 1993).

Hal ini karena kinerja manajerial mampu mempengaruhi budaya organisasi dan produktivitas (Young dkk. 2000) serta konsekuensi perilaku yang mempengaruhinya (Staw dan Barsade 1993).

Seperti studi yang dilakukan Emmanuel dkk. (2007) dikatakan bahwa literatur teoritis dalam pengendalian manajemen meningkatkan kinerja manajerial melalui motivasi manajerial. Pernyataan ini juga diberikan oleh Mia (1989) dengan argumen bahwa partisipasif berpotensi meningkatkan kinerja manajerial.

Mahoney dkk. (1963) melakukan studi yang berkontribusi meningkatkan pemahaman mengenai sifat kinerja manajerial. Dua dimensi yang memiliki relevansi dengan kinerja manajerial, yaitu: *managerial functions* dan *managerial competence*. Kedua dimensi ini menyediakan kerangka kerja (*framework*) menganalisis kerja manajer (Mahoney dkk. 1963). Sehingga Mahoney dkk. (1963) menggunakan dimensi *managerials functions* dalam studinya bahkan instrumen dimensi *managerial functions* ini digunakan oleh banyak peneliti. Sedangkan *managerial competence* berfokus pada bidang kompetensi teknis atau pengetahuan yang meliputi: *employess, finances, material and goods, purchaces and sales, methods and procedures, facilities and equipment*. Kinerja

manajerial demikian menarik untuk di teliti sehingga Borman dan Brush (1993) melakukan studi yang bertujuan mendapatkan induktif taksonomi kinerja manajerial dari studi empiris kinerja manajerial.

Staw dan Barsade (1993) menyatakan bahwa kinerja manajerial merupakan topik menarik untuk menyelidiki konsekwensi yang diakibatkannya. Hal ini karena: (1) manajer relatif tidak terstruktur yang dimungkinkan subjek mempengaruhi peran Miner (1987), (2) berdasarkan penelitian psikologis menyatakan bahwa perilaku adalah sentral untuk kerja manajerial (Mintzberg 1990). Manajer secara interpersonal terlibat dengan peran rutin dengan pengambilan keputusan yang didasari oleh informasi dan tujuan organisasi (Mintzberg 1990). Pengambilan keputusan yang dilakukan manajerial lama menjadi perdebatan (Chalos dan Haka 1989). Dan banyak studi dilakukan untuk hal tersebut.

Seperti studi Wood dan Bandura (1991) yang menemukan hubungan antar *self-efficacy* dengan pengambilan keputusan manajerial. Dalam suatu lingkungan pengambilan keputusan adalah proses berkelanjutan yang memerlukan integrasi kompleks dari beberapa sumber informasi (Mintzberg 1990). Yang terpenting keputusan manajerial dalam mencapai tujuan organisasi adalah bagaimana menggunakan bakat, membimbing dan memotivasi manusia (Wood dan Bandura 1991) dan data yang ambigu dan tidak lengkap (Staw dan Barsade 1993).

Studi Chia (1995) mendapatkan temuan bahwa MAS berkontribusi terhadap

kinerja manajerial. Chang dkk. (2003) juga memperoleh temuan yang menunjukkan bahwa kinerja dapat ditingkatkan dengan tersedianya MAS. Dengan menggunakan regresi ganda, Chong (1998) memperoleh temuan yang menunjukkan bahwa interaksi MAS dengan *tolerance for ambiguity* mempengaruhi kinerja manajerial.

Studi Luthans dan Stewart (1978) menyatakan bahwa *general contingency theory* dapat digunakan untuk mengikat unsur-unsur teoritis manajemen. Selain itu disarankan oleh Luthans dan Stewart (1978) bahwa metodologi berbasis *contingency* digunakan mengembangkan teori tertentu untuk menjadi disintesis dan teori umum manajemen yang terpadu.

Otley (1980) mengatakan bahwa pendekatan kontijensi untuk akuntansi manajemen didasarkan pada premis: tidak ada sistem akuntansi universal sesuai yang berlaku sama untuk semua organisasi dalam semua keadaan. Sebaliknya akuntansi manajemen akan tergantung pada suatu keadaan tertentu dimana sebuah organisasi berada. Di sanalah keberadaan teori kontinjensi harus mengidentifikasi spesifik aspek sistem akuntansi yang terkait dengan kondisi tertentu.

contingency mengembangkan pertanyaan yang mengukur tingkat ketidakpastian (*uncertainty*) dan kompleksitas di tempat kerja. Ketidakpastian (*uncertainty*) oleh Driskill dan Goldstein (1986) didefinisikan yang mengacu pada usulan Garbaith sebagai perbedaan antara jumlah informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah dengan jumlah informasi yang sudah dimiliki. Studi Chong

(1996) mencoba meneliti efek interaktif MAS terhadap kinerja manajerial.

Dalam studinya ini Chong (1996) memasukan variabel kontinjensi yaitu ketidakpastian tugas (*task uncertainty*) sebagai variabel moderating. Temuan yang diperoleh Chong (1996) menunjukkan bahwa situasi ketidakpastian tugas tinggi dengan tingkat penggunaan MAS lingkup luas akan meningkatkan kinerja manajerial.

Studi Chong dan Eggleton (2001) menguji tiga arah interaksi antara *locus of control*, ketidakpastian tugas dan *management accounting system* (MAS) yang mempengaruhi kinerja manajerial. Hasil studi Chong and Eggleton (2001) tiga arah transaksi *locus of control*, ketidakpastian tugas dan MAS mempengaruhi kinerja. Artinya *management accounting system* mempengaruhi kinerja manajerial.

Dengan survei kuesioner dari 131 manajer senior perusahaan di Australia, Vincent K. Chong (2004) menganalisis studinya yang bertujuan menguji *job relevant information*, antara *management accounting system* dan ketidakpastian tugas terhadap kinerja manajerial. Hasil studi memperoleh temuan interaksi tiga arah *job relevant information*, *management accounting system* dan ketidakpastian tugas mempengaruhi kinerja manajerial. Selain itu, disisi lain situasi ketidakpastian tugas yang tinggi pada penggunaan informasi *management accounting system* *broad scope* dan *timely*, dan *job relevant information* untuk pengambilan keputusan mempengaruhi peningkatan kinerja manajerial. Chong (1996) dalam studinya menggunakan ketidakpastian tugas sebagai variabel moderating dalam

menyelidiki hubungan *management accounting system* *broad scope* dengan kinerja manajerial.

Hasil studi Chong (1996) memperoleh hasil yang menunjukkan bahwa situasi ketidakpastian yang tinggi dengan penggunaan *management accounting system* *broad scope* akan meningkatkan kinerja manajerial. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya kinerja manajerial ketika informasi *management accounting system* *broad scope* digunakan disaat situasi ketidakpastian tinggi (Chong 1996).

Ketidakpastian tugas juga dijadikan variabel moderating dalam studi Chong (2004). Variabel moderating ini diinteraksikan dengan *management accounting system* dan informasi pekerjaan yang relevan (*job-relevant information*). Temuan yang diperoleh Chong (2004) menunjukkan bahwa situasi ketidakpastian yang tinggi dengan menggunakan *management accounting system* *broad scope* dan penggunaan informasi pekerjaan yang relevan akan meningkatkan kinerja manajerial. Dengan melihat hasil studi yang telah dilakukan maka hipotesis yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

Ha : ketidakpastian tugas mempengaruhi besar kecilnya peran *management accounting system* terhadap kinerja manajerial.

Secara umum tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran *management accounting system* (MAS) terhadap kinerja manajerial yang ada di koperasi Kabupaten Ponorogo. Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan:

(1) Menganalisis dan mengevaluasi besar kecilnya ketidakpastian tugas

mempengaruhi hubungan *broadscope* terhadap kinerja manajerial.

METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah para manajer koperasi yang berada di Kabupaten Ponorogo- Jawa Timur. Populasi penelitian ini adalah manajer koperasi yang ada di Kabupaten Ponorogo - Provinsi Jawa Timur dengan dengan asumsi bahwa mereka memahami semua kegiatan operasional koperasi.

Alasan penggunaan koperasi di Kabupaten Ponorogo – Provinsi Jawa Timur karena provinsi ini sampai tercatat per 31 Desember 2014 memiliki 30.850 koperasi (Depkop 2014). Angka tersebut adalah jumlah koperasi terbanyak bila dibandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia di mana salah satunya adalah Kabupaten Ponorogo. Koperasi di Kabupaten Ponorogo 760 koperasi aktif (Indakop 2015) namun koperasi sejumlah ratus tersebut tidak seluruhnya memiliki manajer, hanya 121 koperasi yang memiliki manajer (Indakop 2015).

Metode pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pemilihan sampel random acak. Ukuran sampel menggunakan rumus Rao (1996) diketahui besarnya sampel sebanyak 55 manajer.

Terdapat 3 (empat) variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: *Management accounting system*, ketidakpastian tugas (*task uncertainty*) dan kinerja manajerial (*managerial performance*).

Adapun definisi dan pengukurannya adalah sebagai berikut:

Broadscope dalam penelitian ini didefinisikan sebagai karakteristik luas lingkup dari *management accounting system* yang meliputi dimensi fokus, horison waktu dan kuantifikasi (Gordon dan Narayanan 1984). Instrumen terdiri lima item yang dipergunakan oleh Chenhall dan Morris (1986) dengan 7 skala likert.

Ketidakpastian tugas (*task uncertainty*) didefinisikan sebagai perbedaan jumlah informasi yang diperlukan dengan jumlah informasi yang siap diproses Chong (1996). Variabel ketidakpastian tugas (*task uncertainty*) dalam penelitian ini diukur dengan instrumen yang digunakan oleh Chong (1996) dan Chong (2004) yang mengembangkan instrumen dari Withey dkk. (1983). Instrumen ketidakpastian tugas (*task uncertainty*) ini di ukur dengan menggunakan skala 1 sampai 7, sangat tidak setuju sampai sangat setuju.

Kinerja manajerial (*managerial performance*) adalah hasil kerja kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Variabel kinerja manajerial diukur dengan menggunakan instrumen Borman dan Brush (1993) yang dikenal dengan megadimensi. Dalam instrument ini, setiap responden diminta untuk mengukur kinerjanya terhadap instrumen dari megadimensi. Instrument ini diukur dengan skala 1 sampai 7, sangat tidak setuju sampai sangat setuju.

Teknik Analisis Data Statistik Deskriptif

Statistik deskripsi digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel-variabel penelitian.

Uji kualitas data

Kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrument penelitian dapat dievaluasi melalui uji reliabilitas dan ujuvaliditas. Uji ini dilakukan untuk mengetahui konsistensi dan akurasi data yang dikumpulkan dari penggunaan instrumen. Uji reliabilitas dalam penelitian ini di ukur dengan menggunakan *cronbach alpha*. Suatu variabel dikatakan relibel jika memiliki nilai *cronbach alpha* > 0.6 (Nunnaly dan Berstein 1994)

Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan analisis regresi untuk menguji semua hipotesis penelitian. Dengan model analisis sebagai berikut:

$$(1) MP = a + b_1BS + b_2TU + b_3BS.TU + e$$

Keterangan :

BS = *Broadscope*

TL = *Timeliness*

MP = *Managerial performance*
(kinerja manajerial)

TU = *Task uncertainty*
(ketidapastian tugas)

a = konstanta

BS.TU = Interaksi *broadscope*
dengan *taskuncertainty*

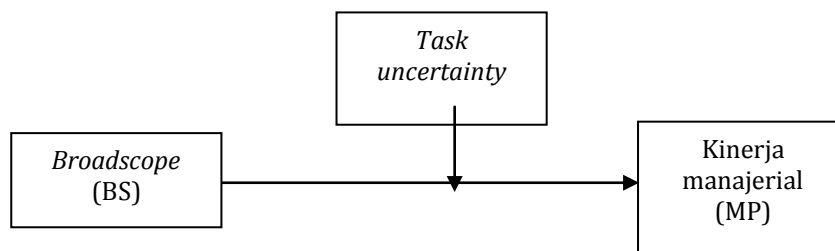
b_1, \dots, b_3 = koefisien

e = error

Pengujian hipotesis penelitian didasarkan pada estimasi parameter dari full model persamaan struktural. Pengujian hipotesis masing-masing hipotesis penelitian didasarkan pada nilai koefisien regresi (parameter). Hipotesis penelitian diterima jika nilai CR lebih besar dari nilai t-tabel ($\pm 1,96$) atau tingkat signifikansi sama atau di bawah 5% ($p \leq 0,05$) (Hair dkk. 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketidakpastian tugas (*task ucertainty*) selalu hadir dalam organisasi. Ketidakpastian tugas terkadang memberikan penguatan atau pelemahan terhadap situasi yang dihadapi manajer. Dalam penelitian ini memiliki model sebagai berikut:



Gambar 1. ketidakpastian tugas sebagai variabel moderating

Berdasarkan perolehan data maka diperoleh *output* dari SPSS maka diketahui validitas dan reliabilitas

Tabel 1. Uji validitas dan reliabilitas

variabel	validitas	Reliabilitas (cronbach alpha)	keterangan

<i>broadscope</i>	0.000	0.750	Valid dan reliabel
Ketidakpastian tugas	0.033	0.733	Valid dan reliabel
Kinerja manajerial	0.000	0.745	Valid dan reliabel

Sumber: di olah dari data primer, 2015

Selain itu diperoleh tabel 2 yang menunjukkan statistik deskriptif variabel penelitian dan tabel 2 menunjukkan korelasi antar variabel. Tabel tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Statistik Deskriptif (n=45)

	Variabel	Mean	Standard deviation	min	max
MP	Kinerja manajerial	1.9862E2	22.65682	143.00	231.00
BS	<i>Broadscope</i>	25.7333	4.14729	17.00	35.00
TL	<i>Timelines</i>	19.7111	2.76029	15.00	24.00
TU	Ketidakpastian tugas	32.4000	6.39744	15.00	43.00

Sumber: di olah dari data primer, 2015

Tabel 2. Korelasi antar variabel

variabel	Kinerja Manajerial	<i>broadscope</i>	timeliness	Ketidakpastian tugas
MP	1	.329*	.021	.355*
BS	0.329	1	-.056	.393**
TL	.021	-.056	1	-.044
TU	.355*	.393**	-.044	1

Sumber: di olah dari data primer, 2015

Uji hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini memiliki model sebagai berikut:

$$MP = a + b_1BS + b_2TU + b_3BS.TU + e \dots\dots\dots (1)$$

Hasil di tunjukkan pada tabel 3 dan tabel 4 yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil regresi sederhana uji hipotesis pertama

	Koefisien	Standar Error	Beta	Nilai t	Probabilitas
konstanta	154.785	19.477		7.947	.000
BS	2.088	.915	.329	2.282	.027
R ² = 0,108 F= 5.209 Sig F= .027					

Sumber: di olah dari data primer, 2015

Tabel 4. Hasil regresi ganda uji hipotesis pertama

	Koefisien	Standar Error	Beta	Nilai t	Probabilitas
konstanta	34.368	101.126		.340	.736

BS	6.655	5.277	1.048	1.261	.214
TU	3.629	2.742	1.059	1.323	.193
BS.TU	-.141	.139	-1.357	-1.009	.319
$R^2 = .188$		$F = 3,169$	$\text{Sig } F = 0,034$		

Sumber: di olah dari data primer, 2015

Tabel 3 menunjukkan R^2 (*r square*) menunjukkan angka 0,108 Angka tersebut mengartikan bahwa besarnya pengaruh *broadscope* terhadap kinerja manajerial sebesar 10,8% saat terdapat ketidakpastian tugas. Besaran 10,8% mengartikan bahwa ketidakpastian tugas mempengaruhi hubungan *broadscope* terhadap kinerja manajerial. Sisanya 89,2% di pengaruhi oleh variabel lain di luar model ini. Saat dimoderating terlihat pada *r square* pada tabel 4 menunjukkan 18,8%. Perbedaan nilai *r square* yang lebih tinggi dibandingkan sebelum di moderating menunjukkan bahwa ketidakpastian tugas memperkuat hubungan *broadscope* terhadap kinerja manajerial.

Secara simultan nilai F signifikan 0,034. Nilai ini dibawah ($< 5\%$) yang menunjukkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini diterima. Dengan demikian ketidakpastian tugas memperkuat peran yang diberikan *broadscope* dalam kinerja manajerial yang ada pada manajer koperasi di Kabupaten Ponorogo

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian yang mereplikasi dari penelitian Chong (1996) dapat disimpulkan bahwa Ketidakpastian tugas memperkuat hubungan *management accounting system-broadscope* terhadap kinerja manajerial. Dengan demikian *management accounting system* (MAS) dapat dijadikan alat dalam

pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja manajerial. Berkaitan dengan hasil penelitian tersebut hendaknya penggunaan *management accounting system* yang ada di koerasi kabupaten Ponorogo dapat dijadikan dasar atau pijakan dalam pengambilan keputusan.

Selain itu hendaknya pihak-pihak yang berkepentingan pada dunia koperasi khususnya Dinas Industri dan Koperasi Kabupaten Ponorogo memfasilitasi kemampuan manajer koperasi dengan *management accounting system* sebagai alat bantu pengambilan keputusan. Namun demikian hasil penelitian ini tidak lepas dari keterbatas. Adapun keterbatasan penelitian ini adalah:

- (1) Pengambilan sampel dengan objek manajer dirasakan kurang mewakili karena dalam struktur organisasi manajer tidak masuk dalam komponen struktur organisasi koperasi yang sesuai dengan UU koperasi.
- (2) Penggunaan instrumen yang digunakan persepsi responden. Hal ini akan menimbulkan masalah jika persepsi berbeda dengan kondisi aktualnya.
- (3) Diasumsikan manajer memahami *management accounting system* ketidakpastian tugas dan kinerja manajerial.

Terlepas dari keterbatasan yang ada. Diharapkan penelitian ini bermanfaat dalam

bahan penelitian berikutnya untuk meneliti peran *management accounting system* terhadap kinerja manajerial, maka untuk penelitian selanjutnya disarankan:

- (1) Perlu memasukkan pengurus sebagai objek kajian bila tidak terdapat manajer dalam suatu koperasi. Karena dalam Undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang koperasi, manajer tidak termasuk dalam unsur struktur organisasi.
- (2) Penelitian berikutnya perlu mempertimbangan gaya pengambilan keputusan yang lainnya diluar indikator dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adzim, M. S. 2011. Penilaian Kinerja Koperasi Pegawai Republik Indonesia (Kpri) Sejahtera Ngadiluwih Berdasarkan Undang-Undang NO.20/PER/M.KUKM/XI/2008.
- Agbejule, A. 2005. The relationship between management accounting systems and perceived environmental uncertainty on managerial performance: a research note. *Accounting and business Research* 35 (4):295-305.
- . 2011. Organizational culture and performance: the role of management accounting system. *Journal of Applied Accounting Research* 12 (1):74-89.
- Ajibolade, S. O. 2013. Management accounting systems design and company performance in Nigerian manufacturing companies: A contingency theory perspective. *British Journal of Arts and Social Sciences* 14 Noll:228-244.
- Alikhani, H., N. Ahmadi, dan M. Mehrava. 2013. Accounting information system versus management information system. *European Online Journal of Natural and Social Sciences* 2 (3(s)):359-366.
- Anselme, P. 2010. The uncertainty processing theory of motivation. *Behavioural Brain Research* 208:291-310.
- Bastian, E., dan M. Muchlish. 2012. Perceived Environment Uncertainty, Business Strategy, Performance Measurement Systems and Organizational Performance. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 65:787 – 792.
- Bello, A., dan Zaria. 2005. The Role of Cooperative Societies in Economic Development, edited by M. Paper.
- Birchall, J., dan L. H. Ketilson. 2009. *Resilience of the Cooperative Business Model in Times of Crisis*. 1 ed. Geneva: International Labour Organization.
- Borman, W. C., dan D. H. Brush. 1993. More Progress Toward a Taxonomy of Managerial Performance Requirements. *HUMAN PERFORMANCE* 6 (1):1-21.
- Bouwens, J., dan M. A. Abernethy. 2000. The consequences of customization on management accounting system design. *Accounting, Organizations and Society* 25:221-241.
- Chalos, P., dan S. Haka. 1989. Participative Budgeting and Managerial Performance. *Decision Science* 20 (2):334-347.
- Chang, R.-D., Y.-W. Chang, dan D. Paper. 2003. The effect of task uncertainty, decentralization and AIS characteristics on the performance of AIS: an empirical case in Taiwan. *Information & Management* 40:691-703.
- Chenhall, R. H. 2003. Management control systems design within its organizational context: findings from contingency-based research and directions for the future. *Accounting, Organizations and Society* 28:127-168.
- Chenhall, R. H., dan D. Morris. 1986. The Impact of Structure, Environment, and Interdependence on the Perceived Usefulness of Management Accounting System. *The Accounting Review* LXI (1):16-35.
- Chia, Y. M. 1995. Decentralization, Management Accounting System (Mas) Information Characteristics And Their Interaction Effects On Managerial Performance: A Singapore Study. *Journal of Business Finance & Accounting* 22 (6):811-830.
- Chiou, B.-C. 2011. Which types of management accounting system information can be

- used to respond adequately to environmental uncertainty? The effects of user participation and tolerance of ambiguity *African Journal of Business Management* 5(34):13293-13301.
- Chong, V. K. 1996. Management Accounting System, Task Uncertainty and Managerial Performance: a Research Note *Accounting, Organizations and Society*, 21 (5):415-421.
- Chong, V. K. 1998. Testing The Contingency 'Fit' Between Management Accounting Systems And Managerial Performance: A Research Note On The Moderating Role Of Tolerance For Ambiguity. *British Accounting Review* 30:331-342.
- . 2004. Job-relevant information and its role with task uncertainty and management accounting systems on managerial performance. *Pacific Accounting Review* 16 (2):1-22.
- Chong, V. K., dan K. M. Chong. 1997. Strategic Choices, Environmental Uncertainty and SBU Performance: A Note on the Intervening Role of Management Accounting Systems. *Accounting and business Research* 27 (4):268-276.
- Chong, V. K., dan I. R. C. Eggleton. 2001. The Decision-Facilitating Role of Management Accounting Systems on Managerial Performance: The Influence of Locus of Control and Task Uncertainty.
- Chong, V. K., dan I. R. C. Eggleton. 2003. The Decision Facilitating Role Of Management Accounting Systems on Managerial Performance: The Influence of Locus of Control and Task Uncertainty. *Advances in Accounting* 20:165-119.
- Chung, S.-H., Y.-F. Su, dan S. Yu-Ju. 2012. Broad scope management accounting system and managerial performance: The impact of role ambiguity and functional difference. *African Journal of Business Management* 6(30): 8873-8878,.
- Chung, T. T. 2011. The Impact Of Accounting Information On Management's Decision Making – Vinamilk Case Study: University College.
- Daft, R. L., dan R. H. Lengel. 1986. Organizational information requirements, media richness and structural design. *Management science* 32 (5):554-571.
- Depkop. 2014. Rekapitulasi Data Koperasi Berdasarkan Provinsi 31 Desember 2014.
- Driskill, L., dan J. R. Goldstein. 1986. Uncertainty: Theory and practice in organizational communication. *Journal of Business Communication* 23 (3):41-56.
- Emmanuel, C. R., G. Kominis, dan S. Slapnicar. 2007. The Impact of Target Setting on Managerial Motivation & Performance. SSRN 1004179.
- Fleischman, G., K. Walker, dan E. Johnson. 2010. A field study of user versus provider perception of management accounting system service. *International Journal of Accounting & Information Management* 18 (3):252-285.
- Gordon, L. A., dan V. K. Narayanan. 1984. Management Accounting Systems, Perceived Environmental Uncertainty And Organization Structure : An Empirical Investigation. *Accounting, Organizations and Society* 9 (1):33-47.
- Gul, F. A. 1991. The Effects of Management Accounting Systems and Environmental Uncertainty on Small Business Managers' Performance. *Accounting and Business Research* 22 (85):57-61.
- Gul, F. A., dan Y. M. Chia. 1994. The Effects Of Management Accounting Systems, Perceived Environmental Uncertainty' And Decentralization On Managerial Performance: A Test Of Three-Way Interaction'. *Accounting, Organizations and Society* 19 (4/5):413-426.
- Hair, J. F., W. C. Black, B. J. Babin, dan R. E. Anderson. 2010. *Multivariate Data Analysis*: Prentice Hall.
- Hammad, S. A., R. Jusoh, dan I. Ghazali. 2013. Decentralization, perceived environmental uncertainty, managerial performance and management accounting system information in Egyptian. *International Journal of Accounting & Information Management* 21 (4):314-330.
- Harrison, E. F. 1996. A process perspective on strategic decision making. *Management Decision* 34 (1):46-53.

- Helmberger, P., dan S. Hoos. 1962. Cooperative enterprise and organization theory. *Journal Of Farm Economics* XLIV (2):275-290.
- Hirst, M. K. 1983. Reliance on accounting performance measures, task uncertainty, and dysfunctional behavior: Some extensions. *Journal of Accounting Research*:596-605.
- Hutasuhut, A. D. 2011. Manajemen Koperasi Menuju Kewirausahaan Koperasi. *Manajemen & Bisnis* 1 (1):1-11.
- Indakop. 2015. Keragaan Koperasi Ponorogo. Ponorogo: Kantor INDAKOP.
- Israelsen, P. a. J., Brian. 2011. Decentralizing decision making in modularization strategies: Overcoming barriers from dysfunctional accounting systems. *Int. J. Production Economics* 131: 453-462.
- J. Williams, J., dan A. E. Seaman†. 2002. Management accounting systems change and departmental performance: the influence of managerial information and task uncertainty. *Management Accounting Research* 13:419-445.
- Jerman, M., S. Kavčič, dan B. Korošec. 2012. The importance of the management accounting system in the decision making process: Empirical evidence from Slovenia. *African Journal of Business Management* 6 (24):7252-7260.
- Leach, D., G. Hagger-Johnson, N. Doerner, T. Wall, N. Turner, J. Dawson, dan G. Grote. 2013. Developing a measure of work uncertainty. *Journal of Occupational and Organizational Psychology* 86 (1):85-99.
- Luthans, F., dan T. I. Stewart. 1978. The reality or illusion of a general contingency theory of management: A response to the Longenecker and Pringle critique. *Academy of Management Review* 3 (3):683-687.
- Mahoney, T. A., T. H. Jerdee, dan S. J. Carroll. 1963. The Job(s) of Management.
- Masngudi. 1990. *Penelitian Tentang Sejarah Perkembangankoperasi Di Indonesia*. Jakarta: Badan Penelitian Pengembangan Koperasi-Departemen Koperasi.
- Mia, L. 1989. The Impact Of Participation In Budgeting And Job Difficulty On Managerial Performance And Work Motivation: A Research Note. *Accounting, Organizations and Society* 14 (4):347-357.
- Mia, L., dan R. H. Chenhall. 1994. The Usefulness Of Management Accounting Systems, Functional Differentiation And Managerial Effectiveness. *Accounting, Organizations and Society* 19 (1):1-13.
- Mia, L., dan A. Patiar. 2001. The use of management accounting systems in hotels: an exploratory study. *Hospitality Management* 20:111-128.
- Miner, A. S. 1987. Idiosyncratic Jobs in Formalized Organizations. *Administrative Science Quarterly* 32 (3):327-351.
- Mintzberg, H. 1990. The Manager's Job Folklore and Fact. *Harvard Business Review* March-April:1-13.
- Moliner, G. H., dan M. E. G. Ruiz. 2004. Information Technologies: Challenge And Opportunity For Modern Management Accounting Systems. *SSRN* 518442.
- Nunnally, J. C., dan I. H. Berstein. 1994. *Psychometric Theory*. New York: McGraw-Hill, Inc. .
- Otley, D. T. 1980. The Contingency Theory Of Management Accounting: Achievement And Prognosis*. *Accounting, Organizations and Society* 5 (4):413-428.
- Palmer, M. A. 2005. *Command at Sea: Naval Command and Control since the Sixteenth Century*. cambridge: harvard university press.
- Philips, R. 1953. Economic Nature of the Cooperative Association. *Journal of Farm Economics* 35 (1):74-87.
- Rao, P. 1996. Measuring Consumer Perceptions Through Factor Analysis. *The Asian Manager* February-March:28-32.
- Robotka, F. 1947. A Theory Of Cooperation. *Journal of Farm Economics* 29 (1):94-114.

- Royer, J. S. 1999. Cooperative Organizational Strategies: A Neo-Institutional Digest. *Journal of Cooperatives*:44-67.
- Siyanbola, dan T. Tunji. 2012. Accounting Information As An Aid To Management Decision Making. *International Journal of Management and Social Sciences Research (IJMSSR)* 1 (3):29-34.
- Soetrisno, N. 2001. *Rekonstruksi Pemahaman Koperasi*. Jakarta: INTRANS.
- . 2003. Koperasi Indonesia : Potret Dan Tantangan. *Jurnal Ekonomi Rakyat*.
- Staw, B. M., dan S. G. Barsade. 1993. Affect and Managerial Performance: A Test of the Sadder-but-Wiser vs. Happier-and-Smarter Hypotheses. *Administrative Science Quarterly* 38 (2):304-331.
- Sugijanto, a. P. 2013. Decentralization Analysis of Decision Making and Performance of Accounting Control System. *IOSR Journal of Business and Management* 10 (1):8-11.
- Tokic, M., M. Spanja, I. Tokic, dan I. Blazevic. 2011. Functional Structure Of Entrepreneurial Accounting Information Systems. *International Journal of Engineering* IX (2):165-168.
- Valentinov, V. 2004. Toward a social capital theory of cooperative organisation. *Journal of Cooperative Studies* 37 (3):5-20.
- VincentK.Chong. 2004. Job-Relevant information and its role with task uncertainty and management accounting system on managerial performance. *Pasific Accounting Review* 16 (2):1-22.
- Watts, D., P. W. S. Yapa, dan S. Dellaportas. 2014. The Case of a Newly Implemented Modern Management Accounting System in a Multinational Manufacturing Company. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal* 8 (2):121-137.
- Withey, M., R. L. Daft, dan W. H. Cooper. 1983. Measures of Perrow's work unit technology: An empirical assessment and a new scale. *Academy of Management Journal* 26 (1):45-63.
- Wood, R., dan A. Bandura. 1991. Impact of Conceptions of Ability on Self-Regulatory Mechanisms and Complex Decision Making. *Journal of Personality and Social Psychology* 56 (3):407-415.
- Young, B. S., J. Winfred Arthur, dan J. Finch. 2000. Predictors Of Managerial Performance: More Than Cognitive Ability. *Journal of Business and Psychology* 15 (1):53-72.
- Zeuli, K., David Freshwater, D. Markley, dan D. Barkley. 2004. Cooperatives In Rural Community Development: A New Framework For Analysis. *Journal of the Community Development Society* 35 (2):17-35.
- Zimmerman, J. L. 2001. Conjectures regarding empirical managerial accounting research. *Journal of Accounting and Economics* 32 (1):411-427.
- Zoni, L., A. Dossi, dan M. Morelli. 2012. Management accounting system (MAS) change: field evidence. *Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics* 19 (1):119-138.

AN INVESTIGATION ON BALANCED SCORECARD IMPLEMENTATION IN EVALUATING AND DEVELOPING CHARACTER BUILDING PROGRAM: A CASE STUDY IN INTERNATIONAL PROGRAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Oleh:

BUDI TIARA NOVITASARI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Email: btiaran@gmail.com

ABSTRAK

Character education has received bigger attention in these past years since it is believed not only able to help students acquire more knowledge and skills but also help them to be a better individual. However, character education program is one of those programs that is hard to be evaluated hence it is very costly. In the emergence of new public management, a program should be evaluated based on both financial and non-financial perspectives to earn complete understanding on the success of its implementation. This research is a case study conducted in International Program Universitas Islam Indonesia to analyze how balanced scorecard as an evaluation tool is implemented in evaluating and developing series of character building program. The data of this research is collected through interview, observation as well as document research. This research found that International Program Universitas Islam Indonesia has implemented the four perspectives of balanced scorecard in evaluating and developing the series of character building program. However, further research findings indicated that the implementation of balanced scorecard in this evaluation and development process is hindered by limited key performance indicators used in the performance evaluation process.

Keywords: balanced scorecard, character building program, evaluation, development

BACKGROUND

Academic proficiency is considered to be not enough to create a good individual for social problems are keep on rising day by day. Character education is believed to be able to solve this problem. Berkowitz and Bier (2004) stated that character education has been demonstrated to be associated with academic motivation and aspirations, academic achievement, prosocial behavior, bonding to school, prosocial and democratic values, conflict resolution skills, moral reasoning maturity, responsibility, respect, self-efficacy, self-control, self-esteem, social skills and trust in and respect for others. The impact of character education is believed to be able to complement academic proficiency and at last be the solution to create a well-qualified

human being. As the demand for integrating character education into formal education is getting higher, education institutions nowadays are improving their character education program. One of those institutions which make character education as a core program is International Program Universitas Islam Indonesia (IP UII). The emerging of new public management concept is adding new challenges for this institution because it is urged to be more aware on their resources management and goal achievement (Hoque, 2003).

Not only dealing with its commitment to realize its vision and mission, this institution is also urged to give its best to the students with the limited resources it has. Character education implemented in IP UII is

consisted of 9 different obligatory programs carried out throughout the students' first semester to their seventh semester. Those programs are organized by character building division and are developed time to time as character education should be organized into series of phases that are revised periodically throughout the life span (Kope, 1964).

The concept implemented in this context is similar to the idea of developmental stage theory. Developing a program into stages based on the learners' development progress is the core idea of developmental stage theory introduced by Jean Piaget. Within the resources limitation and urge to achieve the designated vision and mission, evaluation is crucial for IP UII both to know the result of its educational process as well as a basis to develop its program. An evaluation that is not only focus on the result of the program or on the financial aspect is applied in IP UII now.

Balanced scorecard as a performance measurement method that is able to combine several important aspects to gain complete and valuable information regarding a specific program or project (Mulyadi, 2014; Kaplan, 2009) is implemented in evaluating and developing the character building program of IP UII. The series of character building program's nature is proactive and keep on growing has made balanced scorecard becoming a good choice to assist its evaluation and development process.

This idea is supported by Brown (2012) who explained that the balanced scorecard would be better position in the college or university which operates in a proactive mode since it will be able to help it in linking the strategies and mission with the

measurable outcomes that will drive future endeavors. Thus, this research is aimed to know how balanced scorecard is implemented in evaluating and developing the character building program in International Program, Universitas Islam Indonesia.

Character Education and Character Building Program in IP UII

Character education popularity is keep on rising as people across the world have a strong believe that having a good competency is not enough when it is not complemented by good character. Besides, it is also believed that character education is having positive relationship with academic achievement.

Hartshorne & May (1927) stated that educators and psychologists have been realizing that prediction of school work or in any particular subject depends on other factors such as interest, motivation, persistence, social adjustment, temperament and emotional balance.

Furthermore, Berkowitz & Bier (2004) added that character education has been demonstrated to be associated with academic motivation and aspirations, academic achievement, prosocial behavior, bonding to school, prosocial and democratic values, conflict resolution skills, moral reasoning maturity, responsibility, respect, self-efficacy, self-control, self-esteem, social skills and trust in and respect for others. Considering the importance of character education, IP UII has been implemented integrated character education into its curriculum since 2005 and it is known as character building program. As the time goes by, IP UII is keeping on evaluating and developing its character building program. Nowadays, it has 9

obligatory programs that are also becoming the requirements for the students to graduate from IP UII. These programs are arranged into series of program and conducted throughout the students' study period.

Balanced Scorecard in Educational Sector

Balanced scorecard was first introduced by Kaplan and Norton in 1992 (Brown, 2012).

Hoque (2003) defined balanced scorecard as a performance measurement system which not only focuses on the financial perspective but also on the non-financial perspectives.

Kaplan (2009) further explained that balanced scorecard is a performance measurement technique that uses four different perspectives to support the attainment of the entity's long term goals. Balanced scorecard covers 5 different perspectives (Karathanos&Karathanos, 2005; Kaplan, 2009; Hoque, 2003 and Figge, et al., 2002).

The first perspective is financial perspective. Financial perspective concerns on the value of the organization for the shareholder. In a setting of non-profit organization or governmental organization the financial perspective can be related to the budget that has been prepared (Nair, 2004).

The second perspective is the consumer's perspective. It refers to measuring the performance of a project or entity by using the consumer's point of view. The third perspective is internal business perspective. It focuses on the organization or entity's ability to manage and control its internal business activities. The next perspective is the learning and growth perspective. It focuses on the

entity's effort to keep on improving and developing. The changes in business environment have caused the addition of sustainability perspective in the balanced scorecard as its fifth perspective (Figge, et al., 2002).

Balanced scorecard has been extensively used in many business entities in measuring their performance. Currently, balanced scorecard is not only a performance measuring techniques but also an interactive system that shows the clear connection between the program and its performance as well as a tool in assisting the entities in designing its business strategies (Kaplan, 2009).

Hoque (2003) added that balanced scorecard is more than just a measuring technique for the reason that it is able to put a handful of strategically critical measures together in a single report in a way that makes cause and effect relations transparent and keeps managers from sub-optimizing by improving one measure at the expense of others.

Nair (2004) explained that balanced scorecard is able to cover many functions and relate many aspects for it is able to identify the purpose of organization, make sure that the strategy taken is in line with its purpose and show a clear causal relationship among all of the perspectives (p.30).

Furthermore, Chai (2009) emphasized that balanced scorecard should cover the aspect of openness, causality and balance if the organization want to earn the benefit (p.22). The causal relationship can be clearly seen once a particular organization has created its strategic map. By looking at the

strategic map relating all of the perspectives of balanced scorecard, a particular organization will be able to see the core problem that probably cannot be seen if the evaluation is conducted only based on the financial measurement. To see how everything works is impossible without breaking down the strategies into specific objectives that is measured by using a clear key performance indicator. Thus, in the implementation of balanced scorecard deciding the key performance indicator is very crucial.

Platt (2002) in Chai (2009) explained that a good key performance indicator must be specific, measurable, achievable, relevance and time based. Having a clear performance indicator will help the organization to know how well its goal achievement process. That is why in determining what should be measured, an organization need to understand its vision and mission and also need to know what they need to measure and why it is important to be measured (Gumbus, 2005). The emergence of new public management has urged the need of a comprehensive performance measurement technique to be implemented.

Mulyadi (2014) explained that balanced scorecard can be implemented effectively in any kind of organization included public sector and non-profit organization (p.141).

Hoque (2003) and Northcott&Taulappa (2012) stated that the implementation of balanced scorecard in public sector is expected to bring improvement in the effectiveness and efficiency of the public sector operational activities. The expectation is quite high since balanced scorecard will be

able to assess the public sectors' performance objectively and at the same time help them to translate their vision and mission into the best strategies that later can be formed into action plans (Mulyadi, 2014).

Niven (2003) and Bocci (2005) asserted that the implementation of balanced scorecard in governmental sector could bring tremendous advantages. When balanced scorecard is implemented in the governmental sector, several adjustments are needed to make sure that it will function well.

Chai (2009) mentioned that balanced scorecard need to be adjusted in terms of financial considerations as not the main focus and citizen as the main focus. Based on this adjustment made by Chai (2009), in governmental sector strategic map financial perspective will not be positioned in the top goal, customer perspective in which in this case is the citizen will be taken into the main attention. Several examples of balanced scorecard implementation in the public sector especially in education institutions can be seen in various researches (Karathanos&Karathanos, 2005; Griggs, Blackburn & Smith, 2012, Brown, 2012; Chen, Yang &Shiau, 2006; Martin, 2011 and Umanshankar& Dutta, 2007). Karathanos&Karathanos (2005), Griggs, Blackburn & Smith (2012), Brown (2012), Ruben (1999) and Nefstead& Gilliard (2006) stated that balanced scorecard might help education institution and other public institution to analyze their performance better. Having a restriction on the resources, balanced scorecard will help education institution to allocate the resources better in a

strategically coherent manner (Chen, Yang &Shiau, 2006).

In addition, balanced scorecard is an excellent strategy based management system that can be used in higher education institution to assist them in clarifying their vision and mission and translating their vision into strategies (Brown, 2012).

In the educational sector, the perspective of balanced scorecard used is similar however, there will be several differences compare to the other sector especially private sector.

Developmental Stage Theory

Developmental stage theory is invented by Jean Piaget. DeVries (1997) explained that Piaget related the development of child to social factors and social process, in which social process covers cognitive, affective, social and moral development. One of the most important aspects in Piaget's theory is the point where it put the stage of learner's development stage as a crucial consideration. By considering the learner's development stage, educators can design the next step better to foster their learning. This understanding makes educators to keep on researching on the level of their students' understanding and needs in order to be able to design the next step of learning process. This process is later known as the research curriculum (Koppe, 1964).

RESEARCH METHOD

This research is a case study that is conducted in International Program, Universitas Islam Indonesia.

Sarosa (2012) defined case study as a method of qualitative research which uses

empirical evidences to prove that a particular theory can be applied in a specific situation. Character building program, IP UII is chosen as the setting of this research to know how balanced scorecard can be implemented to evaluate and develop the program. In this research, the researcher uses several data collection methods to obtain primary data. Those methods include participatory observation, document research and semi standardized interview.

The researcher is using purposive sampling in this research to gain information from the potential interviewees. Research validity is ensured by conducting replication logic of similar previous researches and interjudge reliability. In addition, data triangulation and methodological triangulation is also being conducted in this research.

RESEARCH RESULT

Based on the data gathered through observation, document research and interview, it is found that IP UII has implemented the four perspectives of balanced scorecard in the process of evaluating and developing its character building program. Among the four perspectives, IP UII put customer perspective as the first perspective. However, it does not mean that the other perspectives are becoming less important compare to customer perspective.

Each of the perspective is evaluated through different ways.

1. Customer Perspective

Though giving the first place to customer perspective, IP UII management confirmed

that putting students as the priority does not mean that they have to fulfill all of their demands. The management confirmed that its goal is to make its student achieve the graduate attributes in accordance to its vision and mission. Thus, not all of the students demands should be fulfilled especially those that are not in line with the institution vision and mission. In customer perspective, character building division is assessing these following points: student's satisfaction, student's acceptance on the values conveyed in each program, student's learning process, student's character changes and goal achievement of each program and the series as a whole. In assessing the customer perspective, several methods are utilized to gain information from the students. The methods include questionnaire survey, reflection group and reflective essay as well as focus group discussion. To avoid information that is focusing only on the instant impact of training, the character building division is conducting both an evaluation for each of its program once it is conducted and the whole series in the end of every batch study period.

2. Internal Business Perspective

Internal business perspective in this case of research refers to the process of conducting the series of character building program. Based on the research findings, the aspects that are assessed in this perspective are as follows: the quality of speakers, lecturers and trainers, the quality of the facilitators and chaperons as well as efforts needed to improve them,

the quality of the training materials and efforts needed to improve them, the well ness of each program design and facilities and accommodation in running all of the programs. This perspective is evaluated by conducting questionnaire survey distributed to the students as the training participants as well as conducting evaluation meetings during the conduct of a specific program and after it has been completed. In the evaluation meeting, each person that is responsible on a specific job description is required to make a report about their tasks. The other members of the team are also allowed to give suggestions on how it can be improved in the future.

3. Financial perspective

Financial aspect is important for every institution. A bad financial management will restrict that particular institution to carry out its operation. In the case of character building program series evaluation, financial perspective covers the conformity of the realization report and budget as well as budget efficiency. Similar to the evaluation of the customer perspective, financial perspective evaluation is conducted both for each program separately as well as the series of the programs as a whole. Based on the research findings, evaluation on this perspective is mostly handled by the financial staffs and the result is then communicated to both the manager of character building program and director of IP UII.

4. Learning and Growth Perspective

Noir (2004) explained that any organization should not forget about the importance of learning and growth perspective for it is the basis for the other 3 perspectives. Learning and growth perspective will cover improvement programs to supporting human resources needed to make sure that the main business process in this case is ran. It means that it includes finance staff, administrative staff and committee of the program. Based on the research findings, corporate culture is included in this perspective for a good culture will improve the effectiveness of character education implementation. The learning and growth perspective covers the efforts to improve supporting staff's capability to run the series of character building program at its best. Based on the research finding, it is evaluated through regular meeting conducted by the management to analyze the impact of capacity building and training to the staffs. Besides, some staffs are also evaluated through questionnaire distributed to the students. In evaluating the character building program, IP UII management is relating one perspective to the others as well as to the vision and mission of the organization. Once one of the perspectives is not performing well, it will affect the other perspectives and will hinder the process of achieving the vision and mission of the institution. The result of the evaluation is then used as the basis for the development process. The development of character building program in IP UII is focusing on both the

conduct of the program as well as the materials and design on the program based on the learners' learning result from the previous program. Thus, the uses of different perspectives in balanced scorecard support the evaluation and the development process well. However, based on the research result, it is found that even though all of the four perspectives have been evaluated, the key performance indicator used in the evaluation process need to be improved. Some of the key performance indicators are not able to measure the each of the perspectives evaluation point. In addition, when the use of balanced scorecard is drawn into strategic map, there is a different idea between the higher level managements. Though both agreed that customer perspective must be the first perspective and financial perspective will be the last one, two of the most prominent higher level management have a different thought on the second and the third perspective. This first version, put business process perspective as the second and learning growth as the third. However, the second version, showed that the opposite idea. The different perspective on this strategic map can hinder the evaluation and development process of character building program in IP UII. The following is the strategic map based on each of them.

Figure 1. Strategic Map A

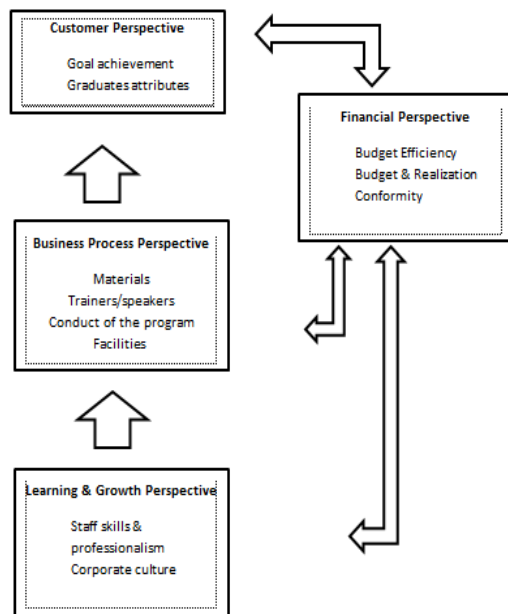
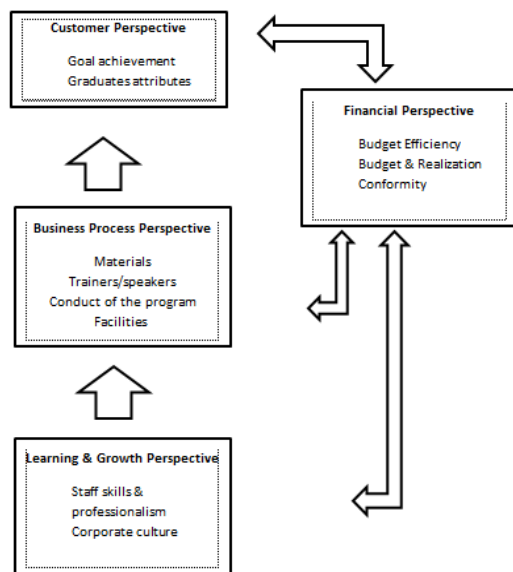


Figure 2: Strategic Map B Version



CONCLUSION AND RECOMMENDATION

Based on the researcher's finding, balanced scorecard is able to assist the evaluation and development of character building program series in International Program, Universitas Islam Indonesia. Based on the findings, four perspectives have been utilized. Though, the researcher found that the key performance indicators are not complete and some are not measurable. Additionally,

the management is still working on the strategic map fixation. However, the researcher found that within these limitations, the character program division has been able to see the connection among the perspectives and used those perspectives evaluation results to better develop its character building program series. Furthermore, the development of character building program is in accordance to the concept of developmental stage theory introduced by Jean Piaget. With this concept, the management is expecting to be able to help the students to learn better and achieve the graduate attributes as what has been stated in the IP UII vision and mission.

This research finding is having a limitation in terms of its generalization due to the nature of case study. Thus, future researches are recommended to explore the use of balanced scorecard in a larger character education setting. Besides future researchers can add the perspective of sustainability into account to see how the complete perspectives of balanced scorecard will work in the educational setting and character education setting.

REFERENCES

- Agrawal, S. (2008). Competency based balance scorecard model: An integrative perspective. *Indian Journal of Industrial Relations*. 44 (1): 24 – 34
- Antariksa, Y. (n.d.). *Balanced scorecard: Cara dantahapan penyusunan balanced scorecard*. Retrieved on 15 January 2015 from <http://manajemenkinerja.com/category/zona-download/>.
- Al-Zwyalif, I. M. (2012). The possibility of implementing balance scorecard in Jordanian private

- universities. *International Business Research*. 5 (11)
- Arthur, J. (2005). The reemergence of character education in British education policy. *British Journal of Educational Studies*. 53 (3): 239 – 254
- Bahous, R. & Nabhani, M. (2011). Assessing education program learning outcome. *EducAssessEval Acc*. 2.21 – 39. doi: 10.1007/s11092.010
- Beard, D. F. (2009). *Successful application of the balanced scorecard in higher education*. Missouri: Heldref publication.
- Benniga, J. S., Berkowitz, M. M., Kuehn, P., & Smith, K. (2006). Character and academics: What good schools do. *The Phi Delta Kappan*: 448 – 452
- Berkowitz, M. W. & Bier, M. C. (2004). Research based character education. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*: 591.
- Bridging Program Team. (2013). *Laporan pelaksanaan latihan kepemimpinan an Islam menengah angkatan 2012*. Jogjakarta, Indonesia: International Program, Universitas Islam Indonesia.
- Brown, C. (2012). Application of the balance scorecard in higher education: Opportunities and challenges. *Society for College and University Planning*.
- Brown, P. C. (2010). *Leading to high performance: A case study of the role of the balanced scorecard in improving urban secondary school*. Retrieved from Proquest dissertation and theses.
- Case, R. (1993). Theories of learning and theories of development. *Educational Psychologist*. 28 (3): 219 – 233.
- Chai, N. (2009). *Sustainability performance evaluation system in government: A balanced scorecard approach towards sustainable development*. London: Springer.
- Character Building Program. (n.d.). Retrieved on 23 February 2015 from http://international.uui.ac.id/?page_id=1417
- Chen, Yang & Shiau, (2006). The application of balance scorecard in the performance evaluation of higher education. *The TQM Magazine*. 18 (2).
- Davis, M. (2003). What's wrong with character education. *American Journal of Education*. 110 (1): 32 – 57.
- Devries, R. (1997). Piaget's social theory. *American Educational Research Association*. 26(2): 4 – 17.
- Eginton, D. P. (1934). Principles of character education. *Junior – Senior High School Clearing House*. 8 (5): 298 – 305.
- Figge, et al., (2002). The sustainability balance scorecard: Linking sustainability management to business strategy. *Business Strategy and The Environment*. (11): 269 – 284.
- Fischer, H. (1964). The psychology of Piaget and its educational applications. *International Review of Education*. 10(4).
- Francis, E. F. (1962). Fundamentals of character education. *The School Review*. 70(3): 345 – 357.
- Gambini, J. M. (1973). *Conceptual development and affective development in diagnosed emotionally disturbed public school males*. (Doctoral dissertation). Retrieved from Proquest dissertations and theses.
- Gilbert, N. (ED.). (2001). *Researching social life* (2nd ed.). Great Britain: The Cormwell Press Ltd.
- Golightly, T. J. (1927). The present interest in character education. *The Phi Delta Kappa*. 9 (5). 140 – 144.
- Gueval, R., Dearden, J. A., Lilien, G. L. (2008). The university rankings game: Modeling the competition among universities ranking. *The American Statistician*. 62 (3). 232 – 237.
- Gumbus, A. (2005). Introducing the balanced scorecard: Creating metrics to measure performance. *Journal of Management Education*. 29 (4). 617 – 630.
- Griggs, Blackburn & Smith. (2012). The educational scorecard: The start of our journey. *Electroninc Journal of Business Research Method*. 10 (2).
- Hartshorne, H. & May, M. A. (1929). Research in character education. *The Phi Delta Kappa*. 9 (5). p. 129 – 131.

- Hoque, Z. (2003). *Strategic management accounting* (2nded.). Australia: Pearson.
- Horngren, C.T, Harrison, W. T. & Oliver, M. S. (2012). *Financial & management accounting* (3rded.). New Jersey: Prentice Hall.
- International Program UII.(2013). *Student guide book*. Yogyakarta: International Program UII.
- International Program UII.(2013). *Report of self leadership training 2013*. Yogyakarta: International Program UII.
- Kagan, J. (1980). Jean Piaget's contribution.*The Phi Delta Kappan*.62(4). 245 – 246.
- Kaplan. R. S. (2009). Conceptual foundations of the balanced scorecard.*Handbook of Management Accounting Research*. 3.
- Karathanos, D & Karathanos, P. (2005).Aplying the balanced scorecard to education.*Journal of Education for Business*.80 (4). 222.
- Kaskey, V. L. (2008). *The balanced scorecard: A comparative study of accounting education and experience on common measure bias and trust in a balanced scorecard*. (Doctoral dissertation).Retrieved from Proquest dissertations and theses.
- Kettunen, J. (2005). Implementation of strategies in continuing education.*The International Journal of Education Management*.19(3).207 – 217.
- Koppe, W. A. (1964). A development theory of character education.*Review of religious research*. 6 (1). 23 – 28.
- Martin, P. C. (2011). *The benefits of utilization of a quality scorecard in higher education*. (Doctoral dissertation).Retrieved from Proquest dissertations and theses.
- Mazandaran, Chen, Zolfani, & Akbarzadeh.(2011). Cause and effect relations of BSC in universities of Iran.*International Journal of Management and Innovation*.3 (2).
- Mulyadi. (2014). *Sistem terpadu pengelolaan kinerja personal berbasis balanced scorecard* (3rded.). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nair, M. (2004).*Essentials of balanced scorecard*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Northcott, D & Taulapapa, T. M. (2012).Using the balanced scorecard to manage performance in public sector organizations: issues and challenges.*International Journal of Public Sector Management*.25 (3). 166 – 191.
- Romanowski M, H. (2003). Through the eyes of students: High school students perspectives on character education.*American Secondary Education*.32 (1). 3 – 20.
- Sarosa, S. (2012).*Penelitian kualitatif: Dasar – dasar*. Jakarta: PT. Indeks.
- Shield, D. L. (2011).Character as the aim of education.*The Phi Delta Kappa International*.92 (8). 48 – 53.
- Sudirman, I. (2012). Implementing balanced scorecard in higher education management.*International Journal of Business and Social Science*.3 (18). 199 – 204.
- Thomas, R. S. (1991). Assessing character education: Paradigms, problems and potentials.*The Clearing House*.65(1). 51 – 55.
- Umanshankar, V & Dutta, K. (2007). Balance scorecard in managing higher education institutions: An Indian Perspective. *International Journal of Educational Management*.21 (1). 54 – 67.
- Wisniewski, M. & Olafson, S. (2004). Developong balanced scorecards in local authorities: A comparison of experience. *International Journal of Productivity and Management*.53(7).
- Yin, R. K. (2011).*Qualitative research from start to finish*.NewYork: The Guildford Press.

**PENGARUH GENDER TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMSI DAN INVESTASI
KELUARGA TKI**

Oleh:

CHOIRUL HAMIDAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

Email: choirulhamidah@gmail.com

ABSTRAK

Pengujian Pengaruh Gender terhadap Keputusan Konsumsi dan Investasi Keluarga TKI ini dilakukan di wilayah Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan responden TKI/TKW dan keluarganya. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif. Hasil kuantifikasi variabel dilakukan pengujian dengan menggunakan alat Uji Statistik. Sesuai dengan permasalahan dan variabel yang terkait, maka rancangan penelitian ini menggunakan Analisis of variance (ANOVA) disebabkan terdapat dua variabel dengan kombinasi, yaitu satu interval dan yang satu nominal. Jumlah Sampel sebanyak 30 terdiri dari TKI/TKW dan keluarga yang tinggal di wilayah Ponorogo terutama yang telah bekerja lebih dari 5 tahun. Alasan masa kerja 5 tahun karena memungkinkan TKI/TKW dan keluarga memiliki penghasilan yang cukup untuk melakukan investasi. Permasalahan yang diteliti mengenai pengaruh perbedaan gender terhadap perilaku dalam pengelolaan keuangan yang diperoleh TKI/TKW dari hasil bekerja di luar negeri, terutama bagaimana membuat keputusan pengeluaran konsumsi maupun investasi. Hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa Tenaga Kerja Pria dan Tenaga Kerja Wanita memiliki perilaku konsumtif dan perilaku investasi yang berbeda. Jika yang bekerja keluar negeri adalah pria, maka pengelola keuangan adalah istri atau keluarganya, sedangkan jika yang bekerja ke luar negeri adalah wanita maka yang menerima remitan dan mengelola keuangan lebih dominan suami (pria). Pada umumnya wanita lebih hemat dan berhati-hati dalam membelanjakan uang kiriman suaminya sedangkan pria yang ditinggal bekerja istrinya cenderung lebih boros dan kurang berhati-hati dalam pembelanjaan..

Kata Kunci : TKI, Konsumsi, Investasi.

PENDAHULUAN

Kondisi kurangnya kesempatan kerja di dalam negeri memicu tenaga kerja untuk melakukan migrasi keluar negeri dengan menjadi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri (TKI). Di sisi lain, upaya penanggulangan yang dilakukan pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan dan pengangguran adalah dengan memfasilitasi permintaan tenaga kerja ke luar negeri. Program pemerintah tersebut tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yang isinya bahwa penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar

negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan hukum nasional.

Kebijakan penempatan tenaga kerja ke luar negeri memberikan dampak positif antara lain menambah devisa negara terutama daerah asal TKI dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Berdasarkan

data Pusat Penelitian dan Informasi (Puslitfo) BNP2TKI (2008), pemasukan devisa dari TKI (remitansi) sepanjang Tahun 2008 naik sebesar 37,3 persen bila dibanding Tahun 2007 yaitu mencapai 8,24 milyar dolar AS (Rp 80,24 trilyun). Devisa dari TKI ini merupakan devisa terbesar kedua setelah minyak dan gas.

Ponorogo sebagai salah satu Kabupaten yang berada di wilayah Jawa Timur termasuk daerah dengan jumlah TKI yang sangat besar. Salah satu bukti adalah semakin banyaknya usaha penyedia jasa penyalur tenaga kerja yang siap membantu masyarakat yang berminat untuk pergi bekerja di luar negeri. Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), bahwa Jawa Barat (Jabar) menjadi daerah terbanyak pengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, dan berhasil mengalahkan Nusa Tenggara Barat (NTB). Tercatat, hingga Juli 2010, Cirebon menjadi kantong utama TKI dengan jumlah 129,717 orang. Disusul, Indramayu dengan 95,581 orang, Subang 95,180 orang, Cianjur 89,182 orang, dan Sukabumi 55,207 orang. Sedangkan Lombok Tengah NTB mengirimkan 62,512 orang, Lombok Barat 59,751 orang, Lombok Timur dengan 46,962 orang. Jumlah tersebut disusul Ponorogo Jawa Timur 47,717 orang dan Malang 39,610 orang (*Copyright © 2010 - 2012 PT.Indopos Intermedia Press*)

Terbatasnya kesempatan kerja di bidang formal, mendorong banyaknya penduduk Ponorogo yang berminat untuk bekerja sebagai TKI. Faktor budaya, faktor sosial serta ekonomi seluruhnya dapat menjadi alasan tingginya minat masyarakat untuk mengadu nasib dengan bekerja di luar negeri. Salah satu alasan yang membuat

masyarakat melakukan perpindahan penduduk atau migrasi diantaranya adalah kesulitan ekonomi serta ketimpangan ekonomi antar negara menjadi salah satu alasan paling dominan yang memacu timbulnya migrasi di kalangan masyarakat Indonesia (Lee, 1996). Ketimpangan ekonomi ini ditandai dengan upah yang jauh lebih tinggi apabila masyarakat Indonesia bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Kebanyakan TKI yang cenderung membanding-bandingkan upah antara negara yang satu dengan lainnya sebelum menentukan negara yang akan menjadi tujuan kerja. Oleh karena itu, negara tujuan emigrasi menjadi hal yang sangat penting bagi para TKI.

Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Sukorejo, dan Kecamatan Jenangan sebagai daerah pemasok TKI terbesar di Ponorogo merupakan wilayah yang relatif subur dan pesat pertumbuhan ekonominya. Kabupaten Ponorogo adalah daerah kecamatan penyangga wilayah kota, disamping kecamatan Siman, Jetis, Jenangan dan Mlarak merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk relatif lebih tinggi dibandingkan kecamatan lainnya. Jika kita berkeliling wilayah Kabupaten Ponorogo sampai jalan-jalan masuk desa Polorejo, desa Gupolo, desa Sukosari, desa Lembah, Purwosari, Trisono maka banyak kita temukan rumah-rumah gaya baru dengan keramik rapi berjajar, halaman luas paving, motor-motor baru serta beberapa rumah yang dihiasi mobil serta pesatnya usaha baru yang dirintis secara pribadi. Hal ini menunjukkan status ekonomi yang setara cukup bahkan lebih. Semua ini didapat bukan hanya dengan

berpangku tangan, menadah, dari olahan sawah atau sebagai pekerja kantor. Namun mereka adalah pejuang ekonomi hingga ke Luar Negeri yang menghasilkan remitansi dan berperan terhadap kehidupan sosial keluarga maupun lingkungan sekitarnya.

Hasil yang diperoleh para TKI berupa remitansi diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan status sosial keluarga TKI melainkan juga meningkatkan investasi di daerah asal serta menciptakan lapangan kerja yang dapat menyerap pengangguran. Permasalahannya, tidak semua keluarga TKI memiliki kemampuan untuk melakukan wirausaha serta pengelolaan keuangan yang baik. Keluarga TKI yang menerima remitansi membelanjakannya untuk konsumsi barang-barang seperti handphone, sepeda motor, mobil, televisi, kulkas serta perabotan rumah lainnya. Mereka yang bekerja di luar negeri menjadi penopang utama bagi perekonomian keluarga, bahkan tidak jarang keluarga yang ditinggalkan hanya berfoya-foya menggunakan hasil jerih payah para TKI. Tidak sedikit para TKI yang pulang dengan kondisi uang kirimannya telah dihabiskan oleh keluarganya, sehingga mereka terpaksa pergi menjadi TKI lagi atau bahkan menjadi pengangguran kembali.

Remitansi (*remittance*) adalah salah satu produk Bank yang berbasis fee (*fee based income*) merupakan transfer atau kiriman uang dari luar negeri ke dalam negeri (*inward remittance*) dan sebaliknya dari dalam negeri ke luar negeri (*outward remittance*). Produk ini memberikan keuntungan terbesar kedua setelah jasa transaksi. Remitansi menghasilkan pendapatan dari biaya administrasi dan selisih kurs karena biasanya

remitansi dikirim dalam valuta asing, misalnya, dolar AS.

India dan Filipina merupakan negara yang dipandang sebelah mata dalam hal ekonomi, tapi sekarang mereka menjadi mapan keadaan ekonominya. Faktor terbesar dari peningkatan ekonomi yang drastis ini adalah karena remitansi yang mereka terima ternyata sangat besar. Jutaan orang keluar dari Filipina setiap tahunnya untuk bekerja di luar negeri dan hasilnya sangat memuaskan bagi keluarga dan devisa negara (<http://www.worldbank.org/>). Negara dengan jumlah remitansi terbesar adalah India dan Meksiko disusul Tiongkok dan Filipina. India mendapat sekitar US\$ 27 miliar pada periode 2006- 2007, disusul Meksiko sekitar US\$ 25 miliar. Di Meksiko, pekerja migrant mendapat porsi khusus dalam pengaturan kebijakan pemerintahan. Bahkan, pada awal 2006, presiden yang menjabat kala itu, Vincente Fox menjadikan pekerja migran sebagai salah satu ujung tombak dari kebijakan luar negerinya (<http://www.worldbank.org/>).

Disamping kisah-kisah yang kurang menyenangkan ternyata masih banyak keluarga TKI di Kabupaten Ponorogo yang telah berhasil mengelola dana remitansi dengan baik. Dari survey pendahuluan diperoleh informasi bahwa cukup banyak mantan TKI bersama keluarganya yang telah melakukan wirausaha secara mandiri. Usaha milik TKI tersebut diantaranya minimarket serta bengkel motor/mobil di desa Polorejo, bengkel variasi mobil di desa Cekok, toko dan fotokopy di desa Ngunut, usaha es krim keliling kota asal Desa Gupolo, Ternak ayam dan bebek di desa Japan, Koperasi Simpan

Pinjam di desa Sukosari, dan kemungkinan masih banyak lagi usaha yang telah dirintis para TKI di wilayah Kabupaten Ponorogo yang lain. Penggunaan remitansi untuk kegiatan investasi ini memiliki beberapa manfaat diantaranya menjadi sumber pendapatan baru keluarga, berperan mengatasi masalah pengangguran, dan pada akhirnya diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pekerjaan menjadi TKI di masa mendatang.

Permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang mencari rejeki di luar negeri memang sangatlah menarik untuk diteliti menggunakan berbagai sudut pandang ilmu pengetahuan. Salah satu tema yang cukup menarik untuk diteliti adalah pemanfaatan remitansi (dana kiriman) yang telah diterima keluarga TKI. Dana tersebut apakah lebih banyak digunakan untuk kegiatan konsumsi atau ternyata keluarga TKI telah berpikir panjang untuk mempersiapkan masa depan dengan menanamkannya dalam bentuk barang-barang investasi. Jika lebih banyak untuk kegiatan konsumsi berarti di masa mendatang harus terus menerus ada TKI. Namun jika dimanfaatkan untuk kegiatan produktif atau investasi, maka hal ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan menjadi TKI/TKW di masa yang akan datang.

Pengujian Pengaruh Gender terhadap Keputusan Konsumsi dan Investasi Keluarga TKI memiliki tujuan : 1) Mengetahui perbedaan antara Tenaga Kerja Wanita dan Tenaga kerja Pria yang bekerja di luar negeri dalam kecenderungan pengeluaran investasi keluarga; 2) Mengetahui perbedaan antara

Tenaga Kerja Wanita dan Tenaga kerja Pria yang bekerja di luar negeri dalam kecenderungan pengeluaran Konsumsi keluarga; 3) Mengetahui perbedaan antara Tenaga Kerja Wanita dan Tenaga kerja Pria yang bekerja di luar negeri dalam keberhasilan menjaga keberlanjutan ekonomi keluarganya.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif. Hasil kuantifikasi variabel dilakukan pengujian dengan menggunakan alat Uji Statistik. Sesuai dengan permasalahan dan variabel yang terkait, maka rancangan penelitian ini menggunakan Analisis of variance (ANOVA) disebabkan terdapat dua variabel dengan kombinasi, yaitu satu interval dan yang satu nominal. Jumlah Sampel sebanyak 30 terdiri dari TKI/TKW dan keluarga yang tinggal di wilayah Ponorogo terutama yang telah bekerja lebih dari 5 tahun. Alasan masa kerja 5 tahun karena memungkinkan TKI/TKW dan keluarga memiliki penghasilan yang cukup untuk melakukan investasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa Tenaga Kerja Pria dan Tenaga Kerja Wanita memiliki perilaku konsumtif dan perilaku investasi yang berbeda. Jika yang bekerja keluar negeri adalah pria, maka pengelola keuangan adalah istri atau keluarganya, sedangkan jika yang bekerja ke luar negeri adalah wanita maka yang menerima remitan dan mengelola keuangan lebih dominan suami (pria). Pada umumnya wanita lebih hemat dan berhati hati dalam

membelanjakan uang kiriman suaminya sedangkan pria yang ditinggal bekerja istrinya cenderung lebih boros dan kurang berhati-hati dalam pembelanjaan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pendapatan TKI sangatlah besar, untuk 30 orang responden dengan berbagai negara tujuan serta gaji dan masa kerja yang berbeda-beda, maka perkiraan pendapatan total mereka sebesar \pm 20 Milyar. Pendapatan tersebut tidak seluruhnya dikirim ke kampung halaman disebabkan bagi TKI pria umumnya menggunakan sebagian untuk biaya hidup di negara tujuan. Besarnya pendapatan yang dikirimkan ke keluarga mereka di kampung halaman hanya sekitar 60%. Berbeda dengan tenaga kerja wanita (TKW) yang lebih banyak bekerja sebagai pembantu rumah tangga, umumnya pendapatan mereka seluruhnya dikirim kepada keluarga di kampung halaman. Adapun pemanfaatan remitansi TKI untuk kegiatan Investasi sebesar 44%, sedangkan sisanya untuk pemenuhan konsumsi sebesar 56%. Jika dibandingkan antara pengeluaran untuk konsumsi dan untuk pengeluaran yang bersifat investasi masih lebih besar untuk kegiatan konsumsi yaitu selisih 12 %.

Jenis pengeluaran Investasi yang paling banyak dipilih oleh TKI dan keluarga adalah tanah pertanian dengan perkiraan total nilai sebesar Rp 3.610.000.000,- (42%), perumahan senilai Rp 3.510.000.000,- (40%), sedangkan modal usaha Rp 1.273.000.000 dan untuk pendidikan anak yaitu biaya sekolah/kuliah hanya Rp 264.000.000,- (3%). Investasi dalam bidang tanah pertanian banyak dipilih dengan alasan keluarga TKI tidak memiliki kemampuan berwirausaha

kecuali melakukan pekerjaan sebagai petani. Selain itu alasan tidak melakukan usaha baru adalah disebabkan mereka takut gagal dan modalnya habis. Pembangunan rumah juga sangat tinggi nilainya karena sejak awal TKI berniat bekerja ke luar negeri salah satu tujuannya adalah untuk membangun rumah atau membantu orang tuanya memperbaiki rumah. Beberapa keluarga TKI juga telah berusaha investasi dalam bidang pendidikan yaitu membiayai sekolah/kuliah anak dan saudara mereka. Alasan investasi bidang pendidikan adalah agar di masa mendatang anak dan saudara mereka tidak perlu menjadi TKI lagi. Jika anak dan saudara mereka memiliki ijazah yang lebih tinggi tentu mereka akan mendapat kesempatan yang lebih luas dalam memperoleh pekerjaan.

Pemanfaatan pendapatan TKI untuk Pengeluaran konsumsi yang tertinggi adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, konsumsi di tempat kerja bagi TKI pria sebesar Rp 7.815.600.000,- (70%). Pembelian motor dan mobil menempati urutan kedua sebesar Rp 2.324.000.000,- (21%). Selanjutnya pembelian perabot rumah dan alat-alat elektronik Rp 608.000.000 (5%) serta dipinjam kerabat mereka serta biaya pemberangkatan ke luar negeri sebesar Rp 450.000.000 (4%).

Jenis usaha yang paling banyak dipilih adalah bidang pertanian sebanyak 14 orang, dengan jumlah tenaga kerja yang dapat terserap sebanyak 28 orang. Toko kebutuhan rumah tangga 5 usaha dengan jumlah tenaga kerja 5 orang, peternakan 3 usaha dengan tenaga kerja 6, variasi mobil 1 usaha tetapi menyerap 5 orang tenaga kerja. Usaha lain yang telah direalisasi diantaranya rental

mobil, shoeroom mobil, fotocopy, dll. Jumlah usaha mandiri yang dilakukan TKI dan keluarga sebanyak 35 unit dengan jumlah tenaga kerja yang dapat terserap sebanyak 63 orang. Tenaga kerja umumnya adalah anggota keluarga serta kerabat dekat yang awalnya belum memiliki pekerjaan yang permanen.

Pendapatan TKI di luar negeri sangat tergantung pada beberapa faktor diantaranya negara tujuan TKI, masa kerja TKI serta bidang pekerjaan. Negara tujuan yang memberi upah tertinggi adalah Amerika Serikat, disusul Korea Selatan, Taiwan, Hongkong. Amerika Serikat dan Korea Selatan umumnya menjadi tujuan TKI pria. Berdasarkan data penelitian diketahui beberapa TKI yang bekerja bahkan telah memiliki latar belakang pendidikan D3/Sarjana. Para TKI sangat tertarik dengan standar gaji yang tinggi serta bidang pekerjaan yang beragam, namun dihadapkan pada biaya pemberangkatan serta biaya hidup untuk tinggal di negara tujuan relatif mahal. Pendapatan TKI pria meskipun lebih tinggi dibanding tenaga kerja wanita, tetapi yang dapat dikirim ke keluarga mereka tidak lebih dari 60% nya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah remitansi sangatlah rentang terhadap pengeluaran yang kurang pasti. Sebagai contoh adalah ketika keluarga TKI menerima kiriman dana dari anggota keluarga yang sedang bekerja di luar negeri, maka banyak dari kerabat yang kemudian meminjam dalam jumlah yang cukup besar tanpa ada kepastian kapan mengembalikannya. Jika TKI dan keluarga sanggup berhemat dalam pengeluaran konsumsi yang habis pakai serta

mengalokasikannya dalam kegiatan yang lebih produktif, maka di masa mendatang akan banyak desa yang menjilma menjadi desa-desa yang makmur dan sejahtera serta terbebas dari permasalahan pengangguran. Lahan pertanian yang semakin sempit disebabkan banyaknya pembangunan perumahan serta pabrik tidak akan menjadi masalah lagi karena telah banyak ragam pekerjaan dalam berbagai bidang usaha baru di pedesaan. Pertumbuhan ekonomi di pedesaan yang disebabkan oleh perilaku masyarakat yang tidak boros akan berdampak secara luas bagi perekonomian wilayah maupun perekonomian Negara secara makro.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemanfaatan dana remitansi pada keluarga TKI di kecamatan Kabupaten Ponorogo terdapat peningkatan pola pikir terhadap kegiatan yang bersifat produktif/investasi. Beberapa jenis usaha baru telah dipilih sebagai kegiatan wirausaha TKI dan keluarga. Adapun jenis investasi yang banyak dipilih terutama pada bidang pertanian, peternakan, mesin-mesin sederhana, bisnis mini market, toko pupuk, variasi mobil, rental mobil, salon kecantikan, warnet/counter hp, serta pendidikan anak/saudara sampai ke perguruan tinggi.

Meningkatnya usaha baru di pedesaan menyebabkan perekonomian desa-desa yang ada di Kabupaten Ponorogo menjadi tumbuh dan berkembang serta terbebas dari masalah kemiskinan dan pengangguran. Jika demikian pemerintah tidak perlu direpotkan oleh permasalahan subsidi rakyat miskin khususnya di desa-desa yang terkenal sebagai kantong-kantong TKI.

Meskipun pengeluaran investasi atau kegiatan produktif masih kalah dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi, paling tidak keluarga TKI di Kabupaten Ponorogo telah mampu menikmati kehidupan yang lebih layak dibanding sebelumnya. Sebenarnya jika mereka mampu berpikir lebih jauh maka meski telah ada kiriman uang seharusnya mereka tetap bekerja dan tidak mengahabiskan kiriman saja. Pengeluaran investasi sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga di masa mendatang agar anggota keluarga tidak terus menerus menjadi TKI.

Hasil wawancara langsung di lapangan diperoleh beberapa informasi tentang harapan dari para TKI dan keluarga terhadap peran pemerintah mengenai keberlanjutan masa depan para TKI dan keluarga antara lain yaitu kurangnya pembinaan dari pihak pemerintah terhadap keluarga TKI yang umumnya tidak memiliki pekerjaan dan hanya mengandalkan kiriman dari para TKI. Padahal jika tidak ada keluarga yang menjadi TKI maka kehidupan mereka akan tetap berada pada garis kemiskinan. Selain itu perlu ada wadah semacam organisasi pada tingkat desa-desa untuk saling berbagi informasi mengenai keberhasilan para TKI serta saling memberi motivasi antar keluarga TKI.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut diatas, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1) Pemanfaatan remitansi TKI dan keluarga di Kabupaten Ponorogo untuk kegiatan konsumsi tertinggi umumnya adalah untuk memenuhi kebutuhan TKI dan keluarganya. TKI pria yang memiliki

gaji lebih tinggi ternyata harus menanggung biaya pemberangkatan dan biaya hidup di tempat kerja yang relatif mahal. Sedangkan TKW pada umumnya dihadapkan pada permasalahan keluarganya yang pengangguran, 2) Pemanfaatan remitansi TKI dan keluarga di Kabupaten Ponorogo untuk pengeluaran ekonomi produktif/investasi sebesar 44% dari total pendapatan TKI antara lain dalam bentuk perumahan, tanah pertanian, peternakan, toko kebutuhan, mini market, salon kecantikan, showroom mobil, variasi mobil, dll. 3) Pemanfaatan remitansi TKI dan keluarga di Kabupaten Ponorogo untuk pengeluaran konsumsi sebesar 56% dari total pendapatan TKI. Konsumsi tertinggi adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga bagi TKW dan menanggung biaya pemberangkatan maupun biaya hidup di tempat kerja bagi tki pria. Selain itu pembelian motor dan mobil menempati urutan kedua pada pengeluaran konsumsi keluarga TKI. 4) Perbandingan Konsumsi dan Investasi menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi pada TKI dan keluarga di Kabupaten Ponorogo 12% lebih besar dibanding investasi. Peran investasi pada tingkat mikro ini diharapkan mampu membawa dampak lebih luas pada terciptanya lapangan kerja sehingga di masa mendatang keluarga TKI tidak perlu ada lagi yang harus menjadi TKI. 5) Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini berhasil mengidentifikasi jenis-jenis pemanfaatan pendapatan TKI oleh TKI dan keluarganya dan mengetahui besarnya perbandingan antara kegiatan konsumsi dengan investsasi.

Adapun saran-saran yang dapat dibelikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagi pemerintah Daerah sudah sepantasnya memberikan alokasi dana bagi pembinaan keluarga TKI dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan ekonomi produktif agar di masa mendatang lebih banyak lagi tercipta lapangan kerja baru di pedesaan. 2) Bagi pemerintah Desa melalui ormas atau kelompok yang ada selayaknya lebih memperhatikan potensi yang ada pada keluarga TKI sehingga mereka memiliki wadah untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi 3) Bagi Perguruan Tinggi melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) perlunya melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk pembinaan terhadap keluarga TKI sehingga mereka memahami langkah yang tepat bagi pengelolaan keuangan keluarga agar kehidupan mereka lebih stabil dalam jangka panjang. 4) Bagi keluarga TKI sudah selayaknya tidak berperilaku boros dan belajar dari keluarga TKI lain yang lebih berhasil memanfaatkan dana daripada hanya untuk kegiatan yang konsumtif saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Penerbit Rineka Cipta, Cetakan ke duabelas, Edisi Revisi V, Jakarta.
- Burhan Bungin, Prof., Dr., S.Sos. M.Si, 2005, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Penerbit Prenada Media, Jakarta
- Fakih, M, 2004, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gorman, Tom, 2009, *The Complete Ideal's Guide: Economics*, Alih Bahasa Arif Rakhman, Prenada, Jakarta.
- Sadono Sukirno, (2008), **Pengantar Ekonomi Makro**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sadono Sukirno, (2008), **Pengantar Ekonomi Makro**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Syahri Alimudin, 2002, *Aplikasi Statistik Praktis dengan SPSS for Windows*, J&J Learning, Yogyakarta.
- Tukiran, Pande M Kutanegara, Agus Joko Pitoyo, M Syahbudin Latief, 2007, **Sumber daya Manusia dan Tantangan Masa Depan**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sumber Non Buku :
- Erna Retna Rahadjeng (2011) : "Analisis Perilaku Investor Perspektif Gender Dalam Pengambilan Keputusan Investasi Di Pasar Modal", Humanity, Volume 6, Nomor 2, Maret 2011
(<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/humanity/article/view/1391>)
- Hamidah, 2013, *Dampak Remitansi TKI Luar Negeri Pada Investasi Daerah Asal di Kabupaten Ponorogo*, Jurnal Ekuilibrium ISSN 1858-165X Volume 11 Nomor 2/ Maret 2013.
- Naning dan Hamidah, 2013, *Transisi Peran TKI Purna Di Ponorogo, Dari Buruh Menjadi Wirausahawan Dan Tuan Tanah*, Penelitian Dosen Pemula Dikti tahun 2013.
- Natalia Christanti dan Linda Ariany Mahastanti, 2011, "Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Investor Dalam Melakukan Investasi", Jurnal Manajemen Teori dan Terapan, Tahun 4, No. 3, Desember 2011 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga
- Suparmin dan M. Sidik, 2010, "Perubahan Perilaku Dan Keseimbangan Ekonomi Rumah Tangga Tki Pria Dan Wanita Setelah Kepulangannya Ke Pulau Lombok", Agroteksos Vol. 20 No.1, April 2010, Fakultas Pertanian Universitas Mataram.

PERAN GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL PEJABAT STRUKTURAL TERHADAP KINERJA KARYAWAN

(studi empiris pada Universitas Muhammadiyah Ponorogo)

Oleh :

HERI WIJAYANTO

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

Email : ok_coi@yahoo.com

ABSTRAK

Pemimpin dapat mempengaruhi semangat dan kegairahan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja, dan terutama tingkat prestasi suatu organisasi. Pemimpin juga memainkan peranan kritis dalam membantu kelompok, individu untuk mencapai tujuan, sehingga dalam penelitian ini bertujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Tujuan Universitas Muhammadiyah Ponorogo adalah mewujudkan Universitas Muhammadiyah Ponorogo sebagai kampus unggulan dengan mengandalkan profesionalitas IPTEK, dan atau seni yang diridhai Allah SWT, sehingga terwujud masyarakat utama yang bertaqwa dan beraklaq mulia. Gaya kepemimpinan transformasional mempunyai peran yang signifikan terhadap peningkatan kinerja karyawan. Gaya kepemimpinan transformasional pejabat structural di Universitas Muhammadiyah Ponorogo termasuk sedang mendekati tinggi, pencerminan nilai tersebut lebih dikarenakan interaksi antara pejabat structural dengan karyawan lebih bersifat koordinatif bukan instruksional, hal ini dikarenakan tugas pokok dan fungsi masing-masing sudah terjabarkan dalam statuta, buku pedoman tata kelola, surat keputusan, dan dasar hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo secara jelas, dan bisa dipahami oleh semua pihak.

Kata kunci: *Kepemimpinan Transformasional, Kinerja karyawan, dan Universitas Muhammadiyah Ponorogo*

PENDAHULUAN

Kepemimpinan transformasional merupakan gaya kepemimpinan yang berupaya mentransformasikan nilai-nilai yang dianut oleh bawahan untuk mendukung visi dan tujuan organisasi. Melalui transformasi nilai-nilai tersebut, diharapkan hubungan baik antar anggota organisasi dapat dibangun sehingga muncul iklim saling percaya diantara anggota organisasi. Karakteristik kepemimpinan transformasional menurut Avolio et al., dalam Stone et al., (2004), yaitu kharisma, inspirasional, stimulan intelektual, dan konsideran individual. Karakteristik itu akan mendorong individu-individu dalam organisasi menerima sebuah sistem baru.

Gaya kepemimpinan yang tepat akan mampu mempengaruhi kinerja karyawan untuk mau mempelajari sistem baru yang diterapkan oleh perusahaan. Gaya kepemimpinan dapat diartikan sebagai sikap dan tindakan yang dilakukan pemimpin dalam menghadapi bawahan, mengatur suatu sistem operasional organisasi, menjalankan dan mengawal kebijakan dan menyelesaikan masalah baik internal maupun eksternal (Bass, Berry dan Houston, 1993).

Visi Universitas Muhammadiyah Ponorogo adalah terwujudnya Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang Islami memiliki komitmen yang tinggi bagi terciptanya lingkungan keilmuan yang kondusif dalam mengembangkan IPTEK, dan

atau seni bertumpu pada prinsip inovatif, dinamis, berciri kemandirian dan kewirausahaan menuju masyarakat utama yang diridhai Allah SWT.

Misi Universitas Muhammadiyah Ponorogo adalah mengembangkan dakwah amar makruf nahi munkar dalam melaksanakan catur dharma Universitas Muhammadiyah Ponorogo sehingga melahirkan penceramah hati, pola pikir dan manfaat lahir batin yang diridhai Allah SWT.

Pejabat Struktural Universitas Muhammadiyah Ponorogo meliputi; pejabat ditingkat rektorat, dekanat, lembaga, UPT, badan, dan biro. Rektorat terdiri dari Rektor, Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, dan wakil Rektor 3, Dekanat terdiri dari dekan, wakil dekan, dan kepala program studi di masing-masing Fakultas, yaitu: Fakultas Agama Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Teknik, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Lembaga, UPT, Badan, dan Biro di pimpin oleh seorang pemimpin dan di bantu beberapa kepala divisi, dan staf.

LANDASAN TEORI

Kepemimpinan Transformasional

Kepemimpinan didefinisikan sebagai kesanggupan mempengaruhi perilaku orang lain dalam suatu arah tertentu (Hughes, Ginnett, dan Curphy, 1993). Kepemimpinan juga diartikan suatu usaha mempengaruhi orang antar perseorangan (interpersonal), lewat proses komunikasi untuk mencapai satu atau beberapa tujuan (Gibson, Ivancevich dan Donnely, 1987).

Bass (1990), dalam Harsiwi (2003), beranggapan bahwa unjuk kerja

kepemimpinan yang lebih baik, bila para pemimpin dapat menjalankan salah satu atau kombinasi dari empat cara ini, yaitu;

1. Memberi wawasan serta kesadaran akan misi, membangkitkan kebanggaan, serta menumbuhkan sikap hormat dan kepercayaan pada bawahannya (*Idealized Influence-kharisma*).
2. Menumbuhkan ekspektasi yang tinggi melalui pemanfaatan simbol-simbol untuk memfokuskan usaha dan mengkomunikasikan tujuan-tujuan penting dengan cara yang sederhana (*Inspirational Motivation*).
3. Meningkatkan intelegensi, rasionalitas, dan pemecahan masalah secara seksama (*Intellectual Stimulation*).
4. Memberikan perhatian, membina, membimbing, dan melatih setiap orang secara khusus dan pribadi (*Individualized Consideration*). Pemimpin yang seperti ini akan dianggap oleh rekan-rekan atau bawahan mereka sebagai pemimpin yang efektif dan memuaskan.

Peran pemimpin sangat dibutuhkan dalam menggerakkan organisasi secara optimal, dalam menjalankan perannya, pemimpin harus mempunyai ketrampilan memimpin dan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Gaya kepemimpinan dari seorang pemimpin, pada dasarnya dapat diterangkan melalui tiga aliran teori (Hersey dan Blanchard dalam Mustopadidjaja, 2005), yaitu;

1. *Teori Genetis* (Keturunan). Inti dari teori menyatakan bahwa "*Leader are born and nor made*" (pemimpin itu dilahirkan, bukannya dibuat). Para penganut aliran

teori ini mengetengahkan pendapatnya bahwa seorang pemimpin akan menjadi pemimpin karena ia telah dilahirkan dengan bakat kepemimpinan. Dalam keadaan yang bagaimanapun seseorang ditempatkan karena ia telah ditakdirkan menjadi pemimpin, sesekali kelak ia akan timbul sebagai pemimpin.

2. Teori sosial. Jika teori pertama di atas adalah teori yang ekstrim pada satu sisi, maka teori inipun merupakan ekstrim pada sisi lainnya. Inti aliran teori sosial ini ialah bahwa *"Leader are made and not born"* (pemimpin itu dibuat atau dididik bukannya kodrati). Jadi teori ini merupakan kebalikan inti teori genetika. Para penganut teori ini mengetengahkan pendapat yang mengatakan bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin apabila diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup.
3. Teori Ekologis. Kedua teori yang ekstrim di atas tidak seluruhnya mengandung kebenaran, maka sebagai reaksi terhadap kedua teori tersebut timbullah aliran teori ketiga. Teori yang disebut teori ekologis ini pada intinya berarti bahwa seseorang hanya akan berhasil menjadi pemimpin yang baik apabila ia telah memiliki bakat kepemimpinan. Bakat tersebut kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman yang memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut. Teori ini menggabungkan segi-segi positif dari kedua teori terdahulu sehingga dapat dikatakan merupakan teori yang paling mendekati kebenaran.

Konsepsi kepemimpinan transformasional pertama kali dikemukakan oleh James McGregor Burns. Dalam kaitannya dengan kepemimpinan transformasional, Bernard Bass dalam Stone et al., (2004), mengatakan sebagai berikut: *"Transformational leaders transform the personal values of followers to support the vision and goals of the organization by fostering an environment where relationships can be formed and by establishing a climate of trust in which visions can be shared"*.

Gaya kepemimpinan transformasional yang berorientasi kepada karyawan atau bawahan ditandai dengan beberapa hal diantaranya: Pemimpin melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan, Pemimpin lebih bersifat kekeluargaan, saling percaya, kerja sama dan saling menghormati di antara sesama anggota kelompok (Dubinsky, Alan dan William Emory, 1998). Karakteristik kepemimpinan transformasional menurut Avolio et al., dalam Stone et al., (2004), adalah sebagai berikut:

1. *Idealized influence (or charismatic influence)*,
Idealized influence mempunyai makna bahwa seorang pemimpin transformasional harus kharisma yang mampu menyihir bawahan untuk bereaksi mengikuti pimpinan. Dalam bentuk konkrit, kharisma ini ditunjukkan melalui perilaku pemahaman terhadap visi dan misi organisasi, mempunyai pendirian yang kukuh, komitmen dan konsisten terhadap setiap keputusan yang telah diambil, dan menghargai bawahan. Dengan kata lain, pemimpin transformasional

menjadi *role model* yang dikagumi, dihargai, dan diikuti oleh bawahannya.

2. *Inspirational motivation*

Inspirational motivation berarti karakter seorang pemimpin yang mampu menerapkan standar yang tinggi akan tetapi sekaligus mampu mendorong bawahan untuk mencapai standar tersebut. Karakter seperti ini mampu membangkitkan optimisme dan antusiasme yang tinggi dari para bawahan. Dengan kata lain, pemimpin transformasional senantiasa memberikan inspirasi dan memotivasi bawahannya.

3. *Intellectual stimulation*

Intellectual stimulation karakter seorang pemimpin transformasional yang mampu mendorong bawahannya untuk menyelesaikan permasalahan dengan cermat dan rasional. Selain itu, karakter ini mendorong para bawahan untuk menemukan cara baru yang lebih efektif dalam menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, pemimpin transformasional mampu mendorong (menstimulasi), bawahan untuk selalu kreatif dan inovatif.

4. *Individualized consideration*

Individualized consideration berarti karakter seorang pemimpin yang mampu memahami perbedaan individual para bawahannya. Dalam hal ini, pemimpin transformasional mau dan mampu untuk mendengar aspirasi, mendidik, dan melatih bawahan. Selain itu, seorang pemimpin transformasional mampu melihat potensi prestasi dan kebutuhan berkembang para bawahan serta memfasilitasinya. Dengan kata lain, pemimpin transformasional mampu

memahami dan menghargai bawahan berdasarkan kebutuhan bawahan dan memperhatikan keinginan berprestasi dan berkembang para bawahan.

Kinerja

Kinerja menunjuk pada konteks manajemen personalia, meskipun semakin meluas pada bidang lain seperti hukum, sosial, politik dan pemerintahan yang bermuara pada manusia yang menjalankannya.

Kinerja dari kata dasar "kerja" yang diterjemahkan kata dari bahasa asing prestasi, dan hasil kerja. Pengertian kinerja karyawan menunjuk pada kemampuan karyawan dalam melaksanakan keseluruhan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Tugas-tugas tersebut biasanya berdasarkan indikator-indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan. Sebagai hasilnya akan diketahui bahwa seseorang karyawan masuk dalam tingkatan kinerja tertentu.

Kinerja karyawan dapat dikelompokkan ke dalam: tingkatan kinerja tinggi, menengah atau rendah. Dapat juga dikelompokkan melampaui target, sesuai target atau di bawah target. Berangkat dari hal-hal tersebut, kinerja dimaknai sebagai keseluruhan "unjuk kerja" dari seorang karyawan.

Kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2000: 67) "Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya", kemudian menurut Ambar Teguh Sulistiyani (2003: 223) "Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan,

usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya". Maluyu S.P. Hasibuan (2001: 34) mengemukakan "kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu".

Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja (*performance appraisal*) pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja karyawan. Menurut Bernardin dan Russel (1993: 379) "*A way of measuring the contribution of individuals to their organization*". Penilaian kinerja adalah cara mengukur kontribusi individu (karyawan) kepada organisasi tempat mereka bekerja.

Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategis dengan akuntabilitas. Suatu instansi pemerintah dapat dikatakan berhasil jika terdapat bukti-bukti atau indikator-indikator yang mengarah capaian misi, tanpa adanya pengukuran kinerja sangat sulit dicari pembenaran yang logis atau pencapaian misi organisasi instansi. Sebaliknya dengan disusunnya perencanaan strategis yang jelas, perencanaan operasional yang terukur maka dapat diharapkan tersedia pembenaran yang

logis dan argumentasi yang memadai untuk mengatakan sesuatu pelaksanaan program berhasil atau tidak (Drs. Salomoen Soeharyo, MPA dan Drs. Nasri Effendy, M.Sc: 2003)

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *deskriptif* dengan rancangan *cross-sectional* untuk menganalisis pengaruh variabel gaya kepemimpinan transformasional pejabat struktural dan variabel kinerja karyawan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang memenuhi kriteria berjumlah 75. dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 40 karyawan.

2. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

3. Alat Pengumpul Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer yang dikumpulkan langsung dari responden, sedangkan instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan kepemimpinan pejabat struktural dan kinerja karyawan. Instrumen penelitian di buat sendiri oleh peneliti. Untuk gambaran mengetahui karakteristik demografi responden maka juga dibuat kuesioner. Dalam penelitian kuesioner yang

digunakan adalah: Kuesioner A digunakan untuk mengukur kepemimpinan transformasional Pejabat struktural, dan kuesioner B digunakan untuk mengukur kinerja karyawan. Jawaban pernyataan dengan menggunakan skala Likert dari 1 s/d 5 dengan kriteria penilaian sebagai berikut:

- a. Tidak Pernah, artinya menurut persepsi responden bahwa jawaban pertanyaan tersebut tidak pernah dilakukan oleh pejabat struktural. Jawaban tidak pernah diberi skor 1.
- b. Jarang, artinya menurut persepsi responden bahwa jawaban pertanyaan tersebut jarang dilakukan oleh pejabat struktural. Jawaban jarang diberi skor 2.
- c. Kadang-kadang, artinya menurut persepsi responden bahwa jawaban pertanyaan tersebut kadang-kadang dilakukan oleh pejabat struktural. Jawaban kadang-kadang diberi skor
- d. Sering, artinya menurut persepsi responden bahwa jawaban pertanyaan tersebut sering

dilakukan oleh pejabat struktural. Jawaban sering diberi skor 4.

- e. Selalu, artinya menurut persepsi responden bahwa jawaban pertanyaan tersebut selalu dilakukan oleh pejabat struktural. Jawaban selalu diberi skor 5.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kepemimpinan Transformasional

1. Gambaran Kepemimpinan Transformasional dapat dilihat berdasarkan aitem pertanyaan dari 4 variabel yaitu kharisma, inspirasional, stimulant intelektual, dan konsideran individu. Butir pertanyaan yang digunakan untuk mengukur kepemimpinan transformasional sejumlah 12 butir pertanyaan. Perhitungan butir pertanyaan menggunakan nilai rata-rata per butir dibagi 5 (skala Likert) kemudian dikalikan 100 (mean dalam skala 100). Adapun distribusi butir pertanyaan tentang kepemimpinan transformasional sebagaimana pada table 1.

Table 1 Nilai Rata-rata Gaya Kepemimpinan Transformasional
Pejabat struktural Universitas Muhammadiyah Ponorogo 2013 (N = 40)

No	Pertanyaan tentang Kepemimpinan	Mean	Mean Skala 100
1.	Pejabat struktural mempunyai kewibawaan	3.0250	60.5
2.	Pejabat struktural kompeten dibidangnya	3.2500	65
3.	Pejabat struktural mempunyai pengaruh yang kuat	3.1750	63.5
4.	Pejabat struktural mempunyai ide-ide terbaru	3.1500	63
5.	Pejabat struktural memotivasi bawahan	3.1750	63.5
6.	Pejabat struktural memberikan inspirasi	3.0250	60.5
7.	Pejabat struktural memberikan solusi	2.9500	59
8.	Pejabat struktural memberikan contoh	3.0750	61.5
9.	Pejabat struktural memberikan penghargaan atas prestasi	3.5000	70
10.	Pejabat struktural memberikan dukungan secara personal	3.3250	66.5
11.	Pejabat struktural mengenali karakteristik bawahan	3.1500	63
12.	Pejabat struktural peduli pada bawahan	3.0750	61.5

2. Gambaran Tentang Kharisma

Gambaran tentang butir pertanyaan mengenai persepsi dan pendapat kepemimpinan transformasional pejabat struktural Universitas Muhammadiyah Ponorogo tentang kharisma, sebagai berikut :

Pejabat struktural mempunyai kewibawaan dengan nilai rata-rata 3.025 atau 60.5, Pejabat struktural kompeten dibidangnya dengan nilai rata-rata 3.250 atau 65, dan Pejabat struktural mempunyai pengaruh yang kuat dengan nilai rata-rata 3.175 atau 63.5.

3. Gambaran Tentang Inspirasional

Gambaran butir pertanyaan mengenai persepsi dan pendapat kepemimpinan transformasional pejabat struktural Universitas Muhammadiyah Ponorogo tentang kharisma, sebagai berikut :

Pejabat struktural mempunyai ide-ide terbaru dengan nilai rata-rata 3.15 atau 63, Pejabat struktural memotivasi bawahan dengan nilai rata-rata 3.17 atau 63.5, dan Pejabat struktural memberikan inspirasi dengan nilai rata-rata 3.025 atau 60.5.

4. Gambaran Tentang Stimulan Intelektual

Gambaran butir pertanyaan mengenai persepsi dan pendapat kepemimpinan transformasional pejabat struktural Universitas Muhammadiyah Ponorogo tentang stimulan intelektual, sebagai berikut:

Pejabat struktural memberikan solusi dengan nilai rata-rata 2.950 atau 59, Pejabat struktural memberikan contoh dengan nilai rata-rata 3.075 atau 61.5, dan Pejabat struktural memberikan penghargaan atas prestasi dengan nilai rata-rata 3.50 atau 70.

5. Gambaran Tentang Konsideran Individu

Gambaran butir pertanyaan mengenai persepsi dan pendapat kepemimpinan transformasional pejabat struktural Universitas Muhammadiyah Ponorogo tentang Konsideran Individu, sebagai berikut:

Pejabat struktural memberikan dukungan secara personal dengan nilai rata-rata 3.325 atau 66.5, Pejabat struktural mengenali karakteristik bawahan dengan nilai rata-rata 3.150 atau 63, dan Pejabat struktural peduli pada bawahan dengan nilai rata-rata 3.075 atau 61.5.

B. Kinerja Karyawan

Gambaran kinerja karyawan dapat dilihat berdasarkan aitem pertanyaan dari 4 variabel kinerja karyawan. Butir pertanyaan yang digunakan untuk mengukur kinerja karyawan sejumlah 15 butir pertanyaan. Perhitungan butir pertanyaan menggunakan nilai rata-rata per butir dibagi 5 (skala Likert) kemudian dikalikan 100 (mean dalam skala 100). Adapun distribusi butir pertanyaan tentang kepemimpinan transformasional sebagaimana pada table 2.

Table 2. Nilai Rata-rata Kinerja Karyawan
Universitas Muhammadiyah Ponorogo 2013 (N = 40)

No	Pertanyaan tentang Kepemimpinan	Mean	Mean Skala 100
1.	Kehadiran karyawan menyesuaikan jam kerja	3.6000	72
2.	Tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan dengan baik	3.4750	69.5
3.	Karyawan mengerjakan tugasnya dengan sungguh-sungguh	3.5750	71.5
4.	Karyawan menyelesaikan tugas secara tepat waktu	3.4750	69.5
5.	Karyawan melakukan pekerjaannya dengan aman	3.6000	72
6.	Karyawan mematuhi peraturan kerja	3.5000	70
7.	Karyawan melakukan evaluasi diri	3.6750	73.5
8.	Hasil pekerjaan Karyawan sudah sesuai harapan	3.5750	71.5
9.	Karyawan menguasai peralatan pendukung pekerjaan	3.4000	68
10.	Karyawan mau belajar hal-hal baru	3.4750	69.5
11.	Karyawan bertanggung jawab atas pekerjaan	3.5250	70.5
12.	Karyawan menyusun jadwal pekerjaan	3.6250	72.5
13.	Karyawan mengarsipkan semua surat dan mencatatnya	3.6500	73
14.	Karyawan berperan aktif dalam kegiatan	3.5500	71
15.	Karyawan melaporkan semua kegiatan kepada atasan	3.6250	72.5

C. Pencermineanan Gaya Kepemimpinan Transformasional pejabat struktural Universitas Muhammadiyah Ponorogo

tercermin dalam gaya kepemimpinan transformasional, dapat terdiskripsi dalam table 3.

Untuk mengetahui bagaimana gaya kepemimpinan pejabat struktural Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Tabel 3. Hasil Analisis Gaya Kepemimpinan Transformasional
Pejabat Struktural Universitas Muhammadiyah Ponorogo 2013 (N = 40)

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kepemimpinan transformasional	40	25	46	37.0250	5.71766

Nilai mean gaya kepemimpinan transformasional sebagaimana dalam table 4.2. adalah 37.025 nilai tersebut berada pada interval $(\mu - 0,5\sigma) < \text{mean} \leq (\mu + 0,5\sigma)$, maka digolongkan/dikategorikan "*sedang*".

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan pejabat struktural Universitas Muhammadiyah Ponorogo bila dicerminkan dalam gaya kepemimpinan

transformasional mempunyai pencerminan yang sedang (37.025).

D. Pencerminean Kinerja Karyawan

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Pencerminean Kinerja Karyawan Universitas Muhammadiyah Ponorogo sebagaimana dalam table 4.

Tabel 4. Hasil Analisis Kinerja Karyawan
Universitas Muhammadiyah Ponorogo 2013 (N = 40)

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kinerja Karyawan	40	41	61	52.7750	5.03571

Nilai mean kinerja karyawan sebagaimana dalam table 4.4. adalah 52.7750, nilai tersebut berada pada interval $(\mu + 0,5\sigma) < \text{mean} \leq (\mu + 1,5\sigma)$, maka digolongkan/dikategorikan "*tinggi*".

Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan Universitas Muhammadiyah Ponorogo adalah tinggi (52.7750).

E. Pengaruh Gaya kepemimpinan Transformasional pejabat struktural terhadap kinerja karyawan.

Pengaruh gaya kepemimpinan transformasional pejabat struktural (variable bebas) terhadap kinerja karyawan (variable y) Universitas Muhammadiyah Ponorogo dianalisis dengan menggunakan regresi linear, dengan persamaan regresinya sebagai $Y = a + bX$. Hasil analisis regresi linear dengan menggunakan program spss, sebagaimana dalam table 5.

Tabel 5.

Hasil Analisis regresi Linear Variable x dan variable y 2013 (N = 40)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
	B	Std. Error	Beta	Sig.
1 (Constant)	27.475	3.376		.000
x	.683	.090	.776	.000

Tabel 5. dapat dijelaskan sebagai berikut; Konstanta sebesar 27.475; artinya jika gaya kepemimpinan transformasional pejabat struktural Universitas Muhammadiyah Ponorogo (X) nilainya adalah 0, maka kinerja karyawan Universitas Muhammadiyah Ponorogo (Y) nilainya positif yaitu sebesar 27.475.

Koefisien regresi variabel harga (X) sebesar 0.683; artinya jika gaya kepemimpinan transformasional pejabat

struktural Universitas Muhammadiyah Ponorogo (X) mengalami kenaikan 1, maka kinerja karyawan Universitas Muhammadiyah Ponorogo (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0.683. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara gaya kepemimpinan transformasional pejabat struktural dengan kinerja karyawan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, semakin naik gaya kepemimpinan

transformatif pejabat structural semakin meningkatkan kinerja karyawan. Persamaan regresi dari hasil analisis adalah sebagai berikut; $Y = 27.475 + 0.683X$.

Tingkat signifikansi hasil analisis menunjukkan nilai 0.000, hal ini berarti bahwa Gaya kepemimpinan Transformatif pejabat structural berpengaruh terhadap kinerja karyawan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan:

1. Gaya kepemimpinan transformatif mempunyai peran yang signifikan terhadap peningkatan kinerja karyawan.
2. Gaya kepemimpinan transformatif pejabat structural di Universitas Muhammadiyah Ponorogo termasuk sedang mendekati tinggi, pencerminan nilai tersebut lebih dikarenakan interaksi antara pejabat structural dengan karyawan lebih bersifat koordinatif bukan instruksional, hal ini dikarenakan tugas pokok dan fungsi masing-masing sudah terjabarkan dalam statuta, buku pedoman tata kelola, surat keputusan, dan dasar hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo secara jelas, dan bisa dipahami oleh semua pihak.
3. Sistem kerja karyawan di Universitas Muhammadiyah Ponorogo lebih berorientasi pada proses dan hasil, sehingga keberadaan pemimpin tidak

mutlak diperlukan ketika proses pekerjaan berlangsung, karena sebagian besar karyawan berinteraksi secara langsung dengan *stake holder* (mahasiswa, pihak luar, dan antar personal karyawan). hanya pada proses pengesahan, dan proses legalitas, karyawan berinteraksi langsung dengan atasan pada jenis pekerjaan rutinitas, dan ada jenis pekerjaan pengembangan karyawan sangat membutuhkan keberadaan atasan sebagai penanggungjawab, dan persetujuan.

4. Kinerja karyawan Universitas Muhammadiyah Ponorogo mempunyai tingkat yang tinggi, hal ini lebih disebabkan pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh karyawan yang rata-rata mempunyai latar belakang pendidikan sarjana, dan SMA setingkatnya.

2. Saran

Saran lebih menitikberatkan pada penelitian lanjutan yang disarankan peneliti adalah;

1. Meneliti pada pejabat structural di masing-masing tingkatan secara utuh, dengan waktu yang relative lama agar mampu mencerminkan hasil yang sesungguhnya.
2. Perlunya meneliti pada perguruan tinggi yang lain, sehingga bisa di generalisasi hasil penelitian sejenis.
3. Perlunya meneliti pencerminan pada gaya kepemimpinan yang lain, selain gaya kepemimpinan transformatif, misalnya gaya kepemimpinan transaksional, sehingga dapat

disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan yang ada di Perguruan tinggi lebih cenderung pada kepemimpinan transformasional atau kepemimpinan transaksional.

4. Perlunya meneliti pengaruh sumber daya manusia karyawan pada sebuah perguruan tinggi terhadap kinerja karyawan yang moderasi dengan gaya kepemimpinan transformasional. hal ini untuk memberikan gambaran tentang apakah tingkat SDM mempengaruhi kinerja disebabkan karena adanya gaya kepemimpinan transformasional pejabat di atasnya.
5. Perlunya penelitian tentang perbedaan antara pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap jenis pekerjaan rutinitas, dan pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap jenis pekerjaan pengembangan pada karyawan perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bass, BM. 1985. *Leadership and Performance Beyond Expectations*. New York: Free Press.
- Burns, A. 1992. *Kharisma and Leadership in Organization*. London: Sage.
- Bycio, P., Hackett, R.D., and Allen, J.S. 1995. Further Assessments of Bass's (1985). Conceptualization of Transactional and Transformational Leadership. *Journal of Applied Psychology*, 80 (4): 468-478.
- Donald R Copper, C William Emory, *Metode Penelitian Bisnis Jilid 2*, PT. Gelora Akasara Pratama, Erlangga, 1998
- Djarwanto, P.S., Statistik Nonparametrik, Edisi Ketiga, Yogyakarta, BPFE, 1995.
- Dubinsky, Alan J., Francis J. Yammarino, Marvin A. Jolson, "An Examination of Linkages Between Personal Characteristic and Dimension of Transformational Leadership", Human Science Press, Inc., 1995, hal. 315-334.
- Dunphy, D. and Stace, D. 1990. *Under New Management*. Reseville: McGraw-Hill.
- Eisenbach, R., Watson, K., and Pillai, R. 1999. Transformational Leadership in The Context of Organizational Change. *Journal of Organizational Change Management*, 12 (2): 80-88.
- Fullan, M.G. 1991. *The New Meaning of Educational Change*. New York: Teachers College Press.
- Gay, L.R. 1996. *Educational Research: competencies for analysis and application*. Prentice Hall, Ohio.
- Gering Supriyadi, MM, Drs. Tri Guno, LLM, *Budaya Kerja Organisasi Pemerintah*, 2003
- Hani Handoko & Fandy Tjiptono. (1996). "Kepemimpinan transformasional dan pemberdayaan". *JEBI*. Vol.11, 1: 23-33
- Hartanto, Frans M., Peran Kepemimpinan Transformasional dalam Upaya Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja di Indonesia, makalah Seminar Departemen Tenaga Kerja, Jakarta, 1991.
- Howell, J.M., and Hall-Merenda, K.E. 1999. The Ties That Bind: The Impact of Leader-Member Exchange, Transformational and Transactional Leadership, and Distance on Predicting Follower Performance. *Journal of Applied Psychology*, 84 (5): 395-401.
- Hughes, R.L., Ginnett, R.L., & Curphy. 1993. *Leadership: enhancing the lessons of experience*. Irwin, Boston.
- Leithwood, K.A. 1992. The Move toward Transformational Leadership. *Educational Leadership*, 49(5), 9-18.
- Management Role of the Principal. *Educational Administration Quarterley*, 30(1), 77-96.
- Mustopadidjaja AR. Prof. Dr. , *Dimensi dan Dinamika Kepemimpinan Abad 21*, 2006
- Pidekso, Yulius Suryo, Hubungan Kepemimpinan Transformasional dan Karakteristik Personal Pemimpin, skripsi yang tidak dipublikasikan, 2000.

- Rakhmat, J., Psikologi Komunikasi, Edisi Revisi, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 1996.
- Saifuddin Azwar, MA, *Penyusunan skala psikologi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002
- Salamoen Soeharyo, Drs, MPA, Nasri Effendy, M.Sc, Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 2003
- Santosa, Singgih, SPSS Mengolah Data Statistik Secara Profesional, Jakarta, Elex Media Komputindo, 1999.
- Shaskin, M. and Kiser, K. 1992. *Total Quality Management*. Seabrook, MD: Docochon Press.
- Sri Nastiti A, Dicky Wisnu UR, *Statistika Bisnis*, UMM, 2004
- Stephen P, Mary, Robbins Coulter, *Management edisi bahasa Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 1999
- Sutanto Priyo Hastomo, *Basic Data Analysis for Healt Research*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2006
- Tjiptono, Fandy, dan Akhmad Syakhroza, "Kepemimpinan Transformasional", *Manajemen dan Usahawan Indonesia*, No. 9, Thn. XXVIII September 1999, hal. 5-13.
- Widayat, SE, MM, *Metode Penelitian Pemasaran*, UMM, Malang, 2004
- Yulk, G., *Leadership In Organization*, Third Edition, New Jersey, Prentice-Hall, Inc., 1981.

**PENGAKUAN DAN PENGUKURAN TRANSAKSI MUDHARABAH;
Kajian PSAK 105 dalam Bingkai Ilmu Sosial Profetik**

Oleh:
ARIF HARTONO

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

ABSTRAK

Penelitian ini berorientasi kepada pembahasan atas konstruksi nilai normatif syariah yang terdapat pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 105 dari aspek pengakuan dan pengukuran transaksi kerjasamanya. Metodologi yang diterapkan pada penelitian kualitatif ini adalah ilmu sosial profetik. Prinsip filosofis yang diturunkan dari metodologi tersebut adalah nilai humanis emansipatoris, transendental dan teleologikal. Supaya dapat lebih dekat dengan unsur teknisnya, masing-masing prinsip filosofis tersebut diturunkan menjadi konsep dasar *instrumental, socio-economic, critical, justice, all inclusive, rational-intuitif, ethical dan holistic welfare*. Hasil penelitian ini dapat terlihat dari transformasi nilai syariah dalam PSAK 105 yang meletakkan standar ukurannya pada sebuah keseimbangan atas keberadaan nilai normatif dengan unsur teknis dalam pengakuan dan pengukuran transaksinya. Berdasarkan prinsip filosofis humanis, PSAK 105 masih belum sepenuhnya memiliki keseimbangan nilai karena nilai kebersamaan dalam kerjasamanya masih tereduksi oleh proses bagi hasil yang berbeda. Prinsip filosofis emansipatoris dalam PSAK 105 masih menemukan adanya proses bagi hasil yang belum seimbang dengan bagi rugi yang dapat mereduksi nilai keadilan, karena lebih cenderung pada materi. Prinsip filosofis transendental melihat konstruksi keilmuan yang mendasari PSAK 105 cenderung bersifat rekonstruktif dari akuntansi konvensional yang empirik, dan belum diimbangi dengan aplikasi aspek non empirik. Sedangkan prinsip filosofis teleologikal memandang akuntabilitas yang terjadi atas kerjasama dalam PSAK 105 lebih dominan pada aspek hubungan antar manusia, dan belum seimbang dengan pertanggungjawabannya sebagai hamba kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Kata Kunci : *Transformasi, humanis, emansipatoris, transendental, teleologikal*

PENDAHULUAN

Munculnya kesadaran umat atas transaksi yang tidak lagi sekedar berorientasi profit secara materi, menyebabkan adanya pergeseran paradigma dalam bertransaksi. Sehingga menyebabkan para pelaku bisnis perbankan kemudian menyesuaikan prinsip-prinsip operasional perbankan dengan membuka divisi syariah. Adanya bank syariah, tidak berarti serta merta terjadi pergeseran sosial dalam masyarakat secara cepat dalam mengubah karakter transaksinya. Tetapi merupakan proses panjang yang dilakukan individu maupun institusional dalam proses transformasi menuju kesadaran fiqih muamalahnya.

Perkembangan konsep syariah berikutnya tentu masih membutuhkan dukungan dari banyak pihak. Karena keberadaan lembaga perbankan syariah yang ada masih membutuhkan seperangkat aturan, kebijakan dan sistem yang baku. Semua perangkat tersebut bersumber dari dua pihak yang berbeda namun harus bersinergi. Pertama, adalah pemerintah sebagai pihak yang berwenang secara legalitas hukum formalnya. Sedangkan yang kedua adalah pelaku transaksinya yang harus konsisten menjaga keberlangsungan prinsip kemanusiaan dalam mengembangkan 'nilai' syariah menuju pada 'fitrah dirinya' yang

sesuai dengan ajaran normatif dalam Al Qur'an dan Al Hadist.

Pemerintah memberikan dukungan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang salah satu bagian di dalamnya berhubungan dengan prinsip bagi hasil. UU ini masih belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai dasar acuan. Karena ada beberapa kerancuan, seperti banyaknya jenis jasa bank syariah yang tidak dapat dilakukan oleh bank konvensional, dilarangnya bank umum melakukan penyertaan modal kecuali pada unit usaha keuangan, dilarangnya bank konvensional dalam transaksi jual beli barang, dan sebagainya. Keterbatasan dari ketentuan pemerintah tersebut kemudian disikapi positif oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dengan mengupayakan membuat standar khusus tentang akuntansi berdasarkan prinsip syariah untuk mengatur penyajian laporan keuangan bank syariah. Harapannya adalah munculnya transaksi yang berbeda antara bank konvensional dengan bank syariah. Hal tersebut sejalan dengan pemahaman system ekonomi Islam yang tidak mengedepankan *output*, tetapi lebih mengutamakan proses yang ada secara berkesinambungan, mulai dari *input*, *process*, *output*. (Yusanto dan Wijayakusuma 2002, 17-24).

IAI kemudian mengesahkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 59 sebagai wujud komitmennya dalam memberikan kontribusi terhadap perkembangan akuntansi syariah. Dengan disahkannya PSAK'59, maka lembaga-lembaga keuangan syariah wajib menjalankan operasionalisasinya berdasarkan PSAK'59 tersebut. Tetapi di dalam penerapan PSAK'59

juga masih terdapat kelemahan mendasar yang bersumber dari kebijakan teknisnya. Beberapa diantaranya adalah pada tahapan perlakuan akuntansi mengenai pengakuan dan pengukuran. Sebagai contoh, munculnya perbedaan pemahaman terhadap pengakuan pendapatan pada transaksi bank syariah, yaitu pembiayaan *profit sharing* (mudharabah). Masih terdapat perbedaan penafsiran dalam pengakuannya, antara menggunakan *accrual basis* atau *cash basis*. Selain itu juga disebabkan oleh kompleksnya system transaksi yang terus berkembang seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dapat menjadi faktor pengganggu atas konsistensi nilai syariah di dalam akuntansi. Sebenarnya hal tersebut tidaklah berlebihan, mengingat akuntansi syariah memang dikembangkan berdasarkan akuntansi kapitalis (Triyuwono, 2001, Harahap, 2001 dan 2003).

Triyuwono (2002c), melakukan kajian PSAK'59 dengan melihat konsep teori yang dijadikan pijakan dalam pengembangannya. Berdasarkan kajian yang dilakukan, ternyata konsep teori yang membentuk PSAK'59 masih mengedepankan unsur-unsur teori kapitalisme. Hal itu terlihat dari aspek dasar teori yang masih memakai teori entitas (*entity theory*). Konsep *entity theory* merupakan pengakuan atas kepemilikan yang dianut oleh prinsip kapitalisme. Harahap (2001, 2003) juga melakukan kajian atas PSAK'59 dengan temuan yang sama, yaitu adanya *entity theory* dalam konsep kepemilikan dan distribusi *income*. Ratmono (2004), melihat PSAK'59 dari konsep pengungkapan. Hasil analisisnya menjelaskan bahwa ; 1) konsep pengungkapan PSAK'59 dari sisi *Islamic value*

masih terbatas pada *direct stakeholders* dan belum terakomodasinya item-item yang mengarah pada sosial lingkungan. 2) perlu adanya dekonstruksi atas PSAK '59 supaya sifat syariah yang ada di dalamnya tidak terbatas pada persoalan materi (informasi), tetapi juga memiliki sifat akuntabilitas. Akuntansi syariah semestinya dikembangkan menjadi konsep hidup, sosial, ekonomi, dan akhirnya masuk dalam konsep bisnis dan akuntansi secara nyata. Triyuwono (2003), menjelaskan bahwa untuk melakukan pembenahan diperlukan pikiran yang bersifat *breakthrough* dalam mengubah akuntansi menjadi lebih humanis dan emansipatoris.

Pandangan singkat yang dilakukan Triyuwono (2003) tersebut mengantarkan kita pada suatu perenungan atas proses pengembangan ilmu. Pada prinsipnya ilmu diciptakan untuk digunakan oleh manusia sebagai makhluk sosial yang hidup di alam. Oleh karena itu, manusia semestinya harus peka terhadap hukum-hukum alam. Merujuk pada teori Imanuel Kant dalam Salim (2001), manusia memiliki dua dunia sekaligus, yaitu fenomena dan noumena. Fenomena diartikan sebagai keterkaitan manusia dengan hukum alam. Sedangkan dalam konteks noumena, manusia memiliki jiwa yang bersifat *free will*. Walaupun manusia dikendalikan dan dikonseptualisasikan sebagai makhluk pasif karena di dorong dan dibentuk oleh kekuatan di luar kendalinya (lingkungan makro dan mikro), tetapi manusia juga bisa sebagai makhluk aktif karena kemampuannya dalam melaksanakan fungsi kontrol, membentuk dan bertindak secara bebas (Salim, 2001).

Berdasarkan konseptualisasi tersebut tentunya kita tidak bisa mensikapi

perkembangan dunia hanya berdasarkan lingkungan yang membentuknya saja, tetapi harus diseimbangkan dengan nilai-nilai kodrati manusia pada posisi yang semestinya. Kodrat manusia menurut Islam adalah sebagai seorang *khalifatullah fil ardh*. Artinya, adanya manusia karena memiliki tugas sebagai seorang pemimpin yang mampu memberikan kesejahteraan, keadilan, dan keseimbangan masyarakat dengan alam semesta. Transformasi nilai-nilai Islam dalam tataran kehidupan masyarakat sebagai makhluk sosial menjadi sangat penting dan relevan untuk menjadi bukti Islam sebagai *rahmatan lil alamin*. (Afifudin, 2004).

Penjelasan tersebut menunjukkan persoalan pada ilmu sosial (ekonomi dan akuntansi) yang semestinya juga mampu menjembatani persoalan tersebut di atas dengan menitik beratkan pada sinergi beberapa nilai-nilai dasarnya. Dalam pandangan Islam, nilai-nilai dasar yang dimaksud adalah ajaran dalam Al Qur'an dan Al Hadist. Sedangkan sinerginya adalah dengan praktek di dunia ekonomi dan akuntansi. Sehingga dalam hubungan kedua elemen tersebut, harus dibentuk sebuah "jembatan" yang mampu menghubungkan antara perintah normatif dengan praktek di dunia secara riil. Proses transformasi tersebut harus selalu terjadi supaya ilmu sosial yang ada tidak terjerumus kepada arah yang salah.

Dalam kaitannya dengan transformasi ilmu sosial, Kuntowijoyo (1998) menawarkan konsep Ilmu Sosial Profetik. Ilmu sosial profetik menurut Kuntowijoyo (1998) merupakan manifestasi dari Al Qur'an pada surat Ali Imran ayat 110 dan Al Baqarah 282. Adapun nilai yang tergambar dalam ilmu

sosial profetik ada empat hal pokok, yaitu; *humanis, emansipatoris, transcendental* dan *teleologikal*.

Penelitian ini bermaksud untuk melakukan sinergi berfikir dalam upaya mengembangkan pendekatan pengakuan dan pengukuran prinsip bagi hasil pada transaksi mudharabah. Transaksi ini sudah diatur secara teknis di dalam PSAK'59. Akan tetapi karena adanya beberapa permasalahan mendasar pada parakteknya, maka penulis bermaksud untuk melihat pengakuan dan pengukuran prinsip bagi hasil dengan menggunakan PSAK'105. Supaya proses penerapannya lebih mendasar dan sesuai dengan "fitrah diri" manusia, maka dilakukan proses transformatif antara kontek riil pada ranah praktek akuntansi mudharabah dalam PSAK'105, dengan dimansi kodrat manusia sebagai seorang *khalifatullah fil ardh*. Transformasi sosial tersebut dilakukan dengan konsep Ilmu Sosial Profetik.

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum PSAK 105

PSAK 105 merupakan aturan untuk transaksi mudharabah secara khusus yang diterbitkan sebagai pengganti aturan yang telah dibuat dalam PSAK'59. Hal ini dilakukan mengingat masih terdapat selisih pemahaman dalam penafsiran PSAK'59 pada perlakuan akuntansi mengenai pengakuan (*recognition*), pengukuran (*measurement*), penyajian (*presentation*) dan pengungkapan (*disclosure*). Selisih pemahaman tersebut terjadi karena masih banyak kepentingan yang harus diakomodasi oleh PSAK tersebut, tetapi terkendala dengan

perumusan prinsip syariah secara normatif. Artinya, terdapat perbedaan mendasar antara konsep normatif dari nilai syariah, dengan proses aplikasi yang sudah terjadi pada kondisi riil. Berdasarkan kondisi tersebut maka dalam upaya untuk menyusun suatu aturan, hendaknya dilakukan pembahasan secara terpisah antara nilai dasar aturannya dengan praktek riil yang sesungguhnya. Oleh karena itu, PSAK'59 dipandang perlu ada penyesuaian kembali, baik secara nilai normatifnya maupun dalam kondisi teknis pada standar akuntansinya.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan secara umum memiliki tujuan untuk mengatur (regulasi) perlakuan akuntansi yang berlaku umum. Demikian juga dengan PSAK 105, yang memiliki tujuan secara lebih spesifik mengatur tentang transaksi mudharabah. Hal ini terlihat pada PSAK 105 par.1 :

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi mudharabah.

Berdasarkan pernyataan tersebut terlihat bahwa PSAK 105 memiliki maksud untuk mengatur seluruh komponen transaksi mudharabah pada bank syariah. Namun ada transaksi mudharabah yang dikecualikan dalam aturan PSAK 105, sebagaimana terlihat pada paragraf 3 :

Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad mudharabah.

Walaupun ada akad yang dikecualikan aturannya oleh PSAK 105, akan tetapi pada prinsipnya asumsi yang digunakan tetap berorientasi pada prinsip *going concern*, sebagaimana terlihat pada Kerangka Dasar Penyajian dan Pelaporan Laporan Keuangan paragraf 4 :

Asumsi dasar konsep akuntansi bank syariah sama dengan asumsi dasar konsep akuntansi keuangan secara umum, yaitu konsep kelangsungan usaha (*going concern*) dan dasar akrual. Pendapatan untuk tujuan penghitungan bagi hasil menggunakan dasar kas.

Proses bisnis berdasarkan prinsip *going concern* tersebut memang harus selalu berjalan dari waktu ke waktu. Hal itu pula yang menyebabkan pertumbuhan transaksi dalam kondisi riil selalu berkembang. Oleh karena itu, standar akuntansi yang mendukung juga harus mengikuti perkembangannya. Munculnya PSAK 105 sebagai pengganti PSAK 59 (PSAK 105 par.42), merupakan contoh dari proses pergeseran kebijakan akuntansi. Standar akuntansi harus mampu mengakomodasi beragam kondisi yang terjadi pada dunia praktek. Menurut Adnan (2002), perkembangan standar akuntansi syariah dilandasi oleh tiga hal utama. *Pertama*, kondisi riil (faktual) yang terus berjalan harus diiringi dengan perubahan regulasi dalam bidang perbankan. *Kedua*, bank syariah harus melakukan transaksi dengan prinsip-prinsip syariah yang benar-benar mengandung nilai syariah. *Ketiga*, bisnis perbankan syariah tidak hanya bertumpu pada salah satu proses

(system, transaksi, pembukuan), tetapi menjadi satu kesatuan yang terikat dalam bingkai nilai-nilai syariah yang bersifat utuh.

B. Pengakuan dan Pengukuran PSAK 105 Pada Tingkat Struktur

PSAK 105 memberikan pedoman dalam pengelolaan pembukuan untuk perbankan syariah dengan prinsip mudharabah. Pengertian mudharabah menurut PSAK 105 par. 4 :

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak ke dua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Dalam transaksi mudharabah lebih ditekankan pada aspek kerja sama yaitu antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) dengan hasil keuntungan (nisbah bagi hasil) diukur berdasarkan nilai profit (*profit sharing*) yang disepakati di muka. Posisi *shahibul maal* dan *mudharib* tergantung pada jenis kesepakatannya. Mudharabah menurut PSAK 105 dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah* (investasi tidak terikat), *mudharabah muqayadah* (investasi terikat) dan *mudharabah musytarakah* (investasi bersama).

Pengakuan dan pengukuran transaksi mudharabah secara garis besar di bagi dalam dua bagian yaitu pada saat bank bertindak sebagai *shahibul maal* atau sebagai *mudharib*. Sehingga pengakuan

dan pengukuran pada tingkat struktur dapat dipahami dari dua pendekatan. *Pertama*, sebagai *shahibul maal*, dimana dana yang akan digunakan untuk pembiayaan sepenuhnya berasal dari bank. Sedangkan nasabah (*mudharib*) hanya memiliki keahlian dalam mengelola dana tersebut. Pada konteks pengakuan dan pengukuran, pencatatan akuntansinya dibedakan menjadi dua yaitu akuntansi untuk pemilik dana dan akuntansi untuk pengelola dana.

Pengakuan dan pengukuran pada posisi entitas selaku pemilik dana mencatat dana syirkah temporer yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset non kas. Sedangkan pengukuran investasi mudharabahnya yang berbentuk kas diukur sebesar jumlah yang diberikan saat pembayaran, sedangkan yang non kas diukur sebesar nilai wajar asset non kas saat penyerahan. Pengakuan penghasilan usaha mudharabah dilihat berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana.

Apabila entitas bertindak selaku pengelola dana, maka pada saat dana diterima diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar asset non kas yang diterima. Pada akhir periode, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatat. Jika entitas menyalurkan dana syirkah temporer mutlaqah yang diterima, maka diakui sebagai asset. Jika entitas menyalurkan dana syirkah temporer muqayadah yang diterima, maka entitas tidak mengakui

sebagai asset, karena entitas tidak memiliki hak untuk menggunakan asset atau melepas asset tersebut, kecuali dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemilik dana. Apabila ada hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diumumkan tetapi belum dibagikan, maka dana diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana. Sedangkan jika terjadi kerugian karena kelalaian pengelola, maka diakui sebagai beban pengelola dana.

Dalam prinsip *mudharabah*, pekerjaan merupakan hak eksklusif dari pengelola dana. Pemilik dana hanya diperkenankan untuk melakukan pengawasan, sehingga yang melakukan pembagian hasil usaha adalah *mudharib* (Wiroso, 2011: 350). Secara konsep, nisbah yang umumnya disepakati dalam bentuk prosentase, harus disepakati oleh kedua pihak yang sama-sama ridho. Dengan demikian, tidak diijinkan salah satu pihak memaksa pihak kedua untuk menyetujui nisbah yang dibuat tanpa landasan kerelaan keduanya. Sangat dianjurkan dalam penentuan kesepakatan nisbah untuk melakukan tawar-menawar. Selain itu dalam prinsip bagi hasilnya, PSAK 105 memperbolehkan menggunakan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Berdasarkan PSAK 105 par. 11 menyatakan, pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Sumber lain yang mendukung diperbolehkannya kedua prinsip pencatatan tersebut adalah DSN MUI no.15/DSN-MUI/IX/2000.

Lebih lanjut diungkapkan dalam PSAK 105 par.10 bahwa Jika dari pengelolaan dana mudharabah menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana mudharabah menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana. Padaparagraph 11 juga menyampaikan prinsip pembagian hasil usaha. Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

C. Konsep Interpretif Pada Pembiayaan Mudharabah

Dasar intepretasi atas pembiayaan mudharabah dibatasi pada posisi pengakuan (*recognition*) dan pengukuran (*measurement*) dari standar akuntansi pada PSAK 105. Intepretasi tersebut akan dilakukan dengan membangun sebuah jembatan yang dapat menghubungkan antara praktek riil dalam penerapan aturan di dalam standar yang berlaku, dengan nilai syariah Islam yang seharusnya melekat sebagai jiwa yang menghidupkan aturan tersebut. Pendekatan yang digunakan untuk

mengintepretasikan pengakuan dan pengukuran supaya memiliki nilai syariah yang *kaffah* dengan dimensi Ilmu Sosial Profetik (Triyuwono, 2002).

Secara umum konsep intepretasi dengan pendekatan dimensi ilmu sosial profetik tidak lain merupakan sebuah transformasi (pembebasan). Dimensi syariah yang utama adalah, bagaimana sebuah standar bisa melakukan transformasi pada nilai-nilai pembebasan sebagai wujud dari fitrah manusia. Sehingga nilai nilai yang terkandung di dalam ketentuan standar mudharabah PSAK 105, seharusnya mampu mencerminkan aspek kerja sama yang tidak sekedar berorientasi materi, namun memiliki dasar filosofis humanis, emansipatoris, transendental dan teleologikal.

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Metodologi

Kondisi yang terjadi pada ranah praktek akuntansi mudharabah, baik menggunakan PSAK 59 maupun PSAK 105, merupakan cerminan atas ketidakberdayaan manusia sebagai bagian dari pengaruh arus modernitas. Pada dasarnya akuntansi merupakan hasil dari modernisasi transaksi yang bersifat kapitalis. Karakter kapitalis selalu berorientasi pada nilai materi sebagai indicator keberhasilan kinerja, sehingga sering berbenturan dengan sifat kodrati manusia. Etika *utilitarianism* yang dijadikan sandaran keilmuannya, justru mengantarkan pada tataran interaksi yang sangat radikal dan eksploitatif. Ukuran dan takaran yang bersifat ekonomis telah

mengubah kodrat manusia sebagai *kalifatullah fil ardh* (Afifudin, 2004).

Bergesernya nilai kodrati manusia disebabkan oleh tidak adanya kesadaran atas keyakinan diri manusia pada nilai Tauhid. Seharusnya konsepsi inilah yang menjadi dasar bagi manusia untuk meyakini ajaran agama juga mengatur tetang muamalah. Islam telah banyak mengajarkan konsepsi dan aturan muamalah di dalam Al Qur'an dan Al Hadist. Tetapi masih dalam bentuk perintah normatif yang perlu penafsiran dan jembatan untuk bisa dijadikan dasar nilai operasional pada ranah praktek. Oleh karena itu dibutuhkan metodologi yang mampu menjembatani arus dua arah yang berasal dari perintah normatif ke dalam dunia praktek secara riil secara lebih bersinergi dan seimbang (*balance*).

Kaitanya dengan transformasi arus dua arah tersebut, Kuntowijoyo (1998, 288) membuat gagasan ilmu sosial profetik. Menurut Pribadi dan Haryono (2002, 305-309), pendekatan ilmu sosial profetik berasal dari enam gagasan besar. *Pertama*, Islam sebagai agama, ideologi, tuntunan hidup, juga memiliki kepentingan pada pengembangan filsafat dan perubahan sosial terhadap masyarakat sesuai dengan visi dan cita-cita luhurnya. *Kedua*, transformasi sosial yang dibangun dalam Islam merupakan jawaban atas pemahaman *amar ma'ruf nahi munkar*, yang dijabarkan dalam nilai humanis, emansipatoris dan liberasi. *Ketiga*, transformasisosial yang dilakukan dilandasi dengan prinsip dasar Islam, sehingga menjadi langkah praktis bagi

proses realisasi upaya transformatif. Artinya diperlukan penerjemahan nilai normatif Islam menjadi perangkat ilmu sosial metodologis, yang dapat menjelaskan realitas sosial secara sosiologis dan memberikan jalan keluarnya.

Keempat, sebagai konsekuensi dari transformasi pada ilmu sosial metodologis, maka proses transformasi sosial harus diikuti proses intelektual dalam wilayah kognitif umat Islam. Artinya, transformasi sosial yang dilakukan harus mampu membawa kepada tatanan intelektual umat Islam menuju pada kesadaran ilmiah. Sehingga diharapkan nantinya mampu memberikan petunjuk nyata bagi perubahan sosial yang lebih baik. *Kelima*, sebagai jawaban keilmiahan dalam transformasi sosial, maka perumusan nilai sosial yang dilakukan merupakan sinergi dua kekuatan besar normatif-empirik. Artinya ilmu sosial Islam selain merujuk pada nilai normatif, seharusnya juga mampu menjelaskan realitas sosial empirik masyarakat. *Keenam*, kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah ilmu sosial Islam haruslah berfungsi profetik. Artinya ilmu sosial Islam benar-benar secara konkret berfungsi humanis, emansipatoris, transendental dan teleologikal.

B. Ilmu Sosial Profetik; Alat Analisis Transformatif

Kuntowijoyo (1998, 288) memaparkan bahwa yang kita butuhkan sekarang adalah ilmu sosial profetik, yaitu ilmu yang tidak hanya menjelaskan dan mengubah fenomena sosial, tetapi juga

memberi petunjuk ke arah mana transformasi dilakukan, untuk apa dan oleh siapa. Ilmu sosial profetik tidak saja mengubah demi perubahan, tetapi mengubah berdasarkan cita-cita perubahan yang diinginkan masyarakat. Pandangan lain yang diberikan Kuntowijoyo (1998, 289) menjelaskan :

Dengan ilmu sosial profetik, kita juga akan melakukan reorientasi terhadap epistemologi, yaitu orientasi terhadap *mode of thought* dan *mode of inquiry*, bahwa sumber ilmu pengetahuan tidak hanya dari rasio dan empirik, tetapi juga dari wahyu (normatif).

Ilmu sosial profetik menurut Kuntowijoyo (1998, 288) merupakan derivasi dari misi historis Islam sebagaimana terkandung dalam Al Qur'an surat Ali Imran ayat 110 :

Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia untuk berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah.

Sedangkan perintah untuk melakukan pencatatan transaksi, yang digunakan sebagai dasar nilai normatif akuntansi syariah terdapat dalam Al Baqarah 282 :

Wahai orang-orang yang beriman ! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah ia menuliskannya. Dan hendaklah orang yang

berutang itu mendiktekan, dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari padanya.....

Humanis ; Wujud dari Fitrah "Diri"

Kandungan nilai yang terdapat pada ilmu sosial profetik terdiri dari empat unsur, yaitu humanis, emansipatoris, transendental dan teleologikal. Pandangan humanis menganggap permasalahan teknis di dunia transaksi modern merupakan wujud dominasi nilai-nilai maskulin yang cenderung *eksploitatif* dan *hyper-ekspansionis* (Heriyanto, 2003). Sehingga orientasi akhir yang bersifat materi itu menjadi virus yang menyebabkan terjadinya dehumanisasi dan mengakibatkan ilmu mengarah kepada sifat yang cenderung reduksionistik. Hal ini dibuktikan dengan cara melihat keberadaan manusia yang tidak secara komprehensif, tetapi secara parsial. Menurut Triyuwono (2002b, 3), humanis merupakan proses dalam memandang suatu teori (akuntansi) dalam sifat yang manusiawi, sesuai fitrah manusia dan dapat digunakan sesuai kapasitas yang dimiliki manusia sebagai makhluk yang berinteraksi antar sesama secara dinamis dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai filosofi humanis kemudian diturunkan dalam dua konsep dasar yaitu ; (1) *Instrumental* yang dilandasi pemikiran bahwa sebuah ilmu pengetahuan (akuntansi syariah) merupakan instrument yang dapat dipraktekkan dalam dunia nyata. Sehingga konsep dasar instrumental ini

digunakan untuk mengembangkan ilmu tidak sebatas pada wacana, tetapi dapat dibangun dengan membawa kepada suatu fase perubahan dengan nilai profetik sebagai landasannya. (2) *Social-economic*, diindikasikan bahwa teori keilmuan (akuntansi syariah) tidak membatasi wacana pada transaksi ekonomi saja tetapi juga harus dilihat dari ilmu sosial atau ilmu yang lain (lingkungan dan budaya). Kondisi tersebut akan mengarahkan ilmu mampu mengakomodasi realitas yang lebih objektif, karena perumusan teori sosial secara transformatif harus mampu membaca gejala-gejala aktual dan historis yang muncul dalam interaksi masyarakat, sehingga keterbukaan keilmuan menjadi relevan (Haryono dan Priyadi, 2002).

Emansipatoris ; Kesetaraan yang Melintas Batas

Prinsip filosofis yang berikutnya adalah *emansipatoris*. Prinsip filosofis ini berasal dari pemahaman emansipasi yang berarti pembebasan diri dari perbudakan (Partono dan Al Barry, 2001). Maksud dari perbudakan tersebut adalah bebas dari *nahi munkar* atas struktur sosial yang eksploitatif, menuju pembebasan penindasan (Pribadi dan Haryono, 2002). Menurut Triyuwono (2002b, 3) perubahan yang terjadi adalah perubahan yang membebaskan diri dari ikatan semu (materi) dan pembebasan dari ideologi semu (kapitalisme).

Untuk mentransformasikan prinsip filosofis emansipatoris dalam teori keilmuan, Triyuwono (2002b) menurunkan prinsip tersebut dalam dua bentuk konsep dasar. Pertama, *critical*

yang merupakan turunan dari *critical study* Habermas. Konsep dasar kritis dalam pembangunan teori akuntansi berarti adanya keterbukaan. Artinya suatu keilmuan (akuntansi syariah) dapat menerima segala masukan yang sesuai dengan nilai ideologinya. Sehingga konstruksi keilmuan yang di bawanya akan berdasar kepada nilai-nilai syariah.

Konsep dasar yang kedua adalah *justice* (keadilan). Konstruksi keilmuan yang adil berarti tidak mengabaikan hak manusia dan alam. Sehingga terjadinya sinergi antara manusia dengan alam yang saling memanfaatkan tanpa saling merusak.

Transendental; Keterbukaan yang Bersinergi

Pandangan transendental adalah adanya keterbukaan yang menyeluruh (*holistic*). Hal tersebut merupakan lawan dari pandangan mekanik, yang melihat keseluruhan berdasarkan jumlah dari bagian-bagian. Pandangan transendental secara *holistic* merupakan cara pandang yang menyeluruh dengan penekanan pada interelasi, interkoneksi dan interdependensi entitas (nilai-nilai agama) dalam sebuah jaringan (Heriyanto, 2003).

Filosofi transendental menurut Triyuwono (2002b) memberikan gambaran bahwa dalam membentuk teori (akuntansi syariah), dapat memperkaya dirinya dengan mengadopsi disiplin ilmu yang lain. Seperti sosiologi, psikologi, etnologi, fenomenologi dan sebagainya. Aspek transendental tidak terbatas pada disiplin ilmu, tetapi juga menyangkut aspek ontologi. Selain itu juga tidak

terbatas pada sifat materi (ekonomi) tetapi juga aspek non materi (mental dan spiritual). Kemudian berlanjut pada aspek epistemologinya dengan merangkai dari berbagai pendekatan supaya teori akuntansi syariah yang dibentuk benar-benar bersifat emansipatoris.

Supaya prinsip filosofis transendental dapat masuk pada tataran teori keilmuan, maka diturunkan menjadi konsep dasar. Triyuwono (2002b) menurunkannya menjadi dua konsep dasar. Pertama, *all inclusive*, yaitu memberikan dasar pemikiran bahwa dalam pembentukan teori tidak bisa menutup diri dari teori lain yang sudah ada sebelumnya. Dengan kata lain, pembentukan konsep dan teori akuntansi syariah tidak bisa mengesampingkan kemapanan teori akuntansi keuangan konvensional yang telah digunakan oleh masyarakat bisnis. Sebagai konsekuensi dari konsep dasar *all inclusive* dalam membentuk akuntansi syariah, membawa implikasi pada kemoderatan yang harus dimiliki para akuntan Islam dengan tidak mengesampingkan makna (esensi nilai) yang ada.

Konsep dasar yang kedua adalah *rational-intuitif* yang mengindikasikan bahwa, secara epistemologi konstruksi keilmuan (akuntansi syariah) memadukan dua kekuatan rasional dan intuisi manusia (Triyuwono, 2002b). Menurut Nasution (2002), akuntansi masuk dalam kategori muamalah, sehingga pendekatan *qauliyah* dan *kauniyah* dapat digunakan bersamaan. Keduanya saling melengkapi dan tidak bersifat dikotomis.

Teleologikal; “Falah” yang Sesungguhnya

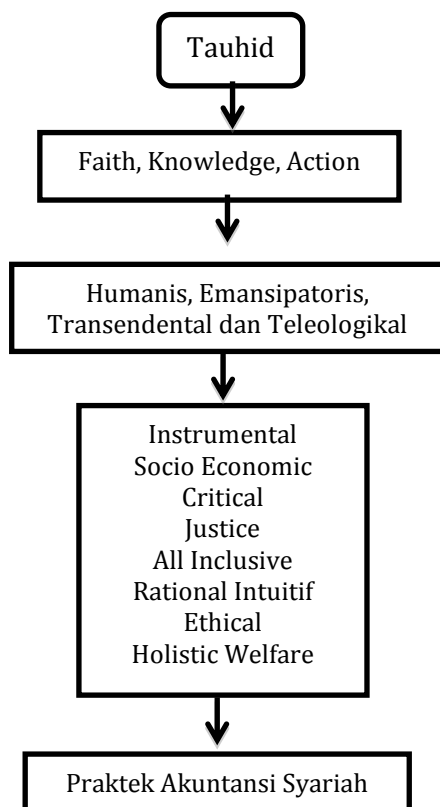
Prinsip filosofis ini memberikan suatu dasar penilaian bahwa akuntansi tidak sekedar memberikan informasi untuk mengambil keputusan ekonomi, tetapi juga memiliki tujuan transendental sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia kepada Tuhan, sesama manusia maupun kepada alam semesta. Sebagaimana digambarkan dalam nilai transendental yang menerima segala bentuk nilai-nilai keilmuan; yang salah satunya adalah nilai agama (syariah), telah mengantarkan pemahaman bahwa ilmu ekonomi dan akuntansi sarat dengan nilai norma. Sehingga dengan sendirinya telah mengantarkan pada kodrat manusia sebagai hamba Tuhan (Afifudin, 2004).

Untuk sampai pada pembentukan keilmuan dengan prinsip teleologikal, diturunkan dalam dua konsep dasar, yaitu secara *ethical* dan *holistic welfare* (Triyuwono, 2002b). Konsep dasar *ethical* dilandasi dari pemikiran bahwa akuntansi syariah tidak bebas nilai seperti pada akuntansi konvensional. Tetapi memiliki nilai-nilai etika dan moral sebagai wujud nilai agama dan intuisi. Etika merupakan tuntunan para akuntan dalam melakukan kegiatan akuntansi.

Konsep dasar yang kedua adalah *holistic welfare*, dimana merupakan satu kesatuan yang utuh dalam mengartikan sebuah kesejahteraan yang dihasilkan oleh suatu aktivitas transaksi akuntansi syariah. Kesejahteraan tidak hanya diartikan dalam bingkai materi, tetapi juga non materi.

Proses transformasi dengan menggunakan ilmu sosial profetik sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan serangkaian proses yang terjadi secara berkesinambungan dalam membentuk pola aktivitas transaksi mudharabah yang sinkron antara nilai normatif yang mengaturnya dengan kondisi riil pada praktek akuntansinya. Gambaran dari struktur hirarkisnya adalah sebagai berikut :

Gambar 1
Struktur Hirarkis Proses Derivasi Konsep
Dasar Teori Akuntansi Syariah



PEMBAHASAN

Sebagaimana telah dijelaskan di awal bahwa penerapan nilai syariah di dalam sebuah teknis akuntansi harus memperhatikan dua unsur secara seimbang. *Pertama*, adalah unsur teknis akuntansinya

yang benar benar meninggalkan ideologi kapitalis dan berubah bercirikan syariah. *Kedua*, nilai dasar yang mengkonstruksi keilmuan ini (akuntansi syariah) supaya benar-benar mampu mewujudkan fitrah diri manusia yang sesungguhnya. Faktor yang pertama tentunya sudah dijalankan dengan adanya transaksi syariah pada lembaga keuangan dan sudah memiliki aturan dalam PSAK maupun dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). PSAK yang telah diterbitkan untuk mengatur transaksi syariah adalah PSAK'59 yang kemudian disempurnakan secara lebih spesifik pada setiap transaksinya pada PSAK 101 sampai PSAK 106. Sedangkan faktor yang kedua sangat erat berhubungan dengan tingkat kepatuhan terhadap syariah dalam penyajian informasi akuntansi. Suatu pertanyaan yang akan kita uraikan pembahasannya adalah apakah ketentuan dalam PSAK 105 dan aturan dari DSN-MUI tentang akad transaksi mudharabah dalam pengakuan dan pengukuran, sudah mengimplementasikan nilai-nilai syariah? Hal inilah yang akan dilihat transformasinya dengan menggunakan metode dalam ilmu sosial profetik.

A. Prinsip Mudharabah Pada Nilai Humanis

Dalam tataran praktek, penyajian informasi berdasarkan PSAK 105 dapat dikritisi berdasarkan elemen-elemen pengertian dari transaksi mudharabah. Berdasarkan definisinya ada dua elemen penting yang dilihat yaitu ; (1) kerja sama antara pihak yang bertransaksi (*shahibul maal* dan *mudharib*). Dasar yang digunakan adalah akad kerja sama, berarti

selama kontrak akad mudharabah tidak diperbolehkan ada satu pihakpun yang dirugikan. Sehingga pengakuan dan pengukuran kerugian hanya sebagai peringatan atas kelalaian yang dilakukan masing-masing pihak, terutama pengelola dana. (2) Nisbah yang disepakati. Pembagian keuntungan memang dilakukan di awal kerjasama namun yang disepakati merupakan prosentase dari hasil usaha berdasarkan nisbah bagi hasil. Prosentase tersebut baru akan terlihat nilai nominal rupiahnya setelah hasil usaha dilaporkan pada akhir periode. Sistem bagi hasil yang digunakan pada PSAK 105 adalah *Net Reveue Sharing* (NRS) dan *Profit Sharing*. Pada prinsip mudharabah pekerjaan merupakan hak eksklusif dari pengelola dana dimana pemilik dana hanya bisa melakukan pengawasan. Sehingga yang melakukan pembagian hasil usaha adalah mudharib (Wiroso, 2011).

Nilai humanis yang terlihat dalam konsep tersebut, terwujud pada karakter kerjasama yang dilakukan oleh pihak yang bertransaksi. Walaupun masing masing pihak memiliki porsi kewajiban yang berbeda tetapi terdapat unsur keridhoan yang dijadikan dasar kepercayaan satu dengan yang lain. Hal tersebut merupakan wujud konsep dasar instrumental yang berarti ada simbol (*instrument*) dalam proses hubungan kerja sama tersebut berupa kepercayaan dari masing-masing pihak. Kepercayaan inilah yang kemudian menguatkan keyakinan dalam bekerja pada bagiannya masing-masing, tanpa ada kondisi memaksakan hasil usaha tanpa

melihat keadaan ekonomi dan kerelaan pelaku bisnisnya.

Atas dasar keadaan ekonomi yang tidak bisa dipastikan dan unsur kerelaan tersebut yang kemudian mendasari transaksi mudharabah dilihat nilai humanisnya berdasarkan konsep dasar sosial ekonomi. PSAK 105 memperbolehkan terjadinya tawar menawar dalam menentukan nisbah dan mencatat bagi hasilnya berdasarkan prinsip bagi hasil maupun bagi laba (PSAK 105 par.11). Aturan tersebut kemudian berkembang meluas pada setiap transaksi dengan prinsip mudharabah di masyarakat. Sehingga ada alternatif yang fleksibel dalam berbagi untuk mewujudkan kerelaan dari pihak yang bertransaksi, dengan menggunakan bagi hasil maupun bagi laba. Selain itu juga dengan adanya alternatif pilihan tersebut dapat mengakomodasi beragamnya transaksi sosial yang ada di masyarakat.

Sudut pandang lain dari transaksi dengan prinsip mudharabah yang dapat dilihat dari perspektif nilai humanis adalah pada konsep pembagian keuntungan dan kerugiannya secara bersamaan. Berdasarkan ketentuan yang ada pada PSAK 105 par. 11(2012), pembagian keuntungan transaksi mudharabah, dapat berdasarkan laba bersih maupun hasil usaha. Sedangkan jika terjadi kerugian, maka pihak yang bertanggungjawab dilihat berdasarkan penyebab terjadinya kerugian. Apabila kerugian terjadi akibat kelalaian pengelola dana, maka beban kerugian ditanggung oleh pihak pengelola. Namun apabila kerugian diakibatkan oleh

sesuatu yang tidak kita duga sebelumnya maka pemilik dana yang menanggung semua kerugian tersebut. Pengakuan dan pengukuran keuntungan dan kerugian dalam tataran informasi yang dibawanya merupakan instrumen yang bersifat hidup karena terus berkembang seiring pergerakan transaksi. Prinsip instrumental yang tampak pada kondisi tersebut adalah munculnya nilai kebersamaan dalam bekerja sama. Sehingga pengakuan keuntungan sebagai hak bersama dapat dimunculkan berupa materi (simbol). Seluruh informasi tentang pelaksanaan usaha sampai dengan laporan hasil keuntungannya yang akan dibagi hasilkan sesuai nisbah, merupakan simbol yang mewakili nilai instrumental dalam prinsip humanis. Sehingga PSAK 105 sudah memiliki nilai humanis yang lebih baik dari pada PSAK'59.

Apabila dilihat dari konsep dasar yang lain dari prinsip humanis, yaitu *socio-economic*, terdapat adanya perbedaan nilai dengan prinsip dasar instrumental. Perbedaan tersebut terjadi mengingat prinsip instrumental memberikan penekanan terhadap simbol (materi maupun non materi) dalam informasi transaksi mudharabah, sehingga mengarah kepada bentuk. Sedangkan selama bentuk tersebut sudah membawa nilai syariah, berarti ada transformasi nilai yang sudah terjadi. Padahal dalam bentuk (*instrument*) tersebut terdapat perbedaan dalam mengakui hasil keuntungan yang diperoleh.

Prinsip *net revenue sharing* dan *profit sharing*, selain sebagai sebuah

alternatif pilihan yang fleksibel, bisa menjadi wujud dari perbedaan kepentingan dalam aturan PSAK 105. Padahal pada hakekatnya, prinsip dasar *socio-economic* memiliki pemahaman bahwa pembiayaan mudharabah tidak terjebak pada suatu kepentingan tertentu atau dibatasi oleh nilai-nilai ekonomis. Demikian pula pada saat menentukan pengakuan dan pengukuran atas kerugian. Dasar dalam menentukan kelalaian menurut PSAK 105 par.18 lebih mengutamakan unsur materi. Sedangkan materi sebenarnya adalah komponen pengukuran pada transaksi berbasis kapitalisme. Materi inilah yang justru mengarahkan transaksi mudharabah meninggalkan nilai amanah yang seharusnya dijaga. Bank akan menyetujui kerjasama mudharabah berdasarkan materi yang akan diterima, bukan sebuah amanah (kepercayaan). Berdasarkan pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai humanis yang ada dalam PSAK 105 masih belum sepenuhnya terkonstruksi, tetapi sudah lebih baik dari pada konstruksi nilai syariah dalam transaksi mudharabah pada PSAK'59.

B. Prinsip Mudharabah Pada Nilai Emansipatoris

Emansipatoris pada hakekatnya berusaha untuk mengarahkan suatu aturan menuju orientasi yang benar benar mempunyai nilai yang baru. Sehingga diharapkan dapat keluar dari pengaruh lama yang mungkin masih ada di dalamnya. Artinya ideologi yang dibawa oleh PSAK 105 harus benar-benar terbebas dari ideologi akuntansi kapitalisme atau

ideologi syariah semu. Ciri dari pembebasan tersebut terdapat pada luasnya cakupan yang diatur dalam transaksi mudharabah. Oleh karena itu, wujud penilaian emansipatoris berada pada dua konsep dasarnya, yaitu *critical* dan *justice*.

Konsep dasar *critical* menilai standar akuntansi mudharabah berdasarkan keterbatasan yang melekat di dalamnya. Orientasi pada keuntungan dan eliminasi terhadap kerugian, masih lebih ditekankan pada proses pengakuan dan pengukuran. Karena bagaimanapun juga standar tersebut akan digunakan oleh sebuah lembaga perbankan yang tetap berorientasi pada keuntungan. Semua syarat sahnya transaksi mudharabah mulai kesepakatan awal sampai dengan pembagian keuntungan masih mengindikasikan kepentingan materi yang ditekankan. Walaupun pada bentuk kebijakannya sudah mulai adaptif, akan tetapi nilai-nilai syariah belum sepenuhnya terakomodasi di dalamnya. Nilai syariah yang dimaksud adalah keadilan dan kesejahteraan sebagai wujud pemahaman Islam dari bentuk *rahmatan lil alamin* (Afifudin, 2004).

Keberpihakannya terhadap unsur materi sebagai syarat operasional transaksi mudharabah dalam PSAK 105, pada akhirnya justru mereduksi prinsip dasar *justice* (keadilan) yang sudah mulai terbentuk. Pada sisi yang positif, keadilan terlihat dari adanya kebersamaan dalam konsep kerjasama, dimana pihak yang memiliki dana berkontribusi terhadap modal. Sedangkan pihak yang memiliki

keahlian berkontribusi terhadap pengelolaan dana. Kerjasama tersebut berlangsung terus sampai dengan diperolehnya hasil yang dibagi sesuai kesepakatan nisbah yang dilakukan dimuka, yang tidak mendasari pada jumlah modal maupun perjanjian dalam satuan jumlah uang. Tetapi menggunakan dasar kepercayaan atas realisasi hasil usaha yang dilaporkan secara nyata.

Reduksi yang terjadi terlihat dalam system pembagian keuntungannya. Masih terdapat dua mode pembagian keuntungan sebagaimana dijelaskan di muka. Pemilihan metode sangat beresiko memunculkan kepentingan dari penggunaanya. Walaupun sebenarnya disarankan menggunakan *net revenue sharing*. Tetapi karena belum adanya pemahaman yang kongkret atas nilai keadilan (*justice*) pada konsep ini, menyebabkan sulitnya mengendalikan penerapannya pada tataran praktek. Artinya, berdasarkan prinsip dasar *justice*, transaksi mudharabah pada PSAK 105 masih terlihat semu karena nilai keadilannya tereduksi oleh konsep materi.

C. Prinsip Mudharabah Pada Nilai Transendental

Pada pengembangan konsep mudharabah dari sudut pandang nilai transendental, merupakan pola peraturan yang bermuara pada keseimbangan dan saling bersinergi dari berbagai dimensi keilmuan. Pada dasarnya keilmuan seharusnya membentuk standar yang bersifat empirik (*kauniyyah*) maupun normatif-intuitif (*qauliyyah*) secara bersamaan (Afifudin, 2004). Keduanya

harus berjalan saling melengkapi dan tidak boleh saling meniadakan.

Apabila kita kembali kepada ketentuan yang ada pada PSAK 105, kita bisa telusuri seberapa jauh konsep pembiayaan mudharabah tersebut dalam memperhatikan nilai-nilai transendental, yang tergambar dalam nilai dasar *rational-intuitif*. Jika kita tarik garis riwayat munculnya standar akuntansi syariah di Indonesia (termasuk di dalamnya PSAK 105), sangat jelas kepentingan yang dibawa lebih mengarah kepada penyelamatan proses bisnis pada lembaga syariah, dari pada membangun nilai syariahnya. Dengan demikian keberadaan standar tersebut merupakan proses "*rekonstruksi*" dari aturan akuntansi konvensional yang "disyariahkan". Hal tersebut terbukti pada lebih dominannya disiplin ilmu akuntansi keuangan yang berorientasi secara materi. Belum terlihat adanya interaksi disiplin ilmu sosial, agama, maupun ilmu yang lain dalam proses penyusunan standarnya. Sehingga pada akhirnya semuanya kembali semua akibat proses yang belum berjalan dengan seimbang.

Konsep pengakuan dan pengukuran dalam PSAK 105 dari prinsip filosofis transendental yang diturunkan pada konsep dasar *rational-intuitif* masih belum seimbang antara nilai-nilai materi dengan nilai-nilai *intuitif-normatif*. Sehingga proses pengakuan dan pengukuran pada PSAK 105 tersebut lebih mengedepankan nilai-nilai materi tanpa dibarengi dengan kemaslahatan umat. Menurut Yusanto dan Wijayakusuma (2002), orientasi kegiatan

ekonomi seharusnya meletakkan dasar keseimbangan dan keadilan secara utuh dalam satu kesatuan yang seimbang. Pada PSAK 105, konsep pengakuan dan pengukuran belum diletakkan dalam posisi yang seimbang. Belum adanya dimensi *intuitif-normatif* yang seharusnya membawa keuntungan tidak dinilai sebatas materi tetapi juga dalam bentuk kesejahteraan, ketetraman, kenyamanan masyarakat dan lingkungan. Seharusnya nilai *intuitif-normatif* tersebut diletakkan dengan seimbang bersama dengan nilai rasionalnya (keuntungan secara materi). Hal tersebut dibuktikan dari masih belum jelasnya proses pembagian keuntungan, maupun pada konsep pengakuan dan pengukuran beban kerugian. Standar aturannya masih cenderung memprioritaskan pihak pemilik dana. (Pengakuan dan Pengukuran; Akuntansi untuk Pemilik Dana, PSAK 105 par.12-24).

D. Prinsip Mudharabah Pada Nilai Teleologikal

Nilai teleologikal merupakan bentuk akuntabilitas dari laporan pembiayaan mudharabah yang harus dipertanggungjawabkan. Bentuk pertanggungjawaban yang seharusnya diatur dalam ketentuan pembiayaan mudharabah tersebut adalah pertanggungjawaban secara vertikal dan horisontal. Bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) dari seluruh kegiatan transaksi mudharabah secara vertikal adalah wujud kehambaan kita terhadap Allah SWT. Dalam konsepsi Islam, hal tersebut dikenal dengan dimensi *tauhid*. Sedangkan akuntabilitas secara horisontal

adalah proses interaksi muamalah secara administratif maupun normatif kepada setiap pelaku transaksi maupun pada lingkungan yang melingkupinya.

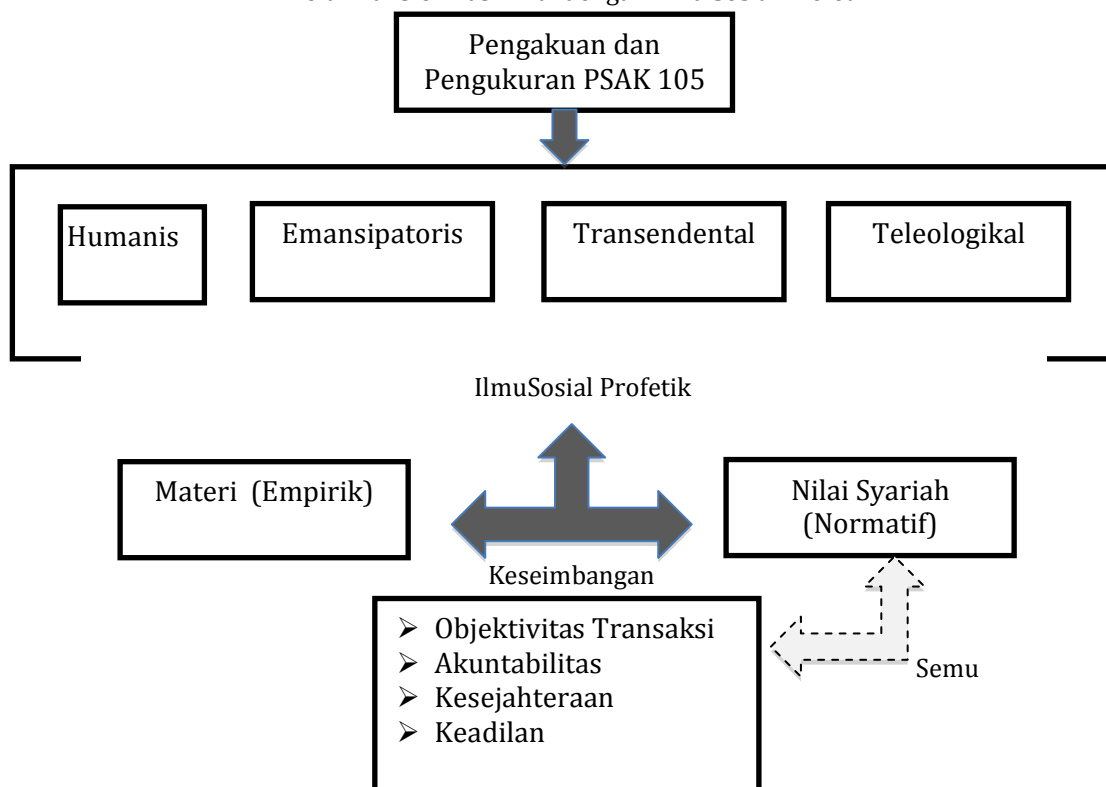
Filosofi teleologikal diturunkan menjadi konsep dasar *ethical* dan *holistic welfare*. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kerangka penyusunan PSAK 105 seharusnya berpijak pada nilai-nilai etika baru yang membawa sebuah regulasi pada kesejahteraan secara utuh (*holistic*). Artinya PSAK 105 tersebut seharusnya mampu mengakomodasi nilai-nilai etika Islam secara penuh, bukan parsial.

Berdasarkan nilai etika profetik terdapat beberapa kondisi atas kebijakan professional yang dapat dievaluasi dari PSAK 105 (Musdalifa dan Abdullah, 2013). *Pertama*, cakupan stakeholders yang tidak sekedar pemilik modal atau pengelola dana. Sehingga pertimbangan teknisnya tidak sekedar materi tetapi juga aspek kemanusiaan. *Kedua*, harus dimunculkan perspektif keadilan dengan memutar dana tidak hanya kepada orang kaya tetapi juga kepada pihak yang selama ini termarginalkan. *Ketiga*, hendaknya disampaikan orientasi tanggungjawab tidak sekedar sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan YME. Nilai-nilai etika tersebut berorientasi kepada terbentuknya regulasi yang membebaskan dan menyebarkan nilai kesejahteraan.

Kesejahteraan yang dimaksud merupakan kesejahteraan yang muncul akibat seimbangnya antara materi dengan *intuisi normatif* (*holistic welfare*). Al Qur'an sudah menjelaskan prinsip keseimbangan antara kebutuhan spiritual dengan materi (ekonomi). Sehingga *holistic welfare* merupakan bentuk akumulatif atas seluruh proses derivasi ilmu sosial profetik. *Holistic welfare* dan *ethical* akan membentuk teleologikal. Teleologikal akan terwujud dengan baik apabila prinsip filosofi *humanis*, *emansipatoris* dan *transendental* telah diletakkan pada proporsi yang benar.

Empat filosofi yang tergambar dalam ilmu sosial profetik tersebut tidak bisa difahami secara terpisah, namun merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling terjait untuk menciptakan sebuah keseimbangan antara materi dan filosofi. Sehingga apabila ada salah satu dari ke empat prinsip tersebut tidak terpenuhi maka dengan sendirinya transformasi nilai tidak terwujud (Afifudin, 2004). Secara sederhana bentuk penerapan nilai filosofis ilmu sosial profetik dalam mentransformasi nilai Islam pada standar transaksi mudharabah PSAK 105 adalah sebagai berikut :

Gambar 2
Pola Transformasi Nilai dengan Ilmu Sosial Profetik



KESIMPULAN

Akuntansi merupakan salah satu ilmu sosial yang keberadaannya selalu berkembang mengikuti putaran perekonomian. Aktivitas bisnis dari setiap entitas, melibatkan interaksi sosial kemasyarakatan yang harus dicatat transaksinya dengan akuntansi. Proses pencatatan itu sendiri melibatkan dua hal penting yaitu aturan secara teknis dalam sebuah standar baku yang berterima umum, dan juga harus sejalan dengan sifat manusia sebagai pelaku interaksi yang memiliki kepentingan duniawi dan ukhrawi. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode pengukuran transaksi yang memiliki aturan teknis baku dan mengandung nilai-nilai kemanusiaan.

Beragam jenis transaksi yang menggunakan metode akuntansi. Pembahasan dalam penelitian ini hanya melihat bentuk transaksi yang dilandasi prinsip kerja sama antara pemili modal dengan pengelolanya. Proses kerja sama tersebut dalam akuntansi diatur dalam PSAK'59 dan PSAK 105 (akuntansi mudharabah).

Pada kenyataannya transaksi mudharabah yang diatur dalam PSAK 59 masih banyak mengandung nilai-nilai kapitalisme, karena proses pembentukannya yang bersifat rekonstruktif. Sehingga nilai syariah yang seharusnya dibawa belum banyak terlihat. Oleh karena itu kemudian digantikan PSAK yang mengatur transaksi syariah secara tersendiri dalam PSAK 105. Sebagai aturan pengganti harusnya sudah

banyak terdapat perubahan aturan maupun nilai dasar. Termasuk juga adanya keseimbangan antara nilai syariah dengan aturan teknis yang ada. Oleh karena itu perlu adanya peninjauan atas keberadaan nilai syariah tersebut dengan menggunakan metode transformasi ilmu sosial profetik.

Berdasarkan sudut pandang ilmu sosial profetik tersebut terdapat beberapa pernyataan tentang keberadaan nilai *humanis*, *emansipatoris*, *transendental* dan *teleologikal* dalam PSAK 105. Nilai *humanis* dalam PSAK 105 dilihat berdasarkan kesesuaian prinsip teknisnya dengan konsep dasar *instrumental* dan *socio-economic*. Berdasarkan konsep dasar *instrumental*, PSAK 105 mampu memberikan informasi sebagai sebuah simbol kerjasama secara kebersamaan atas dasar saling memberikan keridhoan. Sedangkan secara *socio-economic* masih terlihat adanya kepentingan dalam menentukan prinsip bagi hasil dengan menggunakan dua pendekatan yang berbeda yaitu *net revenue sharing* dan *profit sharing*. Sehingga nilai humanismenya masih belum sepenuhnya terjadi, walaupun sudah lebih baik dari pada PSAK'59.

Pada sudut pandang *emansipatoris*, belum terlihat adanya upaya pembebasan orientasi hasil dari bisnis tersebut selain pada keuntungan yang bersifat materi. Berdasarkan konsep dasar *critical* memandang prinsip bagi hasil dan bagi kerugian merupakan warisan dari karakter akuntansi keuangan konvensional yang masih dijalankan oleh transaksi mudharabah. Sedangkan dari konsep dasar *justice*, menganggap apa yang melekat pada konsep konvensional tersebut sebagai wujud tereduksinya keadilan karena

masih mengutamakan materi. Padahal konsep keadilan harusnya mengarah pada suatu keadilan yang menyeluruh, tidak sekedar pada satu tujuan.

Nilai *transendental* memandang bahwa suatu ilmu harus berkembang dengan memanfaatkan keilmuan lain yang bersifat empirik (*kauniyyah*) dan non empirik (*qauliyyah*) secara bersama-sama. Konteks tersebut belum bisa diadopsi oleh PSAK 105 karena kemunculannya lebih banyak didominasi dari proses rekonstruksi akuntansi konvensional. Sehingga masih lebih berorientasi pada proses bisnis dan belum menyeimbangkannya dengan nilai syariah. Hal ini terlihat dari upaya konsep dasar *rational-intuitif* dalam memberikan derivasi nilai syariah yang belum terlihat aplikasinya.

Segala yang sudah terlihat dari tiga prinsip filosofis yang ada dalam ilmu sosial profetik tersebut dapat terlihat pola akuntabilitasnya yang juga belum seimbang. Prinsip teleologikal, lewat konsep dasar *ethical* memandang dimensi etis yang dimiliki PSAK 105 masih membawa proses akuntabilitas yang bersifat rasional dan teknis. Segala bentuk pertanggungjawaban kerja sama belum menunjukkan keseimbangannya dengan nilai normatif agama maupun konstruksi nilai sosial dari berbagai disiplin ilmu yang lain. Sehingga masih membawa bentuk akuntabilitas yang dominan secara horisontal, dan kerjasama yang baru menghasilkan kesejahteraan semu. Padahal kesejahteraan yang menjadi tujuan akhir dari kerjasama tersebut seharusnya kesejahteraan yang dapat dimaknai secara *holistic* (*holistic welfare*). Artinya, kesejahteraan yang tidak sekedar dinikmati

dari sisi materi saja tetapi juga non materi (kepercayaan, kedamaian, kejujuran dan kebenaran).

Berdasarkan kajian ilmu sosial profetik tersebut, PSAK 105 sudah lebih baik dalam membawa nilai syariah dari pada PSAK'59 yang digantikannya, walaupun dalam pengakuan dan pengukuran transaksinya masih cenderung berorientasi pada materi. Pada prinsipnya, ketika keseimbangan antara materi dan nilai normatif tersebut ditransformasikan dengan ilmu sosial profetik, hasilnya masih mengarah pada dominasi unsur materi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Muhammad Ahyar. 2002. Pengembangan Nilai-Nilai Islam dalam Kajian Ilmu Ekonomi, **Millah**, Vol II, No.2 pp 1 – 8.
- Afifudin. 2004. Ilmu Sosial Profetik : Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah. Kajian PSAK'59. **Tesis**, Magister Sains Akuntansi, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang.
- Al Qur'an dan Terjemahannya**. 2002. Departemen Agama Republik Indonesia, Penerbit Fajar Mulia, Surabaya.
- Baydoun, Nabil and Roger Willet. 1994. **Islamic Accounting Theory**, The AAANZ, Annual Conference.
- Burrell, G. dan G. Morgan. 1979. **Sociological Paradigm and Organisational Analysis**. Ashgate Publishing Company. USA.
- Chua, Fai Fong, 1986. Radical Development in Accounting Thought, **Journal The Accounting Review**, Vol LXI, No.4. Oktober.
- Giddens, Anthony. 2001. **Tumbal Modernitas : Ambruknya Pilar-Pilar Keimanan**. Penerjemah Muhammad Yamin, Penerbit IRCISOD, Yogyakarta.
- Harahap, Sofyan Safri. 2001a. **Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam**. Pustaka Kuantum, Jakarta.
- Harahap, Sofyan Safri. 2001b. **Akuntansi Islam**, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.
- Harahap, Sofyan Safri. 2003. Menilai Perkembangan Penerapan Akuntansi Syariah, **Media Akuntansi**, Edisi 33, Mei. Jakarta.
- Heriyanto, Husain. 2003. **Paradigma Holistic : Dialog Filsafat, Sains, dan Kehidupan Menurut Shadra dan Whitehead**, Penerbit Teraju, Jakarta.
- Kuntowijoyo. 1998. **Paradigma Islam ; Interpretasi Untuk Aksi**, Penerbit Mizan, Bandung.
- Nasution, Khoirudin. 2002. Wilayah Kajian dan Filsafat Ekonomi Islam, **Millah**, Vol II No.2.
- Partanto, Pius A dan M. Dahlan Al Barry. 2001. **Kamus Istilah Populer**. Penerbit ARKOL, Surabaya.
- Ratmono, Dwi. 2004. Pengungkapan Islamic Value dalam Pelaporan Keuangan Bank Syariah Menurut Paradigma Akuntansi Syariah Filosofis Teoritis dan PSAK'59, **Proceeding**, Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islami II, PPBEI FE Unibraw, Malang.
- Salim, Agus. 2001. **Teori dan Paradigma Penelitian Sosial dari Denzin Guba dan Penerapannya**, Penerbit PT Tira Wacana, Yogyakarta.
- Standar Akuntansi Keuangan No.59. 2002. **Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah**, Penerbit IAI dan Salemba Empat, Jakarta.
- Standar Akuntansi Keuangan No.59. 2002. **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Perbankan Syariah**, Penerbit IAI dan Salemba Empat, Jakarta.
- Standar Akuntansi Keuangan No.101. 2006. **Penyajian Laporan Keuangan Syariah**, Penerbit IAI, Jakarta.
- Standar Akuntansi Keuangan No.105. 2007. **Akuntansi Mudharabah**, Penerbit IAI, Jakarta.

- Triyuwono, Iwan. 2000. **Organisasi dan Akuntansi Syariah**, Penerbit Lembaga Kajian Islam dan Sosial, Yogyakarta.
- Triyuwono, Iwan. 2002a. Sinergi Oposisi Biner ; Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syariah, **Proceding** Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islami I. P3EI – FE UII, Yogyakarta.
- Triyuwono, Iwan. 2002b. Prinsip Dasar Teori Akuntansi Syariah, **Prosiding**, Seminar Shari'a Accounting Event, KiAMI, FSI – SM, FE UI. Jakarta.
- Triyuwono, Iwan. 2002c. Kritik Atas Teori Konsep yang Digunakan Dalam Standar Akuntansi Perbankan Syariah. **Seminar** Musyawarah Nasional Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam, BEM FE Unibraw, Malang.
- Wiroso, 2011. **Akuntansi Transaksi Syariah**, IAI, Jakarta.
- Yusanto, Muhammad Ismail dan Muhammad Karabet Wijayakusuma, 2002. **Menggagas Bisnis Islami**, Penerbit Gema Insani Press, Jakarta.

**INFORMASI AKUNTANSI UNTUK MENUNJANG
KEBERHASILAN USAHA KECIL DALAM MENGHADAPI MEA**

Oleh :

IKA FARIDA ULFAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

Email : ikafaridaulfa@gmail.com

ABSTRAK

Integrasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pelaku usaha nasional (BUMN, swasta, koperasi, dan UKM). UMKM dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional, meskipun rata-rata produktivitasnya relatif masih rendah (Indralesmana & Suaryana, 2014). Di balik berbagai keunggulan UMKM ternyata terdapat banyak kendala yang dihadapi, diantaranya banyak diantara mereka yang tidak atau belum mengerti dari pencatatan keuangan atau akuntansi. Usaha kecil banyak mengalami kesulitan dalam memahami sistem informasi keuangan dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang bagaimana informasi akuntansi dapat menunjang keberhasilan usaha kecil dalam menghadapi MEA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan mencari referensi yang relevan terkait dengan lingkup penelitian. Keterbatasan UMKM dalam menggunakan dan menghasilkan informasi akuntansi mengakibatkan kegagalan dalam mendapatkan tambahan modal untuk pengembangan usaha. Jika UMKM bisa dengan mudah mendapatkan tambahan modal usaha ditambah dengan semakin baiknya pengelolaan usaha, maka usaha juga akan semakin berkembang dan bisa mendapatkan laba yang maksimal. Apabila UMKM memiliki kekuatan yang cukup baik dalam menghadapi MEA 2015 maka UMKM akan tetap mampu bertahan walaupun produk dari negara asing semakin banyak ada di Indonesia.

PENDAHULUAN

Integrasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pelaku usaha nasional (BUMN, swasta, koperasi, dan UKM). MEA merupakan salah satu pilar-pilar impian masyarakat ASEAN yang dicetuskan dalam kesepakatan Bali Concord II. ASEAN berharap dapat membentuk sebuah pasar tunggal dan basis produksi sebelum tahun 2015. Dengan MEA 2015 maka diharapkan ASEAN akan memiliki 4 karakteristik utama yaitu sebagai (1) pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, (2) kawasan ekonomi yang berdaya saing, (3) pertumbuhan ekonomi yang merata, dan (4) meningkatkan kemampuan untuk berintegrasi dengan perekonomian global. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memainkan suatu peran vital di dalam

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang tetapi juga di negara-negara maju. Diakui secara luas bahwa UMKM sangat penting karena karakteristik-karakteristik utama mereka yang membedakan mereka dari usaha besar, terutama karena UMKM adalah usaha-usaha padat karya, terdapat di semua lokasi terutama di perdesaan, lebih tergantung pada bahan-bahan baku lokal, dan penyedia utama barang-barang dan jasa kebutuhan pokok masyarakat berpendapatan rendah atau miskin (Tambunan: 2012). UMKM di Indonesia mampu menyerap 88% tenaga kerja, memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 40%, dan mempunyai potensi sebagai salah satu sumber penting pertumbuhan ekspor, terutama ekspor non migas (*Indonesian Small*

Business Research Center dalam Pinasti, M, 2007). Di dunia internasional, usaha kecil juga mempunyai peran yang penting, seperti di Amerika Serikat, usaha kecil membayar 44,3% dari total gaji karyawan sektor swasta, dan menciptakan 60% sampai 80% lapangan kerja baru selama satu dekade terakhir (*US Small Business Administration*, dalam Pinasti, M, 2007). UMKM dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional, meskipun rata-rata produktivitasnya relatif masih rendah (Indralesmana & Suaryana, 2014). Bidang akuntansi juga sangat memperhatikan keberadaan UMKM, terbukti dengan adanya suatu *discussion paper* tentang standard akuntansi untuk usaha kecil dan menengah (*Preliminary view on accounting standard for small and medium-sized entities*) yang dilakukan oleh *International Accounting Standard Board* (IASB) pada Bulan Juni 2004 (Pinasti, M, 2007). Berikutnya berkembang menjadi *exposure draft* pada tahun 2007. Adopsi IFRS for SME di Indonesia dituangkan dalam SAK ETAP yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. SAK ETAP diluncurkan secara resmi pada 2009, dan berlaku efektif 2011. SAK ETAP diperuntukkan bagi perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Dengan adanya SAK ETAP, perusahaan kecil, menengah diharapkan mampu untuk menyusun laporan keuangannya sendiri,

dapat diaudit serta bisa mendapatkan opini audit. SAK ETAP lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK – IFRS sehingga lebih mudah dalam implementasinya. Meskipun lebih sederhana tetapi tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan. Di balik berbagai keunggulan UMKM ternyata terdapat banyak kendala yang dihadapi, diantaranya keterbatasan modal, kesulitan bahan baku, Sumber Daya Manusia yang kurang baik, keterbatasan teknologi, informasi dan pemasaran, selain itu adalah kurangnya dukungan dari pemerintah. Tidak sedikit dari mereka yang tidak memiliki catatan harga pokok produksi yang baik. Perhitungan hanya dilakukan secara kasar dalam menentukan harga jual, misalnya hanya mencatat pengeluaran untuk bahan baku dan tenaga kerja. Banyak diantara mereka yang tidak atau belum mengerti dari pencatatan keuangan atau akuntansi. Dari uraian tersebut jelas bahwa usaha kecil banyak mengalami kesulitan dalam memahami sistem informasi keuangan dengan baik. Padahal informasi akuntansi keuangan mempunyai peran penting untuk mencapai keberhasilan usaha, termasuk bagi usaha kecil (Megginson, *et. al*, 2000). Informasi akuntansi keuangan sangat diperlukan perusahaan, terutama bagi usaha kecil, karena dapat menjadi dasar yang andal bagi pengambilan keputusan-keputusan dalam memecahkan segala permasalahan yang dihadapinya, antara lain keputusan akan kebutuhan kas, penetapan harga pokok dan harga jual, dan lain-lain. Selain itu dalam hubungan antara usaha kecil dengan pemerintah dan kreditur (bank) penyediaan informasi akuntansi juga diperlukan. Dalam

prakteknya sering dijumpai usaha kecil sering mengalami kegagalan dalam pengajuan kredit ke bank dikarenakan belum atau tidak adanya penyelenggaraan informasi akuntansi. Agar dapat mengakses bank dengan mudah, maka UMKM harus membuat laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena pihak lembaga keuangan seperti bank tidak memandang perbedaan perusahaan besar dan UMKM semuanya diwajibkan untuk memenuhi persyaratan termasuk harus menyediakan laporan keuangan untuk dapat dijadikan dasar dalam memberikan pinjaman kepada calon debitur (Masitoh & Widayanti, 2015). Sehingga dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan tambahan modal (misalnya dari Bank) untuk pengembangan usaha. Disinilah pentingnya praktek akuntansi bagi UMKM karena dengan diselenggarakannya praktek akuntansi secara tepat maka UMKM dapat menyediakan informasi yang lebih lengkap dan terstruktur terkait usaha dan posisi keuangannya. Akuntansi merupakan salah satu cara untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat digunakan oleh manajemen sebagai dasar mengambil keputusan strategis. Informasi akuntansi merupakan alat yang digunakan oleh pengguna informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan, terutama pelaku bisnis (Nicholls dan Holmes, 1988:57). Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi. Sawers (2007) mendefinisikan informasi akuntansi sebagai informasi kuantitatif tentang entitas ekonomi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan

ekonomi dalam menentukan pilihan-pilihan diantara alternatif-alternatif tindakan. Penggunaan informasi akuntansi digunakan untuk perencanaan strategis, pengawasan manajemen dan pengawasan operasional. Lungu, Caraiani, Dascalu (2007) dan Morris (2007) menyatakan bahwa salah satu sistem informasi yang sangat dibutuhkan adalah sistem informasi akuntansi. Keterbatasan UMKM dalam menggunakan dan menghasilkan informasi akuntansi mengakibatkan kegagalan dalam pengembangan usaha. Banyaknya peranan UMKM di Indonesia maka seharusnya UMKM dapat dikembangkan dengan pengelolaan yang baik. Pinasti, dkk (2007) menunjukkan bahwa kelemahan usaha kecil di Indonesia adalah pada umumnya pengelola usaha kecil tidak menguasai dan tidak menerapkan sistem keuangan yang memadai. Usaha kecil tidak atau belum memiliki dan menerapkan catatan akuntansi dengan ketat dan disiplin dengan pembukuan yang sistematis dan teratur. Pengusaha kecil secara umum menganggap bahwa informasi akuntansi tersebut tidak penting, selain sulit diterapkan juga membuang waktu dan biaya. Hal terpenting bagi pengelola usaha kecil adalah bagaimana cara menghasilkan laba yang banyak tanpa repot menerapkan akuntansi. Kenyataan ini juga didukung oleh hasil penelitian Musmini (2008) menunjukkan bahwa kebanyakan usaha kecil di Kecamatan Buleleng tidak menyelenggarakan catatan akuntansi, beberapa yang mempunyai catatan keuangan modelnya sangat sederhana dan tidak sistematis. Mengingat peran UKM yang begitu besar dalam perekonomian nasional, maka upaya peningkatan kinerja UKM mutlak

untuk dilakukan supaya terjaga stabilitas perekonomian nasional, salah satunya melalui penerapan sistem informasi akuntansi (Nisa, 2011). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang bagaimana informasi akuntansi dapat menunjang keberhasilan usaha kecil dalam menghadapi MEA.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dengan mencari referensi yang relevan terkait dengan informasi akuntansi untuk menunjang keberhasilan usaha kecil dalam menghadapi MEA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Usaha mikro, yaitu usaha produktif milik perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni:
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari

usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni :

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta`rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)

Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah

tenaga kerja 5 orang samapai dengan 19 orang. Sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang.

Permasalahan UMKM

Terdapat empat permasalahan utama yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia, terutama dalam menghadapi era ACFTA 2015. Pertama, permasalahan yang terkait dengan pencatatan keuangan. Kedua, masalah yang terkait dengan permodalan. Ketiga, masalah yang terkait dengan penguasaan teknologi, dan keempat adalah permasalahan yang terkait dengan pemasaran produk maupun jasa UMKM (Putri, dkk, 2015). Aufar (2013), dalam penelitiannya melakukan pengamatan terhadap variable penggunaan informasi akuntansi, khususnya pada 51 UMKM rekanan PT PLN (Persero) di Bandung, di sini menyiratkan bahwa aspek permodalan harus dipertanggungjawabkan, agar apabila terdapat pengajuan tambahan untuk pemenuhan kebutuhan dana sebagai bentuk pengembangan UMKM dapat dipenuhi oleh pihak lembaga pendanaan. Pinasti, dkk (2007) menunjukkan bahwa kelemahan usaha kecil di Indonesia adalah pada umumnya pengelola usaha kecil tidak menguasai dan tidak menerapkan sistem keuangan yang memadai. Usaha kecil tidak atau belum memiliki dan menerapkan catatan akuntansi dengan ketat dan disiplin dengan pembukuan yang sistematis dan teratur. Pengusaha kecil secara umum menganggap bahwa informasi akuntansi tersebut tidak penting, selain sulit diterapkan juga membuang waktu dan biaya. Sehingga tidak sedikit dari mereka yang

mengalami kesulitan saat mengajukan kredit untuk mendapatkan tambahan modal di lembaga keuangan. Bagi usaha kecil sumber permodalan juga menjadi salah satu hal yang sangat penting. Kemudahan akses untuk mendapatkan permodalan dianggap menjadi penunjang keberhasilan usaha.

Keberhasilan Usaha Pada UMKM

Setiap jenis usaha tentu saja berkeinginan untuk mencapai suatu titik yang disebut keberhasilan. Keberhasilan suatu usaha dapat diukur melalui pengukuran kinerja. Adapun kinerja yang dimaksudkan adalah tingkat pencapaian hasil atau tingkat pencapaian tujuan organisasi (Sumarni dan Soeprihanto, 1998). Keberhasilan usaha pada perusahaan kecil (UMKM) ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang ekonomi dan sudut pandang sosial. Dari segi ekonomi, keberhasilan perusahaan dapat ditinjau dari adanya peningkatan kekayaan perusahaan diluar pinjaman, misalnya: kenaikan laba, tambahan modal sendiri dan rasio-rasio yang lain. Sedangkan dari segi sosial, keberhasilan perusahaan ditinjau dari adanya kelangsungan hidup perusahaan dengan kaitannya keberadaan karyawan perusahaan, dan pelayanan kepada pelanggan. Menurut Heckert alih bahasa Gunawan Hutahuruk. (1995:84) untuk mengukur keberhasilan perusahaan dapat digunakan tolak ukur profitabilitas (kemampulabaan) dan tolak ukur pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut menjadi tujuan utama bagi kegiatan usaha pada umumnya. Semua kegiatan usaha pasti tidak lepas dari keinginan mereka untuk bisa mendapatkan laba yang maksimal agar mampu bertahan dan bisa mengembangkan

usahanya. Selain aspek laba dan permodalan Andreas (2011) menyatakan laba atau keuntungan yang dihasilkan harus mampu mensejahterakan kehidupan yang meliputi:

1. Hasil cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga
2. Usaha bisa tetap bertahan
3. Kesejahteraan keluarga terjamin
4. Kesejahteraan karyawan terpenuhi
5. Dapat berkembang

Informasi Akuntansi

Informasi akuntansi merupakan alat yang digunakan oleh pengguna informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan, terutama pelaku bisnis (Nicholls & Holmes, 1988). Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan sumber daya, seperti manusia dan peralatan, yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi. Sawers (2007) mendefinisikan informasi akuntansi sebagai informasi kuantitatif tentang entitas ekonomi yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam menentukan pilihan-pilihan diantara alternatif-alternatif tindakan. Menurut Bodnar dan Hopwood (2003), sistem informasi akuntansi adalah berbagai sumber daya seperti peralatan dan manusia yang diatur guna mengubah data hingga menjadi informasi. Sistem informasi akuntansi ini dirancang oleh suatu perusahaan untuk memenuhi fungsinya guna menghasilkan informasi akuntansi yang relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Dalam suatu sistem informasi akuntansi terkandung unsur-unsur pengendalian, sehingga sangat mempengaruhi fungsi manajemen dalam melakukan pengendalian internal. Fungsi sistem

informasi akuntansi berperan sekali atas pengendalian-pengendalian yang dilakukan perusahaan (Suryandi dkk, 2011). Holmes dan Nicholls (1989) mengklasifikasikan informasi akuntansi dalam tiga jenis berdasarkan manfaatnya bagi para pemakai, yaitu:

a. Statutory Accounting Information

Informasi yang harus disiapkan sesuai dengan peraturan yang ada. Handayani (2011) menyatakan bahwa Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan suatu pedoman untuk penyusunan laporan keuangan jika disajikan kepada pihak luar perusahaan. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) berisikan metode atau teknik-teknik akuntansi yang dapat digunakan suatu perusahaan. Laporan keuangan menurut SAK terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

b. Budgetary Information

Informasi akuntansi ini membantu manajemen untuk menjamin operasional perusahaan dijalankan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Informasi akuntansi yang disajikan dalam bentuk anggaran berguna bagi pihak internal dalam perencanaan, penilaian dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi anggaran yaitu anggaran kas, anggaran penjualan, anggaran biaya produksi dan anggaran biaya operasi.

c. Additional Accounting Information

Informasi akuntansi lain yang disiapkan perusahaan untuk meningkatkan efektifitas pengambilan keputusan manajer. Informasi tambahan meliputi

laporan persediaan, laporan gaji karyawan, laporan jumlah produksi dan laporan biaya produksi.

Penggunaan Informasi Akuntansi.

Mulyadi (2001) menyatakan bahwa dalam melaksanakan fungsinya setiap manajer memerlukan informasi, baik informasi kuantitatif maupun informasi kualitatif. Informasi kuantitatif dapat dibedakan atas informasi akuntansi dan informasi non akuntansi. Salah satu informasi kuantitatif yang paling sering digunakan adalah informasi akuntansi. Informasi akuntansi digolongkan menjadi tiga, yaitu:

a. Informasi Operasi

Informasi ini menyediakan data mentah bagi informasi akuntansi keuangan dan informasi akuntansi manajemen. Informasi operasi pada perusahaan manufaktur adalah informasi pembelian dan pemakaian bahan baku, informasi produksi, informasi penggajian, informasi penjualan, dan lain-lain.

b. Informasi Akuntansi Manajemen

Informasi akuntansi manajemen ditujukan kepada pihak internal perusahaan, dan merupakan informasi saat ini dan masa yang akan datang yang tidak memiliki sifat historikal. Informasi ini digunakan untuk tiga fungsi manajemen, yaitu perencanaan, implementasi dan pengendalian. Informasi akuntansi manajemen disajikan kepada manajemen perusahaan dalam bentuk laporan, seperti anggaran, laporan penjualan, laporan biaya produksi, laporan biaya menurut pusat pertanggungjawaban, laporan biaya menurut aktivitas, dan lain-lain.

c. Informasi Akuntansi Keuangan

Informasi akuntansi keuangan digunakan oleh manajer maupun pihak eksternal perusahaan, bertujuan untuk menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan perubahan keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai dalam hal pengambilan keputusan ekonomi. Wujud nyata dari informasi akuntansi adalah laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Informasi ini bersifat historikal dan harus disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Komponen dan Fungsi Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Romney dan Steinbart (2011), Sistem Informasi Akuntansi terbagi menjadi enam komponen, yaitu:

1. *People*– orang yang menggunakan sistem
2. *Procedures and instruction* yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data
3. Data mengenai perusahaan dan aktivitas bisnis
4. *Software* yang digunakan untuk memproses data
5. *Information technology infrastructure*, termasuk komputer, *peripheral devices*, dan jaringan komunikasi yang digunakan di dalam sistem informasi akuntansi
6. *Internal control* dan *security measures* yang menjaga data sistem informasi akuntansi

Komponen - komponen tersebut memungkinkan sistem informasi akuntansi

untuk memenuhi tiga fungsi bisnis yang utama, yaitu :

1. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh perusahaan, sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas tersebut, dan para pelaku yang terlibat dalam berbagai aktivitas tersebut, agar pihak manajemen, para pegawai, dan pihak-pihak luar yang berkepentingan dapat meninjau ulang (*review*) hal-hal yang telah terjadi.
2. Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
3. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga asset-aset perusahaan, termasuk data organisasi, untuk memastikan bahwa data tersebut tersedia saat dibutuhkan, akurat dan andal.

Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Tujuan penyusunan sistem informasi akuntansi antara lain :

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelola kegiatan usaha baru.
2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, Ketepatan penyajian maupun struktur informasi.
3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi & engecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan (*reability*) informasi akuntansi dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggung jawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan.

4. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.

Perusahaan yang baru memulai usaha sangat memerlukan penyusunan sistem informasi akuntansi yang lengkap. Sistem informasi akuntansi yang sudah ada seringkali tidak dapat memenuhi kebutuhan manajemen, baik dalam hal mutu, ketepatan penyajian maupun struktur informasi yang terdapat dalam laporan. Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang baik maka UMKM bisa mengambil langkah strategis berkaitan dengan kegiatan usahanya. Selain itu bisa juga digunakan sebagai langkah untuk mengembangkan usahanya dengan mengajukan kredit kepada lembaga keuangan untuk mendapatkan tambahan modal usaha. Karena sebagian besar UMKM mengalami kesulitan untuk mengakses sumber permodalan dikarenakan mereka tidak mampu memberikan informasi akuntansi bagi lembaga keuangan yang bersangkutan. Jika UMKM bisa dengan mudah mendapatkan tambahan modal usaha ditambah dengan semakin baiknya pengelolaan usaha, maka usaha juga akan semakin berkembang dan bisa mendapatkan laba yang maksimal. UMKM merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam perekonomian Indonesia, apabila UMKM memiliki persiapan yang cukup baik dalam menghadapi MEA 2015 maka UMKM akan tetap mampu bertahan walaupun produk dari Negara asing semakin banyak ada di Indonesia. Jika UMKM dapat bertahan dan berkembang dengan bagus maka perekonomian Indonesia dapat tumbuh dengan cepat seiring berjalannya MEA 2015.

KESIMPULAN

Dalam menghadapi MEA 2015, semua aspek harus dipersiapkan salah satunya keberadaan UMKM. Kita ketahui bersama bahwa UMKM dapat menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional, meskipun rata-rata produktivitasnya relatif masih rendah. Banyak diantara mereka yang tidak atau belum mengerti dari pencatatan keuangan atau akuntansi. Dari uraian tersebut jelas bahwa usaha kecil banyak mengalami kesulitan dalam memahami sistem informasi keuangan dengan baik. Informasi akuntansi keuangan sangat diperlukan perusahaan, terutama bagi usaha kecil, karena dapat menjadi dasar yang andal bagi pengambilan keputusan-keputusan dalam memecahkan segala permasalahan yang dihadapinya, antara lain keputusan akan kebutuhan permodalan, penetapan harga pokok dan harga jual, dan lain-lain. Selain itu dalam hubungan antara usaha kecil dengan pemerintah dan kreditur (bank) penyediaan informasi akuntansi juga diperlukan. Dalam prakteknya sering dijumpai usaha kecil sering mengalami kegagalan dalam pengajuan kredit ke bank dikarenakan belum atau tidak adanya penyelenggaraan informasi akuntansi. Agar dapat mengakses bank dengan mudah, maka UMKM harus membuat laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena pihak lembaga keuangan seperti bank tidak memandang perbedaan perusahaan besar dan UMKM semuanya diwajibkan untuk memenuhi persyaratan termasuk harus menyediakan laporan keuangan untuk dapat dijadikan dasar dalam memberikan pinjaman kepada calon debitur (Masitoh & Widayanti, 2015). Sehingga dapat menggunakan laporan

keuangannya untuk mendapatkan tambahan modal (misalnya dari Bank) untuk pengembangan usaha. Jika UMKM bisa dengan mudah mendapatkan tambahan modal usaha ditambah dengan semakin baiknya pengelolaan usaha, maka usaha juga akan semakin berkembang dan bisa mendapatkan laba yang maksimal. UMKM merupakan salah satu penyumbang terbesar dalam perekonomian Indonesia, apabila UMKM memiliki persiapan yang cukup baik dalam menghadapi MEA 2015 maka UMKM akan tetap mampu bertahan walaupun produk dari Negara asing semakin banyak ada di Indonesia. Jika UMKM dapat bertahan dan berkembang dengan bagus maka perekonomian Indonesia dapat tumbuh dengan cepat seiring berjalannya MEA 2015. Disinilah pentingnya praktek akuntansi bagi UMKM karena dengan diselenggarakannya praktek akuntansi secara tepat maka UMKM dapat menyediakan informasi yang lebih lengkap dan terstruktur terkait usaha dan posisi keuangannya.

SARAN

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah hendaknya UMKM memperhatikan pentingnya informasi akuntansi sebagai salah satu aspek penunjang keberhasilan usaha. Pelaku usaha (UMKM) hendaknya dapat lebih fokus dalam mengelola keuangan usahanya untuk penegembangan usaha masa yang akan datang. Informasi tentang posisi keuangan UMKM menjadi sarana untuk bisa mendapatkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreas, 2011 : Manajemen Keuangan UKM. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Aufar, 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi pada UMKM (Survei pada Perusahaan Rekanan PT. PLN (Persero) dikota Bandung). Universitas Widyatama.
- Baridwan. 2004. *Intermediate Accounting*, Edisi Kedelapan. Yogyakarta: BPFE.
- Bodnar dan Hopwood. 2003. *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Empat.
- En, K.T., Suryandi, A.F. 2011. Peranan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Pengendalian Intern Aktivitas Pembelian Bahan Baku Guna Mencapai Penyerahan Bahan Baku yang Tepat Waktu (Studi Kasus pada Perusahaan "X" Bandung), *Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Nomor 06 Tahun Ke-2.
- Handayani, Bestari Dwi. 2011. *Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Usaha Kecil dan Menengah*. Akuntabilitas. Sept 2011, Vol.11, No.1, ISSN 1412 – 0240.
- Jones, F.L. and Rama, D. 2006. *Accounting Information System 1st Edition*. South Western: Thomson.
- Lungu C, Caraiani C, Dascalu C. 2007. *New Directions of Financial reporting within Global Accounting Standards for small and medium-sized entities*. Journal of Accounting Research, 40(1).
- Megginson, W.L., M.J. Byrd, and L.C. Megginson. 2000. *Small Bussines Management: An Entrepreneur's Guidebook*. Third Ed. Irwin McGraw-Hill.Boston.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi*. Edisi ke 3. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Nisa, K. 2011. *Strategi Pemasaran Untuk Usaha Kecil Menengah*. (Online). (<http://consumerbehavior.lecture.ub.ac.id/2011/12/strategi-pemasaran-untuk-usaha-kecil-menengah/>), (diakses 19 Oktober 2015).
- Pinasti, M. 2007. *Pengaruh Penyelenggaraan dan Penggunaan Informasi Akuntansi Terhadap Persepsi Pengusaha Kecil Atas Informasi Akuntansi Suatu Riset Eksperiman*.
- Putri, dkk. 2015. *Tantangan Yang dihadapi UMKM di Indonesia Pada Era ACFTA 2015*. Syariah Paper Accounting FEB UMS
- Romney, M.B, and Steinbart, J.P. 2008. *Accounting Information Systems, 11th Edition*. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Sawers, A. 2007. *To What Extent Would the Proposed IFRS for SMEs be Independent of the Full IFRS System*. International Journal of Academic Research, Vol. 2 No.4.
- Sumarni. Murti, John Soeprihanto.1998. *Pengantar Bisnis*.Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Tambunan, Tulus T.H, "Pasar Bebas ASEAN : Peluang, Tantangan dan Ancaman bagi UMKM Indonesia",
- Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Willson, James D., dan John B. Campbel. 1995. *Terj. Controllershship : Tugas Akuntan Manajemen*, edisi ke-3 oleh Gunawan Hutahuruk, Jakarta : Erlangga

**PENGARUH DORONGAN KELUARGA DAN PENDIDIKAN FORMAL TERHADAP KEPUTUSAN
BERWIRAUSAHA DENGAN MOTIVASI BERWIRAUSAHA
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
(Studi Pada Pencari Kerja di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten
Sragen)**

Oleh :

**SEPTIANA NOVITA DEWI¹⁾
ARIS TRI HARYANTO²⁾**

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI AUB SURAKARTA

Email : Septianadewi25@yahoo.co.id¹⁾

Arisharyanto26@yahoo.co.id²⁾

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dorongan keluarga dan pendidikan formal terhadap keputusan berwirausaha dengan motivasi berwirausaha sebagai variabel intervening studi pada pencari kerja di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sragen. Populasi penelitian ini adalah adalah yang mencari kerja di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sragen pada bulan Triwulan I bulan Agustus 2015 sejumlah 50 responden. Sampel diambil dengan teknik sensus dengan jumlah sampel 50 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dorongan keluarga dan pendidikan formal menghasilkan pengaruh langsung terhadap keputusan berwirausaha dibandingkan melalui motivasi berwirausaha. Hasil uji hipotesis menunjukkan dorongan keluarga berpengaruh positif signifikan terhadap motivasi berwirausaha. Pendidikan formal berpengaruh positif signifikan terhadap motivasi berwirausaha. Dorongan keluarga berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan berwirausaha. Pendidikan formal berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan berwirausaha.

Kata Kunci : *Dorongan Keluarga, Pendidikan Formal, Motivasi Berwirausaha, Keputusan Berwirausaha*

PENDAHULUAN

Banyaknya masyarakat yang semakin sulit untuk menemukan lapangan pekerjaan pada masa kini menimbulkan banyak sekali pengangguran khususnya di Indonesia. Jumlah pencari kerja yang banyak tidak sebanding dengan ketatnya dalam seleksi pekerjaan yang terbatas. Bahkan orang-orang yang bergelar sarjanapun sekarang ini bukan menjadi jaminan untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan *degree* mereka. Dampaknya adalah banyak para pelamar kerja yang mendapat suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan pendidikan mereka, mendapatkan pekerjaan yang tidak layak, atau bahkan akan menjadi pengangguran yang

tentunya sangat ditakuti oleh para pencari kerja. Keputusan berwirausaha merupakan sesuatu yang membangkitkan perhatian pada suatu hal. Minat mengindikasikan apa yang diinginkan atau dilakukan orang atau apa yang mereka senangi. Seseorang yang berminat pada suatu hal, maka segala tindakan atau apa yang dilakukan akan mengarahkannya pada minatnya tersebut. Penelitian ini timbul karena adanya beberapa hasil penelitian, kajian teori dan permasalahan atau fenomena yang terjadi. Hal ini seperti adanya sebuah pertanyaan, mengapa pencari kerja bergantung dengan lapangan pekerjaan yang sudah ada, dan mengapa para pencari kerja tidak

menciptakan lapangan kerja baru dengan berwirausaha. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa keputusan untuk berwirausaha masih sangat sedikit atau bahkan kurang, hal ini dikarenakan kurangnya motivasi untuk berwirausaha. Motivasi untuk mengikuti untuk mengikuti pelatihan berwirausaha, karena dengan mengikuti pelatihan akan menimbulkan minat berwirausaha. Dorongan orang tua akan sangat berarti, karena orang tua dapat memberikan saran untuk dapat mencari pekerjaan agar mendorong anak untuk menciptakan lapangan kerja baru dengan menjadi seorang wirausaha. Faktor lingkungan sosial dan pendidikan formal juga mempengaruhi minat berwirausaha. Purnamawati (2009)

Hasil penelitian Dyah Ayu Widi Astuti, (2009) hasil pengujian dari penelitian menunjukkan ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel konteks keluarga, pendidikan dukungan sosial, hambatan dalam memulai bisnis dan nilai individualisme pada intensi berwirausaha. Sedangkan variabel konteks kerja dan nilai kolektivisme tidak berpengaruh secara signifikan pada intensi berwirausaha. Di Kabupaten Sragen banyaknya jumlah penduduk membuat seseorang untuk berlomba-lomba mencari lapangan pekerjaan. Hal ini semakin memperparah keadaan ekonomi dan tingkat kesejahteraan dengan timbulnya pengangguran yang ada. Oleh karena itu, di dalam perekonomian minat berwirausaha merupakan alasan betapa pentingnya hal tersebut dikembangkan. Akhirnya, banyak orang yang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan dengan cara salah satunya adalah mendirikan usaha sendiri atau yang lebih

dikenal sebagai berwirausaha. Menurut Purnamawati (2009) menjadi pengusaha merupakan alternatif pilihan yang tepat. Paling tidak, dengan berwirausaha berarti menyediakan lapangan kerja bagi diri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Seorang wirausahawan adalah seorang yang memiliki keahlian untuk menjual, mulai dari menawarkan ide hingga komoditas baik berupa produk atau jasa. Seorang wirausahawan (*entrepreneur*) adalah seseorang yang menciptakan bisnis baru dengan mengambil risiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang yang signifikan dan menggabungkan sumber-sumber daya yang diperlukan sehingga sumber-sumber daya itu bisa dikapitalisasikan (Zimmerer, 2008). Dengan kreativitasnya, wirausahawan mampu beradaptasi dengan berbagai situasi dan kondisi lingkungan. Sebagai pelaku bisnis, wirausahawan harus mengetahui dengan baik manajemen penjualan, gaya dan fungsi manajemen. Untuk berhasil, ia harus mampu berkomunikasi dan menguasai beberapa elemen kecakapan manajerial, serta mengetahui teknik menjual yang strategis mulai dari pengetahuan tentang produk, ciri khas produk dan daya saing produk terhadap produk sejenis (Mahesa, 2012). Begitu pula yang dikatakan oleh Rye (2005) bahwa seorang wirausahawan adalah seorang yang mengorganisasikan dan mengarahkan usaha baru. Wirausahawan berani mengambil risiko yang terkait dengan proses pemulaian. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi semangat kerja wirausaha antara lain faktor dorongan keluarga, pendidikan formal, famili,

teman, pengalaman usaha, keadaan ekonomi, keadaan lapangan kerja, dan sumber daya yang tersedia. Kewirausahaan dapat diajarkan melalui pendidikan dan pelatihan. *"...entrepreneurship has models, processes, and case studies that allow the topic to be studied and the knowledge to be acquired"* (Kuratko & Hodgetts, 2007: 34). Realita di lapangan, sistem pembelajaran saat ini belum sepenuhnya secara efektif membangun peserta didik memiliki akhlak mulia dan karakter bangsa termasuk karakter wirausaha. Proses pembelajaran di SMK belum sepenuhnya mampu membangun potensi kepribadian wirausaha. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan jumlah pengangguran yang alternatif tinggi, jumlah wirausaha yang masih alternatif sedikit, dan terjadinya degradasi moral (Kemendiknas, 2010). Pembekalan pengetahuan kewirausahaan kepada masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Sragen sangat perlu dilakukan. Semakin tinggi pengetahuan kewirausahaan masyarakat Kabupaten Sragen akan semakin terbuka wawasannya tentang kewirausahaan. Hasil-hasil penelitian Eka (2013) menyimpulkan bahwa pengetahuan kewirausahaan berpengaruh terhadap keputusan berwirausaha. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Singgih Purnomo, (2013), menunjukkan bahwa faktor pendidikan memberikan pengaruh positif dalam mempengaruhi minat berwirausaha mahasiswa. Sehingga peran pendidikan perlu ditingkatkan dalam menumbuhkan minat berwirausaha mahasiswa. Selain itu hasil penelitian Putu Eka Desy Yanti, Made Nuridja, Ketut Dunia. (2014) menghasilkan bahwa lingkungan

keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berwirausaha. Hasil penelitian Eka Aprilianty (2014) menghasilkan bahwa lingkungan keluarga memberi pengaruh yang berarti terhadap minat berwirausaha. Berdasarkan hasil penelitian Singgih (2013), Putu.,et.,al (2014) dan Eka (2014) dorongan keluarga terutama orang tua juga berperan penting sebagai pengarah bagi masa depan anaknya, sehingga secara tidak langsung orang tua juga dapat mempengaruhi minat terhadap pekerjaan bagi anak di masa yang akan datang, termasuk dalam hal berwirausaha. Menurut Wasty Soemanto (2008:38) menyatakan, *"Orang tua atau keluarga juga merupakan peletak dasar bagi persiapan anak-anak agar dimasa yang akan datang dapat menjadi pekerja yang efektif"*. Dalam mendidik anak, para orang tua harus mengajarkan anaknya memotivasi diri untuk bekerja keras, diberi kesempatan untuk bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Orang tua yang berwirausaha dalam bidang tertentu dapat menimbulkan minat anaknya untuk berwirausaha dalam bidang yang sama. Akan tetapi, untuk menjadi pengusaha tidak bisa diraih dalam waktu singkat. Potensi dan kemampuan yang ada, perlu diasah sejak dini. Bimbingan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi calon *entrepreneur* muda berbakat juga perlu dilakukan. Kewirausahaan bukan keturunan akan tetapi dapat dihasilkan melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan meliputi dua aspek yaitu pendidikan mental dan kemampuan atau keahlian (Sunarya, 2011)

PEMBAHASAN

Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Hasil Analisis Jalur Persamaan 1

Tabel 1. Hasil Analisis Jalur Persamaan 1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1.319	2.735		.482	.632
Dorongan_Keluarga	.298	.124	.330	2.411	.020
Pendidikan_Formal	.436	.148	.402	2.942	.005

a. Dependent Variable: Motivasi_Berwirausaha

Sumber : Data yang diolah, 2015

Dari tabel IV.9 dapat dibuat persamaan regresi pertama sebagai berikut:

$$Y_1 = 0,298 X_1 + 0,436 X_2 + \epsilon$$

Dari hasil di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. β_1 = koefisien regresi variabel dorongan keluarga sebesar 0,298, hal ini menunjukkan bahwa variabel dorongan keluarga berpengaruh positif terhadap motivasi berwirausaha Pencari kerja di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sragen, hal ini berarti apabila dorongan keluarga pencari kerja ditingkatkan, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan motivasi berwirausaha mengalami peningkatan.
2. β_2 = koefisien regresi variabel pendidikan formal sebesar 0,436 hal ini menunjukkan bahwa variabel pendidikan formal berpengaruh positif terhadap motivasi berwirausaha Pencari kerja di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sragen, hal ini berarti apabila pendidikan formal ditingkatkan maka motivasi berwirausaha Pencari kerja akan meningkat.

Hasil Analisis Jalur Persamaan 2

Tabel 2. Hasil Analisis Jalur Persamaan 2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.310	2.323		-.564	.576
Dorongan_Keluarga	.565	.111	.527	5.084	.000
Pendidikan_Formal	.282	.137	.219	2.064	.045
Motivasi_Berwirausaha	.274	.124	.231	2.217	.032

a. Dependent Variable: Keputusan_Berwirausaha

Sumber : Data yang diolah, 2015

Dari hasil di atas dapat dibuat persamaan regresi kedua sebagai berikut:

$$Y_2 = 0,565 X_3 + 0,282 X_4 + 0,274 X_5 + \epsilon$$

Pembahasan:

1. β_1 = koefisien regresi variabel dorongan keluarga sebesar 0,565, hal ini menunjukkan bahwa variabel dorongan keluarga berpengaruh positif terhadap keputusan berwirausaha Pencari kerja di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sragen, hal ini berarti apabila dorongan keluarga ditingkatkan maka keputusan berwirausaha Pencari kerja mengalami peningkatan.
2. β_2 = koefisien regresi variabel pendidikan formal sebesar 0,282, hal ini menunjukkan bahwa variabel pendidikan formal berpengaruh positif terhadap keputusan berwirausaha Pencari kerja di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sragen, hal ini berarti apabila pendidikan formal ditingkatkan maka keputusan berwirausaha Pencari kerja akan meningkat.
3. β_3 = koefisien regresi variabel motivasi berwirausaha sebesar 0,274, hal ini menunjukkan bahwa variabel motivasi berwirausaha berpengaruh positif terhadap keputusan berwirausaha Pencari kerja di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Sragen, hal ini berarti apabila motivasi berwirausaha ditingkatkan maka keputusan berwirausaha akan meningkat.

Uji t

Uji t Persamaan Pertama

Tabel 3 Hasil Uji t Persamaan 1

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	1.319	2.735		.482
	Dorongan_Keluarga	.298	.124	.330	.020
	Pendidikan_Formal	.436	.148	.402	.005

a. Dependent Variable: Motivasi_Berwirausaha

Sumber : Data yang diolah, 2015

Pembahasan:

1. Dorongan keluarga berpengaruh signifikan terhadap motivasi berwirausaha Pencari kerja di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sragen, hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yaitu $0,020 < 0,05$. (Hipotesis 1 Terbukti)
2. Pendidikan formal berpengaruh signifikan terhadap motivasi berwirausaha Pencari kerja di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sragen, hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yaitu $0,005 < 0,05$. (Hipotesis 2 Terbukti)

Uji t Persamaan Kedua

Tabel 4 Hasil Uji t Persamaan 2

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-1.310	2.323		.576
	Dorongan_Keluarga	.565	.111	.527	.000
	Pendidikan_Formal	.282	.137	.219	.045
	Motivasi_Berwirausaha	.274	.124	.231	.032

a. Dependent Variable: Keputusan_Berwirausaha

Sumber : Data yang diolah, 2015

Pembahasan:

1. Dorongan keluarga berpengaruh signifikan terhadap keputusan berwirausaha Pencari kerja di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sragen, hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yaitu $0,000 < 0,05$. (Hipotesis 3 Terbukti).
2. Pendidikan formal berpengaruh signifikan terhadap keputusan berwirausaha Pencari kerja di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sragen, hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yaitu $0,045 < 0,05$. (Hipotesis 4 Terbukti).
3. Motivasi berwirausaha berpengaruh signifikan terhadap keputusan berwirausaha Pencari kerja di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sragen, hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yaitu $0,032 < 0,05$. (Hipotesis 5 Terbukti).

Uji F

Tabel 5. Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F
1	Regression	126.384	3	42.128	38.302
	Residual	50.596	46	1.100	
	Total	176.980	49		

a. Dependent Variable: Keputusan_Berwirausaha

b. Predictors: (Constant), Motivasi_Berwirausaha, Dorongan_Keluarga, Pendidikan_Formal

Sumber : Data yang diolah, 2015

Hasil uji secara serempak (Uji F) pada persamaan kedua diketahui besarnya nilai $F = 38,302$ signifikansi $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap Keputusan berwirausaha Pencari kerja.

Koefisien Determinasi / Varian Total

Koefisien determinasi (R^2) total pengaruh diperoleh nilai koefisien determinasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\epsilon_1 &= \sqrt{1 - R_1^2} \\ &= \sqrt{1 - 0,428} \\ &= \sqrt{0,572} \\ &= 0,756 \\ \epsilon_2 &= \sqrt{1 - R_2^2} \\ &= \sqrt{1 - 0,714} \\ &= \sqrt{0,286} \\ &= 0,534\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}R^2 \text{ total} &= 1 - \{(\epsilon_1)^2 \times (\epsilon_2)^2\} \\ &= 1 - \{(0,756)^2 \times (0,534)^2\} \\ &= 1 - \{(0,571) \times (0,285)\} \\ &= 1 - 0,162 \\ &= 0,838\end{aligned}$$

Nilai R^2 total sebesar 0,838, dapat diartikan variabel keputusan berwirausaha Pencari kerja di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sragen dijelaskan oleh variabel pelatihan, dorongan keluarga, pendidikan formal dan motivasi berwirausaha sebesar 83,8% dan sisanya 16,2% dijelaskan variabel lain diluar model penelitian sebagai contoh modal usaha, kreativitas, fasilitas pemerintah dll.

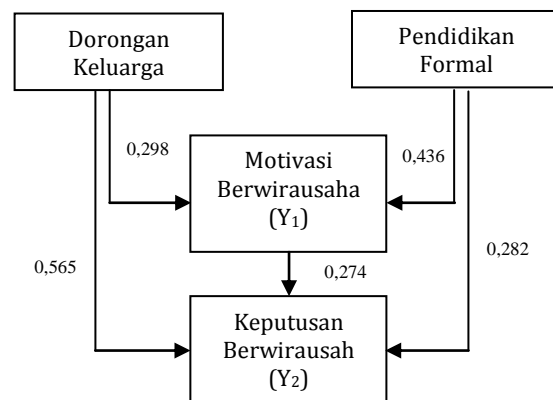
Pengaruh Langsung, Tidak Langsung, Total Effect

Tabel 6. Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan Total Pengaruh

Dari Variabel	Koefisien Jalur		Total Pengaruh
	DE (Direct Effect)	IE (Indirect Effect)	
X ₁ ke Y	P ₃ = 0,565		
X ₂ ke Y	P ₄ = 0,282		
X ₁ melalui X ₃ Ke Y		P ₁ x P ₅ = 0,298 x 0,274 =0,081	P ₃ +(P ₁ xP ₅)= 0,565+0,081 = 0,646
X ₂ melalui X ₃ Ke Y		P ₂ x P ₉ = 0,436 x 0,274 =0,119	P ₄ +(P ₂ xP ₉)= 0,282+ 0,119 =0,401

Sumber: Data diolah 2015

Kesimpulan dari tabel di atas hubungan antar variabel dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:



Gambar 1. Hasil Pengaruh Langsung Dan Tidak Langsung

Implikasi Manajerial

1. Pengaruh dorongan keluarga terhadap keputusan berwirausaha
Penggunaan variabel dorongan keluarga terhadap motivasi berwirausaha mempunyai pengaruh signifikan. Demikian juga pengaruh langsung dorongan keluarga terhadap keputusan berwirausaha berpengaruh signifikan. Dengan demikian dorongan keluarga mempunyai peran penting dalam

mewujudkan keputusan berwirausaha. Implikasinya adalah keluarga merupakan kelompok sosial pertama dalam kehidupan manusia tempat belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial di dalam hubungan interaksi dengan kelompoknya. Dalam keluarga, seorang anak pertamanya belajar memperhatikan keinginan orang lain, bekerjasama, bantu membantu, atau sebagai makhluk sosial dan mempunyai norma-norma dan kecakapan-kecakapan tertentu dalam pergaulannya dengan orang lain (Sobur, 2003). Dorongan keluarga dengan segala kondisi yang ada didalamnya yang meliputi latar belakang anggota keluarga, tradisi keluarga dan cara orang tua mendidik, akan dapat menunjang, membimbing dan mendorong seseorang khususnya para pencari kerja untuk kehidupannya mendatang (Koranti, 2013). Hal ini sesuai dengan teori Sumarni (2006) dan Sartono (2006) bahwa yang dilakukan oleh orang tua dapat mempengaruhi minat terhadap jenis pekerjaan bagi anak di masa yang akan datang, termasuk untuk berwirausaha. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat berwirausaha melalui dorongan keluarga dan motivasi berwirausaha diantaranya adalah dengan adanya latar belakang pendidikan orang tua terhadap anak dapat meningkatkan minat seseorang untuk menjadi seorang wirausaha. Bimbingan orang tua ketika kecil juga merupakan langkah awal untuk membentuk karakter seseorang menjadi seorang wirausaha, selain itu pekerjaan orang tua yang kebanyakan sudah menjadi seorang

pengusaha akan menarik anak-anaknya menjadi seorang pengusaha.

2. Pengaruh pendidikan formal terhadap keputusan berwirausaha

Penggunaan variabel pendidikan formal terhadap motivasi berwirausaha signifikan. Demikian juga pengaruh langsung pendidikan formal terhadap keputusan berwirausaha berpengaruh signifikan. Dengan demikian pendidikan formal perlu direkomendasikan sebagai variabel prediktor untuk mempengaruhi pencari kerja agar mengambil keputusan untuk berwirausaha. Pendidikan formal seperti di sekolah menjadi tanggung jawab guru. Jadi pada dasarnya yang berpengaruh terhadap perkembangan masyarakat yaitu proses pendidikan di sekolah sebagai bekal untuk diterapkan dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Seorang guru dalam proses pendidikan juga dapat memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat dalam menumbuhkan minatnya. Sebagai pendidik dalam lembaga pendidikan formal, maka guru berperan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, apalagi yang dibutuhkan orang pada dasarnya adalah ke arah pengembangan kualitas SDM yang berguna (Suprpto, 2007). Berkaitan dengan pendidikan formal, Henry dan Thompson mendefinisikan pendidikan kejuruan dalam penelitian Berg (2002:45) bahwa pendidikan kejuruan itu identik dengan belajar bagaimana untuk bekerja, pendidikan kejuruan berupaya meningkatkan tehnik dan posisi seseorang di lingkungannya melalui penguasaan teknologi dan

pendidikan kejuruan berkaitan erat dengan kebutuhan pasar kerja dan karena itu sering dipandang sebagai sesuatu yang memberikan kontribusi yang kuat terhadap ekonomi yang minimal. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi besarnya minat yang timbul dari dalam maupun luar diri masyarakat terhadap sesuatu yaitu keputusan berwirausaha. Lingkungan sekolah memiliki arti yang sama dengan lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan menurut Hadikusumo (1996), adalah segala kondisi dan pengaruh dari luar terhadap kegiatan pendidikan. Sedangkan lingkungan pendidikan menurut Tirtahardja dan La Sulo (1994) adalah latar tempat berlangsungnya pendidikan. Sehingga dengan adanya temuan hasil penelitian, landasan teori dapat disimpulkan bahwa pendidikan formal mempunyai peranan penting dalam membentuk minat seseorang untuk mengambil keputusan menjadi seorang wirausaha.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil Uji Hipotesis

1. Dorongan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi berwirausaha Pencari kerja di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sragen.
2. Pendidikan formal berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi berwirausaha Pencari kerja di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sragen.
3. Dorongan keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan berwirausaha Pencari kerja di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sragen.
4. Pendidikan formal berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan berwirausaha Pencari kerja di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sragen.
5. Motivasi berwirausaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan berwirausaha Pencari kerja di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sragen.
6. Hasil uji secara serempak (Uji F) pada persamaan kedua diketahui besarnya nilai $F = 38,302$ signifikansi $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan secara bersama-sama variabel bebas mempengaruhi Keputusan berwirausaha pencari kerja.
7. Nilai R^2 total sebesar 0,838, dapat diartikan variabel keputusan berwirausaha Pencari kerja di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sragen dijelaskan oleh variabel pelatihan, dorongan keluarga, pendidikan formal dan motivasi berwirausaha sebesar 83,8% dan sisanya 16,2% dijelaskan variabel lain diluar model penelitian sebagai contoh modal usaha, kreativitas, fasilitas pemerintah dan lain-lain.
8. Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa:
 - a. Pengaruh langsung dorongan keluarga terhadap keputusan berwirausaha melalui motivasi berwirausaha menghasilkan pengaruh yang lebih

besar dari pada pengaruh tidak langsung.

- b. Pengaruh langsung pendidikan formal terhadap keputusan berwirausaha melalui motivasi berwirausaha menghasilkan pengaruh yang lebih besar dari pada pengaruh tidak langsung.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Variabel dorongan keluarga merupakan variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap keputusan berwirausaha, sehingga sebaiknya faktor lingkungan keluarga lebih diperhatikan apabila ingin membentuk seseorang menjadi seorang wirausaha. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan bimbingan orang tua dan pelatihan berwirausaha kepada anak didikan.
2. Rekomendasi:
Selain dorongan keluarga dan pendidikan formal yang mampu meningkatkan motivasi berwirausaha dan keputusan berwirausaha, maka untuk peneliti berikutnya perlu mengadakan penelitian dengan menambah variabel-variabel yang lain yang dapat meningkatkan pengambilan keputusan bagi pencari kerja, misalnya modal usaha, kreativitas, kesempatan kerja, usia dan lain sebagainya

DAFTAR PUSTAKA

Alma, B. (2004). *Kewirausahaan Penuntun Perkuliahan untuk Perguruan Tinggi*. Bandung: Alfabeta.

Arikunto Suharsimi, A. (2010). *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara

Brown, Duane & Brooks, Linda. (2010). *Caree Counseling Techniques*. Boston: Allyn And Bacon

Cuervo, A., Ribeiro, D., & Roig, S. (2010). *Entrepreneurship: Concepts, Theory and Perspective*. Springer.

Downey, W.D. & Erickson, S.P. (2007) *Manajemen Agribisnis*. (Terjemahan Rochidayat Ganda & Alfonsus Sirait). Jakarta: Penerbit Erlangga. (Buku Asli *Agribusiness Management* diterbitkan tahun 1987)

Dyah Ayu Widi Astuti, 2009. Pengaruh Konteks Keluarga, Kerja, Pendidikan, Hambatan Dalam Memulai Bisnis, Dukungan Sosial, Nilai - Nilai Individualisme Dan Kolektivisme Pada Intensi Berwirausaha (*Studi pada Mahasiswa Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret*). Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

Eka Aprilianty. 2014. Pengaruh Kepribadian Wirausaha, Pengetahuan Kewirausahaan, Dan Lingkungan Terhadap Minat Berwirausaha Siswa SMK. *Jurnal Manajemen Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah*

Ghozali, Imam, 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*

Hanum Risfi Mahanani, 2014. *Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Lingkungan Eksternal Terhadap Pelatihan wirausaha dan Minat Berwirausaha (Studi pada siswa SMA Negeri 1 Semarang)*. Jurnal Universitas Diponegoro Semarang.

Lee, M. S. (2005). Impact of Entrepreneurship Education: A Comparative Study of the US and Korea. *International Entrepreneurship and Management Journal*, 27-43

Linan, Francisco & Leon, J. A. M. (2007) *Entrepreneurial Intentions*. Department of Apply Economy I, Universidad de Sevilla. Department of Social and Organizational Psychology. UNED

Purnamasari. Ika. 2012. *Pengaruh Konsep Diri dan Peranan Keluarga terhadap Minat Berwirausaha Siswa Kelas XI di SMK*

Negeri 1 Singaraja tahun Ajaran 2011/2012. Skripsi (tidak diterbitkan). Jurusan Pendidikan Ekonomi , Fakultas Ilmu Sosial Undiksha

- Putu Eka Desy Yanti, Made Nuridja, Ketut Dunia. 2014. Pengaruh dorongan Keluarga Terhadap minat Berwirausaha Siswa Kelas XI SMK Negeri 1 Singaraja. *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol: 4 N0: 1 Tahun: 2014
- Riduwan, 2005, *Skala pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Cetakan Ketiga, Alfabeta, Bandung.
- Sarwono, Sarlito W.. (2011). *Psikologi Remaja* (edisi revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Selnes, Fred (2008), "An Examination of the effect of Product Performance on Brand Reputation, Satisfaction and Loyalty", *European Journal of Marketing*, 27 (9). (19-35).
- Singgih Purnomo, 2013. *Analisis Pengaruh Faktor Keluarga, Pendidikan dan Lingkungan Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa STMIK Duta Bangsa Surakarta*. Program Studi Sistem Informasi STMIK Duta Bangsa Surakarta
- Solomon, Michael (2006), *Consumer Behavion*, 3th edition, McGraw Hill.
- Sugiyono, 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cetakan Ketujuh, CV. Alfabeta, Bandung

Sikap Manajer Tingkat Menengah Dan Penerapan International Standart Organization serta Hubungannya Dengan Kinerja Manajerial

Oleh :
SYAIFUL¹⁾
ANWAR HARIYONO²⁾

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK
Email : Syaifulis069@gmail.com¹⁾

ABSTRAK

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Ada lima elemen atau faktor TQM dan ISO yang digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam melakukan aktivitas manajemennya. TQM merupakan salah satu alat yang dapat digunakan oleh perusahaan agar perusahaan tetap *going concern* atau lebih dikenal dengan istilah pengendalian mutu terpadu. Agar dapat dikatakan bahwa perusahaan itu berhasil dengan baik dalam menerapkan TQM maka harus didukung dengan ISO yang baik pula, sebab ISO merupakan salah satu alat untuk mengukur keberhasilan kinerja manajerial. Universitas Muhammadiyah Gresik untuk mendukung implementasi TQM yang meliputi 5 elemen yaitu: 1) Fokus pada Pelanggan, 2) Pelibatan dan pemberdayaan karyawan, 3) Kerjasama Team, 4) Pendidikan dan Latihan, 5) perbaikan yang berkesinambungan. UMG menerapkan ISO 9000:2001 untuk melakukan kegiatan manajerialnya dan merupakan salah satu alat untuk mengukur kinerja manajer. Hasil penelitian kali ini menunjukkan dalam penerapan TQM yang diwujudkan dengan implementasi ISO pada Universitas Muhammadiyah Gresik, khususnya pada dua Fakultas yaitu Fakultas Ekonomi dan Fakultas Teknik masih belum maksimal hal ini dapat dibuktikan bahwa dari kelima elemen tersebut elemen fokus pada pelanggan merupakan elemen yang berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal, terutama adalah pihak eksternal yang menyatakan bahwa pelayanan tidak baik dan tidak optimal. artinya tidak sesuai dengan kaidah yang dicanangkan dalam ISO khususnya maupun TQM pada umumnya.

Kata Kunci : *TQM, ISO, Pelanggan, Kerjasama Team, Pemberdayaan, pendidikan dan Latihan, perbaikan yang terus menerus, dan going concern.*

LATAR BELAKANG MASALAH

Sampai saat ini, sistem yang dianggap paling cocok sebagai alat untuk membuat perusahaan tetap *going concern* adalah *Total Quality Management* (TQM) atau di Indonesia dikenal dengan istilah Pengendalian Mutu Terpadu (PMT). TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus menerus atas produk, jasa, manusia, proses dan lingkungannya (Sularso dan Murdjianto:2004). Menurut Nasution (2005:22), dalam penerapan TQM ada 10 karakteristik yang dikembangkan oleh

Goetsch dan Davis yang dapat mempengaruhi kinerja manajer, yaitu: fokus pada pelanggan, obsesi terhadap kualitas, pendekatan ilmiah, komitmen jangka panjang, kerjasama tim, perbaikan sistem secara berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan, kebebasan yang terkendali, kesatuan tujuan, dan adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. Dengan adanya TQM perusahaan dapat selalu mengevaluasi kinerjanya sehingga perusahaan dapat segera memperbaiki apabila ada sistem yang salah dalam perusahaannya. Namun sebelumnya, perusahaan juga

harus melakukan perubahan budaya kerja yang sebelumnya keberatan apabila hasil kerjanya dievaluasi menjadi lebih terbuka menghadapi evaluasi kinerja. Konsep TQM tersebut bertolak belakang dengan pemikiran di negara barat dan Indonesia sendiri. Di negara barat, fokus pekerjaan diletakkan pada profesionalisme dan spesialisasi. Oleh karena itu segala hal yang berhubungan dengan pengendalian mutu hanya dikuasai oleh para spesialis kendali mutu. Apabila pengendalian mutu dipertanyakan pada orang-orang yang ada di divisi lain perusahaan, selain kendali mutu, mereka pasti tidak bisa menjawabnya (Ishikawa, 1992). Demikian juga di Universitas Muhammadiyah Gresik Pelaksanaan pengendalian mutu ditangani oleh suatu lembaga yang disebut dengan Badan Penjaminan Mutu. Hal ini merupakan kelanjutan dari penerapan Total Quality Manajemen/mutu manajemen, terutama penerapan ISO 9000:2001 yang telah diterapkan UMG sejak tahun 2003. Walaupun belum sertifikasi tetapi ISO ini tetap dijalankan. Tetapi dalam pelaksanaannya banyak yang tidak dilakukan secara konsisten, Hal ini disebabkan oleh adanya indikasi rendahnya kinerja manajerial di UMG. Sebagaimana Wruck dan Jansen, (1999), menyatakan bahwa penyebab rendahnya kinerja manajerial disebabkan efektivitas penerapan TQM memerlukan perubahan mendasar pada infrastruktur organisasional, yang meliputi sistem alokasi wewenang pembuatan keputusan, dan sistem pengukuran kinerja, sistem penghargaan dan hukuman. Penelitian yang akan peneliti lakukan, berfokus pada tanggapan, manajer

menengah (dekan), karyawan, dan pelanggan terhadap penerapan manajemen mutu total dalam hubungannya dengan kinerja manajerial. Dalam hal ini tanggapan atau pendapat dari manajer menengah atau dekan, karyawan, dan pelanggan terkait penerapan TQM yang diimplementasikan melalui penerapan ISO dalam rangka untuk menilai Kinerja Manajerial. Sebab ISO ini merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menilai kinerja manajerial, karena berhubungan dengan hasil kerja yang telah dilakukan oleh individu sebagaimana tujuan dan sasaran yang telah dicanangkan perusahaan terutama adalah bagaimana kelompok manajemen terutama manajemen menengah menampilkan kinerja yang memuaskan yang menuntut pertanggungjawaban.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditentukan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Bagaimana kinerja dan sikap Manajer menengah terhadap penerapan TQM yakni fokus pada pelanggan, pelibatan dan pemberdayaan karyawan, kerjasama Tim, pendidikan dan latihan, serta perbaikan berkesinambungan pada Universitas Muhammadiyah Gresik?”

Berdasarkan *Research Question* di atas maka dapat dirinci menjadi *6 mini research question* yang digunakan untuk menganalisis lebih mendalam secara kualitatif.

TINJAUAN PUSTAKA

Karakteristik Total Quality Management

Sepuluh karakteristik TQM yang dikembangkan oleh Goetsch dan Davis dalam

Nasution (2005: 22). Sepuluh karakteristik tersebut adalah sebagai berikut: 1) Fokus Pada Pelanggan, 2) Obsesi terhadap Kualitas, 3) Pendekatan Ilmiah, 4) Komitmen Jangka Panjang, 5) Kerjasama Tim (Teamwork), 6) Perbaikan Sistem Secara Berkesinambungan, 7) Pendidikan dan Pelatihan, 8) Kebebasan yang Terkendali, 9) Kesatuan Tujuan, 10)

Faktor-faktor yang menyebabkan Kegagalan TQM

TQM merupakan suatu pendekatan baru dan menyeluruh yang membutuhkan perubahan total atas paradigma manajemen tradisional, komitmen jangka panjang, kesatuan tujuan, dan pelatihan-pelatihan khusus. Selain dikarenakan usaha pelaksanaan yang setengah hati dan harapan-harapan yang tidak realistis, ada pula beberapa kesalahan yang secara umum dilakukan pada saat organisasi memulai inisiatif perbaikan kualitas. Beberapa kesalahan yang sering dilakukan antara lain: 1) Proses Penyebarluasan, 2) Ada organisasi yang mengembangkan inisiatif kualitas tanpa secara berbarengan mengembangkan rencana untuk menyatukannya ke dalam seluruh elemen organisasi, 3) Harapan yang Terlalu Berlebihan dan Tidak Realistis

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Manajemen

Kinerja dapat diartikan sebagai “penentuan secara periodik efektivitas operasional suatu perusahaan, bagian dari perusahaan dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya” (Lubis, 2005 : 21). Menurut Donnelly, Gibson, dan Ivan Cerich dalam Rivai (2005 : 15) “ kinerja merujuk kepada tingkat keberhasilan dalam

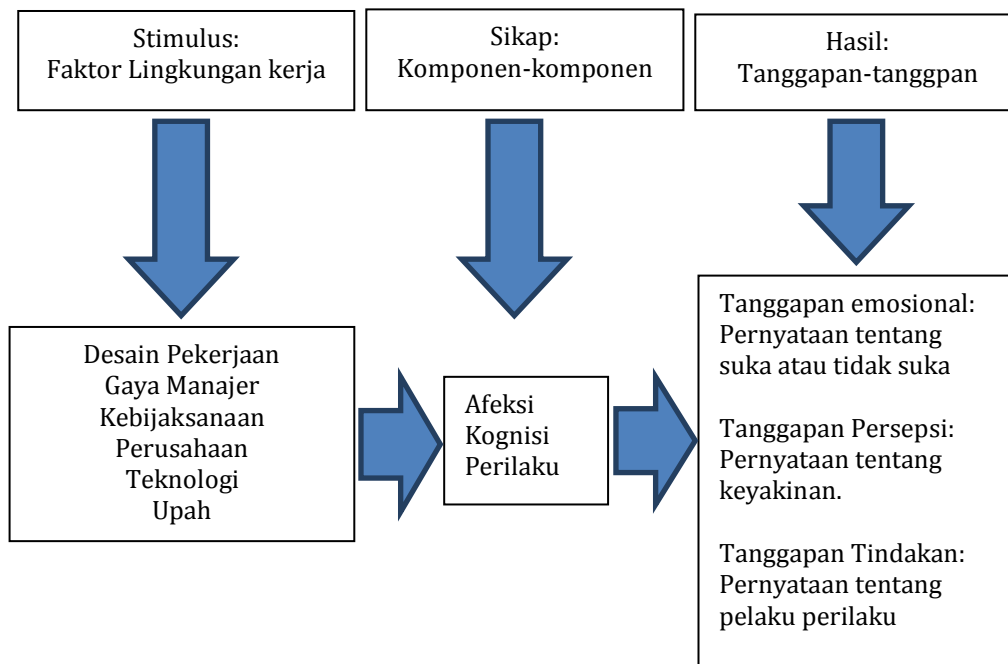
melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.” Kinerja dikatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. “Manajemen adalah pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumberdaya organisasi” (Richard, 2002 : 1).

Sikap dan Karakteristik Sikap

Definisi sikap banyak dikemukakan oleh para ahli tentang sikap dari sudut pandang yang berbeda. Menurut Loudon dan Della Bitta (1985:385) mengatakan bahwa ada sikap merupakan cara bagaimana seseorang merasakan suatu obyek yang positif atau negatif, sesuatu yang menguntungkan atau merugikan, atau sesuatu yang menimbulkan pro dan kontra. Definisi ini memandang sikap sebagai suatu perasaan reaksi evaluatif terhadap suatu obyek. Sementara itu Allport (dalam Loudon dan della Bitta, 1985; 385) yang memandang sikap sebagai *Prodeposisi-predeposisi* yang dipelajari untuk merespon (menanggapi) suatu obyek yang secara konsisten menguntungkan atau tidak menguntungkan. Demikian juga Definisi menurut Gibson (1995;63) mendefinisikan sikap (attitude) adalah kesiap-siagaan mental yang dipelajari dan diorganisasi melalui pengalaman dan mempunyai pengaruh tertentu terhadap perilaku seseorang. Sedangkan menurut Robbins, (1996;169) mendefinisikan sikap sebagai pernyataan evaluatif baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai obyek, orang atau peristiwa. Sikap ini mencerminkan bagaimana seseorang merasakan mengenai sesuatu.

Sedangkan karakteristik sikap menurut Loudon dan Della Bitta (1985;387) ada 4 karakteristik penting dalam teorikap, diantaranya adalah: a) Sikap memiliki obyek: b) Sikap memiliki arah, intensitas, dan tingkatan: c) Sikap memiliki struktur; sikap menunjukkan organisasi, dan d) Sikap dipelajari; sikap peljari seperti halnya kita mempelajari permainan sepak bola. Gambar

dibawah ini menunjukkan tiga kmpenen sikap yang berhubunga dengan faktor-faktor lingkungan seperti desain pekerjaan, kebijaksanaa perusahaan, dan tunjangan. Stimulus tersebut menyntak tanggapan emosional (afeksi), pengakuan (kognitif), dan perilaku(Gibson, 199; 64).



Gambar 2 : Tiga Komponen Sikap
Sumber, Gibsons, 1995;84

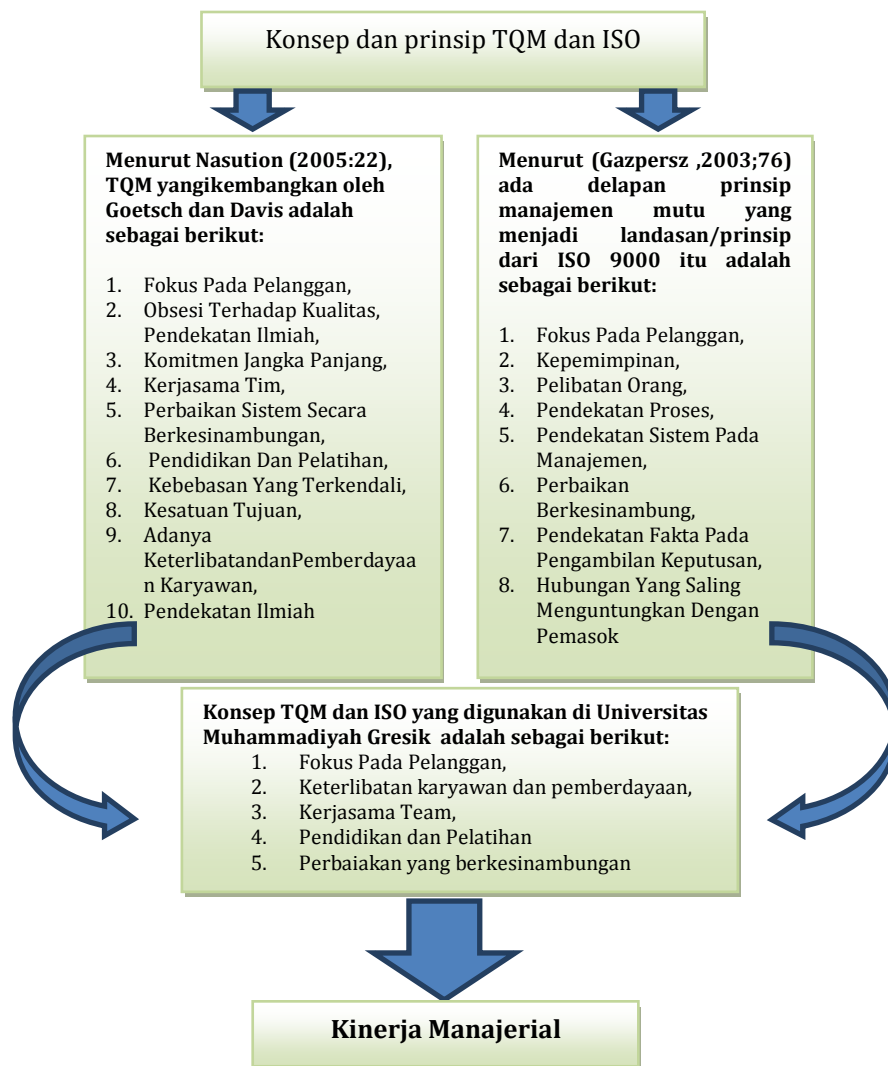
Kerangka Konseptual

TQM dapat memperbaiki kinerja manajemen dalam perusahaan untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Fokus pada pelanggan berarti setiap produk/jasa yang dihasilkan perusahaan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Orientasi pada pelanggan tersebut akan merangsang manajer untuk meningkatkan kinerjanya agar menghasilkan produk/jasa yang bermutu untuk memuaskan pelanggan. Obsesi terhadap kualitas merupakan sikap tidak pernah puas akan kualitas dari produk/jasa

yang dihasilkan. Peningkatan kualitas produk juga dapat mengurangi biaya kualitas yang dapat menurunkan laba. Apabila sikap ini dapat ditanamkan di benak para manajer, maka kinerja para manajer akan meningkat karena mereka ingin tetap menghasilkan produk/jasa yang bermutu tinggi. Pendidikan dan pelatihan sangat dibutuhkan oleh para manajer untuk memperbaharui pengetahuan mereka tentang masing-masing bidang yang mereka tangani. Pendidikan dan pelatihan membuat para manajer semakin ahli di bidangnya. Sedangkan dalam pelaksanaan

atau implementasi TQM dari suatu organisasi yang dapat dipakai sebagai alat ukur salah satunya alat yang digunakan adalah ISO terutama dalam implemetasi TQM-nya. Oleh karena itu menurut (Gazpersz ,2003;76) ada delapan prinsip manajemen mutu yang menjadi landasan/prinsip dari ISO 9000. Demikian juga di Universitas Muhammadiyah Gresik, TQM yang dilaksanakan adalah dengan

menerapkan ISO dengan lima kreteria atau lima prinsip yang diambil dari dua prinsip/konsep TQM maupun ISO. Oleh karena itu kerangka konsep secara utuh dapat digambarkan perbedaan dan persamaan dari kosnep yang ada di ISO maupun yang ada di TQM serta konsep yang diterapkan di Unmuh Gresik adaah sebagai berikut:



Gambar 2.1.
Kerangka Konseptual

Kerangka Pikir dan Proposisi

Menurut Emory dan Cooper (1991), Proposisi adalah pernyataan mengenai suatu

konsep yang bisa dinilai salah atau benar dan mengacu pada fenomena yang bisa diamati. Proposisi tersebut dapat dirumuskan menjadi

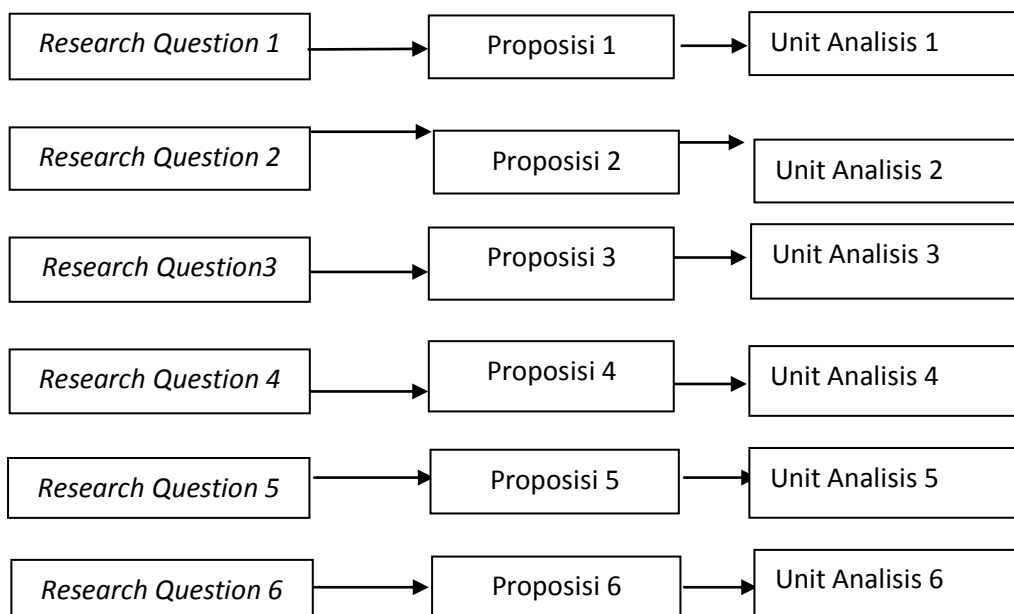
6 proposisi (P1-P6) yang hal ini akan memberikan gambaran, menyeluruh tentang aktivitas pengelolaan organisasi tersebut terutama fokus pada elemen-elemen ISO. Proposisi tersebut adalah sebagai berikut:

- P1: Manajer tingkat menengah memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal.
- P2: Pimpinan Fakultas melibatkan bawahannya pada semua level organisasi dalam pembuatan keputusan dan pemecahan masalah.
- P3: Pimpinan Fakultas melibatkan karyawan/bawahannya dalam sebuah teamwork untuk memecahkan masalah dan pengambilan keputusan terutama berkaitan dengan pengembangan

kualitas dan pelayanan kepada pelanggan.

- P4: Pimpinan Fakultas bersikap evaluatif terhadap pengembangan kualitas total melalui pendidikan dan latihan.
- P5: Pimpinan Fakultas bersikap evaluatif terhadap upaya perbaikan yang berkelanjutan
- P6: Penerapan TQM yang optimal akan berpengaruh pada peningkatan kinerja individu

Peningkatan penerapan TQM akan meningkatkan kinerja manajemen perusahaan. Gambaran tersebut dapat divisualisasikan melalui kerangka penelitian di bawah ini.



Gambar 2.3. Kerangka Penelitian

Berdasar rerangka penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas evaluasi terhadap penerapan *Total Quality Management* (TQM) memiliki 6 aktivitas/kegiatan yaitu: 1) pelayanan yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan pihak internal perusahaan maupun eksternal, yang diwujudkan dengan perencanaan dan pelaksanaan kualitas yang menyeluruh, 2) keikutsertaan karyawan atau bawahan dalam pembuatan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, 3) kegiatan yang terkait dengan aktivitas pelibatan karyawan dalam sebuah teamwork untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, 4) aktivitas pengembangan kualitas total melalui pendidikan dan latihan, 5) aktivitas berupa kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas perbaikan yang berkelanjutan dalam rangk pencapaian pemecahan masalah yang berkualitas. 6) aktivitas yang dilakukan oleh individu dalam kegiatan manajerial. Keenam kegiatan atau aktivitas ini merupakan suatu proses yang saling berkaitan. Tidak adanya standar atau alat yang dapat digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi penerapan TQM maka kinerja manajerial tidak bisa diukur dan dinilai. Oleh karena itu dalam hal ini TQM menjadi alat yang penting didalam melakukan kegiatan evaluasi terhadap kinerja, sehingga apakah dengan adanya penerapan TQM ini akan dapat meningkatkan kinerja manajerial, baik dalam aktivitas internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Untuk mencapai tujuan perusahaan yang kompetitif maka perlu adanya inovasi-inovasi baik dari sisi kualitas produk, manajemen, dan juga yang tidak kalah penting adalah pengetahuan dan ilmu dalam melayani pelanggan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian studi kasus ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif. Menurut Poerwandari (1998) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto rekaman video dan lain-lain. Dalam penelitian kualitatif perlu menekankan pada pentingnya kedekatan dengan orang-orang dan situasi penelitian, agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata. (Patton dalam Poerwandari, 1998)

Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, karakteristik subjek adalah Sebagai berikut :

Subjek penelitian ini adalah Pimpinan Fakultas (Dekan), Ketua Program Studi, Karyawan dan Pelanggan yang ada dilingkungan Universitas Muhammadiyah Gresik

Unit Analisis

Berdasarkan rumusan masalah dan rincian rumusan masalah serta proposis yang ada maka dapat dirusukan sebagai berikut:

1. Adanya aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan pihak internal perusahaan maupun eksternal, yang diwujudkan dengan perencanaan dan pelaksanaan kualitas yang menyeluruh.
2. Adanya keikutsertaan karyawan atau bawahan dalam pembuatan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Indikator aktivitas ini adalah:
3. Adanya kegiatan yang terkait dengan aktivitas pelibatan karyawan dalam

- sebuah teamwork untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.
4. Adanya aktivitas pengembang kualitas total melalui pendidikan dan latihan.
 5. Adanya aktivitas berupa kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas perbaikan pemecahan masalah. Indikator pernyataan ini adalah:
 6. Adanya aktivitas yang dilakukan oleh individu dalam kegiatan manajerial dan diukur dengan instrumen yang dikembangkan oleh Siagian (1997).

Tahap-tahap penelitian

Dalam penelitian terdapat dua tahap penelitian, yaitu :

1. Tahap Persiapan Penelitian

Pertama peneliti membuat pedoman wawancara yang disusun berdasarkan dimensi kebermaknaan hidup sesuai dengan permasalahan yang dihadapi subjek. Pedoman wawancara ini berisi pertanyaan-pertanyaan mendasar yang nantinya akan berkembang dalam wawancara.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 teknik pengumpulan data, yaitu :

2. Wawancara

Kerlinger (dalam Hasan 2000) menyebutkan 3 hal yang menjadi kekuatan metode wawancara :

- a. Mampu mendeteksi kadar pengertian subjek terhadap pertanyaan yang diajukan. Jika mereka tidak mengerti bisa diantisipasi oleh interviewer dengan memberikan penjelasan.

- b. Fleksibel, pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan masing-masing individu.
- c. Menjadi satu-satunya hal yang dapat dilakukan disaat tehnik lain sudah tidak dapat dilakukan.

Menurut Yin (2003) disamping kekuatan, metode wawancara juga memiliki kelemahan, yaitu :

- a. Rentan terhadap bias yang ditimbulkan oleh konstruksi pertanyaan yang penyusunanya kurang baik.
- b. Rentan terhadap terhadap bias yang ditimbulkan oleh respon yang kurang sesuai.
- c. *Probling* yang kurang baik menyebabkan hasil penelitian menjadi kurang akurat.
- d. Ada kemungkinan subjek hanya memberikan jawaban yang ingin didengar oleh *interviewer*.

3. Observasi

Disamping wawancara, penelitian ini juga melakukan metode observasi. Menurut Nawawi & Martini (1991) observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek penelitian.

Alat Bantu pengumpulan Data

Menurut Poerwandari (1998) penulis sangat berperan dalam seluruh proses penelitian, mulai dari memilih topik, mendeteksi topik tersebut, mengumpulkan data, hingga analisis, menginterpretasikan dan menyimpulkan hasil penelitian. Dalam mengumpulkan data-data penulis membutuhkan alat Bantu (instrumen penelitian). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 alat bantu, yaitu : 1)

Pedoman wawancara, 2) Pedoman Observasi, 3) Alat Perekam

Keabsahan dan Keajegan Penelitian

Studi kasus ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif. Yin (2003) mengajukan empat criteria keabsahan dan keajegan yang diperlukan dalam suatu penelitian pendekatan kualitatif. Empat hal tersebut adalah Sebagai berikut :

1. Keabsahan Konstruk (*Construct validity*) caranya adalah dengan proses triangulasi yang meliputi : 1) Triangulasi data, 2) Triangulasi Pengamat, 3) Triangulasi Teori, 4) Triangulasi metode
2. Keabsahan Internal (*Internal validity*)
3. Keabsahan Eksternal (*Eksternal validity*)
4. Keajegan (*Reabilitas*)

Teknik Analisis Data

Marshall dan Rossman mengajukan teknik analisa data kualitatif untuk proses analisis data dalam penelitian ini. Dalam menganalisa penelitian kualitatif terdapat beberapa tahapan-tahapan yang perlu dilakukan (Marshall dan Rossman dalam Kabalmay, 2002), diantaranya :

1. Mengorganisasikan Data;
2. Pengelompokan berdasarkan Kategori, Tema dan pola jawaban;
3. Menguji Asumsi atau Permasalahan yang ada terhadap Data;
4. Mencari Alternatif Penjelasan bagi Data;
5. Menulis Hasil Penelitian;

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap yaitu: tahap eksplorasi menyeluruh, tahap eksplorasi terfokus, dan tahap konfirmasi

serta diakhiri dengan interpretasi data. Pada tahap eksplorasi menyeluruh ini peneliti melakukan *grand tour observation* dan *grand tour question*. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah:

- a. Pada tahap pencarian organisasi/perusahaan yang dapat dijadikan obyek penelitian ini juga sangat sulit sebab tidak semua perusahaan atau organisasi mau dengan metode studi kasus. Akhirnya Universitas Muhammadiyah Gresik yang menurut peneliti yang cocok dijadikan sebagai obyek penelitian dengan pendekatan penelitian studi kasus.
- b. Dari beberapa obyek penelitian yang ada dihubungi untuk mengetahui bahwa organisasi/perusahaan tersebut yang memang benar-benar bersedia untuk dijadikan obyek penelitian. Tujuan utama menghubungi organisasi tersebut untuk mendapatkan ijin melakukan penelitian. Setelah ijin diperoleh selanjutnya proposal penelitian lengkap dengan topik wawancara dan daftar dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini. Selanjutnya dilakukan kunjungan ke obyek tersebut dan kunjungan baru dapat dilakukan oleh peneliti pada bulan Nopember 2010. Pada setiap kunjungan peneliti langsung dengan Dekan Fakultas, kaprodi dilinkungan universitas Muhammadiyah Gresik, karyawan/TU serta mahasiswa selaku pengguna jasa. Pada setiap awal pertemuan dengan subyek peneitian , peneliti harus menjelaskan kembali maksud pnelitian, sebab proposal dan topik pertanyaan yang telah dikirimkan dirasa masih kurang jelas dan lengkap. Pertanyaan awal yang

diajukan bersifat pendahuluan hanya untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum, yaitu gambaran tentang kegiatan penerapan Total Quality Management dan kinerja manajemen dan aktivitas pengendalian mutu yang diterapkan oleh Universitas Muhammadiyah Gresik, misalnya penerapan ISO 9000;2001, dan keberadaan lembaga Penjaminan Mutunya. Pada tahap eksplorasi terfokus, peneliti mulai menangani secara sungguh-sungguh dan rinci untuk mendapatkan kedalaman tentang unit analisis yang diteliti. Oleh karena itu agar mendapatkan gambaran yang menyeluruh pertanyaan dan diskusi dilakukan oleh peneliti dengan berpedoman pada struktur proposisi yang telah ditetapkan dalam penelitian ini. Karena penelitian ini bersifat konfirmasi dan mencari informasi atas sesuatu hal maka pertama yang dilakukan peneliti adalah dengan meminta informasi berdasarkan dokumen-dokumen tertulis, misalnya dokumen ISO, struktur organisasi, sistem dan prosedur yang ada, dokumen penilaian kinerja pegawai, dan daftar hadir pegawai pada beberapa bulan terakhir. Selanjutnya setelah mendapatkan data-data tersebut peneliti mengadakan konfirmasi dengan pengurus pimpinan fakultas dan unsure kelegkapan yang ada di fakultas; kaprodi, dosen dan karyawan (TU) serta mahasiswa dengan cara wawancara secara langsung, hasil wawancara ini dapat dilihat pada sub bab penyajian data. Tahap konfirmasi dengan subyek penelitian atau dengan informan ini dilakukan peneliti setelah mendapatkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini. Pada

konfirmasi ini dilakukan dengan triangulasi data, yaitu dengan cara membandingkan hasil wawancara dua fakultas yaitu Fakultas ekonomi (FE), Fakultas Teknik (FT) dan membandingkannya dengan dokumen yang terkait yang disajikan dalam sub bab penyajian data.

Visi Universitas Muhammadiyah Gresik

“Menjadikan UMG sebagai *The Best Learning University* dengan *The Realistic Education* dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mampu menangani dan mengembangkan proses industrialisasi yang ramah lingkungan dan berwawasan global untuk kesejahteraan umat manusia baik di Indonesia maupun didunia”.

Misi Universitas Muhammadiyah Gresik

Berkaitan dengan misi Islam *rahmatan lil ‘alamiin* dalam mewujudkan *khalifah fil ‘ardhi*, serta kedudukan UMG sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah, dirumuskan misi UMG sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas dalam rangka menyiapkan SDM yang berakhlak mulia, profesional dan berwawasan global.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan penelitian yang berwawasan lingkungan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat serta menerapkannya melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Muhammadiyah Gresik

Berdasarkan visi dan misi, maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai UMG sebagai berikut:

- a. Menguasai dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai

oleh nilai-nilai Islam serta relevan dengan kebutuhan pembangunan bangsa

- b. Mengembangkan kehidupan bermasyarakat akademik yang ditopang oleh nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kejujuran, kesungguhan, inovatif, kritis-konstruktif, terbuka, tanggap terhadap perubahan
- c. Memperluas wawasan dan memperkokoh nilai kemanusiaan, *ahlaqul karimah* dan etika yang bersumberkan ajaran agama Islam serta memupuk keikhlasan dalam melaksanakan *amarma'rufnahnimunkar*

Disamping mengembangkan tiga tujuan umum UMG sebagaimana disebutkan diatas, dalam hubungannya dengan upaya peningkatan kualitas output, UMG mengarahkan segenap proses pendidikannya untuk tujuan khusus: "Mewujudkan sarjana muslim yang berakhlak mulia, cakap, mandiri, serta berguna bagi masyarakat dan negara".

Evaluasi Sistem Penjaminan Mutu

Sejak pertengahan tahun 2003 pengembangan kampus UMG mencoba menerapkan ISO 9000:2001 yang diarahkan kepada peningkatan dan penajaman perencanaan universitas terutama yang terkait dengan peningkatan kualitas yang telah dirinci dalam program tahunan yang tertuang dalam quality plan universitas yang akan dievaluasi setiap tahun. Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi (SPMPT) sangat membutuhkan komitmen Pimpinan. UMG sudah pernah menyusun standar operasional prosedur (SOP) masing-masing unit. Namun, SOP ini tidak semuanya dijalankan karena belum mantapnya sistem penjaminan mutu di UMG yang ditandai oleh belum adanya unit khusus yang menangani SPMPT. Keberadaan P3AI

sejak 2006 berfungsi antara lain menginisiasi sistem penjaminan mutu di tingkat institusi. Kegiatan yang sudah P3AI kerjakan terkait dengan penjaminan mutu, antara lain : menyiapkan form *quality objective* kepada pemilik proses inti dan pendukung serta para dosen. Selain itu juga melakukan Evaluasi Kinerja Dosen (EKD) pada setiap akhir semester dengan alat form *check-list* tatap muka di kelas dan evaluasi kesesuaian Berita Acara Perkuliahan dengan Rencana Perkuliahan. Pelaksanaan EKD semula kurang terkoordinir dengan baik, terbukti beberapa Program Studi masih menggunakan form EKD yang berbeda-beda dengan indikator kinerja yang berbeda pula. Namun, sejak Semester Gasal 2007/2008 pelaksanaan EKD terpusat di P3AI. Penanggung jawab pelaksanaan EKD di tingkat Prodi adalah masing-masing Ketua Program Studi, sedangkan P3AI berfungsi menyediakan form EKD yang senantiasa diperbaiki dari tahun ke tahun, mendistribusikan form, menganalisis hasil inputan mahasiswa dan menyusun laporan hasil EKD untuk disampaikan kepada Pimpinan Fakultas dan Universitas. Berbagai komentar mahasiswa sebagai evaluator EKD menjadi masukan yang berharga untuk penyusunan program berikutnya. Selain EKD yang sudah berjalan, maka kegiatan-kegiatan yang sangat terkait dengan SPMPT belum sepenuhnya ditangani secara konsisten. Hal ini tampak pada penyusunan '*quality objective*' setiap tahun akademik yang tidak secara kontinyu di lakukan '*management review*', akibatnya implementasi '*quality plan*' di tingkat unit inti maupun pendukung menjadi kurang terarah secara tajam. Pelatihan SPMPT sudah pernah dilakukan

oleh P3AI pada bulan Agustus 2007 bekerjasama dengan Kantor Jaminan Mutu UGM melalui dana hibah komptisi P3AI tahun ke dua. Sementara itu *management review* dan audit internal belum secara konsisten dilakukan. Berdasarkan permasalahan dan analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem penjaminan mutu di tingkat institusi belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan pemahaman karyawan terhadap nilai budaya dasar serta sistem penjaminan mutu yang masih rendah.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan TQM atau ISO di Universitas Muhammadiyah Gresik pada dasarnya dilaksanakan dengan baik, terutama di Fakultas Teknik dan Fakultas Ekonomi. Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara dan pengamatan serta dokumen ISO atau formlier-formulir pelaksanaan ISO. Tetapi ada juga yang memang dalam prosedur tetetu dilanggar oleh Fakultas. Masalah ini juga didasarkan pada wawancara dan observasi pada mahasiswa atau pelanggan yang mengeluh karena merasa tidak terlayani dengan baik. Berdasarkan tujuan penelitian maka pembahasan akan disajikan secara beurututan sebagaimana dibawah ini.

Fokus pada Pelanggan

Dengan bukti wawancara dan dokumentasi atas pelaksanaan TQM di UMG terutama di fakultas ekonomi dan Fakultas teknik telah dilasknakan dengan baik, dengan hasil pengamatan yang diperoleh banyak komlpain dari pelanggan baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. Beberapa mahasiswa yang mengatakan tidak puas dan beberapa dosen baik dosen tetap maupun

doen luar biasa juga mengatakan hal sama. Sehingga walaupun dikatakan baik tetapi masih ada celah yang harus ditutup. Yaitu melalui perbaikan-perbaikan dan peningkatan Sumber daya yang ada. Dalam penerapan TQM di UMG khususnya di Fakultas Ekonomi dan Fakultas Teknik, maka jika pihak pimpinan mempunyai komitmen tinggi terhadap penerapan TQM maka akan diperoleh kinerja manajerial yang tinggi pula. Atau dengan lain perkataan bahwa jika pimpinan berkomitmen dan mendukung penerapan TQM maka akan dapat meningkatkan kinerja Manajerial yang optimal. Sebagaimana peneitian yang dilakukan oleh (Sim dan Killough,1998), yang menemukan pengaruh positif dan signifikan dalam penerapan TQM dan desain sistem akuntansi dengan kinerja manjerial. Hasil ini juga mendukung penelitian (Kurnianingsih, 2000) dalam studi empiris, yang menyatakan bahwa penerapan TQM di beberapa perusahaan di Indonesia mempengaruhi kinerja manajerial. Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara dengan beberapa informan yang ada kaitannya dengan elemen TQM yang Fokus pada Pelanggan sebagaimana dgambarkan pada Tabel 4.10. dibawah ini.

Pelibatan Bawahan dan Karyawan Dalam Pengambilan Keputusan

Pelibatan karyawan adalah suatu proses untuk mengkutsertakan para karyawan pada semua level organsiasi dalam pembuatan keputusan dan pemecahan masalah. Orang pada semua tingkat merupakan faktor yang sangat penting dari suatu organisasi dan keterlibatan mereka secara penuh akan memungkinkan kemampuan mereka

digunakan untuk manfaat organisasi. Semenstara itu pemerdayaan karyawan juga penting sebab pemberdayaan bisa diartikan sebagai pemberian wewenang dan kekuasaan kepada orang lain dalam pengambilan keputusan kontrol terhadap pekerjaan mereka sendiri dan memberikan kemudahan untuk memuaskan konsumen. Sementara itu banyaknya pelibatan pegawai atau karyawan dala pengambilan kepuututsan dapat digambarkan pada diagram taksonomi sebagaimana tabel 4.11.

Pelibatan Karyawan atau bawahan dalam Sebuah Teamwork

Jika dilihat dari pelaksanaan dan penerapa TQM di UMG maka hubungan tersebut cukup erat sebab dengan adanya TQM maka TQM bisa digunakan untuk menilai atau mengukur kinerja manajerial. Karena dengan salah satu fungsi TQM adalah memberikan arahan kepada pihak manajer untuk melakukan aktivitas yang sesuai dengan elemen-elemen TQM itu sendiri. Tabel 4.12. dibawah ini menjelaskan manfaat dari penerapan elemen-elemen TQM untuk mendukung dan meningkatkan kinerja manajerial.

Pendidikan dan Latihan

Untuk menunjang pengembangan kualitas total karyawan memerlukan pelatihan. Beberapa ahli menekankan pentingnya pelatihan dan pendidikan dalam rangka pengembangan kualitas. Demikian di UMG pendidikan dan latihan dilaksanakan, baik bagi karyawan maupun dosen dilingkungan 2 fakultas tersebut. Yaitu Fakultas Ekonomi dan Fakultas Teknik. Bentuknya adalah pelatihan terkait dengan bagaimana memberikan layanan yang baik serta keterampilan dalam memberi layanan secara verbal maupun gerak (bahasa

tubuh). Sedangkan untuk dosen biasanya dikutkan pada seminar, workshop, lokakarya atau dengan menyekolahkan pada pendidikan yang lebih tinggi baik tingkat S-2 maupun S-3 (prosedur ISO terlampir). Berdasarkan hasil wawancara di atas (tabel; 4.6) maka dapat di ringkas pada diagram taksonomi 4.13. dibawah ini

Tabel 4.10.

Diagram taksonomi: Fokus Pelanggan/Pelayanan optimal

Struktur Proposisi	FE	FT	Program Studi	Pelanggan
Aktivitas pelayanan yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan pihak internal perusahaan maupun eksternal, yang diwujudkan dengan perencanaan dan pelaksanaan kualitas yang menyeluruh	<i>memuaskan</i>	<i>memuaskan</i>	<i>memuaskan</i>	<i>Tidak memuaskan</i>
Pendapat masing-masing Responden/ Informan	<i>Wah kayaknya ya sudah sesuai, tetapi memang ada beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki terutama berkaitan dengan pelayanan ketika dosen mau mengajar, yaitu ketersediaan alat tulis, ya minum, dll.</i>	<i>Ya, dulu pernah waktu ada forum pertemuan evaluasi perkuliahan semester yang lalu untuk menghadapi semester yang akan datang itu dengan memberikan janji untuk memperbaiki atau dengan meningkatkan layanan tertentu, memang kenyataannya tidak pernah terwujud sampai sekarang.</i>	-	<i>Wah kayaknya ya sudah sesuai, tetapi memang ada beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki terutama berkaitan dengan pelayanan ketika dosen mau mengajar, yaitu ketersediaan alat tulis, ya minum, dll.</i>
Manajer tingkat menengah memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal.	<i>Pelayanan terbaik, sesuai ISO</i>	<i>Pelayanan terbaik, sesuai ISO</i>	<i>Sesuai ISO</i>	-

Tabel 10
Pelibatan dan pemberdayaan karyawan dalam pengambilan keputusan

Struktur Proposisi	FE	FT	Prodi	Pelanggan
<i>Aktivitas berupa kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas Pelibatan dan Pemberdayaan karyawan dalam pengambilan keputusan</i>	<i>dilibatkan</i>	<i>dilibatkan</i>	<i>dilibatkan</i>	-
<i>Pendapat masing-masing Reponden/Informan</i>	<i>Ini merupakan salah satu upaya dari kami, bahwa bawahan juga mempunyai tanggungjawab yang sama dalam pengambilan keputusan perusahaan/organisasi.</i>	<i>Benar Mas, dengan melibatkan bawahan akan di dapatkan bawahan yang bertanggung jawab da kreatif serta produktif</i>	<i>pelibatan bawahan dalam pembuatan, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah menurut saya bentuk pendidikan dan pembelajaran yang baik bagi saya dan teman-teman lainnya, sebab kami diberi kepercayaan dan wewenang untuk mengambil keputusan untuk pemecahan suatu msalah yang kami hadapi”</i>	-
<i>Pimpinan Fakultas besikap evaluatif terhadap Pelibatan dan pemberdayaan karyawan dalam pengambilan keputusan</i>	<i>memperbaiki penyebab penyimpangan dari standar yang ditetapkan.</i>	<i>memperbaiki penyebab penyimpangan dari standar yang ditetapkan.</i>	<i>memperbaiki penyebab penyimpangan dari standar yang ditetapkan.</i>	-

Tabel 4.12
Diagram taksonomi: Pelibatan karyawan dalam sebuah teamwork

Struktur Proposisi	FE	FT	Prodi	Pelanggan
Kegiatan yang terkait dengan aktivitas pelibatan karyawan dalam sebuah teamwork untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.	Terlibat dalam teamwork	Terlibat dalam teamwork	Terlibat dalam teamwork	-
Pendapat masing-masing Reponden/Informan	<i>Tentunya mereka harus bekerja sesuai dengan tugasnya, artinya tim akan dapat berkerja dengan baik/berjalan dengan baik apabila ada kesesuaian antara tanggungjawab, wewenang dengan job diskripsi individu dalam kelompok</i>	<i>Memang tidak seperti pada perusahaan perusahaan besar, tim work disini bekerja dalam rangka untuk membantu meningkatkan kualitas pembelajaran, proses pelayanan, dan membantu pelaksanaan penerapan ISO di UMG serta adanya Badan Penjaminan Mutu yang ada di UMG.</i>	<i>Begini.. kerja tim itu memang tidak semua orang bisa, apalagi dengan berbagai budaya, perilaku dan motivasi, maka sangat sulit untuk berkerja secara tim, tetapi menurut kami setiap individu itu harus memahami dan menyepakati tugas pekerjaan tim, jika tidak maka untuk mencapai kerja tim yang efektif tidak akan terwujud</i>	
Pimpinan Fakultas melibatkan karyawan/bawahannya dalam sebuah teamwork untuk memecahkan masalah dan pengambilan keputusan terutama berkaitan dengan pengembangan kualitas dan pelayanan kepada pelanggan.	<i>Masuk teamwork</i>	<i>Masuk teamwork</i>	<i>Masuk teamwork</i>	

Tabel 4.13.
Diagram taksonomi: Pengembangan Kualitas Total melalui Pendidikan dan Latihan

Struktur Proposisi	FE	FT	Prodi	Pelanggan
Aktivitas pengembang kualitas total melalui pendidikan dan latihan manajerial	Adanya Pendidikan dan Latihan	Adanya Pendidikan dan Latihan	Adanya Pendidikan dan Latihan	-
Pendapat masing-masing Reponden/Informan	<i>Wah sampeyan itu bertanya tapi dijawab sendiri, lawong pertanyaan dan jawaban sudah sampeyan uratakan, ya memang perlu untuk mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi karyawan karena dengan itu upgrade terhadap pola pikir dan keterampilan pada setiap orang itu perlu. Intinya demi kemajuan dengan Pendidikan dan Latihan.</i>	<i>Pokoknya mas yang namanya pendidikan dan latihan itu penting, sebab tanpa itu suatu organisasi tidak akan dapat berjaya dengan baik apalagi bersaing dengan lembaga/organisas yang lain.</i>	<i>Sudah Mas dan itu merupakan bagian dari pelaksanaan TQM/ISO-nya UMG, sehingga benar-benar menjadi organisasi atau perusahaan yang bermutu.</i>	-
Pimpinan Fakultas bersikap evaluatif terhadap pengembangan kualitas total melalui pendidikan dan latihan	<i>Mengirimkan bawahannya mengikuti pendidikan dan pelatihan</i>	<i>Mengirimkan bawahannya mengikuti pendidikan dan pelatihan</i>	<i>Mengirimkan bawahannya mengikuti pendidikan dan pelatihan</i>	-

Apabila dilihat dari tabel tersebut di atas, menjelaskan bahwa pelibatan dan pemberdayaan karyawan, kerjasama tim, pendidikan dan latihan, perbaikan berkesinambungan merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan nilai perusahaan dan nilai konsumen. Menurut Bounds (dalam Mulyadi: 1998,17) mengatakan bahwa paradigma baru yang berkembang dalam manajemen untuk menghadapi lingkungan global adalah: *Costomer Value Strategy, Continous improvement, dan Oganizatal System*. Mengacu pada pendapat Bounds di atas maka dapat digambarkan bahwa paradigma baru tidak jauh berbeda dengan dimensi TQM yang dipergunakan sebagai variabel dalam penelitian ini, yaitu, fokus pada pelanggan, pelibatan dan pemberdayaan karyawan, kerjasama tim, pendidikan dan pelatihan, perbaikan berkesinambungan. Sedangkan menurut (Dubrin, 1991, 421) (dalam Nurlaily, 2001) ada dua faktor yang mempengaruhi prestasi kerja yaitu faktor individual dan organisasional.

Perbaikan yang Berkelanjutan

Selain itu Fakultas Ekonomi selain fokus pada pelanggan, dalam rangka penerapan TQM pada Organisasi yang bergerak dibidang jasa memungkinkan untuk selalu beraktivitas yang dapat memberikan manfaat manajerial, terutama berhubungan Aktivitas dan Pemecahan masalah dan lain-lain. Di bawah ini disajikan dalam bentuk diagram taksonomi. Pada tabel 4.14. di bawah ini.

Kinerja manajemen tingkat menengah (Fakultas) di Universitas Muhammadiyah Gresik

Berdasarkan data hasil wawancara dari berbagai sumber, baik pimpinan fakultas,

katua progam studi, dan pelanggan menunjukkan bahwa dukungan maupun dorongan pimpinan dalam penerapan TQM di lingkungan Fakultas sangat tinggi, Demikian juga dengan komitmennya. Sehingga setiap apa yang dilakukan oleh pimpinan fakultas akan dapat memberikan nilai yang bagus. Dengan demikian akan terjadi penilaian secara obyektif dan bukan karena suka tidak suka dengan seseorang "kata Bagian personalia". Ibu Mila yang Kabag Personalia tersebut juga mengatakan bahwa dengan adanya iso yang diterapkan di Universitas Muhammadiyah Gresik juga bisa digunakan untuk memberikan kontrol atau menilai seseorang bagus atau tidak kinerjanya, yaitu sesuai atau tidak dengan standar ISO tersebut terutama diterapkannya, ISO 9000:2001. Dari jawaban informan di atas kemudian peneliti kembangkan dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya terutama berkaitan dengan sertifikasi ISO-nya, sebab peneliti mengamati belum adanya sosialisasi/pengumuman terkait dengan sertifikasi ISO bagi UMG maupun profil yang dimiliki UMG baik cetak maupun informasi di Web-nya. UMG. Tetapi walaupun belum bersertifikasi tetapi tetap dipakai sebagai acuan dalam melakukan pekerjaan bahkan sejak tahun 2003, hal ini bisa dilihat dari adanya dokument/formulir yang digunakan. Penelitian yang dilakukan secara kuantitatif oleh (Mayasari, 2009), menghasilkan Penerapan TQM pada suatu organisasi berpengaruh terhadap Kinerja manajerial. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dan juga pengamatan secara procedural dan sistematika manajemen dalam menjalankan organisasinya dilakukan dengan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang

berlaku. Misalnya di UMG ada P3AI yang salah satu tugasnya adalah mengontrol dan mengawasi prosedur serta keualifikasi dosen, Prosedur yang ada di ISO, 9000:2001 yang diterapkan UMG sejak tahun 2003 yang fungsinya adalah mengatur memedomani seluruh kegiatan dan aktivitas di UMG dari tingkat atas sampai pada tataran teknis diterapkannya ISO tersebut terutama berkaitan dengan kaulitas manajemen, pada tahun 2009 berdiri yang namanya Badan

Penjaminan Mutu sebagai pengganti dari P3AI yang fungsinya adalah sama dengan P3AI. Sebagaimana taksonomi dibawah ini yang berhubungan dengan kinerja manajerial, bahwa dari pendapat mereka lebih banyak pada keinginan untuk mempertahankan yang ada karena cukup efektif, tinggal memoles sana sini sehingga menjadi pekerjaan yang baik. Hal bisa dilihat pada tabel 4.15. di bawah ini.

Tabel 4.14.

Diagram taksonomi: Aktivitas perbaikan pemecahan masalah.

Struktur Proposisi	FE	FT	Prodi	Pelanggan
Aktivitas berupa kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas perbaikan pemecahan masalah.	Adanya aktivitas Perbaikan	Adanya aktivitas Perbaikan	Adanya aktivitas Perbaikan	-
Pendapat masing-masing Reponden/Informan	<i>Dalam hal ini kami dari fakultas tidak bisa melakukan sendiri, karena kita sulit untuk mengoreksi kesalahan yang kami lakukan, untuk itu kami membutuhkan kerjasama dengan pihak luar yang peduli dan independe dalam hal menilai kekurangan-kekurangan maupun kelemahan yang ada di organisasi ini</i>	<i>Dalam hal ini kami dari fakultas tidak bisa melakukan sendiri, karena kita sulit untuk mengoreksi kesalahan yang kami lakukan, untuk itu kami membutuhkan kerjasama dengan pihak luar yang peduli dan independe dalam hal menilai kekurangan-kekurangan maupun kelemahan yang ada di organisasi ini</i>	<i>Tentunya setiap perusahaan/organisasi perlu untuk melakukan perbaikan yang terus menerus. Demikian juga di fakultas ini juga membutuhkan perbaikan baik pelayanan, proses belajar mengajar, SDM, dan sumber Daya lainnya</i>	-
<i>Pimpinan Fakultas besikap evaluatif terhadap perbaikan kualitas dan memperbaiki penyebab penyimpangan dari standar yang ditetapkan.</i>	<i>memperbaiki penyebab penyimpangan dari standar yang ditetapkan.</i>	<i>memperbaiki penyebab penyimpangan dari standar yang ditetapkan.</i>	<i>memperbaiki penyebab penyimpangan dari standar yang ditetapkan.</i>	-

Tabel 4.15
Diagram taksonomi: Kinerja Manajerial

Struktur Proposisi	FE	FT	Prodi	Pelanggan
Aktivitas yang dilakukan oleh individu dalam kegiatan manajerial	Menilai pimpinan dibawahnya	Menilai pimpinan dibawahnya	Dinilai oleh pimpinan dan pelanggan	Menilai
Pendapat masing-masing Reponden/Informan	<i>Memang tidak mudah untuk mengetahui sikap atau perilaku seseorang dalam hal ini menerima ide-ide dari kita. Tetapi bisa kita lihat misalnya keberhasilan dalam/ketekunan dalam melaksanakan program-program yang telah dicanangkan dan juga untuk pencaangan usuan program</i>	<i>Ya, terutama kita ingin melihat sejauh mana komitmen individu terhadap visi, misi dan tujuan fakultas dlam pengembangannyamaupun prodi. Dengan demikian saya bisa menilai masing-masing, apalagi ada form penilaian bagi setiap individu, terutama memang berkaitan dengan komitmen, kinerja, dan disiplin?</i>	<i>Hasil penilaian kinerja bagus, karena memberikan pelayanan prima ke pelanggan baik mahasiswa maupun non mahasiswa"</i>	<i>kami sering dihadapkn pada prosedur yang membingungkan kami, ketika kami Tanya ke TU katanya bukan tugasnya sebelum ada permohonan untuk menerbitkan transkrip sementara dari prodi, padahal sebelumnya kami ke prodi, oleh prodi disruruh ke TU"</i>
Kinerja manajer tingkat menengah sesuai dengan elemen-elemen Total Quality Management.	<i>Sesuai</i>	<i>sesuai</i>	<i>sesuai</i>	<i>Tidak sesuai</i>

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan TQM harus mendapatkan dukungan, komitmen yang tinggi dari pimpinan, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja juga tinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa,

1. Penerapan TQM akan dapat membantu meningkatkan kinerja manajerial sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh (Sim dan Killough, 1998), yang menemukan pengaruh positif dan signifikan dalam penerapan TQM dan desain sistem akuntansi dengan kinerja manajerial. Hasil ini juga mendukung penelitian (Kurnianingsih, 2000), dan Nurlaily, 2001),
2. Pimpinan bersikap cukup baik terhadap penerapan TQM. Namun yang menarik disini adalah sikap dan komitmen pimpinan terhadap fokus pada pelanggan bukan yang tertinggi, tetapi lebih mendukung terhadap pelibatan dan pemberdayaan karyawan dan merupakan faktor terpenting dalam menerapkan manajemen kualitas Total. Hasil ini mendukung penelitian dari (Rubenstein, 1993) dan (Madu, 1995) dalam (Nurlaily, 2001) menyatakan bahwa perusahaan di Jepang dan Taiwan memfokuskan pada kepuasan karyawan untuk lebih memuaskan kebutuhan pelanggan.
3. Keikutsertaan karyawan/bawahan untuk untuk pembuatan dan pengambilan keputusan merupakan bentuk pembelajaran dalam mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakannya, termasuk wewenang.

Aktivitas ini juga mempengaruhi nilai pelanggan dan kemampuan perusahaan dalam bersaing.

4. Dengan melibatkan karyawan dalam tim kerja juga akan mempengaruhi hasil kerja, dan kinerja seseorang dalam kelompok. Dalam suatu penelitian menyatakan bahwa kerjasama tim menempati urutan yang terendah. Hal ini menunjukkan bahwa pimpinan belum memahami pentingnya kerjasama tim. Tetapi kerjasama tim ini sangat penting karena kerja tim merupakan kunci untuk meningkatkan kinerja.
5. Pendidikan dan latihan diperlukan dalam rangka meningkatkan Sumberdaya manusia yang ada sehingga akan dapat meningkatkan mutu kinerja manajerial atau individual. Tetapi hal ini masih belum dilaksanakan dengan optimal.
6. Perbaikan yang terus menerus akan dapat meningkatkan kinerja dan nilai pelanggan. Intinya pimpinan baik dekan Fakultas Teknik maupun Dekan Fakultas Ekonomi menyadari perlunya perubahan, dalam lingkungan bisnis yang turbulen, manajer/pimpinan dituntut untuk senantiasa melakukan perbaikan berkesinambungan terhadap proses yang digunakan untuk menambah nilai bagi pelanggan.

Saran

Terlepas dari kelemahan dalam penelitian ini, berdasarkan simpulan di atas maka diharapkan pimpinan fakultas harus:

1. Tetap mempunyai komitmen tinggi terhadap TQM, sebab jika pimpinan tidak mempunyai komitmen tinggi maka akan

- menjadi kegagalan dalam penerapan TQM.
2. Lebih mensosialisasi program fokus pada pelanggan. Guna menaikkan organisasi menjadi pesaing yang kuat dilingkungan sendiri maupun lingkungan luar yang lebih luas
 3. Lebih mensosialisasi Quality Control Circle. Dengan melibatkan dan memberdayakan karyawan melalui pembentukan Quality Control Circle atau Gugus Kendali Mutu, akan melatih karyawan bekerja dalam tim, melatih karyawan berpikir secara logika secara ilmiah serta melatih mengemukakan pendapat, kerjasama seperti akan mendorong terciptanya penerapan TQM yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *"Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik"*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ghozali, Imam, 2005. *"Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS"*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Ibrahim, Buddy. 2000. *"TQM (Total Quality Management) : Panduan Menghadapi Persaingan Global"*, Djambatan, Jakarta.
- Ishikawa, Kaoru. 1992. *"Pengendalian Mutu Terpadu"*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Khim Ling Sim and Larry N. Killough. 1998. "The Performance Effects of Complementarities Between Manufacturing Practice and Management Accounting System". *Journal of Management Accounting Research* 10 : 325-346.
- Lubis, Henny Zurika. 2005. *"Pengaruh Total Quality Management Terhadap Kinerja Manajerial dengan Sistem Pengukuran Kinerja Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur di Kawasan Industri Medan)"*, Tesis Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara Medan.
- Mahoney, T. A., T. H. Jerdee and S. J. Carroll. 1963. *"Development of Managerial Performance : A Research Approach"*, Cincinnati : South Western Publ.Co.
- Mardiyah, Aida Ainul dan Listianingsih. 2005. *"Pengaruh Sistem Pengukuran Kinerja, Sistem Reward, dan Profit Center Terhadap Hubungan Antara Total Quality Management Dengan Kinerja Manajerial"*, SNA VIII.
- Mulyadi. 1998. *"Total Quality Management"*, Edisi I, Aditya Media, Yogyakarta.
- and Johny. 1999. *"Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen : Sistem Pelipat Ganda Kinerja Perusahaan"*, Edisi I Aditya Media, Yogyakarta.
- Narsa I Made dan Yuniawati R. D. 2003. *"Pengaruh Interaksi Antara Total Quality Management dengan Sistem Pengukuran Kinerja dan Sistem Penghargaan Terhadap Kinerja Manajerial (Studi Empiris pada PT. Telkom Divre V Surabaya)"*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 6. No. 1, Mei 2003: 18-34.
- Nasution, M. N. 2005. *"Manajemen Mutu Terpadu : Total Quality Management"*, Edisi Kedua, Ghalia Indonesia, Bogor.

- Nurlaily, 2001, "Sikap menejer menenngah terhadap penerapan Total Quality Managentdan pengaruhnya terhadap kinerja Manajerial"
- Purnama, Nursya'bani. 2006. "Manajemen Kualitas Perspektif Global", Ekonisia, Yogyakarta.
- Sari M. S. Dan Siregar H. S. 2008. "Pengaruh Total Quality Management Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Super Andalas Steel", Jurnal Akuntansi, Vol 7, No. 1, Juni 2008 : 1-11.
- Situmorang, Syafrizal Helmi, dkk., 2008, *Analisis Data Penelitian (Menggunakan Program SPSS)*, USU Press, Medan.
- Sugiyono. 2002. "Metode Penelitian Bisnis", Alfabeta, Bandung.
- Suhartini, Dwi. 2007. ""Pengaruh Penerapan Total Quality Management Terhadap Kinerja Manajeria Dengan Budaya Organisasi SebagaiVariabel Moderating Pada PT. Pertamina (Persero) UPMS V Surabaya", Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Vol 8, NO. 2, Juni 2007 :288-297
- Sukmadinata, Nana Syaodih, 2005. *Landasan Psikologi Proses Pendidikan*, Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, Cet. III
- Sularso, R. Andi dan Murdjianto. 2004. "Pengaruh Penerapan Total Quality Management Terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia", Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 6, No. 1, Maret 2004 : 72-81.
- Suprantiningrum dan Zulaikha. 2003. "Pengaruh Total Quality Management Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Sistem Pengukuran Kinerja dan Sistem Penghargaan (Reward) Sebagai Variabel Moderating(StudiEmpiris pada Hotel di Indonesia)", SNA VI.
- Roberts, Harry V. dan Bernard F., Sergesketter. 1993. "Quality is Personal-A Foundation For Total QualityManagement", Macmillan Inc., New York.
- Zulaika. 2008. "Pengaruh Total Quality Management Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. PP. Lonsum Indonesia, Tbk.", Skripsi, Medan.

**OPINION LEADER DAN SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
(Studi di Desa Nglumpang Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)**

Oleh :

NIKEN LESTARINI¹⁾

MUHAMMAD AMIR²⁾

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

Email : lestarini.niken@gmail.com¹⁾

amirmuhammad@gmail.com²⁾

ABSTRAK

Meski Undang-Undang tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mulai dilaksanakan, namun dalam kenyataannya masyarakat secara umum masih belum mengerti tentang Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tersebut. Karena sosialisasi tentang Undang tersebut masih terbatas melalui media massa baik elektronik social media maupun media cetak. Masyarakat di desa perlu sosialisasi secara langsung agar benar-benar paham dan hal ini nampaknya sulit dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karena jumlah pegawainya sangat terbatas. Undang-Undang tentang Jaminan Kesehatan Nasional berhasil disosialisasikan dan dilaksanakan khususnya pada masyarakat desa, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Opinion Leader (pemuka pendapat) atau disebut sebagai pemimpin informal dalam melaksanakan sosialisasi Undang-Undang tersebut sangat penting. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Data diperoleh dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Kemudian data-data tersebut dengan menggunakan metode analisis data dan diverifikasi serta menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

- Ceramah-ceramah agama dan informasi-informasi baru dari lingkungan maupun pemerintah dilakukan oleh Opinion Leader pada kegiatan kelompok-kelompok yang ada pada masyarakat.
- Informasi dan sosialisasi tentang Jaminan Kesehatan Nasional juga dilakukan oleh Opinion Leader pada kegiatan kelompok-kelompok yang ada pada masyarakat.
- Masyarakat mengetahui dan memahami serta memanfaatkan Jaminan Kesehatan Nasional dari Opinion Leader.

Kata Kunci : *Opinion Leader, Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional*

LATAR BELAKANG MASALAH

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting karena menjadi kebutuhan dasar dalam kehidupan ini, masyarakat baik di desa maupun di kota mulai menyadari betapa mahal harganya tubuh yang sehat. Hal tersebut bisa terlihat makin banyaknya tempat-tempat pusat kebugaran, baik fitness, aerobik, berenang, futsal, bulu tangkis dan sebagainya. Semua itu adalah untuk memperoleh badan yang bugar dan sehat karena dengan badan yang bugar dan sehat manusia bisa menikmati kehidupannya.

Terkait dengan kesehatan masyarakat Indonesia, baru-baru ini Pemerintah menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sesuai amanat Undang-Undang No 40/2004, yang diawali dengan jaminan kesehatan per 1 Januari 2014. Sesuai dengan amanat UU No 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Askes dan Jamsostek akan beralih dari badan usaha milik negara menjadi badan hukum publik BPJS Kesehatan (1 Januari 2014) dan BPJS Ketenagakerjaan (1 Juli 2015). Awal pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional

(JKN) dimulai pada tanggal 1 Januari 2014. Secara bertahap, semua penduduk Indonesia akan tercakup dalam program JKN pada tahun 2019. Ada aturan yang mengharuskan semua perusahaan swasta mendaftarkan karyawannya menjadi peserta JKN. Perusahaan yang menolak bisa dikenai sanksi administratif. Sejumlah peraturan pemerintah dan keputusan presiden terkait dengan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Selasa (24/12/2013). Dengan demikian, jaminan kesehatan nasional siap dilaksanakan pada 1 Januari 2014. Meskipun program tersebut telah mulai dilaksanakan, namun dalam kenyataannya masyarakat secara umum masih belum mengerti tentang Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tersebut. Karena sosialisasi tentang Undang tersebut masih terbatas melalui media massa baik elektronik maupun media cetak. Masyarakat di desa perlu sosialisasi secara langsung agar benar-benar paham dan hal ini nampaknya sulit dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) karena jumlah pegawainya sangat terbatas. Sehubungan dengan permasalahan tersebut maka agar Undang-Undang tentang Jaminan Kesehatan Nasional berhasil disosialisasikan dan dilaksanakan khususnya pada masyarakat desa, maka peran *Opinion Leader* (pemuka pendapat) atau disebut sebagai pemimpin informal dalam melaksanakan sosialisasi Undang-Undang tersebut sangat penting. Oleh karena itu perlu adanya penyusunan metode sosialisasi yang efektif agar masyarakat

benar-benar paham, kemudian mendaftarkan dirinya sebagai peserta JKN sehingga kesehatan masyarakat benar-benar dijamin sesuai harapan pemerintah dan masyarakat.

TUJUAN KHUSUS

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan sosialisasi oleh *Opinion Leader* atau pemimpin informal kepada masyarakat tentang Jaminan Kesehatan yang sudah mulai dilaksanakan oleh pemerintah pada tanggal 1 Januari 2014 melalui Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan sementara masih banyak masyarakat yang belum paham bahkan belum mengetahui sama sekali tentang Jaminan Kesehatan Nasional tersebut.
2. Membantu pemerintah agar program atau Undang-Undang tentang Jaminan Kesehatan Nasional bisa tersosialisasikan secara langsung kepada masyarakat terutama masyarakat di desa yang kurang tersentuh oleh media dan apabila masyarakat keberatan dengan program tersebut hendaknya menjadi masukan bagi pemerintah untuk mengkaji ulang Undang-Undang tersebut sehingga sesuai dengan aspirasi dan tidak memberatkan masyarakat secara luas.

URGENSI PENELITIAN

Terhitung 1 Januari 2014, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan menjadi bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang mulai dilaksanakan di Indonesia. Tahap pertama dipastikan yang menjadi peserta JKN adalah masyarakat tidak mampu yang masuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau jamkesmas, anggota TNI/Polri dan pensiunannya, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan

pensiunannya, peserta jaminan pemeliharaan kesehatan Jamsostek. Bagi yang belum terdaftar bisa mendatangi kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (sebelumnya bernama kantor PT Askes) terdekat. Setiap penduduk wajib menjadi peserta JKN dan membayar iuran yang sesuai dengan pelayanan kesehatan yang diinginkan yakni iuran perbulan masing-masing Rp. 25.000,- agar bisa mendapatkan layanan kelas 3. Untuk layanan kelas 2 Rp. 42.500,- dan untuk layanan kelas 1 Rp. 59.500,-. Bila ingin dirawat diVVIP atau VIP juga bisa tinggal membayar biaya cosharing sisanya pada saat perawatan. Masyarakat yang belum menjadi peserta Askes atau jamkesmas mengira bahwa dengan adanya JKN dari pemerintah mereka akan memperoleh sebagai peserta secara gratis, karena kondisi perekonomian mereka kebanyakan tidak jauh berbeda dengan masyarakat yang memperoleh Jamkesmas. Oleh karena itu sosialisai yang langsung berhadapan dengan masyarakat sangat penting dan mendesak untuk segera dilakukan karena Undang-Undang tersebut telah dilaksanakan. Dengan berbagai pengalaman Pemimpin Informal di desa sangat tepat untuk membantu pemahaman masyarakat tersebut.

STUDI PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian tentang metode sosialisasi *opinion Leader* kepada masyarakat tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN), tentu belum pernah dilakukan karena masih merupakan hal baru di Indonesia. Karena itu, pengungkapan temuan penelitian terdahulu

tentang masalah ini tidak bisa dihadirkan dalam tinjauan pustaka ini. Penelitian-penelitian atau kajian-kajian yang mirip atau mendekati dengan alur penelitian barangkali bisa mewarnai di dalam bagian ini. Penelitian atau kajian tentang peran *Opinion Leader* dalam kehidupan politik yang dilakukan oleh Nurudin 2004 menyatakan :

1. *Opinion Leader* sangat berpengaruh di dalam mempengaruhi proses kebijakan politik di Indonesia. Beberapa kiai di desa-desa bahkan sangat menentukan tanda gambar apa yang dipilih oleh warga desa di daerah tersebut. Misalnya karena kiaiinya memilih Partai Persatuan Pembangunan (PPP), bukan tidak mustahil pengikutnya juga akan memilih partai itu. Apalagi jika sang kiai selalu memakai aayat-ayat suci untuk melegitimasi pilihannya. Tak terkecuali jika di daerah terpencil Sulawesi Utara, Maluku, atau Papua, pemimpin Kristen/Khatolik akan memilih Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB), pengikutnya akan melakukan hal serupa. Contohnya bagaimana K.H. Atabik Maksum (Pengasuh PP Krapyak Yogyakarta) sebagai pendukung Golkar atau anjuran pemerintah mempengaruhi para pengikutnya untuk memilih partai tersebut di zaman Orde Baru.
2. *Opinion Leader* juga bisa menolak kebijakan pemerintah. Pada Era Orde Baru, pemerintah sangat getol untuk kampanye Golkar. Bahkan Golkar satu-satunya partai satu-satunya yang disponsori pemerintah. Dengan menggunakan sistem *floating mass* nyaris setiap daerah diharuskan memilih tanda gambar Golkar. Seorang kiai yang berafiliasi PPP, tentu akan menolaknya.

Bahkan secara terang-terangan ia menjadi pendukung PPP dan berperan aktif dalam kampanye. Meskipun toh ia harus “bermusuhan” dengan pemerintah. Sekedar contoh adalah bagaimana peran K.H. Alawy Muhammad di Madura yang mendukung PPP. Perilaku kiai ini jelas menolak kebijakan pemerintah yang memaksa masyarakat memilih Golkar.

3. *Opinion Leader tidak boleh dipandang sebelah mata agar berbagai keinginan pemerintah*, misalnya pembangunan belum berhasil. Pemerintah tidak akan bisa mencapai keberhasilan tanpa dukungan pemimpin opini. Sebab kunci utama keberhasilan progrm pemerintah terutama di desa-desa terletak juga di pundak pemimpin opini tadi.

B. KAJIAN TEORI

Sosialisasi adalah proses sosial tempat seorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku orang-orang di sekitarnya. Sosialisasi dalam penelitian ini adalah cara-cara *opinion leader* dalam memberikan pemahaman dan pembentukan sikap untuk berperilaku kepada masyarakat desa Nglumpang Mlarak Kabupaten Ponorogo terkait dengan Jaminan Kesehatan nasional yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Kajian tentang Pemimpin Informal dalam Ilmu Komunikasi disebut *Opinion Leader* atau pemimpin opini, yang termasuk dalam hal ini adalah para tokoh-tokoh masyarakat desa, kiai ulama, bahkan dukun dan sebagainya. Di awal perkembangannya muncul di Amerika seperti yang telah ditunjukkan oleh **Paul Lazarfeld** dan kawan-kawan. Oleh karena itu, model-

model arus informasi yang lebih mendekati untuk membahas pemimpin opini ini adalah model *two step flow* asumsi dasarnya adalah media massa tidak langsung mengenai audience tetapi melalui pemimpin opininya. Kemudian pemimpin itu meneruskan informasi tersebut kepada para pengikutnya. (Ardial, 2008:198). Peran *Opinion Leader* dalam kehidupan sosial di Indonesia juga tidak bisa dibilang rendah. Karena pemimpin opini sangat dipercaya masyarakatnya, ia ikut menentukan berbagai perilaku masyarakatnya. Di Indonesia pemimpin opini ikut menentukan apakah Program Keluarga Berencana (KB) yang dikampanyekan pemerintah pada tahun 70-an sukses atau tidak. Nyata bahwa kesuksesan program KB tidak lepas dari peran pemimpin opini ini. Bahkan, secara terang-terangan di kantor Kepala Desa di Patalan Jetis Bantul Yogyakarta ditulis bahwa para kiai dan tokoh masyarakat lain mendukung gerakan program KB pemerintah. Bahkan menyatakan bahwa KB halal dan sah. Kampanye lewat tulisan ini penting agar masyarakat yang semula ragu terhadap program KB tidak sangsi memakai alat kontrasepsi. Kiai punya alasan dikatakan sebagai pemimpin opini yang punya kekuatan. M. Munandar Soelaiman (1998:148) mengemukakan setidaknya-tidaknya bisa dilihat dari dua hal :

1. Memiliki kemampuan perasaan kemasyarakatan yang dalam dan tinggi (*highly developed social sense*).
2. Selalu melandaskan sesuatu pada kesepakatan bersama (*general consensus*).

Itu berarti kiai dianggap punya kekuatan yang tinggi di dalam mempengaruhi masyarakat karena bisa memahami apa yang

dibutuhkan dan diinginkan masyarakatnya. Kiai sanggup menjawab berbagai macam persoalan yang ingin diketahui masyarakat. Kiai juga mampu “mengasuh masyarakat dengan menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Kiai dianggap orang yang punya pengaruh karena keilmuannya. Ia ahli dalam bidang agama sehingga sangat dibutuhkan masyarakat. Bahkan ia menjadi patron masyarakat atau ia sanggup melayani kliennya (masyarakat). Bahkan ia bisa berperan sebagai *pressure group* dan *rulling class* di pedesaan. Ia mampu menolak kebijakan pemerintah yang bertolak belakang dengan adat istiadat, aspirasi, atau norma di wilayahnya. Ia dengan kemampuan kharismaniknya melakukan perlawanan terhadap kebijakan tertentu. Oleh karena itu metode sosialisasi dari Pemimpin Opini kepada masyarakat desa tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah, perlu dilakukan agar masyarakat desa benar-benar memahami dan menjalankan aturan tersebut.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena data yang hendak dikumpulkan dalam

penelitian ini adalah tentang metode atau cara-cara sosialisai para tokoh masyarakat atau pemimpin informal yang dalam ilmu komunikasi disebut *opinion leader* atau *pemuka pendapat* kepada masyarakat di desa tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014. Jelas yang dikehendaki adalah informasi dalam bentuk deskripsi tentang bagaimana cara-cara atau metode sosialisasi yang digunakan oleh *opinion leader* tersebut tentang JKN.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Nglumpang Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, dengan alasan bahwa di desa tersebut peran pemimpin informal atau tokoh masyarakat sangat besar baik melalui musyawarah di desa atau kelompok tani atau menghadiri pengajian-pengajian yasinan yang diadakan setiap minggu dan setiap dusun di desa tersebut. Contohnya baru- baru ini di desa Nglumpang terjadi perubahan upah para pekerja khususnya para buruh tani dan sebagai penentu besarnya perubahan upah tersebut adalah para tokoh masyarakat dan masyarakatpun menerima perubahan tersebut secara *legowo* atau menerima dengan ikhlas baik bagi masyarakat pekerja maupun bagi masyarakat pengguna tenaka kerja. Upah tenaga kerja kasar atau buruh tani yang semula perhari, untuk pekerja perempuan dari Rp. 24.000,- menjadi Rp. 30.000,- dan untuk pekerja laki-laki Rp. 30.000,- menjadi Rp. 36.000,-

C. Data dan Sumber Data

Data yang digali lewat penelitian ini, sebagaimana disebutkan di atas adalah tentang bagaimana metode atau cara-cara sosialisasi kepada masyarakat desa yang digunakan oleh para tokoh masyarakat atau *opinion leader* tentang Jaminan Kesehatan Nasional. Oleh karena itu sumber data primer akan digali melalui para tokoh masyarakat di desa Nglumpang Mlarak dan data pendukung dari masyarakat dan dari Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan di Ponorogo.

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah beberapa tokoh masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi JKN biasanya melalui pengajian yasinan rutin baik yang diadakan oleh kelompok ibu-ibu maupun kelompok bapak-bapak. Beberapa ibu anggota yasinan juga beberapa bapak sebagai anggota kelompok tersebut. Penentuan informan tersebut akan dilakukan melalui teknik *snowball* (bola salju), dimana penggalan data akan dilakukan kepada para tokoh masyarakat tanpa menentukan jumlahnya, tetapi mencukupkan diri dengan kualitas informasi yang diberikan, artinya jika informasi dirasa sudah jenuh (tidak ada informasi baru lagi) dari informan yang diinterview, maka penggalan data akan dihentikan. Sementara itu, jika informasi yang digali dari para tokoh masyarakat atau pemimpin informal tersebut masih terus berkembang dan memenuhi kebaruan sesuai dengan fokus penelitian, maka penggalan data akan terus bergulir dan terus mencari informan baru sesuai dengan petunjuk yang

diberikan informan lain yang telah diwawancarai. Demikian juga dengan informan pendukung yaitu anggota kelompok yasinan atau kelompok tani dan masyarakat.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk menggali data tentang berbagai metode sosialisai oleh para *opinion leader* kepada masyarakat desa tentang Jaminan Kesehatan Nasional. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali data tentang berbagai pandangan dan pendapat tentang cara atau metode sosialisasi *opinion leader* kepada masyarakat tentang JKN di desa Nglumpang, yang melatari pandangan dari berbagai aspek, sesuai dengan ruang dan waktu subyek. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk pendokumenan baik berupa catatan kecil, buku, arsip tentang penelitian tersebut.

F. Metode Analisis Data

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, mengacu pada pemikiran Max Weber yang mengatakan bahwa, pokok penelitian bukanlah kepada gejala-gejala sosial, tetapi lebih menekankan kepada memahami makna-makna yang terkandung dibalik tindakan individu yang mendorong terwujudnya gejala-gejala sosial tersebut. (Istbsyaroh, 2004:14). Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui proses induksi-interpretasi-konseptualisasi. Proses analisis dalam penelitian ini telah dimulai

sejak peneliti menetapkan fokus permasalahan, dan likoasi penelitian, kemudian menjadi intensif ketika turun ke lapangan. Data dalam catatan lapangan akan dianalisis dengan cara melakukan penghalusan bahan empirik yang masih kasar ke dalam laporan penelitian. Selanjutnya peneliti akan melakukan penyederhanaan data menjadi beberapa unit informasi yang rinci tetapi sudah terfokus dalam ungkapan asli informan sebagai penampakan perpektif emiknya. Dengan demikian, laporan lapangan yang detail (induksi) menjadi data yang mudah dipahami, dicarikan makna, sehingga ditemukan pikiran apa yang tersembunyi dibalik cerita informan (interpretasi) dan akhirnya dapat diciptakan suatu konsep (konseptualisasi). Proses analisis akan berjalan melalui kategorisasi atau konseptualisasi data yang terus digali, sambil membandingkan dan mencari hubungan antar konsep sampai melahirkan hipotesis-hipotesis. Proses ini akan bergerak tidak secara linear lagi, tetapi berputar secara interaktif antara satu konsep dengan konsep yang lain, atau antara kategori satu dengan yang lain. Proses ini juga akan bergerak sejak awal pengumpulan data, bekerja secara simultan, semakin kompleks atau rumit, tetapi sekaligus semakin mengarah pada proses munculnya hipotesis dan sampai titik tidak terdapat lagi informasi baru. (Hamidi, 2004: 80-81). Penyusunan metode sosialisasi *opinion leader* kepada masyarakat tentang Jaminan Kesehatan Nasional dirumuskan dari berbagai informasi dan data yang diperoleh, menjadi sebuah pedoman metode sosialisasi agar JKN berjalan dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebagaimana telah dijelaskan dalam metode penelitian yaitu dengan cara wawancara mendalam, observasi. Informan dalam penelitian ini adalah beberapa tokoh masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi JKN biasanya melalui pengajian yasinan rutin baik yang diadakan oleh kelompok ibu-ibu maupun kelompok bapak-bapak. Beberapa ibu anggota yasinan juga beberapa bapak sebagai anggota kelompok tersebut. Penentuan informan tersebut akan dilakukan melalui teknik *snowball* (bola salju), dimana penggalian data akan dilakukan kepada para tokoh masyarakat tanpa menentukan jumlahnya, tetapi mencukupkan diri dengan kualitas informasi yang diberikan, artinya jika informasi dirasa sudah jenuh (tidak ada informasi baru lagi) dari informan yang diinterview, maka penggalian data akan dihentikan. Sementara itu, jika informasi yang digali dari para tokoh masyarakat atau pemimpin informal tersebut masih terus berkembang dan memenuhi kebaruan sesuai dengan fokus penelitian, maka penggalian data akan terus bergulir dan terus mencari informan baru sesuai dengan petunjuk yang diberikan informan lain yang telah diwawancarai. Demikian juga dengan informan pendukung yaitu anggota kelompok yasinan atau kelompok tani dan beberapa masyarakat. Informan pertama yang penulis temui adalah Bapak Sulis sebagai perangkat desa / Kepala Urusan Pemerintahan menceritakan bahwa beliau sudah tahu tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tetapi urusan tentang

BPJS kata beliau di Desa Nglumpang diserahkan kepada Bapak Sukadi. Peneliti langsung menemui Bapak Sukadi beliau adalah seorang tokoh masyarakat yang sangat aktif mengisi pengajian baik pada kelompok yasinan ibu-ibu maupun kelompok yasinan bapak-bapak bahkan juga kelompok tani. Selain sebagai perangkat desa / Modin Bapak Sukadi lebih dikenal sebagai tokoh yang sangat dekat dengan masyarakat karena acara-acara di desa seperti manten, tingkeban, sepasaran bayi, dan lain-lain selalu dipercayakan kepada beliau untuk mengisi pengajian dan doa. Bapak Sukadi adalah seorang tokoh desa yang sangat mumpuni dan layak disebut sebagai seorang *Opinion Leader* atau pemimpin opini. Beliau lebih dikenal sebagai Kiai di desa. Sebagaimana dinyatakan M. Munandar Sulaiman dalam Ardial (2008:203) mengemukakan bahwa Kiai bisa dinyatakan sebagai pemimpin opini yang punya kekuatan setidak-tidaknya bisa dilihat dari dua hal yaitu mempunyai kemampuan perasaan kemasyarakatan yang dalam dan tinggi (*highly developed social sense*) dan selalu melandaskan sesuatu pada kesepakatan (*general consensus*). Bapak Sukadi punya kekuatan yang tinggi di dalam mempengaruhi masyarakat karena bisa memahami apa yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakatnya. Beliau sanggup menjawab berbagai macam persoalan yang ingin diketahui masyarakat. Beliau juga mampu “mengasuh masyarakat dengan menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah”. Beliau setiap malam Jum’at mengisi pengajian kelompok Yasinan Ibu-ibu di Dusun III Desa Nglumpang dan ibu-ibu tidak bosan mendengar pengajian beliau

setiap malam jum’at tersebut. Termasuk dalam melakukan sosialisasi tentang Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan BPJS, beliau mengatakan bahwa sosialisasi yang langsung ke desa dari BPJS tidak pernah ada, yang ada sosialisasi di tingkat kecamatan yang dihadiri oleh wakil dari desa dan bapak Sukadi yang mendapatkan tugas dari desa. Setelah mendapatkan sosialisasi dari kecamatan Bapak Sukadi melalui kelompok. Yasinan ibu-ibu dan kelompok yasinan Bapak-bapak baik di dusun Nglumpang I, II, III dan IV beliau memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa karena hampir semua penduduk / Kepala Keluarga menjadi anggota kelompok Yasinan. Beliau mengatakan selain tahu JKN dari kecamatan yang diisi dari BPJS Kabupaten Ponorogo dan Bappeda, beliau juga tahu dari Media Televisi dan radio, bahkan beliau sering mengajak pegawai Puskesmas di Kecamatan Mlarak untuk menjelaskan tentang pentingnya menjaga kesehatan secara preventif dan sosialisasi tentang pentingnya JKN. Menurut Bapak Sukadi apakah masyarakat desa sudah paham tentang JKN beliau menunjuk seorang ibu bernama Welas Asih dan ibu Misratin. Ibu tersebut ternyata memang sudah mendaftar sebagai anggota JKN pada bulan Juni dan Juli 2014 karena ibu tersebut sakit dan opname di Rumah Sakit dan langsung mendaftar agar gratis pengobatannya. Ibu Welas Asih mengatakan bahwa dirinya didaftarkan oleh adiknya yang mempunyai penghasilan lebih tinggi bahkan suaminya juga didaftarkan pada kelas III dengan biaya berdua Rp. 50.000,- setiap bulan. Ibu Misratin mengatakan bahwa untuk membayar biaya opname sangat tinggi sekitar Rp. 6.000.000,- lebih baik jadi anggota

BPJS/JKN yang dianggap lebih ringan bisa ngangsur Rp. 25.000,- setiap bulan. Hal di atas senada dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ninik dari Pengurus BPJS Kabupaten Ponorogo bahwa masyarakat Ponorogo yang mendaftar di BPJS adalah pasien, yaitu orang yang sakit dan dirawat di rumah sakit yang mendaftar secara mandiri / bukan Penerima Bantuan Iuran masih minim yaitu 100 orang yang lain adalah Peserta Jaminan Kesehatan Nasional dari Penerima Bantuan Iuran atau dikenal dengan Jamkesmas (jaminan kesehatan masyarakat miskin). Data peserta JKN di desa hanya peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau Jamkesmas terdiri dari orang yang fakir miskin dan orang tidak mampu dan jumlah peserta yang bukan Penerima Bantuan Iuran terdiri dari Pekerja Penerima Upah, Pekerja Bukan Penerima Upah dan bukan Pekerja tidak ada. Berdasarkan data di desa Nglumpang peserta Jamkesmas berjumlah 648 orang dan sudah diverifikasi Bapeda dengan setor KTP dan KK dan otomatis peserta Jamkesmas tersebut menjadi peserta JKN sehingga pengobatannya bias gratis karena dibantu oleh Pemerintah Daerah Rp. 19.000,- per orang berarti dari Pemerintah Pusat Rp.6.000,- per orang karena kelas III iuran per bula Rp. 25.000,-padahal masih banyak penduduk desa Nglumpang yang masih perlu dibantu dengan Jamkesmas tersebut sekitar 600 orang kata Bapak Sukadi karena dari jumlah penduduk 1.740 orang yang termasuk miskin 1.250 orang. Menurut Bapak Sukadi sebagaimana diungkapkan oleh pegawai Puskesmas bahwa manfaat Jaminan Kesehatan adalah bersifat pelayanan kesehatan perorangan, menyangkut pelayanan promotif, preventif, kuratif,

pelayanan obat bahan medis habis pakai sesuai dengan indikasi medis yang diperlukan. Manfaat Medis yang tidak terikat dengan besaran iuran yang dibayarkan. Manfaat non medis yang ditentukan berdasar skala besaran iuran yang dibayarkan, termasuk di dalamnya manfaat akomodasi. Ambulans diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Dari ungkapan-ungkapan Bapak Sukadi tersebut di atas menunjukkan bahwa sosialisasi dilaksanakan dengan ceramah-ceramah agama dengan pendekatan langsung pada masyarakat tetapi beliau belum pernah dapat brosur atau pamflet dari BPJS untuk sosialisasi beliau tahu dari media TV dan Radio. Selain Bapak Sukadi Tokoh lain yang juga sangat dipercaya masyarakat adalah Bapak Haji Abdul Syukur AzisS.Pd.I beliau adalah seorang guru agama yang aktif juga sebagai kiai di Desa Nglumpang. Beliau juga sering sosialisasi tentang JKN/BPJS, kata Sunarmi (hasil wawancara, tanggal 20 Agustus 2015) sebagai aktivis pengikut pengajian mengatakan bahwa Bapak Haji Syukur pada saat pengajian sering menyampaikan tentang JKN. Lanjut Sunarmi dalam pengajian ibu-ibu sering mendapatkan berita-berita baru dari Bapak Syukur dan Bapak Sukadi karena ibu-ibu gak pernah baca berita kalau nonton TV ya sinetron malam hari karena siang kerja gak sempat nonton TV tapi apabila ada gambar atau film ibu-ibu pasti sangat senang dan lebih paham . Hal senada juga disampaikan oleh ibu Suminten dan Ibu Jumiati bahwa kalau bapak Sukadi atau Bapak Syukur yang menyampaikan dengan film atau gambar ibu-ibu pasti akan lebih mudah mengerti

meskipun kami belum daftar karena harus bayar tiap bulan kami masih berat. (hasil wawancara, 20 Agustus 2015 pada saat pengajian kelompok Yasinan Ibu-ibu). Bapak Sukadi sebagai pemimpin pendapat menyatakan belum daftar sebagai peserta JKN dan perangkat desa juga belum tapi masyarakat sebenarnya paham tentang pentingnya Jaminan Kesehatan Nasional tetapi kalau disuruh membayar iuran masih banyak masyarakat yang keberatan karena kondisi ekonomi mereka. Hasil wawancara dan observasi di atas menunjukkan bahwa Teori Komunikasi dari Lazarsfeld tentang “*Two Step Flow*” yang mempunyai asumsi dasar bahwa efek media massa terhadap masyarakat tidak secara langsung melainkan melalui perantara yaitu *opinion leader* (pemimpin pendapat). Teori ini menyatakan informasi itu datang dari media pindah kedua langkah yang berbeda. Pertama individu (pemimpin pendapat), pemimpin pendapat menyampaikan penafsirannya disamping isi media massa. Komunikasi antar personal adalah kunci untuk mengacu pada proses campur tangan antara pesan langsung media dan reaksi akhir pendengar untuk pesan tersebut. Pemimpin pendapat sangat berpengaruh dalam mengisahkan orang untuk merubah perilaku dan sikap mereka. Pemimpin Opini (*opinion leader*) di desa Nglumpang menggunakan Teori Komunikasi dari Lazarsfeld tentang “*Two Step Flow*” sebagaimana dijelaskan di atas bahwa teori tersebut mempunyai asumsi dasar bahwa efek media massa terhadap masyarakat tidak secara langsung melainkan melalui perantara yaitu *opinion leader* (pemimpin pendapat). Teori ini menyatakan informasi itu datang

dari media pindah kedua langkah yang berbeda. Pertama individu (pemimpin pendapat), pemimpin pendapat menyampaikan penafsirannya disamping isi media massa mampu melakukan komunikasi antar personal sehingga pesan yang disampaikan bisa diterima oleh masyarakat. Masyarakat memahami tentang Jaminan Kesehatan Nasional tidak langsung dari media atau dari BPJS sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial tetapi melalui pemimpin pendapat (*opinion Leader*). Masyarakat memahami tentang Jaminan Kesehatan Nasional melalui *Opinion Leader*, bagi masyarakat penerima jamkesmas terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) tetapi masih banyak dari masyarakat yang belum mendaftarkan sebagai peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (bukan PBI) dikarenakan faktor ekonomi yang hampir sama dengan penerima jamkesmas.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian sebagaimana dipaparkan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

- a. Ceramah-ceramah agama dan informasi-informasi baru dari lingkungan maupun pemerintah dilakukan oleh *Opinion Leader* pada kegiatan kelompok-kelompok yang ada pada masyarakat.
- b. Informasi dan sosialisasi tentang Jaminan Kesehatan Nasional juga dilakukan oleh *Opinion Leader* pada kegiatan kelompok-kelompok yang ada pada masyarakat.

- c. Masyarakat mengetahui dan memahami serta memanfaatkan Jaminan Kesehatan Nasional dari *Opinion Leader*.

www.BPJS.com

http/Jaminan Kesehatan Nasional.com

Saran

1. Untuk melakukan sosialisai selain ceramah perlu komunikasi verbal melalui gambar atau film agar sosialisasi lebih efektif
2. Pemerintah diharapkan melakukan verifikasi ulang bahwa masih banyak masyarakat yang berhak mendapatkan jamkesmas atau menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardial, *Komunikasi Politik*, PT. Indeks, Jakarta, 2010.
- Deddy Mulyana, *Komunikasi Massa, Kontroversi, Teori dan Aplikasi*, Widya Padjadjaran, Jakarta 2008
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi II, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2004
- Jusuf Harsono dan Rony handayanto, *Penyusunan Pedoman Pembuatan Perangkat Kesenian Reyg Ponorogo Sebagai Upaya Mempertahankan dan Melestarikan Budaya Adiluhung*, Laporan Penelitian Hibang Bersaing 2009.
- Nurudin, dkk. *Agama Tradisional, Potret Kearifan Hidup Masyarakat Samin dan Tengger*, Malang, LKIS dan FISIP UMM, 2003
- Rahardjo Hadisasmita, *Membangun Desa Partisipatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006
- Redi Panuju, M.Si., *Komunikasi Organisasi, dari Konseptual-Teoritis ke Empirik*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2001.
- Totok Mardikanto, *Komunikasi Pembangunan, Acuan bagi Akademisi, Praktisi dan Peminat Komunikasi Pembangunan*, UNS Press, Solo, 2010

PEMETAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH MENUJU TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

Oleh:
MUHAIMIN

ABSTRACT

This SPIP mapping aims to present a picture of SPIP the implementation at Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan and to provide improving advice on the weaknesses that found during the SPIP mapping process. The Samples in this SPIP mapping five SKPD which are: DPPKD, Dindikbud, DPU, BAPPEDA, and BPMPPPT, also Inspektorat as key respondent. The data are analyzed with Microsoft Excel. The result of this mapping SPIP shows that SPIP's elements which are control environment and information communication in Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan is adequate. In the other side SPIP's elements which are risk assessment, control activities and monitoring of internal controls are not adequate.

Key word: *SPIP Mapping, SKPD, SPIP elements*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Reformasi di bidang keuangan negara Republik Indonesia telah dimulai dengan ditetapkannya tiga paket perundang-undangan di bidang keuangan negara, yaitu Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara. Selain itu juga Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi menjadi Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi menjadi Undang-undang No. 33 Tahun 2004. Hal tersebut menuntut dilakukannya perubahan-perubahan di berbagai bidang untuk mendukung agar reformasi di bidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan.

Perubahan di bidang akuntansi pemerintahan ini sangat penting karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Untuk mewujudkan *good governance* dalam bidang pengelolaan keuangan negara, diperlukan perubahan dalam sistem pengendalian intern yang harus diimplementasikan di sektor publik atau instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sampai saat ini masih dijumpai keterbatasan dan hambatan dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern. Keterbatasan dan hambatan pelaksanaan sistem pengendalian intern tersebut terutama disebabkan oleh: (Warta Pengawasan BPKP, 2013)

1. Pimpinan Instansi Pemerintah masih mengabaikan pentingnya sistem pengendalian intern.
2. Perspektif pimpinan Instansi Pemerintah dan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) terhadap pelaksanaan sistem pengendalian intern belum mendukung

terciptanya lingkungan pengendalian yang memadai.

3. Kesalahan-kesalahan yang terjadi dilakukan oleh personil baik secara sengaja maupun tidak disengaja.
4. Masih dijumpai adanya praktek-paktek kolusi sehingga sistem pengawasan tidak berjalan secara efektif.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Instansi Pemerintah telah sampai pada suatu tahapan penting dalam membangun organisasi pemerintahan. SPIP yang menekankan pada pentingnya *soft control* melalui pembangunan lingkungan pengendalian dan juga penilaian risiko dapat menjadi bagian dari pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Efektivitas penerapan sistem pengendalian intern sangat dipengaruhi oleh orang sebagai pelaksananya yaitu jajaran pimpinan dan staf di unit organisasi tersebut. Komitmen pimpinan menjadi kunci utama keberhasilan penerapan SPIP. Efektivitas peran dari tiap-tiap pegawai juga menjadi penting dalam menerapkan sistem pengendalian intern untuk bertanggungjawab sesuai dengan tingkatan tanggungjawabnya.

Tujuan Pemetaan SPIP

1. Menyajikan hasil pemetaan berupa gambaran kondisi penerapan SPIP di Pemerintah Kabupaten Pekalongan, bukan untuk memperoleh gambaran keintegrasian antar unsur SPIP
2. Memberikan saran perbaikan atas kelemahan yang ditemukan selama pemetaan pada Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

METODE PEMETAAN SPIP

A. Ruang Lingkup Pemetaan SPIP

Pemetaan SPIP pada tahap awal dilakukan pada tingkat entitas pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan, sehingga gambaran kondisi awal SPIP yang diperoleh adalah suatu kondisi keseluruhan instansi pemerintah.

B. Instrumen Pemetaan

Instrumen dalam kuesioner pemetaan sebanyak 87 pertanyaan dan 158 indikator yang mewakili 5 unsur SPIP dan 26 sub unsur SPIP.

C. Tahapan Pemetaan

Pelaksanaan pemetaan dilakukan dengan tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

D. Metode Pelaksanaan Pemetaan

1. Pemahaman Terhadap Instansi Pemerintah

Langkah pertama dalam tahap pelaksanaan pemetaan adalah memperoleh pemahaman yang memadai tentang profil instansi pemerintah yang dipetakan. Pemahaman ini akan membantu mempercepat pemahaman terhadap kondisi SPIP yang dipetakan. Informasi yang dibutuhkan untuk memperoleh pemahaman tentang profil instansi pemerintah meliputi: (a) Tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah; (b) Struktur instansi pemerintah yang ada; (c) Tujuan instansi pemerintah; (d) Kegiatan Utama Instansi Pemerintah; (e) Permasalahan pokok yang dihadapi instansi pemerintah; dan (f) Proses kegiatan (*business process*) instansi pemerintah.

2. Penetapan Responden

Acuan penetapan jumlah sampel (*purposive sampling*) pada tiap jenjang responden (Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD) adalah sebagai berikut: (a) Kepala Dinas; (b) Seluruh Kepala Subdinas (Kabid); (c) Seluruh Kepala Seksi; dan (d) Minimal tiga orang Staf yang mewakili tiap sub dinas (bidang). Sampel pemetaan SPIP ini meliputi 5 SKPD dengan mempertimbangkan bahwa SKPD tersebut mempunyai fungsi strategis dalam melaksanakan fungsi manajemen (perencanaan, keuangan, pengawasan, dan pelayanan).

3. Pengisian Kuesioner

Setelah memperoleh pemahaman terhadap profil instansi pemerintah yang akan dipetakan, langkah selanjutnya adalah pengisian kuesioner untuk memperoleh persepsi tentang kondisi awal penerapan SPIP di instansi pemerintah tersebut. Informasi tentang kondisi awal penerapan SPIP yang ingin diperoleh adalah terkait dengan pemahaman, pemasyarakatan/diseminasi, penerapan lima unsur SPIP, dan kondisi pencapaian tujuan SPIP. Bentuk kuesioner untuk memperoleh informasi adalah tertutup, dengan menggunakan skala *Likert* 1 – 3. Kuesioner yang telah terisi dengan benar, diberi nomor urut oleh Tim Pemetaan dan dilakukan tabulasi atau *input*, pengolahan. Analisis data dilakukan dengan program aplikasi

spreadsheet yang tersedia yaitu *Microsoft Office Excel*.

4. Analisis Hasil Pemetaan

Hasil analisis terhadap kuesioner pemetaan SPIP berupa sebuah grafik, yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu:

a. Warna Merah : Jika rata-rata skor (*mean*) dari jawaban responden berada pada skor antara **0,00 - 0,49**.

b. Warna Kuning : Jika rata-rata skor (*mean*) dari jawaban responden berada pada skor antara **0,50 - 0,74**.

c. Warna Hijau : Jika rata-rata skor (*mean*) dari jawaban responden berada pada skor antara **0,75 - 1,00**.

Ketiga penggolongan warna tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Warna merah dan kuning menunjukkan potensi adanya kelemahan dalam kondisi awal penerapan SPIP. Atas hal tersebut, perlu dilakukan langkah pengumpulan informasi guna mengidentifikasi penyebab atas kelemahan tersebut.
- Warna kuning menunjukkan adanya persepsi responden bahwa penerapan SPIP cukup memadai;
- Warna hijau menunjukkan adanya persepsi responden bahwa penerapan SPIP sudah memadai. Namun, perlu diyakinkan bahwa persepsi tersebut valid dan telah sesuai dengan SPIP yang dimaksudkan oleh Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008.

Jawaban kuesioner responden yang menunjukkan kelemahan pengendalian intern tersebut, setelah divalidasi dengan wawancara, ditunjukkan fakta kejadiannya/dokumen, atau disertai observasi yang dapat membantu assessor dalam menyimpulkan dan menentukan *area or improvement* penerapan SPIP pada unit kerja Instansi Pemerintah tersebut. Mayoritas jawaban responden terkait dengan urutan (prioritas) pencapaian tujuan SPIP digunakan sebagai dasar penyusunan skala prioritas dalam melaksanakan *Area of Improvement (AOI)*.

HASIL PEMETAAN SPIP

A. Persepsi atas Penerapan SPIP

Persepsi responden atas penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan merupakan informasi tentang kondisi awal penerapan SPIP yang diperoleh dengan pengisian kuesioner pada tahap awal pemetaan. Kuesioner diisi oleh 90 (sembilan puluh) responden. Selain itu dilakukan wawancara kepada responden dari Inspektorat untuk menjawab pertanyaan yang terkait fungsi pengawasan sebanyak 8 orang.

B. Hasil Pemetaan SPIP

Persepsi responden tentang penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan di atas dijadikan bahan awal dalam melakukan wawancara atau metode lainnya (reviu dokumen dan observasi) dalam tahap validasi terhadap 87 parameter SPIP, yang berasal dari pasal-pasal yang ada dalam

Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 tentang SPIP, untuk memetakan area-area yang masih memerlukan perbaikan (*Area of Improvement/AOI*). Berdasarkan hasil validasi terhadap 87 parameter diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Lingkungan Pengendalian

Pemetaan atas unsur lingkungan pengendalian dilakukan terhadap 8 sub unsur lingkungan pengendalian. Untuk mengukur unsur dan sub unsur lingkungan pengendalian dinilai dengan menggunakan 34 (tiga puluh empat) parameter dan 48 (empat puluh delapan) indikator yang pemenuhannya mencerminkan kondisi praktik SPIP khususnya unsur lingkungan pengendalian. Hasil pemetaan yang dilakukan terhadap unsur lingkungan pengendalian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, menunjukkan masih terdapat beberapa kelemahan menyangkut infrastruktur, substansi, dan internalisasi yang merupakan bidang **berwarna kuning** yang artinya unsur lingkungan pengendalian cukup memadai namun masih memerlukan perbaikan.

2. Penilaian Risiko

Pemetaan atas unsur penilaian risiko dilakukan terhadap 2 sub unsur yaitu identifikasi risiko dan analisis risiko, yang terdiri 5 variabel penilaian risiko mencakup penetapan tujuan instansi pemerintah secara keseluruhan, penetapan tujuan pada tingkat kegiatan, identifikasi risiko, analisis risiko, dan pengelolaan risiko selama perubahan (*transformatif*). Hasil pemetaan yang dilakukan terhadap unsur penilaian risiko

pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan yang menyangkut infrastruktur, substansi, dan internalisasi merupakan bidang **berwarna merah** yang artinya unsur penilaian risiko masih memerlukan perbaikan (*area of improvement*).

3. Kegiatan Pengendalian

Pemetaan atas unsur kegiatan pengendalian dilakukan terhadap 11 sub unsur yaitu revidi atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan, pembinaan sumber daya manusia, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, pengendalian fisik atas aset, penetapan dan revidi indikator dan ukuran kinerja, pemisahan fungsi, otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting, pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting. Hasil pemetaan yang dilakukan terhadap unsur kegiatan pengendalian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan yang menyangkut infrastruktur, substansi, dan internalisasi merupakan bidang **berwarna merah**, artinya unsur kegiatan pengendalian masih memerlukan perbaikan.

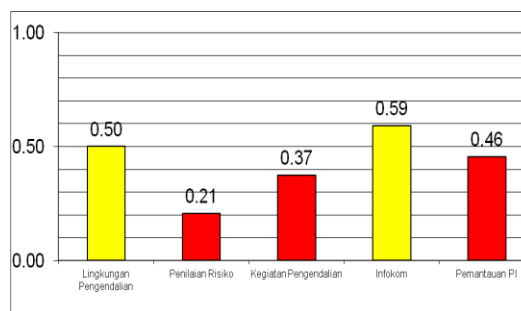
4. Informasi dan Komunikasi

Hasil pemetaan yang dilakukan terhadap unsur informasi dan komunikasi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan, menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan menyangkut infrastruktur, substansi, dan internalisasi merupakan bidang **berwarna kuning**, artinya unsur informasi dan komunikasi cukup memadai namun masih memerlukan perbaikan.

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemetaan atas unsur pemantauan pengendalian intern dilakukan terhadap 3 sub unsur yaitu penerapan umum pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan penyelesaian tindak lanjut. Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan terhadap 3 sub unsur tersebut, masih terdapat beberapa kelemahan menyangkut infrastruktur, substansi dan internalisasi merupakan bidang yang **berwarna merah**, artinya unsur pemantauan pengendalian intern masih memerlukan perbaikan (*area of improvement*). Secara keseluruhan hasil pemetaan terhadap unsur-unsur SPIP dapat digambarkan dalam grafik berikut ini.

Gambar 1
Hasil Pemetaan SPIP



Unsur lingkungan pengendalian mempunyai skor 0,50 dengan warna kuning yang artinya pemerintah daerah telah memiliki lingkungan pengendalian yang cukup memadai, namun masih ada area-area yang memerlukan perbaikan yang meliputi sub unsur: penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, Perwujudan peran APIP yang efektif, dan Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. Sedangkan untuk sub unsur Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat telah dilakukan secara memadai. Unsur Penilaian risiko mempunyai skor 0,21 dengan warna merah artinya pemerintah daerah belum melakukan penilaian risiko yang memadai, area-area yang memerlukan perbaikan meliputi sub unsur: penetapan tujuan instansi pemerintah, identifikasi risiko, dan analisis risiko. Sedangkan untuk sub unsur Penetapan tujuan pada tingkat kegiatan telah dilakukan secara memadai. Unsur kegiatan pengendalian mempunyai skor 0,37 dengan warna merah yang artinya pemerintah daerah belum melakukan kegiatan pengendalian yang memadai terhadap revidi atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan, pembinaan sumber daya manusia, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, pengendalian fisik atas aset, penetapan dan revidi indikator dan ukuran

kinerja, pemisahan fungsi, otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting, pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya, dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting. Unsur informasi dan komunikasi mempunyai skor 0,59 dengan warna kuning, artinya pemerintah daerah telah memiliki saluran informasi dan komunikasi yang cukup memadai, namun masih ada area-area yang memerlukan perbaikan yang meliputi sub unsur: informasi dan komunikasi. Unsur Pemantauan Pengendalian Intern mempunyai skor 0,46 dengan warna merah, artinya pemerintah daerah belum melakukan pemantauan pengendalian intern secara memadai, dan masih harus memperbaiki area-area yang masih lemah meliputi sub unsur penerapan umum pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan penyelesaian audit.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil pemetaan unsur SPIP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Unsur lingkungan pengendalian mempunyai skor 0,50 dengan warna kuning yang artinya pemerintah daerah telah memiliki lingkungan pengendalian yang cukup memadai.

2. Penilaian risiko

Unsur Penilaian risiko mempunyai skor 0,21 dengan warna merah yang artinya pemerintah daerah belum melakukan penilaian risiko (identifikasi dan analisis risiko) yang memadai.

3. Kegiatan pengendalian

Unsur kegiatan pengendalian mempunyai skor 0,37 dengan warna merah yang artinya pemerintah daerah belum melakukan kegiatan pengendalian yang memadai terhadap 11 unsur sub unsur kegiatan pengendalian.

4. Informasi dan komunikasi

Unsur Informasi dan Komunikasi mempunyai skor 0,59 dengan warna kuning, artinya pemerintah daerah telah memiliki saluran informasi dan komunikasi yang cukup memadai.

5. Pemantauan

Unsur Pemantauan Pengendalian Intern mempunyai skor 0,46 dengan warna merah, artinya pemerintah daerah telah cukup melakukan pemantauan pengendalian intern, namun masih perlu memperbaiki area-area yang masih lemah meliputi sub unsur penerapan umum pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan penyelesaian audit.

Saran

Atas dasar hasil pemetaan dalam area yang memerlukan perbaikan (AOI) pada pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan disarankan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan untuk memperkuat infrastruktur, internalisasi SPIP antara lain:

1. Lingkungan pengendalian

a) Menyusun aturan perilaku dan menetapkannya sebagai aturan

perilaku yang menjadi panduan bagi seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan serta mensosialisasikannya;

b) Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi yang mempertimbangkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang diperlukan untuk setiap jabatan.

2. Penilaian risiko

Menyusun kebijakan dan penerapan penilaian risiko dalam penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD, yang mempertimbangkan tujuan SKPD secara keseluruhan dan penilaian risiko yang berasal dari faktor intern dan ekstern, serta menetapkan suatu struktur pengendalian penanganan risiko.

3. Kegiatan Pengendalian

Menyusun SOP (*Standard Operation Prosedure*) berupa kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan kegiatan pengendalian pokok Instansi Pemerintah;

4. Informasi dan Komunikasi.

Menindaklanjuti dengan baik setiap pengaduan, keluhan, dan pertanyaan mengenai layanan instansi pemerintah dan memastikan bahwa saran dan rekomendasi APIP ditindaklanjuti dengan memperbaiki masalah atau kelemahan yang diidentifikasi.

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Melakukan rekonsiliasi secara berkala antara SAKD (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah) dan SIMAK BMD (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Daerah).

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
Tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah.
- Peraturan Kepala Badan Pengawasan
Keuangan Dan Pembangunan Nomor:
Per-500/K/2010 Tentang Pedoman
Pemetaan (*Diagnostic Assessment*)
Terhadap Penerapan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah Di
Lingkungan Instansi Pemerintah
- Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan
Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan
nomor 6 tahun 2011 Tentang Struktur
Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
- Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 55 tahun
2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten Pekalongan.
- Victor Sotorus dan Edi Timbul (2009), Modul
Sistem Pengendalian Manajemen,
Pusdiklatwas BPKP.
- Warta Pengawasan (2013), Membangun Good
Governance Menuju Clean Government,
Majalah Triwulanan Edisi Khusus HUT
ke 30, ISSN: 0854-0519, BPKP.

MEA : SAATNYA PONOROGO MENCURI PERHATIAN

Oleh:

IUSUF HARSONO

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

ABSTRAK

MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) adalah program bersama diantara para anggota negara-negara Asean yang sudah disepakati bersama beberapa tahun yang lalu. Akhir tahun ini adalah kesempatan akhir bagi para anggota dalam mempersiapkan diri untuk membuka hubungan secara lebih luas diantara sesama anggota. Boleh dikata hampir tidak ada batas antar negara. Setiap warga negara anggota diberi kebebasan untuk melintas batas dan beraktifitas sebagaimana yang sudah dilakukan di negeri sendiri. Kesiapan pemerintah daerah seperti Ponorogo akan selalu menjadi pertanyaan pertama oleh siapapun ketika kita bicara tentang MEA. Apalagi pada akhir tahun ini di hampir 200 kota dan Propinsi sedang menyelenggarakan Pilkada serentak yang dampak social-ekonomi-politiknya akan terasa sampai pertengahan th 2016.

Kata kunci : *MEA, pemerintah daerah, kepariwisataan, ponorogo*

PENDAHULUAN

Akhir tahun ini MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) betul – betul akan dilaksanakan secara efektif. Berbagai kebijakan pemerintah pusat sudah disiapkan untuk menyambut pelaksanaan MEA tersebut, terutama pengembangan infrastruktur yang ada mulai pembuatan jalan tol sampai pengembangan pelabuhan udara internasional yang akan menyambut tamu-tamu pelancong yang diharapkan membawa devisa miliaran dollar yang akan masuk ke Indonesia melalui kegiatan kepariwisataan. Bahkan untuk beberapa negara seperti Rusia, Korea Selatan dan 30 negara lainnya, yang selama ini warganegaranya jarang melakukan kunjungan wisata ke Indonesia, pemerintah pusat memberikan kebijakan bebas visa kunjungan. Kebijakan ini diambil karena pemerintah berasumsi bahwa sector kepariwisataanlah yang akan bisa mendongkrak capaian perekonomian nasional Indonesia.

Kesungguhan pemerintah pusat tidak perlu diragukan lagi karena ekonomi nasional yang akan menjadi taruhan. Pelaksanaan MEA yang sudah menjadi agreement multilateral bersama-sama negara ASEAN di satu sisi akan meningkatkan harapan kemampuan ekonomi nasional kita, tetapi di sisi lain akan bisa terjadi sebaliknya, tingginya antusiasme masyarakat Indoensia untuk beperrgian ke luar negeri akan menjadi blunder kebijakan dan capaian ekonomi nasional kita. Berbagai kemudahan dan fasilitas untuk bepergian ke luar negeri akan semakin merangsang masyarakat Indoensia untuk melancong dan belanja ke negara-negara ASEAN, dan itu berarti akan terjadi pengurasan cadangan devisa negara karena kekurangseimbangan neraca perdagangan negara kita dengan negara-negara tetangga. Dari berbagai wacana yang muncul dengan diterapkannya MEA tersebut akhirnya memunculkan pertanyaan: “ dimanakah peran

kota – kota kecil seperti Kabupaten Ponorogo ?”.

PEMBAHASAN

‘Kue MEA’ sudah didepan mata, suka atau tidak suka, setiap daerah akan berebut kue tersebut, tidak peduli kota kecil atau kota besar. Beberapa kota besar sudah diperkirakan akan mendulang dollar, ringgit, bath, peso, yuan, yen, won dll karena kunjungan wisatawan dari negara-negara pemilik mata uang tersebut. Propinsi Bali, DIY, Medan, Bandung, Makassar, Jakarta dan Surabaya termasuk diantara propinsi dan kota besar yang akan menikmati kunjungan wisatawan negara-negara tersebut karena daerah-daerah tersebut memang selama ini sudah menjadi destinasi kunjungan wisatawan tidak hanya negara-negara Asean tetapi juga Australia, Eropa dan Amerika. Kota-kota kecil seperti kabupaten Ponorogo yang agak terpencil diperkirakan tidak termasuk yang kebagian ‘kue MEA’ tersebut. Hal ini sangat masuk akal karena sbb: Ponorogo jauh dari pelabuhan udara Internasional; Ponorogo belum dikenal oleh masyarakat internasional; akses jalan menuju Ponorogo adalah tidak mudah. Namun demikian bukan berarti Ponorogo tidak mempunyai peluang untuk menikmati ‘kue MEA’ tersebut. Potensi yang dimiliki oleh kabupaten Ponorogo adalah sbb : Ponorogo mempunyai seni reyog yang sangat atraktiv ; Ponorogo mempunyai pondok modern Gontor; Ponorogo adalah termasuk salah satu Lumbung TKI terbesar di Indonesia.

Beberapa potensi tersebut selama ini lepas dari pengamatan dan analisa siapapun. Dua potensi terakhir di atas akan menjadi

katalisator penting dalam industri wisata kita. Sebagai daerah asal seni reyog yang oleh Unesco disebut sebagai *the biggest mask dance* , seni reyog mempunyai banyak kelebihan dibanding dengan seni tradisional dari bangsa lain oleh karenanya seni ini akan menjadi potensi wisata yang handal dari kota ini. Berbagai seni telah terelaborasi dalam seni reyog ini seperti; seni tari, seni rupa, seni music, seni drama dll.

Menurut *Alip (2015: 35)* seni ini tidak hanya merupakan sebuah tontonan tetapi juga merupakan sebuah tuntunan pada masyarakat luas. Dengan berbagai kelebihan yang menarik maka seni ini akan menjadi daya tarik utama kunjungan wisata asing ke Ponorogo. Seni ini menjadi sangat menarik karena sangat etnik dan ‘ hanya ‘ bisa dimainkan oleh orang Ponorogo, terutama pada bagian-bagian tertentu seperti sebagai ‘pembarong’.

Seni yang sudah ada sejak awal abad 19 menurut Serat Centini (*Kuntjaraningrat: 1994*) terus berkembang sampai sekarang bahkan keberadaannya sudah merambah di hampir seluruh propinsi di Indonesia. Pondok modern ‘Darussalam’ yang dikenal dengan sebutan Gontor juga merupakan destinasi wisata yang lain. Gontor sangat terkenal di negara-negara seperti : Malaysia, Brunei, Singapore dan negara-negara Islam yang lain karena para santrinya juga banyak yang berasal dari negara-negara tersebut. Sangat dimungkinkan keluarga para santri sangat tertarik untuk berkunjung ke Ponorogo. Ponorogo sangat dikenal sebagai kota lumbung atau asal para TKW terbesar ketiga di Indonesia. Hal ini sangat menguntungkan karena banyak diantara para TKW dan para

majikan yang mempunyai ikatan emosional sehingga dimungkinkan keluarga para juragan ingin mengunjungi daerah asal para TKW dari Ponorogo. Dalam beberapa kasus bisa dijumpai adanya kunjungan keluarga juragan TKW yang berkunjung ke rumah keluarga TKW di Ponorogo dan ini menunjukkan bahwa telah terjadi adanya ikatan emosional antara TKW dengan keluarga juragan di negara TKW bekerja.

Peran Pemerintah

Terdapat empat pilar negara di era globalisasi ini : *pemerintah, NGO, Industri dan Perguruan Tinggi*. Pemerintah mempunyai otoritas untuk menggandeng pillar-pillar tersebut untuk mengembangkan dan mempromosikan industri kepariwisataan di kabupaten ini. Pemerintah kabupaten bisa menentukan visi dan target kepariwisataan dalam jangka pendek, menengah dan panjang karena dalam negara yang liberal fungsi pemerintah memang menciptakan pasar bagi industri. Perguruan Tinggi dengan para akademisinya bisa melakukan pemetaan atas persoalan, potensi dan strategi yang perlu disusun pemerintah daerah dalam mengembangkan sector kepariwisataan. Dengan kemampuannya dibidang penelitian maka ia bisa menjadi penengah antara pemerintah dengan masyarakat sebagai sasaran kebijakannya.

Menurut *Phillip Quarles (1989: 157)*, hasil penelitian menjadikan pemerintah mengetahui keinginan-keinginan masyarakat dan pada akhirnya akan menghasilkan keputusan-keputusan yang lebih baik. Keberadaan seni reyog menjadi sangat dinamis, menurut *Simatupang (2010: 127)*

diantaranya karena banyaknya lulusan akademi yang mengelola sanggar-sanggar kesenian di Ponorogo. NGO (Non Government Organisation) dengan kompetensinya dan keahliannya yang khusus bisa melakukan aksi lapangan dan pemberdayaan dalam pengembangan sector wisata.

Menurut *Pranarka (1996: 263)*, konsep pemberdayaan memusatkan perhatian pada kenyataan bahwa manusia atau sekelompok manusia dapat mengalami kendala dan hambatan dalam proses dan gerak aktualisasi eksistensinya. Maka perhatian gerakan pemberdayaan terutama adalah usaha menciptakan kondisi yang memberikan kemungkinan bagi setiap manusia untuk dapat mmenunaikan tugas aktualisasi eksistensinya. Gerakan pemberdayaan manusia menjadi gerakan perjuangan kebudayaan yang memberikan kemungkinan bagi setinggi-tingginya, seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya aktualisasi eksistensi manusia. Di Ponorogo terdapat Yayasan Reog dan Dewan Kesenian yang bergerak di bidang seni. Dua lembaga non pemerintah penggiat seni tersebut diharapkan bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan seni tradisional Ponorogo.

Partisipasi disini menurut *Mardikanto (2010: 152)* adalah tumbuhnya kesadaran masyarakat arti penting pembangunan bukan hanya bagi pemerintah tetapi juga bagi perbaikan mutu-hidup masyarakat itu sendiri. Sementara industri kepariwisataan seperti : perajin, sanggar seni, hotel, home industry kuliner, transportasi tradisional dan modern bisa menangkap peluang yang telah dibukakan jalan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Kerjasama empat pillar di

atas tidak bisa diabaikan begitu saja karena masing-masing mempunyai otoritas dan kapabilitas yang saling membutuhkan. Pemerintah pada masa kini tidak bisa lagi bermain sebagai '*single fighter*' yang bermain dengan konsep *one man show*.

Dengan berbagai keterbatasan SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimiliki baik secara kualitatif maupun kuantitatif maka pemerintah membutuhkan partner kerja agar kinerja di sector kepariwisataan bisa mencapai kinerja secara lebih efektif dan efisien dengan tingkat produktifitas yang tinggi sesuai dengan harapan. Memilih kepariwisataan sebagai sector penting untuk dikembangkan dalam rangka menyambut pelaksanaan MEA karena peluang kota kecil seperti Ponorogo adalah pada sector tersebut, mengingat kabupaten Ponorogo bukanlah kota industry dan perdagangan seperti Surabaya, Jakarta dan Bandung. Lebih dari itu adalah adanya kecenderungan bahwa orang asing berkunjung ke Indonesia selama ini dalam rangka berwisata dan yang menjadi obyek wisata cenderung hal-hal yang berbau tradisional.

PENUTUP

Industri kepariwisataan bisa menjadi program penting pemerintah kabupaten karena Ponorogo mempunyai banyak keunggulan di bidang tersebut dibanding wilayah-wilayah lain sekitar Ponorogo. Kabupaten yang berpenduduk lebih dari 1 juta orang ini mempunyai berbagai sumberdaya yang bisa dieksplorasi lebih jauh untuk menjadi destinasi wisata andal diantaranya adalah : Sumber daya alam (Telaga Ngebel dll), Sumber daya cultural

(seni reyog dll) dan sumber daya manusia yang kreatif (perajin reyog dan industry kuliner dll). Tinggal bagaimana pemerintah daerah kabupaten bersama pillar-pillar yang lain bisa mensinergikan tiga kekuatan utama potensi wisata kabupaten Ponorogo tersebut.

Tanpa prakarsa pemerintah daerah, karena punya otoritas, maka kekuatan-kekuatan tersebut akan menjadi potensi yang bercerai berai. Saatnnya kota kecil seperti Ponorogo mencuri perhatian masyarakat internasional dengan kekayaan tradisionalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Philliip Quarle van Ufford, Frans Huskon, Tendensi Dan Tradisi Dalam Sosiologi Pembangunan, PT Gramedia, Jakarta, 1989.
- Alip Sugianto, Eksotika Pariwisata Ponorogo, PT Samudra Biru, Yogyakarta, 2015.
- Totok Mardikanto, Komunikasi Pembangunan (Acuan Bagi Akademisi, Praktisi, dan Peminat Komunikasi Pembangunan), UPT UNS Press, Surakarta, 2010.
- Onny S. Prijono dan A.M.W Pranarka, Pemberdayaan (Konsep, Kebijakan dan Implementasi), CSIS, Jakarta, 1996.
- Koentjaraningrat, Kebudayaan Jawa, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- Lono Simatupang, Pergelaran (Sebuah Mozaik Penelitian Seni-Budaya), Jalasutra, Yogyakarta, 2013.

**OPTIMALISASI PERAN KNPI DALAM PROBLEMATIKA SAMPAH SEBAGAI
PERWUJUDAN TERCIPTANYA KOTA SEHAT
DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN**

Oleh:

DIDIK ARIBOWO¹⁾

ENDI PERMATA²⁾

PUTRO FERRO FERDINANT³⁾

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Email: aribowo82@yahoo.co.id¹⁾

endi_permata@yahoo.com²⁾

oom_pheo@yahoo.com³⁾

ABSTRAK

Kuliah Kerja Nyata Pemberdayaan Peran Masyarakat (KKN PPM) dilaksanakan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan melalui diversifikasi kegiatan yang dapat mengikutsertakan, dan menumbuhkan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan. Kelompok organisasi masyarakat dengan struktur yang jelas dan diakui secara nasional melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). KNPI merupakan wadah pengembangan generasi muda non-partisan yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda di wilayah Kecamatan atau komunitas sosial sederajat, yang terutama bergerak dibidang kepemudaan. Tujuan dan target capaian KKN PPM Untirta akan mengambil lokasi di sekitar Kecamatan Jombang kota Cilegon mempunyai tujuan sebagai berikut, memberikan pengetahuan tentang manajemen pengelolaan bank sampah, memberikan pemahaman tentang kebutuhan peralatan pengolah sampah, menyiapkan masyarakat (pemuda) untuk menghadapi persaingan global melalui pelatihan bisnis dan wirausaha, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan IPTEKS dimasyarakat secara individu dan kelompok, optimalisasi peran KNPI untuk membentuk pemuda yang mandiri dan kreatif. Target yang ingin dicapai dari kegiatan KKN PPM Untirta adalah terbentuknya kelompok pemuda mandiri secara ekonomi dan menjadi teladan bagi teman sebaya, melahirkan wirausahawan muda, terbentuknya feasibility study bengkel di Kecamatan Jombang Kota Cilegon.

Kata kunci : *KNPI, Feasibility study, Kuliah Kerja Nyata*

PENDAHULUAN

Kota Cilegon terdiri dari delapan kecamatan dan 43 kelurahan, dengan ruas jalan sepanjang 280,20 km, beriklim tropis dengan temperatur berkisar antara 21,1°C – 34,1°C dengan curah hujan rata-rata 114 mm per bulan dengan topografi berbukit. Pemanfaatan lahan di Kota Cilegon sebagian besar masih berupa lahan tegalan (39,74%), dan lahan untuk pemukiman (23,62%). Pemanfaatan lahan lainnya terdiri atas pertanian (17,24 %), industri (15,44%),

kehutanan (1,50 %), perkebunan (0,57 %), rawa (0,06 %), dan lain-lain (1,82%). Sumber daya alam Kota Cilegon relatif terbatas namun potensi investasi yang strategis didapatkan dari jasa kepelabuhanan dari kegiatan industri. Kehadiran lebih dari 70 perusahaan asing dan 35 perusahaan dalam negeri memberikan dampak yang luas bagi pertumbuhan ekonomi Kota Cilegon.

Tahun 2007 penduduk Kota Cilegon adalah sebanyak 320.253 jiwa, meningkat sebesar 8,5 % pada Tahun 2008 menjadi

346.059 Jiwa kemudian pada Tahun 2009 meningkat sebesar 10,92 % menjadi sebanyak 383.854 jiwa dan pada Desember tahun 2010 meningkat menjadi 422.898 jiwa.

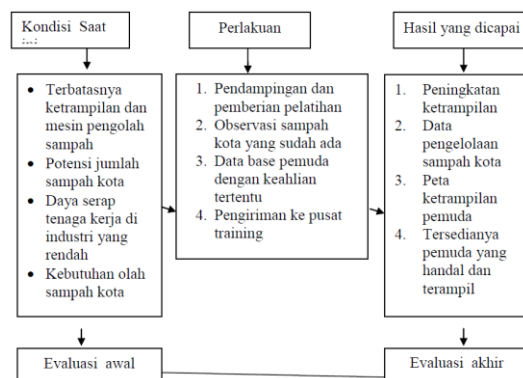
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, 461.725 warga yang tak bersekolah itu terbagi atas 129.698 laki-laki, dan 332.026 perempuan. Mereka tersebar di delapan kabupaten/kota se-Banten. Kabupaten Serang sebanyak 96.890 orang, Kabupaten Lebak 88.216 orang, Pandeglang 46.678 orang, Kota Serang 27.266 orang dan Kota Cilegon 8.270 orang. Pemerintah Kota Cilegon saat ini terus berupaya mengurangi angka pengangguran, salah satunya dengan memperbanyak Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP). Bahkan Pemkot tengah melakukan pelatihan kepada 120 pengelola LKP, agar dapat menciptakan para lulusan dari generasi muda yang berprestasi. kemampuan seluruh harus lebih ditingkatkan, agar dapat dapat dijadikan sebagai acuan para perusahaan yang membutuhkan lulusan berprestasi, sesuai bidang masing – masing.

Data Bapeda Cilegon menunjukkan Pada tahun 2010 bidang pendidikan yang terdiri dari Indeks Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata Lama Sekolah (RLS) mempunyai Indeks Pendidikan sebesar 87,30. Jadi pencapaian pembangunan bidang pendidikan tahun 2010 sebesar 87,30 persen dari pencapaian maksimal. Pencapaian indeks tersebut mengalami kenaikan cukup berarti jika dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 87,27 persen. Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut status pekerjaan utama di Kota Cilegon Tahun 2010 menjadi berusaha sendiri

(22,64%) buruh/karyawan (48,26 %) pekerja bebas (7,90 %) pekerja tidak dibayar (6,11%). Berdasarkan analisa kondisi diatas, permasalahan sosial yang terjadi di Kota Cilegon dapat diidentifikasi dan ingin diperbaiki melalui program KKN-PPM adalah sebagai berikut :

1. Tingkat pendidikan formal masyarakat Kota Cilegon rata hanya sampai sekolah menengah pertama.
2. Jumlah pengangguran banyak meskipun banyak industri dibuka di Cilegon.
3. Kurangnya indeks pembangunan manusia (*Human Index*) di Kota Cilegon
4. Tingginya angka anak putus sekolah
5. Keterbatasan pengetahuan/keterampilan yang kerap dihadapi masyarakat.

Kondisi masyarakat dengan tingkat pendidikan yang sebagian besar lulusan sekolah dasar dan menengah pertama atau setingkat madrasah tsanawiyah maka dibutuhkan program KKN-PPM yang mudah diaplikasikan dan untuk jangka panjang dapat memberikan kontribusi untuk pembangunan. Kerangka pemecahan masalah dari permasalahan yang ada diatas adalah



Gambar 1. Kerangka pemecahan masalah

Penguatan sumber daya manusia, khususnya dalam peningkatan sumberdaya manusia perlu didorong dan disiapkan kemampuannya. Kegiatan atau program yang bisa memberi manfaat dan menjadi media pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya:

1. Memberikan ketrampilan tentang manajemen pengelolaan sampah
2. Memberikan gambaran tentang pengoperasian mesin pengolah sampah
3. Memberikan pengetahuan tentang barang bekas yang mempunyai nilai jual dari sampah dengan memanfaatkan menjadi aneka produk kerajinan
4. Memberikan pendampingan terhadap pendirian usaha pengelolaan bank sampah
5. Mengembangkan kegiatan ekonomi produktif dengan pendayagunaan semua potensi yang tersedia di lingkungan sekitar.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan dimulai dari pelepasan secara resmi oleh Universitas, pelatihan, analisa kelayakan, sampai ekspso handicraft di kelurahan Sukmajaya, Panggungrawi, dan Masigit kecamatan Jombang Kota Cilegon. Berikut ke 3 Kelurahan tempat pelaksanaan KKN PPM.

A. Kelurahan Sukmajaya

Pada dasarnya masyarakat Kelurahan Sukmajaya memiliki tali persaudaraan yang erat, walau kebanyakan adalah para pendatang. Tingkat ekonomi penduduk kelurahan Sukmajaya sangatlah bervariasi, dari

bawah, menengah, hingga menengah keatas. Hampir kebanyakan yang rendah. Sedangkan untuk sumberdaya manusia di Kelurahan Sukmajaya itu bagus dan prospektif. Tetapi masyarakat kurang aktif dan kurang inovatif sehingga masih ada yang menganggur. Kelurahan Sukmajaya, adalah kelurahan yang dimana letaknya dekat dengan pusat Kota Cilegon, dengan demikian tingkat ekonomi masyarakat Kelurahan Sukmajaya terbilang baik. Untuk aspiratif masyarakat Kelurahan Sukmajaya sangat baik dan besar, itu terbukti pada saat pelatihan pengelolaan sampah terpadu sangat terlihat jelas masyarakat sangat antusias mengikutinya. Masyarakat Kelurahan Sukmajaya sangat kuat kemauannya dan ingin merubah keadaannya agar lebih baik dan sejahtera.

B. Kelurahan Panggungrawi

Pada dasarnya masyarakat Kelurahan Panggungrawi memiliki tali persaudaraan yang erat, dikarenakan setiap lingkungannya koperatif mementingkan kepentingan bersama-sama dan menjaga lingkungannya secara bersama-sama. Tingkat ekonomi penduduk kelurahan Panggungrawi cukup bervariasi, dari bawah, menengah, hingga menengah keatas, sedangkan untuk sumberdaya manusia di Kelurahan Panggungrawi itu cukup baik. Sarana dan prasarana kebersihan di Kelurahan Panggungrawi, sarana tempat membuang sampah pusat itu tidak ada, alat-alat kebersihan yang minim, sehingga pembuangan sampah diletakan pada suatu wadah seperti tempat pembuangan akhir

yang besar kemudian dibiarkan berlalu yang membuat terjadinya polusi udara dan banjir di sebagian wilayah Kelurahan Panggungrawi

C. Kelurahan Masigit

Dari sisi ekonomi, Kelurahan Masigit memiliki perekonomian yang sudah cukup maju dan beragam. Dari mulai bercocok tanam hingga pekerjaan yang harus memiliki kemampuan khusus. Sumberdaya manusia di Kelurahan Masigit cukup baik dan prospektif. Masyarakat aktif dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari bukan hanya dalam pekerjaan namun juga kegiatan kemasyarakatan. Bidang pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Masigit adalah sebagian besar merupakan pedagang, pegawai kantor swasta maupun negeri dan lain-lain. Kelembagaan Kemasyarakatan di Kelurahan Masigit merupakan bagian dari potensi yang mempunyai andil besar pada perubahan Kelurahan ini. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan berbagai program dan kegiatan untuk memberdayakan masyarakat di bidang pembangunan berjalan dengan baik di Kelurahan ini. Program program yang ada bukan sebatas menggerakan partisipasi swadaya masyarakat dalam bidang pembangunan tetapi banyak program seperti memfasilitasi pengrekrutan tenaga kerja, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam merencanakan pembangunan di Kelurahan Masigit.

Kegiatan Pelatihan Komposter Pupuk Organik

Kegiatan pelatihan komposter pupuk organik dilaksanakan dengan mengundang pemuda di tiga kelurahan yaitu kelurahan Sukmajaya, Panggungrawi, dan Masigit. Sebelum dilaksanakan pelatihan komposter pupuk organik, mahasiswa dan PK KNPI Jombang bertemu untuk penyampaian gagasan dan sosialisasi ke masyarakat kecamatan Jombang bahwa akan ada pelatihan pengelolaan sampah melalui pelatihan komposter pupuk organik di aula Kecamatan Jombang, dengan peserta pelatihan berasal dari 3 kelurahan yaitu kelurahan Sukmajaya, Panggungrawi, dan Masigit beserta mahasiswa.



Gambar 2. Peserta menghadiri pembukaan pembekalan

Setelah peserta mendapatkan pelatihan komposter pupuk organik ditingkat kecamatan, peserta KKN mengundang kembali di masing-masing kelurahan untuk melaksanakan pelatihan berkelanjutan komposter pupuk organik bersama pemuda dan masyarakat di masing-masing kelurahan. Materi yang disampaikan berdasarkan hasil pelatihan komposter pupuk organik yang

sudah dilaksanakan sebelumnya di kecamatan jombang.



Gambar 3. Peserta melihat cara proses pembuatan pupuk organik



Gambar 4. Peserta mensosialisasikan proses pembuatan pupuk organik dengan komposter bersama warga masyarakat

Pelatihan Handicraft dari sampah an-organik

Tujuan kegiatan pelatihan handicraft dari sampah an-organik yaitu sampah an-organik di sini yang digunakan bahannya yaitu material bungkus plastik minuman kemasan dapat digunakan sebagai handicraft beraneka ragam bentuk yang bernilai ekonomi tinggi, dan seara tidak langsung

mengurangi sampah berbahan plastik menjadikan lingkungan tersebut menjadi lingkungan yang lebih sehat dan meminimalkan limbah yang akan mencemari lingkungan sekitar.



Gambar 5. Peserta mengikuti pelatihan pembekalan

Metode Pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

- Mengkoordinasi dengan RT setempat untuk mengadakan acara sosialisasi tentang pelatihan handicraft dari sampah an-organik.
- Menyebarkan undangan kepada warga untuk menghadiri acara tersebut.
- Memberikan pengarahan tentang cara pembuatan handicraft dari hasil pengolahan material bungkus plastik minuman kemasan.
- Mempraktekan langsung pengelolaan sampah an-organik untuk dijadikan sebagai handicraft yang bernilai ekonomi tinggi.

- e. Mengedukasikan kepada warga masyarakat agar dapat memilah sampah an-organik untuk dijadikan sebagai handicraft
- f. Mengajak warga masyarakat untuk lebih mencintai lingkungan yang bersih dengan tidak membuang sampah organik disembarang tempat tetapi dikumpulkan tersendiri dirumah untuk bisa dimanfaatkan sebagai handicraft.



Gambar 6. Peserta mensosialisasikan pelatihan kepada masyarakat

KESIMPULAN

Kuliah Kerja Nyata Pemberdayaan Pada Masyarakat dengan tema "Optimalisasi Peran KNPI Dalam Problematika Sampah Sebagai Perwujudan Terciptanya Kota Sehat dan Berwawasan Lingkungan", dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Terlaksananya kegiatan karena adanya beberapa faktor pendukung antara lain :

1. Kerjasama yang baik Pemuda dan masyarakat dengan wadah KNPI untuk tata kelola sampah di 3 Kelurahan yaitu Sukmajaya, Panggungrawi, dan Masigit.

2. Pemilihan Lokasi unit usaha tata kelola sampah yang nantinya dikelola oleh PK KNPI dan masyarakat kecamatan Jombang sudah tepat karena sudah dilakukan analisa studi kelayakan.
3. Pelatihan komposter pupuk organik dan pelatihan handicraft yang dilaksanakan sudah cukup baik dan peserta harus lebih sering untuk melakukan latihan secara mandiri di masing-masing kelurahan agar dapat membantu meningkatkan penghasilan tambahan bagi keluarga

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen masyarakat kecamatan Jombang, khususnya di Kelurahan Sukmajaya, Kelurahan Panggungrawi, Kelurahan Masigit yang telah bersedia mengizinkan menjadi lokasi KKN-PPM Untirta Tahun 2015 di Kota Cilegon. Kepada seluruh mahasiswa peserta KKN-PPM 2015, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam melaksanakan kegiatan KKN-PPM 2015 di Kecamatan jombang Kota Cilegon Propinsi Banten.

Kepada pengurus Pimpinan Kecamatan KNPI Jombang diucapkan terima kasih atas kerjasamanya mensukseskan kegiatan KKN-PPM 2015 di Kecamatan Jombang Kota Cilegon. Kepada Pimpinan LPPM Untirta diucapkan terima kasih atas dukungannya dalam melancarkan serta mensukseskan kegiatan KKN-PPM 2015 di Kecamatan jombang Kota Cilegon sehingga dapat berlangsung sesuai dengan jadwal yang telah tersusun.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Data Kependudukan Kelurahan
Sukmajaya Tahun 2015
- Anonim, Data Kependudukan Kelurahan
Panggungrawi Tahun 2015
- Anonim, Data Kependudukan Kelurahan
Masigit Tahun 2015
- Anonim, Data Kependudukan Kecamatan
Jombang Tahun 2015

PROFIL SEKTOR INFORMAL DI KABUPATEN PONOROGO

Oleh:

ASIS RIAT WINANTO¹⁾

KHUSNATUL ZULVA WAFIRO TIN²⁾

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

Email: asiserwe@gmail.com¹⁾

Khusnafeump@gmail.com²⁾

ABSTRAK

Sektor informal di Ponorogo merupakan fenomena sehari-hari yang kontroversial. Tapi masalah sektor informal tidak dapat dibiarkan saja, karena hari jumlah mereka tumbuh dalam jumlah dan akan menghasilkan terangnya ruang publik. Untuk itu, data yang diperlukan dan informasi tentang karakteristik sektor informal, seperti historis usaha mereka, motivasi untuk masuk ke sektor ini, dari mana mereka berasal, latar belakang pendidikan dan pengalaman, dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil dari sektor informal di Ponorogo. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tampak bahwa kelompok usia bahwa sebagian besar responden berada pada kelompok usia 20-4; jenis usaha informal diikuti, mayoritas angkringan kopi jual, mayoritas status perkawinan menikah dengan tingkat pendidikan didominasi oleh lulusan SMA. Menjadi sebagian dari mereka berasal dari daerah asal Ponorogo; dengan keuntungan rata-rata harian Rp. 300.000, -. Modal awal media yang digunakan rata-rata Rp 1.000.000 - Rp. 3.000.000, -; dengan pekerjaan panjang yang tinggal selama lebih dari 10 tahun.

Kata Kunci: *Profil, Sektor Informal, Ponorogo*

PENDAHULUAN

Sektor informal di Kabupaten Ponorogo merupakan fenomena keseharian yang bersifat kontroversial. Di satu sisi, pemegang otoritas kabupaten sering bersifat tidak ramah pada mereka ("mengusir") mereka dari tata ruang kota, tetapi di sisi lain mereka dijadikan sumber pendapatan bagi pemerintah kabupaten melalui pungutan retribusi dan dapat mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di perkotaan. Data dari pemerintah Kabupaten Ponorogo menunjukkan bahwa jumlah pelaku usaha sektor informal di seputaran jalan baru berjumlah 107 pelaku usaha sektor informal (Dinas Indakop dan UKM Kabupaten Ponorogo, 2014).

Sudah barang tentu diperlukan kebijakan dalam rangka pemberdayaan

sektor informal tersebut. Untuk itu, diperlukan data dan informasi tentang karakteristik sektor informal, seperti historis usaha mereka, motivasi memasuki sektor ini, dari mana mereka berasal, latar belakang pendidikan dan pengalaman, dan lain sebagainya. Berangkat dari pemaparan tersebut diatas maka masalah penelitian akan berkisar pada profil (karakteristik) sektor informal di Kabupaten Ponorogo.

Adapun perumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

"Bagaimana profil sektor informal di Kabupaten Ponorogo?"

KAJIAN LITERATUR

2.1. Sektor Informal

Sektor informal merupakan sektor ekonomi yang terdiri dari unit usaha

berskala kecil yang memproduksi serta mendistribusikan barang-barang dan jasa dengan tujuan pokok menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan bagi dirinya yang dibatasi oleh faktor kapital, baik fisik maupun ketrampilan. (Sethuraman, 1981)

Karakteristik sektor informal dan sektor formal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Karakteristik sektor informal dan sektor formal

Sektor Informal	Sektor Formal
1. Mudah dimasuki	1. Sulit dimasuki
2. Tergantung pada sumberdaya lokal	2. Tergantung pada sumberdaya luar
3. Sistem pemilikan keluarga	3. System pemilikan perusahaan
4. Beroperasi dalam skala kecil	4. Beroperasi dalam skala besar
5. Padat karya dan teknologi adaptif	5. Padat modal dan menggunakan teknologi import
6. Ketrampilan diperoleh dari luar pendidikan formal	6. Memerlukan ketrampilan yang berasal dari sekolah formal
7. Tidak teratur dan bersifat kompetitif	7. Pasar terproteksi (ijin perdagangan)

Sumber ILO, 1972 dalam Siregar

Dari tabel tersebut diatas terlihat bahwa sektor informal dapat didefinisikan sebagai unit usaha yang berskala kecil yang menghasilkan dan men- distribusikan barang dan jasa dengan tujuan utama untuk menciptakan kesempatan kerja dan penghasilan bagi dirinya sendiri.

2.2. Sektor Informal Perkotaan

Sektor informal atau ekonomi informal adalah kebalikan dari usaha formal yang berusaha untuk memperoleh penghasilan (income) di luar aturan dan regulasi institusi kemasyarakatan dalam tatanan sosial yang ada yaitu pemerintah sehingga dianggap sebagai sesuatu yang ilegal. Sektor informal perkotaan adalah mereka para pekerja di sektor informal yang berada di wilayah perkotaan. Mereka sebagian besar adlaah para pendatang yang tergiur oleh gemerlap kehidupan di kota, terpengaruh oleh rekan sedesanya yang lebih dahulu sukses, disamping karena semakin langkanya lapangan kerja dan kehidupan di pedesaan sudah sangat sulit dan terbatas.

2.3. Peluang Kesempatan Kerja di Sektor Informal.

Beberapa penelitian mengenai sektor informal, menunjukkan bahwa daya serap tenaga kerja di sektor ini cukup signifikan. Bahkan di beberapa negara, daya serap sektor informal justru melebihi sektor formal. Di kota-kota besar di Indonesia daya serap sektor ini rata-rata mencapai 40% dari angkatan kerja yang ada. Tingginya daya serap tenaga kerja di sektor informal selain karena banyaknya pekerja yang menginginkan (baik secara sukarela maupun terpaksa) masuk ke sektor informal, juga karena karakteristik sektor itu sendiri.

METODE PENELITIAN

3.1. Fokus Penelitian

Dengan memperhatikan kondisi diatas serta mengacu pada permasalahan, maka fokus dalam penelitian ini adalah: untuk memperoleh informasi tentang profil sektor informal di Kabupaten Ponorogo. Dan subyek penelitian ini adalah pelaku usaha sektor informal di Kabupaten Ponorogo

3.2. Penetapan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di seputaran jalan baru Kabupaten Ponorogo. Pemilihan daerah penelitian ini dilakukan secara purposive, yaitu pemilihan secara sengaja dengan maksud untuk menemukan sebuah daerah yang relevan dengan tujuan penelitian, dengan pertimbangan bahwa permasalahan-permasalahan yang dihadapi di tempat ini lebih kompleks dibandingkan dengan permasalahan yang dihadapi oleh tempat lainnya. Selain itu di seputaran jalan ada fenomena semakin banyaknya sektor informal.

3.3. Data dan Sumber Data

Dokumen sebagai sumber data didasarkan pada data primer yang diperoleh dari wawancara mendalam (indepth interview) kepada informan sebagai responden dan pihak terkait.

3.4. Informan dan Teknik Penentuannya

Dalam penelitian ini informan yang dipilih adalah pelaku usaha informal yang mempunyai aktifitas/kegiatan di seputaran jalan baru Kabupaten Ponorogo. Sedang jumlah informan sebanyak 10 informan dengan harapan bisa lebih intens dalam

menggali informasi yang berkaitan dengan penelitian.

3.5. Sumber dan Jenis Data

Data-data pada penelitian ini, sebagian besar berupa kumpulan kata-kata dalam wujud kalimat faktual sederhana atau bisa juga berwujud paragraf penuh, foto-foto dan sedikit data berwujud angka dengan olahan sederhana.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

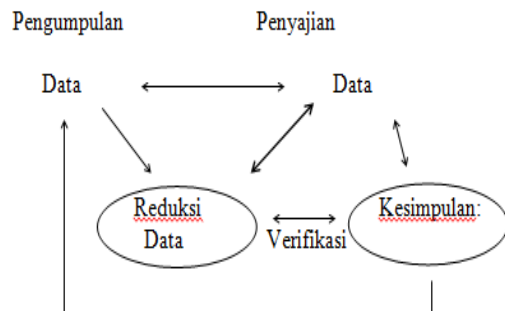
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, secara umum dapat dibagi dalam dua kelompok. Pertama, metode interaktif, yang terdiri dari wawancara mendalam (indepth interview). Kedua, metode non interaktif, berupa pencatatan dokumen atau arsip (Widyaningrum 2002).

Wawancara menggunakan model diskusi sejar, peneliti sebagai si belajar, dan bersikap tidak menjaga jarak. Wawancara bisa dilakukan berkali-kali sesuai dengan keperluan, kejelasan dan kecukupan informasi yang dijelajahi. Peneliti tidak bisa percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan informan, melainkan perlu melakukan cek dan cek ulang secara silih berganti dari hasil wawancara dengan pengamatan di lapangan, atau dari informan yang satu ke informan yang lain.

3.7. Analisa Data

Teknik analisis data yang akan digunakan pada penelitian ini mengacu pada analisis model interaktif yang terdiri dari tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan (Miles

dan Huberman, 1992). Penyederhanaan dalam metode analisa data disederhanakan dalam bagan berikut:



Sumber: Miles dan Huberman (1992)

Disamping itu pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena menurut Kirk dan Miller (Moleong, 2003) penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dan kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai kegiatan usaha sektor informal di Ponorogo, perlu disampaikan/disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini pelaku usaha sector informal yang dijadikan responden (informan) sebanya 10 pelaku usaha sector informal.

4.1.1. Jumlah Responden Menurut Distribusi Umur

Dari pelaku usaha informal sebagai responden, terlihat bahwa kelompok umur responden yang paling banyak berada pada kelompok umur 20-40 tahun sebesar 50%, diikuti oleh kelompok umur 40-60 tahun sebesar 45%, dan yang paling sedikit adalah kelompok umur dibawah 20 tahun sebesar 5%.

4.1.2. Jenis Usaha Responden

Bila diperhatikan bahwa responden pelaku usaha informal mempunyai jenis usaha yang beraneka ragam. Hal ini dapat dilihat pada prosentase jenis uaha yang dijalani, yaitu sebanyak 50% berjualan angkringan kopi, 10% berusaha dengan berjualan nasi pecel, martabak dan tahu petis 10%, dan masing-masing 1% yang berusaha di penjualan nasi dan bakmi goreng, juice buah, sate ayam.

4.1.3. Jumlah Responden Menurut Status Perkawinan

Jumlah responden menurut status perkawinannya dapat terlihat pada hasil prosentase berikut: bahwa responden pelaku usaha informal yang berstatus kawin/menikah sebanyak 80%, sedangkan yang belum kawin/menikah hanya sebesar 10% dan responden yang status perkawinannya adalah cerai (janda) sebesar 10%.

4.1.4. Jumlah Responden Menurut Tingkat Pendidikan

Jumlah responden pelaku usaha informal menurut tingkat pendidikannya, dapat dilihat prosentase berikut ini. Pelaku usaha informal yang paling banyak adalah lulusan SLTA atau sederajat sebanyak 45%, kemudian disusul oleh tingkat pendidikan SD sebanyak 30% dan lulusan SMP sebanyak 25%.

4.1.5. Jumlah Responden Menurut Asal Daerah

Responden pelaku usaha informal menurut asal daerah terbanyak adalah dari daerah Kabupaten ponorogo sendiri, meskipun juga ada yang berasal dari kabupaen/kota lain. Responden yang berasal dari kabupaten Ponorogo sebanyak 70%, yang berasal dari kabupaten/kota Solo sebanyak 10%, dan masing-masing 5% berasal dari Malng dan Jakarta.

4.1.6.Keuntungan Rata-Rata yang dihasilkan Responden

Berdasarkan data yang diperoleh pada saat penelitian dilakukan, diperlihatkan bahwa besarnya keuntungan rata-rata yang dihasilkan oleh responden adalah keuntungan rata-rata perhari kurang dari Rp 100.000 sebanyak 10% , kemudian keuntungan rata rata Rp 100.000 – Rp 300.00,- sebanyak 60%, dan keuntungan rata-rata diatas Rp 300.000,- sebanyak 30%.

4.1.7.Modal Awal yang dibutuhkan Responden

Berdasarkan hasil penelitian, modal awal yang digunakan untuk berusaha bagi pelaku sektor informal adalah sebagai berikut: modal awal kurang dari Rp. 1.000.000 sebanyak 20%, yang menggunakan modal awal sebesar Rp. 1.000.000 - Rp. 3.000.000 sebanyak 50%, yang menggunakan modal awal Rp. 3.000.000 – Rp. 5.000.000 sebanyak 10% dan yang menggunakan modal awal diatas Rp.5.000.000 sebanyak 20%.

4.1.8.Lama Usaha yang dilakukan Responden

Berdasarkan hasil penelitian, lama waktu yang digunakan untuk berusaha bagi pelaku sektor informal adalah sebagai berikut: lama usaha yang dilakukan kurang dari 5 tahun sebanyak 35%, lama usaha 5 – 10 tahun sebanyak 10%, dan yang lama usahanya lebih dari 10 tahun sebanyak 55%.

4.2. Pembahasan Hasil

Dari hasil penelitian yang dilakukan, terlihat ada 8 (delapan) variabel penting yang dapat menggambarkan karakteristik pelaku usaha sektor informal yang beraktifitas/berusaha di seputaran jalan baru. Kedelapan variabel yang diteliti yaitu karakteristik umur responden, jenis usaha (aktivitas) sektor informal, status perkawinan, tingkat pendidikan, asal daerah, keuntungan rata-rata per hari,

modal awal untuk usaha dan lama usaha yang dilakukan.

Berikut ini akan dibahas satu persatu dari variabel tersebut diatas, sehingga terlihat usaha sektor informal yang biasa juga disebut sebagai pedagang kaki lima.

1. Karakteristik usia pelaku usaha sektor informal

Apabila dilihat dari usia pelaku usaha sektor informal ini terlihat bahwa pelaku usaha sektor informal ini lebih banyak didominasi oleh penduduk dalam usia produktif. Terlihat sebanyak 50% dari responden yang dipilih berusia 20 – 40 tahun, kemudian diikuti oleh penduduk dalam usia yang lebih dewasa, yaitu kisaran 40 – 60 tahun sebanyak 45%. Dan paling sedikit usia pelaku usaha sektor informal adalah penduduk di bawah usia 20 tahun sebanyak 5%.

Kondisi ini mencerminkan bahwa dalam masa-masa produktif (penduduk usia 25 – 60 tahun) memang dituntut untuk banyak menghasilkan produksi, terutama berkaitan dengan ekonomi keluarga. Terlihat bahwa penduduk usia 20 – 40 tahun mendominasi pekerja sektor informal ini. Selain dari tuntutan ekonomi, mereka pada masa usia ini dituntut untuk berkarya. Terlihat pula usia yang banyak beraktifitas pada sektor informal adalah responden yang berusia 40 – 60 tahun. Sedang yang paling sedikit adalah responden yang berusia di bawah 20 tahun. Hal ini bisa dipahami karena memang pada masa ini mereka belum berkewajiban untuk bekerja.

2. Jenis usaha (aktivitas) pelaku usaha sektor informal

Usaha yang dilakukan oleh responden di seputaran jalan baru Kabupaten Ponorogo merupakan usaha yang bersifat informal. Usaha mereka juga sering disebut sebagai usaha Pedagang kaki Lima (PKL). Dari hasil penelitian di lapangan, terlihat bahwa mayoritas usaha yang dilakukan oleh responden adalah usaha angkringan kopi. Data menunjukkan bahwa angkringan kopi ini dilakukan oleh para responden sebesar 50%. Hal ini bisa dimaklumi karena untuk berusaha angkringan kopi tidak diperlukan keahlian khusus.

Jenis usaha kedua yang juga agak banyak adalah nasi pecel. Dengan jumlah pelaku sebesar 10% mereka tetap berusaha berjualan, karena nasi pecel merupakan makanan khas daerah Ponorogo. Sementara untuk kegiatan yang lain masih banyak, hanya mereka yang terjun di kegiatan ini sedikit, karena butuh ketrampilan khusus, misalnya untuk menjual sate, mereka harus bisa membuat irisan daging ayam untuk dibuat sate. Karen perlu ketrampilan khusus inilah yang menyebabkan penjual sate di seputaran jalan baru sedikit. Meskipun secara keseluruhan banyak juga yang berjualan sate ayam di Ponorogo.

3. Karakteristik Responden Menurut Status Perkawinan

Dari hasil penelitian yang berkaitan dengan status perkawinan

diketahui bahwa responden pelaku usaha informal yang berstatus kawin/menikah sebanyak 80%, sedangkan yang belum kawin/menikah hanya sebesar 10% dan responden yang status perkawinannya adalah cerai (janda) sebesar 10%.

Mayoritas responden sudah mempunyai keluarga, yang ini berarti responden mempunyai tanggung jawab untuk menghidupi keluarganya. Responden yang berstatus cerai(janda), mereka juga tidak mempunyai ketrampilah untuk bersaing di dunia kerja formal, sehingga mereka berusaha di sektor formal. Apalagi dengan tuntutan sebagai kepala rumah tangga yang harus mencukupi semua kebutuhan keluarga. Sedang untuk responden yang berstatus belum kawin, mereka melakukan usaha ini karena mereka sudah putus sekolah, sementara mereka juga butuh dana untuk membantu ekonomi keluarga.

4. Karakteristik Responden Menurut Tingkat Pendidikan

Jumlah responden pelaku usaha informal menurut tingkat pendidikannya, dapat dilihat prosentase berikut ini. Pelaku usaha informal yang paling banyak adalah lulusan SLTA atau sederajat sebanyak 45%, kemudian disusul oleh tingkat pendidikan SD sebanyak 30% dan lulusan SMP sebanyak 25%.

Dari hasil penelitian benar-benar terlihat bahwa mereka yang bersaing di sektor informal adalah mereka yang

tidak berpendidikan tinggi. Mereka hanya lulusan SMA ke bawah. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan pelaku usaha sektor informal dapat dikatakan rendah.

5. Karakteristik Responden Menurut Asal Daerah

Responden pelaku usaha informal menurut asal daerah terbanyak adalah dari daerah Kabupaten Ponorogo sendiri, meskipun juga ada yang berasal dari kabupaten/kota lain. Responden yang berasal dari kabupaten Ponorogo sebanyak 70%, yang berasal dari kabupaten/kota Solo sebanyak 10%, dan masing-masing 5% berasal dari Malang dan Jakarta. Dari hasil penelitian terlihat bahwa sektor informal didominasi oleh penduduk kabupaten Ponorogo asli sebanyak 70%.

Hal ini bisa dimaklumi karena mereka merasa bahwa untuk bersaing di kota besar mereka merasa tidak mampu, baik dari sisi ketrampilan maupun ekonomi. Dengan kondisi seperti ini mereka hanya bisa berusaha di daerah sendiri. Akan tetapi pelaku usaha sektor informal juga ada yang berasal dari daerah lain, yang bahkan daerah tersebut lebih maju dibanding kabupaten Ponorogo. Ada yang berasal dari Solo sebanyak 10 % dan dari Malang atau Jakarta masing-masing 5%. Kondisi ini menarik perhatian, Karena daerah mereka lebih maju dibanding kabupaten Ponorogo.

6. Karakteristik berdasarkan Keuntungan Rata-Rata yang dihasilkan

Berdasarkan data yang diperoleh pada saat penelitian dilakukan, diperlihatkan bahwa besarnya keuntungan rata-rata yang dihasilkan oleh responden adalah keuntungan rata-rata perhari kurang dari Rp 100.000 sebanyak 10% , kemudian keuntungan rata rata Rp 100.000 – Rp 300.00,- sebanyak 60%, dan keuntungan rata-rata diatas Rp 300.000,- sebanyak 30%.

Dari hasil penelitian yang dilakukan terlihat bahwa keuntungan yang diperoleh dari responden beraneka macam. Dengan nilai terendah 75.000 rupiah dan yang tertinggi 300.000 rupiah, kegiatan ini dipandang mempunyai prospek yang bagus. Jika dilihat dari prosentase besarnya penghasilan rata-rata, banyak diantara responden pelaku sektor informal berpendapatan 100.000 – 300.000,-.

Kondisi ini dianggap sudah layak bagi mereka dengan tingkat modal yang digunakan. Keuntungan mereka bisa lebih dari 100%. Hal ini disebabkan karena untuk berjualan tersebut, modal tidak sepenuhnya dimiliki oleh penjual, tapi mereka banyak menerima titipan barang dari orang lain untuk dijual. Tanpa ada modal, tetapi mereka bisa memperoleh keuntungan dari titipan jajan/masakan dari orang lain. Besar kecilnya keuntungan juga dipengaruhi oleh musim.

Mayoritas responden mengakui kalau keuntungan mereka bisa

berkurang/rendah jika terjadi kondisi hujan yang berlebihan. Bahkan kondisi hujan membuat perasaan mereka lebih was-was karena akan bisa membuat mereka harus menanggung resiko kerugian.

7. Karakteristik Modal Awal yang dibutuhkan

Berdasarkan hasil penelitian, modal awal yang digunakan untuk berusaha bagi pelaku sektor informal adalah sebagai berikut: modal awal kurang dari Rp. 1.000.000 sebanyak 20%, yang menggunakan modal awal sebesar Rp. 1.000.000 - Rp. 3.000.000 sebanyak 50%, yang menggunakan modal awal Rp. 3.000.000 – Rp. 5.000.000 sebanyak 10% dan yang menggunakan modal awal diatas Rp.5.000.000 sebanyak 20%.

Kondisi seperti ini dapat dikatakan sangat wajar. Hal ini dikarenakan untuk memulai usaha dibutuhkan moda awal yang cukup memadai. Karena usaha yang dilakukan dalam sektor informal, maka biaya atau modal awalpun juga tidak terlalu besar. Seperti temuan penelitian bahwa rata-rata modal awal yang berkisar 3 juta rupiah. Hal ini bisa diterima, kerena dalam sektor informal modal awal yang dibutuhkan tidaklah terlalu besar. Seperti yang terlihat dalam karakteristik sektor informal yang dikeluarkan oleh ILO, bahwa modal usaha yang digunakan dalam sektor informal tidaklah besar.

8. Karakteristik berdasar Lama Usaha yang dilakukan Responden

Berdasarkan hasil penelitian, lama waktu yang digunakan untuk berusaha bagi pelaku sektor informal adalah sebagai berikut: lama usaha yang dilakukan kurang dari 5 tahun sebanyak 35%, lama usaha 5 – 10 tahun sebanyak 10%, dan yang lama usahanya lebih dari 10 tahun. Lama usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha sektor informal memang sangat bervariasi, mulai dibawah 1 tahun sampai yang diatas 10 tahun.

Keadaan seperti ini memang bisa terjadi. Mereka yang baru berusaha, karena tidak punya kemampuan untuk bersaing di sektor formal, menyebabkan mereka berusaha di sektor informal. Sedang mereka yang berusaha lebih dari 10 tahun, dikarenakan mereka sudah menikmati usaha ini, dan dirasa bagi mereka usaha yang mereka lakukan sudah bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Disamping itu ketidak befdayaan mereka bersaing di sektor formallah yang menyebabkan mereka bertahan untuk berusaha di sektor informal.

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat disampaikan adalah:

1. Sektor informal merupakan fenomena yang terjadi di perkotaan termasuk di Kabupaten Ponorogo.

2. Profil sektor informal di kabupaten Ponorogo dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: karakteristik umur responden, jenis usaha (aktivitas) sektor informal, status perkawinan, tingkat pendidikan, asal daerah, keuntungan rata-rata per hari, modal awal untuk usaha dan lama usaha yang dilakukan.

4.2. Saran

Saran yang bisa diajukan adalah:

1. Kegiatan sektor informal agar lebih ditekuni oleh para pelakunya.
2. Diperlukan pemberdayaan agar usaha sektor informal semakin bagus dan tertata dengan rapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Djayadi, Rizal H. (2001). Metode Riset dalam Community Development.
- Hill, Hall, 1996, Transformasi Ekonomi Indonesia Sejak 1966, Sebuah Studi Kritis dan Komprehensif, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Hasibuan, Nurimansjah, 2000, Kemiskinan Struktural di Indonesia: menembus ke lapisan bawah, www.ekonomi-rakyat.org.
- Hidayat, 1983, Definisi, Kriteria dan Evaluasi Konsep Sektor Informal: Sumbangan Pemikiran untuk Repelita IV, Analisa tahun XII No. 7
- Mudrajat Kuncoro 2000. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan (1 st ed.). UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Miles, Matthew B dan Hubberman A. Michael. 1992. Analisa data Kualitatif Edisi Bahasa Indonesia. UI Press. Salemba Jakarta.
- Moleong, Lexy, J., 2001. Metode Penelitian Kualitatif, Cetakan Keempat belas. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung.
- Purnomo, Didit, Transformasi Struktural: Proses Dan Perubahannya Dalam

- Pembangunan Ekonomi, Benefit,
Jurnal Ekonomi dan Bisnis BPPE
Fakultas Ekonomi Universitas
Muhammadiyah Surakarta.
- Sethuraman, 1981, The Urban Informal
Sector in Developing Countries,
New York: ILO
- Suhartini, S. dan S. Mardianto. 2001.
Transfromasi Struktur Kesempatan
Kerja Sektor Pertanian ke Non
Pertanian di Indonesia. Agro-
Ekonomika No. 2 Oktober 2001.
PERHEPI, Jakarta.
- Tambunan, Tulus T.H, 2001, Perekonomian
Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Todaro, M, 1994, Pembangunan Ekonomi di
Dunia Ketiga, Penerbit Erlangga,
Jakarta
- Widyaningrum, N. 2002. Model
Pembiayaan BMT dan Dampaknya
bagi Pengusaha Kecil. AKATIGA.
Bogor.
- Winanto, Asis Riat, 2005, Alternatif
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
di Kabupaten Ponorogo, Penelitian
individu, tidak dipublikasikan
- Winanto, Asis Riat, 2012, Peran Lembaga
Keuangan Informal terhadap
Pemeberdayaan Kelompok Usaha
sektor Informal.

**PERAN TIM PENGGERAK PKK DALAM MENGANTISIPASI
PEKERJA ANAK PADA DAERAH MISKIN DI KABUPATEN PONOROGO**

Oleh :
NANING KRISTIYANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
Email : nrafakristi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk : Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Tim Penggerak PKK dalam mengantisipasi pekerja anak pada daerah miskin di Kabupaten Ponorogo ; Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Tim Penggerak PKK dalam mengantisipasi pekerja anak pada daerah miskin; Mengetahui jenis-jenis pelatihan ketrampilan yang diterima Tim Penggerak PKK. Lokasi penelitian ini di Desa Kemiri Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Informan dalam penelitian ini adalah Tim Penggerak PKK Desa Kemiri Kecamatan Jenangan . Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis metode kualitatif yang digunakan adalah metode penelitian lapangan. Metode pengambilan data dalam penelitian ini, dengan cara wawancara langsung (interview). Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan Tim Penggerak PKK Desa Kemiri dalam mengantisipasi pekerja anak yaitu : 1) Meningkatkan ketahanan pangan anggota PKK ; 2) Melakukan kerjasama dengan guru TK dan SD ; 3) Memberikan pelatihan ketrampilan usaha anggota TP PKK. Kendala yang dihadapi Tim PKK untuk mengantisipasi pekerja anak yaitu ; Rendahnya tingkat pendidikan anggota PKK sehingga sulit diajak mengikuti kegiatan dan pelatihan ketrampilan ; Rendahnya tingkat pendidikan anggota PKK untuk diajak kerjasama agar tidak terjadi pekerja anak meskipun pada saat liburan sekolah di Dusun Bandil. Pelatihan ketrampilan yang pernah diikuti yaitu ; Pelatihan Tehnologi Tepat Guna ; Pelatihan pembuatan dan penggunaan mesin tempe ; Pelatihan Sablon ; Pelatihan Komputer .

Kata Kunci : *Tim Penggerak PKK, Pekerja Anak Daerah Miskin.*

PENDAHULUAN

Anak merupakan calon generasi penerus yang harus memperoleh kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 bahwa tujuan perlindungan anak untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Anak yang dimaksud adalah anak yang berusia 18 tahun kebawah.

Keberadaan pekerja anak sudah menjadi fenomena umum di Jawa Timur. Hal ini dibuktikan oleh temuan penelitian-penelitian tentang adanya komunitas pekerja anak dalam satu area, maupun yang keberadaannya menyebar di berbagai tempat. Menurut Hastadewi, dkk (2004) faktor penyebab dominan anak bekerja adalah keluarga. Pengaruh keluarga pada anak yang bekerja sangat dominan. Keluarga merupakan wilayah terdekat dari anak selain lingkungan yang memiliki pengaruh signifikan dalam perkembangannya sebagai manusia. Dalam penelitian Ni Made Taganing, 2012 , “Eksplorasi Orang Tua Terhadap Anak Dengan Mempekerjakan Sebagai Buruh “

memberikan kesimpulan bahwa orang tua melakukan eksploitasi terhadap anak dengan memperkerjakan sebagai buruh, alasan eksploitasi orang tua tidak tahu tentang Undang-Undang Perlindungan Anak dan nilai-nilai budaya masyarakat bahwa anak adalah tempat bergantung di hari tua sehingga anak dapat membantu ekonomi orang tua. Keluarga menjalankan peran tertentu terhadap anak dan mengajarkan nilai sosial dan budaya yang berlaku dalam masyarakatnya, agar kehadiran anak dapat diterima di lingkungan dimana mereka tinggal. Seorang anak yang melakukan suatu kegiatan tertentu sedikit banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berlaku di keluarga dan masyarakatnya. Termasuk seorang anak yang memutuskan untuk tidak bekerja atau bekerja, bersekolah sampai tinggi atau cukup tamat SD saja. Indikator utama dalam keluarga yang menjadi faktor dominan penyebab anak bekerja adalah masalah kemiskinan keluarga (Hastadewi, dkk : 2004). Berdasarkan Program Sensus Ekonomi PSE 2012 oleh BPS Ponorogo diperoleh keluarga miskin tertinggi pertama di Ponorogo yaitu Kecamatan Ngrayun. Di kecamatan ini saja sudah mencapai 13.388 keluarga sedangkan peringkat kedua Kecamatan Sawoo 10.688 keluarga padahal sebelumnya tahun 2008 kecamatan Sawoo jumlah keluarga miskin mencapai 2.744 keluarga, penambahan yang cukup besar. Kemiskinan merupakan faktor klise yang muncul hampir dalam setiap permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Dari kemiskinan akan menimbulkan pendidikan rendah dan kurangnya gizi anak, sehingga anak akan putus sekolah dan masuk ke dunia kerja menjadi pekerja anak pada usia dini.

Lingkaran kemiskinan dengan permasalahan bagai hubungan sebab akibat yang saling mempengaruhi dan tidak mungkin diselesaikan secara parsial. Menurut data Desember 2007 Bappeda Ponorogo dan sebuah LSM di Ponorogo bahwa terdapat pekerja anak sejumlah 242 anak di tiga kecamatan yaitu Sambit, Jenangan dan Sampung, dengan rincian usia 12 tahun sebanyak 3 anak, 13 tahun sebanyak 6 anak, 14 tahun sebanyak 4 anak, 15 tahun sebanyak 40 anak, 16 tahun sebanyak 70 anak, dan usia 17 tahun sebanyak 103 anak. Sebagian besar mereka bekerja pada sektor industri genteng dan batu bata. Data ini dipastikan akan terus bertambah khususnya pada daerah miskin di kabupaten Ponorogo. Sedangkan menurut data Badan Pusat Statistik 2012, Kecamatan Jenangan terdapat keluarga miskin sebanyak 7.411 keluarga. Oleh karena itu keluarga sebagai pihak terdekat dalam mempengaruhi perkembangan anak sebagai manusia, harus mampu mencegah jumlah pekerja anak pada daerah miskin. Tim penggerak PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah dan organisasi masyarakat yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak keluarga, baik di pedesaan maupun di perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan dan kepribadiannya. Menurut RAKERNAS VI PKK Tahun 2005 gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia dan

berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Sebagai suatu kelompok kegiatan baik di tingkat Propinsi, Kabupaten, Kecamatan, maupun pedesaan, Kelompok PKK merupakan kegiatan pemberdayaan terhadap peran serta perempuan dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat. Pemberdayaan perempuan menjadi penting untuk menekan angka kemiskinan karena pemberdayaan merupakan proses yang pada saat bersamaan menjadi tujuan untuk membuka akses perempuan ke keadilan. Dengan pemberdayaan perempuan dapat meningkatkan kapasitas dan rasa percaya diri, sehingga berdampak pada peningkatan kemampuan perempuan untuk mencapai tujuan pembangunan termasuk untuk menekan angka kemiskinan. Lebih lanjut Tim Penggerak PKK memiliki Rencana Kerja Lima Tahun PKK Tahun 2010-2015 sebagai berikut :

1. Rencana Kerja Lima Tahun TP-PKK disusun dengan mengacu pada Millennium Development Goals (MDGs) sebagai pedoman pelaksanaan 10 Program Pokok PKK dengan program-program prioritasnya harus mendapat perhatian TP-PKK di semua jenjang yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah.
2. Dalam waktu lima tahun 2010-2015 TP-PKK berupaya meningkatkan profesionalisme kinerja TP-PKK, mewujudkan kuantitas dan kualitas SDM kader, manajemen dan kemitraan yang mantap sehingga tercapai tujuan.

3. Rencana Kerja Lima Tahun TP-PKK mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan menentukan dalam era globalisasi dan otonomi daerah, sehingga dapat memantapkan Gerakan PKK di semua jenjang

Ditinjau dari program kerja PKK, tampak bahwa kegiatan yang dilakukan tidaklah sepele. Dalam kelompok ini terdapat empat Kelompok Kerja yang merupakan bagian yang membidangi masalah tertentu. Tidak terkecuali kegiatan dalam hal penanggulangan kemiskinan, kesehatan, dan berbagai kegiatan penyuluhan. Untuk itu agar dapat membina keluarga secara langsung dan menjangkau sasaran sebanyak mungkin dalam rangka menghadapi kondisi kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan keluarga, sehat sejahtera, maju dan mandiri diperlukan upaya mengantisipasi pekerja anak melalui gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan TP PKK dalam mengantisipasi pekerja anak pada daerah miskin di Kabupaten Ponorogo dan Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi TP PKK dalam mengantisipasi pekerja anak pada daerah miskin, serta untuk mengetahui pelatihan apa saja yang diterima TP PKK. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya terutama difokuskan pada pengembangan peran wanita dan anak, dapat membantu memecahkan masalah perlindungan anak dan menekan semakin luasnya dampak kemiskinan terhadap sosial ekonomi masyarakat, membantu strategi

pembinaan dan pemberdayaan program kerja tim penggerak PKK desa dan kecamatan, membantu pemerintah mengendalikan dampak kemiskinan terhadap sosial ekonomi masyarakat melalui keluarga.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini di Desa Kemiri Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo. Populasi yang dijadikan obyek penelitian adalah seluruh Tim Penggerak PKK Desa Kemiri, sejumlah 12 orang. Teknik pengambilan sampel adalah sensus/total sampling, menurut Arikunto (2002 : 12) apabila subyek atau populasi kurang dari 100 maka lebih baik diambil seluruhnya, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Penelitian "Peran Tim Penggerak PKK Dalam Mengantisipasi Pekerja Anak Pada Daerah Miskin Di Ponorogo, menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Creswell dalam Herdiansyah (2010); Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para narasumber informasi, serta dilakukan dalam setting yang alamiah tanpa ada intervensi apapun dari peneliti. Teknik analisis data kualitatif adalah semua bahan, keterangan, dan fakta-fakta yang tidak dapat diukur dan dihitung secara matematis karena berwujud keterangan verbal, lebih bersifat proses, sehingga hanya dapat dikelompokkan dalam kategori-kategori. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Model Miles dan Huberman

(2007) pada Prastowo (2012) analisis data penelitian kualitatif adalah terdiri dari :

1. *Reduksi Data*, merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
2. *Penyajian Data*, merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dapat berupa matriks, grafik, serta bagan agar mudah untuk dimengerti.
3. *Menarik Kesimpulan/Verifikasi*, kesimpulan awal yang telah dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa diskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya kurang jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal, interaktif, hipotesis maupun teori.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara administratif, wilayah kecamatan Jenangan terbagi menjadi 2 kelurahan yaitu Singosaren dan Setono, dan 15 desa yaitu Mrican, Plalangan, Ngrupit, Sedah, Pintu, Panjeng, Jimbe, Jenangan, Sraten, Kemiri, Semanding, Tanjungsari, Nglayang, Paringan dan Wates. Dari jumlah kelurahan dan desa tersebut kecamatan Jenangan

terbagi menjadi 120 Rukun Warga (RW), 402 Rukun Tetangga (RT), serta 60 Lingkungan / Dusun. Berdasar sensus penduduk 2010 jumlah penduduk desa Kemiri 3.525 orang. Penduduk desa Kemiri menghasilkan pertanian berupa padi, jagung, ubi kayu, kacang tanah, kedelai, dan tebu. Desa Kemiri saat ini dipimpin oleh Kepala Desa yang bernama Nurdianto, SP dan memiliki 4 dusun yaitu dusun Krajan, Tumpuk, Plosorejo dan Bandil. Hasil penelitian "Peran Tim Penggerak PKK Dalam Mengantisipasi Pekerja Anak Pada Daerah Miskin di Kecamatan Jenangan", berupa keterangan, informasi, serta fakta-fakta selanjutnya dilakukan reduksi data, yakni suatu bentuk analisis data untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Hasil wawancara akan dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang hendak diteliti. Pertemuan PKK Desa Kemiri yang dihadiri oleh pengurus dan kader PKK dusun Krajan, Tumpuk, Plosorejo dan Bandil dilakukan pada tiap tanggal 15 setiap bulannya. Sedangkan pertempuan PKK kecamatan Jenangan yang dihadiri seluruh ketua Tim Penggerak PKK Desa dari seluruh kecamatan Jenangan dilakukan pada tiap hari Senin Pon di kantor kecamatan Jenangan. Kegiatan yang ada dalam PKK Desa Kemiri adalah arisan dan sosialisasi program dari desa, serta sosialisasi program dari kecamatan Jenangan. Terkadang juga diadakan lomba-lomba untuk memperingati perayaan hari besar. Selain itu juga masih ada kegiatan lain yang sifatnya

insidental, yaitu demo penjualan produk. Pengurus PKK Desa Kemiri sebagai berikut :

Ketua : Reni Sulistiawati (Bu Kepala Desa Kemiri)

Sekretaris : Samsiatul

Bendahara : Hartatik

Adapun hasil wawancara dengan Tim Penggerak PKK Desa Kemiri tentang upaya-upaya yang dilakukan PKK dalam mengantisipasi pekerja anak pada daerah miskin Desa Kemiri dapat diuraikan sebagai berikut :

Membantu meningkatkan ketahanan pangan keluarga anggota PKK .

TP - PKK mendorong seluruh keluarga desa Kemiri untuk mengikuti penyuluhan ketahanan pangan yang diberikan oleh Dinas Ketahanan Pangan melalui program karangkriti antara lain mengajak seluruh warga untuk memanfaatkan pekarangan dengan menanam jenis-jenis kebutuhan dapur keluarga di pekarangan mereka seperti bawang merah, bawang putih, cabe, empon-empon dapur, dan lain – lain untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka sendiri, sehingga dapat mengurangi biaya pengeluaran keluarga, anak-anak mereka dapat terpenuhi kebutuhan sekolahnya. Hal ini juga dapat mengantisipasi mereka untuk tidak menyuruh anak-anak mereka bekerja membantu menambah pendapatan keluarga.

Kerjasama dengan guru TK dan SD di sekitar Desa Kemiri.

PKK Desa Kemiri melakukan kerjasama dengan para guru TK dan SD di sekitar desa Kemiri untuk memberikan informasi apabila ada anak-anak dari

keluarga desa Kemiri yang tidak mampu membayar biaya sekolah.

Selama ini anak-anak dari keluarga Desa Kemiri semuanya dapat sekolah minimal pada tingkat SMP, karena program bea siswa keluarga miskin dan program gratis sekolah sampai SMP sangat membantu keluarga miskin untuk dapat sekolah sampai dengan SMP. Tetapi untuk anak-anak TK karena tidak ada program bea siswa para guru TK berusaha kerja sama dengan TP PKK untuk memberikan informasi dan mengupayakan dapat membantu membayar biaya sekolah TK, apabila ada yang tidak mampu membayar biaya sekolah selama ini ketua TP PKK yang membantu melunasi keuangan biaya sekolah TK tersebut. Hal ini dilakukan agar anak-anak tetap bisa sekolah.

Mengikutsertakan anggota PKK dalam berbagai pelatihan ketrampilan

TP PKK desa Kemiri mengikut sertakan seluruh anggota PKK Desa Kemiri secara bergantian untuk mengikuti pelatihan ketrampilan yang diselenggarakan oleh instansi dan BLK (Balai Latihan Kerja) yang dikoordinir oleh TP PKK kecamatan Jenangan. Hal ini dilakukan untuk pembekalan ketrampilan keluarga miskin diharapkan dapat membantu meningkatkan ekonomi / pendapatan keluarga miskin. Pelatihan ketrampilan yang diberikan antara lain pelatihan pembuatan roti, pelatihan sablon, salon, komputer, dan penggunaan mesin giling tempe. Bekal ketrampilan ini diharapkan warga miskin dapat membuka usaha baik sendiri atau kelompok sehingga dapat membantu menambah pendapatan keluarga. Hal ini juga agar mereka tidak menyuruh

anak-anak mereka bekerja membantu ekonomi keluarga. Hasil wawancara dengan TP PKK Desa Kemiri tentang kendala –kendala dalam mengantisipasi pekerja anak sebagai berikut :

1. Tingkat pendidikan yang rendah dan wawasan yang sempit sehingga warga / anggota PKK sulit untuk diajak mengikuti pelatihan / ketrampilan sehingga yang mengikuti pelatihan/ketrampilan tidak merata. Hal ini terutama terjadi pada dusun Bandil dimana warga / anggota PKK dusun Bandil sulit diajak berkembang dengan pola berpikirnya yang masih tradisional seperti menganggap remeh dan tidak penting pelatihan ketrampilan sehingga upaya membantu meningkatkan pendapatan keluarga tidak merata.
2. Pelatihan ketrampilan yang telah diterima warga / anggota PKK selama ini belum pernah ada yang sudah digunakan untuk membuka usaha baik sendiri ataupun kelompok. Alasan modal usaha dan strategi pemasaran yang menjadi kendala mereka untuk dapat memulai usaha tersebut.
3. Rendahnya tingkat pendidikan anggota PKK untuk diajak kerjasama agar tidak terjadi pekerja anak meskipun pada saat liburan sekolah di Dusun Bandil. Di dusun Bandil untuk hari-hari liburan sekolah anak-anak dusun Bandil ikut membantu orang tuanya bekerja di tambang pasir yang terdapat di dusun Bandil. Kondisi ini sulit dicegah dengan alasan kegiatannya dilakukan pada saat liburan sekolah. Kegiatan bekerja di tambang pasir ini diharapkan tidak berkelanjutan terjadi pada saat kegiatan sekolah berlangsung.

Hasil wawancara dengan TP PKK Desa Kemiri diikuti sebagai berikut :
tentang pelatihan / ketrampilan yang pernah

Tabel Jenis Pelatihan Ketrampilan PKK Desa Kemiri.

No	Jenis Pelatihan	Bulan Tahun	Tempat/ Instansi
1	Pelatihan Tehnologi Tepat Guna	Juni, 2015	SMK Negeri Mlarak
2	Pembuatan & Cara Menggunakan Mesin Giling Tempe	2015	SMK Negeri Jenangan
3	Pembuatan Roti	2014	BLK Sukorejo
4.	Sablon	2014	BLK Sukorejo
5.	Komputer	2014	BLK Sukorejo

Sumber : Data Primer, 2015

PEMBAHASAN

TP PKK Desa Kemiri terdiri dari PKK Dusun yaitu Dusun Krajan, Tumpuk, Plosorejo dan Bandil. Kegiatan PKK Desa Kemiri yang dilakukan setiap tanggal 15 setiap bulannya selain dihadiri oleh TP PKK Dusun para kader PKK tiap dusun juga menghadiri kegiatan tersebut. Sementara untuk tingkat dusun dilaksanakan kegiatan PKK pada waktu yang berbeda-beda, tergantung dari waktu luang yang dipunyai oleh masyarakat dusun setempat. Kegiatan yang ada dalam PKK adalah arisan dan sosialisasi program dari desa, serta sosialisasi program dari kecamatan Jenangan. Terkadang juga diadakan lomba-lomba untuk memperingati perayaan hari besar. Selain itu juga masih ada kegiatan lain yang sifatnya insidental, yaitu demo penjualan produk. Kegiatan PKK yang merupakan organisasi wanita sebagai mitra pemerintah diharapkan dapat membantu menekan angka kemiskinan, dimana didalam kemiskinan berpotensi munculnya pekerja anak. Wanita dan anak memiliki hubungan yang lebih dekat dan akrab untuk saling mempengaruhi dibandingkan laki-laki. PKK

yang anggotanya semua adalah wanita yang berstatus sebagai ibu rumah tangga sangat berperan untuk mengendalikan anak-anaknya agar tidak bekerja meskipun dalam kondisi miskin. Oleh karena itu sasaran utama gerakan Tim PKK ini adalah kegiatan untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin sehingga anak-anak mereka tidak bekerja karena kebutuhan hidup dan kebutuhan sekolah terpenuhi.

a. Upaya-upaya yang dilakukan PKK untuk mengantisipasi pekerja anak di Desa Kemiri

TP PKK Desa Kemiri mengajak seluruh anggota PKK untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga mereka. Salah satunya dengan memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanami bawang merah, bawang putih, cabe, empon-empon dapur, sayuran bayam, dan lain-lain. Penyuluhan cara menanamnya diberikan oleh dinas terkait melalui program karangkriti. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengurangi biaya belanja ibu-ibu rumah tangga sehingga dapat membantu kelancaran ekonomi

keluarga. Upaya ini dapat berjalan dengan baik sehingga anak-anak mereka juga dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya terutama biaya sekolah. Upaya mengantisipasi pekerja anak di daerah miskin dengan memberdayakan anggota PKK untuk meningkatkan pendapatan keluarga, menambah ketrampilan usaha sehingga anggota PKK tidak menyuruh anak-anaknya bekerja. Selain itu Tim Penggerak PKK bekerjasama dengan guru TK dan SD untuk memberikan informasi untuk anak-anak yang tidak mampu membayar biaya sekolah. Program beasiswa anak miskin dan program gratis wajib sekolah sampai SMP sangat membantu keluarga miskin sehingga anak-anak tetap sekolah dan tidak menjadi pekerja anak.

b. Kendala yang dihadapi PKK dalam upaya mengantisipasi pekerja anak di Desa Kemiri.

PKK desa Kemiri berupaya mengajak seluruh anggotanya untuk meningkatkan pendapatan keluarga dengan selalu aktif ikut kegiatan PKK, dan mengikuti berbagai pelatihan ketrampilan sebagai bekal anggotanya untuk membuka usaha untuk menambah pendapatan keluarga. Tetapi dusun Bandil yang warganya masih memiliki pola pikir tradisional sulit diajak berkembang dengan mengikuti kegiatan dan pelatihan ketrampilan, karena mereka menganggap remeh dan tidak penting kegiatan tersebut. Sebagian besar warga dusun Bandil memiliki tingkat pendidikan yang rendah, hal ini merupakan faktor pola pikir warga

yang tradisional tersebut. Adanya pekerja anak di desa Bandil sebagai penambang pasir. Meskipun pekerja anak di desa Bandil terjadi pada saat liburan sekolah saja tetapi hal ini diharapkan tidak berkelanjutan pada saat masa sekolah berlangsung. Anggota PKK Desa Bandi dengan pola pikir tradisional yang sulit diajak berkembang untuk menerima perubahan-perubahan budaya/pola pikir sehingga membiarkan anak-anak untuk bekerja di tambang pasir. PKK desa Kemiri belum mendapat sosialisasi tentang Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.

c. Pelatihan ketrampilan yang diterima PKK Desa Kemiri

Pelatihan ketrampilan diberikan kepada anggota TP PKK Desa Kemiri sebagai upaya pemerintah untuk membantu masyarakat mendapat ketrampilan usaha dimana ketrampilan usaha ini sebagai bekal wirausaha sehingga dapat membantu menambah pendapatan keluarga. Beberapa pelatihan ketrampilan yang sudah diberikan ternyata sampai dengan penelitian ini anggota TP PKK belum ada yang menindak lanjuti hasil pelatihan ketrampilan tersebut dengan membuka usaha baik sendiri ataupun kelompok. Alasan modal dan strategi pemasaran menjadi alasan utama mengapa mereka belum menindak lanjuti pelatihan ketrampilan yang sudah mereka terima tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasar uraian yang ada pada bab-bab sebelumnya, maka penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya-upaya yang dilakukan PKK Desa Kemiri untuk mengantisipasi pekerja yaitu ; Meningkatkan ketahanan pangan anggota PKK ; Melakukan kerjasama dengan guru TK dan SD ; Memberikan pelatihan ketrampilan usaha anggota TP PKK.
2. Kendala yang dihadapi PKK untuk mengantisipasi pekerja anak yaitu ; Rendahnya tingkat pendidikan anggota PKK sehingga sulit diajak mengikuti kegiatan dan pelatihan ketrampilan ; Adanya pekerja anak pada saat liburan sekolah di Dusun Bandil.
3. Pelatihan ketrampilan yang pernah diikuti yaitu ; Pelatihan Tehnologi Tepat Guna ; Pelatihan pembuatan dan penggunaan mesin tempe ; Pelatihan Sablon ; Pelatihan Komputer ; Pelatihan Salon.
4. Pembinaan dan pemberdayaan program kerja TP PKK belum sepenuhnya berjalan dengan baik, terbukti sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang pekerja anak belum pernah diterima oleh TP PKK Desa Kemiri, padahal pekerja anak berpotensi tumbuh pada daerah-daerah miskin.

Saran

1. Belum adanya tindak lanjut dari pelatihan / ketrampilan yang sudah diterima oleh anggota TP PKK Desa Kemiri dengan membuka usaha baik sendiri atau kelompok sebagai upaya membantu pendapatan ekonomi rumah tangga ,

seharusnya dilengkapi dengan pelatihan strategi pemasaran dan strategi memperoleh modal usaha. Tim Penggerak PKK Kecamatan dan lembaga pendidikan untuk dapat segera menindaklanjuti kegiatan pelatihan tersebut.

2. Perlunya diberikan sosialisasi tentang Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kepada Desa- desa daerah miskin, khususnya pada dusun Bandil desa kemiri Kecamatan Jenangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Peneiltian*, Rineka Cipta, Jakarta
- Andi Prastowo, 2012, *Methode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian* , Ar-Ruzz Media, Yogyakarta
- Aziz, Noor, 2004, *Peran Wanita Dan Anak-Anak Dalam Iklan*, Jurnal Swagata Volume 1 No.3 Maret 2004 – Juni 2004, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang.
- Garna, Judistira K. Garna, 1999, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif*, Primaco Akademika, Bandung.
- Herdiansyah, Haris, Msi, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta.
- Hastadewi, Yuli, Abdul QudusSalam, Priyono Adnugroho, Umi Cholilah, Winni Isnaini, Yuyun Agusriani, 2004, *Kondisi dan Situasi Pekerja Anak Di Beberapa Sektor Di Tulungagung dan Probolinggo*, UNICEF, Jakarta.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 2002, *Metodologi Penelitian Bisnis*, BPFE Yogyakarta.
- ILO, 2003, *Working Out Poverty*, Report of the Director General, ILO Conference 91st Session 2003, Genewa.
- Ni Made Taganing, 2012, *Eksplorasi Orang Tua Terhadap Anak Dengan Memperkerjakan Sebagai Buruh*, Universitas Gunadarma, Jakarta.

Sugiyono, 2004, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung.

Sen, A., 1999. *Women's Agency and Social Change, Development As Freedom*, 189-203.

-----, 2005, *Jeli Memaknai Emansipasi*, Tabloid Alia Nomor 10 Tahun II April 2005, Jakarta

Rakernas VI PKK Nomor 2 Tahun 2005, Pemberdayaan Dan Kesejahteraan tentang Kelembagaan PKK.

Rakernas VII PKK Tahun 2010, Pemberdayaan Dan Kesejahteraan tentang Kelembagaan PKK.

Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

-----, 2012, *Ponorogo Dalam Angka*, Badan Pusat Statistik Ponorogo

-----, 2014, *Jenangan Dalam Angka*, Badan Pusat Statistik Ponorogo

REDESIGN CAMPAIGN STRATEGY MELALUI PERPADUAN *POLITICAL MARKETING* DAN PEMIKIRAN TAN MALAKA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DEMOKRASI DALAM MENGHADAPI PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI JAWA TIMUR (PILKADA)

Oleh:

BAGUS ANANDA KURNIAWAN

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

Email: bagusanandakurniawan@gmail.com

ABSTRAK

Pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung Jawa Timur putaran kedua sebentar lagi akan dimulai. Calon kepala daerah telah mempersiapkan diri dalam usaha untuk memenangkan Pemilihan Kepala Daerah. Beberapa metode telah dilakukan oleh kedua pasangan pemenang Pemilihan Kepala Daerah di Wilayah Jawa Timur ini. Usaha yang dilakukan tentu saja memiliki tujuan akhir agar mendapatkan suara dari masyarakat. Pada proses *political marketing*, ada empat hal yang harus diperhatikan kontestan yaitu, *product* (platform, karakter personal, janji-janji kampanye), *price* (biaya kampanye, lobi-lobi politik), *place* (basis massa, tim sukses), dan *promotion* (advertising, publicity, kampanye). Selain itu, dalam berkampanye kontestan juga harus memperhatikan banyak faktor yang dapat memengaruhi jumlah perolehan suara, seperti bentuk kelompok gaya hidup masyarakat yang beranekaragam, hal-hal yang mempengaruhi pemilih dalam memilih para kontestan, tipologi pemilih, serta segmentasi dan *positioning* politik. Hal lain yang menjadi perhatian dan pokok kajian pemikiran politik Tan Malaka dalam keyakinan politik adalah strategi dan taktik.

Kata Kunci : *Political Marketing, Demokrasi yang Berkualitas, pemikiran Politik dan Sosial Tan Malaka*

PENDAHULUAN

Dalam Politik kerap kali didefinisikan sebagai “who gets what and when”. Artinya adalah sebuah upaya untuk mencapai kekuasaan, yang sejatinya memang menggiurkan setiap orang. Pada sisi lain, politik merupakan cara yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dengan tujuan untuk mempengaruhi elemen masyarakat agar mau bergabung dengan komunitas yang dimiliki.

Tidak dapat dipungkiri bahwa bangsa Indonesia yang sudah bersepakat untuk belajar demokrasi melalui pemilihan langsung baik di tingkat pusat maupun daerah, sedang mengalami gegap gempita dan euforia pesta demokrasi. Bak permainan baru yang sedang digemari, energi masyarakat banyak yang tersedot ke dalam rivalitas politik yang kian

mengharu biru. pilkada digelar dimana-mana, riuh rendah dukungan dan penolakan terhadap kandidat terpilih, seolah menjadi penanda paling nyata bahwa wilayah permainan dan rivalitas politik tak lagi tersentral di Jakarta. Melalui pilkada langsung, hasrat politik sekian banyak orang dapat tersalurkan. (Heryanto, 2007).

Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Presiden (Pilpres), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah agenda politik yang membutuhkan partisipasi masyarakat. Partai politik yang menjadi sarana dalam memenangkan arena politik senantiasa harus berpikir dan bertindak cerdas jika tidak ingin kehilangan dukungan konstituennya. Pada tataran yang lebih pragmatis, saat ini partai politik dihadapkan pada kenyataan bahwa

partai politik harus lebih melek lagi dalam memahami kondisi psikopolitik dan sosiopolitik masyarakat. Partai politik harus menyadari bahwa munculnya ketidakpercayaan masyarakat kepada elit politik akan berdampak pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam aktivitas politik.

Ada beberapa kekurangan dari hasil Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Presiden (Pilpres), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang telah memakan dana APBD maupun APBN, dimana hasilnya terdapat golongan putih (golput) sangat banyak. Hal ini memerlukan berbagai evaluasi untuk menganalisis kekurangan yang telah terjadi. Banyak faktor yang menjadi penyebab banyaknya golput, di antaranya adalah election fatigue dan stigma negatif masyarakat terhadap partai politik. Election fatigue adalah kondisi masyarakat yang sudah terlalu lelah dan bosan dengan pemilihan yang dilakukan berkali-kali dalam setahun. Selanjutnya, stigma negatif yang ditunjukkan oleh masyarakat menjadi salah satu bukti bahwa belum ada calon yang pantas untuk duduk di kursi pemimpin daerah maupun pemimpin pusat. Menghadapi permasalahan yang telah dijabarkan mengenai kontrol dalam sebuah parpol untuk memenangkan calon yang diangkat, perlu adanya strategi yang dapat mengatasi permasalahan tersebut secara holistik. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan redesign strategi politik melalui political marketing (marketing politik).

Marketing politik merupakan salah satu strategi efektif untuk meningkatkan kualitas demokrasi dalam menghadapi pilkada Jatim Putaran II. Konsep marketing politik merupakan sebuah fenomena baru dalam

dunia politik di Indonesia. Melihat lebih lanjut, marketing dan politik adalah dua disiplin ilmu yang bertolak-belakang. Rasionalitas marketing mengacu pada persaingan dengan tujuan memenangkannya secara efektif. Sebaliknya rasionalitas politik bergerak pada tataran poses menciptakan tatanan masyarakat yang ideal melalui sistematisasi perebutan kekuasaan. Persilangan kedua disiplin tersebut akan menciptakan proses simbiosis mutualisme antara marketing dan politik.

(Tragistina, 2008) Marketing sangatlah kontributif dalam dunia politik. Marketing menjadi strategi (layaknya riset pasar) dalam memahami dan menganalisis keinginan atau kebutuhan pemilih. Seperti halnya dunia bisnis, dunia politikpun membutuhkan 4P dalam strategi marketingnya atau biasa dikenal dengan marketing mix, yaitu product (karakter personal, platform kontestan, janji-janji kampanye), price (biaya kampanye, lobi-lobi politik), place (basis massa, tim sukses), promotion (advertising, publicity, kampanye). (Semarketer, 2008).

Pemikiran – pemikiran politik Tan Malaka telah memberikan kontribusi konstruktif terhadap para founding fathers Indonesia dalam proses perjuangan hingga pembentukan negara. Dari karya-karyanya, Naar de Republiek Indonesia, Massa Aksi, Gerpolek, Thesis, Politik, Madilog dan yang lain dapat diketahui dengan jelas ide-ide dan taktik strategis filsafat politik Tan Malaka. Epistemologi, ontologi dan aksiologi selalu ditempatkan pada dasar materialisme-historis-dialektis. Dapat dipahami dalam keadaan bangsa yang masih dalam jajahan bangsa asing, revolusi sebagai jalan terbaik,

berikut yang terkandung didalam pemikiran Politik dan Sosial Tan Malaka adalah

- a) sikap tidak mau tunduk pada suatu gagasan yang belum melalui uji verifikasi ilmiah.
- b) Masyarakat bagi Tan Malaka adalah sumber pembentukan etika itu sendiri, maka standar nilai (etika) bergerak dapat berubah dan dipengaruhi gerak sosial (sosial movement).
- c) Dalam Tradisi politik, blok kiri diartikan sebagai kelompok paling ekstrim yang anti kemapanan, anti status quo, anti penindasan dan cenderung radikal dalam gerak-gerakannya berupaya mengubah struktur masyarakat secara fundamental, dan kanan diidentikan dengan orang-orang yang konservatif, reaksioner, berusaha mempertahankan kondisi sekarang dengan acuan masa lalu.
- d) Sistem sosialis juga merupakan sistem masyarakat atau kelompok hidup bersama tanpa hak milik pribadi atau swasta. Semuanya dikelola dari, oleh, dan untuk semua (bersama).
- e) Sistem pemilihan umum hanya akan menyebabkan siapa kuat secara modal maka itulah yang akan bertahan. Yang kedua, sistem itu akan memberikan pendapatan baru dan yang ketiga sistem ini pada akhirnya semakin mengekalkan perbedaan yang mencolok antara kelas bourgeois dan kelas proletar.
- f) Sedangkan adanya undang-undang yang mengatur hak dan kekuasaan adalah ciri dari sebuah negara demokrasi. Tan Malaka mengatakan hak dan kekuasaan tersebut dibagi-bagi kedalam: pertama, antara rakyat dan pemerintah. Kedua, pemisahan kekuasaan dalam tiga badan yang terpisah

yang lebih dikenal dengan Trias Politica. Asumsi dasarnya adalah pemisahan badan tersebut berguna untuk mencegah terjadinya praktek-praktek otoriter, di mana kekuasaan terpusat pada satu tangan. Kekuasaan ini terbagi kedalam, kekuasaan legislatif atau pembuat undang-undang, kekuasaan eksekutif atau menjalankan undang-undang dan kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan pada permasalahan yang diangkat didalam penulisan ini maka metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode dalam meneliti status seseorang, suatu objek, suatu situasi atau kondisi sistem pemikiran.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Bentuk Demokrasi Masyarakat Jawa Timur

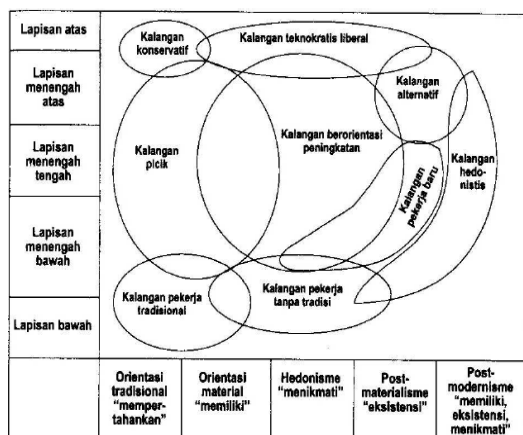
Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia. Beberapa bulan yang lalu, masyarakat Jatim baru saja melaksanakan pesta rakyat melalui pemilihan kepala daerah (pilkada) DI beberapa wilayah di Jawa Timur. Terjadinya putaran kedua pemilihan kepala daerah (pilkada) DI beberapa wilayah di Jawa Timur dikarenakan dari dua hingga tiga pasangan calon yang mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) terpilih belum ada presentase suaranya yang mencapai 30%.

Oleh karena itu, sesuai dengan UU No 12/2008 harus dilaksanakan pemilihan kepala daerah (pilkada) putaran kedua di beberapa

wilayah di Jawa Timur. Belum adanya pasangan calon yang mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) memperoleh 30% suara, sangatlah ironi bila dibandingkan dengan presentase suara pemilih golput yang mencapai 38,3% suara. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi di Jatim tidak berjalan dengan baik karena partisipasi masyarakat dalam rangkaian acara untuk memilih pemimpin mereka cenderung menurun bila dibandingkan dengan Pilpres 2004.

Demokrasi di Jatim melahirkan permasalahan yang sangat kompleks. Ketika menjalankan proses demokratisasi ada kemungkinan bahwa calon tidak melihat secara rinci bentuk kelompok gaya hidup masyarakat yang sangat berlapis-lapis dan memiliki orientasi yang berbeda-beda sehingga melahirkan ciri berbeda di setiap lapisannya.

Gambar 1. Bentuk Kelompok Gaya Hidup Masyarakat di Jawa Timur



Sumber : Dr. Rainer Adam. 2007. *Political Marketing : Strategi Membangun Konstituen dengan Pendekatan Public Relation*.

Berdasarkan gambar di atas, maka kontestan pemilihan kepala daerah (pilkada) di Beberapa Wilayah Jawa Timur harus

bekerja keras dalam memahami berbagai bentuk gaya hidup masyarakat sehingga harapannya semua kelompok masyarakat dapat menyumbangkan suaranya dalam pilkada. Pada kelompok yang berorientasi tradisional (mempertahankan), para kontestan harus bisa meyakinkan mereka untuk memberikan suaranya dengan cara melakukan komunikasi interaktif dan memberikan rasionalisasi program-program yang hendak mereka wujudkan. Dengan cara seperti ini, mereka diharapkan tidak apatis lagi dengan politik. Para kontestan juga seharusnya menyesuaikan tata cara penyampaian program-programnya dengan setiap lapisan yang menjadi tujuan kampanye mereka. Apabila mereka berkampanye atau mensosialisasikan politik pada lapisan bawah, hendaknya mereka menggunakan bahasa-bahasa ringan yang mudah dimengerti oleh rakyat lapisan bawah.

Pada kelompok yang berorientasi material (memiliki), para kontestan juga harus bisa meyakinkan mereka bahwa dengan memilih mereka harapan-harapan mereka untuk memiliki capital dapat terpenuhi. Sama halnya pada kelompok berorientasi tradisional, para kontestan juga harus menyesuaikan gaya kampanyenya dengan lapisan sosial yang mereka jadikan wadah untuk berkampanye.

Pada kelompok yang berorientasi hedonis (menikmati), para kontestan (pensosialisasi) harus lebih menekankan pada inovasi-inovasi yang mereka ciptakan saat menyosialisasikan sistem politik, misalnya dengan acara nonton bareng film yang memiliki nilai edukasi tinggi.

Pada kelompok post-materialism (eksistensi), para kontestan diharapkan dapat

menampilkan sesuatu yang berbeda saat mensosialisasikan sistem politik sehingga membuat orang-orang yang termasuk kelompok ini menjadi yakin bahwa dengan memilih mereka, keeksistensian mereka tidak akan terganggu. Sebagai contoh, para kontestan dapat membuat suatu kontrak politik yang ditandatangani di atas materai sehingga memiliki kekuatan hukum yang dapat dipergunakan bagi masyarakat untuk menuntut kontestan tersebut apabila mereka tidak menjalankan program dengan semestinya.

Redesign Campaign Strategy melalui Perpaduan Political Marketing dengan Pemikiran Tan Malaka untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi dalam menghadapi pemilihan kepala daerah (pilkada) Beberapa Wilayah di Jawa Timur

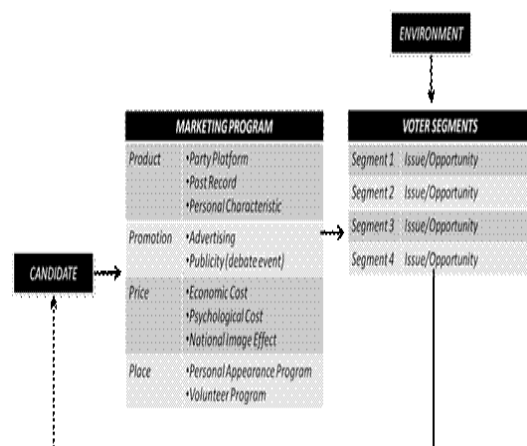
Partai politik agar dapat membangun sistem kepercayaan yang saling menguntungkan dengan pemilih. Upaya yang dilakukan untuk bisa memahami cara berpikir dan bertindak pemilih, kontestan harus memahami rasionalitas yang ada dibalik pengambilan keputusan pemilih. Selama ini, kontestan hanya memperhatikan kondisi yang terjadi di masyarakat secara umum tanpa adanya penelitian lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat. Sebagai salah satu contoh adalah kasus lumpur lapindo. Masyarakat Jawa Timur sangat kecewa dengan seluruh kontestan partai politik yang tidak memasukkan seperti permasalahan lumpur lapindo, Kelangkaan pangan, Kekeringan maupun Kemiskinan dalam kontrak politik ketika kontestan

memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) di Beberapa Wilayah Jawa Timur.

Oleh karena itu, metode lain dalam berkampanye dirasa perlu untuk melihat realita yang sedang terjadi dimasyarakat khususnya Jawa Timur. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan program marketing politik ini. Mulai dari proses pelaksanaan marketing politik yang merupakan awalan, kemudian masuk ke proses selanjutnya yakni *segmentasi, targeting dan positioning*, kemudian faktor yang menjadi penentu politik dan yang terakhir adalah penguasaan kontestan terhadap tipologi pemilih harus dijalankan dengan baik.

Seperti yang terlihat pada bagan 2, seorang kandidat atau dalam makalah ini adalah kontestan harus memiliki marketing program yang layak dan mampu menarik minat masyarakat untuk memilih kontestan tersebut. Marketing program ini lebih sering disebut dengan marketing mix yang terdiri dari product (produk), price (harga), promotion (promosi) dan place (lokasi). Marketing mix lebih populer diistilahkan dengan 4P.

Gambar 2. Proses Marketing Politik



Sumber : Niffenegger (1989)

Berdasarkan gambar diatas, Program marketing yang disuguhkan ke masyarakat haruslah menarik dan jangan sampai justru menyinggung hal-hal yang bersifat sensitif sebagai contoh adalah SARA.

Program yang telah dicanangkan oleh kandidat ini kemudian disegmentasikan ke dalam masyarakat dengan menyebar isu serta mencari peluang. Segmentasi yang dilakukan juga harus dilakukan berdasarkan lingkungan sekitar karena jika tidak, akan membawa dampak yang sangat besar. Hal ini tidaklah mudah. Kandidat harus melakukan berbagai riset pasar untuk membuat segmentasi menjadi lebih tepat sasaran. Kesalahan dalam membawakan isu politik dan kegagalan dalam memanfaatkan peluang berpengaruh signifikan terhadap suara yang akan diperoleh kontestan. Kegiatan riset pasar inilah yang tidak dimiliki oleh kontestan dalam menyusun strategi kampanye. Mereka cenderung berpikir bagaimana caranya lolos dengan mudah dan mendapatkan aspirasi masyarakat dengan cepat. Kontestan hanya melakukan 2 marketing program yang sangat menonjol, yakni *price dan promotion*.

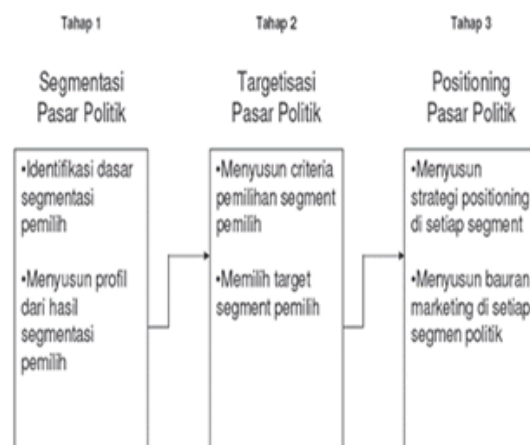
Kontestan sangat boros dalam masalah mengeluarkan dana kampanye dan promosi yang digencarkan adalah slogan-slogan yang nantinya mudah diingat oleh masyarakat. Masyarakat pemilih cenderung lebih hafal dengan slogan dari pada produk yang dimiliki oleh kontestan. Telah disinggung pada point sebelumnya, bahwa dalam politikpun perlu adanya riset pasar yang disebut riset politik jika tujuannya untuk politik.

Beberapa kegunaan utama dari riset politik antara lain : *Pertama*, untuk menyusun strategi dan taktik.

Adman Nursal (2004) mengatakan Strategi kampanye politik tanpa riset bagaikan orang buta yang berjalan tanpa tongkat. Sebaliknya riset tanpa sumber daya strategis seperti desain strategi, orang, dana dan sumber daya lainnya ibarat orang lumpuh yang memahami jalan dan peta akan tetapi tidak memiliki kendaraan untuk menuju tempat yang diinginkannya.

Kedua, riset untuk memonitor hasil penerapan strategi. Implementasi sebuah strategi, akan menimbulkan respon dari pesaing. Reaksi para pemilih perlu diketahui untuk menerapkan strategi berikutnya. Riset monitor politik berorientasi pada tindakan dan reaksi terhadap kondisi saat ini. Lebih spesifik lagi, riset politik ini akan menghasilkan strategi kampanye dalam penetapan segmentasi, target dan posisi (STP) seperti yang terlihat pada bagan 3. Inti dari kegiatan kegiatan STP ini terletak pada P atau positioning. Meskipun dalam segmentasi dan target sudah baik, namun ketika terjadi kegagalan dalam penempatan posisi, maka kegiatan segmentasi dan targetting akan menjadi sia-sia

Gambar 3. STP dalam Politik



Sumber : Hasil olahan tim penulis

Berdasarkan gambar diatas, kontestan harus memiliki tim yang fokus kepada kegiatan riset politik. Hal ini dimaksudkan agar terjadi konsistensi dalam penetapan strategi kampanye yang akan dilakukan. Hasil dari riset politik ini akan mempengaruhi penentuan segmentasi, targetisasi dan positioning dalam pasar politik. Kesesuaian antara strategi STP dengan kampanye yang dilaksanakan akan membawa dampak yang tidak sedikit.

Jika dilihat dari segmentasi maka akan terdapat tiga segmentasi masyarakat yang menjadi alternatif, yakni masyarakat mataraman (Jawa Timur bagian Barat), masyarakat tapal kuda (Jawa Timur Bagian Timur) dan Masyarakat Campuran (Jawa Timur bagian Tengah).

Beranjak menuju tahapan terakhir dan paling inti dari proses STP ini adalah positioning. Bentuk positioning yang setidaknya perlu dilakukan adalah pembentukan ikon yang mudah menembus pengaruh psikologis rakyat pemilih. Pembentukan ikon itu digerakkan secara lintas sektor melalui berbagai media yang mudah dikenal masyarakat pemilih. Nilai yang terkandung didalam pemikiran Politik dan Sosial Tan Malaka adalah

a) Sikap tidak mau tunduk pada suatu gagasan yang belum melalui uji verifikasi ilmiah. Rakyat atau masyarakat Jawa Timur dalam memilih calon kepala daerah atau walikota pemilihan kepala daerah (pilkada) diharapkan tidak berdasar iming-iming dan mengedepankan sikap merdeka. memilih calon bupati maupun walikota juga harus didasar sikap merdeka tidak terpengaruh intervensi dari siapa

pun. Masyarakat harus menggunakan hak pilih sesuai hati nurani dan masyarakat harus melihat program dari para kandidat calon serta rencana program yang terstruktur dari calon pemimpin daerah. Kondisi seperti ini juga terjadi di beberapa wilayah Jawa Timur, dimana masyarakat pemilih yang turut serta dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di Beberapa Wilayah Jawa Timur sebelumnya memberikan kepercayaan mayoritas kepada salah satu Partai Politik. Partai A dianggap sebagai representasi perubahan dari partai - partai sebelumnya yang ada di Indonesia. Kebuntuan politik sebelumnya menjadikan masyarakat menuntut banyak perubahan keadaan menjadi lebih baik, kemudian bermunculannya partai baru memberikan “angin segar” atas tuntutan rakyat terhadap sistem politik Indonesia yang sebelumnya cenderung monoton menjadi semakin dinamis dan konstruktif. Harapan masyarakat tersebut ditindak lanjuti oleh orang-orang yang bergiat di bidang politik untuk menciptakan atau melahirkan partai-partai baru. Meskipun secara faktual muncul partai baru, namun secara personal, rata - rata pengurusnya adalah tokoh partai lama yang bermigrasi ke partai baru, karena berbagai alasan, diantaranya persoalan jenjang karirnya di partai baru lebih menjanjikan di banding partai lama. Sehingga banyak di ketahui, partai dengan nama dan logo baru, namun di kelola oleh tokoh partai lama, yang sebelumnya mereka pernah berkiprah di partai sebelumnya. Pemilih pemula yang terdiri atas pelajar, mahasiswa atau pemilih dengan rentang usia 17-21 tahun

menjadi segmen yang memang unik, seringkali memunculkan kejutan dan tentu menjanjikan secara kuantitas. Disebut unik, sebab perilaku pemilih pemula dengan antusiasme tinggi, relatif lebih rasional, haus akan perubahan. Pemilih pemula memiliki antusiasme yang tinggi sementara keputusan pilihan yang belum bulat, ketika pemilih pemula memilih kandidat yang dapat memberinya keuntungan yang sebesar - besarnya. Misalnya, memilih kandidat yang memberinya uang atau materi sebagai harga dari suara yang akan digunakannya. Selain itu, pemilih pemula juga cenderung memilih kandidat berdasarkan figurnya bukan kemampuannya sehingga pemilih pemula juga cenderung mudah dimanfaatkan oleh partai politik.

- b) Masyarakat bagi Tan Malaka adalah sumber pembentukan etika itu sendiri, maka standar nilai (etika) bergerak dapat berubah dan diimbangi gerak sosial (sosial movement). Pada tahap ini para calon Kepala Bupati atau Walikota yang sedang mempersiapkan diri untuk bertarung di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) beberapa wilayah di Jawa Timur, agar tidak melakukan tindakan kecurangan *money politic* (politik uang), Calon Walikota maupun calon Bupati yang melakukan hal itu bisa dilaporkan di panitia pelaksana juga di aparat Polisi. Jika ada masyarakat yang menemukan ada indikasi kecurangan dalam pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan oleh oknum calon Kepala Daerah di laporkan ke panitia pelaksana secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

secara teknis menggali opini publik secara sistematis, seperti lewat survei, tentang masalah yang berkaitan dengan kepentingan publik dan publikasi terhadap hasilnya lebih mungkin dilakukan dalam sebuah rezim demokratis. Lebih dari itu, penggalan opini publik merupakan konsekuensi logis dari demokrasi itu sendiri sebab sifat dasar demokrasi yang membedakannya dari rezim lain adalah ketanggapan pemerintah secara berkesinambungan terhadap preferensi warga di beberapa wilayah Jawa Timur. Walaupun partisipasi politik warga Jawa Timur bersifat penting, itu terbatas pada bagaimana digunakan elite politik untuk mencapai jabatan publik, seperti partisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) beberapa wilayah di Jawa Timur. Setelah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) beberapa wilayah di Jawa Timur, elite yang menentukan kebijakan yang harus dibuat. Dalam praktiknya, kebijakan ini dibuat lebih mencerminkan kepentingan elite politik itu sendiri. Partisipasi dan opini publik berhenti dengan berakhirnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) beberapa wilayah di Jawa Timur. Bahkan, partisipasi politik warga Jawa Timur untuk memengaruhi kebijakan yang akan dibuat elite terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) beberapa wilayah di Jawa Timur, menurut kaum elitis atau revisionis ini, dapat menimbulkan instabilitas politik dan karena itu bersifat negatif terhadap stabilitas demokrasi (Lipset, 1981; Huntington, 1975). Yang kompeten membuat kebijakan publik adalah elite politik, bukan masyarakat maupun warga

di Beberapa Wilayah Jawa Timur. Pada akhirnya elite politik bukan warga Jawa Timur yang menjadi pengawal demokrasi (McClosky, 1964). Itu sebabnya dipertanyakan apakah kebijakan yang dibuat elite politik didasarkan pada sikap responsif elite politik terhadap opini publik. Kalau ternyata tidak, kenapa harus membicarakan opini publik? Para revisionis atau elitis mengabaikan fakta bahwa elite terpilih punya kepentingan terhadap dukungan massa secara berkesinambungan. Seorang atau sekelompok pejabat publik bisa saja membuat kebijakan tanpa memperhatikan preferensi warga di beberapa Wilayah Jawa Timur, bahkan bertentangan dengan preferensi warga. Namun, kebijakan itu jadi tidak populer, tidak disukai warga di beberapa Wilayah Jawa Timur, dan ini dapat memunculkan resistansi warga terhadap elite politik tersebut. Sementara itu, resistansi warga merupakan sikap atau perilaku yang akan merugikan kelangsungan kepentingan elite politik, setidaknya kepentingan untuk terus berkuasa dan agar peralihan kekuasaan tidak jatuh kepada orang di luar kelompoknya. Opini publik dapat digali lewat berbagai cara. Dalam demokrasi salah satu cara sistematis adalah lewat jajak pendapat umum. Namun, jelas opini publik tidak bisa direduksi ke dalam jajak itu. Bahkan, ada yang berpendapat, jajak pendapat bisa memberikan kesan menyesatkan tentang opini publik dalam hubungannya dengan demokrasi. Opini elite politik dan elite kelompok kepentingan dalam masyarakat di

beberapa Wilayah Jawa Timur juga bagian dari opini publik, dan biasanya tidak cukup tergali oleh jajak, padahal mereka sangat menentukan kebijakan publik. Dalam demokrasi, keputusan penguasa yang tidak populer berdampak negatif terhadap peluang untuk kembali terpilih dalam pemilihan umum berikutnya. Jadi, dalam demokrasi, jangan terpikir oleh seorang politikus profesional atau pejabat publik mengabaikan sentimen atau preferensi warga. yang jadi sasaran jajak adalah calon pemilih Pemilihan Kepala Daerah di beberapa Wilayah Jawa Timur, tetapi sampel ditarik hanya dari beberapa kota besar saja sehingga populasi yang di luar kota dan yang tinggal di pedesaan tidak punya kesempatan tersertakan dalam jajak. Namun, laporannya sering berpretensi mencakup populasi calon pemilih di beberapa Wilayah Jawa Timur, misalnya, lewat judul “Pemilih Pemilihan Kepala Daerah di beberapa mendukung Amien Rais”, “Pemilih Pemilihan Kepala Daerah di beberapa Jawa Timur kecewa dengan kinerja pemerintah daerah”. Fakta yang juga mencerminkan perilaku politisi di lapangan terkait dengan media adalah bagaimana para politisi ketika membuat pernyataan - pernyataan yang menyudutkan pihak lain. Terungkap, beberapa kali press conference, ada politisi yang selalu mengungkapkan kampanye. negatif. Tidak jarang juga ada pihak yang menjelek – jelekkan pihak lain tanpa dasar yang jelas.

- c) Dalam Tradisi politik, pihak kiri diartikan sebagai kelompok paling ekstrim yang anti kemapanan, anti status quo, anti

penindasan dan cenderung radikal dalam gerak-geraknya berupaya mengubah struktur masyarakat secara fundamental dan pihak kanan diidentikan dengan orang-orang yang konservatif, reaksioner, berusaha mempertahankan kondisi sekarang dengan acuan masa lalu. tindakan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah, berupa politik uang, dengan membagi - bagikan uang, membagikan sarung, atau sejenisnya dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat merupakan tindakan pelanggaran yang tidak dibenarkan oleh aturan. Calon Kepala Daerah didalam melakukan Kampanye berlangsung dalam berbagai tahapan mulai dari menarik perhatian khalayak, menyiapkan khalayak untuk bertindak, hingga akhirnya mengajak mereka melakukan tindakan nyata. Kampanye juga mendramatisasi gagasan-gagasan yang disampaikan kepada khalayak dan mengundang mereka untuk terlibat baik secara simbolis maupun praktis, guna mencapai tujuan kampanye. Permasalahan yang muncul kemudian adalah krisis identitas dan tak memiliki ideologi yang menjadi gambaran umum partai-partai politik di Indonesia dewasa ini. Dampaknya tentu membuat arah partai tak jelas dan sulit membedakan partai satu dengan yang lain. Para tokoh dan elite parpol pun tak mampu memberikan contoh panutan yang baik bagi kader dan masyarakat. Mereka lebih sibuk gontok-gontokan dan bagi-bagi kekuasaan ketimbang mengembangkan konsep pemikiran alternatif mengenai bagaimana membenahi persoalan-

persoalan bangsa. Pada masa sebelum tahun 1945, peran partai-partai politik kita jelas, yakni sebagai bagian dari perjuangan kemerdekaan. Tahun 1950, konteks parpol secara umum untuk mengisi kemerdekaan atau membangun Indonesia merdeka. Pada masa demokrasi terpimpin Soekarno, partai dituntut menjadi bagian dari revolusi yang belum selesai. Kemudian, pada zaman Soeharto, partai dituntut dan direkayasa sedemikian rupa untuk mendukung stabilitas, pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi. Pasca-Soeharto, parpol-parpol dituntut untuk merumuskan mau di bawa ke mana bangsa ini. Namun hal ini belum dilakukan meski secara parsial memang muncul. Demokratisasi, pemerintahan yang bersih, antikorupsi, penegakan supremasi hukum, dan segala macam itu semua partai punya. Cuma bagaimana hal itu diperjuangkan, belum sepenuhnya solid dalam visi parpol-parpol. Kondisi seperti itu menyebabkan sulit membedakan satu partai dengan partai lainnya. Akibatnya, pilihan pemilih terhadap partai lebih banyak didasarkan pada faktor-faktor yang sifatnya tak rasional, seperti kultural, agama, dan ketokohan (figur yang populer), tanpa dilandasi pengetahuan yang memadai mengenai visi partai bersangkutan tentang masa depan bangsa ini. Kondisi seperti itu juga membuat energi parpol-parpol habis untuk soal-soal yang sifatnya tidak substansial. Konflik-konflik selalu muncul menjelang atau sesudah kongres atau muktamar partai karena tidak ada diskusi atau perdebatan yang signifikan dalam partai mengenai soal-soal yang lebih

mendasar. Yang ada hanya ribut-ribut bagi kekuasaan, seperti siapa yang menjadi ketua umum. Tidak adanya identitas ini menambah derajat kompleksitas persoalan di dalam partai, di luar persoalan - persoalan seperti kepemimpinan dan demokrasi internal yang tak kunjung muncul di dalam partai, sehingga akhirnya juga memengaruhi kinerja partai secara keseluruhan. Dalam konteks yang lebih spesifik, krisis identitas ini antara lain bisa dilihat dari sifat keanggotaan partai-partai politik yang tidak jelas akan dikembangkan ke mana, yakni apakah akan membuat partai kader atau partai massa, atau gabungan kedua-duanya?

- d) Sistem sosialis juga merupakan sistem masyarakat atau kelompok hidup bersama tanpa hak milik pribadi atau swasta. Semuanya dikelola dari, oleh, dan untuk semua (bersama). Dalam Pemilu baik PILEG, PILPRES, maupun PILKADA peran serta keikutsertaan masyarakat sangat penting, karena sukses tidaknya pelaksanaan PEMILU salah satunya adalah ditentukan bagaimana partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu tersebut. Pemilu merupakan salah satu tonggak penting yang merepresentasikan kedaulatan rakyat, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada negara demokrasi tanpa memberikan peluang adanya pemilihan umum yang dilakukan secara sistematis dan berkala. Oleh karenanya pemilu digolongkan juga sebagai elemen terpenting dalam sistem demokrasi. Apabila suatu negara telah melaksanakan proses pemilu dengan baik, transparan,

adil, teratur dan berkesinambungan, maka negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara yang tingkat kedemokratisannya baik, namun sebaliknya apabila suatu negara tidak melaksanakan pemilu atau tidak mampu melaksanakan pemilu dengan baik, dimana terjadinya berbagai kecurangan, diskriminasi, maka negara itu pula dinilai sebagai negara yang anti demokrasi. Suara publik (rakyat) seharusnya terepresentasi dalam diri Calon Kepala daerah di Beberapa Wilayah Jawa Timur. Artinya Calon Kepala daerah di Beberapa Wilayah Jawa Timur yang diajukan oleh partai ke KPUD tersebut merupakan wakil resmi dari rakyat, dimana mereka merepresentasikan aspirasi mereka. Para Calon Kepala Daerah di Beberapa Wilayah Jawa Timur ini telah terbukti berkarya nyata mensejahterakan rakyat dan benar-benar dicalonkan oleh rakyat melalui partai politik. Namun peranan elit partai politik tersebut seolah 'merampok' aspirasi rakyat dan menggantikannya dengan nama Calon Kepala Daerah di Beberapa Wilayah Jawa Timur yang tidak mewakili kepentingan mereka. Tidak heran dalam sistem politik kita tidak berlaku rakyat mengontrol elit partai politik. Hal ini yang menyebabkan terjadinya pemusatan kekuasaan hanya pada sekelompok elit politik. Penting bagi kandidat Calon Kepala Daerah di Beberapa Wilayah Jawa Timur bahwa mengetahui isu-isu lokal dapat menjadi konsep kebijakan yang akan dijual ke pasar yaitu para pemilih (masyarakat). Visi, misi kandidat dapat dibuat berdasarkan isu-isu lokal tersebut. Visi, misi dan kandidat

Pilkada inilah merupakan produk politik (political product). Mengetahui masalah-masalah seperti transparansi, akuntabilitas, tata kota, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat akan menjadi isu-isu sentral yang menarik dibicarakan. Dalam menjelaskan visi, misi serta isu-isu sentralnya, kandidat Pilkada dapat menggunakan promosi politik (*political promotion*) melalui media, seperti periklanan, hubungan masyarakat, penyiaran radio (dialoginteraktif) ataupun surat langsung yang sesuai dengan karakteristik-karakteristik para pemilih (masyarakat) setempat. Saluran distribusi politik (*political distribution*) dalam konteks pemasaran, disini dapat digunakan *local work* atau jaringan yang dimiliki kandidat Pilkada pada tingkat kecamatan sampai kelurahan, kemudian leader tour dalam bentuk pertemuan - pertemuan tatap muka antara kandidat (tidak diwakili pihak lain) dengan masyarakat yang berada di setiap kecamatan wilayah tersebut.

- e) Sistem pemilihan umum hanya akan menyebabkan siapa kuat secara modal maka itulah yang akan bertahan. Sistem itu akan memberikan pendapatan baru dan yang terakhir sistem ini pada akhirnya semakin mengekalkan perbedaan yang mencolok antara kelas bourgeois dan kelas proletar. Makadarkitu Calon Bupati atau calon Walikota terus menyambangi masyarakat dengan tujuan untuk mendengarkan berbagai masukan dan keluhan sekaligus menyosialisasikan visi dan misi yang akan ditawarkan dan dilaksanakan saat nanti memimpin

daerahnya dan masyarakat tidak seperti membeli kucing dalam karung, pasangan calon bupati-calon wakil bupati harus menyosialisasikan visi-misi jika kelak dipercaya oleh masyarakat maupun juga Mengetahui kebutuhan masyarakat itu yang paling penting. Implikasi penerapan demokrasi yang dipahami secara prosedural tersebut berdampak pada munculnya transaksi jual beli suara. Artinya Calon Kepala daerah di Beberapa Wilayah Jawa Timur mendaftar ke partai politik dan 'membeli nomor urut' yang merupakan tiket untuk ikut Pemilu. Ketika mereka diperhadapkan dengan masyarakat. mereka bingung, karena tidak mengenal dan tidak tahu harus berbuat apa. Oleh karena itu untuk memengaruhi masyarakat. Para Calon Kepala daerah di Beberapa Wilayah Jawa Timur melakukan tindakan money politics. Tampaknya kekuasaan hanya dipersepsi seperti jual beli barang di pasar, dimana terjadi negosiasi antara pembeli dan penjual. Calon Kepala daerah di Beberapa Wilayah Jawa Timur yang bermodal uang banyak mampu membeli suara banyak, namun sebaliknya Calon Kepala daerah di Beberapa Wilayah Jawa Timur yang miskin tidak mampu membeli suara. Ada tiga dimensi untuk menilai harga politik (political Price), yaitu harga ekonomi, yang didasarkan pada komunitas masyarakat yang dijadikan target oleh organisasi kandidat atau politik, sedangkan harga nasional menjelaskan bahwa masyarakat akan memperhatikan kandidat dari kemampuannya, pertimbangan/hasil keputusan dan pribadi yang layak untuk

dipercaya. Harga psikologi dalam pengertian harga politik ini berdasarkan dari harga observasi, bahwa sebuah penggunaan hak suara adalah sebuah pembelian psikologi atau ingin mendapatkan rasa aman.

- f) Sedangkan adanya undang-undang yang mengatur hak dan kekuasaan adalah ciri dari sebuah negara demokrasi. Tan Malaka mengatakan hak dan kekuasaan tersebut dibagi-bagi kedalam: pertama, antara rakyat dan pemerintah. Kedua, pemisahan kekuasaan dalam tiga badan yang terpisah yang lebih dikenal dengan Trias Politika. Asumsi dasarnya adalah pemisahan badan tersebut berguna untuk mencegah terjadinya praktek-praktek otoriter, di mana kekuasaan terpusat pada satu tangan saja. Kekuasaan ini terbagi kedalam, kekuasaan legislatif atau pembuat undang - undang, kekuasaan eksekutif atau menjalankan undang-undang dan kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili. Dalam sistem politik negara Indonesia, pemilu merupakan salah satu proses politik yang dilaksanakan setiap lima tahun, baik untuk memilih anggota legislatif, maupun untuk memilih anggota eksekutif. Anggota legislatif yang dipilih dalam pemilu lima tahun tersebut, terdiri dari anggota legislatif pusat/parlemen yang dalam ketatanegaraan Indonesia biasanya disebut sebagai DPR-RI, kemudian DPRD Daerah Pripinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sementara dalam konteks pemilu untuk pemilihan eksekutif, rakyat telah diberi peluang untuk memilih President, Gubernur dan

Bupati/Walikota. Besarnya hak rakyat untuk menentukan para pemimpin dalam lembaga eksekutif dan legislatif pada saat ini tidak terlepas dari perubahan dan reformasi politik yang telah bergulir di negara ini sejak tahun 1998, dimana pada masa-masa sebelumnya hak-hak politik masyarakat sering didiskriminasi dan digunakan untuk kepentingan politik penguasa saja dengan cara mobilisasi, namun rakyat sendiri tidak diberikan hak politik yang sepenuhnya untuk menyeleksi para pemimpin, mengkritisi kebijakan, dan proses dialogis yang kritis, sehingga masyarakat dapat menyalurkan aspirasi dan kepentingan-kepentingannya. Perubahan yang terjadi mengikut kepada undang-undang dasar tersebut juga terjadi pada pemilihan kepala daerah. Dengan lahirnya Undang-undang No. 32 Tahun 2004, maka undang-undang tersebut telah memberikan hak politik rakyat untuk memilih Gubernur dan Bupati/Walikota secara langsung. Dengan demikian hak politik masyarakat untuk melakukan partisipasi politik secara konvensional terbuka lebar. Produk politik dari perpaduan sistem *political marketing* dan *pemikiran politik Tan Malaka* ini adalah adanya suatu pemaparan nilai-nilai yang melandasi partai untuk mengusung wakilnya menjadi kontestan. Selain itu, terdapatnya program-program konkret dan rasional yang ditawarkan kepada masyarakat serta adanya suatu kekuatan hukum yang dapat digunakan masyarakat apabila program-program tersebut tidak tercapai, membuat masyarakat akan tertarik dengan program-program yang

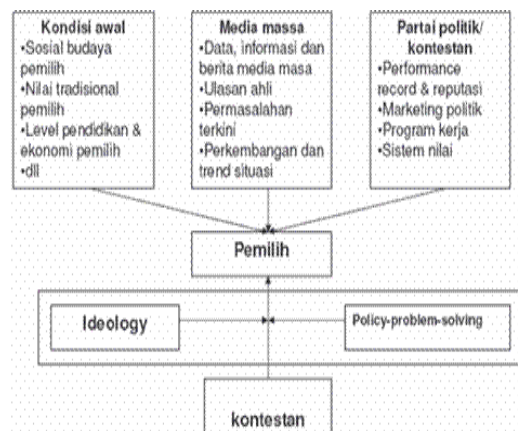
ditawarkan yang kemudian ditindaklanjuti dengan memberikan suara mereka kepada kontestan. Komunikasi yang dipakai adalah sistem interaksi dengan merumuskan kebijakan-kebijakan politik ke dalam bahasa-bahasa ringan maupun pemanfaatan ragam media sehingga informasi tersebut dapat sampai ke benak pemilih. Selain itu, komunikasi juga dilakukan dengan cara mencari pemahaman beserta solusi masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, akan timbul feedback bagi para kontestan yang dapat digunakan sebagai bahan perumusan program yang nantinya oleh para kontestan dapat digunakan sebagai bahan kampanye. Bukti bagaimana perpaduan *political marketing* dan *pemikiran politik Tan Malaka* adalah yang pasca Pemilu 1999, sejak menjadi pemenang Pemilu 1999 para pemimpin Parpol, tiba – tiba sering menunjukkan kepeduliannya pada korban bencana alam atau musibah di segala pelosok Indonesia. Diiringi sekelompok juru publisitasnya, mereka berlomba-lomba mendatangi lokasi berbagai musibah. Suatu kepedulian yang sebelum Pemilu 1999 tidak pernah diketahui publik.

KUTIPAN DAN ACUAN

Pergeseran budaya juga memberikan dampak yang tidak sedikit dalam dunia perpolitikan. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi faktor penentu politik, yakni sosial budaya, media massa dan partai politik atau kontestan itu sendiri. Ketiga faktor tersebut akan membentuk karakter pemilih yang terdiri dari dua tipe, yakni policy problem solving dan

berdasarkan ideologi. Ketiga faktor tersebut yang seharusnya dipahami oleh kontestan pilkada untuk mereduksi jumlah golput pada pilkada. Sehingga, secara otomatis berdampak pula pada peningkatan kualitas demokrasi.

Gambar 5. Faktor Penentu Politik



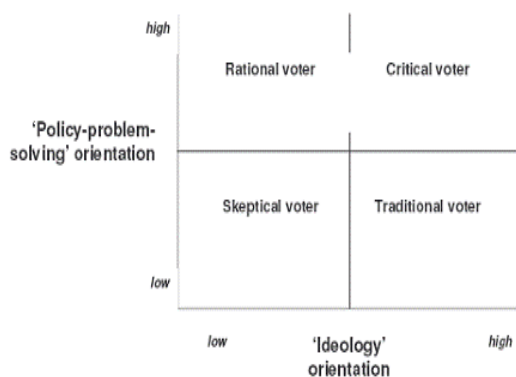
Banyak pemimpin tidak tahu bagaimana mengurus rakyatnya, bagaimana mengelola birokrasi. Ada kebingungan-kebingungan dalam bekerja yang hampir merata diseluruh Indonesia. Bahkan banyak juga yang tidak mengerti apa itu pemerintahan dan bagaimana itu pemerintah. Kebingungan itu terutama terjadi pada pemimpin yang lahir secara instan. Padahal seorang pemimpin pemerintahan harus lahir melalui proses yang panjang. pemimpin tidak dibentuk dan dipersiapkan secara baik maka kebingungan terus berlanjut. Hal itulah yang banyak terjadi saat ini. Banyak daerah seperti tidak memiliki pemerintahan dan bersamaan dengan itu rakyat merasa tidak punya pemimpin.

Itu sebabnya, perlu ada model pengkaderan yang benar terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pemimpin tidak dibentuk dan dipersiapkan secara baik maka kebingungan terus berlanjut. Hal itulah yang banyak terjadi saat ini. Banyak daerah seperti tidak memiliki pemerintahan dan

bersamaan dengan itu rakyat merasa tidak punya pemimpin. Itu sebabnya, perlu ada model pengkaderan yang benar terhadap penyelenggaraan pemerintahan. kedepan seyogyanya tidak boleh lagi ada pimpinan, bupati misalnya, yang dicalonkan oleh partai politik yang tidak dipersiapkan dari awal. Parpol harus menyampaikan secara terbuka seluruh track record orang yang dicalonkan. Apa saja prestasi yang telah dicapai, dimana saja dia pernah berkiprah, apa kelemahan - kelemahannya, dari mana saja sumber harta yang dimilikinya, dan sebagainya. Jadi setiap orang yang diajukan oleh parpol untuk jabatan-jabatan public harus bersedia 'di telanjangi'.

Seseorang yang dijagokan tidak lagi sekedar didasarkan atas popularitas atau kemampuan financial belaka. Dengan kata lain, dibutuhkan kebesaran jiwa dari para elite politik untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang mampu dan memiliki pengalaman, pendidikan memadai, dan rekam jejak yang baik dalam hal pemerintahan atau kemampuan kepemimpinan lainnya.

Gambar 6. Tipologi Pemilih



Berdasarkan gambar diatas, penulis menjabarkan bahwa penulis merangkum dari pendapat Dr. Rainer Adam (2007).

Masyarakat Jatim cenderung berada pada *skeptical voter*, bentuknya adalah massa mengambang. Begitu banyaknya massa mengambang membuat golongan putih mencapai kejayaan. Inilah kesalahan dari partai politik dan kontestannya tidak memperhatikan suara karena lebih mementingkan kemenangan dengan cara apapun. Disadari atau tidak kemenangan dalam pilkada merupakan hal penting bagi setiap kontestan, namun cara memenangkannya haruslah diperhatikan. Masyarakat kurang mendapatkan perhatian dari kontestan, selain itu masyarakat merasa tidak ada perubahan meskipun terjadi pergantian kekuasaan. Kontestan harus bisa menguasai massa mengambang, karena secara otomatis program mereka sudah bagus. Strategi yang dipakai adalah *Political marketing*, yaitu suatu strategi untuk menarik masyarakat agar bersedia menyumbangkan suaranya dengan melakukan riset pra-pemilu sehingga apa yang disuarakan dan diperjuangkannya kelak akan tepat sasaran.

Komunikasi yang dipakai adalah sistem interaksi dengan merumuskan kebijakan-kebijakan politik ke dalam bahasa-bahasa ringan maupun pemanfaatan ragam media sehingga informasi tersebut dapat sampai ke benak pemilih. Selain itu, komunikasi juga dilakukan dengan cara mencari pemahaman beserta solusi masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, akan timbul feedback bagi para kontestan yang dapat digunakan sebagai bahan perumusan program yang nantinya oleh para kontestan dapat digunakan sebagai bahan kampanye.

UCAPAN TERIMA KASIH

Jika perlu berterima kasih kepada pihak tertentu, misalnya sponsor penelitian, nyatakan dengan jelas dan singkat, hindari pernyataan terima kasih yang berbunga-bunga.

PENUTUP

Kesimpulan

Pemilihan Calon Kepala daerah di Beberapa Wilayah Jawa Timur merupakan event yang sangat menarik untuk diamati, tak terkecuali pemilihan Calon Kepala daerah di Beberapa Wilayah Jawa Timur Mulai dari perencanaan sampai implementasi pelaksanaan Calon Kepala daerah di Beberapa Wilayah Jawa Timur memberikan informasi yang sangat penting bagi rakyat. Apalagi yang menyangkut peran masing-masing kandidat dalam mempertaruhkan “diri” dalam ajang tersebut lebih menarik juga untuk diamati. Strategi yang dipakai adalah membangun dan membentuk reputasi politik yang baik, profesional, dan bebas dari KKN atau strategi kotor lainnya seperti money politic.

Selain itu, strategi yang dipakai adalah *Political Marketing*, yaitu suatu strategi untuk menarik masyarakat agar bersedia menyumbangkan suaranya dengan melakukan riset pra-pemilu sehingga apa yang disuarakan dan diperjuangkannya kelak akan tepat sasaran. Dalam perpaduan sistem Political Marketing dan Pemikiran Politik Tan Malaka ini penulis menawarkan bahwa Sifat hubungan antara kandidat dengan pemilih adalah relasional. Di mana para kontestan lebih menganggap masyarakat sebagai teman atau saudara mereka yang suaranya harus didengarkan dan hak-haknya harus dipenuhi.

Kemenangan calon bupati menduduki jabatan bupati banyak ditentukan oleh kesiapan mereka dan timnya dalam mempengaruhi hati konstituennya yang terdiri dari masyarakat luas.

Kesiapan awal calon dalam mempengaruhi masyarakat sangat besar pengaruhnya. Karena itu sejak awal partai politik yang diberikan kesempatan untuk memunculkan calonnya harus berinisiatif memberikan rekomendasi sedini mungkin kepada calon yang “akan bertarung” agar mereka bisa mempersiapkan diri dengan baik. Keunggulan dari political marketing ini adalah retensi memori kolektif yang tidak mudah hilang karena dengan ini para kontestan akan berlomba-lomba untuk menyajikan bentuk kampanye yang menarik sehingga dapat membuat masyarakat tidak bosan untuk mengikuti rangkaian acara pilgub. Sifat kampanye yang jelas, tanggap terhadap kritikan yang membangun, dan atraktif. Aplikasi marketing dalam politik justru membantu para kontestan ataupun partai politik untuk mengetahui aspirasi masyarakat secara komprehensif. Hal ini pada akhirnya akan memudahkan parpol atau kontestan untuk menyusun platform-nya ketika berkampanye ataupun setelah berkuasa.

Bagi masyarakat Jawa Timur pemilihan Calon Kepala daerah di Beberapa Wilayah Jawa Timur adalah salah satu faktor penting dalam menentukan masa depan mereka, karena itu sejak awal masyarakat sudah memberikankriteria seorang calon yang akan dipilih. Kriteria itu diantaranya seorang bupati harus dekat dengan rakyat kecil, memiliki pengalaman dalam jabatan pemerintahan, mampu merangkul dan mengakomodasi

semua golongan, shaleh/sholehah. Kriteria itu melebihi keberhasilan kandidat dibidang usahanya, bahkan seorang cendekiawan sekalipun. Selain itu, seorang calon kepala daerah harus memiliki sifat jujur dan ikhlas, menjunjung toleransi dalam perbedaan, seorang dermawan, dan merangkul siapa saja.

Saran

Berdasarkan atas temuan-temuan dilapangan, bagi siapapun yang ingin mencalonkan diri menjadi Calon Kepala daerah di Beberapa Wilayah Jawa Timur maka mereka harus menyiapkan dirisejak awal. Persiapan itu meliputi aspek kredibilitas calon, sampai sejauh mana merekadikenal oleh masyarakatnya sampai pada seberapa banyak pengalaman di dalam bidang pemerintahan. Dengan memperhatikan semua itu, maka calon akan bisa memperkirakan diri bagaimana elektabilitasnya dimata masyarakat, sehingga jumlah dana yang dikeluarkan untuk membuat sarana promosi dan sosialisasi bisa digunakan untuk kepentingan lain yang lebih besar.

Di dunia ini memang penuh akan sifat kebalikan. Begitu juga halnya dengan konsep *political marketing ini*, selain terdapat potensi positif yang telah dipaparkan di atas, dia juga memiliki potensi negatif. Potensi negatif pertama yang timbul dari adanya political marketing ini adalah kemungkinan terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh mesin politik. Mereka bisa saja justru melakukan penipuan politik dengan tujuan agar perolehan suara mereka meningkat. Hal ini dikarenakan konsep political marketing ini belum memiliki payung hukum sehingga masih dapat dimungkinkan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh masing-masing mesin parpol.

Kedua adalah penggunaan metode marketing yang berlebihan dalam kehidupan berpolitik yang hanya akan melahirkan komersialisasi politik dan mereduksi arti berpolitik itu sendiri (O'Soughnessy, 2001).

Artinya, meluasnya penggunaan televisi, media cetak dan radio sebagai media iklan dan publikasi dikhawatirkan akan semakin menjauhkan masyarakat dari ikatan ideologi sebuah partai dengan massanya. Masyarakat cenderung akan lebih memperhatikan aspek artistik daripada pesan politik itu sendiri. Isu politik berbeda dengan produk komersial, karena isu politik berkaitan erat dengan nilai dan ideology bukan sebuah produk yang diperjualbelikan. Hal lain yang menjadi perhatian dan pokok kajian pemikiran politik Tan Malaka dalam keyakinan politik adalah strategi dan taktik. Penulis merangkumnya, sukses gagalnya suatu program Partai Politik dalam perjuangan revolusi perubahan kearah yang lebih baik tergantung pada benarnya strategi dan taktik. Hal terakhir dalam pokok kajian dari Pemikiran Politik Tan Malaka adalah mengenai organisasi (partai).

Penulis merangkumnya, yang dimaksud dengan Partai Revolusioner atau merevolusi segala program yang salah ialah gabungan orang-orang yang bersamaan pandangan dan perbuatannya dalam revolusi. setiap Partai Politik wajib bekerja keras dan mendapatkan reward sesuai prestasi kerjanya. Sistem kepartaian di Indonesia meliputi sistem masyarakat atau kelompok hidup bersama tanpa hak milik pribadi atau swasta. Semuanya dikelola dari, oleh, dan untuk semua (bersama).

Dalam pemilihan Calon Kepala daerah di Beberapa Wilayah Jawa Timur, masyarakat

tidak hanya menjadi obyek. Mereka sangat menentukan keberhasilan seseorang untuk menjadi bupati. Karena itu kedewasaan masyarakat dalam menentukan pilihan akan sangat menentukan kualitas demokrasi di daerah. Kualitas demokrasi yang baik akan menghasilkan pimpinan/bupati yang baik dengan selalu memperhatikan kebutuhan dan keinginan masyarakatnya. Jangan sampai masyarakat terpengaruh oleh faktor “sesaat” seperti politik uang yang dijanjikan oleh kandidat bupati. Kalau itu terjadi maka “tergadaikanlah” masa depan masyarakat dan wilayah tersebut kepada masa depan yang penuh ketidak pastian dan kebimbangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2008. Kampanye Sukses Lewat Pola "Marketing".
<http://www.jpjpr.or.id/content/view/1471/2/> di akses tanggal 28 September 2008
- Budiardjo, Miriam. 2004 (Cetakan ke-26). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Firmanzah, Ph.D. 2007. Marketing Politik : Antara Pemahaman dan Realitas. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia
- Heryanto, Gun Gun. 2008. Marketing Politik dan IndustriCitra.<http://gunheryanto.blogspot.com/2007/12/marketing-politik-dan-industri-citra.html> di akses tanggal 28 September 2008
- Niffenegger, P. B. 1989. Strategies for Success from the Political Marketers. The Journal of Consumer Marketing. (6).1. hlm. 45-51.
- Prasojo E., Maksum, Irfan Ridwan., dan Kurniawan, Teguh. 2006. Desentralisasi & Pemerintah Daerah: Antara Model Demokrasi Lokal & Efisiensi Struktural. Jakarta: FISIP UI.
- Prihatwono. 2007. Calon Independen.
<http://prihatwono.blog.friendster.com/2007/07/calon-independen/> di akses tanggal 28 September 2008
- Rahman, Fadjoel. 2007. Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat. Tentang Kebebasan, Demokrasi dan Negara Kesejahteraan. Jakarta : Koekoesa
- Semarketer. 2008. Marketing Politik PILKADA Jawa Barat 2008.
http://www.berpolitik.com/static/myposting/2008/02/myposting_10531.html di akses tanggal 28 September 2008
- Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT Grasindo
- Ujungpandang Ekspres, Senin, 17 Maret 2008. Saatnya Marketing Politik dalam Pemilu.
<http://www.ujungpandangekspres.com/view.php?id=16616&jenis=Pilkada> di akses tanggal 28 September 2008
- Wirocst. 2008. Strategi Pemenangan Pemilu.
<http://wirocst.blog.friendster.com/> di akses tanggal 28 September 2008

INTERNET

- [http://www.kompasiana.com/Guno Tri Tjahjoko](http://www.kompasiana.com/Guno_Tri_Tjahjoko) 23 Juli 2013 13:30:54 Diperbarui: 24 Juni 2015 10:09:57
- <http://nasional.kompas.com/> Jumat, 2 Januari 2015 | 21:12 WIB Yunarto Wijaya Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Editor: Inggried Dwi Wedhaswary Sumber: KOMPAS CETAK
- [http://www.lsi.or.id/Jajak Pendapat Publik Membantu Demokrasi Bekerja Oleh Dr. Saiful Mujani KOMPAS 01-09-2004](http://www.lsi.or.id/Jajak_Pendapat_Publik_Membantu_Demokrasi_Bekerja_Oleh_Dr_Saiful_Mujani_KOMPAS_01-09-2004) Halaman: 33 Tanggal dimuat: 1 September 2004

**FAKTOR-FAKTOR KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH YANG
MEMPENGARUHI BELANJA OPERASI**

(Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012)

Oleh:

ARDYAN FIRDAUSI MUSTOFFA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

Email: ardyanfirdausi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor karakteristik pemerintah daerah yang mempengaruhi Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan) Studi pada Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh BPK pada 35 kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 yang diambil dari website resmi BPK. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis rasio keuangan dan pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Variabel Rasio Kemandirian secara parsial tidak ada pengaruh signifikan terhadap Belanja Operasi. Variabel HDI secara parsial tidak ada pengaruh signifikan terhadap Biaya Operasi. Variabel Ukuran Legislatif secara parsial ada pengaruh signifikan terhadap Belanja Operasi. Variabel Size secara parsial ada pengaruh signifikan terhadap Belanja Operasi. Variabel Status secara parsial ada pengaruh signifikan terhadap Belanja Operasi.

Kata Kunci: *Ukuran Dewan, Size, Human Development Index (HDI), Rasio Kemandirian, Status Daerah, Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan.*

PENDAHULUAN

PP No. 24 Tahun 2005 yang telah diperbaharui menjadi PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan (SAP), menyebutkan bahwa belanja operasi merupakan salah satu akun yang ada pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan non pemerintah dengan tidak terus-menerus dan selektif. Lebih lanjut, PP nomor 71 tahun 2010 mengklasifikasikan belanja menurut klasifikasi ekonomi yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Lain-lain/Tak terduga, Transfer. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial. Sedangkan Belanja Modal terdiri dari Belanja Aset Tetap

dan Belanja Aset Lainnya. Dewasa ini, struktur dan alokasi belanja APBD di berbagai daerah dinilai belum efektif. Hal itu ditunjukkan oleh alokasi belanja pegawai yang terus meningkat, sebaliknya porsi belanja modal untuk pembangunan daerah justru menurun. Peningkatan porsi belanja pegawai dalam APBD berkaitan erat dengan terjadinya penambahan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru daerah setiap tahun, yang dalam banyak kasus, tidak sesuai dengan kompetensi dan keperluannya. Perilaku boros pemerintah daerah yang menguras anggarannya untuk membiayai belanja pegawai disebabkan oleh: *Pertama*, pemerintah telah menetapkan kenaikan gaji pegawai secara berkala sejak tahun 2007 sampai tahun 2011 antara 5-15 persen serta

adanya gaji ke-13. *Kedua*, pembiaran terjadinya rekrutmen PNS secara terus menerus tanpa mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. *Ketiga*, jumlah organisasi yang ada di kabupaten/kota terlalu besar sehingga menambah beban terhadap anggaran daerah (Prayitno, 2012).

Patrick (2007) membuktikan secara empiris bahwa karakteristik pemerintah daerah di negara bagian Pennsylvania yang mempunyai ukuran besar, budaya inovasi organisasi yang semakin besar, *intergovernmental revenue* yang rendah cenderung melakukan inovasi yang diproksikan dengan determinasi untuk mengadopsi GASB 34.

Lesmana (2010) menemukan bahwa karakteristik pemerintah daerah yaitu umur dan rasio kemandirian keuangan daerah secara signifikan dan positif mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib pada LKPD. Peneliti merasa perlu untuk mengetahui faktor-faktor karakteristik pemerintah daerah yang mempengaruhi belanja operasi. Belanja Operasi yang diteliti dipersempit menjadi Belanja Pegawai, Belanja barang, Belanja Hibah, belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan. Berdasarkan latar belakang diatas, pertanyaan dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut: Apakah Ukuran Dewan, Ukuran Pemerintah Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan *Human Development Index (HDI)* mempengaruhi Belanja Operasi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2012?

Peneliti membatasi permasalahan yang diteliti sebagai berikut: (i) Variabel

Independen yang diteliti adalah ukuran dewan, ukuran pemerintah daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, dan HDI; (ii) Variabel Dependen yang diteliti adalah Belanja Operasional (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan). (iii) Objek Penelitian yang digunakan adalah seluruh Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2012.

TINJAUAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah. Instrumen utama yang digunakan dalam mengelola keuangan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam PP nomor 58 tahun 2005 mendefinisikan APBD sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Penerimaan dan belanja yang dianggarkan dalam APBD digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pemerintah daerah. Penyusunan program sendiri diarahkan dengan mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik.

Belanja pegawai digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam

melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, termasuk di dalamnya gaji yang bersifat rutin. Belanja pegawai diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non PNS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja barang merupakan pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak di pasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk di serahkan atau di jual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja barang dibedakan menjadi belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas. Belanja hibah merupakan belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan sebelumnya.

Karakteristik Daerah

Karakteristik berarti mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Lesmana (2010) mengatakan bahwa karakteristik pemerintah daerah berarti sifat khas dari otoritas administratif Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Ukuran Legislatif (ULEG)

Giligan dan Matsusaka (2001) memproksikan ukuran legislatif dengan jumlah anggota Badan Legislatif yang ada di Pemerintah Daerah di Amerika Serikat. Sumarjo (2010) juga menggunakan proksi jumlah anggota DPRD untuk mengukur ukuran legislatif. Berdasarkan penelitian

Giligan dan Matsusaka (2001) dan Sumarjo (2010), maka dalam penelitian ini juga menggunakan jumlah anggota DPRD sebagai proksi untuk mengukur ukuran legislatif. Berdasarkan penelitian Giligan dan Matsusaka (2001) dan Sumarjo (2010), maka dalam penelitian ini juga menggunakan jumlah anggota DPRD sebagai proksi untuk mengukur ukuran legislatif.

Ukuran Pemerintah Daerah (SIZE)

Untuk mengukur ukuran suatu organisasi dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti jumlah pegawai, total aset, total pendapatan dan tingkat produktifitas (Damanpour, 1991).

Sumarjo (2010) dan Lesmana (2010) menggunakan total aset Pemerintah daerah sebagai proksi untuk variabel ukuran Pemerintah Daerah karena aset menunjukkan sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan dapat diperoleh. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sumarjo (2010) dan Lesmana (2010), peneliti menggunakan total aset sebagai proksi untuk mengukur ukuran Pemerintah Daerah. Data seperti total aset memiliki variabilitas yang tinggi.

Menurut Stevens (1992) dalam Patrick (2007), data dengan variabilitas yang tinggi harus ditransformasi atau dieliminasi. Ada beberapa metode dalam mentransformasi data, seperti akar kuadrat dan natural logaritma. Dengan demikian, dalam penelitian ini total aset diubah dalam bentuk natural logaritma total aset.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengelola keuangannya sendiri. Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari jumlah pendapatan asli daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah maka pemerintah daerah cenderung berusaha memenuhi pengungkapan pada LKPD karena tuntutan terhadap transparansi atas pengungkapan pelaporan keuangan semakin tinggi. Dalam mengukur rasio kemandirian keuangan daerah Halim (2011) memformulasikan pendapatan asli daerah dengan bantuan pemerintah pusat/provinsi dan pinjaman. Lesmana (2010) juga menggunakan proksi dengan membandingkan pendapatan asli daerah dengan jumlah pendapatan transfer dan kewajiban. Sejalan dengan penelitian Lesmana (2010), dalam penelitian ini juga membandingkan pendapatan asli daerah dengan total pendapatan transfer dan total kewajiban.

Human Development Index (HDI)

HDI merepresentasikan capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Nilai HDI merupakan hasil perhitungan dari kombinasi atas beberapa unsur, yaitu :

- a. Angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan;
- b. Angka melek huruf, rata-rata lama sekolah mengukur capaian pembangunan di bidang pendidikan; dan

- c. Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak (UNDP, 1996).

Status Daerah

Status daerah pada penelitian ini diukur dengan menggunakan skor, dengan ketentuan, jika status daerah adalah kabupaten maka diberi skor 1 dan jika status daerah adalah kota maka diberi skor 2 dengan alasan status kota penduduknya memiliki kontrol social yang tinggi jika dibandingkan dengan penduduk di daerah kabupaten.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu menguji faktor-faktor dari karakteristik pemerintah daerah yang mempengaruhi belanja operasi pada laporan keuangan Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah tahun 2012. Karakteristik pemerintah daerah terdiri dari *legislature size*, ukuran pemerintah daerah, dan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, HDI (*Human Development Index*), dan Status Daerah. Berikut ini merupakan pengembangan hipotesis yang dilakukan:

1. Pengaruh Ukuran Dewan Pemerintah Daerah Terhadap Belanja Operasional Pemerintah Daerah.

Lembaga legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga yang memiliki posisi dan peran strategis terkait dengan pengawasan keuangan daerah (Winarna dan Murni, 2007). Winarna dan Murni (2007) menyatakan

bahwa lembaga legislatif atau DPRD merupakan lembaga yang memiliki potensi dan peran strategis terkait dengan pengawasan keuangan daerah. Banyaknya jumlah anggota DPRD diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga berdampak dengan adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Giligan dan Matsusaka (2001) menemukan ada pengaruh positif *legislature size* terhadap kebijakan pendapatan dan pengeluaran suatu Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, semakin banyak jumlah anggota DPRD diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah sehingga adanya peningkatan pada pengungkapan laporan keuangan Pemerintah Daerah. Dari uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah :

H₁ : Jumlah anggota DPRD berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

2. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

Ukuran organisasi menunjukkan seberapa besar organisasi tersebut. Perusahaan yang memiliki ukuran lebih besar akan memiliki tekanan yang besar pula dari publik untuk menyajikan laporan keuangannya secara lengkap. Begitu pula dalam sektor pemerintahan, Pemerintah Daerah yang memiliki ukuran besar dituntut untuk melakukan transparansi atas pengelolaan keuangannya sebagai bentuk akuntabilitas publik melalui pengungkapan

informasi yang lebih banyak dalam laporan keuangan.

Arcay dan Vazques (2005) menemukan bahwa *size* berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela perusahaan-perusahaan publik di Spanyol.

Patrick (2007) menemukan bahwa ukuran organisasi berpengaruh positif dan sangat kuat terhadap penerapan sebuah inovasi baru. Dalam sektor pemerintahan, Sumarjo (2010) juga menemukan bahwa ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, meski pengaruh tidak terlalu signifikan. Akan tetapi Lesmana (2010) menemukan bahwa ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Semakin besar ukuran Pemerintah Daerah maka kinerja keuangan diharapkan akan semakin bagus. Salah satu perwujudan akuntabilitas adalah pelaporan kinerja organisasi melalui laporan keuangan (Mahmudi, 2010).

Dengan begitu diharapkan bahwa semakin baik kinerja suatu Pemerintah Daerah diimbangi dengan pelaporan keuangan yang baik, termasuk melakukan pengungkapan rincian atas Belanja Operasi. Dari uraian diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah :

H₂ : Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah .

3. Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan Pemerintah

Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian keuangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk mengukur kemampuan suatu Pemerintah Daerah untuk tetap dapat menjalankan kegiatan operasionalnya tanpa adanya dana perimbangan dari pemerintah pusat.

Lesmana (2010) menemukan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan wajib LKPD. Tuntutan terhadap transparansi atas pengungkapan dan pelaporan keuangan juga semakin tinggi, termasuk dalam hal pengungkapan terhadap rincian belanja operasional. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan daerah maka Pemerintah Daerah cenderung untuk berusaha melakukan pengungkapan secara lengkap pada laporan keuangannya. Dari uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah :

H₃ : Rasio Kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

4. Pengaruh *Human Development Index (HDI)* Terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau juga disebut *Human Development Index (HDI)* adalah indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pembangunan manusia untuk dapat hidup berkualitas, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi (UNDP, 2004). IPM juga digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah

negara merupakan negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan digunakan untuk mengukur pengaruh kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup (UNDP, 1996).

Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia perlu memperhatikan empat hal pokok, yaitu produktifitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan (UNDP, 1996:12). Dari uraian di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah :

H₄ : HDI berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

5. Pengaruh Status Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

Penelitian ini menggunakan variabel status daerah untuk membedakan antarkota dan kabupaten. Masyarakat kotamemiliki kontrol sosial yang lebih kuat (Abdullah, 2004).

Dengan adanya kontrol sosial tersebut, tuntutan gencar dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah agar terselenggara pemerintahan yang baik sejalan dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat serta adanya pengaruh globalisasi menuntut adanya keterbukaan (Herminingsih, 2009) dalam Suhardjanto et al, 2010.

Perbedaan karakteristik antara masyarakat kota dan kabupaten inilah yang menarik untuk diteliti lebih jauh. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H₅: Terdapat pengaruh positif status daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

METODOLOGI PENELITIAN

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi berganda (*multiple regresion model*, karena terdiri dari satu variabel dependen dan beberapa variabel independen (Sekaran, 2006).

Untuk menguji pengaruh *ULEG*, *SIZE*, *MANDIRI*, *HDI*, dan *AGE* terhadap Belanja Operasi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah tahun 2012 yang dinyatakan dalam rasio kemandirian (RKM), rasio efisiensi (RES), rasio efektivitas (REK).

Kelima proksi variable kinerja keuangan sebagai variable dependen, untuk kepentingan regresi berganda harus diperoleh satu variable dependen. Cara untuk mendeteksi ada tidaknya korelasi antara proksi kelima variable tersebut maka digunakan uji *Barlett's Test of Sphericity*. Jika signifikan maka kelima proksi tersebut dapat dipergunakan sebagai variable dependen. Sebelum masuk koregresi linier berganda, data harus diuji asumsi klasik terlebih dahulu.

Tahap-tahap pengujian yang dilakukan dalam analisis regresi linier dijelaskan sebagai berikut: (a) Uji normalitas untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal sebagai syarat dalam model

regresi. (b) Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (Ghozali, 2011).

(c) Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). (d) Uji Heteroskedastisitas untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam persamaan regresi digunakan metode grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu *ZPRED* dengan residualnya *SRESID*.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan populasi seluruh laporan keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah pada tahun anggaran 2012 yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Pemilihan sampel dilakukan dengan cara *purposive sampling* dan teknik pengambilan sampel dilakukan secara *judgement sampling*.

1. Statistik Deskriptif

Adapun hasil statistik deskriptif yang dihasilkan pada penelitian ini adalah:

Tabel 1 Diskripsi Data Penelitian

	Minimum	Maximum	Mean
Belanja Operasi	-1.63623	2.95640	.0001
Rasio Kemandirian	5.658	16.340	10.4379
HDI	263.75	276.00	268.8689
DPR	25.00	50.00	43.1429
SIZE	562323845006.00	2533676148799.00	1236793989917.2634

Tabel 1 menunjukkan bahwa rasio belanja operasi kabupaten/kota Jawa Tengah mempunyai nilai rata-rata sebesar 0.0001%. Nilai minimum -1,636 dimiliki Kabupaten Karanganyar dan nilai maksimum sebesar 2,956 dimiliki Kabupaten Cilacap. Rasio kemandirian mempunyai nilai minimum sebesar 5,658% pada kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa Kabupaten Banyumas belum mandiri masih menggantungkan bantuan dari pusat, nilai maksimum sebesar 16,340% pada kota Surakarta menunjukkan Kota Surakarta sudah baik dalam mengelola keuangan daerah dan nilai rata-rata rasio kemandirian Kabupaten/Kota Jawa Tengah sebesar 10,438%.

Rasio HDI mempunyai nilai minimum sebesar 263,75 pada daerah Kabupaten Klaten, nilai maksimum sebesar 276,00 dimiliki oleh Kota Pekalongan dan nilai rata-rata rasio kemandirian Kabupaten Kota Jawa

Tengah sebesar 268,869. Nilai minimum *Legislature Size* (ukuran legislatif) sebesar 25 dimiliki oleh Kota Salatiga, nilai maksimum sebesar 50 dimiliki oleh Kabupaten Banyumas, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Pati, sedangkan nilai rata-rata *Legislature Size* Kabupaten/Kota Jawa Tengah sebesar 43.

Nilai minimum size yang diproksi dengan total pendapatan daerah sebesar Rp 562.323.845.006,00 yang dimiliki Kabupaten Salatiga, nilai Size maksimum sebesar Rp 2.533.676.148.799.00,- yang dimiliki oleh Kota Semarang hal ini menunjukkan bahwa kota Semarang memiliki ukuran terbesar dan nilai rata-rata size atau pendapatan daerah Kabupaten/Kota Jawa Tengah sebesar Rp. 1.236.793.989.917,26,-

2. Analisis Faktor

Adapun hasil analisis faktor dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2 Analisis Faktor

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.		.519
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	18.885
	Df	10
	Sig.	.042

Tabel 2 dapat dilihat bahwa *Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO) sebesar 0.519 > 0.500, sedangkan *Bartlett's Test of Sphericity* mempunyai p-value sebesar 0.042 < 0.05 yang berarti analisis factor dapat dilanjutkan, untuk membuat *factor scores* dengan menggunakan *principle component* sebagai variable dependen.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik terdiri dari normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas data.

Hasil pengujian normalitas data dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3 Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.66215510
Most Extreme Differences	Absolute	.112
	Positive	.112
	Negative	-.079
Kolmogorov-Smirnov Z		.665
Asymp. Sig. (2-tailed)		.768

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai residual mempunyai nilai *asymp. Sig Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,768 > 0.05, yang berarti bahwa seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal.

b. Uji Multikolonieritas

Hasil pengujian asumsi multikolinearitas dapat dilihat berdasarkan nilai *variance inflation factor* (VIF) dan *Tolerance* berikut ini:

Tabel 4 Uji Multikolineaitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Rasio Kemandirian	.873	1.146
	HDI	.409	2.447
	DPR	.426	2.346
	LNSIZE	.729	1.372
	Status	.273	3.663

Tabel 4 pada perhitungan *collinearity* menunjukkan bahwa nilai VIF untuk masing-masing variabel independent memiliki nilai < 10 dan nilai *tolerance* > 0.01, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada

multikolinearitas antar variabel independent pada persamaan regresi.

c. Uji Autokorelasi.

Adapun hasil uji *Runs Test* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5 Uji Autokorelasi

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.02899
Cases < Test Value	17
Cases >= Test Value	18
Total Cases	35
Number of Runs	18
Z	.000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1.000

Hasil uji *runs test* pada tabel 5 menunjukkan nilai signifikansi sebesar

0.828 > 0.05, hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi baik

positif atau negative pada persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

d. Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tidak tetap atau menyebar tidak berpola, yang mengindikasikan tidak adanya gejala heteroskedastisitas pada persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

4. Pengujian Hipotesis.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bukti empiris pengaruh karakteristik pemerintah daerah yaitu Uleg (Ukuran Legislatif, Size, Ukuran Kemandirian Mandiri, HDI (*Human Development Index*) dan Status terhadap Belanja Operasi pada pemerintah daerah Jawa Tengah dengan menggunakan analisis regresi berganda. Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7 Hasil Analisis Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-36.123	22.208		-1.627	.115
RKM	.024	.053	.060	.452	.654
HDI	-.093	.064	-.276	-1.437	.161
DPR	.062	.029	.399	2.121	.043
LNSIZE	2.025	.464	.629	4.365	.000
STATUS	1.522	.615	.582	2.474	.019

a. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji t)

Dari tabel 7 dapat diperoleh kesimpulan:

- 1) Variabel Rasio Kemandirian mempunyai *P value* (0,654) > 0.05 hal ini menunjukkan bahwa secara parsial tidak ada pengaruh signifikan Rasio Kemandirian terhadap Belanja Operasi.
- 2) Variabel *Human Development Index* mempunyai *P value* (0.161) > 0.05 hal ini menunjukkan bahwa secara parsial tidak ada pengaruh signifikan *HDI* terhadap Belanja Operasi.
- 3) Variabel Ukuran Legislatif mempunyai *P value* (0.043) < 0.05 hal ini menunjukkan secara parsial ada pengaruh signifikan *Legislator*

Size terhadap Belanja Operasi.

- 4) Variabel *Size* mempunyai *P value* (0.000) < 0,05 hal ini menunjukkan secara parsial ada pengaruh signifikan *Size* terhadap Belanja Operasi.
- 5) Variabel Status mempunyai *P value* (0.019) < 0.05 hal ini menunjukkan secara parsial ada pengaruh signifikan Status terhadap Belanja Operasi.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Hasil analisis uji F dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8 Hasil Analisis Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	19.093	5	3.819	7.428	.000 ^a
	Residual	14.907	29	.514		
	Total	34.000	34			

Hasil pengujian secara simultan pada tabel diatas menunjukkan nilai F hitung sebesar 7,428 dengan *p-value* sebesar $0.000 < 0.05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Uleg (Ukuran Legislatif), Size, Ukuran Kemandirian Mandiri, HDI (*Human Development Index*) dan Status terhadap

Belanja Operasi secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Operasi.

c. Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2) (*Goodness of Fit*)

Adapun hasil koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9 Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
.749 ^a	.562	.486	.71696868

Tabel 9 bahwa dengan *adjusted R²* sebesar 0,486 hal ini menunjukkan bahwa sebesar 48,60 % variasi dari Belanja Operasi dapat diterangkan oleh variabel Uleg (Ukuran Legislatif), Size, Ukuran Kemandirian Mandiri, HDI (*Human Development Index*) dan Status, sedangkan 51,40% diterangkan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian secara statistik pada penelitian ini dapat disimpulkan:

1. Variabel Rasio Kemandirian secara parsial tidak ada pengaruh signifikan rasio kemandirian terhadap Belanja Operasi.
2. Variabel HDI secara parsial tidak ada pengaruh signifikan HDI terhadap Belanja Operasi.

3. Variabel Ukuran Legislatif secara parsial ada pengaruh signifikan *Legislator Sizet* terhadap Belanja Operasi.
4. Variabel Size secara parsial ada pengaruh signifikan *Sizet* terhadap Belanja Operasi.
5. Variabel Status secara parsial ada pengaruh signifikan *Status* terhadap Belanja Operasi.

Saran

Saran dan implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya penambahan periode pengamatan yang lebih panjang untuk memberikan gambaran yang lebih konsisten.
2. Peneliti selanjutnya seharusnya menambah variabel lain yang dapat menjadi proksi dari kinerja keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arcay, R.B., & Vazquez, F.M. (2005). *Corporate Characteristics, Governance Rules and the Extent of Voluntary Disclosure in Spain*. *Advances in Accounting*. Vol. 21: 299-331.
- Abdullah, Syukriy. 2004. *Perilaku oportunistik legislatif dalam penganggaran daerah: Pendekatan Principal-Agent Theory*. Makalah disajikan di Seminar Antarbangsa di Universitas Bengkulu, Bengkulu, 4-5 Oktober 2004.
- Baber, William R, Gore, Angela K, Rich, Kevin T and Zhang, Jean X. 2010. *An Empirical Investigation of Accounting Restatements and Governance in the Municipal Context*. Working Paper Series. SSRN August.
- Damanpour, F. 1991. *Organizational innovation: A meta-Analysis of effects of determinants and moderators*. *Academy of Management Journal*, Vol. 34:555-590
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 19, Edisi Kelima*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Giligan, Thomas W. & Matsusaka J. G. (2001). *Fiscal Policy, Legislature Size and Political Parties: Evidence from State and Local Governments in the First Half of the 20th Century*. *National Tax Journal*. Vol 54: 57-82
- Halim, Abdul & Theresia Damayanti. *Seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah: Pengelolaan Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN. 2011.
- Lesmana, Sigit I. (2010). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia*. Tesis, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Edisi ke-2. UPP STIM YKPN. Yogyakarta
- Patrick, Patricia A. 2007. *The determinants of organizational innovativeness: The adoption of GASB 34 in Pennsylvania local government*. Ph. D. dissertation, The Pennsylvania State University, United States-Pennsylvania. Retrieved August 8, 2011, from *Accounting & Tax Periodicals*. (Publication No. AAT)
- Prayitno, Hadi. 2012. *Birokrasi Tambun; 291 Daerah Habiskan Separuh Lebih APBD untuk Belanja Pegawai*. Seknas FITRA. <http://seknasfitra.org/pressrelease/birokrasi-tambun-291-daerah-habiskan-separuh-lebih-apbd-untuk-belanja-pegawai/>. (Diakses 2 November 2014).
- , PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- , PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business: "Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat
- Suhardjanto, Djoko dan Rena Rukmita Yulianingtyas. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten Kota di Indonesia)*. *Jurnal Akuntansi & Auditing Volume 8 No. 1*, 1-94.
- Sumarjo, Hendro. (2010). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi, Fakultas Ekonomi UNS.
- Suyono, 2010. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Tesis. UNS.
- UNDP. 2004. *Human Development Report*. United Nations Development Programme. New York
- Winarna, J and Murni, S. (2007). *Pengaruh Personal Background, Political Background, dan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Keuangan Daerah (Study Kasus di Karesidenan Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006)*. Simposium Nasional Akuntansi X.
- Yudhoyono, Susilo Bambang. 2011. *Inilah pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang*

**PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
MELALUI PENGGAJIAN POTENSI RETRIBUSI PARKIR
DI KABUPATEN PONOROGO**

Oleh:

SLAMET SANTOSO¹⁾
CHOIRUL HAMIDAH²⁾
EDY KURNIAWAN³⁾

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggali potensi retribusi parkir sehingga mampu memberikan sumbangan yang berarti untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Penelitian ini dilaksanakan di lokasi parkir tepi jalan umum dan parkir di pasar kecamatan dengan jumlah responden yang diwawancarai sebanyak 132 juru parkir. Metode analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif dan berdasarkan hasil pengolahan data lapangan dilakukan proyeksi potensi penerimaan retribusi parkir tiga estimasi, yaitu estimasi optimis, moderat, dan pesimis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa potensi retribusi parkir di tepi jalan umum secara total mampu mencapai nilai yang cukup besar. Berdasarkan ketiga estimasi (pesimis, moderat, dan optimis) potensi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum yang lebih mendekati dengan kondisi dan perkembangan yang ada adalah menggunakan estimasi moderat.

Kata Kunci: Potensi Retribusi Parkir, Pendapatan Asli Daerah

PENDAHULUAN

Perkembangan retribusi parkir di Kabupaten Ponorogo dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 terdapat fluktuasi prosentase capaian antara realisasi penerimaan dengan target yang telah ditentukan. Pada tahun 2000, 2001 dan 2003, capaian realisasi penerimaan retribusi parkir dapat sebanding target yang telah ditentukan (berada di atas target), namun untuk tahun 2002 dan 2004 capaian realisasi penerimaannya masih di bawah target yang ditentukan. Mulai tahun 2005 sampai 2007 dengan diberlakukannya parkir berlangganan, realisasi penerimaan retribusi parkir berada di atas target yang telah ditetapkan. Namun demikian, kondisi tersebut berbalik kembali karena mulai tahun 2008 kebijakan retribusi parkir berlangganan dicabut kembali dan akhirnya berdampak pada capaian realiasi

selalu dibawah target retribusi parkir yang sudah ditentukan. Pada tahun 2008 prosentase capaiannya sebesar 27,6%, tahun 2009 mencapai 57,2% dan tahun 2009 mencapai 73,5%. Sedangkan untuk tahun 2011 dan 2012 realisasi penerimaan sama dengan target yang telah ditetapkan, dan baru pada tahun 2013 realisasi penerimaan berada di atas target yang ditetapkan, yaitu prosentase capaiannya sebesar 104,5% (Dinas Perhubungan; 2014). Menurut Mardiasmo (2000) bahwa dalam kenyataan di lapangan atau secara riil yang dihadapi oleh pemerintah daerah, jumlah pajak dan retribusi yang berhasil dikumpulkan sering kali tidak pernah mencapai angka 100 persen. Hal ini terjadi karena beberapa alasan berikut: a) Pemerintah daerah tidak mungkin mengumpulkan semua jenis pendapatan sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-

undang; dan b) Walaupun menggunakan sistem dan prosedur yang baik, seringkali tetap terdapat beberapa sumber pendapatan yang hilang. Pendapat tersebut sesuai dengan hasil penelitian "*Pendataan dan Penghitungan Potensi Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2004*" (Rido Kurnianto dan Slamet Santoso; 2004) yaitu menyimpulkan bahwa potensi penerimaan pajak per tahun di Kabupaten Ponorogo adalah sangat besar. Jika dibandingkan dengan target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan, penetapan target tersebut masih sangat jauh dari potensi yang ada. Hasil penelitian tersebut memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa telah terjadi *potential loss* dalam penetapan target penerimaan pajak daerah karena dalam penetapannya belum mengacu pada data riil di lapangan. Selain itu, hasil penelitian Slamet Santoso dan Rony Handayanto (2006) tentang "*Analisis Potensi Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo*", menyimpulkan bahwa hasil perbandingan target pajak restoran yang ditetapkan dengan potensi pajak restoran hasil penggalan data di lapangan adalah bahwa target pajak restoran yang ditetapkan tersebut masih sangat rendah, yaitu hanya sebesar 10,96 % dari potensi pajak restoran. Sedangkan hasil penelitian "*Analisis Potensi Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo*" (Slamet Santoso dan Rony Handayato; 2007) menyimpulkan bahwa penerimaan pajak hotel di Kabupaten Ponorogo mempunyai potensi yang sangat besar, yaitu ditunjukkan pada tahun 2006 realisasi penerimaan pajak hotel hanya sekitar 23,7% dari potensi penerimaan pajak

hotel. Meskipun secara target penerimaan pajak hotel dari tahun ke tahun dapat tercapai, tetapi dalam penetapan target pajak hotel tahunan belum berdasarkan potensi yang ada atau belum berdasar data riil di lapangan. Berdasarkan kondisi riil penerimaan retribusi parkir dan didukung dengan beberapa hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat memberikan gambaran bahwa penetapan target penerimaan masih belum mempertimbangan kondisi riil di lapangan sehingga terdapat fluktuasi yang cukup tajam dengan realisasi penerimaannya. Oleh sebab itu, pendataan potensi menjadi sangat penting dilakukan agar tidak terjadi fluktuasi yang sangat tajam antara target penerimaan dengan realisasi penerimaan per tahun. Penetapan target penerimaan retribusi parkir yang berdasarkan kondisi riil di lapangan dapat menghindari terjadinya *potential loss* dalam setiap tahun dan akhirnya mampu memberikan sumbangan yang berarti terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Ponorogo, yaitu lokasi parkir di tepi jalan umum dan lokasi parkir di pasar kecamatan. Responden dalam penelitian adalah seluruh petugas parkir atau juru parkir yang berada pada lokasi penelitian tersebut sebanyak 132 responden. Teknik penggalan data menggunakan wawancara secara langsung kepada juru parkir dengan dipandu kuesioner yang telah disiapkan. Selain itu, juga dilakukan pengamatan langsung untuk mengetahui aktifitas juru parkir dan kerja sama antara kelompok juru parkir. Teknik

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif, yaitu pengungkapan atau penggambaran tentang keadaan faktual dan akurat tentang obyek yang diamati dan dibahas secara analitis bertitik tolak dari pemikiran, konsep dan paradigma yang melandasi. Berdasarkan data yang diperoleh, secara kuantitatif akan diproyeksikan potensi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum dengan tiga estimasi, yaitu estimasi optimis, moderat dan pesimis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran secara umum tentang profil juru parkir yang berada di wilayah Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut (Slamet Santoso dkk; 2014):

- a. Tingkat pendidikan juru parkir di tepi jalan umum rata-rata berpendidikan tingkat SLTA. Jumlah juru parkir yang berpendidikan tingkat SD sebanyak 36 orang atau 27,30%, tingkat SLTP sebanyak 31 orang atau 23,50%, tingkat SLTA sebanyak 64 orang atau 48,50%, dan tingkat Perguruan Tinggi sebanyak 1 orang atau 0,80%.
- b. Tahun mulai menjadi juru parkir sangat bervariasi, yaitu sejak tahun 1975 dan ada yang baru menjadi juru parkir pada tahun 2014. Jumlah juru parkir yang memulai usaha parkir di tepi jalan umum antara tahun 1975 sampai dengan 1984 sebanyak 8 orang atau 6,06%, antara tahun 1985 sampai dengan 1994 sebanyak 7 orang atau 5,30%, antara tahun 1995 sampai dengan 2004 sebanyak 40 orang atau 30,30%, dan antara tahun 2005 sampai dengan 2014 sebanyak 77 orang atau 58,33%.
- c. Status usaha parkir di tepi jalan umum ini adalah usaha yang dilakukan bersifat mandiri atau dilakukan sendiri atau usaha tersebut dilakukan secara berkelompok. Jumlah juru parkir yang menjalankan usaha parkir di tepi jalan umum secara mandiri sebanyak 62 orang atau 47,00% dan yang menjalankan secara berkelompok sebanyak 70 orang atau 53,00%.
- d. Aktivitas parkir di tepi jalan umum tidak selalu dilakukan setiap hari. Beberapa juru parkir pada hari tertentu tidak bekerja sebagai juru parkir, namun secara mayoritas mereka setiap hari melakukan usaha juru parkir tersebut. Jumlah juru parkir yang setiap hari menjalankan usahanya sebanyak 84 orang atau 63,60%, pada hari Minggu tidak menjalankan usaha sebanyak 11 orang atau 8,30%, pada hari Sabtu dan Minggu tidak menjalankan usaha sebanyak 6 orang atau 4,50%, dan pada hari tertentu (hari pasaran jawa) tidak menjalankan usaha sebanyak 31 orang atau 23,50%.
- e. Jumlah kendaraan sepeda motor yang diparkir per hari paling sedikit sejumlah 10 kendaraan dan paling banyak sejumlah 300 kendaraan. Jumlah juru parkir yang setiap hari memarkir kendaraan sepeda motor di bawah 49 kendaraan sebanyak 66 orang atau 50,00%, antara 50 sampai dengan 99 kendaraan sebanyak 36 orang atau 27,77%, antara 100 sampai dengan 149 kendaraan sebanyak 17 orang atau 12,88%, antara 150 sampai dengan 199 kendaraan sebanyak 9 orang atau 6,82%, antara 200 sampai dengan 249 kendaraan sebanyak 2 orang atau 1,52%, dan di atas

250 kendaraan sebanyak 2 orang atau 1,52%.

- f. Penghasilan per hari terendah yang diterima oleh juru parkir sebanyak Rp 10.000 dan yang tertinggi sebanyak Rp 350.000. Penghasilan juru parkir per hari di bawah Rp 49.000 sebanyak 68 orang atau 51,52%, penghasilan antara Rp 50.000 sampai dengan Rp 99.000 sebanyak 42 orang atau 31,82%, penghasilan antara Rp 100.000 sampai dengan Rp 149.000 sebanyak 12 orang atau 9,09%, penghasilan antara Rp 150.000 sampai dengan Rp 199.000 sebanyak 5 orang atau 3,79%, penghasilan antara Rp 200.000 sampai dengan Rp 249.000 sebanyak 1 orang atau 0,76%, dan penghasilan di atas Rp 250.000 sebanyak 4 orang atau 3,03%.
- g. Terkait dengan jumlah setoran perbulan, juru parkir yang bersedia menyampaikan jumlah setoran per bulan sebanyak 102 orang dan yang tidak bersedia menyampaikan jumlah setoran per bulan sebanyak 30 orang. Jumlah setoran per bulan paling rendah dari juru parkir sebesar Rp 5.000 dan paling tinggi sebesar Rp 740.000. Jumlah setoran per bulan juru parkir di bawah Rp 100.000 sebanyak 31 orang atau 23,48%, setoran antara Rp 100.000 sampai dengan Rp 199.000 sebanyak 42 orang atau 31,82%, setoran antara Rp 200.000 sampai dengan Rp 299.000 sebanyak 13 orang atau 9,85%, setoran antara Rp 300.000 sampai dengan Rp 399.000 sebanyak 3 orang atau 2,27%, dan setoran di atas Rp 500.000 sebanyak 3 orang atau 2,27%

Berdasarkan hasil penggalan data di lapangan (Slamet Santoso dkk; 2014), data yang diperoleh diolah dan dijadikan data base untuk menghitung potensi dari retribusi parkir tepi jalan umum. Formula untuk menghitung potensi retribusi parkir tepi jalan umum pada kondisi hari rata-rata, kondisi hari ramai, kondisi hari sepi, dan kondisi bulan ramai adalah sebagai berikut:

$$PRt = (Spd \times TSpd \times HR) + (SM \times TSM \times HR) + (M \times TM \times HR)$$

$$PRm = (Spd \times TSpd \times HRm) + (SM \times TSM \times HRm) + (M \times TM \times HRm)$$

$$PSp = (Spd \times TSpd \times HSp) + (SM \times TSM \times HSp) + (M \times TM \times HSp)$$

$$PBR = (Spd \times TSpd \times HBR) + (SM \times TSM \times HBR) + (M \times TM \times HBR)$$

Keterangan:

- PRt = Potensi retribusi parkir tepi jalan umum pada kondisi hari rata-rata
- PRm = Potensi retribusi parkir tepi jalan umum pada kondisi hari ramai
- PSp = Potensi retribusi parkir tepi jalan umum pada kondisi hari sepi
- PBR = Potensi retribusi parkir tepi jalan umum pada kondisi bulan ramai
- Spd = Jumlah sepeda pancal yang diparkir
- SM = Jumlah sepeda motor yang diparkir
- M = Jumlah mobil yang diparkir
- TSpd = Tarif parkir sepeda pancal
- TSM = Tarif parkir sepeda motor
- TM = Tarif parkir mobil
- HR = Jumlah hari kerja dalam satu tahun dikurangi dengan jumlah hari kondisi ramai, jumlah hari kondisi sepi, dan jumlah hari kondisi bulan ramai

HRm = Jumlah hari kondisi ramai dalam satu tahun
 HSp = Jumlah hari kondisi sepi dalam satu tahun
 HBR = Jumlah hari pada bulan ramai dalam satu tahun

Berdasarkan keempat formula tersebut di atas, maka untuk menghitung potensi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum untuk satu tahun dengan formula sebagai berikut:

$$PRPTJU = \frac{(PRt + PRm + PSp + PBR)}{50\%}$$

Keterangan :

PRPTJU = Potensi retribusi parkir tepi jalan umum dalam satu tahun
 PRt = Potensi retribusi parkir tepi jalan umum pada kondisi hari rata-rata
 PRm = Potensi retribusi parkir tepi jalan umum pada kondisi hari ramai
 PSp = Potensi retribusi parkir tepi jalan umum pada kondisi hari sepi
 PBR = Potensi retribusi parkir tepi jalan umum pada kondisi bulan ramai
 50% = Bagi hasil antara juru parkir sebesar 50% dan Dinas Perhubungan sebesar 50% dari potensi yang ada

Selanjutnya untuk memproyeksi target penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum menggunakan tiga estimasi, yaitu estimasi pesimis, moderat, dan optimis. Etimasi pesimis menggunakan prosentase sebesar 30%, estimasi moderat menggunakan prosentasi sebesar 50%, dan estimasi optimis sebesar 70% dari potensi yang ada setelah dikurangi bagi hasil. Hasil proyeksi potensi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum dengan menggunakan formula dan ketiga estimasi di atas adalah sebagai berikut:

- Proyeksi dengan estimasi *pesimis* sebesar Rp 391.207.950 per tahun
- Proyeksi dengan estimasi *moderat* sebesar Rp 652.013.250 per tahun
- Proyeksi dengan estimasi *optimis* sebesar Rp 912.818.550 per tahun

Berdasarkan hasil proyeksi ketiga estimasi tersebut di atas maka dapat digunakan untuk melakukan proyeksi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Proyeksi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 (menggunakan asumsi pertumbuhan ekonomi 6%) dapat diperinci sebagai berikut:

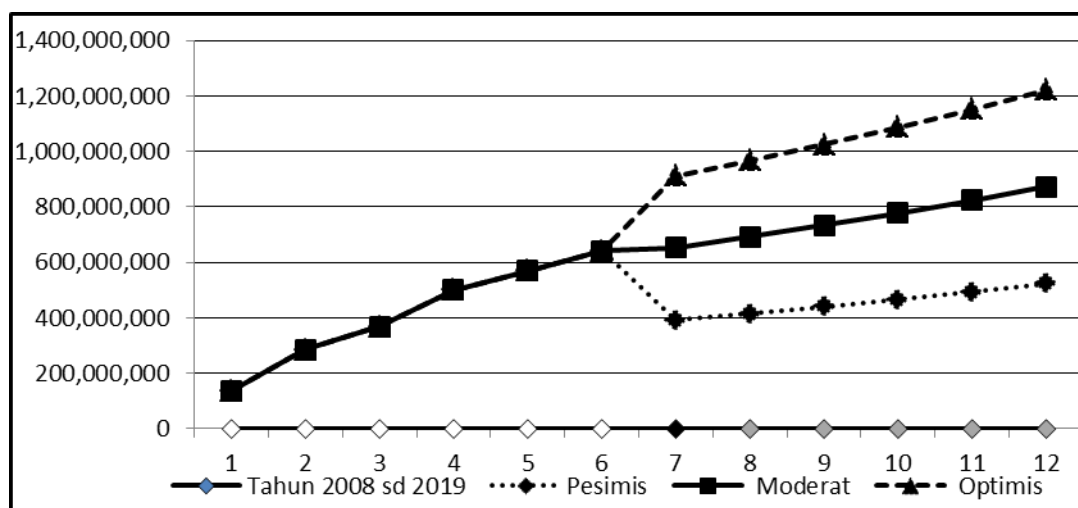
Tabel 1. Proyeksi Penerimaan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019

Estimasi	2015	2016	2017	2018	2019
Pesimis	414.680.427	439.561.253	465.934.928	493.891.023	523.524.485
Moderat	691.134.045	732.602.088	776.558.213	823.151.706	872.540.808
Optimis	967.587.663	1.025.642.923	1.087.181.498	1.152.412.388	1.221.557.131

Sumber: data primer yang diolah, 2014

Berdasarkan tabel 1 tersebut di atas, proyeksi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum dengan menggunakan estimasi *moderat* merupakan proyeksi yang lebih sesuai dengan perkembangan realisasi penerimaan retribusi parkir sampai saat ini. Hal tersebut dapat digambarkan dari

perkembangan realisasi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, pada saat penelitian tahun 2014, dan proyeksi pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 (lihat gambar 1).



Catatan :

- ◇ = Realisasi Retribusi Parkir dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013
- ◆ = Hasil Penelitian pada tahun 2014
- ◇ = Proyeksi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum tahun 2015 sampai dengan tahun 2019

Gambar 1. Realisasi dan Proyeksi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Estimasi Pesimis, Moderat, dan Optimis Tahun 2008 sampai dengan 2019

Berdasarkan gambar 1 tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa dengan menggunakan estimasi *moderat*, perkembangan potensi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum lebih realistis, mendekati kondisi riil, dan terdapat kenaikan yang signifikan untuk setiap tahun.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Potensi retribusi parkir di tepi jalan umum secara total mampu mencapai nilai sebesar

Rp 2.608.053.00 dan untuk potensi bagi hasil (sebesar 50%) mampu mencapai nilai sebesar Rp 1.304.026.500;

- b. Potensi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum dengan menggunakan estimasi *pesimis* (sebesar 30% dari potensi bagi hasil) adalah sebesar Rp 391.207.950. Potensi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum dengan menggunakan estimasi *moderat* (sebesar 50% dari potensi bagi hasil) adalah sebesar Rp 652.013.250. Potensi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum dengan menggunakan estimasi *optimis* (sebesar

70% dari potensi bagi hasil) adalah sebesar Rp 912.818.550;

- c. Berdasarkan ketiga estimasi (*pesimis*, *moderat*, dan *optimis*) potensi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum yang lebih mendekati dengan kondisi dan perkembangan yang ada adalah menggunakan estimasi *moderat*; dan
- d. Proyeksi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum, menggunakan estimasi *moderat* dan asumsi pertumbuhan sebesar 6% per tahun, pada tahun 2015 sebesar Rp 691.134.045, pada tahun 2016 sebesar Rp 732.602.088, pada tahun 2017 sebesar Rp 776.558.213, pada tahun 2018 sebesar Rp 823.151.706, dan pada tahun 2019 sebesar Rp 872.540.808.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

- a. Data base potensi retribusi parkir di tepi jalan umum perlu ditindaklanjuti dengan tersedianya sistem informasi pengelolaan yang memadai sehingga pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum dapat dijalankan secara baik, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- b. Berbagai temuan yang terangkum dalam data base potensi retribusi parkir di tepi jalan umum sangat perlu ditindaklanjuti dan selalu dilakukan pembaharuan data. Oleh sebab itu, pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo dapat mengeluarkan kebijakan terkait peningkatan potensi penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum, baik menyangkut manajemen pengelolaan, pembinaan juru parkir,

maupun penemuan potensi baru retribusi parkir di tepi jalan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo, 2000, "*Penghitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang*", Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dengan Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Rido Kurnianto, Slamet Santoso, 2004, "*Pendataan dan Penghitungan Potensi Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2004*", kerja sama antara Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Slamet Santoso dan Rony Handayanto, 2006, "*Analisis Potensi Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo*", penelitian yang didanai oleh DP2M Ditjen Dikti Depdiknas Tahun 2006, dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor : 233/SP3/PP/DP2M/II/2006.
- Slamet Santoso dan Rony Handayato, 2007, "*Analisis Potensi Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ponorogo*", penelitian yang didanai oleh DP2M Ditjen Dikti Depdiknas Tahun 2007, dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor : 008/SP2H/DP2M/III/2007.
- Slamet Santoso, Heri Wijayanto, Edy Kurniawan, 2014, "*Pengembangan Model Sistem Informasi Retribusi Parkir Berbasis WEB untuk Mewujudkan Transparansi Keuangan Daerah di Kabupaten Ponorogo*" Penelitian Hibah Bersaing dibiayai oleh Kopertis Wilayah VII Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian Nomor 022/SP2H/P/K7/KM/IV/2014, tanggal 5 April 2014.
- , 2014, "*Data Target dan Realisasi Retribusi Parkir*", Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo

ANALISIS KOMITMEN PENERAPAN PESAN GIZI SEIMBANG PADA KELUARGA DI DAERAH ENDEMI *DOWN SYNDROM*

Oleh :

SUGENG MASHUDI

UNIVERSITAS MUHAMAMDIYAH PONOROGO

Email:nershudi@gmail.com

ABSTRAK

Analisis komitmen penerapan pesan gizi seimbang pada keluarga di daerah endemi *down syndrom* belum pernah dilakukan. Dibutuhkan komitmen yang baik untuk menerapkan pedoman gizi seimbang untuk menjadikan keluarga sadar gizi. Desa Kreet yang terletak 18 km dari pusat kota Ponorogo merupakan salah satu desa dengan status gizi yang masih rendah. Data dari Dinas kesehatan Ponorogo pada tahun 2011 sebanyak 308 anak balita gizi buruk, tahun 2012 sebanyak 240 anak gizi buruk dan khususnya di Desa Kreet terdapat 83 balita penderita gizi buruk. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui komitmen penerapan pesan gizi seimbang pada keluarga di daerah endemi *down syndrom*. Metode penelitian yang digunakan adalah observasional analitik dengan pendekatan *cross sectional*. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kreet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Populasi adalah seluruh keluarga yang mempunyai anak balita usia 1-5 tahun selama bulan Juni 2015. Teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling* yang diseleksi berdasarkan kriteria inklusi. Kriteria inklusi meliputi: 1) warga tetap desa Kreet; 2) tinggal satu rumah dengan anak; 3) mengasuh anak secara mandiri; 4) bisa membaca dan menulis. Sementara kriteria eksklusinya yaitu keluarga dengan anak balita penderita penyakit kronis (seperti TB) dan penyakit cacangan. Jumlah sampel penelitian sebanyak 44 responden. Variabel penelitian adalah komitmen keluarga penerapan pesan gizi seimbang. Data yang terkumpulkan dari koeksioner kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden paling banyak adalah SMP 52% dan yang paling sedikit adalah PT 5 %. Usia responden paling banyak adalah 27-30 tahun sebanyak 25% dan yang paling sedikit adalah 43-46 tahun sebanyak 7%. Sebanyak 100%, semua responden berasal dari suku Jawa. Terdapat empat responden berkomitmen negatif dan 44 responden memiliki komitmen positif. Kemampuan ibu dalam menyiapkan menu harian yang cukup gizi merupakan bentuk komitmen ibu dalam memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Meskipun hanya dilihat dari faktor pendidikan, usia, dan budaya hal ini jika dikaitkan dengan faktor yang mempengaruhi penyusunan gizi seimbang bahwa faktor tingkat ekonomi, dan kondisi kesehatan tercermin dalam tingkat pendidikan masyarakat, sehingga untuk melihat dua faktor tersebut peneliti cukup melihat dari sisi tingkat pendidikan. Kecenderungan gizi buruk dan pendidikan rendah pada sebuah keluarga akan mengakibatkan daya tahan tubuh menurun. Kondisi daya tahan yang menurun akan mengakibatkan individu mudah terserang penyakit. Faktor yang mempengaruhi penyusunan gizi seimbang yang masih jarang dikaji peneliti yaitu aktivitas, kebiasaan makan (*like or dislike*); dan ketersediaan pangan setempat.

Kata Kunci: *Komitmen, Pesan gizi seimbang, endemik down syndrome.*

PENDAHULUAN

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat tahun 2013 menyebutkan, pada saat ini Indonesia mengalami beban ganda masalah gizi yaitu, kekurangan gizi dan kelebihan gizi. Pada

dasarnya keadaan ini disebabkan karena konsumsi makanan yang tidak seimbang, mengkonsumsi makanan yang bergizi kurang dibanding kecukupan gizi yang dianjurkan akan menimbulkan masalah gizi kurang dan gizi buruk berupa Kekurangan Energi Protein

(KEP), sementara mengkonsumsi makanan yang bergizi lebih dibanding dengan kecukupan gizi akan memunculkan masalah gizi lebih yakni obesitas (Marmi, 2013). Gizi kurang dan gizi buruk merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian, karena dapat menimbulkan *the lost generation*. Kualitas bangsa di masa depan akan sangat dipengaruhi keadaan atau status gizi pada saat ini, terutama balita (Prasetyawati, A.E. 2012). Indonesia memperkenalkan pedoman “4 sehat 5 sempurna” sejak tahun 1950 namun kini pedoman tersebut sudah tidak sesuai dan di ganti dengan Pedoman Gizi Seimbang (PGS) (Marmi, 2013). Dibutuhkan kesadaran dan komitmen untuk menerapkan pedoman gizi seimbang untuk menjadikan keluarga sadar gizi. Desa Krebet yang terletak 18 km dari pusat kota Ponorogo merupakan salah satu desa dengan status gizi yang masih rendah. Dinas kesehatan Ponorogo (2013) tahun 2011 sebanyak 308 anak balita gizi buruk, tahun 2012 sebanyak 240 anak gizi buruk dan khususnya di Desa Krebet terdapat 83 balita penderita gizi buruk. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui komitmen penerapan pesan gizi seimbang pada keluarga di daerah endemi *down syndrom*.

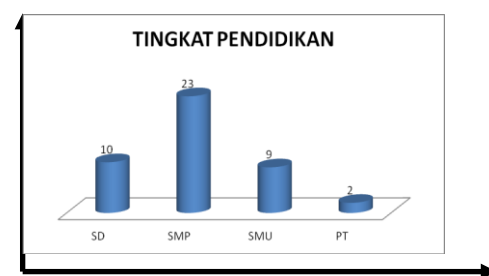
METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah observasional analitik dengan pendekatan *cross sectional*. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Populasi adalah seluruh keluarga yang mempunyai anak balita usia 1-5 tahun selama bulan Juni 2015. Teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random sampling* yang diseleksi

berdasarkan kriteria inklusi. Kriteria inklusi meliputi: 1) warga tetap desa Krebet; 2) tinggal satu rumah dengan anak; 3) mengasuh anak secara mandiri; 4) bisa membaca dan menulis. Sementara kriteria eksklusinya yaitu keluarga dengan anak balita penderita penyakit kronis (seperti TB) dan penyakit cacangan. Jumlah sampel penelitian sebanyak 44 responden. Variabel penelitian adalah komitmen keluarga penerapan pesan gizi seimbang. Data yang terkumpulkan dari koesoner kemudian dianalisis secara deskriptif.

HASIL

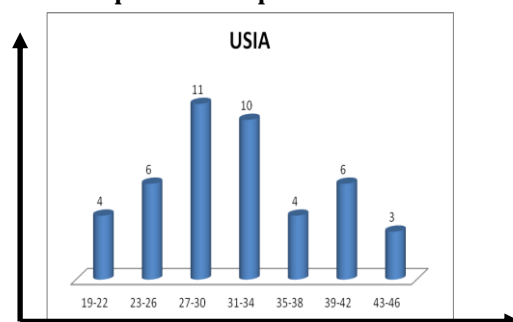
Tingkat Pendidikan Responden



Gambar 1 Tingkat Pendidikan Responden

Berdasarkan gambar 5.1 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden paling banyak adalah SMP 52% dan yang paling sedikit adalah PT 5 %.

Usia Responden Responden

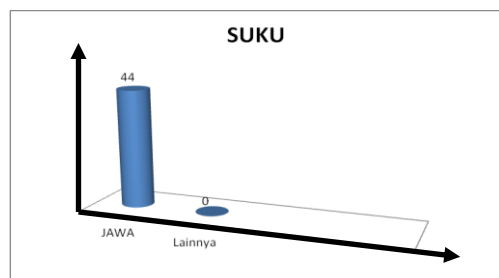


Gambar 2 Sebaran Usia Responden

Berdasarkan gambar 5.2 menunjukkan

bahwa usia responden paling banyak adalah 27-30 tahun sebanyak 25% dan yang paling sedikit adalah 43-46 tahun sebanyak 7%.

Suku Bangsa Responden



Gambar 3 Sebaran Suku Responden

Berdasarkan gambar 5.3 menunjukkan bahwa 100% responden berasal dari suku Jawa.

Tabel 1. komitmen pemenuhan gizi ibu di daerah endemik down syndrome

	Jumlah Responden	
	Positif	Negatif
Komitmen	40	4

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa dari 44 responden, jumlah responden yang memiliki komitmen positif 40 responden dan hanya empat responden dengan komitmen negatif.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian yang tersaji dalam tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat 5 responden berkomitmen buruk dan 39 responden berkomitmen baik. Komitmen merupakan kemampuan dan kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan komitmen mencakup cara mengembangkan tujuan atau memenuhi kebutuhan yang intinya

mendahulukan misi kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi (Soekidjan, 2009). Gizi seimbang merupakan susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktifitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal (Marmi, 2013). Komitmen keluarga dalam memenuhi gizi seimbang merupakan kemampuan ibu dalam menyiapkan menu harian yang cukup gizi pada keluarga di daerah endemik down syndrome. Secara umum bahwa berdasarkan gambar 5.1 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan responden paling banyak adalah SMP 52% dan yang paling sedikit adalah PT 5 %. Gambar 5.2 menunjukkan bahwa usia responden paling banyak adalah 27-30 tahun sebanyak 25% dan yang paling sedikit adalah 43-46 tahun sebanyak 7%. Serta gambar 5.3 bahwa sebanyak 100% responden berasal dari suku Jawa. Terdapat delapan faktor yang mempengaruhi penyusunan gizi seimbang, diantaranya 1) tingkat ekonomi (terjangkau dalam keuangan keluarga); 2) sosial budaya (tidak bertentangan); 3) kondisi kesehatan; 4) umur; 5) berat badan; 6) aktivitas; 7) kebiasaan makan (*like or dislike*); 8) ketersediaan pangan setempat (Marmi, 2013). Menurut Pender (2011) faktor yang berpengaruh terhadap komitmen yaitu a) faktor Perilaku, frekuensi perilaku kesehatan yang sama atau serupa di masa lalu memengaruhi seseorang untuk memiliki komitmen terhadap kesehatan. b) Faktor personal meliputi (1) Biologis, faktor biologis pribadi termasuk variabel seperti usia, jenis kelamin, kekuatan, kelinahan dan

kesinambungan; (2) psikologis, termasuk variabel seperti motivasi diri, kompetensi yang dirasakan, status harga diri pribadi dan persepsi kesehatan; (3) sosial budaya, termasuk variabel ras, etnis, akulturasi, pendidikan, status sosial ekonomi. Menurut peneliti komitmen keluarga dalam memenuhi gizi seimbang, didefinisikan sebagai kemampuan ibu dalam menyiapkan menu harian yang cukup gizi pada keluarga di daerah endemik down syndrome, hanya dilihat dari faktor pendidikan, usia dan budaya. Meskipun hanya dilihat dari pendidikan, usia, dan budaya hal ini jika dikaitkan dengan faktor yang mempengaruhi penyusunan gizi seimbang bahwa faktor tingkat ekonomi, dan kondisi kesehatan tercermin dalam tingkat pendidikan masyarakat, sehingga untuk melihat dua faktor tersebut peneliti cukup melihat dari sisi tingkat pendidikan. Pendapat ini di dasarkan atas konsep beban kasus keluarga, bahwa tingkat pendidikan mempengaruhi ekonomi dan status kesehatan keluarga (Mashudi, S. 2012). Kecenderungan gizi buruk, pendidikan rendah pada sebuah keluarga akan mengakibatkan daya tahan tubuh menurun. Kondisi daya tahan yang menurun akan mengakibatkan individu mudah terserang penyakit. Secara konsep bahwa individu yang mudah terserang penyakit bisa juga dilihat dari aktivitas individu (Mashudi, S.2012), namun hal ini belum dikaji oleh peneliti. Secara keseluruhan dari delapan faktor yang mempengaruhi penyusunan gizi seimbang yang masih jarang dikaji peneliti yaitu aktivitas, kebiasaan makan (*like or dislike*); dan ketersediaan pangan setempat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kecenderungan gizi buruk dan pendidikan rendah pada sebuah keluarga akan mengakibatkan daya tahan tubuh menurun. Kondisi daya tahan yang menurun akan mengakibatkan individu mudah terserang penyakit. Faktor yang mempengaruhi penyusunan gizi seimbang yang masih jarang dikaji penelitian diantaranya aktivitas, kebiasaan makan (*like or dislike*); dan ketersediaan pangan setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo. 2013. *Profil Kesehatan Kabupaten Ponorogo Tahun 2012*. Ponorogo: Dinkes Ponorogo.
- Mashudi, S. 2012. *Sosiologi Keperawatan Teori dan Aplikasinya Bidang Keperawatan*. Salemba Medika Jakarta.
- Marmi. 2013. *Gizi dalam Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Pender. 2011. *The Health Promotion Model*. University of Michigan.
- Prasetyawati, Arsita Eka. 2012. *Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dalam mellenium Development Goal (MDGs)*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Soekijdan, Soegiarto. 2009. *Komitmen Organisasi Sudahkah Menjadi Bagian dari Kita*.

**PERILAKU IBU HAMIL DALAM SENAM GERAKAN TARI JATHILAN PONOROGO DI WILAYAH
PUSKESMAS BALONG KABUPATEN PONOROGO**

Oleh :
SRININGSIH¹⁾
SUJIONO²⁾

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
Email : sriningsihbidan@gmail.com¹⁾

ABSTRAK

Senam Hamil suatu latihan gerak yang dilakukan oleh wanita hamil selama masa kehamilannya dengan gerakan yang disesuaikan dengan kondisi kehamilan dan bertujuan untuk mempersiapkan kondisi fisik dan mental dalam menghadapi persalinan yang aman dan lancar sesuai waktu yang diharapkan. Untuk membantu perilaku ibu hamil dalam melakukan senam yang lebih rileks, lebih enjoy, gerakan mudah diingat dan bisa dilakukan setiap saat di rumah, maka ibu hamil diajarkan senam dengan gerakan tari jathilan Ponorogo. Disamping itu untuk melestarikan budaya Reog Ponorogo melalui bidang kesehatan. Data Puskesmas Balong tahun 2013 menunjukkan jumlah ibu hamil yang mengikuti senam hamil masih belum optimal (58%). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Perilaku ibu hamil dalam senam gerakan tari jathilan Ponorogo di wilayah Puskesmas Balong Kabupaten Ponorogo. Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kuantitatif, Populasi adalah ibu hamil yang mengikuti kelas ibu hamil/senam hamil di Puskesmas Balong dengan jumlah 40 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Purposive Sampling* dengan besar sampel 30 responden. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Data dianalisis dengan menggunakan uji statistik *Chi Square*. Hasil penelitian berdasarkan uji statistik chi square menunjukkan Perilaku ibu hamil dalam senam gerakan tari jathilan Ponorogo di wilayah Puskesmas Balong Kabupaten Ponorogo sebanyak 23 (76,7%) responden, berperilaku aktif, 7 (23,3 %) responden berperilaku pasif. Hasil penelitian direkomendasikan bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan penelitian tentang pengaruh senam hamil gerakan tari jathilan Ponorogo terhadap persalinan. Luaran hasil penelitian ini adalah berupa seminar local, artikel jurnal ilmiah dan buku ajar.

Kata Kunci: *Perilaku, ibu hamil, senam gerakan tari jathilan Ponorogo*

PENDAHULUAN

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia secara Nasional dari tahun 2004 sampai tahun 2007, menunjukkan penurunan signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007 AKI Indonesia sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup, meskipun demikian angka tersebut masih tertinggi di Asia. Sementara target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ada sebesar 226 per 100.000 kelahiran Hidup. Pelayanan terhadap ibu hamil dapat dilakukan dengan cara *antenatal care* yaitu pemeriksaan

kehamilan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil sehingga mampu menghadapi persalinan, kala nifas, persiapan memberikan ASI dan kembalinya kesehatan reproduksi secara wajar (Manuaba, 2008). Senam hamil sebagai salah satu pelayanan prenatal. Dengan senam hamil akan didapatkan kesegaran jasmani yang optimal, menjaga kondisi kesehatan bumil, mempersiapkan proses persalinan. Senam Hamil suatu latihan gerak yg dilakukan oleh wanita hamil selama masa kehamilannya dengan gerakan yang disesuaikan dengan kondisi kehamilan dan bertujuan untuk

mempersiapkan kondisi fisik dan mental dalam menghadapi persalinan yang aman dan lancar sesuai waktu yang diharapkan (Sarwono, 2005). Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo semua (100%) Puskesmas di wilayah Kabupaten Ponorogo telah mengadakan Kelas Ibu Hamil (KIH) dan senam hamil, dimana langkah-langkah senam hamil sesuai program yang telah ditetapkan. Di wilayah Puskesmas Balong Kecamatan Balong juga telah mengadakan KIH dan senam hamil sejumlah tiga tempat. Namun jumlah ibu hamil yang mengikuti senam hamil tahun 2013 menunjukkan masih belum optimal (58%). Ada beberapa factor yang mempengaruhi perilaku ibu hamil dalam melakukan senam hamil diantaranya adalah tingkat pendidikan, tingkat pengetahuan ibu dan factor lingkungan. Ibu hamil yang mengikuti senam hamil juga diajarkan gerakan-gerakan tari jathilan Ponorogo. Mengapa senam hamil dengan gerakan tari jathilan? Perkembangan kebudayaan dalam Reog Ponorogo semakin mengalami kemajuan. Kesenian ini berjalan seiring menelusuri langkah-langkah modernisasi, yang pada hakikatnya tidak akan lepas dari budaya asli, misalnya menghadirkan gerakan-gerakan tari jathilan untuk senam ibu hamil. Hal ini merupakan salah satu usaha dalam pelestarian Reog Ponorogo melalui kesehatan. Tari jathil sebagian gerakan tarinya cenderung feminin, halus dan lincah, sehingga sesuai dengan tujuan dan manfaat senam hamil diantaranya untuk menjaga kondisi otot-otot dan persendian yang berperan dalam proses mekanisme persalinan, memperkuat dan mempertahankan elastisitas otot-otot dinding

perut, otot-otot dasar panggul, otot-otot tungkai, melonggarkan persendian, ligament dan jaringan yang berperan dalam proses persalinan, mempertinggi kesehatan fisik dan psikis serta kepercayaan diri sendiri dan penolong, membentuk sikap tubuh yang prima, menguasai tehnik-tehnik pernafasan persalinan. Latihan fisik pada ibu hamil akan meningkatkan proses metabolisme tubuh. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa latihan fisik pada senam hamil akan meningkatkan kebutuhan tubuh akan oksigen (Nanik Muhimah, 2010). Untuk mengimplementasikan senam ibu hamil dengan gerakan tari jathilan, dilakukan studi pendahuluan dengan pengamatan terhadap 5 ibu hamil yang hasilnya 2 ibu dengan berperilaku aktif sedangkan 3 ibu berperilaku negatif pasif. Dalam senam gerakan tari jathilan tidak semua langkah bisa diadap, namun hanya sebagian langkah yang disesuaikan dengan keadaan ibu hamil. Senam hamil dianjurkan tidak lebih dari 30 menit, dalam seminggu 3-5 kali senam hamil. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko cedera saat hamil (Nanik Muhimah, 2010). Masalah diatas perlu adanya penyuluhan/sosialisasi kepada ibu hamil tentang senam hamil dengan gerakan tari jathilan Ponorogo. Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang perilaku ibu hamil dalam senam gerakan tari jathilan Ponorogo di wilayah Puskesmas Balong Kabupaten Ponorogo.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kuantitatif, Populasi adalah ibu hamil yang mengikuti kelas ibu

hamil/senam hamil di Puskesmas Balong dengan jumlah 40 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Purposive Sampling*, dengan besar sampel 30 responden. Pengumpulan data menggunakan koesioner. Data dianalisis dengan menggunakan uji statistik *Chi Square*.

HASIL PENELITIAN

A. Data Umum

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Tabel 5.1 Distribusi Responden Berdasarkan Usia

No	Umur (Tahun)	Frekuensi (f)	Prosentase (%)
1	20 - 30	13	43,34
2	30 - 40	16	53,33
3	> 40	1	3,33
Jumlah		30	100

Berdasarkan tabel 5.1 menunjukkan bahwa sebagian besar 16 (53,33%) responden berusia 30-40 tahun, sedangkan sebagian kecil 1(3,33%) responden berusia > 40 tahun.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 5.2 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Prosentase (%)
1	SD	2	6,67
2	SMP	11	36,67
3	SMA	13	43,33
4	Perguruan Tinggi	4	13,33
Jumlah		30	100

Berdasarkan tabel 5.2 di atas menunjukkan bahwa hampir setengahnya 13(43,33%) responden pendidikan SMA, sedangkan sebagian kecil 2(6,67%) responden pendidikan SD.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 5.3 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Pekerjaan

N o	Pekerjaa n	Frekuensi	Prosentas e (%)
1	IRT	14	46,67
2	Swasta	14	46,67
3	PNS	-	-
4	Tani	2	6,6
JUMLAH		30	100

Berdasarkan tabel 5.3 di atas menunjukkan hampir setengahnya 14(46,67%) responden sebagai IRT dan bekerja swasta, sedangkan sebagian kecil 2(6,66%) responden tani.

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Paritas

Tabel 5.4 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Paritas

No	Hamil ke	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Satu	11	36,67
2	Dua	18	60
3	Tiga	1	3,33
JUMLAH		30	100

Berdasarkan tabel 5.4 di atas menunjukkan sebagian besar 18(60%) responden paritas dua, sedangkan sebagian kecil 1(3,33%) responden paritas tiga.

5. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Kehamilan

Tabel 5.5 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Usia Kehamilan

No	Usia Kehamilan	Frekuensi	Prosentase (%)
1	22-28 minggu	18	60
2	29-36 minggu	10	33,33
3	37-40 minggu	2	6,67
JUMLAH		30	100

Berdasarkan tabel 5.5 di atas menunjukkan sebagian besar 18(60%) responden Usia

Kehamilan 22-28 minggu, dan sebagian kecil 2 (6,67%) responden Usia Kehamilan 37-40 minggu.

B. Data Khusus

Perilaku ibu hamil dalam senam gerakan tari jathilan Ponorogo di wilayah Puskesmas Balong Kabupaten Ponorogo

Tabel 5.6 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Perilaku ibu hamil dalam senam gerakan tari

jathilan Ponorogo di wilayah Puskesmas Balong Kabupaten Ponorogo

No	Perilaku	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Aktif	23	76,67
2	Pasif	7	23,33
JUMLAH		30	100

Berdasarkan tabel 5.6 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar 23 (76,67%) responden berperilaku aktif, sedangkan sebagian kecil 7 (23,33%) responden berperilaku pasif.

Uji Statistik Chi Squer :

PERILAKU_SENAM

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid AKTIF	23	76.7	76.7	76.7
PASIF	7	23.3	23.3	100.0
Total	30	100.0	100.0	

Statistics

	USIA	PEKERJAAN	PENDIDIKAN	USIA KEHAMILAN	PARITAS	PERILAKU SENAM
N Valid	30	30	30	30	30	30
Missing	0	0	0	0	0	0
Mean	1.6000	1.6667	2.6333	1.4667	1.6333	1.2333
Median	2.0000	2.0000	3.0000	1.0000	2.0000	1.0000
Mode	2.00	1.00 ^a	3.00	1.00	2.00	1.00
Std. Deviation	.56324	.80230	.80872	.62881	.49013	.43018
Minimum	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Maximum	3.00	4.00	4.00	3.00	2.00	2.00

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

PEMBAHASAN

Hasil penelitian terhadap ibu hamil yang mengikuti kelas ibu hamil /senam hamil dengan gerakan tari jathilan Ponorogo menunjukkan bahwa sebagian besar 23 (76,67%) responden berperilaku aktif, sedangkan sebagian kecil 7 (23,33%) responden berperilaku pasif.

1. Perilaku aktif.

Berdasarkan tabel 5.6 menunjukkan bahwa sebagian besar 23 (76,67%) responden berperilaku aktif. Dari 23 responden yang berperilaku aktif, yaitu 11 (47,83) responden berusia 20-30 tahun. Usia 21-30 tahun termasuk golongan usia yang sangat produktif. Pada masa ini merupakan penyesuaian diri terhadap

pola-pola kehidupan baru dan harapan-harapan sosial. Orang dewasa muda ini diharapkan memainkan peran baru seperti peran suami/istri, orang tua, pencari nafkah dan mengembangkan sikap-sikap baru (Widayatun, 2009). Oleh karena itu disini seorang wanita dituntut untuk bertanggung jawab sebagai seorang ibu, sehingga membuat ibu memiliki perilaku aktif untuk mengikuti kelas ibu hamil /senam hamil dengan gerakan tari jathilan Ponorogo. Tingkat pendidikan pada perilaku aktif hampir setengahnya 10 (43,48%) responden pendidikan SLTA dan 3(13,04) PT. Menurut Sunaryo (2004) pendidikan merupakan kegiatan yang berfokus pada proses belajar mengajar, dengan tujuan agar terjadi perubahan perilaku, yaitu dari tidak tahu menjadi tahu, tidak mengerti menjadi mengerti dan tidak dapat menjadi dapat. Dengan tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang akan dapat lebih mudah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan menyerap kemajuan teknologi. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan ibu hamil maka semakin menyadari pula untuk berperilaku aktif dalam mengikuti kelas ibu hamil /senam hamil dengan gerakan tari jathilan Ponorogo.

2. Perilaku pasif.

Berdasarkan tabel 5.6 menunjukkan bahwa sebagian kecil 7 (23,33%) responden berperilaku pasif. Dari 7 responden yang berperilaku pasif, yaitu 4 (57,14) responden bekerja sebagai IRT. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 126), ibu rumah tangga adalah wanita yang mengatur penyelenggaraan

berbagai macam pekerjaan rumah tangga, istri (ibu) yang hanya mengurus berbagai pekerjaan dalam rumah tangga (tidak bekerja di kantor). Pekerjaan sebagai ibu rumah tangga dengan multi paritas /jumlah anak yang banyak/, maka akan banyak menyita waktu sehingga mereka tidak memperhatikan pentingnya mengikuti kelas ibu hamil /senam hamil . Akibatnya ibu tidak aktif dalam melakukan senam hamil dengan gerakan tari jathilan Ponorogo.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perilaku ibu hamil dalam senam gerakan tari jathilan Ponorogo di wilayah Puskesmas Balong Kabupaten Ponorogo. sebanyak 23 (76,7%) responden, berperilaku aktif, 7 (23,3 %) responden berperilaku pasif.

Saran

Bidan sebaiknya meningkatkan pengetahuan dan mensosialisasikan yang berkaitan dengan senam hamil ,misalnya senam hamil gerakan tari jathilan Ponorogo. dengan teknik memasukkan materi praktek senam gerakan tari jathilan Ponorogo di kelas ibu hamil. Perlu diteliti tentang pengaruh senam hamil dengan gerakan tari jathilan Ponorogo terhadap persalinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprillia Yesie. 2010. *Hipnostetri: Rileks, Nyaman, dan Aman Saat Hamil & Melahirkan*. Jakarta: Gagas Media.
- Azis, A. 2006. *Kebutuhan Dasar Manusia*. Jakarta: Salemba Medika.

- . 2007. *Metode Penelitian Kebidanan Teknik Analisis Data*. Jakarta: Salemba Medika.
- Dinas Pariwisata Seni & Budaya Kabupaten Ponorogo. 2000. *Reog Ponorogo dari masa ke masa*.
- Manuaba. 2008. *Konsep Obstetri Dan Ginekologi Sosial Indonesia*. Jakarta:EGC
- Muhimah N, Safe'i. 2010. *Panduan Lengkap Senam Sehat Khusus Ibu Hamil*
Jogjakarta: POWER BOOKS
- Notoatmodjo. S. 2003. *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- . 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Saifudin Abdul Bahri. 2002. *Buku panduan praktis pelayanan kesehatan maternall neonatal*.YBP_SP.Jakarta
- Sarwono. 2005. *Ilmu Kandungan*.Jakarta : Yayasan Bina Pustaka
- Sugiyono. 2004. *Metode penelitian Administrasi*.Bandung: Alfa Beta
- Sunaryo. 2004. *Pisikologi untuk keperawatan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC
- Valen, H.2006. *Asuhan Kebidanan*. Jakarta:EGC
- Wawan, A & M, Dewi. 2011. *Teori dan Pengukuran Pengetahuan,sikap,dan perilaku manusia*. Yogyakarta: Nuha Medika
- Wikipedia.(2013).<http://id.wikipedia.org/wiki/reproduksi>. Diakses tanggal 12 Februari 2013
- Widayatun, Tri Rusmi. 2009. *Ilmu Perilaku*. Jakarta: CV Agung Seto

FAKTOR RISIKO PENYAKIT HIPERTENSI BERBASIS PEDESAAN

Oleh:

SAIFUL NURHIDAYAT¹⁾

TAUFIQ HARJONO²⁾

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

Email : saiful.nurhidayat2@gmail.com¹⁾

ABSTRAK

Hipertensi adalah peningkatan abnormal tekanan darah dalam pembuluh darah arteri secara terus-menerus lebih dari suatu periode. Hipertensi dipengaruhi oleh faktor risiko ganda, baik yang bersifat endogen seperti usia, jenis kelamin dan genetik/keturunan, maupun yang bersifat eksogen seperti obesitas, konsumsi garam, rokok dan kopi). Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran prevalensi faktor resiko penyakit hipertensi, dan menganalisis faktor risiko dominan penyakit hipertensi pada masyarakat pedesaan. Penelitian dilakukan di desa Slahung Ponorogo, sampel representatif 100 responden diambil secara *Purposive Sampling*. Desain kuantitatif dengan rancangan *Cross sectional*. Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner dan lembar observasi. Analisis menggunakan distribusi frekuensi. Hasil penelitian didapatkan usia ≥ 40 merupakan faktor risiko dengan prevalensi tertinggi kejadian hipertensi dengan prosentase sebesar 96 % atau 96 responden. Faktor resiko penyakit hipertensi secara berurutan dari yang paling dominan adalah usia ≥ 40 sejumlah 96 responden, obesitas sejumlah 88 responden, konsumsi kopi sejumlah 77 responden, riwayat keturunan sejumlah 71 responden, jenis kelamin laki-laki sejumlah 71 responden, merokok sejumlah 66 responden dan konsumsi garam berlebih sejumlah 14 responden. Dengan hasil tersebut dimungkinkan satu responden mempunyai lebih dari satu faktor risiko hipertensi. Untuk keberlanjutan dari penelitian ini maka peneliti selanjutnya akan meneliti perilaku masyarakat dalam mencegah komplikasi hipertensi pada masyarakat pedesaan.

Kata Kunci : *masyarakat pedesaan, faktor resiko, penyakit hipertensi.*

PENDAHULUAN

Hipertensi adalah suatu peningkatan abnormal tekanan darah dalam pembuluh darah arteri secara terus-menerus lebih dari suatu periode. Hipertensi dipengaruhi oleh faktor risiko ganda, baik yang bersifat endogen seperti usia, jenis kelamin dan genetik/keturunan, maupun yang bersifat eksogen seperti obesitas, konsumsi garam, rokok dan kopi (Hananta, 2011). Insidensi hipertensi meningkat seiring dengan pertambahan usia, laki-laki memiliki risiko hipertensi lebih tinggi untuk menderita hipertensi lebih awal. Meningkatnya kelompok usia (≥ 40 tahun) meningkat pula prevalensi

hipertensi. Hipertensi bersifat diturunkan atau bersifat genetik. Individu dengan riwayat keluarga hipertensi mempunyai risiko dua kali lebih besar untuk menderita hipertensi daripada individu yang tidak mempunyai keluarga dengan riwayat hipertensi. Obesitas juga dapat meningkatkan kejadian hipertensi. Beberapa studi menunjukkan bahwa seseorang yang mempunyai kelebihan berat badan lebih dari 20% dan hiperkolesterol mempunyai risiko yang lebih besar terkena hipertensi. Hal ini disebabkan lemak dapat menimbulkan sumbatan pada pembuluh darah sehingga dapat meningkatkan tekanan darah. Jika asupan garam

antara 7-15 gram perhari prevalensi hipertensi meningkat menjadi 15-20%. Pada kalangan penduduk umur 25-65 tahun dengan jenis kelamin laki-laki mempunyai kebiasaan merokok cukup tinggi yaitu 54,5%. Seseorang menghisap rokok lebih dari satu pak rokok sehari menjadi 2 kali lebih rentan terhadap hipertensi dari pada mereka yang tidak merokok. Kopi adalah bahan minuman yang banyak mengandung kafein. Kopi juga berakibat buruk pada jantung. Kafein dapat menstimulasi jantung untuk bekerja lebih cepat sehingga mengalirkan lebih banyak cairan setiap detiknya. Kebiasaan minum kopi didapatkan dari satu cangkir kopi mengandung 75-200 mg kafein, sehingga minum kopi lebih dari empat cangkir sehari dapat meningkatkan tekanan darah sistolik sekitar 10 mmHg dan tekanan darah diastolik sekitar 8 mmHg (Sutedjo, 2006). Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana prevalensi faktor resiko penyakit hipertensi pada masyarakat pedesaan di Kabupaten Ponorogo?. Apakah faktor resiko penyakit hipertensi yang dominan pada masyarakat pedesaan di Kabupaten Ponorogo?

KONSEP TEORI

Faktor Risiko Hipertensi

1. Usia/Umur

Hipertensi erat kaitannya dengan umur, semakin tua seseorang semakin besar risiko terserang hipertensi. Umur lebih dari 40 tahun mempunyai risiko terkena hipertensi (Mansjoer, 2001).

2. Herediter/Keturunan

Dari data statistik terbukti bahwa seseorang akan memiliki kemungkinan lebih besar untuk mendapatkan hipertensi jika orang tuanya menderita hipertensi (Soenarta, 2005).

3. Jenis Kelamin

Berkaitan dengan hipertensi, laki-laki mempunyai risiko lebih tinggi untuk menderita hipertensi lebih awal. Jenis kelamin berpengaruh terhadap kadar hormon yang dimiliki seseorang. Estrogen yang dominan dimiliki oleh perempuan diketahui sebagai faktor protektif atau perlindungan pembuluh darah, sehingga penyakit jantung dan pembuluh darah termasuk hipertensi lebih banyak ditemukan pada laki-laki yang kadar estrogennya lebih rendah daripada perempuan. Pada saat mengatasi masalah, laki-laki juga cenderung emosi dan mencari jalan pintas seperti merokok, mabuk/minum-minuman alkohol, dan pola makan yang tidak baik sehingga tekanan darahnya dapat meningkat. Laki-laki juga mempunyai risiko yang lebih besar terhadap morbiditas dan mortalitas kardiovaskuler (Susilo, 2011).

4. Obesitas

Obesitas meningkatkan risiko terjadinya hipertensi karena beberapa sebab. Semakin besar massa tubuh maka semakin banyak darah yang dibutuhkan untuk memasok oksigen dan makanan ke jaringan tubuh. Ini berarti volume darah yang beredar melalui pembuluh darah menjadi meningkat

sehingga memberi tekanan lebih besar pada dinding arteri (Sugiarto, 2007).

5. Konsumsi Kopi

Kandungan kafein dalam kopi memiliki efek yang antagonis kompetitif terhadap reseptor adenosin. Adenosin merupakan neuromodulator yang mempengaruhi sejumlah fungsi pada susunan saraf pusat. Hal ini berdampak pada vasokonstriksi dan meningkatkan total resistensi perifer yang akan menyebabkan tekanan darah naik (Martiani, 2012).

6. Merokok

Nikotin dalam tembakau merupakan penyebab meningkatnya tekanan darah segera setelah isapan pertama. Nikotin diserap oleh pembuluh darah yang sangat kecil didalam paru-paru dan diedarkan ke aliran darah. Hanya dalam beberapa detik nikotin sudah mencapai otak. Otak bereaksi terhadap nikotin dengan memberi sinyal pada kelenjar adrenal untuk melepas epinefrin (adrenalin). Hormon yang kuat ini akan menyempitkan pembuluh darah dan memaksa jantung untuk bekerja lebih berat karena tekanan yang lebih tinggi. Setelah merokok dua batang saja maka baik tekanan sistolik maupun diastolik akan meningkat 10 mmHg. Tekanan darah akan tetap pada ketinggian ini sampai 30 menit setelah berhenti mengisap rokok (Sheps, 2005).

7. Konsumsi Garam

Garam menyebabkan penumpukan cairan dalam tubuh, karena menarik cairan diluar sel agar tidak keluar, sehingga akan meningkatkan volume dan tekanan darah.

Pada manusia yang mengkonsumsi garam 3 gram atau kurang ditemukan tekanan darah rata-rata rendah, sedangkan asupan garam sekitar 7-8 gram tekanan darahnya rata-rata lebih tinggi. Konsumsi garam yang dianjurkan tidak lebih dari 6 gram/hari setara dengan 110 mmol natrium atau 2400 mg/hari (Kaplan, 1998).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan cross sectional. Rancangan ini digunakan untuk mempelajari prevalensi factor risiko penyakit hipertensi dan mengkaji hubungan antara variable factor risiko yang bisa diubah dan yang tidak bisa diubah dengan variable penyakit hipertensi yang dilakukan secara serentak dalam satu waktu pada masyarakat desa Slahung Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Teknik sampling yang digunakan adalah Purposive Sampling dengan besar sampel 100 responden. Peneliti menggunakan instrumen berupa lembar isian untuk umur, jenis kelamin, riwayat keturunan, konsumsi garam, rokok dan kopi. Sedangkan pada faktor obesitas menggunakan IMT dengan menggunakan alat timbangan untuk mengukur berat badan dan meteline untuk mengukur tinggi badan. Untuk pengukuran tekanan darah peneliti menggunakan tensimeter pegas dengan merk onemed. Peralatan yang digunakan untuk mendukung penelitian adalah, timbangan, tensi meter, stetoskop, meteran. Selain itu juga alat-alat pendukung seperti alkohol, kapas alkohol, tempat kapas alkohol, tissue. Responden menjawab pertanyaan terkait data demografi

seperti umur, jenis kelamin, riwayat keturunan. Dan menjawab pertanyaan tentang faktor risiko penyakit hipertensi seperti konsumsi rokok, konsumsi kopi, konsumsi garam. Data tentang berat badan, tinggi badan, tekanan darah dan lingkar pinggang akan dilakukan pengukuran. Proses Pengumpulan data peneliti dibantu oleh 4 tenaga. Tenaga pengumpul data berasal dari mahasiswa keperawatan prodi D3 dan S1. Sebelum pengambilan data untuk mempertahankan validitas dan realibilitas akan dilakukan pelatihan dan persamaan persepsi. Analisis univariat digunakan untuk menganalisis secara deskriptif karakteristik masing-masing variabel dengan distribusi frekuensi yang akan ditampilkan dalam bentuk narasi dan tabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

1. Data Umum

Tabel 1. Distribusi Frekwensi Data Umum
Responden Yang Menderita Hipertensi di Desa
Slahung Ponorogo Pada Bulan Juni 2015

Variabel	Σ	%
Pendidikan		
Tinggi	7	7
Menengah	27	27
Dasar	66	66
Pekerjaan		
Pegawai Negeri	5	5
Swasta	13	13
Wiraswasta	47	47
Petani	17	17
Tidak Bekerja	18	18

Sumber : Data Primer

Distribusi frekwensi pada tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa responden yang menderita hipertensi sejumlah 66% berpendidikan dasar dan 47% bekerja sebagai wiraswasta.

2. Data Khusus

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Data Faktor Risiko
Responden Yang Menderita Hipertensi di Desa
Slahung Ponorogo Pada Bulan Juni 2015

Variabel	Σ	%
Jenis Kelamin		
Perempuan	29	29
Laki-laki	71	71
Usia		
< 40	4	4
≥ 40	96	96
Riwayat Keturunan		
Tidak	29	29
Ya	71	71
Obesitas		
Tidak	12	12
Ya	88	88
Merokok		
Tidak	34	34
Ya	66	66
Konsumsi Kopi		
Tidak	23	23
Ya	77	77
Konsumsi Garam		
berlebih		
Tidak	86	86
Ya	14	14

Sumber : Data Primer

Distribusi frekwensi pada tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa dari 100 responden yang mengalami penyakit hipertensi, Usia ≥ 40 merupakan faktor risiko tertinggi yang dialami oleh penderita hipertensi dengan prosentase sebesar 96 % atau 96 responden. Sedangkan konsumsi garam berlebih merupakan faktor risiko terendah yang dialami oleh penderita hipertensi dengan prosentase sejumlah 14 responden (14 %).

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Urutan Faktor Risiko Dominan Penyebab Penyakit Hipertensi pada masyarakat pedesaan di Desa Slahung Ponorogo pada bulan Juni 2015

No.	Faktor Risiko	Σ	%
1.	Usia ≥ 40	96	96
2.	Obesitas	88	88
3.	Konsumsi Kopi	77	77
4.	Riwayat Keturunan	71	71
5.	Jenis Kelamin Laki-laki	71	71
6.	Merokok	66	66
7.	Konsumsi Garam berlebih	14	14

Sumber : Data Primer

Distribusi frekuensi responden berdasarkan faktor risiko dominan penyakit hipertensi didapatkan bahwa usia ≥ 40 merupakan faktor risiko tertinggi yang dialami oleh penderita hipertensi dengan prosentase sebesar 96 % atau 96 responden.

PEMBAHASAN

1. Faktor Risiko Terjadinya Hipertensi Berdasarkan Dari Usia ≥ 40 tahun

Berdasarkan tabel 3 disebutkan bahwa usia ≥ 40 merupakan faktor risiko tertinggi yang dialami oleh penderita hipertensi dengan prosentase sebesar 96 % atau 96 responden. Hipertensi erat kaitannya dengan usia, semakin tua seseorang maka semakin besar risiko terserang hipertensi. Usia > 40 tahun mempunyai risiko terkena hipertensi dibandingkan dengan usia yang kurang dari 40 tahun (Kaplan, 1998). Dengan bertambahnya usia, risiko terkena hipertensi lebih besar sehingga prevalensi hipertensi dikalangan usia lanjut cukup tinggi yaitu

sekitar 40% dengan kematian sekitar 50% diatas umur 60 tahun (Mansjoer, 2001). Masyarakat desa Slahung yang ber usia ≥ 40 tahun lebih banyak menderita hipertensi dibandingkan dengan usia < 40 tahun yang menderita hipertensi. Hal ini dikarenakan arteri akan kehilangan elastisitas atau kelenturan pada usia yang lebih lanjut sehingga pembuluh darah akan berangsur-angsur menyempit dan menjadi kaku. Di samping itu, pada usia lanjut sensitivitas pengatur tekanan darah yaitu refleksi baroreseptor mulai berkurang. Hal ini mengakibatkan tekanan darah meningkat seiring dengan bertambahnya usia.

2. Faktor Risiko Terjadinya Hipertensi Berdasarkan Obesitas

Berdasarkan tabel 3 disebutkan bahwa obesitas merupakan faktor risiko terbanyak kedua yang dialami oleh penderita hipertensi di desa Slahung Ponorogo dengan prosentase tertinggi yaitu sebesar 88 responden (88%). Obesitas adalah meningkatnya berat badan akibat dari menumpuknya lemak yang berlebihan atau status yang akan menjadi gemuk. Obesitas merupakan salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya berbagai macam penyakit, salah satunya adalah hipertensi. Penelitian epidemiologi menyebutkan adanya hubungan antara berat badan dengan tekanan darah baik pada pasien hipertensi maupun normotensi (Susilo, 2011). Pada masyarakat desa Slahung 88 responden yang menderita hipertensi mengalami obesitas. Penyebab obesitas itu

sendiri disebabkan oleh diet yang salah dan kurangnya aktifitas fisik. Obesitas sangat erat kaitannya dengan pola makan yang tidak seimbang. Di mana seseorang lebih banyak mengkonsumsi lemak dan protein tanpa memperhatikan serat. Ada dua pola makan abnormal yang bisa menjadi penyebab obesitas, yaitu makan dalam jumlah sangat banyak dan makan pada malam hari. Kedua pola makan ini biasanya dipicu oleh stres dan kekecewaan.. Asupan kalori lebih besar dari energi yang dipakai, maka kelebihan karbohidrat diubah menjadi lemak di hati, selain itu akibat kelebihan kalori tersebut juga akan disimpan dalam jaringan lemak, yang lama kelamaan akan mengakibatkan obesitas (Waspadji, 2003). Hal ini dibuktikan dengan penelitian sebelumnya bahwa didapatkan hubungan antara obesitas dengan kejadian hipertensi pada siswa ($p= 0,000$) dengan keeratan hubungan 5,874. Hal ini diperkuat dengan hasil analisis regresi logistic bahwa obesitas mempunyai risiko 6 kali lebih besar menyebabkan kejadian hipertensi pada siswa di Ponorogo (Nurhidayat, 2014).

3. Faktor Resiko Terjadinya Hipertensi Berdasarkan Konsumsi Kopi

Berdasarkan tabel 3. disebutkan bahwa minum kopi merupakan faktor risiko terbanyak ketiga yang dialami oleh penderita hipertensi di desa Slahung Ponorogo dengan prosentase sebesar 77 responden (77 %). Kopi dapat berakibat buruk pada penderita hipertensi karena kopi mengandung kafein yang meningkatkan

curah jantung dan naiknya tekanan darah. Peningkatan tekanan darah ini diduga karena kafein mempunyai efek langsung pada medula adrenal untuk mengeluarkan epinefrin yang menyebabkan curah jantung meningkat dan terjadi peningkatan sistole yang lebih besar dari tekanan diastole. Faktor kebiasaan minum kopi di dapatkan dari satu cangkir kopi mengandung 75-200 mg kafein. Minum kopi lebih dari empat cangkir kopi sehari dapat meningkatkan tekanan darah sistolik sekitar 10 mmHg dan tekanan darah diastolik sekitar 8 mmHg (Anonim, 2009). Masyarakat desa Slahung banyak yang menikmati kopi dalam berbagai aktifitas dan acara. Sebelum saat dan setelah bekerja mereka minum kopi karena banyak yang bekerja sebagai wiraswasta (pedagang, buruh pasar, bekerja di pengepul mpon-mpon). Setiap acara masyarakat (kenduri, selamatan, yasinan, arisan) kopi sebagai hidangan minum undangan. Warung kopi juga tidak pernah sepi pembeli yang rata-rata mereka minum kopi.

4. Faktor Resiko Terjadinya Hipertensi Berdasarkan Riwayat Keturunan

Berdasarkan tabel 3. disebutkan bahwa mempunyai riwayat keturunan hipertensi merupakan faktor risiko terbanyak keempat pada penderita hipertensi di desa Slahung Ponorogo dengan prosentase sebesar 71 responden (71 %). Orang-orang dengan sejarah keluarga yang mempunyai hipertensi lebih sering menderita hipertensi. Riwayat keluarga dekat yang menderita hipertensi (faktor keturunan) juga mempertinggi risiko

terkena hipertensi terutama pada hipertensi primer (Nurkhalida, 2008). Pada masyarakat desa Slahung banyak yang menderita hipertensi karena keturunan. Mereka yang tinggal disana banyak yang masih berhubungan saudara dengan tempat tinggal yang masih berdekatan. Desa Slahung termasuk desa yang jauh dari pusat kota (25 km arah selatan) berbatasan dengan kabupaten Pacitan. Penduduk pendatang juga hanya sedikit itupun karena faktor perkawinan. Hal ini yang menyebabkan jumlah penderita hipertensi dengan faktor risiko keturunan dengan jumlah yang besar.

5. Faktor Resiko Terjadinya Hipertensi Berdasarkan Jenis Kelamin Laki-laki

Berdasarkan tabel 3 disebutkan bahwa jenis kelamin laki-laki mempunyai jumlah prosentase sebesar 71 responden (71 %) atas kejadian hipertensi di desa Slahung Ponorogo. Berkaitan dengan hipertensi, laki-laki mempunyai risiko lebih tinggi untuk menderita hipertensi lebih awal. Jenis kelamin berpengaruh terhadap kadar hormon yang dimiliki seseorang. Estrogen yang dominan dimiliki oleh perempuan diketahui sebagai faktor protektif atau perlindungan pembuluh darah, sehingga penyakit jantung dan pembuluh darah termasuk hipertensi lebih banyak ditemukan pada laki-laki yang kadar estrogenya lebih rendah daripada perempuan. Pada saat mengatasi masalah, laki-laki juga cenderung emosi dan mencari jalan pintas seperti merokok, mabuk/minum-minuman alkohol, dan pola makan yang tidak baik sehingga

tekanan darahnya dapat meningkat. Laki-laki juga mempunyai risiko yang lebih besar terhadap morbiditas dan mortalitas kardiovaskuler (Susilo, 2011). Penelitian ini sesuai dengan teori di atas bahwa penyebab hipertensi masyarakat desa Slahung dikarenakan jenis kelamin laki-laki. Peneliti menemukan fakta bahwa selain faktor hormonal (terkait kadar estrogen), faktor perilaku dan kepribadian juga berpengaruh terhadap insiden hipertensi terbanyak pada jenis kelamin laki-laki. Faktor perilaku merokok menunjukkan bahwa semua perokok (66%) berjenis kelamin laki-laki. Dari jumlah 66 laki-laki, 49 orang mempunyai kebiasaan minum kopi. Lebih banyaknya laki-laki sering berkumpul bersama di setiap acara menyebabkan mereka merokok dan minum kopi. Pekerjaan juga mempengaruhi laki-laki hipertensi. bekerja sebagai wiraswasta mempunyai kebiasaan meroko dan minum kopi lebih besar dibanding dengan pekerjaan yang lain. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat desa slahung yang menderita hipertensi berjenis kelamin laki-laki.

6. Faktor Resiko Terjadinya Hipertensi Berdasarkan Perilaku Merokok

Berdasarkan tabel 3 disebutkan bahwa merokok memiliki jumlah prosentase sebesar 66 responden (66 %) atas kejadian hipertensi di desa Slahung Ponorogo. Rokok juga dihubungkan dengan hipertensi. Hubungan antara rokok dengan peningkatan risiko kardiovaskuler telah banyak dibuktikan. Selain dari lamanya, risiko

merokok terbesar tergantung pada jumlah rokok yang dihisap perhari. Seseorang lebih dari satu pak rokok sehari menjadi 2 kali lebih rentan hipertensi dari pada mereka yang tidak merokok (Suyono, 2001). Mekanisme yang mendasari hubungan rokok dengan tekanan darah adalah proses inflamasi. Baik pada mantan perokok maupun perokok aktif terjadi peningkatan jumlah protein C-reaktif dan agen-agen inflamasi alami yang dapat mengakibatkan disfungsi endotelium, kerusakan pembuluh darah, pembentukan plak pada pembuluh darah, dan kekakuan dinding arteri yang berujung pada kenaikan tekanan darah (Syukraini, 2009). Berdasarkan data diketahui bahwa responden yang merokok semuanya berjenis kelamin laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa jenis kelamin berpengaruh pada kebiasaan merokok. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa laki-laki memiliki gaya hidup yang berbeda dari perempuan di mana laki-laki menganggap merokok sebagai sesuatu sensasi tersendiri dan perilaku merokok berasal dari teman dekat, khususnya dengan jenis kelamin sama dengan adanya dorongan sosial. Selain itu perilaku merokok pada laki-laki merupakan perilaku simbolisasi. Simbol dari kematangan, kekuatan, kepemimpinan daya tarik terhadap lawan jenis (Brigham, 1991). Masyarakat khususnya laki-laki di desa Slahung masih memandang bahwa merokok adalah hal yang biasa dilakukan sehari-hari karena tanpa rokok mereka tidak bisa bekerja dan berpikir secara jernih. Hal

yang salah tersebut sudah menjadi kebiasaan di masyarakat khususnya pada laki-laki sehingga masyarakat tidak bisa lepas begitu saja dari kebiasaan merokok tersebut. Dalam setiap aktifitas apapun baik sendiri maupun saat aktifitas bersama mereka merokok. Bahkan saat olahraga pun mereka masih sempat untuk merokok. Perilaku merokok masih sulit untuk dihindari di daerah pedesaan seperti di desa Slahung ini.

7. Faktor Resiko Terjadinya Hipertensi Berdasarkan Perilaku Mengkonsumsi Garam Berlebih

Berdasarkan tabel 3 disebutkan bahwa mengkonsumsi garam berlebih juga sebagai faktor risiko terjadinya penyakit hipertensi dengan prosentase sebesar 14 responden (14 %) Garam merupakan hal yang sangat penting pada mekanisme timbulnya hipertensi. Pengaruh asupan garam terhadap hipertensi melalui peningkatan volume plasma (cairan tubuh) dan tekanan darah. Keadaan ini akan diikuti oleh peningkatan ekskresi kelebihan garam sehingga kembali pada keadaan hemodinamik (sistem peredaran) yang normal. Pada hipertensi esensial mekanisme ini terganggu, di samping ada faktor lain yang berpengaruh (Yundini, 2006). Menurut Beevers (2002), berpendapat bahwa konsumsi garam secara pasti merupakan suatu unsur dalam hipertensi. Konsumsi garam per hari yang diperbolehkan adalah kurang dari 5 gram atau kira-kira satu sendok teh. Dari 14 responden yang mengkonsumsi garam

berlebih rata-rata mereka mengkonsumsi garam lebih dari satu sendok makan per hari. Hal ini dikarenakan mereka merasa tidak enak makan jika makanan tidak terasa garamnya. Dilihat dari faktor usia, semua responden juga berusia lebih dari 40 tahun yang mana sudah terjadi penurunan fungsi – fungsi sensorinya, salah satunya sensori perasa (pengecap).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Usia ≥ 40 merupakan faktor risiko tertinggi dengan prevalensi tertinggi kejadian hipertensi pada masyarakat di desa Slahung Ponorogo dengan prosentase sebesar 96 % atau 96 responden.
2. Faktor resiko penyakit hipertensi secara berurutan dari yang paling dominan adalah usia ≥ 40 sejumlah 96 responden, obesitas sejumlah 88 responden, konsumsi kopi sejumlah 77 responden, riwayat keturunan sejumlah 71 responden, jenis kelamin laki-laki sejumlah 71 responden, merokok sejumlah 66 responden dan konsumsi garam berlebih sejumlah 14 responden.

Saran

1. Responden
Penderita Hipertensi untuk melakukan mengenali faktor risiko apa saja yang menyebabkan penyakit hipertensi yang dideritanya. Kemudian berusaha untuk mengurangi bahkan dapat menghindari faktor-faktor risikonya dan dengan selalu berperilaku hidup sehat.

2. Keluarga dan Masyarakat

Keluarga dan masyarakat berusaha untuk menghindari faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan penyakit hipertensi, terutama faktor risiko yang bisa dimodifikasi/ diubah seperti obesitas, konsumsi kopi, merokok dan konsumsi garam berlebih. Menghindari faktor risiko tersebut juga berguna untuk mencegah terjadinya komplikasi dari penyakit hipertensi seperti penyakit stroke.

3. Penelitian lanjutan

Setelah penelitian ini diperoleh data tentang prevalensi dan prosentase faktor risiko penyebab hipertensi pada masyarakat desa Slahung. Untuk keberlanjutan dari penelitian ini maka peneliti selanjutnya akan meneliti perilaku masyarakat dalam mencegah komplikasi hipertensi pada masyarakat pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anomin. 2009. *Faktor Risiko Hipertensi Yang Dapat Dikontrol*.
<http://www.smallscab.com/kesehatan/25.healthy/511-faktor-risiko-hipertensi-yang-dapat-dikontrol> diakses tanggal 24 November 2014 jam 21.00 WIB
- Beevers, D.G. 2002. *Seri Kesehatan : Bimbingan Dokter Pada Tekanan Darah*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Brigham, J.C. 1991. *Social Psychology*. New York: Harpercollins Publisher.
- Hananta Yuda, I Putu. 2011. *Deteksi Dini dan Pencegahan 7 Penyakit Penyebab Mati Muda*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Kaplan M. Norman. 1998. *Measurement of Blood Pressure and Primary Hypertension: Pathogenesis in Clinical Hypertension: Seventh Edition*. Baltimore, Maryland USA: Williams & Wilkins

- Mansjoer, Arif. 2001. *Kapita Selekta Kedokteran Jilid I*. Jakarta: Media Aesculapius FKUI
- Martiani, Ayu. 2013. *Faktor Risiko Hipertensi Ditinjau Dari Kebiasaan Minum Kopi (Studi Kasus Di Wilayah Kerja Puskesmas Ungaran Pada Bulan Januari-Februari 2012)*.
<http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/jnc/article/view/678/0> diakses tanggal 29 Maret 2014 jam 19.00 WIB
- Nurhidayat, Saiful. 2014. *Faktor Risiko Penyakit Kardiovaskuler Pada Remaja di Ponorogo*. Jurnal Dunia Keperawatan Vol. II No. 2. Kalimantan Selatan: PSIK FK Unlam.
- Nurkhalida. 2008. *Warta Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Depkes RI.
- Sheps, Sheldon G. 2005. *Mayo Clinic Hipertensi, Mengatasi Tekanan Darah Tinggi*. Jakarta: PT Intisari Mediatama
- Soenarta, Ann Arieska. 2005. *Konsensus Pengobatan Hipertensi*. Jakarta: Perhimpunan Hipertensi Indonesia (Perhi)
- Sugiarto. 2007. *Faktor-faktor Risiko Hipertensi Grade II pada Masyarakat (Studi Kasus di Kabupaten Karanganyar)* [internet]. 2007 [cited 2011 Oct 7]. p: 29-50, 90-126. Available from: <http://eprints.undip.ac.id/> diakses tanggal 22 Desember 2014 jam 22.00 WIB
- Sutedjo. 2006. *Profil Hipertensi pada Populasi Monica*. Hasil Penelitian MONICA-Jakarta III", Jakarta: Filed Under Riset Epidemiologi
- Susilo, Yekti dan Ari Wulandari. 2011. *Cara Jitu Mengatasi Hipertensi*. Yogyakarta: ANDI
- Syukraini, Irza. 2009. *Analisis Faktor Risiko Hipertensi pada Masyarakat Nagari Bungo Tanjung, Sumatera Barat* [internet]. [cited 2012 Feb 8]. p: 33-53, 60. Available from: <http://repository.usu.ac.id/> diakses tanggal 22 Desember 2014 jam 22.00 WIB
- Waspadji, Sarwono, dkk. 2003. *Indeks Glikemik Berbagai Makanan Indonesia*. Jakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Yundini. 2006. *Faktor Risiko Hipertensi*. Jakarta: Warta Pengendalian Penyakit Tidak Menular, diakses tanggal 16 November 2014 pukul 10:27 WIB

**HUBUNGAN ANTARA PENDIDIKAN IBU DAN STATUS EKONOMI
KELUARGA DENGAN STATUS GIZI BALITA DI PUSKESMAS
SUKOREJO KABUPATEN PONOROGO**

SITI FARIDAH¹⁾

INNA SHOLICHA FITRIANI²⁾

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

Email: wawid53@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan utama pembangunan nasional adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilakukan secara berkelanjutan. Upaya peningkatan kualitas SDM di mulai dengan perhatian utama pada proses tumbuh kembang anak sejak pembuahan sampai dewasa muda. Pada saat masa tumbuh kembang ini, pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti perawatan dan makanan bergizi yang diberikan dengan penuh kasih sayang dapat membentuk SDM yang sehat, cerdas dan produktif (Zulfaeni, 2006). Puskesmas Sukorejo sebanyak 125 ibu balita dan balita Teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random* dengan besar sampel 96 responden. Analisa data Kuantitatif diperoleh melalui pengambilan data dengan subyek penelitian menggunakan pengukuran secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian yang dilaksanakan dengan melibatkan 96 responden diperoleh data sebanyak 79 responden (82,2%) mempunyai penghasilan \leq Rp. 945.000. Faktor Status ekonomi kemungkinan besar merupakan pembentuk gaya hidup keluarga.

Kata Kunci: *Kualitas Sumber Daya Manusia, Gizi, Puskesmas Sukorejo*

PENDAHULUAN

Tujuan utama pembangunan nasional adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dilakukan secara berkelanjutan. Upaya peningkatan kualitas SDM di mulai dengan perhatian utama pada proses tumbuh kembang anak sejak pembuahan sampai dewasa muda. Pada saat masa tumbuh kembang ini, pemenuhan kebutuhan dasar anak seperti perawatan dan makanan bergizi yang diberikan dengan penuh kasih sayang dapat membentuk SDM yang sehat, cerdas dan produktif (Zulfaeni, 2006). Air Susu Ibu (ASI) merupakan cairan putih yang dihasilkan oleh kelenjar payudara wanita melalui proses laktasi. ASI dalam jumlah cukup merupakan makanan terbaik dan dapat memenuhi kebutuhan bayi selama 6 bulan. Sesudah itu, berangsur-angsur bayi perlu diberi makanan lengkap, berupa sari

buah, dan buah-buahan seger. Kemudian diberi makanan lumat dan akhirnya makanan lembik (Milda, 2008). Masalah gizi adalah masalah kesehatan masyarakat yang penanggulangannya tidak dapat dilakukan dengan pendekatan medis dan pelayanan kesehatan saja. Masalah gizi disamping merupakan sindroma kemiskinan yang erat kaitannya dengan masalah ketahanan pangan di tingkat rumah tangga juga menyangkut aspek pengetahuan dan perilaku yang kurang mendukung pola hidup sehat (Mambo, 2006). Laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan bahwa kesehatan masyarakat Indonesia terendah di ASEAN dan peringkat 142 dari 170 negara. Data WHO itu menyebutkan angka kejadian gizi buruk dan kurang pada tahun 2002 masing-masing meningkat 8,3 % dan 27,5% naik menjadi masing-masing 8,8% dan 28% (Diana, 2007).

Kondisi tersebut cukup mengkhawatirkan. Alasannya, selain berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak, kekurangan gizi juga termasuk salah satu penyebab utama kematian balita. Data WHO tahun 2002 menunjukkan 60% kematian bayi dan balita terkait dengan kasus gizi kurang (Diana, 2007). Data UNICEF tahun 2007 menyatakan 8,3% balita di Indonesia yang bersatus gizi buruk akibat asupan gizi yang kurang dan perubahan pola asuh keluarga yang tidak terpantau dengan baik (Daniel, 2007). Sementara itu, data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Ponorogo pada akhir 2011, tercatat bahwa dari keseluruhan balita di Ponorogo, sebanyak 62.434 bayi 303 mengalami gizi buruk, 252 diantaranya sangat kurus dan 51 tergolong kurus. Di Kecamatan Sukorejo pada akhir tahun 2011 dan awal tahun 2012 terdapat jumlah balita sebanyak 3644 bayi. Balita yang mengalami gizi buruk/Bawah Garis Merah (BGM) berjumlah 71 bayi dan yang mengalami Gizi buruk sebanyak 25 bayi. Dari jumlah Balita yang mengalami BGM tersebut diperoleh rincian; 43 bayi mengalami susah makan, 28 bayi menderita sakit dan seorang bayi menderita kelainan bawaan. Sukorejo menjadi tempat peneliti melakukan penelitian, karena Sukorejo termasuk salah satu daerah rawan gizi di Ponorogo yang terjangkau oleh peneliti. Status gizi anak balita dipengaruhi oleh beberapa faktor didalam keluarga. Adapun faktor yang mempengaruhi keadaan gizi seperti pendidikan, pengetahuan, pekerjaan, asupan makanan dan pendapatan atau ekonomi keluarga (Notoatmodjo, 2007). Menurut Wirawan (2009), permasalahan yang memicu gizi buruk adalah tingkat

pendidikan rendah berdampak pada minimnya pengetahuan tentang pola asuh yang benar. Kebanyakan profesi orang tua penderita gizi buruk adalah sebagai buruh dan ibu rumah tangga. Berdasarkan data diatas peneliti merasa tertarik untuk melihat apakah ada hubungan antara pendidikan ibu dan status ekonomi keluarga dengan status gizi balita di sebagian Wilayah Puskesmas Sukorejo.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah observasional analitik dengan pendekatan *cross sectional*. Populasi adalah ibu balita yang ada di Wilayah Puskesmas Sukorejo sebanyak 125 ibu balita dan balita Teknik pengambilan sampel menggunakan *simple random* dengan besar sampel 96 responden. Analisa data Kuantitatif diperoleh melalui pengambilan data dengan subyek penelitian menggunakan pengukuran secara langsung.

A. Hasil Penelitian

1. Data Umum

- a. Karakteristik responden berdasar usia ibu balita

Tabel 5.1 Karakteristik responden berdasarkan usia ibu balita di Wilayah kerja Puskesmas Sukorejo desa Prajegan kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo

No	Usia Ibu Balita	Frekwensi	Prosentase
1.	< 20 tahun	1	1
2.	20-35 tahun	77	80,2
3.	> 35 tahun	18	18,7
Jumlah		96	100

Sumber : data primer 2015

Berdasarkan tabel 5.1.1 diatas didapatkan hampir seluruhnya usia ibu balita 20-35 tahun yaitu 77 responden (80,2 %).

b. Karakteristik responden berdasar Paritas

Tabel 5.1 Karakteristik responden berdasarkan Paritas di Wilayah kerja Puskesmas Sukorejo desa Prajegan kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo

No	Paritas	Frekwensi	Prosentase
1.	≤ 2	84	87,5
2.	≥ 3	12	12,5
	Jumlah	96	100

Sumber : data primer 2015

Berdasarkan tabel 5.1.2 diatas didapatkan hampir seluruhnya paritas ibu Balita ≤ 2 yaitu 84 responden (87,5 %).

2. Data Khusus

a. Karakteristik responden berdasar tingkat pendidikan ibu

Tabel 5.1 Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan ibu di Wilayah kerja Puskesmas Sukorejo desa Prajegan kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo bulan Juni 2015

No	Pendidikan	Frekwensi	Prosentase
1.	SD dan SMP	57	59,3
2.	SMA	35	36,4
3.	PT	4	16,6
	Jumlah	96	100

Sumber : data primer 2015

Berdasarkan tabel 5.1 diatas sebagian besar ibu balita berpendidikan dasar yaitu 57 (59,3%).

b. Karakter responden berdasarkan status ekonomi keluarga ibu balita

Tabel 5.2 Karakteristik responden berdasarkan status ekononi kelaurga di

Wilayah kerja Puskesmas Sukorejo desa Prajegan kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo dapat dilihat pada tabel berikut:

No		Frekuensi	Prosentase
1	Penghasilan kurang (≤) Rp.945.000,-	79	82,2
2	Penghasilan lebih Rp. 945.000,-	17	18,7
Jumlah		96	100

Sumber : data primer 2015

Berdasarkan tabel 5.2 diatas hampir seluruhnya ibu responden adalah berpenghasilan menengah kebawah , yaitu 79 responden (82,2 %).

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Status gizi balita

Tabel 5.3 Karakteristik responden berdasarkan status gizi balita di Wilayah kerja Puskesmas Sukorejo desa Prajegan kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo pada tahun 2015.

No	Status gizi	Frekwensi	Prosentase
1.	Gemuk	9	9,3
2.	Normal	76	79,1
3.	Kurus	8	8,3
4.	Kurus sekali	3	3,1
Jumlah		96	100 %

Sumber : data primer 2015

Berdasarkan Tabel 5.3 Datas diketahui bahwa hampir seluruhnya status gizi balita di desa Prajegan normal yaitu 76 responden (79,1%).

ANALISA DATA

Analisa hubungan antara tingkat pendidikan dan status ekonomi keluarga

dengan status gizi balita didesa Prajegan Wilayah kerja Puskesmas Sukorejo diperoleh analisa sebagai berikut:

Correlations

			tingkat.pendidikan	status.gizi.balita
Spearman's rho	tingkat.pendidikan	Correlation Coefficient	1.000	-.013
		Sig. (2-tailed)	.	.896
		N	96	96
	status.gizi.balita	Correlation Coefficient	-.013	1.000
		Sig. (2-tailed)	.896	.
		N	96	96

Tabel diatas menunjukkan nilai korelasi hubungan antara tingkat pendidikan dengan antara tingkat pendidikan dengan status gizi status gizi balita di desa Prajegan wilayah balita adalah 0,896 sedangkan signifikasi kerja Puskesmas Sukorejo Kabupaten Ponorogo. 0,05 maka dapat disimpulkan tidak ada

Correlations

			status.ekonomi	status.gizi.balita
Spearman's rho	status.ekonomi	Correlation Coefficient	1.000	.109
		Sig. (2-tailed)	.	.291
		N	96	96
	status.gizi.balita	Correlation Coefficient	.109	1.000
		Sig. (2-tailed)	.291	.
		N	96	96

Tabel diatas menunjukkan nilai korelasi antara tingkat pendidikan dengan status gizi balita adalah 0,291 sedangkan signifikasi 0,05 maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara Status ekonomi dengan status gizi balita di desa Prajegan wilayah kerja Puskesmas Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

PEMBAHASAN

1. Tingkat Pendidikan Ibu Balita

Berdasarkan tabel 5.1 dari 96 responden terdapat 57 atau (59,3%) responden mempunyai tingkat pendidikan dasar. Pendidikan SD dan SMP termasuk pendidikan dasar, yaitu pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan, sosial budaya, alam sekitar dan dapat

mengembangkan kemampuan (Hasbullah, 2005: 12).

2. Status gizi balita

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada 96 responden sebanyak 70 responden (72,9) yang memiliki balita dengan status gizi normal. Menurut Akhmadi (2008), faktor tahapan penyebab timbulnya kurang gizi pada anak balita, baik penyebab langsung, tidak langsung, akar masalah dan pokok masalah. Faktor tersebut sangat terkait dengan tingkat pendidikan, pengetahuan, dan ketrampilan keluarga. Pendidikan ibu balita merupakan faktor yang sangat penting. Tinggi rendahnya pendidikan ibu erat kaitannya dengan tingkat pengetahuan terhadap perawatan kesehatan terutama tentang gizi untuk balita.

3. Status Ekonomi Keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan pada 96 responden sebanyak 79 responden (82,2%) mempunyai penghasilan \leq Rp. 945.000. Faktor Status ekonomi kemungkinan besar merupakan pembentuk gaya hidup keluarga. Pendapatan keluarga memadai akan menunjang tumbuh kembang anak. Karena orang tua dapat menyediakan semua kebutuhan anak baik primer maupun sekunder (Soetjiningsih, 2004:122). Status ekonomi keluarga berhubungan usia ibu balita didapatkan 62 responden (64,5%) berusia 20-35 tahun. Menurut Hurlock, 2006 usia 20-35 tahun merupakan Masa dewasa dini.

4. Hubungan tingkat Pendidikan dengan Status Gizi Balita

Berdasarkan cross tabb dapat diketahui dari 96 responden didapatkan sebagian besar 57 (59,3%) responden ibu yang berpendidikan dasar dan 79 responden (82,2 %) dengan status gizi anak balita normal, 7 responden (7,2%) dengan status gizi balita gemuk, 7 (7,2%) dengan status gizi balita kurus, 3 responden (3%) dengan status gizi balita kurus sekali. Hasil dari uji statistik kolerasi Spearman's rho nilai antara tingkat pendidikan dengan status gizi balita didapatkan nilai $p = 0,896 >$ sedangkan signifikasi 0,05 maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan status gizi balita di desa Prajegan wilayah kerja Puskesmas Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

5. Hubungan Status Ekonomi Keluarga terhadap Status Gizi Balita

Berdasarkan cross tabb dapat diketahui dari 96 responden didapatkan sebagian besar 80 (83,3%) responden ibu yang mempunyai penghasilan \leq Rp. 945.000. dan 16 responden (16,6) yang mempunyai penghasilan $>$ Rp. 945.000, dengan status gizi balita 9 responden (9,3%) status gizi gemuk, 76 responden (70,1%) dengan status gizi normal. 8 responden (8,3%) dengan status gizi kurang dan 3 responden (3,1%) dengan status kurus sekali. Hasil dari uji statistik korelasi Spearman's rho nilai $p = 0,291$ sedangkan signifikasi 0,05 maka dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara status ekonomi keluarga dengan status gizi balita di Desa Parajegan Kec. Sukorejo kabupaten Ponorogo.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dari 96 ibu balita dan balita di dapatkan Sebagian besar pendidikan ibu balita di desa Parjegan Wilayah kerja Puskesmas Sukorejo adalah pendidikan dasar sebanyak 57 responden (59,3%) dan 35 responden (36,1%) berpendidikan menengah dan 4 responden (4,1%) berpendidikan PT, sedangkan status ekonomi \leq Rp. 945.000 sebanyak 81responden (84,3%) dan status ekonomi $>$ Rp. 945.000 sebanyak 15responden (15,6%) dengan status gizi normal sebanyak 79 responden (82,2%) yang gemuk 7 responden (7,2%) dan status gizi kurus 7 responden(7,2%) sisanya status gizi kurus sekali sebanyak 3 responden (3%). Tidak ada hubungan antara pendidikan status ekonomi keluarga dengan status gizi balita di desa Parjegan Wilayah kerja Puskesmas Sukorejo Kabupaten Ponorogo.

Saran

Sebaiknya ibu balita terutama yang mempunyai balita dengan status kurus dan kurus sekali supaya teratur ke posyandu di samping untuk monitor tumbuh kembang juga akan mendapatkan penyuluhan tentang gizi seimbang balita serta untuk mendapatkan makanan tambahan untuk mencukupi gizi balitanya, untuk ibu balita yang status gizi normal ke Posyandu supaya tetap datang ke Posyandu untuk memantau perkembangnya.

DAFTAR PUSTAKA

Almatier, S. 2003. *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*. PT. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta.

Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta : Jakarta

Arisman. 2004. *Gizi Dalam Daur Kehidupan*. EGC : Jakarta

_____. 2009. *Gizi Dalam Daur Kehidupan*. EGC : Jakarta

Depkes RI. 2000. *Program Imunisasi Dan Gizi*. Depkes RI : Jakarta

Dina, 2007. 40% Lebih Balita di Indonesia Kurang Gizi.at

(<http://digilib.com>, diakses 9 Maret 2009)

Depkes RI. 2009. *Buku Ilmu Gizi Umum*. Direktorat Gizi. Jakarta: Direktorat jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes RI.

Djoko Wijono. 2009. *Manajemen Perbaikan Gizi Masyarakat*. Surabaya: Duta Prima Airlangga

Hidayat A. Aziz. 2007. *Riset Keperawatan dan Teknik Penulisan Ilmiah*, Bandung: YIA-PKP.

_____. 2010. *Metode Penelitian Kebidanan Dan Teknis AnalisisData*. Jakarta : Salemba Medika

Jhonson, R . 2010 . *Konsep Keluarga*. Nusa Medika, Yogyakarta

Kertasapoetra. 2001. *Gizi Bagi Pertumbuhan Bayi*. [http : svorong.com](http://svorong.com) diakses pada 2 Agustus 2012

Mambo, 2006. *Penanggulangan gizi buruk* (online)

(<http://www.dinkespurworejo.go.id>, diakses 20 Maret 2009)

Nency, Y. 2007. www.InovasiOnline.com. Diakses tanggal 12 Januari 2013

Nelson. 2000. *Ilmu Kesehatan anak*, Jakarta: ECG.

Notoatmodjo, S. 2002. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta : Jakarta

_____. 2003. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Rineka Cipta : Jakarta

_____. 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta : Jakarta

Nursalam. 2003. *Konsep Dan Penerapan Metodologi Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta : Jakarta

- _____. 2009. *Konsep Dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*. Jakarta : Salemba Medika.
- Sediaotama, A.D 2004. *Ilmu Gizi*. Jakarta:Dian Rakyat.
- Pudjiadi. 2005. *Ilmu Gizi Klinis Pada Anak*. FKUI : Jakarta
- Sarjanaku. 2013.www.sarjanaku.com. diakses tanggal 28 Februari 2013
- Suriadi dan yuliani. 2001. *Perawatan Anak Sakit*. EGC : Jakarta
- _____.2004. *Tumbuh Kembang anak*.EGC: Jakarta
- Sugiono.
2013.IslamicSpaceOnline.com.diakses tanggal 12 Januari 2013
- Soegianto, Beny dkk. 2007. *Penilaian Status Gizi dan Baku Antropometri WHO-NCHS*. Surabaya: Duta Prima
- Supariasa, I Dewa Nyoma, Bachsyar Bakri dan Ibnu Fajar 2002. *Penilaian Status Gizi*, Jakarta: EGC
- Sugiyono, Prof. Dr. 2010. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfa Beta

**PERSEPSI PASIEN TB PARU KEPADA PMO
DALAM MENUNJANG KEPATUHAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGOBATAN
DI GHS (GOVERNMENT HEALTH SERVICE) PONOROGO**

Oleh :

**NURUL SRI WAHYUNI¹⁾
ANDY TRIYANTO PUJO RAHARJO²⁾**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
Email: hauraalmash2@yahoo.com¹⁾

ABSTRAK

Kepatuhan pengobatan TB merupakan hal yang sangat penting, karena bila pengobatan tidak dilakukan secara teratur dan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka akan dapat timbul kekebalan kuman TB terhadap Obat Anti TB (OAT) secara meluas atau disebut *Multi Drugs Resistance* (MDR) (Depkes, 2001). Desain penelitian ini menggunakan metode *deskriptif*. Populasi penelitian adalah seluruh penderita TB Paru di wilayah kerja Puskesmas Badegan Ponorogo sejumlah 32 pasien. Teknik pengambilan data adalah *total sampling*. Jadi jumlah sampel pada penelitian ini adalah 32 responden. Pengumpulan data menggunakan kuesioner untuk selanjutnya dianalisa menggunakan rumus *skor T* dan dengan analisa prosentase. Hasil penelitian didapatkan persepsi pasien TB Paru kepada PMO dalam menunjang kepatuhan pelaksanaan program pengobatan di wilayah kerja Puskesmas Jambon (59,37%) atau 19 responden berpersepsi positif, sedangkan (40,62%) atau 13 responden berpersepsi negatif. Persepsi pasien positif dipengaruhi oleh pengetahuan pasien tentang peran PMO (53%) atau 17 responden, lama menderita sakitnya lebih dari satu tahun (38%) atau 12 responden, hubungan PMO dengan pasien yang salah satunya adalah hubungan anak (31%) atau 12 responden, tempat tinggal PMO dengan pasien yang tinggal serumah dengan pasien (59%) atau 19 responden. Sedangkan persepsi pasien negatif dipengaruhi oleh usia yang salah satunya adalah usia 60-68 tahun (22%) atau 7 responden, tingkat pendidikan pasien yang tingkat pendidikannya tidak sekolah (12%) atau 4 responden, frekuensi mendapat info yang mendapatkan info satu kali (22%) atau 7 responden. Direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya, diharapkan menindaklanjuti tentang PMO dalam keterlibatan pengobatan sehingga penelitian ini lebih baik.

Kata Kunci: *Persepsi, PMO, Kepatuhan, Program Pengobatan*

PENDAHULUAN

Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh kuman (*Mycrobakterium Tuberkulosis*), kuman ini memiliki sifat khusus tahan asam, cepat mati dengan matahari, tetapi bisa tahan hidup beberapa jam di tempat yang gelap dan lembab. Dalam penyembuhannya memerlukan waktu yang lama, salah satunya dengan strategi DOTS. Strategi DOTS dapat diartikan pengawasan langsung menelan obat yang diawasi oleh PMO selama 6 bulan terhadap pasien TB untuk menjamin kepatuhan penderita menelan obat (WHO, 1997). Kepatuhan pengobatan TB merupakan hal yang sangat penting, karena bila

pengobatan tidak dilakukan secara teratur dan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka akan dapat timbul kekebalan kuman TB terhadap Obat Anti TB (OAT) secara meluas atau disebut *Multi Drugs Resistance* (MDR) (Depkes, 2001). Fakta menunjukkan bahwa kepatuhan pengobatan belum sepenuhnya dipahami, karena masih banyak para penderita TB yang berhenti di tengah jalan karena menganggap penyakitnya sudah sembuh. Hal ini kemungkinan disebabkan karena pengetahuan yang masih kurang dan persepsi penderita kepada keberadaan pengawasan minum obat sehari-hari di rumah (Depkes RI, 2002). WHO memperkirakan terjadi kasus TBC sebanyak 9

juta per tahun di seluruh dunia, dengan jumlah kematian sebanyak 3 juta orang per tahun dari Seluruh kematian tersebut, 25% terjadi di negara berkembang. Laporan WHO pada tahun 2010, peringkat Indonesia menurun ke posisi lima dengan jumlah penderita TB paru sebesar 429.000 orang (Kompas, 2011). Data dari Dinkes Provinsi Jawa Timur Indonesia tahun 2009, jumlah kasus baru TB paru dengan BTA Positif Adela 37.000 penduduk dan terjadi trend kenaikan penemuan kasus dalam 5 tahun terakhir (Dinkes Provinsi Jawa Timur, 2010). Faktor penyebab masih tingginya prevalensi TB paru di Indonesia termasuk di Jawa Tiimur diantaranya kemiskinan, kebodohan, geografis, perilaku yang tidak sehat, lingkungan yang kurang sehat, penyakit dan akses pelayanan kesehatan terbatas (Dinkes Prov.Jatim,2010). Faktor lain yang juga menjadi penyebab adalah putus berobat dan kurangnya dukungan keluarga dan pengawasan secara langsung minum obat di rumah (Pratiwi, 2008). Menurut hasil penelitian Heriyono tahun 2004, faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan penderita TB paru adalah pendidikan, pemgetahuan, sikap, pekerjaan, jarak pelayanan dan kurangnya pengetahuan Pengawas Menelan Obat (PMO) mengenai tugasnya. Sedangkan faktor yang tidak berhubungan dengan kepatuhan penderita TB adalah umur dan jenis kelamin (Heriyono, 2004). Berdasarkan data Dinas Kesehatan Ponorogo mulai bulan Januari sampai November tahun 2013 didapatkan kasus TB di Ponorogo sebanyak 388 penderita.Diperoleh data dari Dinkes Ponorogo kejadian TB tertinggi di wilayah kerja puskesmas

Jenangan. Di wilayah kerja Puskesmas Badegan diperoleh penderita TB sebanyak 32 penderita.Alasan peneliti mengambil di wilayah kerja Puskesmas Badegan karena dari tahun ke tahun meningkat, dan kini di daerah Puskesmas ini sudah dibentuk kader-kader PMO untuk memantau peran PMO dan penderita dalam program pengobatan. Menurut hasil penelitian Rhita Tahitu dan Ridwan Amarudin tahun 2006, terdapat 3variabel/ faktor resiko terjadinya kegagalan konversi yakni Pengawas Menelan Obat (PMO), kepatuhan berobat dan efek samping obat. Hasil penelitian yang dilakukan Rhita dan Rhitwan didapatkan 70,6% tidak patuh minum obat dan 29,4% patuh minum obat, yang tidak patuh minum obat akan beresiko 42,8 kali mengalami kegagalan konversi (Tahitu, 2006).Faktor penyebab putusnya minum obat adalah miskinnya informasi tentang pengobatan TB, kebosanan minum obat yang terlalu lama dan jumlah obat yang efektif cukup banyak, merasa sudah sehat dan adanya efek samping obat, kesulitan obat atau tidak ada yang mengantar penderita berobat (Depkes, 2010). Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi virulensi dan menekan jumlah penderita tuberkolusis, diantaranya dengan dicanangkannya Gerakan Terpadu Nasional (Gardunas TB) oleh Menkes RI pada tanggal 24 Maret 1999.Pemerintah melalui Program Nasional Pengendalian TB telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi TB, yakni dengan strategi DOTS. WHO merekomendasikan 5 komponen strategi DOTS, antara lain dengan pengawasan langsung Pengawas Minum Obat (PMO). Pelaksanaan strategi DOTS sudah

dilaksanakan tetapi sampai saat ini penderita tuberkulosis di Indonesia masih tinggi. Perlu dilakukan suatu modifikasi strategi untuk meningkatkan keteraturan minum OAT bagi penderita TB. Penderita TB perlu pengawasan langsung agar minum obat secara teratur sampai sembuh (Depkes RI, 2003). Keberhasilan pengobatan TB tidak lepas dari keteraturan penderita TB paru dalam minum obat. Keteraturan minum obat dapat dicapai dengan adanya pengawas minum obat OAT (PMO) yang dipilih dari orang dekat atau keluarga dan harus disegani oleh penderita (Depkes RI, 2003). PMO bertanggung jawab untuk memastikan penderita TB minum obat sesuai aturan petugas Puskesmas/UPK (Unit Pelayanan Kesehatan). Penderita TB mungkin saja merasa malu atau kesakitan karena mengidap TB, maka PMO harus bisa menjadi sahabat yang siap mendengarkan keluhan penderita dan bisa membuat penderita merasa nyaman (Bachti, 2008). Pengawasan minum obat pada penderita TB paru dapat dilakukan oleh keluarga sebagai unit terdekat dengan klien TB. Keluarga memberikan perawatan secara preventif dan secara bersama-sama merawat anggota keluarga yang sakit. Lebih jauh keluarganya mempunyai tanggung jawab utama untuk memulai dan mengkoordinasikan pelayanan yang diberikan oleh para profesional perawatan kesehatan (Marilyn M Friedman, 1988: 402). Maka dari itu perlu diadakan kerja samanya yang baik antara penderita TB Paru, keluarga, bahkan ahli medis dan dinas kesehatan untuk meningkatkan pelayanannya, memberikan fasilitas pengobatan yang strategis dan memadai serta memberikan penyuluhan kepada klien dan keluarga agar

mempunyai semangat untuk berobat ke ahli medis secara teratur dan sembuh. (Pedoman Nasional Penanggulangan TB Paru, 2009: 9). Salah satu faktor penunjang kepatuhan pasien TB dalam program pengobatan adalah peran PMO yang efektif, sehingga persepsi klien tentang PMO sangat menunjang kelancaran pengobatan. Dari data di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang persepsi pasien TB paru kepada PMO dalam menunjang kepatuhan pelaksanaan program pengobatan di wilayah kerja Puskesmas Badegan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pasien TB paru kepada PMO dalam menunjang kepatuhan pelaksanaan program pengobatan di *GHS (Government Health Service)* Ponorogo, yaitu di wilayah kerja Puskesmas Badegan Ponorogo. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan peneliti tentang persepsi pasien TB kepada peran PMO, bagi institusi keperawatan diharapkan dapat menambah beragam hasil penelitian dalam dunia penelitian serta dapat dijadikan referensi bagi pembaca lain yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut, baik penelitian yang serupa maupun penelitian yang lebih kompleks. Sedangkan bagi profesi, diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut dalam mengembangkan profesi keperawatan. Adapun manfaat bagi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan informasi tentang peran PMO pada program pengobatan TB Paru sehingga dapat mempengaruhi sikap masyarakat tentang program pengobatan tersebut.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan adalah Deskriptif yaitu untuk mengetahui persepsi pasien TB kepada PMO dalam menunjang kepatuhan pelaksanaan program pengobatan di wilayah kerja Puskesmas Badegan Ponorogo. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien TB paru di wilayah kerja puskesmas Badegan sejumlah 32 pasien, dengan sampel seluruh pasien TB paru yang berada di wilayah kerja Puskesmas Badegan Ponorogo sejumlah 32 pasien. Dalam melakukan pengumpulan data, peneliti menggunakan kuisioner yang dibagikan kepada responden untuk diisi dan telah dikembalikan langsung kepada peneliti. Sedangkan pengolahan data akan dilakukan dengan tahap 1) Editing (penyuntingan), 2) Coding (pengkodean), 3) Skoring, dan 4) Entri

HASIL DAN PEMBAHASAN.

Penelitian dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Badegan Ponorogo. Penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi kerumah (*door to door*). Puskesmas ini terletak di Desa Badegan, Kecamatan Badegan. Adapun jumlah desa yang termasuk di wilayah kerja Puskesmas Badegan yaitu Desa Blembem, Kribet, Sidoharjo, Bulu, Srandil, Poko, Karangjoho, Bulu Lor, Pulosari. Batas wilayah penelitian sebelah utara Kecamatan Sampung, sebelah barat Kecamatan Kauman, sebelah selatan Kecamatan Balong, sebelah timur Kecamatan Jambon. Sebagian besar wilayah Badegan yaitu tanah pertanian. Jarak rata-rata antara wilayah penelitian dengan Puskesmas Badegan ± 5 km, dan jarak dengan pusat kota cukup jauh ± 15 km dengan waktu tempuh sekitar 30 menit dapat dijangkau dengan

kendaraan umum atau kendaraan pribadi. Jumlah pasien TB Paru pada tahun 2013 ada 32 orang dengan rincian 22 orang yang hasil lab BTA nya positif, sedangkan 10 orang dengan hasil lab BTA nya negatif. Dalam pengobatan TB Paru di Puskesmas Badegan menggunakan program pengobatan DOTS. Dengan strategi pengobatan ini diperoleh hasil pada tahun 2014 tingkat keberhasilan pasien TB Paru yang sembuh dan pengobatan lengkap ada 17 orang. Sedangkan yang sudah meninggal ada 2 orang dan 13 orang masih menjalani masa pengobatan. Jumlah PMO ada 32 orang yaitu berasal dari keluarganya sendiri. Sedangkan jumlah kader-kader PMO ada 2 orang. Kader-kader ini juga berperan aktif dalam proses pengobatan. Hasil penelitian disajikan dalam 2 kelompok data yaitu:

- Data Umum, meliputi Data umum pada penelitian ini menyajikan karakteristik responden berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, lama menderita TB paru, apakah pasien mengetahui peran dari PMO dan sumber informasinya.
- Data khusus, berisi tentang persepsi pasien TB paru kepada PMO dalam menunjang dalam menunjang kepatuhan pelaksanaan program pengobatan, disajikan sebagai berikut:

Tabel 1 Distribusi persepsi pasien TB Paru kepada PMO dalam menunjang kepatuhan pelaksanaan program pengobatan di wilayah kerja Puskesmas Badegan Bulan Maret tahun

2015			
No	Persepsi	Frekuensi	P (%)
1	Positif	19	59

2	Negatif	13	41
Jumlah			100
32			

Dari tabel 1 dapat diketahui bahwa sebagian besar (59%) atau 19 responden persepsinya positif. Sedangkan hampir setengahnya (40%) atau 13 responden persepsinya negatif. Pasien yang sudah mengerti peran dari PMO berpersepsi positif. Menurut Suriasumantri, J.S. 2001 menyatakan bahwa informasi adalah sesuatu yang dapat diketahui, namun ada pula yang menekankan informasi sebagai transfer pengetahuan, sehingga semakin banyak informasi yang didapat seseorang maka semakin baik orang tersebut mempersepsikan suatu obyek atau peristiwa. Berdasarkan hasil tersebut seharusnya PMO di beri penjelasan dan pemahaman yang lebih dari petugas kesehatan, sehingga PMO dalam memberikan penjelasan ke pasiennya agar bisa dimengerti dengan baik. Dalam hal ini pasien saat ditanya siapa yang menjadi pengawas minum obat di rumah (PMO) pasien mampu menjawab. Pasien mengetahui peran-peran PMO diantaranya keluarga mengingatkan, memperhatikan saat minum obat setiap hari, dan apabila telat minum obat pasien dimarahi. Selain itu pasien yang sudah mengetahui peran dari PMO sebagian besar (53%) berpersepsi positif, tetapi ada (25%) yang berpersepsi negatif. Hal ini dipengaruhi oleh faktor usia. Menurut WHO tahun 2010 usia yang tergolong lanjut kemungkinan akan terjadi perubahan-perubahan yang terjadi pada usia tersebut sudah semakin bertambah terutama perubahan mental psikologis. Hal ini

menjukkan bahwa tingkat pengetahuan pasien terhadap peran PMO sangat dipengaruhi oleh faktor usia. Semakin tua umur seseorang maka akan semakin lemah pula daya tangkap seseorang terhadap obyek atau peristiwa yang terjadi, sehingga pemahaman terhadap suatu obyek tersebut akan semakin berkurang. Responden mengetahui peran dari PMO tapi disini ada yang mempersepsikan negatif, karena responden sudah tua, keluarga mengatakan bahwa setiap hari tidak bosan dalam mengingatkan dan memperhatikan saat minum obat tapi responden merasa tidak diperhatikan, sehingga pasien kurang baik dalam memandang keluarganya. Pasien yang lama menderita sakitnya lebih dari satu tahun berpersepsi positif, yaitu sebesar (38%) atau 12 berpersepsi positif dari 22 jumlah responden. Menurut Azwar (2005), pengalaman adalah suatu peristiwa yang pernah dialami seseorang. Tidak adanya suatu pengalaman sama sekali dengan suatu obyek cenderung bersifat negatif dalam memberikan penilaian terhadap obyek tertentu. Hasil penelitian didapatkan bahwa responden yang menderitanya lebih dari 1 tahun berpersepsi positif karena semakin lama menderita pasien semakin memahami penyakit yang diderita yang dijelaskan oleh pelayanan kesehatan dan anggota keluarga yang menjadi pengawas minum obat sehari-hari di rumah. Selain itu bahwa lama responden menderita sakit lebih dari satu tahun pada hampir setengahnya (38%) berpersepsi positif, tapi yang lama menderita lebih dari satu tahun ada juga yang berpersepsi negatif yaitu (31%) atau 10 orang dari 22 jumlah pasien. hal ini dipengaruhi oleh pekerjaan mereka. Menurut Teori Berbagai

(Lawrence Green) faktor demografi seperti keadaan sosial ekonomi, umur, jenis kelamin, pekerjaan secara tidak langsung dapat mempengaruhi pola pikir dan cara pandang masyarakat terhadap kesehatan. Namun demikian, terdapat responden yang lama menderitanya lebih satu tahun tetapi berpersepsi negative. Itu disebabkan karena faktor pekerjaan, yaitu pekerjaan nya petani dan buruh tani. Dengan pekerjaan ini, pengalaman penderita sangat kurang karena kesibukannya hanya disawah, responden mengatakan setelah pulang kerja di sawah istirahat dan besok ke sawah lagi, hal itu yang menyebabkan mereka kekurangan info tentang kesehatan. Anak atau suami istri yang menjadi PMO, pasien cenderung mempersepsikan positif. Terbukti dari hasil penelitian didapatkan bahwa hubungan anak (31%) atau 10 orang dari 17 responden dan suami istri (23%) atau 7 orang dari 11 responden berpersepsi positif. Menurut Mangunegara dan Suryatenggoro (1994) dalam pengawasan pengobatan petugas kesehatan harus mengikutsertakan keluarga supaya pasien dapat berobat secara kontinyu. Hasil penelitian bahwa yang ditunjuk sebagai pengawas minum obat adalah dari keluarganya sendiri, karena hubungan anak ataupun suami/istri sangat dekat dan disegani oleh penderita. Orang yang mempunyai hubungan sedarah itu akan lebih sayang dalam memperhatikan keluarganya yang sakit, bukan hanya sekedar mengingatkan saja, tapi merawat dengan tulus agar keluarga yang menderita sakit cepat sembuh. Selain itu juga didapatkan bahwa hubungan PMO dengan pasien sebagai anak hampir setengahnya (31%) berpersepsi

positif, tapi ada (22%) yang hubungannya sebagai anak, pasien berpersepsi negatif. Hal ini dipengaruhi oleh faktor tempat tinggal PMO (anak) tidak serumah dengan pasien atau dekat dengan rumah. Menurut Depkes RI (1999) PMO adalah seseorang yang ditunjuk, dan dipercaya untuk mengawasi dan memantau penderita tuberkolosis dalam meminum obat nya secara teratur dan tuntas adalah bagian dari keluarganya. Walaupun anak adalah bagian dari keluarga yang sah, tapi kalo tempat tinggal nya tidak serumah akan mempengaruhi persepsi pasien, karena pasien mungkin merasa jarang diperhatikan sama anaknya yang rumahnya tidak serumah karena kesibukannya, sehingga pandangan seorang penderita akan hal atau peristiwa yang didapat sulit untuk diterima. Tempat tinggal PMO yang serumah dengan pasien, persepsi pasien kepada PMO positif. Hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa tempat tinggal PMO yang 1 rumah dengan pasien (59%) atau 19 orang dari 26 responden berpersepsi positif. Menurut Depkes RI (1999) PMO adalah seseorang yang ditunjuk, dan dipercaya untuk mengawasi dan memantau penderita tuberkolosis dalam meminum obatnya secara teratur dan tuntas adalah bagian dari keluarganya. Hal ini dapat dilihat kembali dari syarat menjadi PMO yaitu dari keluarga dan tempat tinggal serumah, ini bertujuan untuk memudahkan dalam pengawasan pasien dalam minum obat secara rutin di rumah. Orang yang tinggal serumah pasti akan lebih peka ketika memberikan wawasan tentang sakitnya, sehingga pasien bisa mempersepsikan yang baik terhadap keluarga serumah yang ditunjuk sebagai pengawas minum obat sehari-hari karena

pasien merasa kalau yang tinggal serumah itu setiap hari memperhatikan. Selain itu tempat tinggal PMO dengan pasien didapatkan bahwa yang tinggal serumah sebagian besar (59%) berpersepsi positif, tapi ada sebagian kecil (23%) pasien yang berpersepsi negatif. Hal ini dipengaruhi oleh faktor frekuensi mendapat info satu kali. Menurut Notoatmodjo (2008) bahwa semakin banyak informasi dapat mempengaruhi atau menambah pengetahuan seseorang dan dengan pengetahuan menimbulkan kesadaran yang akhirnya seseorang akan berpersepsi sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Sehingga walaupun tinggal serumah dengan pasien, kalau frekuensi mendapatkan info tentang pengobatannya sedikit atau jarang, responden mengatakan nonton televisi tak sempat bahkan baca koran tak pernah sana sekali, padahal sumber informasi juga banyak didapat dari itu. Dengan kondisi seperti ini pasien akan mempersepsikan suatu obyek atau peristiwa sesuai yang didapat. Pasien yang mendapatkan informasi tentang pelaksanaan program pengobatan TB paru cuma satu kali, Persepsi pasien negatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang berpersepsi negatif adalah pasien yang mendapatkan info satu kali yaitu (13%) atau 4 orang dari 8 jumlah responden. Menurut Notoatmodjo (2008) bahwa semakin banyak informasi dapat mempengaruhi atau menambah pengetahuan seseorang dan dengan pengetahuan menimbulkan kesadaran yang akhirnya seseorang akan berpersepsi sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Dengan demikian, responden yang kurang mendapatkan informasi tentang penjelasan pengobatannya, mereka kurang memahami

cara pengobatan yang mereka terima saat ini. Responden yang kurang mendapatkan info, saat peneliti tanya tentang pengobatan, dan peran-peran pengawas minum obat di rumah, mereka kadang masih kebingungan dalam menjawab, sehingga hasil pandangnya kepada yang menngawasi minum obat kurang begitu optimal karena kurangnya informasi. Selain itu pasien yang Frekuensi mendapatkan informasi tentang pengobatan TB sebagian kecil (13%) dengan ferkuensi 1 kali pasien berpersepsi negatif, tetapi ada (12%) dengan frekuensi 1 kali yang berpersepsi positif. Hal ini dipengaruhi oleh jenjang pendidikan pasien menengah ke atas. Menurut Widyastuti (2005), orang yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi lebih berorientasi pada tindakan preventif, mengetahui lebih banyak tentang masalah kesehatan dan memiliki status kesehatan yang lebih baik sehingga dalam penilaian terhadap suatu obyek atau peristiwa akan optimal. Pada tingkat pendidikan pasien yang menengah ke atas ini walaupun hanya mendapatkan info satu kali, tetapi mereka sudah mampu menangkap informasi apa yang dia dapatkan karena memiliki pengetahuan yang luas, sehingga dia mampu mempersepsikan suatu obyek atau peristiwa yang dialaminya secara baik. seseorang mendapat informasi yang cukup sehingga semakin tinggi tingkat pendidikan responden maka pengetahuan responden semakin baik. Ditinjau dari usia pasien, pasien yang berpersepsi negatif adalah yang usia 51-59 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang berpersepsi negatif didapatkan usia 51-59 tahun, yaitu (16%) atau 5 responden dari 6 responden dan usia 60-68 tahun, yaitu (22%)

atau 7 dari 13 responden. Menurut WHO tahun 2010 usia yang tergolong lanjut kemungkinan akan terjadi perubahan-perubahan yang terjadi pada usia tersebut sudah semakin bertambah terutama perubahan mental psikologis. Kemungkinan pada usia tersebut terdapat banyak kendala yang dialami oleh responden baik fisik maupun mental sehingga mempengaruhi daya tangkap seseorang terhadap orang yang menjadi pengawas minum obat, sebenarnya orang-orang yang sudah tua itu sudah dikasih wawasan sama keluarga, tapi kadang orang yang sudah tua itu mudah lupa. Akhirnya hasil pandang pasien yang sudah tua ini kepada anggota keluarganya kurang optimal. Pasien yang pendidikannya rendah cenderung persepsinya negatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang berpersepsi negatif adalah tingkat pendidikan yang tidak sekolah (TS), yaitu (12%) atau 4 orang dari 7 jumlah responden dan SD (19%) atau 6 orang dari 11 jumlah responden. Menurut Notoatmodjo (2005) menyebutkan semakin rendah tingkat pendidikan seseorang maka semakin sulit menerimainformasi yang diberikan. Kemungkinan orang yang tidak sekolah atau pendidikan SD sulit menangkap atau memahami penjelasan dari PMO. Hal ini mungkin disebabkan karena lamanya mereka memperoleh ilmu pengetahuan yang diperoleh secara formal, karena pendidikan formal juga berdampak pada pengetahuan mereka, sehingga apa yang dijelaskan keluarga mengenai pengobatan ini kurang di pahami oleh penderita. Dalam kenyataan dilapangan pasien yang tidak sekolah tidak dapat menulis dan pada saat saya kasih penjelasan tentang pernyataan dikuesioner

tidak bisa menangkap dengan baik sehingga mempengaruhi pandangan pasien kepada orang yang menjadi pengawas minum obat sehari-hari.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil bahwa sebagian besar responden (59,37%) berpersepsi positif kepada PMO dalam menunjang kepatuhan pelaksanaan program pengobatan di wilayah kerja Puskesmas Badegan dan hampir setengahnya (40,62%) berpersepsi negatif. Hasil penelitian ini direkomendasikan: 1) Bagi Pengawas Minum Obat (PMO), untuk mengingatkan minum obat di rumah jangan terlalu ramah, yang tegas sehingga pasien dapat mematuhi saat waktunya minum obat dan tidak terjadi kegagalan; 2) Bagi puskesmas, diharapkan dapat meningkatkan frekuensi dalam memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat terkait dalam penyakit TB Paru beserta program pengobatan. Upaya penyuluhan dari Dinas kesehatan dan Puskesmas hendaknya dilakukan secara rutin agar masyarakat memahami tentang penyakit TB paru dan tidak terjadi kegagalan dalam program pengobatan. Puskesmas juga membrikan penyuluhan kepada PMO secara rutin agar PMO semakin memahami peran-perannya; 3) Bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan tentang persepsi pasien TB paru kepada peran dari PMO. Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan karena adanya keterbatasan penelitian. Oleh karena itu diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih mendalam tentang PMO dalam keterlibatan pengobatan sehingga penelitian ini lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsani. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Cetakan ketiga belas. Jakarta: PT Asdi Mahasatya
- Bimo, Walgito. 2003. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi
- Depkes RI. 2001. *Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis*. Cetakan keenam. Jakarta
- _____. 2004. *Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis*. Jakarta: Gedurnas-TB
- _____. 2010. *Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis*. Jakarta: Gedurnas-TB

Evaluasi Perilaku Keluarga Sadar Gizi di Ponorogo

Oleh :

METTI VERAWATI¹⁾

RIRIN NASRIATI²⁾

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

ABSTRAK

Gizi sangat penting bagi kehidupan. Kekurangan gizi pada anak dapat menimbulkan beberapa efek negatif seperti lambatnya pertumbuhan badan, rawan terhadap penyakit, menurunnya tingkat kecerdasan, dan terganggunya mental anak. Kekurangan gizi yang serius dapat menyebabkan kematian anak dan apabila gizi kurang dan gizi buruk terus terjadi dapat menjadi faktor penghambat dalam pembangunan nasional. Pemenuhan gizi masyarakat tergantung erat dengan pola perilaku orang tersebut. Kenyataannya masih banyak keluarga yang belum berperilaku gizi yang baik sehingga sampai saat ini masih dijumpai adanya masalah gizi di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perilaku Keluarga Sadar Gizi di Ponorogo. Pada penelitian ini mendeskripsikan perilaku keluarga sadar gizi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh orang tua yang mempunyai anak balita Di Desa Lembah Dusun Ngijo Kecamatan Babadan Ponorogo. Sampel dalam penelitian ini adalah 46 ibu dengan kriteria ibu yang mempunyai balita usia 6-59 bulan. Untuk analisa data dan penarikan kesimpulan, perilaku keluarga sadar gizi, maka peneliti menggunakan indikator yang sudah ditetapkan oleh Departemen Kesehatan. Sebagian besar (80,4%) berperilaku belum baik, (80,4%). Suatu keluarga disebut KADARZI apabila telah berperilaku gizi yang baik dengan menerapkan kelima indikator kadarzi dengan menimbang berat badan secara teratur, memberikan air susu ibu (ASI) saja sampai umur 6 bulan (ASI Eksklusif), makan beranekaragam, menggunakan garam beryodium dan minum suplemen gizi (kapsul vitamin A dosis tinggi). Responden yang berperilaku belum baik dalam Kadarzi dipengaruhi dari pengetahuan berdasarkan sumber informasi yang kurang. Disarankan untuk petugas kesehatan memberikan pendidikan kesehatan tentang Kadarzi pada keluarga sehingga keluarga faham pentingnya Kadarzi dan dapat merubah perilaku yang belum baik.

Keyword : *Perilaku Keluarga Sadar Gizi, Balita*

PENDAHULUAN

Derajat kesehatan yang tinggi dalam pembangunan ditujukan untuk mewujudkan manusia yang sehat, cerdas, dan produktif. Salah satu unsur penting dari kesehatan adalah masalah gizi. Gizi sangat penting bagi kehidupan. Status gizi masyarakat dapat digambarkan terutama pada status gizi balita. Balita merupakan kelompok yang rawan terhadap masalah kesehatan dan kekurangan gizi. (Mardawati, 2008). Menurut hasil pemantauan Direktorat Bina Gizi Masyarakat, Kementerian Kesehatan, selama tahun 2005 sampai dengan 2009, jumlah temuan kasus balita gizi buruk amat berfluktuasi. Tahun

2005-2007 jumlah kasus cenderung menurun dari 76178, 50106, dan 39080. Akan tetapi tahun 2007 dan 2008 cenderung meningkat yaitu 41290 dan 56941. Yang menarik, terdapat empat provinsi yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur dan Gorontalo yang selalu hadir berturut-turut dari 2005-2009. Provinsi NTT pada tahun 2005, 2007 dan 2008, menduduki posisi teratas sedangkan tahun 2006 dan 2009 masing-masing ditempati Jawa Tengah dan Jawa Timur. Keempat provinsi tersebut selama 5 tahun berturut-turut (2005-2009) masuk ke dalam kategori 10 provinsi dengan kasus tertinggi. Kondisi ini sebaiknya menjadi

bahan pertimbangan untuk menempatkan keempat provinsi tersebut sebagai prioritas utama upaya penanggulangan gizi buruk. (Siswono, 2010). Dari Dinas Kesehatan Ponorogo didapatkan data bahwa balita yang datang ke Posyandu dan ditimbang jumlahnya 44667 Balita dari situ diketahui status gizinya, gizi buruk 249, gizi kurang 2310, gizi baik 41457 dan gizi lebih 651 Balita. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Nurul tahun 2013 diKecamatan Babadan, dari 80 balita yang diobservasi, didapatkan data balita dengan status gizi kurang sejumlah 37 balita, status gizi buruk 21 balita, dan 2 balita dengan gizi lebih. Pemenuhan gizi masyarakat tergantung erat dengan pola perilaku orang tersebut. Yang dimaksud dengan Kadarzi adalah keluarga yang mampu mengenal, mencegah dan mengatasi masalah gizi setiap anggotanya. Selama ini telah dilakukan upaya perbaikan gizi mencakup promosi gizi seimbang termasuk penyuluhan gizi di Posyandu, pemberian makanan tambahan termasuk MP-ASI, pemberian suplemen gizi (kapsul Vitamin A dan Tablet Tambah Darah), pemantauan dan penanggulangan gizi buruk. Kenyataannya masih banyak keluarga yang belum berperilaku gizi yang baik sehingga sampai saat ini masih dijumpai adanya masalah gizi di Indonesia.(Suparmanto 2007). Merubah perilaku keluarga menjadi keluarga sadar gizi bukanlah hal mudah, diperlukan suatu upaya pendidikan gizi masyarakat yang terus menerus, termasuk penyebarluasan informasi melalui media massa, pembinaan dan pergerakan tokoh dan kelompok-kelompok masyarakat, serta pendampingan keluarga baik oleh tenaga profesional maupun masyarakat terlatih. (Karolina, E, 2012).

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perilaku Keluarga Sadar Gizi di Ponorogo.

METODOLOGI PENELITIAN

Desain penelitian ini adalah deskripsi. Penelitian mendeskripsikan perilaku sadar gizi keluarga. Variabel dalam penelitian ini adalah Perilaku sadar gizi pada keluarga di Kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo. Penelitian ini dilaksanakan di Dukuh Ngijo Desa Lembah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh orang tua yang mempunyai anak balita Kecamatan Babadan Ponorogo, sampel dipilih berdasarkan kriteria sampel dengan teknik sampling Purposive Sampling dengan jumlah sampel 46 responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

- a. Karakteristik responden berdasarkan Perilaku Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) berdasarkan menimbang BB secara teratur. Tabel 5.6. Distribusi frekwensi responden berdasarkan Perilaku Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) berdasarkan menimbang BB secara teratur.

No	Kadarzi (Menimbang BB)	Frekwensi (f)	Prosentase (%)
1	Baik	44	95,6
2	Belum Baik	2	4,4
	Jumlah	46	100

Sumber : Kuesioner tahun 2015

- Berdasarkan table 5.6 didapatkan dari 46 responden, hampir seluruhnya (95,6%) berperilaku baik dalam menimbang BB balita.
- b. Karakteristik responden berdasarkan Perilaku Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) berdasarkan makan beraneka ragam.

Tabel 5.7. Distribusi frekwensi responden berdasarkan Perilaku Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) berdasarkan makan beraneka ragam.

No	Kadarzi (Makan beraneka ragam)	Frekwensi (f)	Prosentase (%)
1	Baik	29	63
2	Belum Baik	17	37
	Jumlah	46	100

Sumber : Kuesioner tahun 2015

Berdasarkan table 5.6 didapatkan dari 46 responden, sebagian besar (63%) berperilaku baik dalam makan beraneka ragam.

- c. Karakteristik responden berdasarkan Perilaku Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) berdasarkan konsumsi garam beryodium
- Tabel 5.8. Distribusi frekwensi responden berdasarkan Perilaku Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) berdasarkan konsumsi garam beryodium.

No	Kadarzi (Konsumsi Garam Beryodium)	Frekwensi (f)	Prosentase (%)
1	Baik	39	84,8
2	Belum Baik	7	15,2
	Jumlah	46	100

Sumber : Kuesioner tahun 2015

Berdasarkan table 5.8 didapatkan dari 46 responden, hampir seluruhnya (84,8%) berperilaku baik dalam mengkonsumsi garam beryodium.

- d. Karakteristik responden berdasarkan Perilaku Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) berdasarkan pemberian ASI Eksklusif
- Tabel 5.9. Distribusi frekwensi responden berdasarkan Perilaku Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) berdasarkan pemberian ASI Eksklusif.

No	Kadarzi (ASI eksklusif)	Frekwensi (f)	Prosentase (%)
1	Baik	31	67,4
2	Belum Baik	15	32,6
	Jumlah	46	100

1	Baik	31	67,4
2	Belum Baik	15	32,6
	Jumlah	46	100

Sumber : Kuesioner tahun 2015

Berdasarkan table 5.9 didapatkan dari 46 responden, sebagian besar (67,4%) berperilaku baik dalam pemberian ASI Eksklusif.

- e. Karakteristik responden berdasarkan Perilaku Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) berdasarkan pemberian suplemen gizi sesuai anjuran.

Tabel 5.10. Distribusi frekwensi responden berdasarkan Perilaku Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) berdasarkan pemberian suplemen gizi sesuai anjuran.

No	Kadarzi (pemberian suplemen gizi sesuai anjuran)	Frekwensi (f)	Prosentase (%)
1	Baik	31	67,4
2	Belum Baik	15	32,6
	Jumlah	46	100

Sumber : Kuesioner tahun 2015

Berdasarkan table 5.10 didapatkan dari 46 responden, sebagian besar (67,4%) berperilaku baik pemberian suplemen gizi sesuai anjuran

- f. Karakteristik responden berdasarkan Perilaku Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi).

Tabel 5.11. Distribusi frekwensi responden berdasarkan Perilaku Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi).

No	Perilaku Keluarga Sadar Gizi	Frekwensi (f)	Prosentase (%)
1	Baik	9	19,6
2	Belum Baik	37	80,4
	Jumlah	46	100

Sumber : Kuesioner tahun 2015

Berdasarkan table 5.6 didapatkan dari 46 responden, sebagian besar (80,4%) berperilaku belum baik.

PEMBAHASAN

- a. Perilaku Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) berdasarkan penimbangan balita secara teratur.

Berdasarkan table 5.6 didapatkan dari 46 responden, hampir seluruhnya (95,6%) berperilaku baik dalam menimbang BB balita. Menimbang BB balita dikategorikan baik jika dilakukan lebih dari sama dengan 4x berturut-turut. Pemantauan pertumbuhan balita bisa dilakukan dengan menimbang berat badan balita di rumah maupun di posyandu atau di puskesmas.

Pemantauan ini dimaksudkan untuk mengetahui pertumbuhan balita dan bisa mencegah masalah sedini mungkin apabila terjadi penyimpangan. Pemantauan pertumbuhan ini dapat dilihat dari KMS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 95,6% ibu yang secara teratur menimbang berat badan balitanya setiap bulan dengan kategori baik. Artinya angka tersebut sudah cukup baik, menurut Depkes (2007), dari target cakupan penimbangan balita minimal adalah 80%. Perubahan berat badan menggambarkan perubahan konsumsi makanan atau gangguan kesehatan. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan kesehatan yaitu mengikuti perkembangan kesehatan dan pertumbuhan anggota keluarga, terutama bayi, balita dan ibu hamil.

Pertumbuhan adalah perubahan ukuran dan bentuk tubuh (fisik) dari waktu ke waktu. Perkembangan adalah bertambahnya fungsi tubuh seperti pendengaran, penglihatan, kecerdasan dan

tanggung jawab. Kegunaan dari pemantauan ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita, mencegah memburuknya keadaan gizi, mengetahui kesehatan ibu hamil dan perkembangan janin, mencegah ibu melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah dan terjadinya pendarahan pada saat melahirkan, dan mengetahui kesehatan anggota keluarga dewasa dan usia lanjut (Dinkes DKI Jakarta 2002 dalam Gabriel 2008).

Hal ini dapat disebabkan karena rutinitas penimbangan ini biasanya dilakukan oleh ibu yang rumahnya dekat dengan posyandu atau rumah kader. Dari hasil observasi peneliti pada saat pengumpulan data, sebagian besar ibu yang membawa balitanya ke posyandu untuk menimbang balitanya rumahnya berdekatan dengan posyandu. Selain jarak rumah dengan posyandu, hal ini juga dipengaruhi oleh status ibu hampir setengahnya (37,5 %) sebagai ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga mempunyai cukup waktu untuk merawat balita, termasuk membawa balitanya ke posyandu untuk ditimbang. Menimbang berat badan secara teratur maka segera dapat diketahui apabila terjadi penyimpangan pola pertumbuhan untuk dilakukan perbaikan dan pencegahan kearah yang lebih jelek.

Berdasarkan table 5.6. juga didapatkan hasil 2 responden berperilaku kurang baik dalam menimbang balitanga secara teratur diposyandu. Gambaran perilaku gizi yang belum baik juga

ditunjukkan dengan masih rendahnya pemanfaatan fasilitas pelayanan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena aspek masalah pada tingkat keluarga, aspek tersebut adalah pengetahuan dan keterampilan keluarga. Dari data demografi didapatkan bahwa responden yang tidak menimbang BB balitanya secara teratur berpendidikan SD dan pekerjaan petani. Pendidikan SD adalah pendidikan dasar, dengan pendidikan yang dimiliki responden adalah SD maka dimungkinkan pengetahuan responden tentang KADARZI dalam masih kurang sehingga berpengaruh dalam perilaku KADARZI.

b. Perilaku Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) berdasarkan makan beraneka ragam.

Berdasarkan table 5.6 didapatkan dari 46 responden, sebagian besar (63%) berperilaku baik dalam makan beraneka ragam. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar balita mendapat asupan gizi yang lengkap dan seimbang, yang terdiri dari karbohidrat (nasi atau bubur), protein hewani (telur, ayam) dan nabati (tahu dan tempe), sayur, buah dan susu setiap hari.

Teori Herdiansyah (2006) dalam Gabriel 2008, bahwa makanan beranekaragam saja belum cukup sehingga perlu didukung dengan jumlah asupannya yang mencukupi kebutuhan tubuh. Praktek keluarga yang mampu mengkonsumsi makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan, dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan setiap individu dalam keluarga dan bebas dari pencemaran.

Pemenuhan makanan yang beragam sesuai indicator Kadarzi dipengaruhi salah satunya oleh status ekonomi keluarga. Berdasarkan data demografi responden didapatkan data bahwa 25 responden yang berpenghasilan > Rp. 500.000-Rp. 1.000.000 dan lebih dari Rp. 1.000.000 memiliki perilaku yang baik dalam penyediaan makanan beragam bagi keluarganya. Orang tua yang memiliki pengetahuan dan pendidikan tinggi akan lebih mengerti tentang pemilihan pengolahan pangan serta cara pemberian makan yang sehat dan bergizi untuk anaknya (Soetjiningsih 1995). Kondisi ekonomi keluarga adalah salah satu factor yang dapat mempengaruhi kehidupan keluarga lainnya, diantaranya pendidikan keluarga, kesehatan dan gizi balita, serta kualitas tumbuh kembang anak balita (Gunarsa & Gunarsa 1985 dalam Gabriel 2008).

Kebiasaan responden untuk menyediakan makanan yang beraneka ragam di rumah memberi peluang bagi balitanya untuk dapat menerima pangan yang berkualitas dan berkuantitas gizi baik. Makan makanan yang beragam dapat mencukupi kebutuhan gizi seseorang karena tidak ada satu jenis panganpun yang kandungan zat gizinya lengkap. Konsumsi pangan yang kurang beragam akan menimbulkan ketidakseimbangan antara masukan dengan kebutuhan zat gizi yang diperlukan untuk hidup sehat dan produktif. Dampak negatif selanjutnya adalah akan mengakibatkan terjadinya penyakit kekurangan gizi.(Gabriel, 2008)

Berdasarkan table 5.7 didapatkan 17 responden belum baik dalam berperilaku KADARZI dalam aspek penyediaan makanan beragam. Hal ini disebabkan karena status social ekonomi keluarga. Hasil data demografi keluarga didapatkan hampir setengahnya berpenghasilan <Rp. 500.000 perbulan dan mempunyai anak lebih dari 1. Dengan kondisi status ekonomi keluarga tersebut akan menghambat pemenuhan nutrisi yang beragam pada anggota keluarga. Menurut Depkes tahun 2007, aspek yang perlu dicermati pada masalah KADARZI di tingkat keluarga, adalah i) pengetahuan dan keterampilan keluarga dan ii) kepercayaan, nilai dan norma yang berlaku. Berdasar analisis masalahnya adalah sikap dan keterampilan serta kemauan untuk bertindak memperbaiki gizi keluarga masih rendah. Sebagian keluarga menganggap asupan makanannya selama ini cukup memadai karena tidak ada dampak buruk yang mereka rasakan. Sebagian keluarga juga mengetahui bahwa ada jenis makanan yang lebih berkualitas, namun mereka tidak ada kemauan dan tidak mempunyai keterampilan untuk menyiapkannya.

- c. Perilaku Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) berdasarkan konsumsi garam beryodium. Berdasarkan table 5.8 didapatkan dari 46 responden, hampir seluruhnya (84,8%) berperilaku baik dalam mengkonsumsi garam beryodium. Hal ini dapat dikarenakan meskipun sebagian besar keluarga sudah menggunakan garam beryodium namun belum diyakini apakah

jumlah yodium yang digunakan cukup atau tidak karena hanya melihat label pada garam saja, penanganan dan cara penyimpanan garam yang kurang baik dapat menyebabkan kandungan dalam yodium berkurang bahkan hilang. Dari tabel 5.6. juga didapatkan 7 responden perilaku KADARZI dari aspek konsumsi garam beryodium. Dari hasil pemeriksaan dengan menggunakan amilum dan KI, hasilnya tidak berwarna ungu tua tetapi ungu sangat muda mendekati putih. Hal ini menunjukkan kadar yodium pada garam rendah. Menurut Depkes RI (2005) garam beryodium baik adalah garam yang mempunyai kandungan yodium dengan kadar yang cukup (>30 ppm kalium yodat). Berdasar analisis masalah Depkes tahun 2007, sekitar 28 % rumah tangga belum menggunakan garam beryodium yang memenuhi syarat dan pola makan yang belum beraneka ragam.

- d. Perilaku Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) berdasarkan pemberian ASI Eksklusif.

Berdasarkan table 5.9 didapatkan dari 46 responden, sebagian besar (67,4%) berperilaku baik dalam pemberian ASI Eksklusif. ASI eksklusif merupakan ASI yang diberikan kepada bayi, sejak lahir sampai bayi berusia 6 bulan tanpa minuman dan makanan lain selain ASI. Pemberian ASI eksklusif sangat bermanfaat, karena ASI merupakan makanan yang paling sempurna untuk bayi, bahkan sangat mudah dan murah memberikannya kepada bayi. ASI juga dapat mencukupi kebutuhan gizi bayi sehingga bayi dapat tumbuh dan

berkembang secara optimal. Kolostrum merupakan ASI yang pertama keluar, berwarna kekuning-kuningan dan mengandung zat kekebalan tubuh untuk mencegah timbulnya penyakit (Dinkes DKI Jakarta 2002 dalam Gabriel 2008). Bayi sangat dianjurkan untuk diberi ASI Eksklusif karena pencernaan bayi belum siap untuk mencerna makanan selain ASI. ASI juga mengandung zat-zat kekebalan yang sangat diperlukan oleh bayi karena bayi sangat rentan terhadap penyakit (Karolina, 2012).

Robertson (1998) dalam Gabriel 2008, menyatakan bahwa pada empat sampai enam bulan pertama kehidupan manusia, satu-satunya bentuk pangan yang dapat diterima oleh tubuh bayi adalah Air Susu Ibu (ASI). ASI memiliki beberapa keuntungan apabila dibandingkan dengan susu formula, misalnya kandungan protein pada ASI cocok bagi metabolisme tubuh bayi. Selain itu, ASI mengandung zat antibodi yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh bayi terhadap berbagai penyakit. Kandungan lemak dan zat besi pada ASI juga sangat mudah dicerna dan diserap oleh tubuh bayi sehingga dapat dengan mudah digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Kelebihan lain dari ASI adalah suhu ASI yang sesuai dengan kondisi bayi, steril, serta adanya ikatan yang kuat antara ibu dengan bayinya akibat dari praktek pemberian ASI. Oleh sebab itu, tidak diragukan lagi bahwa pemberian ASI secara eksklusif enam bulan sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi. Berdasarkan

table 5.9 didapatkan terdapat 33, 6% berperilaku belum baik dalam pemberian ASI Eksklusif. Sementara berdasarkan data Depkes tahun 2007, pada analisis masalah keluarga didapatkan perilaku gizi lain yang belum baik adalah masih rendahnya ibu yang menyusui bayi 0-6 bulan secara eksklusif yang baru mencapai 39 %. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh pekerjaan ibu. Berdasarkan data demografi didapatkan data bawa 11 responden sebagai ibu bekerja bukan ibu rumah tangga. Ibu yang bekerja tidak penuh berada dirumah sehingga mereka dalam memberikan ASI tidak bisa full, tetapi ditambah makanan tamtambahan berupa bubur, buah dan susu formula.

- e. Perilaku Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) berdasarkan pemberian suplemen gizi sesuai anjuran.

Vitamin A sangat diperlukan oleh tubuh, penyakit akibat kekurangan vitamin A ini disebut *xerophthalmia*. Menurut Poejiadi (1994) dalam Karolina, dkk tahun 2012 vitamin A berperan dalam sintesis mukoprotein dan polisakarida yang berfungsi mempertahankan kesatuan epitel, khususnya jaringan mata, mulut, alat pernafasan, alat pernafasan, dan saluran genital. Oleh karena itu, apabila terjadi kekurangan vitamin dan mineral maka akan terjadi gangguan pembentukan mukosa yang dapat menyebabkan tubuh mudah terkena infeksi sehingga jadi mudah sakit. Berdasarkan table 5.10 didapatkan dari 46 responden, sebagian besar (67,4%) berperilaku baik dalam pemberian suplemen gizi sesuai anjuran.

Vitamin dan mineral memiliki peran bagi pertumbuhan dan perkembangan balita. Kekurangan vitamin dan mineral dapat menyebabkan timbulnya penyakit-penyakit tertentu serta menghambat pertumbuhan balita. Di dalam tubuh, zat besi berperan untuk melaksanakan transpor oksigen dari paru-paru ke jaringan serta dalam proses respirasi sel. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan penurunan kadar hemoglobin darah atau anemia gizi besi. Kekurangan vitamin C dapat menyebabkan pendarahan gusi yang diakibatkan oleh tubuhnya yang mudah terjadi luka dan infeksi. Vitamin A berperan pada sintesis mukoprotein dan mukopolisakarida yang berfungsi mempertahankan kesatuan epitel, khususnya jaringan mata, mulut, alat pencernaan, alat pernapasan, dan saluran genital (Poedjiadi 1994 dalam Gabriel 2008). Berdasarkan table 5.10 didapatkan dari 46 responden, hampir setengahnya (33,6%) berperilaku belum baik dalam pemberian suplemen gizi sesuai anjuran. Berdasarkan analisis masalah Depkes tahun 2007 didapatkan bayi dan balita yang telah mendapat Kapsul Vitamin A baru mencapai 74 %.

f. Perilaku Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi).

Berdasarkan table 5.6 didapatkan dari 46 responden, sebagian besar (80,4%) berperilaku belum baik. Dari hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar keluarga belum melaksanakan perilaku KADARZI sepenuhnya. Keluarga termasuk sudah berperilaku baik dalam KADARZI apabila sudah melaksanakan semua

indicator KADARZI yaitu menimbang berat badan secara teratur, memberikan ASI

Eksklusif dan makan beranekaragam makanan, menggunakan garam beryodium dan memberikan kapsul vitamin A kepada balita. Apabila salah satu dari indikator KADARZI tidak dilaksanakan maka keluarga belum baik dalam perilaku KADARZI. Menurut Gabriel (2008) faktor yang mempengaruhi KADARZI diantaranya adalah faktor sosio demografi yang meliputi tingkat pendidikan orang tua, umur orang tua, jumlah anggota keluarga, pendapatan keluarga, ketersediaan pangan, pengetahuan dan sikap ibu terhadap gizi. Berdasarkan data dari 37 responden (80,4%) yang berperilaku belum baik dalam Kadarzi dipengaruhi dari pengetahuan berdasarkan sumber informasi, 35 diantaranya belum pernah mendapatkan informasi tentang Kadarzi. Sumber informasi akan mempengaruhi pengetahuan responden dan pengetahuan akan mempengaruhi perilaku. Apabila informasi tidak didapat maka akan berdampak pengetahuan akan kurang dan perilaku yang terbentuk belum baik. Pengetahuan gizi seseorang menentukan perilaku gizinya kelak. Bahkan Notoatmodjo (2007) menyatakan bahwa pengetahuan tentang gizi dan makanan merupakan faktor penentu kesehatan seseorang (Gabriel, 2008).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hampir seluruhnya (95,6%) berperilaku baik dalam menimbang BB balita. Hal ini dapat disebabkan karena rutinitas penimbangan ini biasanya dilakukan oleh ibu yang rumahnya dekat dengan posyandu atau rumah kader dan status ibu hampir setengahnya (37,5 %) sebagai ibu rumah tangga.
2. Sebagian besar (63%) berperilaku baik dalam makan beraneka ragam. Hal ini dipengaruhi oleh status social ekonomi responden yang relative tinggi.
3. Hampir seluruhnya (84,8%) berperilaku baik dalam mengkonsumsi garam beryodium.
4. Sebagian besar (67,4%) berperilaku baik dalam pemberian ASI Eksklusif. Hal ini dipengaruhi oleh status responden adalah sebagai ibu rumah tangga.
5. Sebagian besar (67,4%) berperilaku baik pemberian suplemen gizi sesuai anjuran. Vitamin dan mineral memiliki peran bagi pertumbuhan dan perkembangan balita.
6. Sebagian besar (80,4%) berperilaku belum baik, (80,4%). Suatu keluarga disebut KADARZI apabila telah berperilaku gizi yang baik dengan menerapkan kelima indikator kadarzi dengan menimbang berat badan secara teratur, memberikan air susu ibu (ASI) saja sampai umur 6 bulan (ASI Eksklusif), makan beranekaragam, menggunakan garam beryodium dan minum suplemen gizi (kapsul vitamin A dosis tinggi). Responden yang berperilaku belum baik dalam Kadarzi dipengaruhi dari pengetahuan berdasarkan sumber informasi yang kurang.

Saran

Berdasarkan simpulan diatas, secara umum hasil penelitian menunjukkan hampir seluruhnya berperilaku belum baik dalam Kadarzi dipengaruhi dari pengetahuan berdasarkan sumber informasi, maka disarankan untuk petugas kesehatan memberikan pendidikan kesehatan tentang Kadarzi pada keluarga sehingga keluarga faham pentingnya Kadarzi dan dapat merubah perilaku yang belum baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian, edisi revisi II*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Azwar, S. 2002. *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Depkes, 2007, Pedoman Strategi KIE Keluarga sadar Gizi, Departemen Kesehatan
- Gabriel, A, 2008, Perilaku Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi) serta Hidup Bersih dan Sehat Ibu Kaitannya dengan Status Gizi dan Kesehatan Balita di Desa Cikarawang Bogor, Skripsi, IPB
- Karolina, E, 2012, Hubungan Perilaku Sadar Gizi Keluarga dengan Status Gizi Balita di gayo Lues. portalgaruda.org/download_article.php?article=131331&val=410
- Merdawati, L, 2008, Upaya Perbaikan Gizi Balita Melalui Gerakan Kadarzi di Nanggalo, Padang. *Warta Pengabdian Andalas Volume XIV, Nomor 21 Desember 2008*
- Masruri, M, 2013, *Hubungan Perilaku Sadar Gizi Keluarga dengan Status Gizi pada Balita* : tidak dipublikasikan
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. *Ilmu Kesehatan Masyarakat*. Jakarta : Rineka Cipta
- Notoatmodjo, S. 2003, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta. Rineka Cipta
- Sudiman, H, 2012, Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Remaja tentang Kadarzi, <http://ejournal.litbang.depkes.go.id/index.php/MPK/article/view/2632/615>

Siswono, 2010,
<http://gizi.depkes.go.id/kasus-gizi-buruk-empat-provinsi-tak-pernah-absen>

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung. Alfabeta

<http://gizi.depkes.go.id/wp-content/uploads/2012/05/strategi-KIE-Kadarzi.pdf>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/28016/4/Chapter%20II.pdf>

PEREMPUAN RENTAN DENGAN GANGGUAN JIWA DI DESA KENITEN KABUPATEN PONOROGO

Oleh :
EKY OKVIANA ARMYATI
SRI SUSANTI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

ABSTRAK

Menurut Kompas Jakarta 2 mei 2010 Perempuan lebih rentan mengalami gangguan jiwa. Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2007 menyebutkan prevalensi penduduk usia lebih dari 15 tahun yang mengalami gangguan mental emosional ringan pada perempuan 16 % dan pada laki-laki 9% hal ini menunjukkan bahwa perempuan lebih rentan dengan gangguan jiwa. Menurut Tun Kurniasih Bastaman Ketua perhimpunan Dokter spesialis kedokteran jiwa Indonesia menyatakan bahwa perempuan akan lebih mudah atau lebih rentan bunuh diri hal ini dikarenakan perempuan mudah sekali mengalami gangguan jiwa. Menurut dr RH Budhi Mulyanto, SpKJ dalam bukunya Bina Jiwa bahwa perempuan di mata Budhi mengenai kesehatan mental menyatakan bahwa perempuan harus menghadapi lebih banyak peristiwa fisik dan psikologis daripada pria misalnya menarche sehingga mendapatkan haid pertama kali, hamil, menyusui dan menopause selain itu budaya yang berkembang di masyarakat lebih banyak dan menghadapi kehidupan. Wanita dibandingkan pria stresornya lebih berat pada perempuan. Ponorogo merupakan sebuah kabupaten kecil yang berbatasan dengan kabupaten trenggalek sebelah timur, dan berbatasan dengan kabupaten Madiun, Magetan, Naganjuk untuk sebelah utaranya, dan berbatasan dengan Kabupaten Pacitan sebelah selatan dan berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri untuk bagian baratnya. Ponorogo walaupun kecil kotanya namun gangguan yang berhubungan dengan masalah perempuan juga cenderung banyak. Mulai dari menstruasi sampai menopause perempuan di kabupaten Ponorogo juga mengalami masalah yang sama dengan daerah-daerah yang lain. Dengan ini peneliti tertarik untuk mengetahui perempuan rentan dengan gangguan jiwa. Apalagi di Kabupaten Ponorogo ada daerah yang dianggap sebagai kampung atau daerah yang mengalami gangguan psikologis yaitu skizofrenia dan retardasi mental. Sehingga mendapat sebutan bahwa Ponorogo adalah kota dengan "Kampung Gila".

Kata kunci: *perempuan, gangguan jiwa.*

PENDAHULUAN

Makhluk Tuhan yang bernama perempuan memang mempunyai keunikan tersendiri, sejak membahas asal kejadiannya, kadar rasionalitasnya kodratnya sampai perannya dalam rumah tangga. Sementara itu cukup banyak pandangan sinisnya. Perempuan merupakan makhluk lemah lembut dan penuh kasih sayang karena perasaannya yang halus. Secara umum sifat perempuan adalah keindahan, kelembutan, serta rendah hati dan memelihara. Demikianlah gambaran perempuan yang sering terdengar di Negara kita perbedaan

secara anatomis dan fisiologis menyebabkan pula perbedaan pada tingkah lakunya (Muhibbin, Syafiq Hasyim 2005).

Menurut Kompas Jakarta 2 Mei 2010 Perempuan lebih rentan mengalami gangguan jiwa. Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2007 menyebutkan prevalensi penduduk usia lebih dari 15 tahun yang mengalami gangguan mental emosional ringan pada perempuan 16% dan pada laki-laki 9% hal ini menunjukkan bahwa perempuan lebih rentan dengan gangguan jiwa. Menurut Tun Kurniasih Bastaman Ketua perhimpunan Dokter spesialis kedokteran jiwa Indonesia

menyatakan bahwa perempuan akan lebih mudah atau lebih rentan bunuh diri hal ini dikarenakan perempuan mudah sekali mengalami gangguan jiwa.

Menurut dr. RH Budhi Mulyanto, SpKJ dalam bukunya Bina Jiwa bahwa perempuan harus menghadapi lebih banyak peristiwa fisik dan psikologis daripada pria misalnya menarche sehingga mendapatkan haid pertama kali, hamil, menyusui dan menopause selain itu budaya yang berkembang di masyarakat lebih banyak dan menghadapi kehidupan. Wanita disbanding pria stresornya lebih berat pada perempuan. Factor yang membuat perempuan mengalami gangguan jiwa semakin tinggi maka perhatian sejak dini masalah psikologis perempuan. Ponorogo walaupun kecil kotanya namun gangguan yang berhubungan dengan masalah yang berhubungan dengan perempuan juga cenderung banyak. Mulai dari menstruasi sampai menopause perempuan di kabupaten ponorogo juga mengalami masalah yang sama dengan daerah-daerah lain. Dengan ini peneliti tertarik untuk mengetahui perempuan rentan dengan gangguan jiwa. Apalagi di kabupaten Ponorogo ada daerah yang dianggap sebagai kampung atau daerah yang mengalami gangguan psikologis yaitu skizofrenia dan retardasi mental. Sehingga mendapat sebutan bahwa Ponorogo adalah kota dengan "Kampung Gila".

DESAIN PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian deskriptif yaitu

memaparkan peristiwa-peristiwa yang *Urgen* yang terjadi pada masa kini (Nursalam, 2001:55). Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan jenis random sampling yaitu pemilihan sampling yaitu pemilihan sampel ini setiap element dipilih secara acak (Nursalam, 2013:99).

Pada penelitian ini akan meneliti analisa perempuan rentan dengan gangguan jiwa di Perum Pepabri Keniten Kabupaten Ponorogo. Teknik pengambilan sampel dan besar sampel. Teknik pengambilan sampel menggunakan kriteria *Purposing Sampling*. pengambilan data berdasarkan pada kriteria yang sudah ditentukan, dengan besar sampel responden yang diambil di Perumahan Asabri Keniten Ponorogo. Kriteria yang akan diambil adalah:

1. Remaja putri yang mengalami disminore
2. Ibu hamil primigravida
3. Ibu masa nifas
4. ibu mengalami menopause

2. Kerangka Kerja

Kerangka kerja merupakan pertahapan dalam suatu penelitian pada kerangka kerja disajikan alur penelitian terutama variable yang akan digunakan dalam penelitian (Nursalam, 2003:212)

1. Kerangka Kerja

Populasi



Seluruh Perempuan yang ada di perumahan asabri keniten terutama remaja sampai lansia

Sampel



Sebagian dari perempuan yang ada di perumahan asabri keniten berjumlah 22 orang

Sampling



Just mental (berdasarkan kriteria)

Desain Penelitian



Skala kecemasan Hars

Pengolahan Data



SPSS

Penarikan Kesimpulan

HASIL PENELITIAN

1. Data Umum pada penelitian menyajikan karakteristik berdasarkan usia

Tabel 1 Distribusi Frekuensi responden berdasarkan usia Remaja

No	Usia	frekuensi	Prosentase (%)
1	(13-15thn)	2	29%
2	(16-18thn)	4	57%
3	(19-21thn)	1	14%
Total		7	100%

Tabel 2 Distribusi Frekuensi responden berdasarkan usia Ibu hamil

No	Usia	Frekuensi	Prosentase (%)
1	(27-30 thn)	2	40%
2	(31-34 thn)	3	60%
Total		5	100%

Tabel 3 Distribusi Frekuensi responden berdasarkan usia ibu nifas

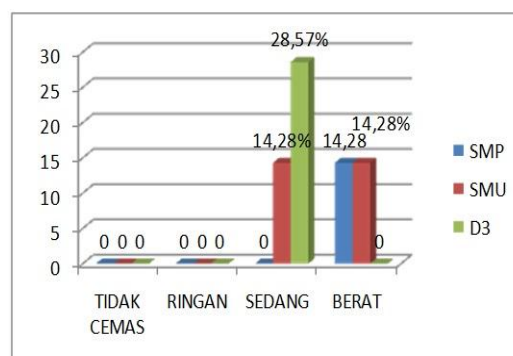
No	Usia	Frekuensi	Prosentase(%)
1	(21-26 thn)	3	60%
	(27-32 thn)	1	20%
	(33-38 thn)	0	0%
	(39-44 thn)	1	20%
Total		5	100%

Tabel 4 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Usia ibu Menopause

No	Usia	Frekuensi	Prosentase (%)
1	(50-53thn)	0	0%
	(54-57thn)	2	40%
	(58-61 thn)	2	40%
	(62-65thn)	1	20%
Total		5	100%

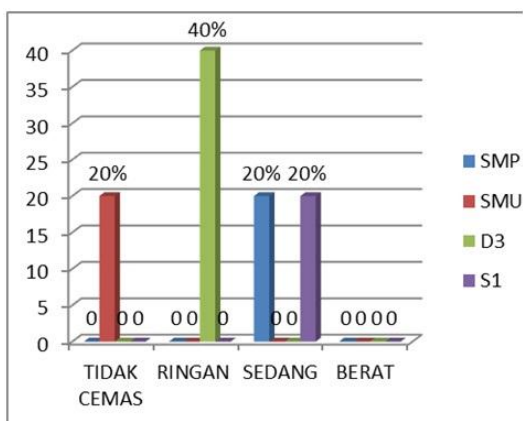
Tabel tabulasi silang (cros tab) antara kecemasan dan tingkat pendidikan.

1. Tabulasi silang antara kecemasan dan tingkat pendidikan pada remaja.



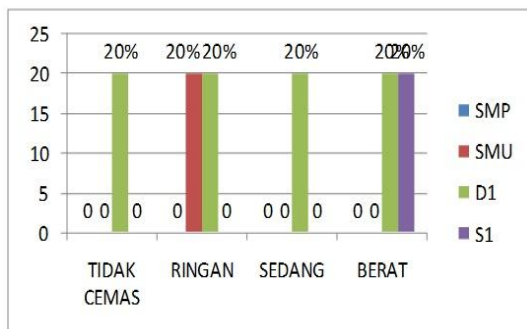
Dari hasil tabulasi silang antara kecemasan dan Tingkat pendidikan pada remaja dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan D3 cenderung mengalami kecemasan sedang. Dari hasil tabulasi silang antara kecemasan dan tingkat pendidikan ada juga remaja yang tingkat pendidikan SMU mengalami kecemasan ringan dan bahkan sampai tidak cemas.

2. Tabulasi silang antara kecemasan dan tingkat pendidikan pada ibu hamil



Dari hasil tabulasi silang antara kecemasan dan tingkat pendidikan pada ibu hamil dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan D3 cenderung mengalami kecemasan ringan. Dari hasil tabulasi silang antara kecemasan dan tingkat pendidikan kebanyakan mereka mengalami ketidakcemasan sampai dengan kecemasan sedang.

3. Tabulasi silang antara kecemasan dan tingkat pendidikan pada ibu nifas



Dari hasil tabulasi silang antara kecemasan dan tingkat pendidikan pada ibu nifas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan D1 dan S1 cenderung mengalami kecemasan berat sedangkan D1 cenderung tidak mengalami kecemasan. Sedangkan yang mengalami kecemasan ringan adalah dari tingkat pendidikan SMU dan D1.

4. Tabulasi silang antara kecemasan dan tingkat pendidikan pada ibu menopause



Dari hasil tabulasi silang antara kecemasan dan tingkat pendidikan pada ibu menopause dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan SMU tidak mengalami kecemasan dan SD mengalami kecemasan sedang sedangkan SMP cenderung mengalami kecemasan berat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Budi Mulyanto. S.Pkj. dalam buku bina jiwa RSJ Surakarta 2014
- <http://www.jakarta.kompas> 2 mei 2010. Perempuan rentan gangguan jiwa
- Dr Albert Maramis SpKj.Illmu Kedokteran jiwa.
- Prof Dr. Gunarsa Singgih D .Ilmu kedokteran jiwa. 2009
- Nursalam dalam Pariani.Konsep penerapan metodologi penelitian ilmu keperawatan.
- <http://www.margo.nung> 2010. Penyebab gangguan jiwa.
- <http://www.muhibbin.syafiq.hasyim> 2005.Perempuan dan gangguan jiwa.
- <http://www.digilib-unimus> 2014. Kecemasan ketika terjadi diseminore pada remaja.
- <http://www.ari.fatmawati-psikologi-ums-etd-db>. 2013. Kecemasan wanita ketika menghadapi masa hamil.
- <http://www.ambarwati.wulandari>.2012. UNSU (Univ Sumatra Utara).Kecemasan perempuan menghadapi persalinan Fsakultas psikologi

Wirawan.Sartono. 20008. Psikologi Sosial.
Univ. Indonesia.

[http/klinis.Setyo Purwanto.World press.com](http://klinis.SetyoPurwanto.Worldpress.com).
2014. perempuan dan kecemasan
menghadapi masa menopause.

THE DIFFERENCES CARDIOVASCULAR DISEASE RISK FACTORS IN RURAL AND URBAN POPULATION IN DISTRICT PONOROGO

Oleh:

CHOLIK HARUN ROSJIDI¹⁾

LAILY ISRO'IN²⁾

NURUL SRI WAHYUNI³⁾

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

Email: cholikharunrosjidi@gmail.com¹⁾

ABSTRAK

Penyakit kardiovaskular saat ini merupakan ancaman global di dunia. Penyakit kardiovaskular merupakan penyebab utama kematian di Negara sedang berkembang termasuk negara Indonesia. Munculnya ancaman penyakit kardiovaskular ternyata tidak diikuti peningkatan kewaspadaan sehingga penanganan penyakit Kardiovaskular saat ini bukan menjadi prioritas utama oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran perbedaan pola penyakit kardiovaskular antara penduduk yang tinggal di pedesaan dengan yang tinggal di perkotaan kabupaten Ponorogo. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ponorogo. Dua lokasi dipilih mewakili pedesaan dan perkotaan secara *cluster sampling*. Studi *crosssectional* untuk mengukur prevalensi faktor resiko penyakit kardiovaskular pada kedua *cluster* terpilih. Besar sampel pada penelitian ini 350 responden. Instrumen pada penelitian diadopsi dari WHO STEPS. Terdapat perbedaan distribusi faktor resiko penyakit kardiovaskular antara penduduk yang tinggal di pedesaan dengan perkotaan di Kabupaten Ponorogo. Prevalensi Perokok Laki-laki lebih tinggi pedesaan dibanding penduduk perkotaan ($p=0,04$), demikian juga laki-laki yang tinggal di desa cenderung lebih besar konsumsi alkohol dibanding penduduk kota ($p=0,012$). Prevalensi konsumsi buah tidak sehat cenderung lebih tinggi pada kedua jenis kelamin penduduk yang tinggal di desa ($p=0,025$ dan $p=0,012$). Hipertensi cenderung lebih tinggi perempuan di desa dibandingkan perempuan yang tinggal di kota ($p=0,024$). Tidak terdapat perbedaan bermakna antara konsumsi sayur, aktifitas fisik, Diabetes millitus, hiperkolesterol, dan obesitas antara penduduk tinggal di pedesaan dengan tinggal di perkotaan. Simpulan penelitian ini terdapat perbedaan pola distribusi faktor resiko penyakit kardiovaskular penduduk tinggal di pedesaan dengan di perkotaan. Bukti ilmiah ini seharusnya dapat digunakan sebagai bahan advokasi untuk penyusunan kebijakan publik pencegahan dan penanggulangan penyakit kardiovaskular di Ponorogo.

Kata Kunci: *penyakit kardiovaskular, faktor resiko, pedesaan, perkotaan*

PENDAHULUAN

Transisi Epidemiologi

Transisi Epidemiologi, atau beban ganda penyakit. Transisi epidemiologi bermula dari suatu perubahan yang kompleks dalam pola kesehatan dan pola penyakit utama penyebab kematian dimana terjadi penurunan prevalensi penyakit infeksi (penyakit menular), sedangkan penyakit non infeksi (penyakit tidak menular) justru semakin meningkat. Hal ini terjadi seiring dengan berubahnya gaya hidup, sosial

ekonomi dan meningkatnya umur harapan hidup yang berarti meningkatnya pola risiko timbulnya penyakit degeneratif seperti penyakit jantung koroner, diabetes melitus, hipertensi, dan lain sebagainya. Negara-negara sedang berkembang pada umumnya mempunyai pola khusus yang berbeda dengan teori transisi epidemiologi oleh Omran.

Teori transisi epidemiologi sendiri pertama kali dikeluarkan oleh seorang pakar Demografi **Abdoel Omran** pada tahun 1971. Pada saat itu ia mengamati perkembangan

kesehatan di negara industri sejak abad 18. Dia kemudian menuliskan sebuah teori bahwa ada 3 fase transisi epidemiologis yaitu 1) *The age of pestilence and famine*, yang ditandai dengan tingginya mortalitas dan berfluktuasi serta angka harapan hidup kurang dari 30

tahun, 2) *The age of receding pandemics*, era di mana angka harapan hidup mulai meningkat antara 30-50 dan 3) *The age of degenerative and man-made disease*, fase dimana penyakit infeksi mulai turun namun penyakit degeneratif mulai menurun.



Namun pada kenyataannya teori ini tidak sesuai di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Pada negara sedang berkembang terdapat pola tambahan yang disebut tahap *Triple Burden/ The age of triple health burden*, yang ditandai dengan 3 hal yaitu: a) masalah kesehatan klasik yang belum terselesaikan (infeksi penyakit menular), b) munculnya problem kesehatan baru dan c) pelayanan kesehatan yang tertinggal (Lagging), Namun ketika itu dikaitkan dengan jenis penyakit beberapa pakar mengganti beban ketiga itu dengan “New Emerging Infectious Disease” Penyakit menular baru/penyakit lama muncul kembali.

SITUASI INDONESIA DAN PONOROGO

Penyakit kronis saat ini menyumbang 60% mortalitas dan 47% beban penyakit di dunia dan akan terus meningkat dengan prediksi pada tahun 2020 kematian akibat

penyakit kronis sebesar 73% dan merupakan 60% beban penyakit di dunia (WHO, 2002).

Negara miskin dan sedang berkembang menunjukkan perkembangan peningkatan angka kejadian penyakit kardiovaskular. Pada negara berpenghasilan rendah angka kejadian penyakit kardiovaskular mencapai 78% dan merupakan ranking ke 3 kematian di dunia pada tahun 1999, dan diperkirakan pada tahun 2010 merupakan penyebab utama kematian di Negara sedang berkembang. (Gwatkin, 2000).

Isu utama adalah peningkatan kejadian penyakit kardiovaskular di negara-negara miskin yang diakibatkan efek globalisasi, urbanisasi, dan meningkatnya gaya hidup kurang gerak. Hal ini diperparah oleh rendahnya status sosial ekonomi, dimana masyarakat dengan status sosial ekonomi yang rendah lebih rentan terserang penyakit kardiovaskular. Isu kemiskinan, ketidakadilan

ekonomi dan social menjadi masalah utama yang menjadi tantangan terhadap perkembangan penyakit kardiovaskular. Risiko penyakit kardiovaskular yang tinggi telah dilaporkan terjadi pada negara-negara miskin dan yang sedang mengalami proses transisi seperti Hongkong, Puerto Rico, Pakistan dan beberapa negara di Sub-Sahara Afrika (Song, 2006; Minh, 2006; Tang, 2003). Angka kemiskinan di Indonesia pada tahun 2012 bulan September menurut data BPS (BPS, 2013) sebesar 28,59 juta atau sebesar 11,66%. Angka yang sangat besar jika dihubungkan dengan tingginya resiko penyakit kardiovaskular pada kemiskinan. Beberapa faktor resiko sosial ekonomi yang berhubungan dengan penyakit kardiovaskular telah diidentifikasi adalah tingkat pendidikan rendah, pekerjaan, pendapatan, ras dan gender. Fakta menunjukkan terdapat perbedaan resiko penyakit kardiovaskular antara laki-laki dan perempuan.

WHO (2008) menunjukkan data kematian dini terjadi pada 22% laki-laki dan 35% perempuan di negara berkembang. Data terbaru hasil penelitian di Ponorogo menunjukkan perempuan lebih rentan terserang penyakit kardiovaskular. Rata-rata terdapat 7 faktor resiko pada pasien laki-laki sementara pada perempuan terdapat 4 faktor resiko, hasil ini menunjukkan perempuan lebih rentan terserang penyakit kardiovaskular (Rosjidi dan Laily, 2013).

Hasil studi sebelumnya telah dilaksanakan oleh peneliti pada tahun 2012 dengan tujuan memperoleh gambaran pola distribusi resiko penyakit kardiovaskular pada keluarga TKI di Ponorogo, hasil utama penelitian ini adalah terdapat 37,1%

responden merokok, 8,2% responden yang minum alkohol, 69,1% konsumsi buah tidak sehat, 99% konsumsi sayur kategori sehat, 30,9% responden dengan aktivitas fisik kategori ringan, hipertensi sebanyak 68%. Berat badan lebih menunjukkan angka 28,9%, dan resiko DM 38,1%. Tahun 2013 telah dilaksanakan penelitian untuk menganalisis inaktivitas fisik terhadap resiko obesitas, hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara inaktivitas fisik dengan obesitas, responden dengan aktivitas fisik kategori ringan beresiko 9 kali mengalami obesitas dibanding responden dengan aktivitas fisik sedang atau berat (OR=9, 95% 2,3-35,1).

Tahun 2013 dilakukan penelitian tentang kerentanan perempuan terhadap serangan penyakit kardiovaskular, hasil utama penelitian ini adalah Hasil penelitian menggambarkan rata-rata jumlah factor resiko penyakit kardiovaskular pada responden perempuan adalah 5,0, dengan SD= 1,9. Jumlah faktor resiko maksimal 9 dan minimal 0. Rata-rata jumlah factor resiko penyakit kardiovaskular pada responden laki-laki 6,2, dengan SD=1,8, nilai maks=10 dan min=3. Hasil uji t-test menunjukkan nilai $p=0,002$. Hal ini membuktikan ada perbedaan signifikan jumlah factor resiko penyakit kardiovaskular antara laki-laki dan perempuan. Perempuan lebih rentan terserang penyakit kardiovaskular dibanding laki-laki.

Hasil-hasil penelitian ini menggambarkan penyakit kardiovaskular telah menjadi ancaman serius di Kabupaten Ponorogo, kota dengan kategori kota kecil. Penyakit kardiovaskular merupakan penyakit

yang memerlukan pengobatan jangka panjang sehingga akan menimbulkan dampak beban ekonomi yang sangat tinggi. Pembiayaan pengobatan terhadap penyakit kardiovaskular sangat mahal dan tidak semua lapisan masyarakat dapat menjangkau. Padahal pencegahan penyakit kardiovaskular sebenarnya mudah dan murah, hanya sering dilupakan atau tidak dihiraukan oleh masyarakat, seperti misalnya pengaturan pola makan yang seimbang dan ditambah dengan aktivitas fisik atau olahraga teratur harus dioptimalkan. Upaya pencegahan penyakit kardiovaskular harus diupayakan semaksimal mungkin oleh masyarakat disamping pemerintah sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab. Pemerintah memiliki peranan sangat penting dalam perumusan kebijakan yang berorientasi pada pengendalian penyakit kardiovaskular.

Pemerintah harus mampu meningkatkan kesehatan masyarakat, merespons kebutuhan penderita penyakit kardiovaskular, serta memberikan perlindungan pembiayaan bagi masyarakat miskin. Namun sayang sampai saat ini perhatian pemerintah terhadap ancaman penyakit kardiovaskular belum maksimal. Isu inilah yang harus dicari jawabannya terutama di Indonesia, apakah ada perbedaan faktor resiko penyakit kardiovaskular antara penduduk kaya-miskin, desa kota, dan laki-lak-perempuan. Hasil penelitian ini penting dianalisis untuk mendapatkan data gambaran pola serangan penyakit kardiovaskular sehingga program penanggulangan penyakit dapat dibuat secara tepat sasaran. Program pencegahan memainkan peran kunci dalam

menurunkan penyakit kronis yang sebenarnya dapat dicegah.

BONUS DEMOGRAFI

Perkembangan Transisi demografi akhir-akhir ini memberikan gambaran sebuah peluang yang disebut Bonus demografi. Bonus demografi ditandai dengan adanya struktur komposisi penduduk dimana usia produksi menempati lebih dari 60%, dan usia non produktif 30%. *Bonus Demografi* yang diprediksi terjadi pada tahun 2020-2030.

Bonus demografi merupakan suatu keadaan dimana jumlah produktif usia kerja (15-64 tahun) mencapai sekitar 60 persen atau mencapai 60 -180 juta jiwa sedangkan penduduk usia tidak produktif (14 tahun kebawah dan 65 tahun keatas) hanya 30 persen. Berdasarkan sensus BPS tahun 2010 diperkirakan bahwa 100 orang produktif hanya akan menanggung sekitar 40-50 orang saja. Struktur penduduk seperti ini sangat menguntungkan dari sisi pembangunan dan menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk peningkatan kesejahteraan keluarga karena biaya yang dibutuhkan untuk membiayai penduduk tidak produktif dapat dialihkan sebagai investasi. Bonus demografi ini menjadi tantangan besar bagaimana bangsa Indonesia menyiapkan generasi muda yang sehat dan mampu hidup secara produktif. Namun data-data hasil penelitian tentang penyakit kardiovaskular menggambarkan terdapat ancaman serius pada usia produktif.

FAKTOR RESIKO MEROKOK

Secara umum berdasarkan kluster penelitian, prevalensi konsumsi rokok di daerah pedesaan sebesar 30,9%, sedangkan

konsumsi rokok di kluster kota sebesar 26,3%. Konsumsi rokok dipandang sebagai kebiasaan laki-laki sejak lama. Konsumsi rokok umum dilakukan oleh responden laki-laki. Hasil Analisis data diatas menunjukkan terdapat hubungan konsumsi rokok dengan jenis kelamin. Prevalensi merokok pada laki-laki di desa sebesar 78%, sedangkan di kota 62,9%.

Hasil ini menunjukkan laki-laki yang tinggal di desa cenderung mempunyai kebiasaan merokok 2 kali lebih besar di bandingkan yang tinggal diperkotaan (OR=2,1, 95%CI=1-4,6). Meskipun perempuan yang tinggal desa mempunyai kemungkinan 3 kali mengkonsumsi rokok, namun hubungan ini tidak bermakna ($p=0,75$, OR=3,8,95%CI= 0,8-18,4)). Berdasarkan usia, usia lima puluh tahun ke bawah menunjukkan gambaran konsumsi rokok lebih besar dibanding usia di atas 50 tahun. Proporsi laki-laki usia kurang dari 50 tahun sebesar 77,8%, sedangkan usia di atas 50 tahun sebesar 62,1%. **Angka yang sangat tinggi.** Hampir 80% di dunia 1 milyar perokok di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. Penggunaan produk tembakau secara global meningkat, tetapi di negara-negara yang berpendapatan tinggi dan menengah justru terjadi penurunan. Tembakau merupakan peringkat utama penyebab kematian yang sebenarnya dapat dicegah.

Merokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia masih dianggap sebagai perilaku yang wajar, bagian dari kehidupan sosial dan gaya hidup, tanpa memahami risiko dan bahaya kesehatan terhadap dirinya dan orang serta masyarakat di sekitarnya. Para perokok tidak menyadari bahwa mereka

terjerat dalam kondisi ketergantungan yang sangat sulit dilepaskan. Tingkat penyebaran yang tinggi terhadap perokok pemula terutama generasi muda, bahkan di Indonesia di berbagai wilayah tertentu, merokok sudah dimulai pada usia balita. Sangat mencengangkan, menurut hasil survey GATS 2011, prevalensi perokok di Indonesia rankingnya naik menjadi nomor 2 terbesar di dunia. Hasil penelitian menunjukkan secara total angka konsumsi rokok sebesar 28,6%. Hasil ini lebih rendah dari angka merokok secara nasional sebesar 29,0% pada tahun 2007 dan 31,1% pada tahun 2010 (Kemenkes, 2010).

Rokok sangat erat hubungannya dengan serangan penyakit kardiovaskular, rokok membunuh 6 juta orang di Negara yang sedang berkembang. Rokok menyebabkan kadar COHb meningkat disebabkan proses pembakaran tidak sempurna bahan organik dalam rokok sehingga mengurangi konsentrasi oksigen darah, rokok dapat meningkatkan konsentrasi fibrinogen hal ini akan mengakibatkan terjadinya penebalan dinding pembuluh darah. Semakin dini merokok semakin cepat terserang penyakit kardiovaskular. Hasil penelitian menunjukkan rokok berhubungan dengan status ekonomi rendah.

WHO (2003) melaporkan penyakit-penyakit akibat rokok mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan kemiskinan, 6 juta kematian diperkirakan akibat kebiasaan merokok di negara yang sedang berkembang dan 50% terdapat di Asia. Kesadaran masyarakat tentang faktor risiko dan bagaimana strategi pencegahan menjadi komponen promosi yang sangat penting

mengingat faktor risiko penyakit kardiovaskular lebih banyak pada perubahan gaya hidup atau perilaku. Tingkat risiko masyarakat terhadap serangan penyakit kardiovaskular yang diketahui secara dini dapat dijadikan dasar untuk membuat strategi promosi yang efektif dan efisien. Perokok membebankan biaya keuangan dan risiko fisik kepada orang lain, seharusnya perokoklah yang menanggung semua "biaya" atau kerugian akibat merokok. Tetapi pada kenyataannya perokok membebankan secara fisik dan ekonomi kepada anggota keluarga dan orang lain juga. Beban ini meliputi risiko orang lain yang terkena asap rokok di lingkungan sekitarnya dan biaya yang dibebankan pada masyarakat untuk pelayanan kesehatan. Agar permasalahan dan kondisi tersebut di atas dapat dikendalikan maka perlu dilakukan upaya pengamanan terhadap bahaya merokok melalui penetapan Kawasan Tanpa Rokok dan juga membatasi ruang gerak para perokok.

Tingkat ekonomi keluarga terutama keluarga miskin, keterikatan pengeluaran rumah tangga untuk belanja rokok akan mempengaruhi prioritas belanja rumah tangga terhadap kebutuhan pokok lainnya. Menghentikan konsumsi rokok merupakan tindakan rasional untuk menurunkan resiko serangan penyakit kardiovaskular. Rokok menjadi ancaman bagi bonus demografi Indonesia. Perokok usia 15-19 tahun terus meningkat. Risiko penyakit dan kematian akibat rokok saat mereka menginjak usia produktif, 25-35 tahun, diprediksi tinggi. Hal ini mengganggu produktivitas penduduk. Perawatan

kesehatan mereka juga membebani keuangan negara.

Riset Kesehatan Dasar 2013 menyebutkan, perokok usia 15-19 tahun mencapai 34,2 persen pada 2007. Pada 2013, jumlahnya meningkat menjadi 36,3 persen. Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 2011 menyatakan, 300.000 kematian di negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada orang berusia 30 tahun ke atas setiap tahun terjadi akibat rokok.

Kapan dampak rokok terlihat?

Remaja merokok dengan alasan klasik yang sama seperti tekanan teman, keingintahuan, ingin tampil gaya, agar terlihat dewasa, dan mereka hanya berfikir untuk hari ini saja. Dan akhirnya motif-motif di atas hilang, karena merekalah yang menyalakan rokok sendiri dan merokok tidak lagi menjadi peristiwa sosial. Dan **KECANDUAN**. Mereka mengatakan 5 tahun lagi akan berhenti. TAPI kenyataannya tetap merokok sampai 10 tahun, 15 tahun. dan itu waktu yang cukup bagi KANKER untuk terbentuk. AKANKAH BISA MENIKMATI BONUS DEMOGRAFI...!!! Perang melawan rokok dapat perbaikan kualitas kesehatan remaja dan generasi muda. Generasi muda yang sehat akan mampu hidup produktif dan siap menyongsong Bonus Demografi.

KONSUMSI ALKOHOL

Konsumsi alkohol nampaknya bukan menjadi perilaku penduduk ponorogo, hal ini dibuktikan rendahnya prevalensi konsumsi alkohol. Secara umum hanya 3,4% responden yang mengkonsumsi alkohol. Namun demikian Prevalensi konsumsi alkohol responden dari desa cenderung lebih tinggi

dibandingkan responden di kota Ponorogo ($p=0,012$).

Responden dari desa yang mengkonsumsi alkohol sebesar 5,7%, sedangkan responden dari kota sebesar 1,1%. Proporsi konsumsi alkohol lebih besar pada usia di atas 50 tahun 4,9% berbanding 1,8%. Konsumsi alkohol umumnya dilakukan oleh laki-laki yang tinggal di desa dibandingkan perempuan ($p=0,000$), hal ini berbeda pada responden yang tinggal di kota, dimana tidak terdapat perbedaan yang signifikan konsumsi alkohol responden laki-laki dengan perempuan ($p=0,08$). Perbedaan konsumsi alkohol antara desa dan kota berdasarkan jenis kelamin menunjukkan konsumsi alkohol 6 kali lebih tinggi pada laki-laki yang tinggal di desa dibandingkan di kota ($OR=6,12$, 95% $CI=1,3-29,6$).

DIET BUAH

Secara umum konsumsi buah kategori sehat dilakukan oleh 62,3% responden. Prevalensi konsumsi buah dan sayur responden dari kota lebih sehat dibandingkan dari desa. Prevalensi konsumsi buah kategori sehat responden dari kota sebesar 70,9%, sedangkan responden dari desa sebesar 53,7%. Tidak terdapat perbedaan pola diet buah antara responden laki-laki dengan perempuan baik di desa maupun di kota.

Prevalensi konsumsi buah tidak sehat mencapai 50,8% pada laki-laki dan 44% pada perempuan di daerah pedesaan, dan sebesar 31,4% pada laki-laki dan 27,6% pada perempuan yang tinggal di perkotaan. Jika dibandingkan dengan desa, baik laki-laki maupun perempuan yang tinggal di kota mempunyai kecenderungan mengkonsumsi buah lebih sehat. Laki-laki Kota cenderung 2,3

kali mengkonsumsi buah kategori sehat dibandingkan dengan laki-laki desa ($OR=2,3$, 95% $CI=1,04-4,94$), sedangkan perempuan kota cenderung 2 kali lebih banyak mengkonsumsi buah dibandingkan perempuan yang tinggal di desa ($OR=2,06$, 95% $CI=1,13-3,76$). Berdasarkan usia di atas 50 tahun lebih banyak mengkonsumsi buah kategori tidak sehat sebesar 45,6% dibanding 29,2% pada usia kurang dari 50 tahun. Pola diet sayur terdistribusi dengan pola yang sama berdasarkan jenis kelamin. Pola diet sayur yang tidak sehat mencapai 6,9% di daerah pedesaan, dengan laki-laki mencapai 8,5% sedangkan pada perempuan mencapai 6%. Meskipun terdapat perbedaan namun tidak bermakna ($p=0,546$).

Responden yang tinggal di daerah perkotaan mempunyai pola diet tidak sehat lebih tinggi dibanding pedesaan. Prevalensi diet sayur tidak sehat di daerah perkotaan mencapai 8,0%, dengan laki-laki mencapai 7,0%, sedangkan perempuan mencapai 6,7%. Perbedaan pola diet sayur antara pedesaan dan perkotaan di kabupaten Ponorogo baik pada laki-laki maupun perempuan menunjukkan tidak terdapat perbedaan, meskipun responden di perkotaan lebih banyak melakukan pola diet yang tidak sehat. Meskipun konsumsi buah sangat penting untuk asupan gizi, namun belum menjadi kebiasaan pola diet responden dari desa. Serat yang terkandung dalam buah dan sayur larut dan mengikat asam empedu yang didalamnya terlarut lemak. Serat akan keluar bersama tinja, dengan demikian makin banyak konsumsi buah dan sayur semakin banyak pula lemak dan kolesterol yang dikeluarkan, dan pada akhirnya, mampu

mengurangi timbunan lemak di tubuh. Selain itu kandungan serat pada buah dan sayur sangat bermanfaat untuk mengurangi konsumsi lemak dan gula karena perasaan kenyang.

Drapeau *et al.* (2004) menyatakan bahwa peningkatan konsumsi sayuran dan buah dapat menurunkan berat badan dan lemak seseorang. Beberapa studi telah membuktikan beberapa zat makanan berperan terhadap peningkatan risiko penyakit jantung dan stroke.

WHO (2002) merekomendasikan program diet dan aktifitas fisik untuk masyarakat dan individu dalam mengurangi penyakit *cardiovascular*. Program diet seperti: 1). Mencapai keseimbangan energi dan berat badan sehat. 2). Batasi intake lemak dan alihkan konsumsi lemak jenuh ke lemak tidak jenuh. 3). Tingkatkan konsumsi buah-buahan dan sayuran, serta kacang-kacangan 4). Batasi penggunaan gula bebas. 5). Batasi garam dari semua sumber dan pastikan garam adalah beryodium. Apabila kita mengkonsumsi kalori lebih banyak daripada yang digunakan dalam aktifitas sehari-hari, kelebihan kalori akan disimpan dalam bentuk timbunan lemak, terutama yang bahaya jika disimpan di dinding pembuluh darah karena akan menyebabkan penebalan dinding pembuluh darah (aterosklerosis), hipertensi, diabetes millitus, berat badan berlebih yang semuanya merupakan faktor risiko penyakit jantung dan stroke. Temuan penelitian ini dapat memberikan gambaran faktor resiko penyakit kardiovaskular pola konsumsi buah masih tinggi, dengan kelompok penduduk di pedesaan mempunyai resiko lebih besar di bandingkan perkotaan. Penduduk di pedesaan

pola konsumsi buah yang memenuhi sarat kesehatan masih rendah jika dibandingkan daerah kota. Berdasarkan hasil penelitian ini perencanaan promosi kesehatan tentang pola konsumsi buah yang sehat dapat lebih difokuskan pada daerah pedesaan dengan pendekatan partisipasi komunitas.

AKTIVITAS FISIK

Aktivitas fisik yang memenuhi sarat kesehatan belum dipahami dan menjadi perilaku sehat masyarakat di Ponorogo. Hasil penelitian menggambarkan tidak terdapat perbedaan aktivitas fisik baik kelompok responden dari daerah perkotaan dan pedesaan. Sebagian besar pada kedua kelompok menunjukkan tingginya aktivitas kategori ringan. Prevalensi aktivitas fisik yang tidak memenuhi sarat kesehatan di daerah pedesaan sebesar 73,7%, laki-laki cenderung melakukan aktivitas fisik yang sehat (aktivitas kategori sedang dan berat) sebesar 42,4%, sedangkan pada perempuan yang melakukan aktivitas kategori sedang dan berat sebesar 18,1%.

Perbedaan ini secara statistik bermakna ($p=0,001$). Aktivitas Fisik kategori tidak sehat lebih banyak dilakukan oleh penduduk dengan usia di atas 50 tahun ($p=0,026$). Aktivitas fisik penduduk dari daerah perkotaan sedikit lebih besar melakukan aktifitas fisik tidak sehat sebesar 74,3% dibanding daerah pedesaan. Berdasarkan jenis kelamin tidak terdapat perbedaan yang bermakna aktivitas fisik responden dari perkotaan. Demikian juga aktivitas fisik antara penduduk kota dan desa menunjukkan tidak terdapat perbedaan bermakna. Data menggambarkan aktivitas

fisik penduduk ponorogo belum memenuhi standart kesehatan. Aktivitas fisik dan olahraga telah diketahui mempunyai banyak manfaat.

Kaplan (1994) menjelaskan beberapa riset memberikan bukti secara tidak langsung efek perlindungan gerak badan aerobik terhadap PJK dengan memberikan pengaruh pada penurunan berat badan, hipertensi, lipid darah, toleransi glukosa, dan peningkatan cara hidup sehat. Kurangnya aktivitas fisik merupakan salah satu penyebab utama dari meningkatnya angka kejadian obesitas di tengah masyarakat dengan status sosial ekonomi tinggi. Orang-orang yang tidak aktif memerlukan lebih sedikit kalori. Seseorang yang cenderung mengkonsumsi makanan kaya lemak dan tidak mempunyai aktivitas fisik yang seimbang akan mengalami obesitas. Temuan penelitian ini menggambarkan masih tingginya pendudukan Ponorogo kurang memenuhi sarat kesehatan saat melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang sehat dilakukan minimal 3 kali seminggu dengan kategori aktivitas sedang atau berat. Rekomendasi WHO untuk program aktifitas fisik masyarakat dan individu dalam mengurangi penyakit *cardiovascular* adalah paling sedikit 30 menit aktifitas fisik **tingkat sedang** secara teratur setiap hari. Rekomendasi lain oleh *American Heart Assocation* bahwa aktifitas fisik yang meningkatkan kesehatan jantung, paru dan sirkulasi adalah aktifitas **sedang sampai berat** dengan jenis aerobik paling sedikit 30 menit setiap hari. Aktifitas fisik tidak harus berupa olah raga, bisa saja ke sawah bagi petani, ke pasar, menyapu, mencuci dan mengepel. Bergerak mampu membakar

timbunan lemak yang tersimpan ditubuh manusia. Berdasarkan hasil temuan penelitian ini harus dibuat suatu program untuk meningkatkan perilaku olahraga masyarakat di Ponorogo dengan mengikutsertakan semua sektor yang terlibat dalam penanggulangan penyakit kardiovaskular, baik profesional kesehatan, dinas kesehatan, pendidikan, industri dan lain-lain.

HIPERTENSI

Hipertensi menjadi penyakit dengan proporsi tinggi pada kedua lokasi, desa maupun kota di Ponorogo. Prevalensi hipertensi secara keseluruhan di Ponorogo sebesar 46,9%. Prevalensi Hipertensi di daerah pedesaan sebesar 46,9%, dengan laki-laki sebesar 49,2%, dan perempuan lebih tinggi dari laki-laki sebesar 55,2%. Prevalensi Hipertensi penduduk kota lebih rendah sebesar 40,6%. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan kejadian hipertensi antara laki-laki dan perempuan, dengan laki-laki sebesar 41,4% dan perempuan sebesar 40% ($p=0,85$).

Hasil penelitian menunjukkan hanya responden perempuan yang berbeda secara signifikan antara tinggal di daerah pedesaan dengan perkotaan ($p=0,024$). Sementara pada laki-laki tidak terdapat perbedaan bermakna. Perempuan yang tinggal di pedesaan cenderung 1,8 kali menderita hipertensi di banding tinggal di kota ($OR=1,85$, $95\%CI=1,04-3,27$). Prevalensi Hipertensi pada usia produktif (di bawah 50 tahun) sebesar 32,7% sedangkan pada usia di atas 50 tahun sebesar 59,9%. Penduduk berusia 50 tahun ke atas mempunyai kecenderungan 3 kali menderita Hipertensi dibanding usia di bawah

50 tahun (OR=3, 95% CI=1,9-4,87). Hipertensi merupakan factor resiko penyakit kardiovaskular mayor. Hipertensi diukur berdasarkan tekanan darah individu. Tekanan darah merupakan gaya yang diberikan darah pada dinding pembuluh darah. Tekanan ini bervariasi sesuai pembuluh darah terkait dan denyut jantung. Tekanan darah pada arteri besar bervariasi menurut denyutan jantung. Hipertensi dapat mengakibatkan pecahnya maupun menyempitnya pembuluh darah.

Secara Nasional angka kejadian hipertensi menurut Riskesdas 2007 adalah 29,8. Hasil ini sedikit turun dibandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Cholik dan Ririn tahun 2009 dimana angka kejadian hipertensi di Ponorogo sebesar 52,7%. Hipertensi dipengaruhi oleh beberapa factor seperti umur, ras, jenis kelamin, obesitas, diet, konsumsi alkohol, rokok, kopi, dan masih banyak lagi yang sedang diteliti. Temuan penelitian ini menggambarkan penduduk baik desa maupun kota Ponorogo mengalami hipertensi yang tinggi. Penduduk perempuan yang tinggal di desa mempunyai kecenderungan lebih tinggi mengalami hipertensi. HT pada usia muda menunjukkan angka yang tinggi sebesar 32,7%. Dibutuhkan intervensi yang akurat berbasis komunitas untuk mengatasi masalah ini. Kewaspadaan dini masyarakat dan perubahan perilaku sehat harus ditingkatkan terutama pada masyarakat yang tinggal di pedesaan.

HIPERKOLESTEROL

Hasil penelitian menunjukkan secara umum prevalensi hiperkolesterol masih tinggi sebesar 34%. Hasil ini tidak berbeda jauh prevalensi hiperkolesterol penduduk yang

tinggal di pedesaan sebesar 33,7%. Berbeda pada penduduk yang tinggal di daerah perkotaan menunjukkan prevalensi lebih sedikit tinggi sebesar 34,3%. Penduduk perempuan baik yang tinggal di pedesaan maupun perkotaan mempunyai prevalensi lebih tinggi mengalami hiperkolesterol di banding laki-laki. Perempuan yang tinggal di pedesaan 36,2% mengalami kolesterol tinggi, sementara laki-laki 28,8% mengalami hiperkolesterol. Sedangkan perempuan yang tinggal di perkotaan mengalami hiperkolesterol lebih tinggi sebesar 56,7% dibanding laki-laki sebesar 43,3%.

Prevalensi Hiperkolesterol pada usia muda sebesar 26,2%, sementara pada penduduk berusia di atas 50 tahun sebesar 41,2%. Meskipun tidak terdapat perbedaan bermakna angka kejadian hiperkolesterol antara penduduk tinggal di desa dengan di perkotaan kabupaten Ponorogo, namun data menunjukkan penduduk yang tinggal di perkotaan mempunyai angka kejadian lebih tinggi. Fraksi lemak tubuh terdiri atas kolesterol total, LDL, HDL, dan Trigliserida.

Kolesterol sangat berguna bagi tubuh manusia, kolesterol merupakan bahan pembentuk hormon seks, membentuk dinding sel dan masih banyak lagi. Lemak dan kolesterol menjadi berbahaya jika keduanya dalam takaran abnormal. Peningkatan kadar lemak darah merupakan masalah pada masyarakat modern. Peningkatan kadar lemak darah merupakan cerminan dari tingginya asupan lemak dalam makanan. Kolesterol menjadi permasalahan yang besar berhubungan dengan risiko Penyakit jantung koroner. Peningkatan kadar kolesterol darah yang disertai faktor risiko lain seperti

hipertensi dan merokok menjadikan resiko penyakit jantung koroner lebih besar lagi. Peningkatan serum kolesterol total dan low-density lipoprotein (LDL) merupakan faktor risiko penting baik pada laki-laki maupun perempuan.

Hasil meta-analisis menunjukkan tingginya lemak darah dapat menjadi prediksi kematian akibat penyakit jantung koroner pada wanita di bawah usia 65 tahun. Nilai high-density lipoprotein (HDL) kolesterol, merupakan factor risiko Kadar kolesterol yang dianggap normal menurut Kusmana (2006) adalah sebagai berikut kolesterol total <200 mg/dl, kadar LDL <130 mg/dl, dan kadar HDL >40 mg/dl. PJK pada perempuan muda maupun tua dan merupakan predictor kuat kematian pada perempuan dibanding laki-laki (Mosca, L., 1997).

Hasil penelitian Oleh Nurwahyuni (2012) di RSUD Dr. Hardjono Ponorogo didapatkan hasil pada pasien dengan PJK sebagian besar kadar LDL tinggi sebanyak 51%, kadar Trigliserida kategori tinggi sebanyak 46%, dan kadar total kolesterol tinggi sebesar 59%. Hasil ini menunjukkan ada permasalahan serius pada kadar kolesterol yang tinggi penduduk Ponorogo, khususnya penduduk kota. Baik desa maupun kota penduduk perempuan lebih banyak mengalami peningkatan kolesterol. Promosi kesehatan tentang bahaya hiperkolesterol harus ditingkatkan dengan target khusus daerah perkotaan dan penduduk dengan jenis kelamin perempuan.

OBESITAS

Kejadian Obesitas di masyarakat semakin mengkhawatirkan semakin lama

semakin besar angka kejadiannya. Hasil penelitian ini menunjukkan prevalensi obesitas berdasarkan IMT sebesar 40,6%. Terdapat kecenderungan usia di bawah 50 tahun mengalami obesitas lebih banyak. Penduduk kota lebih tinggi angka obesitas dibanding penduduk pedesaan. Angka kejadian obesitas penduduk dari perkotaan sebesar 42,9%, dengan perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki sebesar 45,7%, sedangkan pada laki-laki sebesar 38,6%. Prevalensi obesitas di daerah pedesaan sebesar 38, 3%, dengan perempuan lebih tinggi sebesar 38,8%, sedangkan laki-laki sebesar 37,3%.

Meskipun penduduk kota cenderung lebih banyak mengalami obesitas, hasil penelitian ini menunjukan tidak banyak perbedaan kejadian obesitas antara penduduk desa dan kota di kabupaten Ponorogo, baik pada laki-laki maupun perempuan. Obesitas sangat erat kaitannya dengan pola makan yang tidak seimbang. Di mana seseorang lebih banyak mengkonsumsi lemak dan protein tanpa memperhatikan serat. Kelebihan berat badan meningkatkan risiko terjadinya penyakit kardiovaskular karena beberapa sebab. Makin besar massa tubuh, makin banyak darah yang dibutuhkan untuk memasok oksigen dan makanan ke jaringan tubuh. Ini berarti volume darah yang beredar melalui pembuluh darah menjadi meningkat sehingga memberi tekanan lebih besar pada dinding arteri. Pola konsumsi masyarakat dunia lebih banyak mengkonsumsi tinggi energi, tinggi gula, lemak dan tinggi garam. Perubahan pola nutrisi dan kurangnya aktivitas fisik terlihat lebih cepat di negara miskin dari pada negara kaya sehingga rata-

rata penyakit kronis terus meningkat pada beberapa negara miskin didunia (Rosjidi,C:2009).

Data-data akhir menunjukkan peningkatan angka kejadian obesitas diseluruh dunia dan Indonesia. Angka kejadian *over weight* (kegemukan) di Indonesia adalah 17,5% dan 4,7% obesitas (Fx.haryanto:2009).

Temuan penelitian menggambarkan penduduk kota lebih banyak mengalami obesitas di banding penduduk desa dan baik di desa maupun di kota penduduk perempuan lebih banyak mengalami obesitas di banding laki-laki. Obesitas di Ponorogo menjadi masalah yang sangat penting untuk segera dicari solosinya, mengingat daerah perkotaan dan penduduk perempuan lebih banyak mengalami obesitas.

DM

DM pada penelitian ini dengan pemeriksaan nilai gula darah acak. Hasil penilaian hanya menggambarkan sebagai seseorang beresiko DM atau tidak. Hasil penelitian menggambarkan prevalensi DM secara total sebesar 27,4%, dengan usia di atas 50 tahun lebih banyak mengalami DM ($p=0,05$). . Prevalensi DM pada usia di bawah 50 tahun sebesar 22,6%, sedangkan pada usia di atas 50 tahun sebesar 31,9%. Penduduk perkotaan mempunyai kemungkinan menderita DM lebih tinggi dibanding pedesaan. Prevalensi DM pada penduduk perkotaan sebesar 30, 9%, tidak terdapat perbedaan bermakna kejadian DM antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki yang menderita DM sebesar 32,9%, sementara pada perempuan sebesar 29,5%. Prevalensi DM

Penduduk di pedesaan Ponorogo sebesar 24%, perempuan lebih tinggi proporsinya mengalami DM dibanding laki-laki. Angka kejadian DM pada perempuan di pedesaan sebesar 25%, sementara laki-laki sebesar 22%. Angka kejadian DM penduduk perkotaan sebesar 30,9%, laki-laki lebih tinggi proporsinya mengalami DM sebesar 32,9% dibanding perempuan sebesar 29,5%.

Meskipun laki-laki lebih tinggi, namun perbedaan ini tidak bermakna secara statistik. Perbedaan kejadian DM antara penduduk di pedesaan dan perkotaan meunjukkan tidak bermakna, baik pada laki-laki maupun perempuan. Diabetes Millitus ditentukan jika nilai gula darah sewaktu lebih besar atau sama dengan 200mg/dl. Pengukuran ini jelas mengandung banyak kelemahan, sehingga hasil ini masih berupa dugaan terjadi DM.

Hasil penelitian menunjukkan terdapat 27,4% responden mengalami DM, hasil ini jauh lebih tinggi dari angka Nasional sebesar 1,1%. Penyakit DM sering disebut sebagai *the great imitator* artinya mengenai semua organ dengan berbagai macam keluhan. Gejalanya bervariasi dan timbulnya perlahan tanpa disadari oleh penderita dengan gambaran klinis kadang tidak jelas atau tanpa gejala (asintomatik) dan biasanya ditemukan saat memeriksakan penyakit lain. Diabetes menyebabkan gangguan vascular berupa mikroangiopati, terjadinya penebalan dinding pembuluh darah semua organ seperti mata, ginjal, otak, dan jantung. Proses terjadinya kerusakan organ berlangsung pelan-pelan sehingga sering sekali penderita tidak menyadari jika menderita DM. Hal ini jelas berefek sangat buruk dimana pada saat terdiagnosis sudah dalam kondisi terjadi

komplikasi. Temuan lain pada penelitian ini adalah laki-laki yang tinggal di perkotaan lebih banyak mengalami DM dibanding perempuan, sebaliknya perempuan yang tinggal di pedesaan cenderung mengalami DM lebih besar di banding laki-laki. Survey faktor resiko penyakit DM sangat penting dilakukan dengan memperhatikan wilayah, sehingga penyebab atau faktor resiko dapat dipetakan dengan jelas.

Penyusunan program pencegahan dan penanggulangan penyakit kardiovaskular berbasis bukti ilmiah sangat penting dilakukan, sehingga pembuatan program dapat efektif dan efisien. Hasil penelitian ini akan memberikan bukti ilmiah sebagai dasar penyusunan program penanggulangan dan pencegahan penyakit kardiovaskular di Ponorogo. Sinergisme berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan mengingat penyakit kardiovaskular membutuhkan penanganan lintas sektoral. Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar atau bahan advokasi penyusunan kebijakan publik tentang pencegahan penyakit kardiovaskular.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dicapai dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Beberapa Faktor Resiko Penyakit Kardiovaskular dimana Desa lebih tinggi angka kejadiannya adalah Konsumsi rokok, konsumsi alkohol, konsumsi buah tidak sehat, dan hipertensi
- b. Beberapa Faktor Resiko Penyakit Kardiovaskular dimana Kota lebih tinggi angka kejadiannya adalah Konsumsi sayur tidak sehat, obesitas, DM, dan hiperkolesterol

- c. Beberapa faktor resiko mengelompok pada perempuan seperti hipertensi, hiperkolesterol, obesitas, inaktivitas fisik, dan DM

Saran

Penyusunan program penanganan penyakit kardiovaskular harus melibatkan berbagai stakeholder, dengan prinsip sinergisme. Pemerintah Kabupaten Ponorogo harus segera merencanakan dan mengimplementasikan tindakan kesehatan masyarakat mengingat besarnya ancaman penyakit kardiovaskular.

DAFTAR PUSTAKA

- American Heart Association (AHA) (2007) Asian/Pacific Islanders and Cardiovascular Diseases-Statistic. <internet> tersedia <http://www.americanheart.org>, akses tanggal 5 Oktober 2007.
- BPS (2013) Tingkat Kemiskinan di Indonesia, Berita Resmi Statistik, 47:IX
- Drapeau V, Despr?s J-P, Bouchard C, et al (2004) Modifications in food-group consumption are related to long-term body-weight changes. *Am J Clin Nutr* 80:29-37, 2004.
- Kemenkes RI. Promosi Kesehatan (2010). Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok. Jakarta, Kemenkes R.I.
- Fx, Haryanto.2009.*Seminar Obesitas Antisipasi dan Manajemen* 2-6
- Gwatkin, D.R., Guillot, M., (2000) The Burden of Disease among the Global Poor Current Situation, Future Trends, and Implication for Strategy. Washington, D.C: The World Bank.
- Kaplan, Norman M., Stamler, Jeremiah (1994) Pencegahan Penyakit Jantung Koroner: Penatalaksanaan praktis faktor-faktor resiko. Jakarta: EGC.
- Mosca,L., Manson, J.E, Sutherland,S.E.,Langer,D., Manolio, T., Connor,E.B. (1997) Cardiovascular

Disease in Women: A Statement for Healthcare Professionals From the American Heart Association. *Circulation*, 96:2468-2482.

Nurwahyu, E., Rosjidi C.H (2012) Hubungan profil lipid darah dengan obesitas sentral pada pasien penyakit jantung koroner di poli jantung RSUD dr. Hardjono Ponorogo. Karya Tulis Ilmiah, UNMUH Ponorogo, tidak dipublikasikan.

Rosjidi, C.H (2011) Faktor resiko Penyakit Kardiovaskular pada keluarga TKI Ponorogo, tidak dipublikasikan. Unmuh Ponorogo

Rosjidi, C.H dan Isro'in, Laily (2013) Kerentanan perempuan terhadap serangan penyakit jantung dan stroke. Penelitian. Inpress

Song Y.M., Ferrer, R.L., Cho, S.I., Sung, J., Ebrahim, S., Smit, G.D. (2006) Socioeconomic Status and Cardiovascular Disease Among Men: The Korean National Health Service Prospective Cohort Study, *American Journal of Public Health*. 96: 152-159.

World Health Organization (2002) *The World Health report 2002, reducing risk, promoting healthy life*. Jenewa: WHO,

, World Health Organization (2003) *Global Strategy On Diet, Physical Activity and Health*. (internet) Available from: <www.who.int> (diakses tanggal 27 September 2006).

World Health Organization (2007) *cardiovascular_diseases*. < Internet> tersedia di http://www.who.int/cardiovascular_diseases/resources/atlas/en/. Diakses tanggal 1 Maret 2008

**PENYAKIT TUBERKULOSIS PARU
DAN IMPLIKASI TERHADAP BEBAN PENDAPATAN EKONOMI KELUARGA**

Oleh:

SULISTYO ANDARMOYO

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

Email: sulistyoandarmoyo@gmail.com

ABSTRAK

Tuberkulosis (TB) Paru merupakan penyakit infeksi menular langsung yang mengenai pada paru-paru yang disebabkan oleh kuman TBC (*Mycobacterium Tuberculosis*). Penyakit ini bisa berkembang menjadi penyakit kronis selama bertahun-tahun. Kasus tuberkulosis paru sebagian besar mengenai usia produktif (15-50 tahun) sehingga dengan kondisi seperti ini akan menurunkan produktifitas kerjanya yang berdampak terhadap penurunan pendapatan ekonomi keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapatan ekonomi keluarga setelah mereka didiagnosa atau dinyatakan menderita penyakit tuberkulosis paru. Metode Penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan pendekatan cross sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah penderita baru tuberkulosis paru yang teridentifikasi pada tahun 2013 dan 2014 di wilayah kerja Puskesmas Badegan dan Kunti Kabupaten Ponorogo. Teknik pengambilan sampling menggunakan Purposif Sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 87,23% responden memiliki pendapatan ekonomi yang rendah (<UMR) dan 12,77% memiliki pendapatan ekonomi keluarga tinggi (\geq UMR) di Kabupaten Ponorogo. Saran pada penelitian ini diperlukan upaya pengobatan tuberkulosis yang benar, baik dan tuntas, hal ini untuk menjamin kesembuhan pasien sehingga mereka yang masih berada dalam usia produktif masih bisa kembali bekerja, berproduksi dan memaksimalkan pendapatannya.

Kata kunci: *Tuberkulosis Paru, Pendapatan Ekonomi Keluarga*

PENDAHULUAN

Tuberkulosis adalah suatu penyakit menular langsung yang disebabkan oleh kuman dari kelompok *Mycobacterium* yaitu *Mycobacterium Tuberculosis* (Kemenkes RI, 2014), suatu basil aerobik tahan asam, yang ditularkan melalui udara (*airborn*) (Asih & Effendy, 2004).

Tuberkulosis (TB) masih terus menjadi masalah kesehatan di dunia terutama di negara berkembang. Meskipun obat anti tuberkulosis (OAT) sudah ditemukan dan vaksinasi *Bacillus Calmette Guérin* (BCG) telah dilaksanakan, TB tetap belum bisa diberantas habis (Kemenkes RI, 2012).

Di negara-negara berkembang kematian TBC merupakan 25% dari seluruh kematian, yang sebenarnya dapat dicegah.

Diperkirakan 95% kasus TB dan 98% kematian akibat TB didunia, terjadi pada negara-negara berkembang, dengan 75% penderita TB adalah kelompok usia produktif (15-50 tahun). Dalam laporan WHO tahun 2013 diperkirakan terdapat 8,6 juta kasus TB pada tahun 2012 dimana 1,1 juta orang (13%) diantaranya adalah pasien TB dengan HIV positif (Kemenkes RI, 2014).

Di Indonesia sendiri penyakit TB Paru merupakan masalah utama kesehatan masyarakat. Berdasarkan perhitungan ekonomi kesehatan yang menggunakan indikator DALY (*Disability Adjusted Life Year*) yang diperkenalkan oleh Word Bank, TB merupakan 7,7% dari *total disease burden* di Indonesia, angka ini lebih tinggi dari berbagai negara di Asia lain yang hanya 4%. Pada tahun

1995, hasil Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) menunjukkan bahwa penyakit tuberkulosis merupakan penyebab kematian nomor tiga setelah penyakit kardiovaskuler dan penyakit infeksi saluran pernapasan pada semua kelompok usia, dan nomor satu dari golongan penyakit infeksi. Tahun 1999, WHO memperkirakan setiap tahun menjadi 583.000 kasus baru tuberkulosis dengan kematian sekitar 140.000. Secara kasar diperkirakan setiap 100.000 penduduk Indonesia terdapat 130 penderita baru tuberkulosis dengan BTA positif. Diperkirakan pada tahun 2004, setiap tahun ada 539.000 kasus baru dan kematian 101.000 orang.

Berdasarkan Data Badan Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2007 menyatakan bahwa jumlah penderita Tuberkulosis di Indonesia sekitar 528 ribu jiwa dan berada di posisi tiga dunia setelah india dan tiongkok. Laporan WHO pada tahun 2009 mencatat peringkat Indonesia menurun ke posisi lima dengan jumlah penderita TBC sebesar 429 ribu orang. Indonesia termasuk 10 negara tertinggi penderita kasus tuberkulosis paru di dunia.

Menurut WHO (2012) dalam laporan *Global Report 2011* bahwa prevalensi tuberkulosis diperkirakan sebesar 289 kasus per 100.000 penduduk, insidensi tuberkulosis sebesar 189 kasus per 100.000 penduduk, dan angka kematian sebesar 27 kasus per 100.000 penduduk.

Evaluasi yang dilakukan melalui *Joint External Monitoring Mission* (JEMM) pada tanggal 11-22 Februari 2013, dilaporkan bahwa Indonesia telah banyak mencapai kemajuan dalam upaya pengendalian TB di Indonesia dimana Indonesia berpeluang

mencapai penurunan angka kesakitan dan kematian akibat TB menjadi setengahnya di tahun 2015 jika dibandingkan dengan data tahun 1990. Angka prevalensi TB yang pada tahun 1990 sebesar 443 per 100.000 penduduk, pada tahun 2015 ditargetkan menjadi 222 per 100.000 penduduk. Pencapaian indikator MDG's untuk TB Indonesia saat ini sudah sesuai jalurnya dan diperkirakan semua indikator dapat dicapai sebelum waktu yang ditentukan (Kemenkes RI, 2014).

Penderita tuberkulosis paru yang tertinggi berada pada kelompok usia produktif (15-50 tahun) yaitu berkisar 75%. Seorang pasien tuberkulosis dewasa diperkirakan akan kehilangan rata-rata waktu kerjanya 3-4 bulan sehingga berakibat pada kehilangan pendapatan rumah tangganya yaitu sekitar 20-30%. Jika seseorang meninggal akibat tuberkulosis, maka dia akan kehilangan pendapatannya sekitar 15 tahun. Selain merugikan secara ekonomis, tuberkulosis juga memberikan dampak buruk lainnya, yaitu dikucilkan oleh masyarakat (stigma) (WHO, 2012).

Berdasarkan Riskesdas pada tahun 2010 di Jawa Timur prevalensi TB pada penduduk usia ≥ 15 tahun adalah 0,628% dan suspek TB sebanyak 1.843%. Penderita TB paru yang menggunakan fasilitas pengobatan melalui puskesmas 44,2%. Sedangkan kasus TB Paru di Ponorogo, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo tahun 2013 didapatkan sejumlah 380 penemuan kasus baru penderita TB dengan BTA (+), sedangkan pada tahun 2014 penemuan kasus baru didapatkan sejumlah 300 orang (Dinkes Ponorogo, 2015).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapatan rata-rata ekonomi keluarga setelah pasien didiagnosa atau dinyatakan menderita penyakit tuberkulosis paru.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Penelitian dilaksanakan di Wilayah Kerja Puskesmas Badegan dan Kunti Kabupaten Ponorogo. Sampel sejumlah 47 responden, diambil dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, untuk mengidentifikasi jumlah pendapatan rata-rata ekonomi keluarga yang diperoleh dalam waktu 1 bulan, setelah didiagnosa atau dinyatakan menderita tuberkulosis paru selama kurang lebih 5 bulan. Hasil dikategorikan menjadi 2 kelompok; rendah jika pendapatan ekonomi keluarga <UMR dan tinggi jika \geq UMR Kabupaten Ponorogo.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Karakteristik Penderita Tuberkulosis Paru berdasarkan usia dan tingkat pendidikan.

Karakteristik Responden	N	%
Usia		
- $\geq 15-50$ tahun	35	74,47
- ≥ 51 tahun	12	25,53
Jumlah	47	100
Tingkat Pendidikan		
- SD/SR	17	36,17
- SLTP	21	44,68
- SLTA	9	19,15
- PT	0	0

Jumlah 47 100

Sumber: Data Primer, 2015

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa sejumlah besar (74,47%) responden berusia $\geq 15-50$ tahun dengan tingkat pendidikan sebagian besar SLTP sejumlah 44,68%.

Tabel 2. Rata-rata Pendapatan Ekonomi Keluarga dalam 1 Bulan pada Penderita Tuberkulosis Paru.

Variabel	N	%
Pendapatan Ekonomi Keluarga		
- Rendah (<UMR)	41	87,23
- Tinggi (\geq UMR)	6	12,77
Jumlah	47	100

Sumber: Data Primer, 2015

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah didiagnosa atau dinyatakan menderita tuberkulosis, responden yang memiliki rata-rata pendapatan ekonomi keluarga rendah (<UMR) sebesar 87,23% sedangkan yang mempunyai rata-rata pendapatan ekonomi keluarga tinggi (\geq UMR) sebesar 12,77%.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa setelah didiagnosa atau dinyatakan menderita tuberkulosis paru, responden yang memiliki rata-rata pendapatan ekonomi keluarga rendah (<UMR) sebesar 87,23% sedangkan yang mempunyai rata-rata pendapatan ekonomi keluarga tinggi (\geq UMR) sebesar 12,77%.

Tuberkulosis paru adalah penyakit yang disebabkan oleh *Mycobacterium*

Tuberculosis, yaitu kuman *aerob* yang dapat hidup terutama di paru atau di berbagai organ tubuh yang lainnya yang mempunyai tekanan parsial oksigen yang tinggi (Rab T, 1999). Seorang yang terkena infeksi dapat menyebarkan partikel kecil melalui batuk, bersin, atau berbicara (DiGiulio, dkk 2014). Gejala utama pasien TB paru adalah batuk berdahak selama 2-3 minggu atau lebih. Batuk dapat diikuti dengan gejala tambahan yaitu dahak bercampur darah, batuk darah, sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan menurun, malaise, berkeringat malam hari tanpa kegiatan fisik, demam meriang lebih dari satu bulan (Depkes RI, 2014). Gejala-gejala penyakit ini secara langsung akan mempengaruhi produktifitas kerja mereka sehingga berdampak pada pendapatan ekonomi keluarga dalam setiap bulannya.

Berdasarkan usia penderita, sebagian besar 74,47% penderita berusia 15-50 tahun. Usia ini merupakan usia produktif dimana pada usia ini seharusnya masih memungkinkan bagi seseorang untuk memproduksi secara lebih maksimal lagi. Adanya penyakit tuberkulosis paru telah membawa mereka kurang mampu dan tidak maksimal dalam hal bekerja yang berdampak pada pendapatan ekonomi keluarga. Pada tahap lebih lanjut lagi kondisi ini akan mengkhawatirkan keadaan ekonomi dan keuangan keluarga. Pendapatan yang berkurang akan menimbulkan berbagai permasalahan dalam keluarga, seperti halnya penyediaan sumber pangan atau gizi keluarga yang menyebabkan malnutrisi. Rab (1999) menyatakan bahwa salah satu faktor resiko

penyakit tuberkulosis paru adalah kemiskinan dan malnutrisi.

Kekurangan gizi atau malnutrisi bisa disebabkan karena asupan gizi yang tidak seimbang baik dari kualitas dan kuantitas, bisa juga karena penyakit infeksi. Gizi kurang atau buruk dapat menyebabkan menurunnya imunitas atau kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh yang menurun akan menyebabkan seseorang mudah terkena penyakit infeksi, seperti tuberkulosis. Demikian juga sebaliknya, seseorang yang menderita penyakit kronis, seperti tuberkulosis paru, umumnya status gizinya mengalami penurunan. Menurut Narasimhan *et al.* (2012), malnutrisi (baik mikro dan makro-defisiensi) meningkatkan risiko tuberkulosis karena adanya respon kekebalan yang terganggu. Penyakit tuberkulosis dapat menyebabkan kekurangan gizi itu sendiri karena penurunan nafsu makan dan perubahan dalam proses metabolisme. Hubungan antara malnutrisi dan tuberkulosis telah ditunjukkan dengan uji vaksin BCG yang dilakukan di Amerika Serikat pada tahun 1960 dan memperkirakan bahwa anak-anak kekurangan gizi akan berisiko dua kali untuk terkena penyakit tuberkulosis daripada anak-anak yang gizinya baik.

Pendapatan ekonomi keluarga yang rendah juga akan menyebabkan kondisi rumah yang tidak layak dan tidak memenuhi persyaratan kesehatan. Lingkungan rumah akan menjadi lembab dan ventilasi berkurang, sehingga besar kemungkinan akan menyebabkan kuman-kuman penyakit seperti tuberkulosis paru akan tetap berkembang biak di lingkungan rumah pasien. Sebagaimana diketahui, bahwa rumah yang

baik bagi penderita tuberkulosis paru adalah rumah yang mempunyai ventilasi yang cukup, yang memungkinkan sinar matahari bisa masuk ke dalam rumah sehingga bisa membunuh kuman penyebab tuberkulosis paru yaitu *Mycobacterium Tuberculosis*. Hal ini dikarenakan kuman *Micobacterium Tuberculosis* merupakan kuman yang sangat peka terhadap panas, sinar matahari, sinar ultraviolet, dimana adanya paparan langsung terhadap sinar matahari sebagian kuman akan mati dalam waktu beberapa menit (Kemenkes RI, 2014).

Ventilasi pada rumah memiliki banyak fungsi, selain menjaga agar aliran udara dalam rumah tetap segar juga membebaskan udara ruangan dari bakteri-bakteri, terutama bakteri patogen, karena disitu selalu terjadi aliran udara yang terus menerus. Fungsi lainnya adalah untuk menjaga agar ruangan rumah selalu dalam kelembaban yang optimum. Ventilasi yang tidak mencukupi akan menyebabkan peningkatan kelembaban ruangan karena terjadinya proses penguapan dan penyerapan cairan dari kulit. Kelembaban ruangan yang tinggi akan menjadi media yang baik untuk tumbuh dan berkembangbiaknya bakteri-bakteri patogen termasuk kuman tuberkulosis (Notoatmojo, 2007).

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa ada keterkaitan yang erat antara pendapatan keluarga setelah didiagnosa atau dinyatakan menderita tuberkulosis. Seseorang yang menderita tuberkulosis paru mempunyai kecenderungan memiliki pendapatan yang rendah.

Saran pada penelitian ini diperlukan upaya pengobatan tuberkulosis yang benar, baik dan tuntas, hal ini untuk menjamin kesembuhan pasien sehingga mereka yang masih berada dalam usia produktif masih bisa kembali bekerja, berproduksi dan memaksimalkan pendapatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, T. Y. (2005) Tuberkulosis dan Kemiskinan. Majalah Kedokteran Indonesia. Volume: 55, Nomor: 2, Pebruari 2005
- Alsagaf, H dan Abdul M (editor), (2005). *Dasar-Dasar Ilmu Penyakit Paru*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Asih, N.G.Y & Effendy, C. (2004). *Keperawatan Medikal Bedah: Klien Dengan Gangguan Sistem Pernafasan*. Jakarta, EGC.
- Depkes RI. (2007). *Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis, cetakan kedua, 2007*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Jakarta: Kemenkes RI.
- DiGiulio, dkk (2014). *Keperawatan Medikal Bedah DeMYSTiFieD*, Yogyakarta Andi Publisher.
- Dinkes Ponorogo, (2015). *Laporan Penemuan Pasien TB per UPK*. Ponorogo. Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.
- Kemenkes RI, (2012). *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Tuberkulosis Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan*. Jakarta. Direktorat Bina Upaya Kesehatan. Kemenkes RI.
- Kemenkes RI. (2014). *Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis*, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Jakarta: Kemenkes RI.
- Narasimhan et all. (2012). *Risk Factors for Tuberculosis*. Pulmonary Medicine Volume 2013, Artikel ID 828939, 111 page. Tersedia di: <http://dx.doi/10.1155/2013/828939> diakses pada tanggal 13 Desember 2014

- Notoatmodjo, S. (2007). *Ilmu Kesehatan Masyarakat Ilmu Dan Seni*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rab, T. (1999). *Ilmu Penyakit Paru*, editor Sandy Qlintang, Jakarta: Hipokrates
- WHO, (2012). *"Global Tuberculosis Report 2012"*. World Health Organization 20 Avenue Appia, 1211-Geneva-27, Switzerland. Tersedia di www.who.int/-tuberculosis. diakses pada tanggal 25 Mei 2014.

EFEKTIFITAS PELATIHAN ASUHAN PERSALINAN NORMAL (APN) TERHADAP PENGETAHUAN, KETERAMPILAN, DAN SIKAP BIDAN DI PUSKESMAS JAMBON KABUPATEN PONOROGO

Oleh:

YAYUK DWIRAHAYU

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

ABSTRAK

Fokus utama asuhan persalinan normal adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, para penolong persalinan atau bidan dalam membuat keputusan, asuhan sayang ibu dan bayi, upaya pencegahan infeksi, rekam medik, dan rujukan yang optimal dalam mencegah adanya komplikasi. Hal ini merupakan suatu pergeseran paradigma dari sikap menunggu menjadi menangani komplikasi yang mungkin terjadi selama persalinan dan setelah bayi lahir untuk mengurangi angka kesakitan dan angka kematian ibu dan bayi baru lahir (Depkes, APN 2004). Tujuan penelitian ini untuk membuktikan Pengaruh Pelatihan Asuhan Persalinan Normal terhadap Pengetahuan, keterampilan, dan sikap bidan di Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksperimen semu dengan design survei dan observasi dengan rancangan penelitian *after only with control design*. Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh bidan di Puskesmas Jambon Kabupaten Ponorogo sebanyak 23 bidan. Pengambilan sampel dengan cara *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 10 orang. Pengumpulan data meliputi data primer (Pengetahuan dengan kuesioner, keterampilan dan sikap dengan checklist). Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan program SPSS 17.0. Hasil penelitian diperoleh melalui T- Test pada pengetahuan didapatkan t hitung = 3.955 pada tingkat signifikan $p=0.003$ dengan df 9 sedangkan pada t tabel pada tingkat signifikan $p = 0.05$ dengan df 9 adalah =2,262. Suatu pengaruh dikatakan signifikan apabila hasil t hitung lebih besar dari t tabel, dalam pelatihan ini pada tingkat pengetahuan didapatkan t hitung lebih besar dari t tabel maka pelatihan ini berpengaruh sangat signifikan terhadap tingkat pengetahuan bidan. Pada tingkat sikap didapatkan t hitung = 5,308 pada tingkat signifikan $p= 0.000$ dengan df 9 sedangkan t tabel pada tingkat signifikan $p = 0.05$ dengan df 9 adalah = 2,262. Suatu pengaruh dikatakan signifikan apabila hasil t hitung lebih besar dari t tabel, pada pelatihan ini didapatkan t hitung lebih besar dari t tabel maka pelatihan berpengaruh sangat signifikan terhadap sikap bidan. Pada tingkat keterampilan didapatkan t hitung = 7,534 pada tingkat signifikan $p= 0.000$ dengan df 9 sedangkan pada t tabel pada tingkat signifikan $p= 0.05$ dengan df 9 adalah = 2.262. Suatu pengaruh dikatakan signifikan apabila hasil t hitung lebih besar dari t tabel, pada pelatihan ini didapatkan t hitung lebih besar dari t tabel maka pelatihan ini berpengaruh sangat signifikan terhadap tingkat keterampilan bidan.

Kata Kunci : *Pengaruh, Pelatihan APN, Pengetahuan, Keterampilan, Sikap*

PENDAHULUAN

Derajat kesehatan masyarakat diukur tinggi rendahnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Karena tingginya AKI akan mempunyai dampak yang besar dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Angka Kematian Ibu (AKI) telah terjadi penurunan sekitar 25% dari 334/100.000 kelahiran hidup (SDKI, 1997) menjadi 307/100.000 kelahiran hidup (SKDI, 2002-2003). Sedangkan Angka Kematian Bayi

(AKB) menurun cukup signifikan melalui berbagai intervensi namun hasilnya belum sesuai dengan harapan dari 52 per 1000 kelahiran hidup (SKDI, 1997) menjadi 35 per 1000 kelahiran hidup (SKDI, 2002-2003) Data tersebut masih tinggi di antara negara-negara ASEAN. Salah satu faktor penting dalam upaya penurunan angka kematian tersebut adalah penyediaan pelayanan kesehatan maternal dan neonatal yang bermutu, dekat dengan masyarakat difokuskan pada tiga pesan kunci

Making Pregnancy Safer, yaitu setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, setiap komplikasi obstetri dan neonatal mendapat pelayanan yang adekuat dan setiap wanita usia subur mempunyai akses terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanganan komplikasi keguguran. (Depkes, APN 2004).

Fokus utama asuhan persalinan normal adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, para penolong persalinan atau bidan dalam membuat keputusan, asuhan sayang ibu dan bayi, upaya pencegahan infeksi, rekam medik, dan rujukan yang optimal dalam mencegah adanya komplikasi. Hal ini merupakan suatu pergeseran paradigma dari sikap menunggu menjadi menangani komplikasi yang mungkin terjadi selama persalinan dan setelah bayi lahir untuk mengurangi angka kesakitan dan angka kematian ibu dan bayi baru lahir (Depkes, APN 2004).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif eksperimen semu dengan *design survei* dan observasi dengan rancangan penelitian *after only with control design*. Dalam rancangan ini kelompok sampel (E) yang diberi perlakuan (T) atau intervensi telah dilakukan, kemudian dilakukan pengukuran dengan observasi hasil OI (Y) dan mengamati kelompok kontrol pada saat yang lama (C) tanpa perlakuan dilakukan pengukuran dengan observasi hasil OI (Z) kelompok kontrol pada penelitian ini adalah bidan yang belum mengikuti pelatihan Asuhan Persalinan Normal. Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh bidan di Puskesmas

Jambon Kabupaten Ponorogo sebanyak 23 bidan. Pengambilan sampel dengan cara *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 10 orang. Variabel penelitian ini terdiri dari 2 variabel, yakni variabel bebas (Pelatihan Asuhan Persalinan Normal) dan variabel terikat (Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap).

Pengumpulan data meliputi data primer; (i) Pengetahuan bidan setelah dilatih maupun kontrol dan pengukuran menggunakan kuesioner dengan skala nominal (benar/salah, diberi skor: 1, 0), (ii) Keterampilan bidan setelah dilatih maupun kontrol dan pengukuran menggunakan check list dengan skala ordinal (dilakukan dengan sempurna, kurang sempurna, tidak dilakukan diberi skor : 2, 1, 0), (iii) Sikap bidan setelah dilatih maupun kontrol dan pengukuran menggunakan check list dengan skala ordinal (dilakukan dengan sempurna, kurang sempurna, tidak dilakukan diberi skor : 2, 1, 0). Data sekunder; data yang dikumpulkan mencakup gambaran umum lokasi penelitian, data-data yang berhubungan serta gambaran umum mengenai pelatihan asuhan persalinan normal.

Instrumen penelitian menggunakan lembar kuesioner. Dengan pemberian skor; Nilai 1 (jawaban benar), nilai 0 (jawaban salah). Hasilnya dimasukkan ke dalam kategori penilaian sebagai berikut:

- a. Nilai 30 - 38 (baik)
- b. Nilai 25 - 29 (cukup)
- c. Nilai < 24 (rendah)

Analisis data dilakukan dengan menggunakan program Statistical Program for Science (SPSS) for Windows 17.0. Data diolah dengan melakukan analisis

univariat berupa tabel distribusi frekuensi dari variabel-variabel yang diteliti dan analisis bivariat untuk mengetahui pengaruh yang ada antarvariabel. Dibandingkan dengan analisis dari kelompok kontrol. Analisis dilakukan dengan uji statistik dengan uji T-Tes dengan taraf signifikan (α) 95%

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2

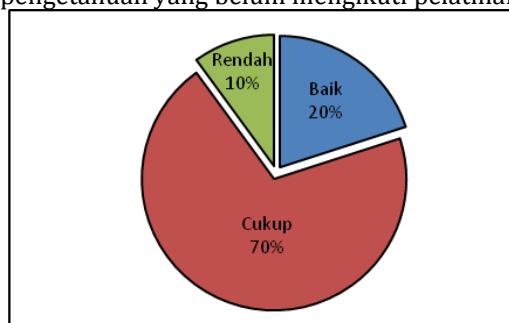
Distribusi responden menurut tingkat pengetahuan yang belum mengikuti pelatihan

No	Tingkat pengetahuan	Frekuensi	Persentase (%)
	Baik	2	20
	Cukup	7	70
	Rendah	1	10
	Jumlah	10	100

Sumber: Data Primer

Bagan 2

Distribusi responden menurut tingkat pengetahuan yang belum mengikuti pelatihan



Dari tabel 2 dan Bagan 2 dapat dilihat bahwa tingkat pengetahuan dari para bidan yang belum mengikuti pelatihan Asuhan Persalinan Normal yang tingkat pengetahuannya baik sebanyak 2 bidan (20%), cukup 7 bidan (70%), dan yang rendah 1 (10%). Jadi masih ada bidan yang kurang mengerti tentang persalinan normal.

Tabel 3

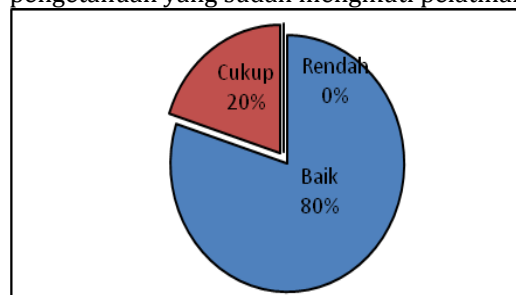
Distribusi responden menurut tingkat pengetahuan yang sudah mengikuti pelatihan

No	Tingkat pengetahuan	Frekuensi	Persentase (%)
1.	Baik	8	80
2.	Cukup	2	20
3.	Rendah	-	-
	Jumlah	10	100

Sumber: Data Primer

Bagan 3

Distribusi responden menurut tingkat pengetahuan yang sudah mengikuti pelatihan



Dari tabel 3 dan bagan 3 dapat dilihat bahwa tingkat pengetahuan para bidan yang telah mengikuti pelatihan Asuhan Persalinan Normal terjadi perubahan yang sangat signifikan dibandingkan dengan yang belum mengikuti pelatihan. Dengan tingkat pengetahuan baik sebesar 8 bidan (80%), dan cukup 2 (20%).

Tabel 4

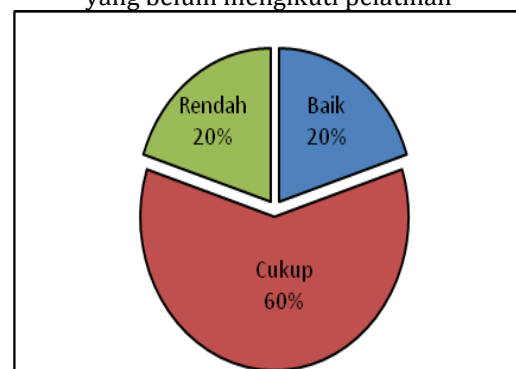
Distribusi responden menurut sikap bidan yang belum mengikuti pelatihan

No	Sikap	Frekuensi	Persentase (%)
1	Baik	2	20
2	Cukup	6	60
3	Rendah	2	20
	Jumlah	10	100

Sumber: Data primer.

Bagan 4

Distribusi responden menurut sikap bidan yang belum mengikuti pelatihan



Dari tabel 4 dan bagan 4, dapat dilihat bahwa sikap bidan dalam menangani pasien yang belum mengikuti pelatihan menunjukkan sikap yang baik sebanyak 2 bidan (20%), cukup sebanyak 6 bidan (60%) dan yang rendah sebanyak 2 (20%).

Tabel 5

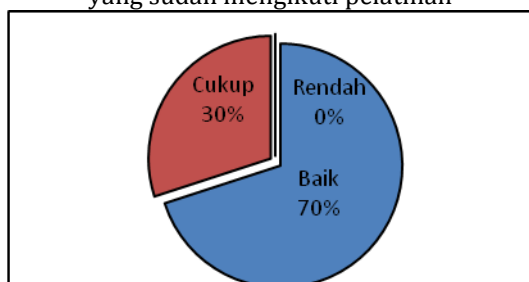
Distribusi responden menurut sikap bidan yang sudah mengikuti pelatihan

No	Sikap	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Baik	7	70
2	Cukup	3	30
3	Rendah	-	-
	Jumlah	10	100

Sumber: Data primer

Bagan 5

Distribusi responden menurut sikap bidan yang sudah mengikuti pelatihan



Dari tabel 5. dan bagan 5, dapat dilihat bahwa sikap bidan dalam menangani pasien setelah mengikuti pelatihan menunjukkan perubahan sikap yang sangat signifikan dilihat dari tidak adanya yang bersikap kurang baik dalam menangani pasien.

Tabel 6

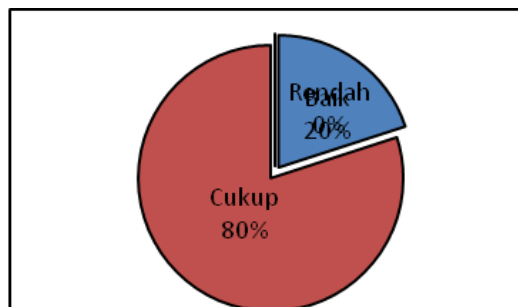
Distribusi responden menurut tingkat keterampilan yang belum mengikuti pelatihan.

No	Tingkat Keterampilan	Frekuensi	Prosentasi (%)
1	Baik	2	20
2	Cukup	8	80
3	Rendah	-	-
	Jumlah	10	100

Sumber: Data primer

Bagan 6

Distribusi responden menurut tingkat keterampilan yang belum mengikuti pelatihan



Dari tabel 6 dan bagan 6 dapat dilihat bahwa tingkat keterampilan para bidan yang belum mengikuti pelatihan dengan tingkat keterampilan baik sebanyak 2 (20%), dan cukup 8 (80%).

Tabel 7

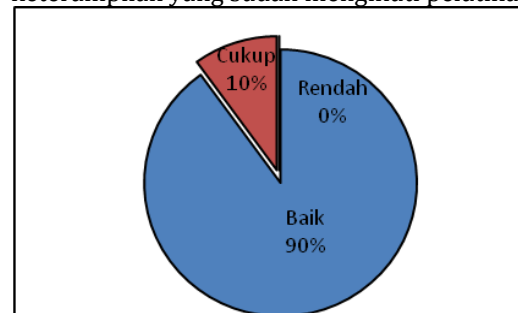
Distribusi responden menurut tingkat keterampilan yang sudah mengikuti pelatihan.

No	Tingkat ketrampilan	Frekuensi	Prosentase (%)
1	Baik	9	90
2	Cukup	1	10
3	Rendah	-	-
	Jumlah	10	100

Sumber: Data primer

Bagan 7

Distribusi responden menurut tingkat keterampilan yang sudah mengikuti pelatihan



Dari tabel 7 dan bagan 7, dapat dilihat bahwa tingkat keterampilan setelah mengikuti pelatihan ada peningkatan yang signifikan dengan tingkat keterampilan baik sebanyak 9 (90%), dan cukup 1 (10%).

Dari hasil uji statistik dengan SPSS 17.0, diperoleh hasil:

Tabel 8

Uji T-Test Tingkat Pengetahuan Bidan Sebelum dan Sesudah Pelatihan APN

		Paired Samples Test							
		Paired Differences							
		Mea n	Std. Deviati on	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
Low er	Uppe r								
Pai r 1	Pengetahuan sesudah pelatihan – Pengetahuan sebelum pelatihan	5.80 0	4.638	1.467	2.48 2	9.11 8	3.95 5	9	.003

Melalui T- Test pada pengetahuan didapatkan t hitung = 3.955 pada tingkat signifikan $p=0.003$ dengan df 9 sedangkan pada t tabel pada tingkat signifikan $p = 0.05$ dengan df 9 adalah =2,262. Suatu pengaruh dikatakan signifikan apabila hasil t hitung

lebih besar dari t tabel, dalam pelatihan ini pada tingkat pengetahuan didapatkan t hitung lebih besar dari t tabel maka pelatihan ini berpengaruh sangat signifikan terhadap tingkat pengetahuan bidan.

Tabel 9

Uji T-Test Sikap Bidan Sebelum dan Sesudah Pelatihan APN

		Paired Samples Test							
		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Sikap sesudah pelatihan – Sikap sebelum pelatihan	2.400	1.430	.452	1.377	3.423	5.308	9	.000

Pada tingkat sikap didapatkan t hitung = 5,308 pada tingkat signifikan $p= 0.000$ dengan df 9 sedangkan t tabel pada tingkat signifikan $p = 0.05$ dengan df 9 adalah = 2,262. Suatu pengaruh dikatakan signifikan

apabila hasil t hitung lebih besar dari t tabel, pada pelatihan ini didapatkan t hitung lebih besar dari t tabel maka pelatihan berpengaruh sangat signifikan terhadap sikap bidan.

Tabel 10
Uji T-Test Keterampilan Bidan Sebelum dan Sesudah Pelatihan APN
Paired Samples Test

		Paired Differences							
					95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	t	df	Sig. (2-tailed)				
Pair 1	Keterampilan sesudah pelatihan - Keterampilan sebelum pelatihan	21.800	9.151	2.894	15.254	28.346	7.534	9	.000

Pada tingkat keterampilan didapatkan t hitung = 7,534 pada tingkat signifikan p= 0.000 dengan df 9 sedangkan pada t tabel pada tingkat signifikan p= 0.05 dengan df 9 adalah = 2.262. Suatu pengaruh dikatakan signifikan apabila hasil t hitung lebih besar dari t tabel, pada pelatihan ini didapatkan t hitung lebih besar dari t tabel maka pelatihan ini berpengaruh sangat signifikan terhadap tingkat keterampilan bidan.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Dari analisis analitik membuktikan adanya pengaruh pelatihan Asuhan Persalinan Normal terhadap pengetahuan yang sangat signifikan, dilihat dari t-hitung =3,955 lebih besar dari t-tabel =2.262 dan nilai p = 0.003 (< 0.05). Terbukti adanya peningkatan pengetahuan bidan yang sudah mendapat pelatihan dibanding dengan bidan yang belum mendapat pelatihan Asuhan Persalinan Normal.
2. Dari analisis analitik membuktikan adanya pengaruh pelatihan Asuhan Persalinan Normal terhadap sikap yang sangat signifikan dilihat dari t-hitung = 5,308 lebih besar dari t-tabel = 2,262 dan nilai p=

0.000 (< 0.05). Terbukti adanya peningkatan sikap bidan yang sudah dilatih dalam menangani pasien dibanding bidan yang belum mendapat pelatihan dalam menangani pasien.

3. Dari analisis analitik membuktikan adanya pengaruh pelatihan Asuhan Persalinan Normal terhadap keterampilan yang sangat signifikan dilihat dari t-hitung = 7,534 lebih besar dari t-tabel = 2,262 dan nilai p= 0.000 (< 0.05). Terbukti adanya peningkatan keterampilan bidan yang sudah mendapat pelatihan Asuhan Persalinan Normal dibanding dengan bidan yang belum mendapat pelatihan Asuhan Persalinan Normal.

Pengetahuan, keterampilan, dan sikap merupakan komponen dari perilaku (Bloom dalam Notoatmojo 2003) sehingga dapat peneliti simpulkan bahwa adanya pengaruh pelatihan Asuhan Persalinan Normal terhadap perilaku bidan di Kabupaten Ponorogo.

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang kebidanan. Disamping itu, penelitian ini dapat memotivasi para bidan yang belum mengikuti pelatihan APN untuk mengikuti pelatihan

serta bagi para bidan yang sudah melakukan pelatihan APN untuk secara konsisten melaksanakan standar Asuhan Persalinan Normal (58 langkah).

DAFTAR PUSTAKA

- Arief TQ 2004, *Pengantar Metodologi Penelitian Untuk Ilmu Kesehatan*. The Community Of Self Help Group Forum. Jakarta.
- As ad Suryani, 2002 *Kesehatan Ibu dan Anak* Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- DEPKES RI 1999, *Pedoman Pelayanan Kebidanan Dasar*, Jakarta: Dirjen BinKesMas Direktorat Bina Kesehatan Keluarga.
- DEPKES RI, 2001, *Making Pregnancy Safer: Strategi Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir*, Jakarta: Dirjen Binkemas Depkes RI.
- DEPKES RI, 2001, *Konsep Asuhan Kebidanan*, Jakarta: Abetupusdiknakes.
- DEPKES RI. 2005. *Pelatihan Manajemen Asfiksia bayi baru lahir Untuk Bidan*. Jakarta.
- DEPKES RI, POGI, IDAI, Derinasea. IBI, 2002, *Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawiroharjo.
- DEPKES RI; JH PIEGO, POGI, IBI, JNPKKR, 2004, *Asuhan Persalinan Normal (APN)*. Jakarta: Depkes RI.
- DEPKES RI : 2003, *Upaya akselerasi penurunan angka kematian ibu*, Jakarta.
- Hasbullah 2005, *Dasar-dasar ilmu pendidikan (umum & Agama Islam)* Edisi 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Lennox C dan Kwast B, 2001 *The Partogram in community obstetrics, Topical Doklor*, Arlington USA.
- Murti 1998, *Prinsip dan Metode Riset Epidemiologi*, Edisi kedua jilid Pertama, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Macdonald, A *Philosophy Of Education*, <http://www.angel-fire.com/d/bc3/bcca/erti-matlamat.html>.
- Magnin -G, 1999 *Maternal morbidity Related to delivery, Rel-Part*.
- Nana Dana priatna. Rom• Setia'wan. 2005. *Pengantar Statistika*. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Nana Syaodih Sukmadinata, 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Edisi 3. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Sarwono Prawiroharjo, 1997. *Ilmu Kandungan*, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Jakarta.
- Sukijo Notoatmojo, 2002. *Metodologi Penelitian Kesehatan*, Edisi Revisi, Jakarta : PT. Rineka Cipta Jakarta.
- Suharsini Arikunto, 1998. *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sri Nuryati, -10 Aug 2004. *Millenium Development Goals* Internet.
- Notoatmojo, S, 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Program MNH & STARH, 2004. *Panduan Pencegahan Infeksi*, Yayasan Bina Pustaka Sarwono, JPIEGO, JNPKR, POGI.

**BUDAYA MBECEK DALAM PERSPEKTIF AGAMA, SOSIAL DAN EKONOMI
DI KABUPATEN PONOROGO**

Oleh :
SUNARTO

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah awal mula budaya mbecek. Pandangan masyarakat terhadap budaya mbecek dalam perspektif agama, sosial dan ekonomi, serta mengetahui model-model mbecek yang terjadi di masyarakat Ponorogo. Aspek yang menarik untuk diteliti adalah bahwa budaya mbecek sudah menjadi tradisi turun temurun di masyarakat. Budaya yang tadinya didasarkan nilai-nilai luhur yang bersumber pada agama dan budaya bangsa, mulai terjadi pergeseran nilai yang mengarah pada nilai-nilai materialism, bisnis dan ekonomi. Sebagian masyarakat yang lain merasa tidak bahkan merupakan tabungan untuk masa depan. Pengumpulan data dilakukan dengan jalan interview kepada tokoh pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan dan pelaku budaya tersebut. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa budaya mbecek lahir didasari nilai-nilai agama dan nilai budaya bangsa Indonesia. Dalam perspektif agama, sosial dan ekonomi para tokoh sepakat tradisi itu dilestarikan dengan syarat tidak menyimpang dari ajaran agama dan tidak membebani semua pihak. Masukan dari para tokoh, hendaknya para pemimpin memberikan contoh budaya mbecek yang sesuai dengan ajaran agama dan tidak memberatkan.

Kata Kunci: *Mbecek, budaya*

PENDAHULUAN

Menurut Koentjaraningrat (1992) dalam Sistem Nilai Budaya Orang Indonesia nilai itu mengandung empat konsep, ialah (1) Manusia itu tidak hidup sendiri di dunia, tetapi dikelilingi oleh komunitasnya, masyarakatnya, dan alam semesta di sekitarnya. Di dalam sistem makro-kosmos tersebut ia merasakan dirinya hanya sebagai suatu unsur kecil saja, yang ikut terbawa oleh proses peredaran alam semesta yang maha besar itu, (2) Dengan demikian dalam segala aspek kehidupannya manusia pada hakekatnya tergantung kepada sesamanya, (3) Karena itu ia harus selalu berusaha untuk sedapat mungkin memelihara hubungan baik dengan sesamanya, terdorong oleh jiwa sama rata sama rasa dan, (4) Selalu berusaha untuk sedapat mungkin bersifat konform, berbuat

sama dan bersama dengan sesamanya dalam komunitas, terdorong oleh jiwa sama tinggi sama rendah. Dari konsep nilai di atas, maka muncullah berbagai istilah gotongroyong yaitu aktivitas-aktivitas tolong-menolong atau tukar-menukar tenaga antar tetangga, dan antara kaum kerabat dalam masyarakat desa kecil, bentuk tolong-menolong itu antara lain berupa aktivitas sambatan atau guyuban, njurung atau rewang, tetulung layat, kerja bakti, dan masih banyak lagi. Salah satunya adalah Budaya atau tradisi mbecek.

Menurut Isnaini Rahmat (2009) tradisi atau budaya mbecek sering diartikan sebagai pemberian bantuan baik berupa barang atau uang kepada pihak yang sedang menyelenggarakan hajatan atau pesta. Adapun bentuk sumbangan yang berupa barang diantaranya adalah beras, gula, kentang, mie,

roti, pisang, kelapa, boncis, cabe, minyak kelapa dan lain sebagainya. Sumbangan yang berupa barang tersebut biasanya berupa kebutuhan pokok yang dibawa oleh kaum wanita di tambah dengan uang. Sedang laki-laki berupa uang saja. Tradisi mbecek ini pada awalnya adalah merupakan implementasi dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia yang agamis dan kesadaran bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri, dan membutuhkan bantuan orang lain. Budaya mbecek ini adalah bagian dari nilai-nilai gotong-royong atau tolong-menolong dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam perkembangannya seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh budaya globalisasi, budaya mbecek ini mulai terjadi perubahan dalam hal model atau mbecek itu sendiri. Demikian juga nilai-nilai positif dari mbecek yang merupakan bagian dari tolong-menolong juga mengalami pergeseran menjadi tercampur dengan nilai bisnis, nilai status sosial dan terasa memberatkan sebagian dari masyarakat. Model mbecek ini menarik untuk diteliti karena tradisi yang ada di daerah pedesaan dan sebagian pinggiran kota di Ponorogo ini mulai terasa memberatkan dan memungkinkan terjadinya resistensi dalam perekonomian keluarga. Hal tersebut disebabkan budaya mbecek yang tadinya merupakan nilai tolong-menolong bagi untuk keluarga yang masih ada hubungan kekerabatan, dan sebagai upaya mengumpulkan keluarga besar serta menolong tetangga berkembang lebih luas jangkauannya, sehingga teman sekantor, tetangga jauh bahkan siapapun yang ia kenal semua diundang. Bahkan pada bulan-bulan

tertentu bagi orang Jawa di disebut dengan bulan manten. Bulan baik untuk punya gawe. Hal tersebut di atas yang membuat sebagian orang berpendapat bahwa mbecek adalah budaya yang memberatkan, meskipun tidak berani menolak, karena merupakan budaya yang sudah mentradisi di masyarakat. Penelitian yang telah dilakukan Isnaini Rahmat (2009) yang berjudul "Realita Tradisi Mbecek dan Jeritan Kemiskinan di Ngrayun Ponorogo", yang berlokasi di Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo menjelaskan bahwa tradisi mbecek merupakan kegiatan tolong-menolong dengan menggunakan prinsip "paseduluran" (persaudaraan) dalam bidang ekonomi yang terlihat dari adanya saling membantu dalam memenuhi kebutuhan untuk menggelar hajatan atau pesta yang berupa bahan kebutuhan untuk menggelar hajatan tersebut.

Dalam penelitian tersebut dijelaskan terjadinya perubahan nilai mbecek zaman dahulu dengan mbecek zaman sekarang disebabkan terjadinya Globalisasi dalam kehidupan. Pergeseran nilai tersebut dapat dilihat niat dan persiapan sebelum terselenggaranya hajatan atau pesta. Orang-orang dahulu apabila punya hajatan atau gawe mempunyai niat mengundang atau ngaturi seluruh keluarga atau family, dan tetangga untuk menjalin silaturahmi. Jauh-jauh sebelum hari H sudah mempersiapkan diri dengan istilah "Klumpuk-Klumpuk" misalnya kayu bakar, kelapa, dan bumbu-bumbu dapur. Sedang orang sekarang lebih berpikir ekonomi/bisnis ketika punya hajatan. Dia merasa telah mengeluarkan uang yang banyak untuk mbecek, maka uang atau barang-barang yang dikeluarkan, harus kembali. Kebanyakan

sekarang, seseorang yang akan punya gawe atau hajatan kurang memiliki modal atau bahkan tidak punya modal sama sekali, sehingga ia berprinsip mengeluarkan biaya seringan-ringannya untuk mendapatkan hasil yang sebanyak-banyaknya. Karena tidak punya modal awal, orang yang punya gawe sekarang ini banyak ruginya dan harus pinjam bank atau jual sawah ladang. Penelitian di atas belum menjelaskan tentang bentuk-bentuk atau model mbecek, sehingga dapat diketahui model mana yang memberatkan atau yang tidak. Demikian juga belum meneliti pandangan masyarakat tentang budaya mbecek itu sendiri, sehingga dapat diketahui duduk permasalahannya, sehingga dapat dipadukan dilestarikannya budaya mbecek sesuai dengan niat awal para leluhur kita dan tidak memberatkan masyarakat. Masalah inilah yang mendorong penulis untuk meneliti model budaya mbecek dalam perspektif masyarakat Ponorogo. Semua menyadari bahwa kita berada dalam suatu lingkungan yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat cepat dan revolusioner (Pasaribu, 1986).

Sebagai akibatnya terjadi perubahan nilai-nilai dalam tolong-menolong yang berbentuk tradisi budaya mbecek. Perubahan masyarakat dari *Gemeinschaft* yang bercirikan hubungan pertemanan, persahabatan, pertuanan, kekuasaan, tak rasional, pribadi dan statis menjadi *Gesellschaft* yang bercirikan hubungan pertemuan, kerjasama, bekerja sama pada majikan, rasional tidak pribadi dan dinamik menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan perilaku dalam masyarakat (Pasaribu, 1986). Menurut Homans dalam

Poloma (1994) terjadinya perubahan nilai-nilai dalam masyarakat dapat dianalisa berdasarkan teori-teori pertukaran sosial yang dilandaskan pada prinsip-prinsip transaksi ekonomis yang elementar orang menyediakan barang atau jasa dan sebagai imbalannya berharap memperoleh barang atau jasa yang diinginkan. Ahli teori perubahan memiliki asumsi sederhana bahwa interaksi sosial mirip dengan transaksi ekonomi. Akan tetapi mereka mengakui bahwa pertukaran sosial tidak dapat selalu diukur dengan nilai uang, sebab dalam berbagai transaksi sosial dipertukarkan juga dengan hal-hal yang nyata dan tidak nyata.

Homans dalam Poloma (1994) percaya bahwa proses pertukaran dapat dijelaskan lewat lima pernyataan proporsional yang saling berhubungan dan berasal dari psikologi Skinnerian. Proposisi itu adalah pertama : proposisi sukses. Dalam setiap tindakan, semakin sering suatu tindakan tertentu memperoleh ganjaran, maka kian kerap ia akan melakukan tindakan itu. Kedua : proposisi stimulus. Jika di masa lalu terjadinya stimulus yang khusus, atau seperangkat stimulus, merupakan peristiwa di mana tindakan seseorang memperoleh ganjaran, maka semakin mirip stimuli yang ada sekarang ini dengan yang lalu itu, akan semakin mungkin seseorang melakukan tindakan serupa atau agak sama. Ketiga : Proposisi nilai. Semakin tinggi nilai suatu tindakan, maka kian senang seseorang melakukan tindakan itu. Keempat : proposisi Deprivasi-Safiasi semakin sering di masa yang baru berlalu seseorang menerima suatu ganjaran tertentu, maka semakin kurang bernilai bagi orang tersebut peningkatan

setiap unit ganjaran itu dan yang kelima : Bila tindakan seseorang tidak memperoleh ganjaran yang diharapkannya, atau menerima hukuman yang tidak diinginkan, maka dia akan marah; dia menjadi sangat cenderung menunjukkan perilaku agresif dan hasil perilaku demikian menjadi lebih bernilai baginya. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam menganalisis masyarakat dan kebudayaan umat manusia adalah pendekatan fungsionalisme dan struktural fungsionalisme. Pendekatan ini muncul didasari oleh pemikiran bahwa manusia sepanjang hayatnya dipengaruhi oleh pemikiran dan tindakan orang sekitarnya, sehingga manusia tidak pernah mampu sepenuhnya menentukan pilihan tindakan, sikap atau perilaku tanpa mempertimbangkan orang lain. (Sulasman, 2013: 110).

Budaya mbecek yang menjadi adat dan budaya masyarakat Ponorogo dan sekitarnya mengalami perubahan makna karena dipengaruhi oleh pemikiran dan tindakan orang sekitarnya. Budaya mbecek yang awalnya sebagai bagian dari implementasi budaya gotong royong dan tolong menolong berkembang seiring berkembangnya pemikiran dan tindakan dari sebagian orang yang ada di masyarakat. Adanya pendapat bahwa budaya mbecek di samping sebagai upaya gotong royong dan tolong menolong antar sesama masyarakat, juga berfungsi sebagai sarana investasi atau tabungan yang sewaktu-waktu dapat kita ambil kembali. Adanya budaya malu dan berpikir seimbang atau adil yang merupakan ciri masyarakat Indonesia menyebabkan adanya pola pencatatan dalam budaya mbecek. Setiap orang yang punya hajat, pasti mencatat siapa

saja yang menyumbang atau mbecek dan berapa besar jumlah sumbangan yang dan jenis sumbangan seseorang. Pada saatnya nanti orang yang menyumbang punya hajat, maka ada semacam kewajiban untuk mengembalikan sumbangan sesuai dengan yang diberikannya. Perasaan malu untuk tidak mengembalikan sesuai dengan besar dan jenis sumbangan menjadikan suasana kekeluargaan atau kebersamaan tetap terjaga di dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap pola adat kebiasaan merupakan bagian dari fungsi dasar dalam kebudayaan. Perubahan sosial budaya adalah gejala berubahnya struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Perubahan sosial kebudayaan pada suatu masyarakat merupakan keniscayaan dan tidak dapat dielakkan disebabkan oleh adanya perubahan pada masyarakat. Perubahan ini dapat dikatakan sebagai salah satu modus operasional dari suatu masyarakat untuk bertahan (survive) atau mempertahankan diri. Oleh karena itu masyarakat tidak pernah statis, selalu dinamis berubah dari satu keadaan ke keadaan lainnya disebabkan oleh berbagai faktor. Perubahan ini dimaksudkan sebagai wujud tanggapan manusia terhadap tantangan lingkungannya (Sulasman, 2013: 137).

Menurut Herbert Spencer dalam (Sulasman: 2013: 136) berpendapat bahwa perkembangan masyarakat dan kebudayaan tiap-tiap bangsa di dunia telah atau akan melalui tingkat-tingkat evolusi yang sama (evolusi universal). Perubahan sosial bisa juga terjadi karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Budaya mbecek yang terjadi di masyarakat Ponorogo dan sekitarnya berdasarkan beberapa teori

evolusi di atas juga mengalami perubahan. Hal tersebut dapat kita lihat, khususnya di daerah perkotaan. Awalnya budaya mbecek, di samping membawa uang, juga membawa sanggan yang berupa bahan-bahan mentah untuk kebutuhan pokok, seperti beras, gula, kentang, mie, kubis, minyak, kecap, bawang merah, bawang putih dan lain-lain. Sekarang ini di daerah perkotaan cukup dengan membawa uang dan itu cukup untuk satu keluarga. Bisa bapak atau ibu. Hal tersebut dirasa lebih enak dan praktis jika dibanding dengan model mbecek di desa yang harus membawa sanggan. Orang yang menerima berkat dari membawa sanggan biasanya tidak termakan, apalagi dalam satu hari lebih dari satu orang punya hajat. Materialisme adalah salah satu paham yang beranggapan bahwa hidup di dunia ini adalah hasil rekayasa materi. Akhirnya selagi seorang manusia hidup di dunia, dia sebenarnya hidup di dunia materi. Dia mau hidup, harus menggunakan alat (materi). Materialisme berpandangan kebudayaan adalah hasil kumpulan pikiran yang dipelajari sosial masyarakat, yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. (Sulasman, 2013: 243)

Perubahan Budaya mbecek dalam pandangan materialism tidak bisa lepas dari cara berpikir materi atau ekonomi. Budaya mbecek merupakan peluang bisnis, peluang ekonomi, sehingga budaya mbecek merupakan bagian dari cara berinvestasi yang cukup baik. Orang yang mengikuti pemikiran materialisme akan melakukan investasi dengan orang yang punya hajat, apalagi orang tersebut dalam jangka waktu tidak terlalu lama akan punya hajat juga. Dengan memberikan sumbangan yang besar, ia sangat

berharap mendapatkan kembali apa yang telah ia sumbangkan. Ketika punya hajat. Oleh karena itu banyak terjadi di masyarakat bahwa setelah punya gawe ia dapat memperbaiki rumah, membeli barang-barang mewah, membeli sawah dan kendaraan, meskipun masyarakat sekitar terhadap perilaku tersebut. Dari paparan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut : (1) Bagaimana sejarah awal budaya mbecek yang terjadi di Ponorogo; (2) Bagaimana pandangan masyarakat Ponorogo terhadap budaya mbecek yang terjadi di Kabupaten Ponorogo, (3) Model-Model mbecek yang terjadi di masyarakat Ponorogo. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengetahui sejarah budaya mbecek yang terjadi di kabupaten Ponorogo; (2) Mengetahui pandangan masyarakat Ponorogo terhadap budaya mbecek yang terjadi di Kabupaten Ponorogo dan (3) Mengetahui model-model mbecek yang terjadi di masyarakat Ponorogo.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena yang berhubungan dengan keadaan sesuatu yang digambarkan dengan kosa kata atau kalimat dipisahkan-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan (Suharsimi, Arikunto, 1993). Penelitian ini mencoba menggambarkan budaya mbecek yang terjadi pada masa lalu sampai dengan sekarang dan mencoba menggali pandangan dari tokoh dan masyarakat tentang budaya mbecek yang terjadi sekarang ini dan model mbecek yang

cocok untuk kondisi sekarang ini. Penelitian ini dilakukan di wilayah Ponorogo dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, dan tokoh di pemerintahan yang terkait dengan permasalahan. Data yang hendak digali lewat penelitian ini adalah model-model atau bentuk-bentuk budaya mbecek yang ada di Kabupaten Ponorogo dan pandangan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan dan tokoh di pemerintahan dan praktisi yang memiliki kompetensi terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

Sumber data primer akan digali dari Bupati, beberapa Kepala Desa, Tokoh Agama, tokoh masyarakat, budayawan, praktisi. Sedang sumber data sekunder (pendukung) akan digali melalui masyarakat pelaku budaya mbecek, baik yang tinggal di pedesaan, pinggiran kota dan kelurahan yang ada di Ponorogo. Informan penelitian adalah Bupati Ponorogo, Kepala Desa / Kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh budaya, tokoh agama, tokoh pendidikan. Penentuan Informan akan dilakukan melalui teknik Snowball (Bola Salju), di mana penggalian data akan dilakukan kepada para informan tanpa mematok jumlahnya, tetapi mencukupkan diri dengan kualitas informasi yang diberikan, artinya jika informasi di rasa sudah jenuh dan tidak ada informasi baru yang disampaikan, maka penggalian data secara otomatis dihentikan. Sementara itu, jika informasi yang digali tersebut masih terus berkembang dengan informasi-informasi baru yang sesuai dengan fokus penelitian, maka penggalian data akan terus bergulir dan terus mencari informasi baru sesuai dengan petunjuk yang

diberikan oleh informan lain yang telah diwawancara.

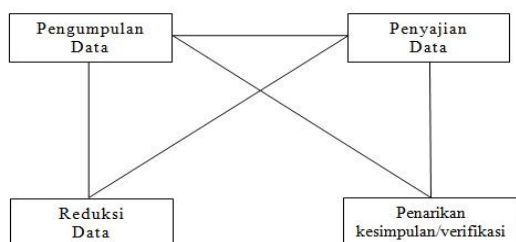
Teknik pengumpulan data yang dipakai di dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali data tentang berbagai pandangan dan pendapat para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh budaya, tokoh pendidikan dan tokoh pemerintahan terkait dengan model-model mbecek dan perspektif masyarakat Ponorogo terkait dengan budaya mbecek.

Observasi digunakan untuk mengetahui secara langsung budaya mbecek yang berkembang di masyarakat Ponorogo. Sedang dokumentasi digunakan untuk pendokumenan model atau membentuk serta barang bawaan yang dibawa oleh masyarakat yang sedang melakukan budaya mbecek. Adapun teknik dokumentasinya dilakukan melalui tape recorder, foto digital dan shooting (DVD dan VCD). Data yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis melalui empat tahapan yang digambarkan sebagai berikut :



Analisis data kualitatif di atas, merupakan komponen-komponen analisis data model mengalir alir. Analisis data kualitatif juga diartikan sebagai upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah pengumpulan data, sajian data, reduksi data dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis

(Miles dan Huberman, 1997) dapat digambarkan sebagai berikut :



Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara : (1) Perpanjangan keikutsertaan. Pada saat pengumpulan data, peneliti menyediakan waktu sebanyak mungkin untuk berinteraksi dengan para tokoh dan masyarakat, dengan cara ini diharapkan akan dapat mengambil kesimpulan yang representative, (2) Triangulasi. Penelitian akan memeriksa keabsahan data melalui berbagai sumber dan informan melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Asal-Usul Budaya Mbecok di Ponorogo

Dari kajian teori dan penelitian lapangan yang penulis lapangan menunjukkan bahwa kata mbecok sepadan dengan kata buwuh dan nyumbang. Mbecok berasal dari kata becek-becek yang bermakna rela berkorban dengan sepenuh hati atau berbasah-basahan (ngembloh), bekerja secara total yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang membantu mempersiapkan segala sesuatu mulai dari perencanaan, persiapan dan pelaksanaan hajatan yang dilaksanakan oleh tetangga, saudara dan teman dekat. Hajatan tersebut bisa persiapan mendirikan rumah, membakar batu bata, upacara kelahiran anak, khitanan, pernikahan dan yang lainnya. Budaya mbecok adalah

implementasi dari nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh nenek moyang kita sampai sekarang ini berupa tolong menolong dan gotong royong yang dilaksanakan oleh warga masyarakat, khususnya tetangga, saudara dan teman dekat yang membantu saudaranya yang kebetulan punya hajat. Tolong menolong itu dilakukan berupa tenaga, pikiran dan harta benda. Ditinjau dari ajaran agama, budaya mbecok adalah bentuk dari ta'awun atau sikap saling tolong menolong antar sesama manusia dalam melaksanakan suatu kebaikan, misalnya acara walimah, khitanan, mendirikan rumah dan lain-lain. Hal tersebut dilaksanakan dengan penuh keikhlasan dan merupakan bagian dari amal sholeh, yang dilaksanakan sebagai bukti keimanan pada Allah (Tauhid kepada Allah).

Perilaku ta'awun itu dilakukan semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT. Dari buku-buku yang penulis baca, memang tidak jelas kapan dimulainya kegiatan mbecok tersebut. Memang kata-kata gotong royong itu sudah populer pada masa presiden Sukarno. Menurut seorang ahli pertanian Belanda yang pernah bekerja di daerah Blitar yang bernama GH Van der Kolff, menulis bahwa dalam tahun 1920, bahwa di daerah pedesaan di Blitar banyak petani mulai meninggalkan adat gotong-royong dalam produksi pertanian dan menganggap lebih praktis untuk menyewa buruh tani yang diberi upah berupa uang. Menurut Koentjaraningrat dalam penelitian tentang gotong-royong di Karanganyar tahun 1958 dan 1959 menyebut gotong royong dengan istilah sambatan yang berasal dari kata sambat atau minta bantuan yang dalam bahasa Jerman diistilahkan bitarbeits artinya

“Pekerjaan bantuan yang diminta.” Dari kata sambatan atau minta bantuan atau minta tolong tersebut, kemudian berkembang dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk ketika punya hajat minta bantuan atau sumbangan yang kemudian berkembang dengan budaya mbecek, buwuh atau menyumbang.

Dalam perkembangan zaman, budaya mbecek yang dilakukan dengan ikhlas tersebut mulai mengalami proses perubahan. Perubahan dalam aktivitas masyarakat sangatlah wajar. Banyak faktor yang berpengaruh terhadap terjadinya perubahan tersebut. Diantara terjadinya perubahan pola pikir masyarakat diakibatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pengaruh budaya-budaya yang masuk ke Indonesia dan berkembangnya paham-paham materialisme, hedonisme, faktor ekonomi dan tantangan kebutuhan hidup yang semakin kompleks, maka nilai-nilai gotong-royong, tolong menolong tersebut mengalami pergeseran nilai. Nilai tolong menolong yang merupakan nilai-nilai sosial, nilai-nilai agamis bergeser ke nilai-nilai ekonomi. Sehingga budaya becek tersebut di samping punya nilai sosial, nilai agama juga harus bernilai ekonomi. Perubahan tersebut sangatlah wajar, karena tuntutan kehidupan yang semakin materialistis dan hedonis, di mana setiap aktivitas diukur dari kepentingan dan keuntungan material di samping. Di samping itu nilai-nilai persamaan, keseimbangan, kesepadanan membuat masyarakat khususnya Jawa untuk saling membantu dan berusaha untuk membantu kepada orang lain, minimal sama atau lebih baik dari apa yang telah ia terima. Permasalahannya kita mesti mengambil jalan tengah, di mana apa yang

kita lakukan untuk orang lain berupa mbecek atau sumbangan harus tetap dilandasi oleh nilai-nilai ajaran agama yaitu keikhlasan dan bagian dari ibadah serta amal sholeh. Sementara dalam hubungan dengan sesama, ada baiknya prinsip seimbang atau sepadan itu kita lakukan bahkan kalau bisa lebih baik. Bagi yang disumbang, sudah tentu tidak perlu melihat-lihat kembali apa yang ia sumbangkan kepada orang lain. Sebab masing-masing kita tidak mengetahui problem yang dialami oleh masing-masing diantara kita. Dengan prinsip ini keharmonisan tetap terjaga dan apa yang kita berikan kepada orang lain adalah bagian dari shodaqoh dan amal sholeh, yang mendapat ridho Allah SWT.

Pandangan Masyarakat Terhadap Budaya Mbecek Dalam Perspektif Agama Sosial dan Ekonomi

Dari hasil wawancara dengan berbagai tokoh yang menjadi informan dalam penelitian ini dapat kita analisa sebagai berikut :

Pertama, mereka sepakat bahwa budaya mbecek pada awalnya adalah budaya yang dilandasi dari nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur dari bangsa Indonesia. Budaya mbecek/ buwuh/ nyumbang dari perspektif ajaran agama merupakan implementasi dari nilai ta’awun atau sikap untuk saling membantu, saling tolong-menolong yang didasari kebaikan dan taqwa. Dari nilai-nilai yang digali dari perjalanan bangsa ini, budaya mbecek adalah implementasi dari nilai gotong-royong atau tolong menolong sesama umat manusia. Nilai tersebut adalah nilai yang dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat

bangsa kita sampai sekarang budaya itu selalu eksis dan berkembang, karena dilandasi pula oleh nilai-nilai keturunan, kebersamaan, kesepadan.

Kedua, Pandangan para informan tentang budaya mbecek yang terjadi sekarang ini ada beberapa macam diantaranya budaya mbecek sudah mengalami perubahan nilai. Budaya mbecek yang pada awalnya sebagai bentuk ta'awun atau implementasi nilai-nilai gotong royong dan tolong menolong sudah mulai bergeser mengarah ke nilai-nilai hedonisme dan materialistik. Mbecek merupakan investasi atau tabungan sosial, mbecek sebagai investasi masa depan dan mbecek sebagai arisan. Oleh karena itu menjadi tugas pimpinan masyarakat pimpinan organisasi dan para pemimpin untuk mengembalikan kembali nilai-nilai awal dari budaya mbecek tentang makna ta'awun, tolong menolong dan nilai gotong royong.

Ketiga, terkait dengan budaya mbecek yang dilakukan dengan membawa sanggan berupa barang yang basah maupun yang kering, yang dilakukan secara berlebih atau di atas keumuman, mayoritas informan berpendapat sangat memberatkan dan membebani masyarakat mengganggu perekonomian warga, karena tidak ada anggaran khusus untuk itu. Demikian juga kembalian dari mbecek yang diberikan berupa nasi dan sayur, apabila tidak enak dan terlalu banyak, maka sangat mubadzir dan sering diberikan kepada hewan maupun ayam atau dijemur untuk nasi aking. Namun jika budaya mbecek itu tidak berlebihan seperti yang terjadi di daerah perkotaan yaitu memberikan uang dalam amplop pada waktu resepsi adalah wajar, dan tidak masalah.

Sebab tidak ada batasan minimal dan sesuai kemampuan masing-masing. Mesti demikian kebanyakan penyumbang akan memberi sumbangan lebih jika dibanding dengan apa yang ia peroleh. Hampir semua informan setuju budaya mbecek untuk tetap dilestarikan sebagai media silaturahmi, media ta'awun, media menyambung persaudaraan antar sesama asal tidak memberatkan semua pihak, baik yang menyumbang maupun yang disumbang. Kalau memang kita mampu, maka tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun lebih baik untuk menjaga keikhlasan dan amal sholeh. Kita mengundang orang lain untuk menyaksikan acara pernikahan putra-putri kita adalah bentuk rasa syukur dan mohon do'a restu dan pemberitahuan tentang bertambahnya keluarga kepada masyarakat, khususnya tetangga, sahabat, keluarga besar dan masyarakat pada umumnya.

Model Atau Bentuk Mbecek Yang Terjadi di Kabupaten Ponorogo

Setidaknya ada dua model / bentuk budaya mbecek yang ada di Kabupaten Ponorogo yaitu : Pertama, model mbecek di masyarakat desa dan pinggiran. Budaya mbecek di daerah tersebut adalah model lama, di mana ibu-ibu di samping bawa uang, juga masih bawa gawan atau sanggan berupa barang, baik yang basah maupun yang kering. Gawan yang basah berupa sayur mayor, kentang, kubis, beras, mie, gula, roti dan lain-lain. Sedang yang laki-laki dengan uang. Biasanya ada di daerah tertentu yang menyumbang itu seluruh anggota keluarga yang sudah akil baligh, akan tetapi yang banyak adalah bapak dan ibu. Bagi

perempuan yang membawa sanggan atau bawaan, ketika pulang akan diberi nasi dan sayur. Biasanya kalau dalam hari itu lebih dari sekali mbeceknnya, maka nasi tersebut akan mubadzir, sehingga untuk makan hewan dan ungags serta dijemur buat nasi aking. Kedua, model daerah perkotaan atau pinggiran kota yang melakukan budaya mbecek dengan cukup mengasih uang dalam amplop pada waktu resepsi atau acara memang masih ada juga di suatu tempat yang mengadakan becean dan resepsi. Penyumbang ada yang datang kedua-duanya atau memilih salah satu model kedua ini lebih ringan dan efektif, karena tidak ada batasan nominal uang yang diberikan. Biasanya sesuai dengan kemampuan dan keumuman masyarakat.

Dari dua model di atas, kebanyakan informan lebih memilih bentuk model yang kedua yaitu cukup memberikan uang dalam amplop dengan berbagai alasan, antara lain lebih praktis, bisa menjaga keikhlasan, karena tidak ada pencatatan dan lebih efektif dan efisien bagi penyumbang. Bagi penerima sumbangan tentu bantuan berupa uang akan lebih bermanfaat untuk mencukupi kebutuhan resepsi, jika dibanding dengan barang yang harus menjual terlebih dahulu dengan warga lebih murah dan barang biasanya tidak tahan lama.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Asal-usul budaya mbecek secara jelas memang tidak ada tanggal dan tahun pastinya. Namun berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, bahwa budaya mbecek merupakan implementasi nilai gotong royong, tolong-menolong dan

sambatan yang terjadi pada awal abad dua puluh.

2. Kata mbecek berasal dari kata becek-becek artinya rela berqurban membantu keluarga, tetangga dan teman yang punya hajat dengan sungguh-sungguh mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Dari sudut ajaran agama budaya mbecek adalah implementasi dari perintah Al-Qur'an untuk tolong-menolong dalam melakukan kebaikan dan taqwa.
3. Pandangan mayoritas informan setuju untuk melestarikan budaya mbecek sebagai media silaturrohim. Gotong-royong dan ta'awun atau tolong menolong dengan catatan tidak menyimpang dari ajaran agama, mulai dari proses dan pelaksanaannya. Budaya tersebut perlu dilestarikan dengan syarat:
 - a. Dilandasi dengan nilai-nilai agama dan nilai sosial yakni ikhlas dan saling tolong menolong antar sesama
 - b. Tidak memberatkan orang lain
 - c. Tidak memaksakan diri dan sesuai dengan kemampuan
 - d. Tidak ingin mendapatkan pujian atau wah dari orang lain
 - e. Dilaksanakan dengan prinsip Islam seperti sederhana, tepat waktu dan lain-lain.
4. Model mbecek dengan amplop yang berisi uang lebih bagus, efektif dan efisien dibanding dengan model desa yang membara barang dan uang.

Saran

1. Kepada seluruh anggota masyarakat yang merasa keberatan dengan budaya mbecek, hendaknya mengukur dari apabila akan

- punya hajat atau ketika melakukan mbecek, sehingga tidak memberatkan
2. Agar terjadi harmonisasi di masyarakat, hendaknya sumbangan yang kita berikan sesuai dengan sumbangan yang kita terima. Paling tidak kita mbecek sesuai dengan keumuman atau pada umumnya orang melakukan mbecek.
 3. Para pemimpin punya tanggung jawab moral untuk memberikan contoh dan mengembalikan budaya mbecek, sesuai dengan nilai awal lahirnya budaya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Isnaini Rahmat, 2009. *Realitas Tradisi Mbecek dan Jeritan Kemiskinan di Ngrayun Ponorogo*. FISIP, UNS.
- Koentjoroningrat, 1992. *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Miles, Methew B dan Huberman, A, Michael. 1997. *Qualitative Data Analysis, Terjemahan, Analisis data Kualitatif*. Universitas Terbuka, Jakarta.
- Mulyana, Deddy. 1010. *Metodologi Penelitian Kulaitatif*. Rosdakarya, Bandung.
- Noraha, Taliziouhu, 2010. *Budaya Organisasi*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Pasaribu, 1986. *Sosiologi Pembangunan*. Tarsito, Bandung.
- Poloma, M.M. 1994. *Sosiologi Kontemporer*, Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Sihabuddin, Ahmad. 2013. *Komunikasi Antar Budaya Satu Perspektif Multimedia*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Sulasman, 2013. *Teori-Teori Kebudayaan dari Teori Hingga Aplikasi*. Pustaka Setia, Bandung.

**INTERAKSI SIMBOLIK DALAM KOMUNIKASI BUDAYA
(STUDI ANALISIS FASILITAS PUBLIK DI KABUPATEN PONOROGO)**

Oleh:

OKI CAHYO NUGROHO

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

Email : okicahyo@umpo.ac.id

ABSTRAK

Ponorogo adalah salah satu kota di ujung barat Propinsi Jawa Timur yang mempunyai kesenian khas yaitu Reyog Ponorogo. Kesenian ini merupakan salah satu kekayaan kesenian nasional yang menjadi aset bangsa dalam kekayaan budaya dunia. Reyog sendiri ibaratnya sudah mendarah daging dan menyatu dalam kehidupan sosial di masyarakat Ponorogo. Hal ini tercermin dari banyaknya jumlah even yang diselenggarakan baik dalam tingkat desa, kecamatan maupun tingkat nasional. Kebanggaan akan kesenian ini diwujudkan dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah bangunan yang bersifat publik atau lebih tepatnya landmark yang menjadi ciri khas dan identitas kota ini. Jika kita perhatikan lebih jauh, bangunan publik berupa gerbang masuk kabupaten Ponorogo dari empat penjuru mempunyai perbedaan jika dibandingkan dengan beberapa bangunan yang mempunyai cirikhas atau yang berkaitan langsung dengan reyog itu sendiri. Begitu pula dengan beberapa gapura masuk perkampungan penduduk yang berbeda dari pusat kota. Penelitian ini berusaha mengungkap makna yang terkandung dalam setiap bangunan yang bercirikan reyog dan berusaha menemukan proses interaksi simbolik yang terjadi antar bangunan tersebut dilihat dari sudut pandang ilmu komunikasi. "Mind, Self and Society dari Mead dalam interaksi simbolik ini merupakan teori dasar yang menjadi pegangan dalam menganalisa fenomena yang ada di Ponorogo ini. Pentingnya makna bagi perilaku manusia, pentingnya konsep mengenai diri, hubungan antara individu dengan masyarakat merupakan konsep dasar bangunan-bangunan yang mencirikan sebuah kondisi sosial masyarakat yang hadir pada jaman tersebut. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana data yang diambil dengan tehnik snowball sampling. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Kabupaten Ponorogo dibangun atas empat era yang berbeda dalam sudut pandang memaknai kesenian reyog ini sebagai identitas dan kebanggaan Ponorogo sebagai kota reyog. Politik, ekonomi, pendidikan berpengaruh terhadap daya cipta, rasa, dan karsa dalam pembentukan fasilitas publik berupa tugu atau gerbang (landmark). Kondisi sosial yang dipengaruhi oleh kelompok masyarakat yang dominan turut menyumbang keragaman dalam pembentukan identitas di kota ini.

Kata Kunci : *Reyog Ponorogo, interaksi simbolik, komunikasi, fasilitas public*

LATAR BELAKANG

Kebanggaan terhadap reyog yang menjadi salah satu pendukung kesenian nasional sudah menjadi darah daging dalam diri masyarakat Ponorogo. Hal ini dapat dilihat secara langsung dengan banyaknya monumen atau bangunan publik yang sangat kental dengan nuansa reyognya. Bangunan-bangunan ini dapat berupa gapura, patung yang berada disetiap perempatan jalan besar di kota ponorogo, patung di seputar alun-alun dan beberapa yang masih tersisa

pintu gerbang masuk ke rumah warga. Bangunan-bangunan ini dalam perspektif komunikasi budaya dapat dijadikan sebuah data penting yang berkaitan langsung dengan informasi yang terkandung didalamnya dalam berbagai sudut pandang seperti sejarah, sosial budaya dan politik yang menyelimutinya. Dari perkembangan inilah, Ponorogo menjadi salah satu magnet budaya di kawasan Jawa timur bagian barat. Hal demikian menjadi pemicu turut berkembangnya tatanan sosial budaya dan pemerintahan pada masyarakat ini.

Wujud dari perubahan tersebut secara kasat mata dapat dilihat langsung dengan adanya bangunan publik berupa *landmark* atau bangunan yang menjadi ciri khas atau identitas suatu kota. Bangunan-bangunan ini dibuat dalam berbagai bentuk dan ukuran menyesuaikan jaman, mode dan pemegang kekuasaan pada saat itu.

Contoh bangunan yang menjadi ciri khas kota Ponorogo adalah gerbang masuk kota Ponorogo dari arah utara yang berbatasan langsung dengan kota Madiun yang sangat khas dengan nuansa reyog pada kanan dan kiri jalan. Begitu pula dengan gerbang masuk sisi timur yang berbatasan langsung dengan kabupaten Trenggalek. Tidak kalah menarik pula gerbang masuk sisi selatan yang berada di kecamatan Slahung dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Pacitan. Sisi barat berada di wilayah kecamatan Badegan dan berbatasan langsung dengan Purwantoro yang masuk dalam propinsi Jawa tengah. Tidak hanya itu bangunan berupa gerbang masuk yang menjadi perhatian utama ketika masuk ke kabupaten Ponorogo, tetapi ketika sudah masuk ke perkampungan penduduk yang lingkupnya lebih kecil gerbang masuk ini dengan mudah kita jumpai. Tetapi bentuk, motif, warna dan modelnya berbeda menyesuaikan dengan tingkat kreatifitas dan kemampuan dalam berbagai hal yang berkaitan dengan masyarakat setempat. Hal ini dapat kita jumpai pula ketika kita masuk ke dalam lingkup yang lebih kecil seperti perkampungan penduduk, seperti desa atau kecamatan-kecamatan di Ponorogo. Ada beberapa versi yang menggambarkan ragam bentuk dan model dari gerbang masuk ke

sebuah daerah. Model yang bisa kita jumpai adalah satu bentuk reyog yang dibelah menjadi dua bagian, tetapi tanpa Barongan. Model yang lain adalah Reyog dengan penampilan utuh dan lengkap dengan pemainnya berada pada salah satu sisi jalan. Hal demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah tata arsitektur ruang dalam sebuah bangunan mencerminkan tata budaya manusia yang ada didalamnya. Arsitektur sebagai budaya material tidak hanya sekedar menyusun elemen-elemen material bangunan menjadi bangunan secara utuh, akan tetapi arsitektur juga berperan pada pembentukan ruang-ruang sosial dan simbolik, sebuah “ruang” menjadi cerminan dari perancang dan masyarakat yang tinggal di dalamnya.

Karakter, garis, bentuk, elemen, ornament, bahkan model menjadi ciri khas yang pada akhirnya berusaha menyampaikan sebuah pesan yang ada dan terkandung didalamnya. Jadi jika dipandang dari segi arsitekturnya, hubungan manusia dengan budaya adalah bagaimana suatu budaya dari daerah tertentu dicirikan melalui bangunan-bangunan yang mencirikan kebudayaan-kebudayaan yang berbeda dari suku bangsa yang dianut manusia tersebut, dalam kasus ini reyog Ponorogo menjadi sebuah inti dari budaya Ponoragan yang dicirikan dalam bentuk *landmark* yang ada diseperti dan pelosok desa di Ponorogo. Dalam konteks yang lebih besar, jika kita amati lebih jauh maka dalam sebuah bangunan publik terutama yang menjadi *landmark* terjadi sebuah proses interaksi satu dengan yang lainnya berdasarkan simbol-simbol yang terkandung didalamnya. Proses interaksi ini dapat dijelaskan sebagai sebuah proses saling

mempengaruhi dalam bentuk perilaku atau kegiatan diantara anggota-anggota masyarakat (Effendy. 1989: 184) sedangkan simbolik adalah bersifat melambangkan sesuatu (Effendy. 1989: 354).

Fokus penelitian ini adalah bagaimana sebuah bangunan publik menjadi sebuah penanda adanya sebuah transaksi dalam komunikasi budaya yang mencerminkan sebuah makna tersendiri dalam tataran komunikasi budaya. Adanya proses komunikasi secara simbolik ini dapat dilihat dengan simbol-simbol yang saling berkait antara satu bangunan dengan bangunan lain dalam lingkup bangunan fasilitas publik seperti gerbang masuk kota, gapura, patung diperempatan jalan, dan patung yang berada dialun-alun Kota Ponorogo.

Secara spesifik fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana interaksi simbolik yang terjadi antar fasilitas publik di Kabupaten Ponorogo?
2. Apa makna yang terkandung dalam simbol masing-masing fasilitas publik di Kabupaten Ponorogo?

TINJAUAN PUSTAKA

Interaksi Simbolik

Menurut kamus komunikasi (Effendy. 1989: 184) definisi interaksi adalah proses saling mempengaruhi dalam bentuk perilaku atau kegiatan di antara anggota- anggota masyarakat, dan definisi simbolik (Effendy. 1989: 352) adalah bersifat melambangkan sesuatu. Simbolik berasal dari bahasa Latin "*Symbolic(us)*" dan bahasa Yunani "*symbolicos*". (Susanne K. Langer dalam Mulyana. 2008: 92), dimana salah satu

kebutuhan pokok manusia adalah kebutuhan simbolisasi atau penggunaan lambang, dimana manusia adalah satu-satunya hewan yang menggunakan lambang. keunggulan manusia yang lain dan membedakan dari makhluk lain adalah keistimewaan mereka sebagai *animal symbolicum* (Ernst Cassirer dalam Mulyana 2008: 92). Definisi interaksi adalah hal yang saling melakukan aksi, berhubungan, mempengaruhi; antar hubungan (Kam. 2001: 438). Dan definisi simbolis adalah sebagai lambang; menjadi lambang; mengenai lambang (Kam. 2001: 1066).

Oleh karena itu Interaksi simbolik adalah suatu faham yang menyatakan bahwa hakekat terjadinya interaksi sosial antara individu dan antar individu dengan kelompok, kemudian antara kelompok dengan kelompok dalam masyarakat, ialah karena komunikasi, suatu kesatuan pemikiran di mana sebelumnya padadiri masing-masing yang terlibat berlangsung internalisasi atau pembatinan (Effendy 1989: 352). Definisi singkat dari ke tiga ide dasar dari interaksi simbolik, antara lain:

1. Pikiran (Mind)

Kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama, dimana tiap individu harus mengembangkan pikiran mereka melalui interaksi dengan individu lain.

2. Diri (self)

Kemampuan untuk merefleksikan diri tiap individu dari penilaian sudut pandang atau pendapat orang lain, dan teori interaksionisme simbolis adalah salah satu cabang dalam teori sosiologi yang

mengemukakan tentang diri sendiri (the-self) dan dunia luarnya.

3. Masyarakat (Society)

Sebuah tatanan hubungan sosial yang diciptakan, dibangun, dan dikonstruksikan oleh tiap individu ditengah masyarakat, dan tiap individu tersebut terlibat dalam perilaku yang mereka pilih secara aktif dan sukarela, yang pada akhirnya mengantarkan manusia dalam proses pengambilan peran di tengah masyarakatnya.

"*Mind, Self and Society*" merupakan karya George Harbert Mead yang paling terkenal (Mead. 1934 dalam West-Turner. 2008: 96), dimana dalam buku tersebut memfokuskan pada tiga tema konsep dan asumsi yang dibutuhkan untuk menyusun diskusi mengenai teori interaksi simbolik. Tiga tema konsep pemikiran George Herbert Mead yang mendasari interaksi simbolik antara lain:

1. Pentingnya makna bagi perilaku manusia,
2. Pentingnya konsep mengenai diri,
3. Hubungan antara individu dengan masyarakat.

Tema pertama pada interaksi simbolik berfokus pada pentingnya membentuk makna bagi perilaku manusia, dimana dalam teori interaksi simbolik tidak bisa dilepaskan dari proses komunikasi, karena awalnya makna itu tidak ada artinya, sampai pada akhirnya di konstruksi secara interpretif oleh individu melalui proses interaksi, untuk menciptakan makna yang dapat disepakati secara bersama.

Hal ini sesuai dengan tiga dari tujuh asumsi karya Herbert Blumer (1969) dalam West-Turner (2008: 99) dimana asumsi-asumsi itu adalah sebagai berikut: Manusia

bertindak terhadap manusia lainnya berdasarkan makna yang diberikan orang lain kepada mereka, Makna diciptakan dalam interaksi antar manusia Makna dimodifikasi melalui proses interpretif. Individu-individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan orang lain, Konsep diri memberikan sebuah motif penting untuk berperilaku, Orang dan kelompok-kelompok dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial, Struktur sosial dihasilkan melalui interaksi sosial.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian dengan tema Interaksi Simbolik Dalam Komunikasi Budaya (Studi Analisis Fasilitas Publik Di Kabupaten Ponorogo). Penelitian ini berfokus pada fasilitas umum berupa *landmark* atau penanda lokasi dalam sebuah tempat atau lokasi. Landmark ini merupakan sebuah ciri khas yang hanya ada di Ponorogo saja. Dalam perkembangannya, landmark ini menjadi sebuah penanda yang ingin dikomunikasikan pada jaman pemerintahan dibuat. Makna dalam setiap penanda atau simbol yang muncul dalam setiap bentuk dari landmark merupakan sebuah representasi dan refleksi dari jaman yang diwakilinya. Oleh karena itu secara rinci tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan interaksi simbolik yang terjadi antar fasilitas publik di Kabupaten Ponorogo?
2. Untuk mengetahui makna yang terkandung dalam simbol masing-masing fasilitas publik di Kabupaten Ponorogo?

Gambaran manfaat diatas diambil berdasarkan perkembangan yang terjadi di wilayah Kabupaten Ponorogo khususnya sebagai *Holy Land Of Reyog* dan merupakan

rujukan utama dalam kebudayaan Ponoragan yang unik dan menarik. Manfaat diatas dapat dikatakan masih berupa usaha dalam lingkup yang kecil dalam rangka menjaga sebuah hasil karya cipta manusia yang besar dan indah dalam lingkup budaya Ponoragan.

METODE PENELITIAN

Dalam mengungkap interaksi simbolik dalam komunikasi budaya yang terjadi pada fasilitas publik diatas ,penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Prosedur dari penelitian ini sudah masuk dalam kategori penelitian kualitatif dengan ciri-ciri sebagai berikut:(1) Ciri latar belakang alamiah,(2) Manusia sebagai alat instrumen,(3) metode kualitatif,(4) analisis data secara induktif,(5)teori dari dasar, (6) Bersifat deskriptif atau apa adanya, (7) Lebih mementingkan hasil daripada proses, (8) adanya batas yang ditentukan oleh fokus, (9) ada kriteria khusus untuk keabsahan data, (10) Desain bersifat sementara, (11)Hasil Peneltian dipentingkan dan disepakati bersama (Moleong, 2000, hal. 4-8). Dalam penelitian ini penulis lakukan di beberapa lokasi di kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini penulis lakukan di beberapa lokasi di kabupaten Ponorogo

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan fasilitas umum (*landmark*)

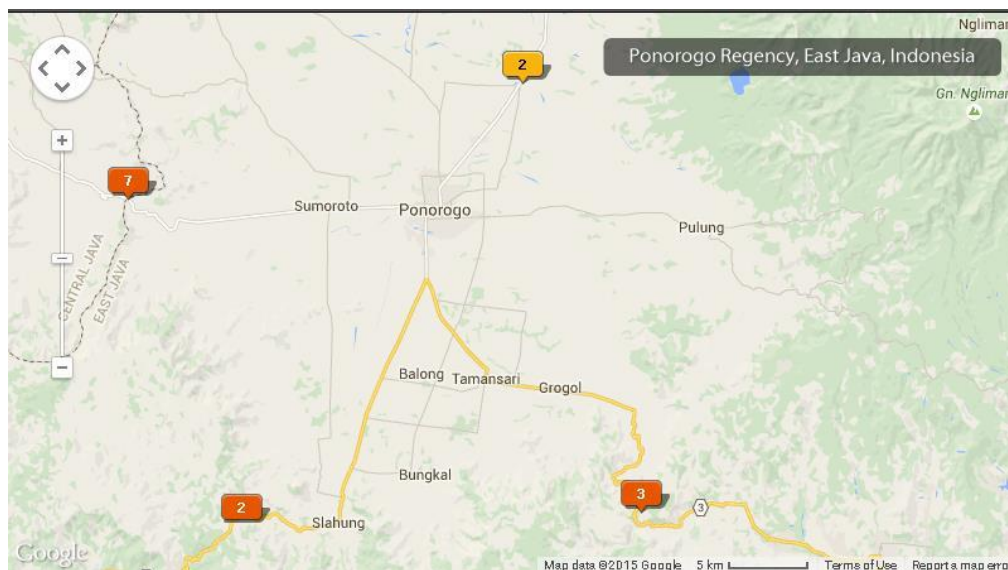
Kebudayaan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin dan individu pada suatau tatanan masyarakat dalam menangkap dan merepresentasikan dalam bentuk simbol, lambang atau tanda. Penanda-penanda inilah yang menjadi kekuatan dalam sebuah

ungkapan yang mengandung bayak makna. Disamping banyak makna, penanda-penanda ini juga mewakili suatu kondisi tertentu yang mencerminkan kondisi pada suatu massa tanda itu dibuat. Selain itu, beberapa faktor lain turut menyumbang dalam pembentukan tanda dan bentuk-bentuk komunikasi nonverbal yang terwakili dalam bentuk tugu batas, gerbang masuk atau beberapa gerbang masuk rumah penduduk.

Keberadaan tugu batas atau gerbang masuk sebuah daerah diponorogo ini sangat unik jika dibanding dengan daerah lain. jika kita perhatikan dengan seksama, ada beberapa model yang mewakili beberapa era dalam pembangunannya. Tetapi yang paling banyak dan tersebar didaerah sampai ke pelosok desa adalah dalam bentuk reyog yang dibelah menjadi dua bagian. Dalam hal ini peneliti hanya fokus pada bangunan fasilitas umum dalam bentuk tugu batas, gerbang masuk atau keluar daerah serta bangunan-bangunan non gerbang seperti patung yang berada hampir disetiap perempatan yang ada dikota Ponorogo. Hal ini sebagai fokus dalam penelitian ini yang membatasi hanya bangunan yang berkaitan langsung dengan bentuk reyog yang menjadi subyek penelitian. Gedung pemerintah yang pada dasarnya merupakan fasilitas umum tidak termasuk dalam subyek penelitian karena secara fisik tidak mencirikan bentuk atau ada kaitan secara bentuk dengan reyog. Sebagai contoh stadion batoro katong, stadion ini secara nama terkait langsung dengan reyog ponorogo, tetapi dalam bentuknya tidak ada ciri fisik yang mengingatkan kita terhadap bentuk atau wujud dari reyog itu sendiri.

Oleh karena itu, dalam fasilitas publik yang ada di Kabupaten Ponorogo terbagi menjadi empat bentuk yang mewakili beberapa era kepemimpinan bupati di

Ponorogo dengan dinamika politik yang menyertainya. Dalam hal ini dinamika politik yang menyangkut langsung dengan kesenian reyog ponorogo secara langsung.



Gambar 1 Peta penyebaran gerbang pintu masuk Kabupaten Ponorogo dari kabupaten lain. (map: google maps, proses lokasi: Adobe Lightroom)

Era Pemerintahan lama

Tugu pertama yang dipetakan berbentuk mirip pura yang terbuat dari batu bata yang disusun tinggi. Tugu ini dibangun sebagai penanda batas wilayah suatu desa, kecamatan atau wilayah administrasi tertentu. Wilayah-wilayah ini biasanya dibatasi oleh sebuah kondisi alam sebagai penanda wilayah yang nyata seperti sungai, gunung, bukit atau tanah lapang. Sehingga sering disebut sebuah wilayah sebagai *etan kali* atau *kulon kali* yang artinya timur sungai atau barat sungai sebagai sebutan pada suatu wilayah yang dibatasi oleh sungai sebagai pembatasnya. Peneliti memberikan nama untuk pada masa ini adalah era pemerintahan lama. Pemerintahan yang berlangsung antara tahun 1945 sampai tahun 1980an dengan bupati yang memerintah antara lain R Soesanto Tirtoprodjo (1944-1945), R Tjokrodiprojo (1945-1949), R Prajitno (1949-

1951), R Moehammad Mangoendiprdja (1951-1955), R Mahmoed (1955-1958), R.M. Harjogi (1958-1960), R. Dasoeki Prawirowasito (1960-1967), R. Soejoso (1967-1968), dan R. Soedono Soekirdjo (1968-1974). Melihat lebih jauh pada masa ini, dasar pembangunannya masih mengacu pada jaman kejayaan dari kerajaan Majapahit yang terletak di Trowulan, Mojokerto. Bentuk yang digunakan merupakan bentuk candi dengan susunan batu bata merah yang ditata rapi dan kuat. Hal ini dimungkinkan karena pada masa ini reyog belum menjadi sebuah ciri khas daerah yang menjadi sebuah kebanggaan yang ditata sedemikian rupa seperti sekarang, artinya reyog merupakan sebuah pertunjukkan daerah rakyat yang dianggap biasa dalam pertunjukannya.



Gambar 2. Tugu yang mempunyai bentuk seperti Pura /Candi di desa Demangan Kecamatan Jetis.

Tugu dengan bentuk Reyog (era bupati H. Soemadi (1974-1984), Bupati Drs. Soebarkah Poetro Hadiwirjo 1984-1989 dan Drs. R. Gatot Soemani 1989-1994

Bentuk yang kedua adalah berupa tugu reyog. Bentuk ini pada beberapa desa atau tempat berbeda-beda. Bentuk yang paling lazim dan banyak kita temui adalah bentuk reyog yang dibelah menjadi dua bagian. Setengah bagian dikanan dan setengah bagian dikiri, kemudian ditengah-tengahnya adalah jalan masuk menuju suatu kampung atau daerah tertentu. Bentuk ini pada beberapa daerah mempunyai detil, warna dan ukuran yang berbeda-beda. Dengan demikian, setiap tugu mempunyai keunikan dan ciri khas masing-masing. Khusus untuk bentuk ini dalam observasi penggalan data dan wawancara muncul 2 versi dalam proses pembangunannya. Data dari Drs.Budi Satriyo (badan Arsip daerah Kabupaten Ponorogo) menyebutkan bahwa tugu-tugu reyog yang dibangun merupakan prakarsa dari Bupati Drs. Soebarkah Poetro Hadiwirjo 1984-1989.

Tugu-tugu ini dibangun sebagai penanda mulai bangkitnya kesenian reyog ponorogo yang menjadi sebuah ikon budaya

daerah Ponorogo dengan mulai dipertontonkan sebagai pertunjukkan wajib dalam setiap perayaan 1 Muharram atau 1 Suro. Wawancara dengan Drs Budi Satriyo menyatakan bahwa latar belakang didirikan atau dibangunnya secara massif tugu dalam bentuk reyog ini sebagai penguat dan identitas ponorogo sebagai kota reyog sesungguhnya. Latar berlakang yang kedua adalah reyog mulai menjadi tontonan dan pertunjukkan wajib pada setiap gelaran 1 suro. Hal ini didasari dari pengamatan oleh bupati Soebarkah ketika melihat kerumunan dan ritual masyarakat Ponorogo pada waktu itu yang *melekan* dialun-alun kota Ponorogo.

Masyarakat yang *melekan* selama semalam suntuk ini mempunyai kepercayaan untuk tirakat dalam menyambut bulan yang dianggap sakral oleh masyarakat jawa yaitu bulan suro. Kerumunan massa ini bisa dimaksimalkan dengan adanya suguhan pertunjukkan reyog. Pada masa itu pertunjukkan reyog belum menjadi sebuah Festival seperti sekarang. Gagasan dari bupati Soebarkah untuk menjadikan reyog sebagai pusat pertunjukkan menjadikan reyog sebagai bentuk baru dalam model pertunjukannya.

Bentuk tugu tiga dimensi ini merupakan bentuk patung yang kelihatan dan menyerupai bentuk aslinya, artinya karakter orang yang dibuat patung benar-benar menunjukkan bentuk aslinya. Bentuk asli dengan wujud dan asesoris yang dipakai sebagaimana layaknya seorang penari yang sedang mengadakan pementasan. Bentuk yang kedua adalah dua dimensi. Yang dimaksud dengan bentuk dua dimensi ini adalah patung atau karakter penari yang

dibuat bukan merupakan sebuah patung yang sesungguhnya tetapi lebih mengarah atau lebih cenderung kelihatan seperti relief. Bentuk yang dibuat merupakan perwujudan seluruh tokoh dalam penampilan reyog, tetapi hadir dalam sebuah tembok layaknya kanvas dalam sebuah lukisan. Hal ini dapat kita temukan didesa Caluk Kecamatan Slahung dengan bentuk relief penampilan dari sebuah pertunjukkan reyog ini.



Gambar 3. Bentuk tugu reyog yang menampilkan seluruh penari lengkap dalam bentuk tiga dimensi

Pada era ini juga mempunyai bentuk yang berbeda yaitu dadak merak yang dibelah menjadi dua dengan berbagai ukuran dan bentuknya. Hal ini masih kita jumpai dengan mudah pada setiap kita memasuki sebuah kawasan desa, kampung, atau daerah tertentu. Jumlahnya masih banyak dan menyebar sampai ke pelosok desa, meskipun sekarang sudah mulai tergantikan dengan bentuk yang baru. Melihat beberapa artefak atau peninggalan yang dapat memberikan informasi mengenai waktu pembuatan tugu ini, beberapa tugu dibuat sekitar tahun 1977. Hal ini dapat ditemukan pada salah satu tugu dengan motif reyog yang ada di desa

Nongkodono Kecamatan Kauman. Dengan demikian, jika ditarik kebelakang berdasarkan bupati yang memerintah pada waktu itu maka bupati H. Soemadi yang menjabat pada tahun 1974-1984.

Menurut Drs. Jusuf Harsono (pemerhati sosial dan politik Ponorogo) masa tersebut merupakan era mulai bangkitnya reyog Ponorogo setelah di cap jelek sebagai antek-antek PKI pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, bupati Soemadi berusaha mengembalikan citra pertunjukkan reyog dengan berusaha mengangkatnya ke pentas nasional sebagai salah satu budaya khas Jawa

Timur yang ditampilkan di Anjungan Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Era Patung Singa (era pemerintahan Bupati DR.H.M.Markum Singodimejo 1994-2004)

Bentuk yang ketiga adalah *landmark* yang dibangun pada jaman Bupati Markum Singodimejo. pada jaman ini, bupati Markum Singodimejo membangun dengan massif beberapa fasilitas publik yang bercirikan langsung reyog ponorogo atau sebagai fasilitas dalam petunjukkan reyog. Diantaranya adalah panggung utama pertunjukkan yang digunakan pada setiap Festival Reyog Nasional pada sisi selatan alun-alun kota ponorogo. Disamping itu, Bupati Markum juga membangun *landmark* berupa patung-patung singa yang berada pada setiap sisi alun-alun kota Ponorogo. Pada jaman Bupati Markum Singodimejo ini, pembangunan di Ponorogo sangat pesat yang dilihat dari ciri fisik bangunan yang ada. Paling fenomenal adalah pembangunan panggung utama alun-alun yang berada disisi selatan alaun-alun. Hal ini dilakukan oleh bupati Markum karena pada tahun1995, pertunjukkan reyog yang awalnya hanya sebagai pertunjukkan pentas pada saat bulan Suro atau 1 Muharram berubah menjadi Festival Reyog dalam skala nasional.

Nama pementasan yang awalnya hanya pentas atau pertunjukkan reyog menjelang 1 suro berubah menjadi Festival Reyog Nasional dengan memperebutkan Piala Presiden Republik Indonesia. Menurut Drs Budi Satriyo, yang pada waktu itu menjadi panitia Festival Reyog Nasional mulai tahun 1995-2000, festival ini mengundang peserta atau grup reyog yang berada diluar Ponorogo, tetapi setiap kecamatan di wilayah Kabupten Ponorogo wajib untuk ikut serta dalam

Festival ini. Adanya Festival reyog Nasional ini, maka Ponorogo memerlukan sebuah panggung permanen yang dapat menampung segala aktifitas yang berkaitan dengan pertunjukkan reyog ini. Oleh karena itu sekitar tahun 1995, dimulailah pembangunan panggung utama pertunjukkan reyog yang berada disisi selatan alun-alun tersebut.

Menurut Setyo Budiono, Humas Pemerintahan Kabupaten Ponorogo, pembangunan ini berawal dari rasa kurang puasnya bupati Markum Singodimejo pada panggung semi permanen yang terbuat dari besi yang pada waktu Festival Reyog Nasional berada disisi utara alun-alun. Panggung-panggung semi permanen atau bongkar pasang ini kurang leluasa dan untuk gerakan tari dalam jumlah yang besar dengan bermain konfigurasi tari seperti yang diinginkan. Patung-patung ini pernah menjadi polemik dimasyarakat yang menentang binatang singa sebagai ikon utama kota ponorogo. Dalam kesenian reyog yang kita ketahui, binatang utama dalam tarian reyog bukanlah singa tetapi harimau. Ciri fisik yang terlihat jelas membuat perbedaan ini sempat menjadi *headline* salah satu surat kabar harian terkenal di wilayah karisidenan Madiun dan sekitar (Radar Ponorogo, 17November 2014).



Gambar 4. Gambar deretan patung singa didepan pondopo kabupaten Ponorogo yang sedang dihalau oleh Klanasewandana (foto: Dokumentasi Peneliti)

Era Modern (era pemerintahan bupati Muhadi Soeyono (2005-2010) dan Bupati Amin (2010-2015))

Peneliti memberikan kategori ini karena pembangunan setelah era bupati Markum Singodimejo tidak ada ciri khusus yang dapat kita lihat pada model tugu atau penanda-penanda dalam bentuk fisik yang kita temui. Kategori ini merupakan gabungan dari beberapa kategori yang berkaitan langsung dengan fasilitas publik yang berhubungan dengan sebuah identitas kota Ponorogo, terutama pada tugu batas, gerbang masuk dan beberapa penanda lainnya. Bentuk tugu pada kategori ini mempunyai bentuk yang sangat beragam dan sangat berbeda antar satu tugu dengan tugu yang lain. Fasilitas berupa tugu batas atau gerbang masuk ini seakan-akan menghilangkan ciri khas dari reyog itu sendiri. Hal ini dapat kita lihat pada beberapa tugu masuk ke beberapa desa yang tidak ada bentuk reyog sama sekali. Ciri khas reyog dalam bentuk dadak merak atau penari reyog yang sebelumnya bisa kita temui pada beberapa tugu yang dibangun pada masa pemerintahan bupati Soemadi, Soebarkah dan Gatot Soemani tidak bisa kita temukan lagi

sekarang. Tugu atau gerbang yang dibangun cenderung menggunakan model yang sedang populer pada saat sekarang yang disebut dengan model minimalis. Seperti yang terlihat pada gerbang masuk desa Plancungan Kecamatan Slahung yang menggunakan model minimalis dan modern. Bentuk ini merupakan bentuk modern yang dipengaruhi oleh swadaya masyarakat sendiri dalam mengkreasi gerbang masuk atau *landmark* daerah mereka sendiri-sendiri. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, intelektualitas para perangkat desa atau tokoh masyarakat setempat. Beragam bentuk dan model yang menjadi gerbang masuk suatu daerah tanpa adanya unsur reyog merupakan sebuah kondisi dimana masyarakat sudah mulai kehilangan identitas dan ciri khas masing-masing yaitu reyog Ponorogo.

Melihat lebih jauh fenomena ini, beberapa daerah juga sudah mulai meninggalkan reyog sebagai ciri utama dari kabupaten ini yaitu reyog. Dominasi kelompok sosial bahkan partai politik sedikit demi sedikit mulai menggeser keberadaan

tugu atau gerbang dengan bentuk reyog ini. hal ini dapat kita lihat dari beberapa tugu gerbang masuk di selatan kecamatan Bungkal menuju desa Munggu dengan mencantumkan atau memberikan unsur salah satu partai politik didalamnya. Kondisi dan gejolak sosial di Ponorogo pada akhir tahun 1990an dan memasuki tahun 2000an sampai sekarang mempengaruhi beberapa penanda berupa gerbang masuk atau tugu-tugu tertentu. Dalam hal ini adalah konflik dalam kelompok masyarakat dalam kelompok olahraga tradisional, pencak silat. Dua kelompok yang dominan merupakan bukan asli kelompok dari Ponorogo, tetapi kedua kelompok ini mempunyai massa yang sangat banyak di Ponorogo dengan daerah dan basis massa yang berbeda-beda. Dua kelompok ini adalah Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) dan Persaudaraan Setia Hati Winongo (PSHW). Sampai beberapa tahun inipun kedua kelompok ini sering berseteru yang

memperebutkan identitas dengan simbolisasi pendirian tugu-tugu ini.

Seperti yang dikutip pada berita tanggal 15 Januari 2013 pada beberapa media seperti televisi dan koran. Pada hari minggu tanggal 15 Januari 2013 Ratusan pendekar dari dua perguruan pencak silat bentrok di Kecamatan Slahung, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Empat rumah warga rusak akibat terkena lemparan batu. Sebuah sepeda motor yang kebetulan terparkir di lokasi bentrokan juga ikut dirusak. Menurut warga bentrok terjadi ketika massa salah satu perguruan terbesar di Ponorogo tengah berkonvoi. Entah apa pemicunya, tiba-tiba mereka saling lempar dengan massa perguruan silat lainnya. Untuk menghindari bentrok susulan, ratusan polisi berjaga di sejumlah titik rawan kerusakan (Dirgo Suyono, berita liputan 6 pagi SCTV).



Gambar 5. Tugu dengan bentuk baru dengan bentuk yang modern dan minimalis di desa Plancungan kecamatan Slahung. (Foto: Dokumentasi Peneliti)



Gambar 6. Salah satu gerbang masuk yang mencirikan sebuah organisasi massa di desa Sendang, Kecamatan Jambon.

Analisis Interaksionisme Simbolik pada Fasilitas publik di Kabupaten Ponorogo

Melihat lebih jauh dan detil terhadap bangunan yang merupakan fasilitas publik dalam hal ini adalah *landmark* yang terdapat di Kabupaten Ponorogo merupakan sebuah usaha lintas waktu dan *cross culture study*.

Landmark yang ada di Ponorogo merupakan ciri khas dari sebuah perkembangan tata kota dan tata budaya dari masyarakatnya yang terus berkembang secara dinamis. Bangunan-bangunan yang dibangun tersebut merupakan sebuah penanda adanya sebuah lompatan sejarah yang tidak bisa dihapus begitu saja. Layaknya sebuah cincin pohon yang menandakan usia dari batang pohon tersebut. Bentuk dan simbol yang terkandung di dalamnya pun mempunyai makna dan maksud tersendiri yang disiratkan dalam wujud bangunan tersebut. Konsepsi dari Herbert Blumer bahwa manusia bertindak terhadap manusia lainnya berdasarkan makna yang diberikan orang lain kepada mereka jika dikaitkan dengan beberapa kemunculan tanda yang terdapat

pada ciri fisik bangunan pada fasilitas umum dapat kita lihat Herbert Blumer (1969) dalam West-Turner (2008: 99). Sebagai contoh jika kita lihat kebelakang sesuai dengan urutan bupati yang memerintah di Kabupaten Ponorogo, maka akan ada kesamaan pola dalam nama yaitu didepan namanya terdapat gelar kehormatan kerajaan yaitu gelar Raden atau didalam penulisan disingkat dengan R.

Hal ini bisa kita lihat pada deretan nama berikut ini R Soesanto Tirtoprodjo (1944-1945), R Tjokrodiprojo (1945-1949), R Prajitno (1949-1951), R Moehammad Mangoendiprdja (1951-1955), R Mahmoed (1955-1958), R.M. Harjogi (1958-1960), R. Dasoeki Prawirowasito (1960-1967), R. Soejoso (1967-1968), dan R. Soedono Soekirdjo (1968-1974). Menurut Drs. Budi Satriyo dari Badan Arsip dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo, pembangunan tugu dengan motif atau bentuk menyerupai tugu dibangun sebelum era pemerintahan bupati Drs. Soemadi, yang artinya tugu-tugu ini dibangun pada masa bupati dengan gelar Raden didepan namanya.

Rupanya gelar Raden ini juga mempengaruhi dalam penentuan kebijakan tata kota Ponorogo waktu itu.

Pengetahuan yang diturunkan melalui institusi kerajaan dengan segala makna, tata cara dan adat istiadat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan dalam pembuatan fasilitas umum di Ponorogo. Gelar Raden merupakan gelar kebangsawanan yang diturunkan melalui garis keturunan dari keluarga raja atau keraton. Mengacu pada jaman-jaman feodal, yang berhak dalam menduduki jabatan pemerintahan adalah mereka yang mempunyai keturunan bangsawan, dan salah satu ciri dari keturunan kerajaan atau bangsawan ini adalah adanya gelar raden atau disingkat R. Meskipun pada saat sekarang gelar ini sudah tidak berpengaruh lagi terhadap status sosial dimasyarakat. Setelah era bupati dengan gelar raden, Ponorogo mulai memasuki era pemerintahan dengan gelar bupati yang menandakan gelar akademis. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa nama bupati H. Soemadi (1974-1984), Bupati Drs. Soebarkah Poetro Hadiwirjo (1984-1989), Drs. R. Gatot Soemani (1989-1994), Bupati DR.H.M. Markum Singodimejo (1994-2004), bupati Muhadi Soeyono (2005-2010) dan Bupati Amin (2010-2015).

Nama-nama yang mendominasi pada masa memasuki tahun 70an gelar Raden didepan nama-nama tersebut tidak ada, hal ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang berjalan di Ponorogo sudah tidak lagi berdasarkan sistem feodal kerajaan yang mengutamakan keturunan. Oleh karena itu, tugu atau penanda-penanda yang dibangun mengalami beberapa bentuk dan perubahan.

Pada awalnya, tugu yang dibangun menyerupai bentuk candi, mirip dengan bentuk candi-candi yang ada di daerah Mojokerto. Jika kita tarik lebih jauh lagi, maka bentuk ini mirip dengan bentuk candi-candi pada jaman Majapahit yang banyak ditemukan di daerah Trowulan Mojokerto dengan ciri khas utama yaitu bangunan tinggi dengan batu bata yang tersusun rapi. Berbeda dengan candi-candi di Pulau Bali yang mayoritas berbentuk mirip seperti di Mojokerto tetapi dengan bahan yang terbuat dari batu. Era pembangunan tugu dengan bentuk candi berakhir seiring dengan berakhirnya masa pemerintahan dengan bupati bergelar Raden yang disusul dengan bupati-bupati dengan gelar akademik. Era ini merupakan tonggak sejarah reyog menjadi sebuah ikon dan kebanggaan tersendiri dari kabupaten Ponorogo. Era tugu dengan bentuk reyog ini mulai marak pada tahun 1970an pada masa bupati Soemadi (1974-1984).

Menurut Drs Jusuf Harsono, pada masa ini merupakan masa dimana reyog mulai naik daun dalam pementasan-pementasan di istana negara. Tokoh-tokoh yang terlibat pada masa ini merupakan tokoh-tokoh sentral pada saat sekarang dalam pemerintahan dan seni budaya Ponorogo pada saat sekarang. Diantara tokoh-tokoh tersebut ada Mbah Tobron dan Mbah Wo Kucing. Kedua tokoh ini merupakan tokoh sentral dalam perkembangan reyog menuju kancah nasional. Era ini menjadikan reyog sebagai wujud kesenian tunggal yang hanya ada di Ponorogo saja, meskipun beberapa kesenian tetap eksis. Hal ini memicu pada beberapa kepentingan dalam pencitraan khususnya dalam identitas suatu lokasi atau lebih dikenal

dengan sebutan *landmark*. Bentuk-bentuk bangunan ini mulai muncul pada tahun 1977 seperti yang ada di desa Nongkodono kecamatan Kauman sampai sekarang tetap dilestarikan, bahkan beberapa mulai membangun baru dengan bentuk dan kemampuan menerjemahkan kedalam bentuk tiga dimensi patung mempunyai beberapa bentuk dan karakteristik. Dengan demikian, ketika reyog menjadi sebuah ikon tersendiri dalam sebuah tata kota, maka peran tokoh sentral dalam pemerintahan dalam hal ini adalah bupati segera menjadikan Ponorogo sebagai *holy Land of Reyog* dengan menjadikan setiap tempat penuh dengan nuansa reyog dengan berbagai model dan bentuk serta ukuran.

Kekuatan dari seorang Bupati dalam hal ini sangat mendominasi dan peka terhadap sebuah identitas yang bisa disimbolkan dengan bentuk bangunan yang sederhana tetapi sanggup menceritakan sebuahuforia budaya pada jaman tersebut. Euforia budaya pada jaman tersebut ditandai dengan pembangunan tugu dalam bentuk reyog ini yang massif dari pusat pemerintahan sampai ke pelosok desa bahkan warga masyarakat pun antusias membangun tugu dengan bentuk reyog ini di halaman rumah mereka masing-masing. Memasuki pemerintahan Bupati Markum Singodimejo yang memerintah Ponorogo pada tahun 1994-2004, reyog masih menjadiuforia yang semakin dikuatkan dengan adanya Festival Reyog Nasional. Bupati Markum Singodimejo menggagas Festival Reyog dengan skala nasional mulai tahun 1995. Hal ini merupakan refleksi dari beberapa pementasan yang menjadi tontonan wajib

dalam setiap perayaan Grebeg Suro yang diselenggarakan oleh beberapa bupati sebelumnya. Peluang untuk menjadikan reyog sebagai ikon, identitas serta budaya yang eksklusif membuat Bupati Markum Singodimejo membangun panggung utama yang permanen disisi selatan alun-alun Ponorogo.

Drs. Budi Satriyo dari Badan Arsip dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo serta peran sertanya sebagai Panitia serta ketua umum dalam Festival Reyog Nasional dari tahun 1995 sampai 2013 mengatakan bahwa bupati Markum sangat mencintai dan antusias terhadap kesenian reyog ini, karena reyog merupakan aset daerah sekaligus aset nasional dalam bidang seni budaya. Usaha bupati Markum tidak berhenti sampai pembangunan panggung utama alun-alun, tetapi berlanjut sampai pembangunan beberapa patung dengan figur binatang pada setiap sisi alun-alun. Figur binatang ini merupakan figur binatang singa yang sampai sekarang masih menjadi polemik dan wacana dalam seni dan budaya Ponorogo. Begitu pula dengan 9 patung singa betina yang ada di depan paseban alun-alun yang menghadap keselatan. Dua patung singa jantan yang berada di depan pendopo kabupaten serta di depan gedung lanati 8 yang fenomenal juga menguatkan karakter bupati Markum dalam pembangunannya.

Menurut Setyo Budiyo, Humas Pemerintah Kabupaten Ponorogo, patung-patung singa ini dibuat sebagai bentuk representasi dari bupati Markum yang nama belakangnya merupakan Singodimejo. Oleh karena itu, keberhasilan dalam pembangunan Ponorogo ini, bupati Markum mempunyai

prasasti sebagai representasi diri yang diwakilkan dengan patung binatang singa. Perdebatan ini mewakili konsepsi Blumer yang mengungkapkan makna dimodifikasi melalui proses interpretif. Bahkan perdebatan ini sampai diangkat menjadi *headline* pada sebuah harian regional Madiun (Jawa Pos Radar Ponorogo 17 November 2014).

Hal ini menjadi sebuah proses interpretatif tersendiri pada masyarakat yang ditandai dengan nama-nama grup reyog yang mengikuti Festival. grup-grup reyog tersebut antara lain Singo Budoyo Kab. Muara Enim, Singo Watu Ireng PT. Bukit Asam Muara Enim, Singo Manggolo Kota Balikpapan, Singo Budoyo Kab Pacitan, Singo Joyo Jati Kota Balikpapan, Singo Mulang Joyo Kota Metro Lampung, Karyo Singo Yudho Kab. Kutai Kartanegara, Singo Manggolo Mudho kota Malang dan beberapa grup reyog lokal yang menggunakan nama depan Singo. Hal ini menunjukkan bahwa proses intrepetasi warga masyarakat mulai terbentuk dengan kuatnya figur atau sosok bupati Markum Singodimejo. Ditambah lagi dengan ciri khas bangunan dengan wujud singa sebagai representasi bupati Singodimejo ini. Jauh melihat dengan lebih seksama, sosok binatang singa tidak ada hubungannya dengan kesenian reyog itu sendiri, karena reyog merupakan representasi dari binatang harimau atau macan, atau dalam bahasa kawi jawa disebut degan Simo. Binatang Singa tidak dikenal oleh masyarakat indonesia karena binatang singa ini merupakan binatang endemik benua Afrika, sedangkan harimau atau macan merupakan binatang endemik yang menyebar dari India sampai pulau Jawa. Meskipun kedua binatang

ini dari keluarga yang sama yaitu kucing besar. Nama-nama yang terpengaruh menjadi nama singo ini lebih dipengaruhi adanya individu-individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan orang lain. Hal ini sesuai dengan konsepsi Blumer tentang konsep diri yang berhubungan langsung dengan proses interaksi yang saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Desa-desa yang mempunyai kesenian reyog lebih cenderung menggunakan nama sesuai dengan nama asal desa masing-masing, tetapi kenyataan sekarang lebih banyak desa yang menggunakan nama yang mengandung unsur "singo" didalam nama kelompoknya. Hal ini juga memberikan sebuah kesimpulan bahwa orang dan kelompok-kelompok dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial yang sesuai dengan konsepsi Blumer. Bukti nyata dari tindakan ini adalah adanya nama-nama dengan nama "singo" di depan nama grup reyog mereka sendiri-sendiri.

Satu nama yang masih menggunakan nama harimau atau macan adalah grup reyog dari instansi pendidikan yaitu Simo Budi Utomo, yang arti nama dari Simo itu sendiri adalah harimau atau macan dalam bahasa jawa Kawi. Pemahaman orang akan pemberian nama ini mengacu pada sebuah proses interaksi dengan masyarakat atau kondisi sosial yang diciptakan oleh pemerintahan pada saat itu, terutama pada masa pemerintahan bupati Markum Singodimejo. Pada era selanjutnya mengalami perbedaan yang cukup signifikan. Pada era ini dipimpin oleh Bupati Muhadi Soeyono dan Bupati Amin. Konsepsi Blumer tentang struktur sosial dihasilkan melalui interaksi sosial merupakan bentuk nyata yang dapat

kita lihat keberadaanya berdasarkan ciri fisik yang bisa kita lihat secara nyata. Bukti adanya struktur sosial yang sedang berkembang adalah masyarakat mulai mengembangkan struktur organisasi sosial berdasarkan dominasi kelompok tertentu, dalam hal ini kelompok dalam persilatan yang mempunyai dominasi massa terbanyak yang mempunyai kekuasaan membangun tanda pada suatu tempat. Dominasi kekuasaan bermotifkan dominasi kekuatan massa dengan berbasis persilatan ini mulai muncul dan marak sekitar tahun 2008 sampai sekarang dan terus mengalami konflik.

Akhir dari konflik ini secara simbolis dapat kita lihat dengan adanya pembangunan tugu-tugu dengan nama perguruan silat mereka yang menandakan bahwa unsur pemerintahan dapat dipengaruhi oleh struktur sosial pada sebuah kondisi sosial pada suatu masyarakat yang diawali dengan interaksi satu orang atau kelompok sosial dengan individu atau kelompok yang lain.

KESIMPULAN

Dari data yang diperoleh dilapangan dapat diperoleh beberapa kesimpulan yang dapat mengarahkan hasil akhir dari penelitian ini. Data dari pemetaan berupa foto geo-tagging memberikan kontribusi yang cukup memadai dalam menganalisa lokasi *landmark-landmark* tersebut tersebar. Hal ini dapat dijadikan sebuah analisa sendiri yang menghasilkan kesimpulan bahwa pada jaman sebelum bupati Drs. Soebarkah Poetro Hadiwirjo yang menjadi bupati Ponorogo pada tahun 1984-1989 belum menemukan identitas sesungguhnya dalam kehidupan sehari-hari dalam pemerintahan, meskipun

kesenian reyog pada tahun-tahun tersebut masih tergolong murni dan belum ada sentuhan-sentuhan kreasi modern seperti sekarang ini.

Kesimpulan selanjutnya pada jaman Drs Soemadi dan Bupati Drs. Soebarkah inilah mulai muncul ide untuk membuat reyog menjadi sebuah tontonan wajib dalam setiap perayaan satu Muharram atau 1 syuro dalam penanggalan jawa. Oleh karena itu dalam masa bupati inilah digalakkan ciri khas kota ponorogo sebagai kota reyog dengan memberikan identitas reyog yang menjadi nafas utama dalam setiap sendi kehidupan masyarakat desa maupun kota. Wujud dari kentalnya nuansa reyog adalah dibangunnya tugu atau landmark dengan bentuk dadak merak yang dibelah menjadi dua bagian yang melambangkan reyog melebur dalam diri setiap pribadi orang yang melintas gerbang tersebut. Pada waktu bupati Gatot Sumani yang menjadi bupati Ponorogo tahun 1989-1994 usaha ini diteruskan meskipun sudah mulai tidak adanya inovasi dan pembangunan yang berarti.

Pada tahun 1995 merupakan tahun revolusi bagi pertunjukkan reyog dimana Festival Reyog secara nasional diadakan pertama kali di Alun-alun kota Ponorogo oleh Bupati Markum Singodimejo. Dengan adanya Festival Reyog Nasional inilah, laju perekonomian, politik dan sosial budaya juga mengalami perkembangan yang luar biasa. Dibangunnya gedung pemerintahan Kabupaten dengan lantai 8 merupakan sebuah peristiwa yang fenomenal untuk ukuran kota kecil seperti ponorogo ini. begitu pula dengan pembangunan landmark berupa patung-patung singa yang ada disepulur alun-

alun dan halaman pendopo kabupaten Ponorogo. Kesimpulan sederhana dari peristiwa diatas adalah pembangunan *landmark* diponorogo didasari beberapa kepentingan seperti politik, ekonomi dan kepentingan- kepentingan lain dibelakangnya.

Pembangunan *landmark* yang dianggap berhasil dalam melestarikan identitas dan cirikhas ponorogo sebagai kota reyog dimulai dari Bupati Drs. Soebarkah yang mencetuskan pembangunan landmark berupa reyog pada seluruh element dari kota sebagai pusat kekuasaan dan pemerintahan serta desa sebagai pemerintahan lokal yang mengawal warganya dari tingkat terendah dalam susunan kehidupan bermasyarakat. Bupati Markum dianggap berhasil dalam mengembangkan kesenian reyog, tetapi beberapa budayawan cenderung menolak dengan tegas adanya patung-patung singa yang tidak mencirikan reyog, karena pada dasarnya reyog merupakan kepala harimau, bukan singa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. (1992). *Sosiologi, Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Cleary, S. (2009). *Communication: A Hand -On Approach*. Lansdowne: Juta and co ltd.
- Dahlan, A. (1983). *Budaya Komunikasi di Indonesia : Beberapa pengamatan, Makalah yang disampaikan pada seminar/diskusi tentang budaya komunikasi dan permasalahannya di Indonesia*. Jakarta: LPKN-LIPI.
- Griffin, E. (2012). *A First Look At Communication Theory. 8th edition* . New York: Mac GrawHill.
- Gutierrez, J. (2009). *Oral Communication: A content-Based And Learning Centered Text- manual In Effective Speech Communication. Second Edition*. Philipines: Katha Publishing Co, INC.
- Hall, E. T. (1976). *Beyond Culture*. new york: Doubleday.
- Hong, Y., & Chiu, C. (2006). *Social Psycology of Culture*. New York: Psycology Press.
- Kluckholm, C., & Kroeber, A. (2005). "Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions," Harvard University Peabody Museum of American Archeology and Ethnology Papers. In L. A. Samovar, R. E. Porter, & E. R. McDaniel, *Communication Between Cultures* (p. 181). Boston: Wadsworth Cengage Learning.
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, D. (2008). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Rosengren, K. E. (2000). *Communication. An Introduction*. London: SAGE Publication Ltd. Samovar, L. A.
- Porter, R. E., & McDaniel, E. R. (2009). *Communication Between Cultures*. Boston: Wadsworth Cengage Learning.
- Steinberg, S. (1995). *Introduction to Communication Course Book 1: The Basics*. . Cape Town. South Africa: Juta & co Ltd.
- Storti, C. (2011). *Culture Matters. The Peace Corps Cross-Cultural Workbook*. Peace Corps, US.
- Sunarwinandi, I. (2000). *Komunikasi Antar Budaya*. Jakarta: Pusat Antar Universitas Ilmu- ilmu Sosial Universitas Indonesia.
- Wiryanto. (2004). *pengantar ilmu komunikasi*. jakarta: grasindo.
- Wood, J. T. (2013). *Communication in Our Lives. Sixth Edition*. Boston USA: Wadsworth Cengage Learning.

PAGELARAN WAYANG KRUCIL DAN MITOS GAGAL PANEN
(Studi Terhadap Masyarakat Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo)

Oleh:

DIAN SULUH KUSUMA DEWI ¹⁾
PINARYO ²⁾

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

ABSTRAK

Bersih desa merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang dilaksanakan oleh kebanyakan desa di Jawa. Bersih desa biasanya dilaksanakan setelah petani panen raya. Kegiatan bersih desa diyakini sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih petani terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, bersih desa merupakan acara yang ditunggu oleh masyarakatnya yang mayoritas berprofesi sebagai petani karena ada sebuah pagelaran wayang krucil yang menjadi sebuah ritual wajib pada kegiatan bersih desa setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan mitos yang dipercaya oleh masyarakat desa tempuran untuk keberhasilan panen karena jika pagelaran wayang krucil tidak ada atau diganti dengan wayang lainnya, maka gagal panen. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan secara mendalam dan menyeluruh berbagai aspek yang berhubungan dengan keterkaitan pagelaran wayang krucil dan mitos gagal panen pada masyarakat Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan metode penentuan informasi dengan cara purposive sampling. Informan pada penelitian ini adalah kepala desa, tokoh masyarakat, dalang dan beberapa masyarakat yang dianggap mengetahui keterkaitan pagelaran wayang krucil dengan mitos gagal panen di Desa Tempuran.

Kata Kunci: *wayang krucil, mitos, ritual*

PENDAHULUAN

Desa dan petani merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Desa adalah tempat dimana petani menjalani kehidupannya. Desa tidak sekedar bermakna teritorial yang secara wilayah berbeda dengan kota dalam ciri geografis dan ekologis, tetapi desa juga mempunyai karakter sosial yang unik. Banyak ilmuwan telah meneliti tentang apa itu desa dengan karakter sosialnya. Berbagai pandangan muncul sebagai bentuk penjelesaian tentang desa dan petani.

Bersih desa merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang dilaksanakan oleh kebanyakan desa di Jawa. Bersih desa biasanya dilaksanakan setelah petani panen raya. Kegiatan bersih desa diyakini sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih petani

terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Biasanya, masing-masing desa di Jawa mempunyai tradisi dan kebiasaan berbeda-beda. Namun demikian kegiatan bersih desa selalu ditandai dengan kegiatan kerja bakti, doa bersama dilanjutkan makan bersama.

Di desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, bersih desa merupakan acara yang ditunggu oleh masyarakatnya yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Rangkaian kegiatan bersih desa yang dilaksanakan di desa Tempuran adalah kerja bakti yang diikuti oleh semua lapisan masyarakat, doa bersama biasanya dipimpin oleh salah satu tokoh masyarakat dan pemuka agama, dilanjutkan dengan pagelaran wayang krucil. Sepintas wayang krucil tak jauh beda dengan wayang kulit, hanya bahan bakunya

yang berbeda. Wayang kulit terbuat dari kulit binatang, sedangkan wayang krucil dari kayu. Tetapi wayang krucil dengan wayang kulit mempunyai banyak perbedaan, jika wayang kulit cerita yang diambil ramayana atau kisah mahabharata, namun untuk wayang krucil berisikan sejarah bangsa dan penyebaran agama Islam di Pulau Jawa.

Pementasan wayang krucil sendiri dimulai dengan Tari Remong, dimana penonton disuguhi tarian khas Jawa Timuran ini dirangkai dengan tembang-tembang Jawa. Selesai Tari Remong giliran sang dalang untuk menggelar pentas. Sebelum memainkan wayang-wayang krucil terlebih dahulu sang dalang memainkan dua buah wayang golek yang bertindak sebagai waranggono dan sindennya. Dalam cerita wayang krucil lebih menonjolkan sejarah perkembangan Islam masuk ke Pulau Jawa dengan berbagai tokoh seperti Wali Songo, Pangeran Diponegoro maupun Untung Suropati. Di Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo, pagelaran wayang krucil diyakini menjadi rangkaian ritual yang harus diikuti oleh semua petani karena menjadi salah satu kunci keberhasilan petani dalam mendapatkan panen. Mitos gagal panen jika kegiatan bersih desa tidak menggelar wayang krucil atau mengganti dengan wayang kulit. Mitos tersebut dipercayai masyarakat Desa Tempuran selama berpuluh tahun lamanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang bersifat komprehensif, mendalam dan *natural*

(alamiah) tentang pagelaran wayang krucil dan mitos gagal panen di Desa Tempuran Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo.

Hal ini sejalan dengan pendapat Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2002: 3) yang menyatakan "metodologi kualitatif" sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.

- INFORMAN

Dalam penelitian ini, peneliti memilih beberapa orang untuk dijadikan informan yaitu Kepala Desa Tempuran, Tokoh masyarakat, Dalang Wayang Krucil dan beberapa masyarakat yang dianggap memahami keterkaitan pagelaran wayang krucil dan mitos gagal panen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Tempuran Bapak Misnianto yang menjelaskan bahwa malam tirakatan dan pagelaran wayang krucil sangat erat kaitannya dengan sejarah berdirinya desa Tempuran yang awalnya merupakan pecahan dari desa Tumpak pelem.

Pada tahun 1948, terjadi peperangan antara kelompok komunis Trenggalek dengan masyarakat Desa Tumpak Pelem. Peperangan yang terjadi berada tepat di perbatasan desa. Sehingga dinamailah desa Tempuran (peperangan) karena menjadi lokasi peperangan. Ritual yang dilaksanakan di Desa Tempuran Pagelaran wayang krucil di Desa Tempuran dilaksanakan setiap tahun dalam

kegiatan bersih desa. Rangkaian kegiatan bersih desa dilaksanakan beberapa acara yaitu pengajian dan pagelaran wayang krucil yang disertai dengan ritual ruwat desa. Ruwat desa dilaksanakan bertujuan untuk menjauhkan desa Tempuran dari musibah dan bencana. Pada tahun 70-an, desa tempuran mengalami banyak musibah dan bencana.

Pembunuhan dilakukan oleh sepasang suami istri, mati dengan cara gantung diri, mengubur hidup-hidup bayi yang baru dilahirkan, paceklik, banjir, jembatan putus. Menurut hasil wawancara dengan bapak Suroso pada tanggal 14 Juni 2014 di Desa Tempuran, bahwa desa Tempuran dipercayai memiliki rojo pati sehingga pada awal berdirinya desa Tempuran seringkali terjadi kejadian-kejadian tragis dan bencana alam. Kepala desa kemudian melakukan pendekatan dan diskusi dengan para sesepuh desa. Para sesepu kemudian melakukan malam tirakatan yang kemudian mendapatkan wangsit (pesan khusus) agar dilaksanakan malam tirakatan dan ritual ruwatan desa dengan menggunakan wayang krucil.

Sebelum ruwatan desa dilaksanakan, para kamituwo di 4 dusun di desa Tempuran (dusun manding, dusun poko, dusun kudo sentono, dusun sentono) melakukan brokohan (makan bersama dengan menu ingkung) kemudian dilanjutkan ritual nyekar (tabur bunga) di 4 lokasi danyangan (tempat yang dikeramatkan). Setelah selesai ruwatan dan pagelaran wayang krucil, para kamituwo menanam sesaji di 4 danyang. Empat dusun yang ada, setiap dusunnya memiliki danyangan.

1. Isi Cerita Wayang Krucil (Sejarah Kerajaan Blambangan)

sumber primer yang bisa dikaitkan dengan keberadaan Blambangan, yakni Pararaton, yang meski tak menyebutkan nama Blambangan namun kemunculan nama Arya Wiraraja dan Lamajang akan membantu kita menyibakkan kabut yang menyelimuti sejarah awal Kerajaan Blambangan.

Istana Timur Majapahit

Untuk melacak sejarah kemunculan Kerajaan Blambangan diakui cukup sulit. Minimnya data dan fakta membuat para ilmuwan kesukaran untuk menentukan sejarah awal kerajaan ini. Namun, bila kita memetakan sejarah awal Majapahit pada masa Sri Nata Sanggramawijaya alias Raden Wijaya, maka sedikit celah akan terkuak bagi kita guna menuju pencarian awal mula Blambangan. Pelacakan ini bisa dimulai dari peristiwa larinya Sanggramawijaya (R. Wijaya) dan kawan-kawan ke Songeneb (kini Sumenep) di Madura guna meminta bantuan kepada Arya Wiraraja dalam usaha menjatuhkan Jayakatwang yang telah menggulingkan Kertanagara di Singasari. Menurut Pararaton, Raden Wijaya berjanji, bahwa jika Jayakatwang berhasil dijatuhkan, kelak kekuasaannya akan dibagi dua, satu untuk dirinya, satu lagi untuk Arya Wiraraja. Arya Wiraraja ini ketika muda merupakan pejabat di Singasari, yang telah dikenal baik oleh Raden Wijaya yang tak lain menantu dan keponakan Kertanagara.

Ketika Raden Wijaya berhasil mendirikan Majapahit tahun 1293, Arya Wiraraja diberi jabatan sebagai pasangguhan

dengan gelar Rakryan Mantri Arya Wiraraja Makapramuka.

Namun, rupanya Wiraraja pada tahun 1296 sudah tidak menjabat lagi, hal ini sesuai dengan isi Prasasti Penanggungan yang tak mencatat namanya. Muljana menjelaskan bahwa penyebab menghilangnya nama Wiraraja dari jajaran pemerintahan Majapahit karena pada 1395, salah satu putranya bernama Ranggalawe memberontak terhadap Kerajaan lalu tewas. Peristiwa ini membuat Wiraraja sakit hati dan mengundurkan diri, seraya menuntut janji kepada Raden Wijaya mengenai wilayah yang dulu pernah dijanjikan. Pada 1294, raja pertama Majapahit itu mengabdikan janjinya dengan memberi Wiraraja wilayah Majapahit sebelah timur yang beribukota di Lamajang (kini Lumajang). Babad Raja Blambangan memberi tahu kita bahwa wilayah Lumajang yang diberikan pada Arya Wiraraja adalah berupa hutan, termasuk Gunung Brahma (kini Gunung Bromo) hingga tepi timur Jawi Wetan (Jawa Timur), bahkan hingga Selat Bali ("Wit prekawit tanah Lumajang seanteronipun kedadosaken tanah Blambangan").

Menurut teks Babad Raja Blambangan, Arya Wiraraja memerintah di Blambangan sejak 1294 hingga 1301. Ia digantikan putranya, Arya Nambi, dari 1301 sampai 1331. Setelah Nambi terbunuh karena intrik politik pada 1331, takhta Kerajaan Blambangan kosong hingga 1352. Yang mengisi kekosongan ini adalah Sira Dalem Sri Bhima Chili Kapakisan, saudara tertua Dalem Sri Bhima Cakti di Pasuruan, Dalem Sri Kapakisan di Sumbawa, dan Dalem Sri Kresna Kapakisan di Bali. Kesaksian Babad Raja Blambangan berkesesuaian dengan apa yang

tertulis pada Pararaton. Dikisahkan, pada 1316 Nambi, seorang pengikut setia Raden Wijaya sekaligus Patih Amamangkubhumi Majapahit yang pertama, memberontak pada masa pemerintahan Jayanagara, seperti yang dijelaskan Pararaton. Riwayat lain, yakni Kidung Sorandaka, menceritakan pemberontakan Nambi terjadi setelah kematian ayahnya yang bernama Pranaraja (sementara Kidung Harsawijaya menyebut ayah Nambi adalah Wiraraja). Pararaton mengisahkan, Nambi tewas dalam benteng pertahanannya di Desa Rabut Buhayabang, setelah dikeroyok oleh Jabung Tarewes, Lembu Peteng, dan Ikal-Ikalan Bang. Sebelumnya, benteng pertahanan di Gending dan Pejarakan yang dibangun Nambi, dapat dihancurkan oleh pasukan Majapahit. Akhirnya Nambi sekeluarga tewas dalam peperangan itu.

Menurut Nagarakretagama, yang memimpin penumpasan Nambi adalah Jayanagara sendiri. Dalam peristiwa ini, jelas Nambi berada di Lamajang dan dibantu oleh pasukan Majapahit Timur, wilayah yang menjadi kekuasaan Wiraraja. Namun belum jelas, apakah Wiraraja masih hidup saat peristiwa Nambi berlangsung. Pemaparan di atas, dalam upaya menjelaskan keberadaan Blambangan, tentu belum dirasakan memuaskan, karena walau bagaimana pun, semua data di atas tak menyebutkan nama Blambangan. Untuk itu, kita langkahkan lagi penelesuran kita ke masa yang lebih kemudian, yakni masa Perang Paregreg, peperangan antara "Keraton Barat" versus "Keraton Timur" di wilayah Majapahit.

“Kedaton Wetan” dan Perang Paregreg 1406 M

Bila merujuk ke Pararaton, kita akan mengetahui bahwa ayah angkat sekaligus kakek dari istri Bhre Wirabhumi, yakni Bhre Wengker yang bernama Wijayarajasa (suami Rajadewi), mendirikan keraton baru di Pamotan dan bergelar Bhatara Parameswara ring Pamotan. Bhatara Parameswara ini juga adalah mertua Hayam Wuruk karena putrinya yang bernama Paduka Sori meikah dengan raja ini. Setelah Bhatara Parameswara wafat tahun 1398 M, keraton di Pamotan diserahkan kepada Bhre Wirabhumi. Bila menghubungkan berita Pararaton dengan berita pada Sejarah Dinasti Ming, kita bisa melihat adanya kesesuaian.

Kronik Cini memberitakan bahwa pada 1403 M di Jawa terdapat “Kerajaan Barat” dan “Kerajaan Timur” yang tengah berseteru. Diberitakan bahwa pada tahun itu Bhre Wirabhumi, penguasa Kerajaan Timur, mengirim utusan kepada Cina guna mendapatkan pengakuan Kaisar Cina. Hal ini membuat Wikramawardhana, penguasa Kerajaan Barat, marah dan segera ia membatalkan masa kependetaannya yang telah dimulai sejak 1400. Selama itu yang menjalankan roda pemerintahan adalah istrinya, Kusumawardhani. Dengan begitu jelas, bahwa penguasa “Kerajaan Timur” yang diperikan oleh Sejarah Dinasti Ming ini mengacu pada penguasa di Pamotan, yakni Bhre Wirabhumi. Namun kemudian, muncul masalah baru: apakah istilah Kerajaan Timur pada masa Bhre Wirabhumi sama dengan istilah “Istana Timur” pada masa Arya Wiraraja? Pada 1403 Kaisar Yung Lo di Cina mengirim utusan ke Jawa guna

memberitahukan bahwa dirinyalah yang menjadi Kaisar Cina. Hubungan Cina-Jawa makin mesra ketika Wikramawardhana menerima stempel perak berlapis emas dari Kaisar Yung Lo.

Sebagai terima kasih, Wikramawardhana mengirim utusannya ke Cina dengan membawa upeti. Rupanya kiriman stempel perak-emas itu membangkitkan keinginan Bhre Wirabhumi untuk mengirimkan upeti ke Cina. Pengirim utusan oleh Wirabhumi ini memiliki maksud yang lebih khusus: meminta pengakuan dari Kaisar Cina. Pengesahan resmi dari Kaisar Cina terhadap Bhre Wirabhumi di Kerajaan Timur membuat geram Wikramawardhana yang tengah bertapa. Ketika mendengar Bhre Wirabhumi diakui oleh Kaisar Cina, pada 1403 Wikramawardhana kembali mengemban pemerintahan. Tiga tahun berikutnya, 1406, baik Kerajaan Barat maupun Kerajaan Timur sama-sama meminta dukungan kepada kerabat istana Majapahit lain untuk mendukung mereka. Pararaton mencatat, Perang Paregreg (“perang yang berangsur-angsur”) antara Wikramawardhana-Bhre Wirabhumi terjadi pada tahun Saka naga-lor-anahut-wulan atau 1328 Saka (1406).

Setelah Wikramawardhana berhasil mengalahkan Kerajaan Timur, Bhre Wirabhumi melarikan diri saat malam dengan menumpang perahu. Namun ia berhasil dikejar oleh Bhra Narapati Raden Gajah, kepalanya dipancung lalu dibawa ke Majapahit untuk dipersembahkan kepada Bhra Hyang Wisesa. Kepala Bhre Wirabhumi kemudian ditanam di Desa Lung. Candinya dibangun pada tahun itu juga (1406), bernama Grisapura. Perang ini berawal dari

ketidaksetujuan Bhre Wirabhumi, anak Sri Rajasanagara atau Hayam Wuruk dari selir, atas penunjukan Suhita, putri pasangan Kusumawardhani (putri Hayam Wuruk) dengan Wikramawardhana, menjadi penguasa Majapahit. Sebelumnya, pada 1389 Wikramawardhana, menantu sekaligus keponakan Hayam Wuruk, dinobatkan menjadi raja, lalu setelah 12 tahun memerintah, Wikramawardhana turun takhta dan menjadi pendeta. Penunjukan Suhita oleh Wikramawardhana tidak disetujui Bhre Wirabhūmi. Wirabhumi, walau sebatas anak dari seorang selir, merasa lebih berhak atas takhta Majapahit karena ialah satu-satunya anak lelaki dari Hayam Wuruk. Ia melihat bahwa Suhita kurang berhak atas takhta tersebut karena hanya seorang wanita dari seorang putri Hayam Wuruk, yakni Kusumawardhani. Bhre Wirabhumi sendiri, menurut Nagarakretagama, menikah dengan Nagawardhani, sedangkan menurut Pararaton ia menikah dengan Bhre Lasem yakni Sang Alemu alias Indudewi, kemenakan Hayam Wuruk sekaligus anak dari Rajadewi (Rajasaduhitendudewi).

Rajadewi dalam Nagarakretagama, yang identik dengan Bhre Daha menurut Pararaton, ini adalah bibi Hayam Wuruk. Setelah Bhre Wirabhumi tewas, Bhre Daha, ibu angkat Bhre Wirabhumi yakni Rajasaduhitendudewi, diboyong oleh Hyang Wisesa ke Kedaton Kulon, Majapahit. Siapa orang yang menggantikan Bhre Wirabhumi menjadi penguasa Daha, tidak diketahui. Pararaton hanya menceritakan bahwa pada 1359 Saka (1437 M), yang menjadi penguasa Daha adalah Jayawardhani Dyah Jayeswari, putri bungsu Bhre Pandan Salas. Setelah

Perang Paregreg, takhta Majapahit masih dipegang oleh Wikramawardhana hingga 11 tahun kemudian. Pada 1349 Saka (1427 M) Wikramawardhana wafat, takhta Majapahit lalu diserahkan kepada Suhita. Setelah Bhre Wirabhumi tewas, Kerajaan Timur bersatu dengan Kerajaan Barat. Namun, di lain pihak banyak daerah bawahan di luar Jawa yang melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Dari uraian di atas, sama, bahwa sumber-sumber tertulis yang lebih tua, yakni Nagarakretagama pada abad ke-14 tidak mencantumkan nama “Blambangan” untuk wilayah yang dikuasai Arya Wirajaja; pun Pararaton yang ditulis sekitar abad ke-15 dan 16 tidak menyebutkan nama itu, melainkan “Istana Timur” untuk wilayah yang dikuasai oleh Bhre Wirabhumi. Istilah “Blambangan” sebagai sebuah kerajaan baru muncul pada abad-abad selanjutnya, yakni abad ke-18 pada masa Mataram-Islam, dua abad setelah era Paregreg. Namun ada pengecualian, naskah Bujangga Manik yang ditulis sekitar akhir abad ke-15 atau awal abad ke-16 menyebutkan nama tempat “Balungbungan” yang terletak di ujung timur Jawa Timur sebagai tempat ziarah kaum Hindu (hal ini akan dibahas pada uraian selanjutnya).

Panarukan, Pelarian Dyah Ranawijaya Raja Kediri

Namun, sebelum putus asa, ada data menarik yang akan membimbing kita menelusuri kabut sejarah kerajaan ini. Data itu menguraikan sebuah peristiwa yang terjadi pada akhir abad ke-16, setengah abad setelah masa Paregreg, yakni penyerangan pasukan Demak ke Daha, ibukota Kediri. Saat itu, Kediri merupakan kerajaan utama setelah

berhasil menyerang Majapahit. Muljana (1986: 300) menuturkan, pasukan Demak yang Islam menyerang Tuban pada 1527; setelah Tuban, laskar Demak menyerang Daha, ibukota Kediri pada tahun itu juga. Raja Kediri, Girindrawardhana Dyah Ranawijaya (diidentifikasi sama dengan tokoh Bhatara Wijaya atau Brawijaya dalam serat) melarikan diri ke Panarukan, sementara Kediri jatuh ke tangan Demak. Dyah Ranawijaya sendiri sebelumnya pernah mengalahkan Bhre Kertabhumi Raja Majapahit pada 1478. Penyerangan itu dalam rangka balas dendamnya, karena ayahnya, Suraprabhawa Sang Singawikramawardhana yang duduk di keraton Majapahit diserang oleh Bhre Kretabhumi, sehingga menyebabkan Suraprabhawa mengungsi ke Daha, Kediri. Pendapat ini didukung oleh Prasasti Petak yang menyebutkan, keluarga Girindrawardhana pernah berperang melawan Majapahit lebih dari satu kali. Berita dari Serta Kanda yang menyebutkan bahwa Dyah Ranawijaya, setelah Daha jatuh ke pasukan Demak, melarikan diri ke Bali, menurut Muljana, tak dapat dibuktikan oleh data sejarah yang lebih sahih. Sebaliknya, Dyah Ranawija melarikan diri ke Panarukan (kini nama kecamatan di Kab. Situbondo, Jawa Timur, utara Banyuwangi). Panarukan sendiri ketika itu merupakan sebuah pelabuhan yang cukup ramai dan sejak abad ke-14 telah menjadi salah satu pangkalan kapal terpenting bagi Majapahit. Dengan tibanya Ranawijaya ke kota pelabuhan ini, Kerajaan Panarukan ini bisa dianggap sebagai kelanjutan Kediri. Dan berdasarkan penuturan orang Belanda kemudian, kerajaan Panarukan ini dapat diidentifikasi sebagai

Kerajaan Blambangan. Hal ini sesuai berita Portugis yang menyebutkan adanya utusan Kerajaan Hindu di Panarukan ke Malaka pada 1528—setahun setelah Dyah Ranawijaya diserang Demak. Utusan dari Panarukan ini bermaksud mendapatkan dukungan orang-orang Portugis, yang tentunya bermaksud menghadang pengaruh Islam di Jawa. Bukti lain bahwa Panarukan adalah (bagian dari) Blambangan adalah peristiwa terbunuhnya Sultan Trenggana raja ke-3 Demak pada 1546. Hanya saja, belum ada kepastian, sejak kapan pusat pemerintahan Blambangan pindah dari Panarukan ke wilayah yang lebih timur. Pada saat Kerajaan Demak memperlebar wilayah kekuasaannya di bawah kepemimpinan Sultan Trenggana, sebagian wilayah Jawa Timur berhasil dikuasainya. Pasuruan ditaklukan pada 1545 dan sejak saat itu menjadi kekuatan Islam yang penting di ujung timur Jawa. Akan tetapi, usaha Demak menaklukkan Panarukan/Blambangan mengalami kendala karena kerajaan ini menolak Islam. Bahkan, pada 1546, Sultan Trenggana sendiri terbunuh di dekat Panarukan, setelah selama tiga bulan tak mampu menembus kota Panarukan. Barulah ketika Pasuruan berhasil dikuasai Demak, posisi Blambangan makin terdesak.

Pada 1601 ibukota Blambangan dapat direbut oleh pasukan Pasuruan yang dibantu Demak. Setelah dikalahkan oleh aliansi Demak-Pasuruan, Kerajaan Blambangan mulai dimasuki budaya dan ajaran Islam. Pusat pemerintahan pun bergeser ke selatan, ke daerah Muncar. Pada masa Kesultanan Mataram, penguasa Blambangan kembali menyatakan diri sebagai wilayah yang merdeka. Usaha para penguasa Mataram

dalam menundukkan Blambangan mengalami kegagalan. Hal ini mengakibatkan kawasan Blambangan (dan Banyuwangi pada umumnya) tidak pernah masuk ke dalam budaya Jawa Tengahan. Maka dari itu, sampai sekarang kawasan Banyuwangi memiliki ragam bahasa yang cukup berbeda dengan bahasa Jawa baku. Pengaruh Bali-lah yang lebih menonjol pada berbagai bentuk kesenian dari wilayah Blambangan.

Dari uraian di atas terkesan bahwa cikal bakal Blambangan terdapat di Panarukan, jadi bukan berasal dari “Istana Timur” di Lumajang peninggalan Arya Wiraraja atau istana pada masa Perang Paregreg. Namun demikian, diperlukan sejumlah pertimbangan lain untuk memutuskan apakah tepat bila kita menyebutkan bahwa Panarukan merupakan awal mula Kerajaan Blambangan. Hal ini akan lebih terkuak pada uraian-uraian di bawah ini.

Pangeran Tropauna (Pangeran Kedhawung) dan Tawang Alun (Sinuhun Macan Putih)

Pada abad ke-16, Blambangan berada dalam kekuasaan Bali. Kerajaan Gelgel di Bali yang dirajai Dalem Watuengong (1460-1550) mampu memperluas wilayahnya hingga ke bagian timur Jawa Timur, Lombok dan Sumbawa. Setelah Dalem Watuengong digantikan oleh putranya yakni Dalem di Made, satu persatu wilayah kekuasaan Gelgel melepaskan diri, di antaranya Blambangan dan Bima (tahun 1633) dan Lombok (tahun 1640).

Pada 1651, muncul pemberontakan Gusti Agung Maruti atas Gelgel. Ketika Dewa Agung Jambe menggantikan Dalem di Made, kembali Gelgel merebut wilayahnya yang

terlepas pada 1686. Raja ini lalu memindahkan pusat kerajaan ke Samarapura di Klungkung. Pada abad ke-17, Blambangan sendiri dipimpin oleh Santaguna. Setelah Blambangan ditaklukkan pada 1636 oleh Sultan Agung Mataram, Santaguna digantikan oleh Raden Mas Kembar alias Tropauna pada 1637. Ketika itu, ibukota masih di Lumajang. Pada 1639, raja ini memindahkan keraton ke Kedhawung, sekitar Panarukan, Situbondo, sehingga bergelar Pangeran Kedhawung. Kalimat ini menjelaskan bahwa cikal bakal Blambangan adalah Lumajang—dan untuk ini kita bisa menarik garis ke masa Arya Wiraraja. Pada masa Mas Tropauna ini, Blambangan selalu menjadi rebutan antara Bali dan Mataram. Perebutan pengaruh antardua kerajaan itu berakhir setelah kedua penguasa kerajaan itu wafat, Sultan Agung pada 1646 dan Dewa Agung pada 1651.

Pada 1649, setelah berusia sepuh, Mas Tropauna bertapa di hutan Kedhawung menjadi begawan. Setelah Mas Tropauna menjad begawan, pemerintahan digantikan oleh putranya yakni Tawang Alun pada 1652. Menurut cerita, raja ini melakukan samedhi dan memunyai gelar baru, Begawan Bayu. Di tempat bertapanya, ia mendapat petunjuk untuk berjalan “ngalor wetan” bila ada “macan putih”. Ia pun harus duduk di atas macan putih dan mengikuti perjalanan macan putih tersebut menuju hutan Sudhimara (Sudhimoro). Tawang Alun lalu mengelilingi hutan seluas 4 km². Tempat itulah yang selanjutnya dijadikan pusat pemerintahan dan diberi nama keraton Macan Putih (tahun 1655). Ketika di bawah kepemimpinan Raja Tawang Alun atau Sinuhun Macan Putih, Blambangan berusaha melepaskan diri dari

Mataram. Tulisan Raffles (2008: 511) menerangkan bahwa pada 1659 M atau 1585 Saka, raja Blambangan yang baru dilantik (tidak disebut namanya), dengan dibantu angkatan perang dari Bali, kembali melakukan pemberontakan. Susuhunan Amangkura I (Sunan Tegal Arum), pengganti Sultan Agung dari Mataram, lalu mengirimkan pasukannya untuk mengatasi pemberontakan laskar Blambangan-Bali ini dan berhasil menguasai ibukota Blambangan. Diberitakan, raja Blambangan—yang dipastikan adalah Tawang Alun—dan para pengikutnya melarikan diri ke Bali. Sementara itu, pasukan Mataram pimpinan Tumenggung Wiraguna terserang wabah penyakit yang memaksa dirinya menarik pasukannya kembali. Mendengar itu, Amangkura memutuskan untuk menghukum sang tumenggung dengan alasan hendak memberontak. Pada masa, Tawang Alun memerintah, wilayah kekuasaan Blambangan meliputi Jember, Lumajang, Situbondo.

Dikisahkan bahwa Raja Tawang Alun berwawasan terbuka, karena meski merupakan penganut Hindu yang taat, raja ini tidak melarang komunitas Islam berkembang. Yang menjadi fokusnya adalah bagaimana caranya melawan arus dominasi asing. Sebelum memindahkan ibukota ke Macan Putih, Tawang Alun sempat mendirikan ibukota di wilayah Rowo Bayu (kini termasuk Kec. Songgon, Banyuwangi)—jauh sebelum Mas Rempeg Jagapati menetap di Rowo Bayu. Kepindahan ini diakibatkan serangan adik Tawang Alun sendiri, yakni Mas Wila, yang memberontak. Menurut cerita penduduk setempat, tawang Alun mendirikan sebuah tempat bertapa di Rowo Bayu ini

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2002, “Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek”, Penerbit Rineka Cipta, Cetakan Keduabelas, Edisi Revisi V, Jakarta.
- Dhavamony, Mariasusai, 1995, “*Fenomenologi Agama*”, Penerbit Kanisius, Yogyakarta
- Hadiwijono, Harun, 1985, “*Kebatinan Jawa Dalam Abad XIX*”, BPK Gunung Mulia, Cetakan Kedua, Jakarta
- Kurnianto, Rido, 2012, “*Laporan Hasil Penelitian Strategis Nasional, Tema: Integrasi Nasional dan Harmoni Nasional, Judul Penelitian Prospek Akulturasi Budaya Sebagai Nilai Agama Dan Budi Pekerti Pada Seni Salawatan Gembrung*”
- Minsarwati, Wisnu, 2002, “*Mitos Merapi dan Kearifan Ekologi: menguak bahasa mitos dalam kehidupan masyarakat jawa pegunungan*”, Kreasi Wacana,
- Moleong, Lexy J, 2000, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Remaja Rosda Karya,
- Stange, Paul, 1998 “*Politik Perhatian Rasa Dalam Kebudayaan Jawa*”, Penerbit LKiS, Yogyakarta

**VARIASI LEKSIKAL HANTU DALAM BAHASA JAWA DAN BAHASA INGGRIS: ANALISIS
KONTRASTIF PERPEKTIF ETNOLINGUISTIK**

Oleh:

ALIP SUGIANTO

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

Email: Sugiantoalip@gmail.com

ABSTRAK

Variasi leksikal hantu memiliki keanekaragaman dalam masyarakat, baik masyarakat Jawa maupun Masyarakat Inggris. Dari dua wilayah kebudayaan yang berbeda tersebut ternyata memiliki beberapa kesamaan budaya, utamanya istilah dalam menginterpretasikan wujud atau sosok makhluk halus yang berada di wilayah kebudayaan tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini Peneliti ingin mengungkap beberapa keunikan dari dua bahasa tersebut dari sudut pandang etnolinguistik antara lain: Pertama mengungkap dengan mendeskripsikan variasi leksikal hantu dalam kedua bahasa tersebut, Kedua, membandingkan kesamaan dan perbedaan dari variasi leksikal tersebut secara makna Kultural, ketiga, mengetahui jenis-jenis dari variasi leksikal tersebut. Adapun metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menjelaskan istilah-istilah variasi leksikan yang diperoleh dari Buku Harry Potter serta Tuturan Masyarakat Jawa yang umum di gunakan dalam menyebut istilah Hantu, sedangkan analisisnya menggunakan analisis etnosaint. Hasil penelitian ini menunjukkan ada persamaan kultural dari kedua bahasa tersebut jika ditinjau dari sejarah dari asal kedua bahasa tersebut, dan secara umum dalam penyebutan istilah hantu terdapat tiga istilah berdasarkan kategori yaitu laki-laki, perempuan dan umum.

Kata Kunci: *Variasi Leksikal dan Etnolingistik*

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dengan faktor interaksi dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, dalam proses interaksi satu dengan yang lain maka di perlukan sebuah bahasa sebagai media pengantar. Bahasa yang di gunakan mencerminkan identitas suatu daerah tertentu, sebagai contoh bahasa Jawa identik dengan masyarakat Jawa, contoh lain, bahasa Inggris yang digunakan penutur, meskipun penuturnya bukan asli orang Inggris maka bahasa yang di gunakan berdasarkan ciri-ciri yang dapat diketahui secara umum menunjukkan daerah asli bahasa tersebut yaitu identik dengan Negara Inggris. Dari kedua contoh diatas maka, dapat disimpulkan bahwa bahasa memiliki kaitan

erat dengan daerah tertentu, bahasa Jawa yang identik digunakan oleh masyarakat Jawa pada umumnya. Bahasa Jawa memiliki jumlah penutur yang relatif banyak yakni dengan jumlah 75.500.000 penutur dan menempati urutan ke sebelas terbanyak di dunia, yang menarik jumlah penutur bahasa Jawa lebih banyak dari pada bahasa Indonesia dengan jumlah penutur bahasa Indonesia 17.050.000 dan menempati urutan ke 56 di dunia. Sedangkan bahasa Inggris yang menempati urutan ke tiga di dunia dengan jumlah penutur 322.000.000 juta jiwa. Berikut ini data berdasarkan rilis dari Summer Institute of Linguistic (SIL:2006). Dari 6.809 bahasa di dunia, urutan terbanyak penutur: (1) Mandarin (Cina) 885.000.000 (2) Spanyol 332.000.000 (3) **Inggris**

322.000.000 (4) Bengali 189.000.000 (5) Hindi 182.000.000 (6) Portugis 170.000.000 (7) Rusia 170.000.000 (8) Jepang 125.000.000 (9) Jerman 98.000.000 (10) Wu (Cin) 77.000.000 (11) **Jawa 75.500.000** (12) Korea 75.000.000 (13) Perancis 72.000.000 (14) Sunda 27.000.000 (15) Melayu 17.600.000 (16) Bahasa Indonesia 17.050.000 (17) Madura 13.694.000

Jika ditelusuri lebih mendalam bahasa Jawa dan bahasa Inggris ada kaitan erat terutama memiliki kesamaan dari budaya dari kedua asal bahasa tersebut. Bahasa Jawa tidak terlepas dengan budaya masyarakatnya yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai Jawanya, masyarakat Jawa kaya akan tradisi dan budaya. Salah satu tradisi yang masih melekat pada masyarakat Jawa ialah ritual-ritual dan masih percaya pada kekuatan gaib, yang bersifat spiritual magis dan tak jarang dengan mengundang ruh halus (baca: Hantu).

Di masyarakat, khususnya Jawa mengenal banyak istilah-istilah Hantu berdasarkan jenis dan karakternya. Masyarakat Inggris pun demikian, masih menjunjung budaya negaranya, Inggris sebagai salah satu Negara maju dan modern di dunia juga masih menggunakan sistem pemerintahan monarki, di mana sebuah Negara dipimpin oleh pangeran atau raja di dalam sebuah kerajaan. Dalam bahasa Inggris pun ternyata juga mengenal istilah-istilah Hantu meskipun Inggris sebuah Negara modern. Kedua bahasa dan budaya tersebut sangat menarik dikaji dengan menggunakan pendekatan etnolinguistik. Etnolinguistik adalah cabang dari ilmu linguistik yang menyelidiki hubungan antara bahasa dengan sikap dan pandangan masyarakat. Istilah

etnolinguistik berasal dari kata 'etnologi' dan 'linguistik', yang lahir karena adanya penggabungan antara pendekatan yang biasa dilakukan oleh para ahli etnologi (kini: antropologi budaya) dengan pendekatan linguistik dalam studi semacam ini sebenarnya terjadi timbal balik yang menguntungkan antara disiplin etnologi, yakni (a) kajian linguistik yang memberikan sumbangan bagi etnologi dan (b) kajian etnologi yang memberikan sumbangan bagi linguistik (Shri Ahimsa Putra, 1997: 3).

Dalam etnolinguistik salah satu topik yang dipelajari adalah taksonomi sebagaimana pendapat berikut. *"The term ethnoscient refers to systems of classification that people construct to organize knowledge of their universe. The term ethnoscience is derived from the Greek word ethnos, meaning "people" or "a division of people." such systems are based on taxonomic hierarchies in which some entities are ordered hierarchically and other entities contrasted taxonomically. Studies ethnoscientific domains in different cultures demonstrated the variety of underlying assumption that can be used to group entities. For example, the Papago, a native people living in Arizona, devide the category of life forms into two large Classes: living thing and plants.* (Nancy Bonvillain, 2003:57)

"Ethnoscient merujuk pada sistem klasifikasi bahwa orang membangun untuk mengatur pengetahuan alam semesta mereka. Istilah ethnoscience berasal dari ethnos kata Yunani, yang berarti "orang" atau "sebuah divisi dari orang." sistem tersebut didasarkan pada hirarki taksonomi di mana beberapa entitas berurutan secara hirarki

dan entitas lain kontras taksonomi. Studi domain ethnoscientific dalam budaya yang berbeda menunjukkan berbagai asumsi dasar yang dapat digunakan untuk entitas kelompok. misalnya, Papago, seorang penduduk asli yang tinggal di arizona, membagi kategori bentuk kehidupan menjadi dua kelas besar: makhluk hidup dan tanaman". Sebagaimana penjelasan diatas pada dasarnya taksonomi adalah sistem klasifikasi khususnya dalam dunia tumbuh-tumbuhan dan binatang. Taksonomi adalah praktek dan ilmu klasifikasi. Kata ini juga digunakan sebagai kata benda hitungan: Sebuah taksonomi, atau skema taksonomi, adalah klasifikasi tertentu ("taksonomi"), diatur dalam struktur hirarki. Biasanya hal ini dilakukan oleh hubungan antara sub-tipe, juga disebut hubungan generalisasi-spesialisasi, atau kurang formal, hubungan orangtua-anak. Sebagai contoh, mobil yaitu sub-tipe dari kendaraan. Jadi setiap mobil juga kendaraan, tetapi tidak setiap kendaraan menjelaskan mobil. Secara sistematis taksonomi yang hirarkis adalah pohon struktur dari klasifikasi obyek-obyek yang sudah ditentukan.

Merujuk pada teori taksonomi tersebut, Pada penelitian ini berfokus pada istilah-istilah Variasi leksikal Hantu dalam bahasa Jawa dan Inggris. Peneliti memilih istilah-istilah Hantu karena jenis-jenis variasi leksikal Hantu dalam bahasa Jawa dan bahasa Inggris memiliki banyak keanekaragaman dan bentuk. Sebagai contoh istilah-istilah Hantu dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Bahasa Inggris	Bahasa Jawa
Devil	Setan

Dracula	Jenglot
Vampire	Pocong

Hantu bagi masyarakat merupakan suatu hal yang menakutkan yang bersifat mistis, yang biasanya dapat dilihat menggunakan indra keenam atau orang-orang yang memiliki kelebihan di bidang supranatural yang diperoleh dengan berbagai cara seperti semedi, bertapa, puasa atau tirakat. Masyarakat Jawa terkenal dengan hal-hal yang berbau dengan mistik, bahkan dalam sebuah media penulis pernah membaca di tribunnews menjelang pemilihan legislatif banyak para calon anggota dewan yang masih percaya menggunakan perklenikan dengan jasa para dukun. Tentu ini berkaitan dengan kepercayaan individu masing-masing, hal ini menunjukkan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan makhluk halus masih digunakan untuk menghalalkan berbagai cara, selain hal tersebut ada berbagai cara pesugihan kilat dengan mempunyai tuyul dan babi ngepet yang masih dipercaya masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa kaya akan istilah-istilah gaib yang penuh dengan misteri dengan melabeli berbagai istilah-istilah setan dengan bervariasi seperti itu.

Adapun tujuan penelitian antara lain (1) Pertama untuk mendeskripsikan variasi leksikal bahasa setan dalam bahasa Jawa dan bahasa Inggris (2) Membandingkan persamaan dan perbedaan variasi bahasa setan dalam bahasa Jawa dan bahasa Inggris (3) Mengetahui jenis-jenis variasi leksikal bahasa hantu terhadap kedua bahasa tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut ini: Pertama, Persiapan dengan melakukan pencarian terkait nama-nama setan dalam bahasa Jawa dan bahasa Inggris dalam kamus bahasa Inggris maupun dalam internet dan mencari informan sebagai bahan diskusi terkait hal-hal yang berbau mistis magis untuk mengetahui istilah-istilah Hantu dalam bahasa Jawa. Kedua, Pengumpulan data leksikon hantu dalam bahasa Inggris diperoleh dari novel Harry Potter, kamus-net, kamus Hassan Shadily, sedangkan leksikon bahasa Jawa penulis peroleh dari cerita masyarakat, kemudian setelah data terkumpul penulis klasifikasikan, dipilih dan dipilah berdasarkan keakuratan serta kebenaran secara umum. Ketiga, analisis data dengan cara hasil yang telah diklasifikasikan dalam bahasa Jawa dan Inggris dianalisis

berdasarkan jenis, bentuk dan arti menggunakan taksonomi etnosaint.

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori etnosaint menggunakan taksonomi untuk klasifikasi leksikon Hantu dengan kategori yang berbeda dalam sebuah bahasa dan dibagi ke dalam dua kelas, yaitu: jenis dan bentuk. Data dalam bahasa Inggris dan bahasa Jawa kemudian dikontraskan untuk membandingkan dua bahasa yang berbeda untuk mendapat persamaan dan perbedaan kedua bahasa tersebut. Hal ini didapatkan dengan cara mencocokkan kedua bahasa dilihat dari segi kelompok kata, arti dan pemakaian.

Data yang telah diidentifikasi dan diklasifikasi kemudian dianalisis secara kontrastif untuk mendapatkan persamaan dan perbedaannya. Berikut ini data leksikon hantu dalam bahasa Jawa:

No	Nama	Jenis	Bentuk, Ciri-ciri dan Makna Kultural
1	Babi ngepet	U	adalah manusia biasa yang mempunyai "ilmu" untuk mengubah dirinya jadi siluman berwujud babi, tujuannya untuk mencuri uang atau benda-benda berharga milik orang lain. Babi Ngepet biasanya beroperasi pada malam hari, untuk jadi Babi Ngepet seseorang harus mempunyai partner yang tugasnya untuk menjaga lilin sebab konon katanya kalau lilinnya sampai padam si manusia yang menjelma jadi babi tersebut tidak bisa kembali kewujud aslinya.
2	Banospati	U	Banaspati berupa api yang berkobar seperti manusia yang di penuhi api. Ia sering juga mengganggu manusia menyerang dan meminum darahnya, sehingga dikategorikan setan pengganggu
3	Buto	U	Raksasa bertubuh hijau (hijau tua) Watak: beringas, memakan korban manusia. Tinggal: Buto Ijo di Pohon besar, kalo jadi peliharaan biasanya dibuatkan kamar khusus.
4	Cumplong	U	berupa tengkorak manusia yang tinggal kepalanya saja. Uniknya ia bersuara seperti ayam. Kruk!!! Kruk!!! Kruk!!! Tempat-tempat yang lebat dan rimbun yang disukainya.
5	Demit	U	Istiah Jawa menyebut hantu secara umum
6	Gundul pringis	U	Merupakan setan yang berupa kepala orang yang lagi ketawa meringis, kepala orang itu nyambung ke usus dan

			jantungnya menurut orang-orang hantu ini jenis hantu yang ganas. Di kalangan masyarakat Jawa Tengah, terutama bagian selatan, nama hantu ini sudah lama dikenal. Wujudnya mirip buah kelapa. Kalau dipegang tiba-tiba menyeringai! Buah kelapa itu punya mata, hidung, mulut, dan telinga! Mirip kepala manusia! Kalau menggoda orang biasanya pada malam hari.
7	Genderuwo	L	Makhluk halus yang menyerupai kera tapi berbadan tinggi dan besar, makhluk ini suka tinggal di pepohonan, seperti pohon beringin dan pohon-pohon besar lainnya karena wujudnya yang seperti kera raksasa
8	Jailangkung	U	Berbentuk permainan yang mengundang roh halus yang masuk kedalam permainan tersebut. Permainan ini terbuat dari bamboo.
9	Jenglot	L	Perawakannya kecil dengan tubuh tak lebih dari 12 cm dan rambutnya yang panjang, jarang dan kaku melewati kaki.
10	Jrangkong	U	Hantu berbentuk kerangka manusia secara utuh.
11	Kebalak	U	adalah setan yang sebenarnya adalah kejadian saja seperti halnya babi ngepet. Bentuknya seperti kelelawar dan berperut tambun hingga menyentuh tanah hingga menimbulkan suara Blek!1 Blek!!! Blek!!! Dan memang ia bisa menyedot Harta benda orang yang rumahnya didatangi. Biasanya dibelakang rumah terdengar suara Blek!!! Blek!! Blek!!! Dan tahu-tahu harta didalam rumah hilang. Ia dikategorikan setan pencuri.
12	Kuntilanak/ Jenny Greenteeth	P	Hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal karena melahirkan dan anak tersebut belum sempat lahir. Nama "kuntilanak" kemungkinan besar berasal dari gabungan kata "bunting" (hamil) dan "anak".
13	Medhon	U	adalah hantu atau setan yang berwujud putih seperti pocong, akan tetapi dapat menjadi panjang atau bahkan bisa mengecil. Medhon biasanya berada di kerumunan bambu. Ia memiliki ludah yang bisa membuat orang mati dan tubuh korbannya berbintik-bintik hitam.
14	Memedi	U	Wujudnya adalah nyala api seperti lilin, bergerak mengambang di udara. Kadang juga mengecoh org yg sedang keluar malam, dari kejauhan seperti rombongan org membawa obor tp bgt dekat ternyata cuma obor tanpa org yg membawa.
15	Momok	U	Hantu (untuk menakut-nakuti anak);
16	Pocong	U	Penggambaran pocong bervariasi. Dikatakan, pocong memiliki wajah berwarna hijau dengan mata yang kosong. Penggambaran lain menyatakan, pocong berwajah rata dan memiliki lubang mata berongga atau tertutup kapas dengan wajah putih pucat. Mereka yang percaya akan adanya hantu ini beranggapan, pocong merupakan bentuk protes dari si mati yang terlupa dibuka ikatan kafannya sebelum dikubur.
17	Setan	U	Adalah istilah umum bahasa Jawa untuk menyebutkan hantu
18	Suster ngesot	P	Setan yang gejala dengan ngesot dilantai berpenampilan seorang suster dirumahsakit. Biasanya hantu ini berada di rumah sakit
19	Sundel	P	Digambarkan dengan wanita berambut panjang dan

	bolong		bergaun panjang warna putih. Digambarkan pula terdapat bentukan bolong di bagian punggung yang sedikit tertutup rambut panjangnya sehingga organ-organ tubuh bagian perut terlihat. Dimitoskan hantu sundel bolong mati karena diperkosa dan melahirkan anaknya dari dalam kubur
20	Tuyul/ Imp	L	Makhluk halus berwujud anak kecil yang kerdil, perawakannya gundul, dan suka mencuri. Tuyul juga kadang-kadang digambarkan bekerja pada seorang majikan manusia untuk alasan tertentu. Adapun tuyul digambarkan mempunyai sifat seperti anak-anak normal biasa dimana dia harus mencari induk semang sebagai ibu kandungnya.
21	Tuyul intuk	P	Tuyul intuk ini sama dengan tuyul pada umumnya namun berjenis kelamin perempuan
22	Wewe gombel/nymph	U	Sebuah istilah dalam tradisi Jawa yang berarti roh jahat atau hantu yang suka mencuri anak-anak, tapi tidak mencelakainya. Konon anak yang dicuri biasanya anak-anak yang ditelantarkan dan diabaikan oleh orang tuanya. Wewe Gombel biasanya akan menakut-nakuti orang tua si anak atas sikap dan perlakuannya kepada anaknya sampai mereka sadar

Variasi leksikal Hantu dalam bahasa Inggris:

No	Nama	Jenis	Bentuk, Ciri-ciri dan makna kultural
1	Ariel	P	Setan disebut-sebut dalam novel Shakespeare <i>The Tempest</i> . <i>Ariel</i> ini adalah setan yang dipenjarakan dalam pohon dan dibebaskan oleh tukang tenung Prospero dengan janji dia akan berbakti menjadi kaki tangan dan mata telinga untuk Prospero.
2	Banshee	P	Sejenis Peri
3	Brownie	P	adalah makhluk halus yang berpenampilan mirip dengan tuyul.
4	Cambion	U	blasteran manusia-setan ini sudah menyerupai persis seperti anak manusia biasa. <i>Cambion</i> ini berwajah malaikat dan sangat cerdas, dan mampu membujuk siapa saja untuk menuruti kehendaknya.
5	Devil	U	Setan secara umum
6	Doppelganger	U	Hantu ini bisa mendirikan bulu roma, karena teman-teman kita bisa bertemu dengan kembaran diri kita, padahal fisik kita yang asli berada di tempat lain. Jadi dengan kata lain ada dua pribadi serupa pada saat yang sama di tempat yang berbeda. <i>Doppelganger</i> ini dianggap sebagai firasat buruk bahwa seseorang akan segera menemui ajalnya. Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln konon melihat <i>doppelganger</i> (kembarannya) sesaat sebelum dia tewas ditembak.
7	Dracula	U	Hantu bertaring yang suka menghisap darah manusia
8	Elf	P	Hantu ini mempunyai sosok makhluk yang kecil, mempunyai daun telinga yang runcing (<i>pointed ears</i>) dan senang mengganggu dan mengusili manusia.
9	Evil	U	Hantu secara umum
10	Fairy	P	sering dinamakan dengan peri, mempunyai kegembiraan untuk menculik bayi dan menukarnya dengan bayi lain (<i>changeling</i>) dan untuk menangkai <i>fairy</i> ini maka orang akan memasang 'besi dingin' (besi ini bak racun untuk

			<i>fairy</i>), jimat (<i>charm</i>) dari tanaman herbal <i>rowan</i> di depan pintu rumah
11	Ghost	U	Hantu secara umum
12	Goblin	U	adalah makhluk halus yang berpenampilan mirip dengan tuyul. Namun kalau tuyul dalam legenda kita, gemar mencuri di rumah yang disatroninya, maka <i>goblin</i> ini gemar mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Dia tidak suka dilihat oleh manusia dan bekerja pada malam hari dan sebagai imbalan si pemilik rumah cukup menyediakan makanan secukupnya (biasanya bubur atau madu)
13	Gnomes	U	Hantu ini mempunyai sosok makhluk yang kecil, mempunyai daun telinga yang runcing (<i>pointed ears</i>) dan senang mengganggu dan mengusili manusia.
14	Hallowens	U	Hantu berupa kepala manusia berapi yang menyala nyala
15	Incubus	L	Hantu cowok yang mempunyai sosok hitam bersayap mengerikan ini mempunyai kegemaran untuk melakukan senggama dengan wanita pada saat tertidur. Dia akan hadir berulang kali menyetubuhi wanita dalam alam mimpinya dengan tujuan untuk mendapat keturunan anak setan
16	Leprechaun	U	Hantu ini mempunyai sosok makhluk yang kecil, mempunyai daun telinga yang runcing (<i>pointed ears</i>) dan senang mengganggu dan mengusili manusia.
17	Lucifer	U	konon merupakan jelmaan setan, setelah dia diusir dari taman firdaus. Karena lekat dengan asosiasi api neraka, maka dalam bahasa Belanda <i>lucifer</i> merupakan metafora dari 'korek api'
18	Lmp	U	Makhluk halus berwujud anak kecil yang kerdil, perawakannya gundul, dan suka mencuri. Tuyul juga kadang-kadang digambarkan bekerja pada seorang majikan manusia untuk alasan tertentu. Adapun tuyul digambarkan mempunyai sifat seperti anak-anak normal biasa dimana dia harus mencari induk semang sebagai ibu kandungnya.
19	Mephisto	U	dilukiskan dengan wajah yang horor menakutkan, dapat terbang (karena memiliki sayap seperti kelelawar). <i>Mephisto</i> ini menjadi tenar dari legenda Jerman <i>Faust</i> , dimana si Faust ini menggadaikan jiwanya (<i>sell his soul</i>) kepada <i>mephisto</i> untuk menggapai tujuannya.
20	Nymph	P	digambarkan sebagai perawan cantik tanpa busana yang senang bercengkerama di atas daun teratai yang besar. Karena perangnya yang lepas bebas dalam memancarkan seksualitasnya, maka dalam terminologi psikologi ada kata <i>nymphomania</i> yaitu kelainan hiperseksual, di mana seseorang melakukan aktivitas seksual yang berlebihan seperti melakukan masturbasi setiap hari
21	Ogre	U	Raksasa bertubuh hijau (hijau tua) Watak: beringas, memakan korban manusia. Tinggal: Buto Ijo di Pohon besar, kalo jadi peliharaan biasanya dibuatkan kamar khusus.
22	Pixies	U	Hantu ini mempunyai sosok makhluk yang kecil, mempunyai daun telinga yang runcing (<i>pointed ears</i>) dan senang mengganggu dan mengusili manusia. Di dalam bahasa kita dia dinamakan 'kurcaci'
23	Poltergeist	U	dimaknai sebagai fenomena dimana di dalam sebuah rumah dan disaksikan oleh manusia, benda-benda

			beterbangan tanpa ada yang melemparkan, disertai dengan suara aneh seperti ketukan pintu, gelegar suara logam, suara menyeramkan dan kadang-kadang disertai dengan hempasan orang yang berada di dalam rumah itu
24	Succubus	P	yaitu hantu cewek yang gemar bersetubuh dengan para pria dan hadir dalam mimpi dalam ujud wanita yang membangkitkan birahi. Konon bila seseorang sering disetubuhi oleh <i>incubus/succubus</i> ini, maka kesehatannya akan terus merosot dan akhirnya meninggal.
25	Trool	L	Makhluk halus yang menyerupai kera tapi berbadan tinggi dan besar, makhluk ini suka tinggal di pepohonan, seperti pohon beringin dan pohon-pohon besar lainnya karena wujudnya yang seperti kera raksasa
26	Vampire	L	Manusia berbentuk mumi yang sudah diberi balsam, kalau di Jawa sejenis pocong

Keterangan: Laki-laki disingkat L, Perempuan:P dan Umum : U

Data kedua bahasa Hantu dalam bahasa Jawa dan bahasa Inggris dapat dilihat dalam table, yang menarik dalam sajian table ternyata terdapat beberapa jenis hantu dalam bahasa Jawa dan bahasa Inggris memiliki kemiripan hantu dalam kedua bahasa tersebut, selain juga terdapat kemiripan budaya dalam kedua wilayah teritorial antara Jawa dan Inggris hal ini dapat dibuktikan dengan jenis-jenis nama-

nama hantu dalam kedua bahasa tersebut secara budaya memiliki kesamaan. Berikut ini data persamaan/kemiripan dan perbedaan nama-nama hantu dalam bahasa Jawa dan bahasa Inggris: (1) Persamaan: Bahasa Jawa dan bahasa Inggris memiliki persamaan dalam berbagai nama-nama Hantu, yakni berupa jenis, bentuk/ciri-ciri dan aspek budaya sebagai berikut.

No	Jenis		Bentuk	Aspek budaya
	Jawa	Inggris		
1	Buto	Ogre	Sama	Sama-sama berbentuk seram, besar dan berwarna gak kehijaun
2	Genderuw o	Trool	Sama	Sama sam-berbentuk besar dan menyerupai kera yang tinggal di pohon-pohon besar
3	Tuyul	Imp	Sama	Kedua jenis seta ini sama-sama berbadan kecil dan sama suka mencuri uang
4	Dracula	Jenglot	Besar dan kecil	Dracula berbadan besar sedangkan jenglot berbadan kecil, sama-sama bertaring dan menghisap darah manusia.
5	Pocong	Vampire	Sama mayat	Sama-sama berbentuk mayat, tetapi pocong dalam bahasa Jawa berbentuk putih kain mori sedangkan vampire mayat yang berpakaian rapi
6	Banospati	Halloween	Sama berbentuk kepala	Sama-sama berbentuk kepala berapi, namun halloween digambarkan agak besar.

Selain itu dalam bahasa Inggris untuk istilah setan memiliki banyak variasi leksikal hantu namun memiliki arti yang sama yaitu devil, evil, ghost, dan goblin. Sedangkan bahasa Jawa terdapat kata setan dan demit

untuk istilah umum menyebutkan nama hantu. Disamping itu ternyata dalam bahasa Inggris juga terdapat hantu yang memiliki kegembiraan mencuri uang, dan ada pula yang berbentuk seram dan menakutkan seperti

buto yang digambarkan berbadan besar berwarna hijau tentu ini berkaitan dengan aspek budaya masing-masing (2) Perbedaan: Dalam konteks budaya, terdapat perbedaan culture masyarakat sehingga mengakibatkan bervariasi istilah bahasa hantu dalam bahasa Jawa dan bahasa Inggris yang pada hakekatnya sama dalam makna sedangkan dalam bahasa Inggris terdapat lebih banyak bervariasi dalam jenis hantu kurcaci dibandingkan dalam bahasa Jawa. Dalam bahasa Inggris untuk kurcaci terdapat beberapa leksikal yang memiliki arti dan fungsi sama diantaranya: *elf, fairy, pixies, gnomes, leprechaun*. Sedangkan bahasa Jawa yang hampir menyerupai kurcaci secara model dan bentuk yaitu jeglot dan tuyul untuk kedua hantu tersebut digambarkan berbentuk kecil namun berbeda fungsi.

KESIMPULAN

Setelah mendeskripsikan jenis-jenis variasi leksikal hantu dalam bahasa Jawa dan bahasa Inggris kemudian membuat analisis kontrastif, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

(1) Bahasa Jawa dan bahasa Inggris memiliki persamaan dalam berbagai jenis Hantu, yakni jenis secara umum ada penyebutan secara pasti berdasarkan gender hantu laki-laki, perempuan dan penyebutan secara umum. Selain itu terdapat hantu yang memiliki kesamaan fungsi dalam bahasa Jawa maupun bahasa Inggris yaitu tuyul dengan lpm, Dracula dengan jeglot, vampire dengan pocong.

(2) Budaya yang membedakan variasi nana-nama leksikal hantu antara bahasa Jawa dan bahasa Inggris.

(3) Kedua bahasa tersebut jika ditinjau dari sistem memiliki kesamaan budaya pada jaman dahulu, yaitu sama-sama menggunakan sistem monarki dalam pemerintahan Leksikal hantu dalam bahasa Jawa dan bahasa Inggris sangat bervariasi karena setiap daerah memiliki budaya yang berbeda. Sehingga mempengaruhi orang untuk melebeli kata hantu sesuai dengan budayanya sendiri.

REFERENSI

- Bonvillain, Nancy. 2003. *Language, culture and communication the meaning of message*. Amerika. Prentice Hall.
- Shri Ahimsa Putra. 1997. *Etnolinguistik: Beberapa Bentuk Kajian*. Yogyakarta: Balai Penelitian Bahasa.
- Summer Institute of Linguistic (SIL: 2006)*

**TELAAH NILAI-NILAI ISLAMI DALAM “SENI BADUT SINAMPURNA” DI DESA PLOSO
KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN DALAM
PERSPEKTIF KOSMOLOGI JAWA-ISLAM**

Oleh:
IMAM MAHFUD

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
Email: imammahfud1951@gmail.com

ABSTRAK

Badut Sinampurna adalah seni tradisional yang telah lama berkembang di Desa Ploso, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan Jawa Timur. Tepatnya, di sebelah timur ujung Kabupaten Pacitan, berdekatan dengan perbatasan Kabupaten Ponorogo. Badut Sinampurna belum banyak dikenal oleh masyarakat kabupaten Pacitan, bahkan di daerah kecamatan Tegalombo sendiri, kesenian ini belum begitu populer. Melalui penelitian ini penulis menemukan nilai-nilai Islami yang terkandung dalam pentas kesenian tersebut berupa: (1) hubungan antara manusia dengan Tuhannya, (2) penghormatan terhadap Rasulullah SAW, (3) silaturahmi, (4) cinta tanah air, dan pelestarian alam, dan (5) kesyukuran. Nilai-nilai islami tersebut diliput oleh suasana kosmologi Islam Jawa. Akan tetapi di lapangan ditemukan fakta bahwa kesenian ini masih perlu dipoles sedemikian rupa agar lebih menarik bagi wisatawan luar daerah dan luar negeri untuk berkunjung menyaksikannya, atau mengundang untuk pentas di lingkungannya. Dengan demikian, layaklah kiranya jika objek budaya ini dijadikan objek penelitian lanjutan, dengan maksud menggali lebih dalam nilai-nilai kemanusiaan Jawa Islam untuk kemudian diadakan pembinaan dan mengangkatnya sebagai asset lokal yang bernilai ekonomis.

Kata kunci: *Nilai-nilai Islami, Kosmologi Islam Jawa, Seni Badhut Sinampurna*

PENDAHULUAN

Seni Badut Sinampurna yang telah lama berkembang di Desa Ploso, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan Jawa Timur, tepatnya, di sebelah timur ujung Kabupaten Pacitan, berdekatan dengan perbatasan Kabupaten Ponorogo, merupakan seni tradisional yang dipertahankan oleh masyarakat dan pemerintah desa. Penulis mengamati bahwa keberadaan kesenian tersebut sangat strategis sebagai; (1) pencerahan keagamaan, (2) alat perekat sosial, (3) asset budaya yang bernilai ekonomis bagi masyarakat desa Ploso, (4) media penerangan pembangunan, (5) media penguatan cinta tanah air, (6) media pelestarian alam, (7) ungkapan rasa syukur, dan (7) hiburan. Dengan demikian, layaklah

kiranya jika objek budaya ini dijadikan objek penelitian, dengan maksud menggali lebih dalam nilai-nilai islami yang terkandung dalam kosmologi Islam Jawa untuk kemudian diadakan pembinaan dan mengangkatnya sebagai asset lokal yang bernilai religious dan ekonomis.

Masyarakat Desa Ploso memandang bahwa jagad raya merupakan satu kesatuan yang serasi dan harmonis, tidak lepas satu dengan yang lain dan selalu berhubungan. Jagad raya terdiri dari *jagad gede* (makrokosmos – alam di luar manusia) dan *jagad cilik* (mikrokosmos – alam manusia). Antara *jagad gede* dan *jagad cilik* tidak selalu dalam keadaan stabil, namun mengalami juga kelabilan. Kelabilan yang terjadi di dalam *jagad gede*, sebagai akibat dari ulah yang

ditimbulkan oleh *jagad cilik*, atau sebaliknya. Keteraturan di dalam *jagad gede* dan *jagad cilik* adalah terkoordinasi dan apabila masing-masing berusaha keras ke arah kesatuan dan keseimbangan, maka hidup akan lebih tentram dan harmonis. Masyarakat Jawa selalu berusaha menjaga keharmonisan jagad raya. Apabila terjadi disharmoni dalam jagad raya, mereka biasanya menyelenggarakan upacara-upacara.

Upacara ruwatan merupakan salah satu bentuk usaha masyarakat Jawa untuk menyeimbangkan jagad raya dari kelabilan. Manusia oleh karena suatu sebab terkena *sukerta* (noda), maka ia harus diruwat (dibebaskan) dari malapetaka (mangsa Batara Kala). Dalam upacara ruwatan ini, masyarakat Desa Ploso telah mantab dengan keyakinannya menanggapi Badut Sinampurna untuk mencegah bahaya yang datang ke Desa Ploso. Seiring dengan berkembangnya pemahaman manusia sebagai sebuah upaya untuk memenuhi kebutuhan akan perlindungan dan rasa aman dari bencana, masyarakat Jawa sejak dari nenek moyangnya hingga saat ini justru telah mempunyai kesadaran dan tingkat pemahaman yang tinggi akan *kosmos*.

Kosmosentrisme spiritual yang kini didengungkan manusia modern sebagai kritik dan alternatif terhadap paradigma *antroposentrisme sekuler* telah lama dimiliki masyarakat Jawa (Rahma, 2008).

Dimulai dari timbulnya sebuah pertanyaan, mengapa terjadi bencana? Kemudian dalam benak mereka memahami bahwa mereka tidak memperhitungkan lagi keseimbangan alam. Manusia melewati batas menuntut pada alam sehingga mencemari

bumi dan mengakibatkan lingkungan hidup manusia menjadi buruk. Manusia mengeksploitasi terlalu banyak air bawah tanah sehingga mengakibatkan permukaan bumi tenggelam. Manusia menebang hutan secara berlebihan sehingga mengakibatkan erosi tanah (Rahma, 2008).

Tak dapat dipungkiri bahwa bersamaan dengan meningkatnya rasionalitas dan majunya teknologi manusia, ruang hidup manusia malah semakin menyusut, lingkungan ekologi terus memburuk dan telah mencapai pada tahap yang berbahaya. Proses ini berlaku seakan hukum alam yang berjalan tanpa disadari namun niscaya akan terjadi. Proses yang dijalani manusia membawa mereka menuju timbulnya kekacauan dan bencana (Rahma, 2008).

Paham hidup orang Jawa mengajarkan keseimbangan *mikrokosmos*, *makrokosmos* dan *metakosmos* menjadikan masyarakat Jawa sangat menjaga keseimbangan dan keteraturan. Bagi masyarakat Jawa yang lebih mengutamakan *logos* daripada *chaos*, manusia dan alam merupakan lingkup kehidupan yang tak terpisahkan dalam dunia orang Jawa. Manusia mula-mula hidup dalam lingkup kecil masyarakat. Kemudian melalui masyarakat ia bersinggungan dengan alam, memahami irama-irama dan denyut nadi kehidupan melalui peristiwa alam, terjadinya siang-malam, musim hujan dan musim kering, sekaligus manusia belajar bahwa alam bisa mengancam sekaligus memberikan berkah tak ternilai bagi kehidupan manusia. Eksistensi manusia sangat tergantung kepada alam sehingga manusia mempunyai kewajiban untuk menempatkan diri dalam keselarasan

kosmos jika menginginkan keselarasan dan mencapai kesejatan (Rahma, 2008).

Denyut nadi alam sedemikian rupa dihayati dan disalami sehingga menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan nada irama kehidupannya sebagai bagian kecil dari alam. Selanjutnya, alam semesta atau *makrokosmos* yang terungkap dalam indera manusia dipahami sebagai cerminan dari alam gaib atau *metakosmos*, suatu sumber kekuatan tertinggi dimana manusia menggantungkan eksistensinya.

Kosmos, atau keseluruhan kehidupan merupakan suatu kesatuan di mana setiap gejala, baik itu yang material maupun spiritual mencerminkan “makna” melebihi apa yang nampak dalam inderawi (Rahma, 2008).

Berangkat dari kenyataan ini, rumusan masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah : (1) Nilai-nilai islami apa sajakah yang terkandung dalam pentas seni Badut Sinampurna? (2) Bagaimana hubungan antara nilai-nilai islami terhadap kosmologi Islam Jawa dalam Seni Badut Sinampurna?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah model penelitian etnografi, yaitu penelitian untuk mendeskripsikan kebudayaan sebagaimana adanya. Model ini berupaya mempelajari peristiwa kultural, yang menyajikan pandangan hidup subyek sebagai obyek studi. Studi ini akan terkait bagaimana subyek berpikir, hidup, dan berperilaku. Tentu saja perlu dipilih peristiwa yang unik yang jarang teramati oleh kebanyakan orang (Endraswara 2003).

Penelitian etnografi adalah kegiatan pengumpulan bahan keterangan atau data

yang dilakukan secara sistematis mengenai cara hidup serta berbagai aktivitas sosial dan berbagai benda kebudayaan dari suatu masyarakat. Berbagai peristiwa dan kejadian unik dari komunitas budaya akan menarik perhatian peneliti etnografi. Peneliti justru lebih banyak belajar dari pemilik kebudayaan, dan sangat respek pada cara mereka belajar tentang budaya (Endraswara, 2003).

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data, penulis melakukan penelitian dengan cara;

- a) Menggali masalah dari informan (dari pelaku dan tokoh masyarakat) yang mengetahui seluk-beluk ritual Ruwat Badut Sinampurna
- b) Melakukan pengamatan pada latar budaya (observasi)
- c) Mencatat hal-hal penting yang mendukung tema penelitian (analisis lapangan)
- d) Melakukan wawancara mendalam (interview)
- e) Merekam dalam bentuk audio dan visual tentang Seni Badut Sinampurna di lapangan (dokumentasi)
- f) Menerjemahkan ungkapan-ungkapan Jawa ke dalam bahasa Indonesia, yang dibantu oleh orang yang mampu menerjemahkan

Data penelitian yang telah diperoleh, dianalisis dengan teknik deskriptif -analitis, yaitu mensinkronkan teori dengan data yang terjadi di lapangan. Alurnya : bertanya → mencari jawaban → menganalisa → mengembangkan pertanyaan → mencari jawaban → menganalisa → mengembangkan pertanyaan → mencari jawaban, dan seterusnya. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis

data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Basrowi (2008) mencakup tiga kegiatan yang bersamaan (1) reduksi data (2) Penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan (verifikasi).

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, meringkas, memberi kode, mencari tema, menulis memo, dan lain-lain. Fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga interpretasi bisa ditarik. Dalam kegiatan ini peneliti mencari data yang benar-benar valid, bisa dijamin kebenarannya.

Oleh karena itu, jika peneliti menyangsikan kebenaran data yang diperoleh dari informan, maka akan dicek ulang dengan informan lain yang dirasa oleh peneliti mengetahuinya. Penyajian data adalah tindakan mengelompokkan hal-hal serupa menjadi kategori atau kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga dan seterusnya. Masing-masing kelompok tersebut merupakan hal-hal terkait dengan rumusan masalah. Dalam tahap ini peneliti menyajikan data secara sistematis, berurutan sesuai dengan rumusan masalahnya. Pada tahap kesimpulan, peneliti membuat rumusan simpulan dan saran yang terkait dengan rumusan masalah dan hasil temuan-temuan yang diperoleh.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari informan, fungsi pentas Badut Sinampurna antara lain untuk; (1) kegiatan bersih desa dalam rangka mendekatkan diri masyarakat dengan Tuhan Yang Maha Esa, (2) meningkatkan rasa hormat kepada Rasulullah

dan mengindahkan tuntunannya, (3) mempererat *keguyuban* atau tali persaudaraan (*silaturahmi*) antar warga desa, (4) meningkatkan kecintaan masyarakat kepada desanya, daerah, dan tanah air, (5) mematangkan diri dalam bercocok tanam dan usaha, (6) sarana menilai tingkat kegairahan masyarakat dalam memelihara desanya, (7) meningkatkan kesadaran masyarakat desa untuk melestarikan lingkungan alam, (8) sarana transformasi budaya, dan (9) sarana sedekah sebagai ungkapan rasa syukur. Adapun nilai-nilai yang bersifat islami dari temuan-temuan yang terkandung dalam Seni Badut Sinampurna antara lain seperti terurai di bawah ini.

Nilai hubungan antara manusia dengan Tuhan.

Nilai ini sangat tampak pada kegiatan bersih desa sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Mahaesa. Mereka menyadari bahwa Allah SWT tempat bergantung, tempat memohon segala kebutuhan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al Ikhlas ayat 2: "*Allaahush shamad*", yang artinya: Allah adalah Tuhan tempat bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Sedangkan mantra-mantra yang menunjukkan kekuasaan Allah antara lain tertulis pada baris-baris terakhir dalam *Mantra Penulakan Jajar Kala* sebagai berikut:

Teka nyembah lunga nyembah

Teka ndhekung lunga ndhekung

Teka kedhep lunga kedhep

Kedhep lerep saking kersane Allah

Kondisi ini menegaskan kembali bahwa inti dari religi adalah kepercayaan dalam hal-hal spiritual. Penjelasan ini, mengisyaratkan bahwa nilai-nilai spiritual

jauh lebih penting dibanding nilai materi dalam bersih desa. Nilai-nilai spiritual tersebut menjadi penggerak batin warga masyarakat untuk selalu mengadakan aktivitas bersih desa.

Nilai penghormatan terhadap Rasulullah SAW.

Berurutan dengan kegiatan di atas sekaligus sebagai perwujudan rasa hormat kepada Rasulullah SAW dan mengindahkan tuntunan-tuntunannya. Hal ini diwujudkan dengan doa-doa yang selalu diawali dengan menyebut asma Allah SWT lalu diikuti dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan pemuliaan yang bersifat simbol-simbol adalah sajian dalam bentuk ambeng yang disebut Rasulan.

Nilai silaturahmi

Sebagai sarana penyambung tali silaturahmi antarwarga masyarakat diwujudkan dalam bentuk mengundang seluruh warga sekitar agar ikut nyekseni/menyaksikan seorang yang menanggapi ruwat tersebut. Dengan demikian maka setiap kali ruwat badut ini dilaksanakan, maka sanak saudara dan tetangga yang lain akan berduyun-duyun datang. Mereka ikhlas mengikuti ritual tersebut. Karena mereka yakin akan mendapatkan berkah dari kegiatan itu.

Dengan demikian keterlibatan masyarakat secara khidmat dalam setiap pelaksanaan ritual ini, maka semakin menambah eratnya kerukunan antarmasyarakat di Desa Ploso. Dengan kata lain, masyarakat selalu menyepakati secara aklamasi ketika dilakukan rencana bersih desa. Hal ini selalu di dorong oleh asumsi bahwa dengan cara gotong royong

menjalankan bersih desa kelak akan mendapatkan keselamatan hidup, berhasil dalam memelihara lingkungan dan *karang pomahan*, agar tetap lestari.

Hal ini sesuai dengan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari melalui Abu Harairah yang artinya: "barang siapa yang senang diperluas rezekinya dan diperpanjang usianya, maka hendaklah ia menyambung hubungan kekeluargaan /tali silaturahmi.

Nilai cinta tanah air dan pelestarian alam

Metri desa, dan *metri karang pomahan*, merupakan hajatan bersama seluruh warga desa sebagai lambang cinta tanah air dan pelestarian alam. *Metri* mengandung makna pelestarian. Mereka berharap lingkungan rumah atau *karang pomahan* dan lingkungan desa serta lingkungan daerahnya tetap dalam suasana aman damai tidak terjadi bencana alam.

Masyarakat desa Ploso menjalin hubungan dengan alam dengan sangat eratnya atau dengan kata lain *hablum minal alam*. Mereka selalu menjaga keseimbangan alam, mereka tidak suka dengan perusakan-perusakan alam seperti yang terjadi di daerah lain. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al Qashash ayat 77: "...*Wala tabghil fasaada fil ardi...*" yang artinya: ...dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi.

Nilai kesyukuran.

Di samping menampilkan seni budaya dan penyampaian informasi, Badut Sinampurna juga sebagai sarana sedekah. Hal ini diwujudkan oleh masyarakat Desa Ploso setelah acara ruwat Badut Sinampurna dilaksanakan. Mereka membagi-bagikan sesaji yang telah diberi mantra oleh Badut

Sinampurna. Sesaji yang dibagikan kepada masyarakat itu berupa sega tumpeng, sega ambeng dan ingkung, sega golong, yang merupakan simbul-simbul rasa syukur kepada Tuhan Yang Mahaesa, serta sedekah sebagai perwujudan rasa syukur.

Mereka mendapatkan bagian yang sama, tanpa harus berebut seperti yang terjadi di daerah lain. Mereka tetap menjunjung tinggi norma dan etika agar terjadi kerukunan antar warga. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Ibrahim ayat 7: " ... *La in syakartum laazidannakum walain kafartum inna 'adzabii lasyadied*", yang artinya: ... Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (ni'mat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (ni'mat-Ku), maka sesungguhnya azab-ku sangat pedih.

Kosmologi Islam Jawa dalam Seni Badut Sinampurna

Seni Badut Sinampurna dengan ritual *ruwatannya* hakikatnya adalah sebagai sarana permohonan doa warga Desa Ploso agar terhindar dari gangguan kekuatan gaib yang diwujudkan dalam bentuk doa simbolik berupa sesaji. *Ruwatan* berarti pembebasan, yaitu pembebasan dari gangguan makhluk halus atau pembebasan dari bencana. Sesaji merupakan bahasa halus, santun, yang dilakukan oleh pelaku ritual, sebagai manifestasi atau perwujudan permohonan manusia yang telah dipakemkan sesuai dengan konsepsi Jawa yang *andhap asor* atau rendah hati, hati-hati, takut, dan penuh dengan ketulusan. Sesaji adalah ungkapan hati melalui lambang-lambang.

Inti dari aktivitas bersih desa adalah pemujaan. Doa-doa terkandung dalam

pemujaan, baik yang diwujudkan dalam bentuk mantra maupun seni pertunjukan. Dalam ritual doa ini, masyarakat Desa Ploso menjadikan bersih desa sebagai tradisi yang sakral.

Tradisi ini mempunyai sasaran pada *caos pisungsung*, artinya pemberian pengorbanan kepada Nabi, ulama dan leluhur. Hubungan antara masyarakat desa dengan leluhur tampak dekat, yakni melalui batin. Kontak batin, akan terjadi pada saat bersih desa dilaksanakan tahap demi tahap. Tradisi demikian dilandasi oleh aktivitas moral yang tinggi yang disebut budi luhur. Kontrol sosial diwujudkan dalam bentuk ketaatan masyarakat untuk mematuhi syarat-syarat sebelum dan sesudah ritual Badut Sinampurna dilaksanakan. Mereka mematuhi adat-istiadat agar tidak terkena kutukan dari kekuatan gaib. Mereka mentaati semua prosesi ruwat dengan khidmat, tertib, dengan membawa sesaji yang telah ditentukan oleh Badut Sinampurna. Tradisi tersebut, pada umumnya menjadi "hajatan besar" desa setempat. Hajatan dilakukan secara kolektif, dengan biaya ditanggung bersama. Kegiatan dilakukan oleh seluruh warga desa, tua-muda, pria-wanita, bersama pamong dan sesepuh desa, petinggi dan pemangku adat setempat, bahkan sering terjadi warga tetangga desa ikut serta meramaikannya.

Kegiatan bersih desa pada dasarnya untuk membuat desanya menjadi bersih, tertib, teratur dan terawat baik, sehingga dapat "ikut menjaga" ketahanan desa, agar menjadi lebih maju dan lestari. Sebagai ungkapan syukur, dalam ritual Badut Sinampurna diwujudkan dalam bentuk doa bersama. Mereka mendapatkan doa dari Sang

Badut yang berisi permohonan agar diberi keselamatan hidupnya, baik di dunia maupun di alam akhirat nanti.

Hal demikian, sejalan dengan pendapat Bratasiswara (2000) bahwa bersih desa (*memetri desa*), kegiatan bersama masyarakat desa untuk menghormati, mengenang dan memelihara desanya, setahun sekali sesuai musim panen. Bagi masyarakat pedesaan yang sebagian besar bermata pencaharian bercocok tanam, musim panen menjadi suatu harapan yang didambakan. Oleh karena itu, pada setiap musim panen mereka merasa menerima kebahagiaan tahunan, sehingga menimbulkan gerakan hati untuk mengenang dan menghormati desa yang telah berjasa menjadi tempat hunian dan tumpuan pencaharian. Sikap itu kemudian menimbulkan kebiasaan desa setempat untuk bersam-sama menyatakan syukur dan terima kasih dengan menyelenggarakan kegiatan bersih desa. Ruwat Badut Sinampurna tidak terlepas dari keyakinan masyarakat Desa Ploso terhadap keberadaan makhluk halus penjaga dan pengganggu kehidupan manusia.

Oleh karena itu mereka harus memperlakukan makhluk-makhluk gaib itu dengan kehati-hatian dan kewaspadaan tinggi. Kehati-hatian itu diwujudkan dalam hal kirim sesaji. Sedangkan kewaspadaan itu diwujudkan dalam bentuk doa kepada Tuhan agar diberi kekuatan untuk melindungi diri dan desanya dari gangguan makhluk gaib tersebut. Nilai-nilai islami yang terkandung dalam seni Badut Sinampurna tersebut diliputi oleh suasana Kosmologi Islam Jawa.

Posisi Temuan Empirik Terhadap Teori

Tahap-tahap prosesi ritual bersih desa berkaitan dengan simbol dan proses sosial.

Simbol dan proses sosial membentuk sebuah sistem budaya yang rapi.

Hal ini memang diakui oleh Geertz (2003) bahwa kajian antropologi religi dapat dari dua aspek, yaitu (a) analisis sistem makna yang diejawantahkan lewat simbolisme, (b) menghubungkan sistem itu dengan proses sosio-kultural dan psikologis. Aspek pertama, memberikan pemahaman terhadap kajian simbol sesaji, pertunjukan, peralatan, dan seterusnya dalam bersih desa. Simbol ini dikaitkan dengan makna dan fungsi bersih desa dalam struktur sosial masyarakat. Dari teori tersebut kemudian melahirkan sikap menerima, sabar dan legowo tanpa harus berebut makanan seperti yang terjadi di daerah lain. Mereka tetap menjunjung tinggi norma dan etika agar terjadi kerukunan antar warga.

Menurut Darusuprta (1988:48) *bersih desa* kemungkinan besar masih berkaitan dengan tata cara memberikan makanan (pengorbanan) kepada roh leluhur sebagai cikal bakal yang menjaga desa *majupat maju lima pancer*. Arwah tersebut, memang pantas dimintai berkah agar membantu anak cucu. Roh leluhur itu dianggap menjadi penjaga (*backing*) *sanjawining wangon* dan *salebeting wangon*, artinya di luar pekarangan dan di dalam pekarangan. Hal ini berarti bahwa masyarakat Desa Ploso mencoba mengaitkan antara dunia (alam seisinya) dengan kosmologi Islam Jawa.

Implikasi Temuan Bagi Penguatan nilai-nilai Islami.

Temuan penelitian di atas, menunjukkan bahwa pentas seni Badut Sinampurna dengan ritual bersih desa di Desa Ploso dapat meningkatkan persatuan

antarwarga agar menjadi lebih baik dalam membangun desa dan mempertahankan kemakmuran alam sekitarnya. Oleh karena itu, agar keberadaan Badut Sinampurna semakin menarik, perlulah kiranya dibangun suatu komunikasi antara pemerintah desa dan pemerintah daerah, agar kesenian ini bisa dijadikan percontohan desa lain dalam membina masyarakat menuju keseimbangan alam yang damai dan lestari.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, di atas, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Nilai-nilai islami yang terkandung dalam pentas seni Badut Sinampurna antara lain adalah:
 - a. Nilai hubungan antara manusia dengan Tuhannya.
 - b. Nilai penghormatan terhadap Rasulullah SAW,
 - c. Nilai cinta tanah air dan pelestarian alam
 - d. Nilai silaturahmi, dan
 - e. Nilai kesyukuran.
2. Nilai-nilai Islami yang terkandung dalam Seni Badut Sinampurna tersebut diliputi oleh suasana kebatinan kosmologi Islam Jawa.

Saran

Seni Badut Sinampurna yang memiliki nilai-nilai islami sekaligus merupakan asset local yang bernilai ekonomis, perlu mendapatkan perhatian dan pengembangan oleh yang berwenang demi menyambut suasana yang semakin menggelobal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashshiddiqi, Hasbi, T.m., dkk. 1971. *Al Quran dan Terjemahannya*. Saudi Arabia: Mujamma'AlMalik Fahd Li Thiba'at Al Mush-haf.
- Basrowi, Suwanndi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bratasiwijaya, Tomas Wijaya. 1993. *Upacara Tradisional Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan
- Endraswara, Suwandi. 2003. *Metodologi Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Geertz, Clifford. 1988. *Santri dan Abangan di Jawa*. Jakarta: INIS II.
- Mulyono, Slamet. 2008. *Kamus Pepak Basa Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Widyatama.
- Rahma, Ratna W. 2008. *Keselarasan dalam konsep Kosmologi Jawa* <http://pantarhei1filsafat1ugm.wordpress.com/2008/05/20/keselarasan-dalam-konsep-kosmologi-jawa/islam>.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

**TINJAUAN TAYANGAN SINETRON PADA PROGRAM PRIME TIME TELEVISI DARI SUDUT
PANDANG MORAL KHUSUSNYA BAGI PENONTON WANITA DAN REMAJA PUTRI**

Oleh :

FIRDA DJUITA¹⁾

H. HARDONO²⁾

AGUSTINA SRIHANDARI³⁾

STIBA "SATYA WIDYA" SURABAYA

Email : fdjuita@gmail.com¹⁾

hardono77@yahoo.com²⁾

agustina.handari@yahoo.com³⁾

ABSTRAK

Tayangan Primetime televisi di 4 stasiun TV besar di Indonesia didominasi oleh sinetron Indonesia dan India. Dari penelitian isi tayangan ditemukan banyaknya adegan yang tidak sesuai dengan moral dan etika yang tentunya sangat tidak sesuai dengan berbagai pasal dalam Undang Undang Penyiaran seperti adegan kekerasan yang menjurus sadisme, adegan seksual, perilaku pergaulan remaja yang tidak sehat, dll yang akan berdampak buruk pada penonton khususnya wanita dan remaja putri seperti meniru gaya hidup dan timbulnya sikap lebih berani terhadap lawan jenis yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia.

Kata Kunci: *Moral, Primetime*

PENDAHULUAN

Televisi sudah menjadi kebutuhan sekunder yang utama dalam kehidupan masyarakat yang seolah bergantung pada keberadaan televisi karena dengan televisi mereka bisa menyampaikan dan mendapatkan informasi dengan lebih mudah dan cepat. Dalam lingkup yang lebih luas, media massa seperti televisi dapat dianggap sebagai agen perubahan karena sesungguhnya media massa dapat mengubah banyak hal yang ada di masyarakat karena media massa memiliki pengaruh besar dalam banyak hal terutama bagi generasi muda seperti yang dinyatakan dalam <http://www.veryinvolvedparents.com/the-influence-of-mass-media-on-teenagers/>:
There are both good and bad influence of the media towards our young generation of today. Although I have to admit that media is inevitably one of the greatest necessity in our

lives today, some of the negative effects which it has brought to the society today are something which the local authority, parents as well as the academic institution should not be ignoring any longer.

Kutipan diatas menunjukkan bahwa media massa termasuk televisi memiliki pengaruh yang baik dan juga yang buruk terhadap generasi muda dan tampaknya dewasa ini pengaruh media massa khususnya televisi sudah sedemikian seriusnya karena dapat menimbulkan efek negative yang tidak boleh diabaikan oleh pemerintah, orang tua serta lembaga pendidikan. Salah satu efek yang serius dapat dilihat pada kutipan berikut:

"Leonard Eron of the University of Illinois followed 800 children who were in the third grade in 1960 until they were 30 years old. He found that the amount of television violence that the children watched at age 8 was the best

indicator of their behavior at age 19" (wps.pearsoncustom.com/wps/media/object/s/2974/3046126/Ch04.pdf)

Dua kutipan di atas menggambarkan betapa besarnya pengaruh televisi bagi masa depan anak dan remaja. Dijelaskan bahwa suatu aksi kekerasan yang ditonton anak pada usia 8 tahun, akan menentukan perilakunya diusia 19 tahun kelak. Anak-anak yang terbiasa menonton kekerasan dalam tayangan televisi akan cenderung menjadi remaja yang berperilaku agresif dimasa depannya. Melalui penelitian ini penulis meninjau berbagai acara prime time 4 stasiun televisi utama di Indonesia yaitu RCTI, SCTV, ANTV, dan MNC TV dari sisi moral dan etika. Penulis memilih 4 stasiun televisi ini karena stasiun ini merupakan stasiun favorit masyarakat Indonesia yang tayangannya bersifat nasional. Sementara itu penulis memfokuskan pembahasannya pada penonton wanita dan remaja putri karena penulis mengamati bahwa penonton utama televisi untuk acara-acara yang ditayangkan pada prime time adalah wanita.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif ini bersifat diskriptif karena data yang digunakan adalah ujaran dan gambar film. Menurut Bogdan dan Biklen (1992:29), *"Qualitative research is descriptive. The data collected are in the form of words or pictures rather than number. They often contain quotation and try to describe what a particular situation or view is like in the narrative form. Qualitative researcher tends to analyze their data inductively"* Sementara itu Donald Ary (1990 : 381) menyatakan: *"Descriptive research studies are designed to*

obtain information concerning the current status of phenomena".

Penulis melakukan penelitian dengan metode tersebut karena penelitian ini berupaya untuk memberikan informasi yang deskriptif tentang tayangan sinetron pada program primetime 4 stasiun televisi di Indonesia.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

a. Prime time

Prime time atau primetime adalah suatu istilah yang mengacu pada jam tayang televisi atau jam siaran radio yang merupakan waktu khusus seperti yang dikatakan dalam

[http://en.wikipedia.org/wiki/Prime time#Indonesia](http://en.wikipedia.org/wiki/Prime_time#Indonesia) sebagai berikut: " Prime time usually takes place from 18:00 to 23:00 WIB, preceded by a daily newscast at 17:00. "lebih jauh lagi di cantumkan dalam

<http://www.businessdictionary.com/definition/prime-time.html#xz3KbvmqoM>

"Part of daily broadcast time during which the number of listeners or viewers is the highest"

Dari dua kutipan di atas, jelaslah bahwa di Indonesia slot waktu siaran prime time adalah setiap hari Senin sampai Jum'at mulai pukul 18:00 sampai 23:00 dimana saat ini sesungguhnya merupakan waktu berkumpul yang paling efektif bagi seluruh anggota keluarga. Prime time menjadi slot acara paling penting bagi setiap stasiun televisi karena pada saat ini jumlah pemirsa adalah yang terbanyak sehingga menjadi saat yang

efektif pula untuk siaran iklan yang menjadi sumber dana utama bagi stasiun televisi tersebut.

b. Peran Televisi

Dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dinyatakan bahwa:

- a) bahwa lembaga penyiaran merupakan media komunikasi massa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta control dan perekat social.
- b) bahwa siaran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas, memiliki pengaruh yang besar dalam pembentukan pendapat, sikap, dan perilaku khalayak, maka penyelenggara penyiaran wajib bertanggung jawab dalam menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang berlandaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;

Dalam kutipan diatas jelas tercantum bahwa lembaga penyiaran termasuk televisi, berperan penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik serta ekonomi masyarakat karena itu diharapkan agar seluruh stasiun televisi benar-benar menjaga materi siarannya sebagai upaya menjaga kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi masyarakat. Kutipan di atas juga mengingatkan bahwa siaran televisi memiliki pengaruh yang

besar dalam pembentukan pendapat, sikap dan perilaku khalayak sehingga salah satu tanggung jawab stasiun televisi adalah menjaga nilai moral, tata susila, budaya serta kepribadian masyarakat. Lebih lanjut dalam bab II tentang Asas, Tujuan, Fungsi, dan Arah pada pasal 3 dicantumkan bahwa "Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa . . ." Disini jelas bahwa tujuan berbagai acara dalam siaran televisi adalah untuk membina watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa serta untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara itu dalam pasal 5 poin b dikatakan bahwa penyiaran diarahkan untuk "menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa" dan dalam poin j dikatakan penyiaran di arahkan untuk "memajukan kebudayaan nasional". Undang Undang penyiaran ini juga memberikan pedoman perilaku penyiaran yang pada poin 4.e dicantumkan bahwa pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran berkaitan dengan perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan. Hal ini dinyatakan secara spesifik sehingga dapat diartikan bahwa materi acara siaran televisi wajib memperhatikan kepentingan anak-anak, remaja, dan perempuan. Disamping itu dalam Ketentuan UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran terkait Haluan Dasar, Karakteristik Penyiaran, dan Prinsip Dasar Penyiaran di Indonesia poin b, dinyatakan bahwa arah penyiaran di Indonesia adalah " menjaga dan

meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa". Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa materi tayangan televisi harus benar-benar dipersiapkan agar dapat meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta dapat membantu masyarakat membangun jati diri.

c. Dampak siaran televisi

Tidak diragukan lagi bahwa sebagai media massa televisi merupakan media penyampai informasi yang jauh lebih cepat dan juga menarik dibandingkan koran, majalah atau media lainnya. Sebagai media audio visual televisi dapat menyajikan informasi dalam bentuk yang lebih menarik sehingga jelas akan lebih efektif dalam menyampaikan pesan. Dari berbagai penelitian yang dilakukan dinyatakan bahwa televisi pendidikan mempunyai banyak manfaat diantaranya seperti yang ditulis dalam Media Awareness Network *"Television can be a very powerful and effective learning tool for children if used wisely"* (http://en.wikipedia.org/wiki/Social_aspects_of_television). Kutipan ini menunjukkan bahwa tayangan televisi akan sangat bermanfaat apabila digunakan secara tepat dan sebaliknya akan menimbulkan kerusakan dalam berbagai aspek bilamana tidak dimanfaatkan secara tepat.

Dimitri A. Christakis, MD, MPH, seorang dokter anak dan ahli epidemic di University of Washington School of Medicine, memfokuskan berbagai penelitian untuk mengoptimalkan kemampuan kognitif serta perkembangan

sosial dan emosional anak-anak. Dalam salah satu penelitiannya ia menyatakan bahwa menonton televisi benar-benar membawa dampak serius pada pembelajaran dan perkembangan anak . (Christakis et. Al: 2005) dijelaskan: *"television watching in very young children is associated with slightly lower cognitive outcomes in later years. The more the children watch TV at before the age of three, the worse they perform in reading recognition, reading comprehension, and digit span memory at the age of six or seven years "*. Fakta ini memberikan gambaran bahwa menonton televisi dapat membawa dampak buruk bagi anak-anak dalam membaca, memahami teks dan juga mengurangi rentang memori terhadap angka. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa kemampuan akademik mereka akan lebih rendah. Hasil yang mengejutkan ditemukan oleh Manganello dan Taylor, (2009) dalam penelitian mereka yang menjelaskan bahwa semakin banyak anak menonton TV pada usia dini, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk menunjukkan perilaku agresif. Mereka juga menyatakan bahwa jam yang dihabiskan menonton televisi pada anak usia dini juga terkait dengan perilaku yang lebih agresif di kemudian hari pada usia dewasa. Selanjutnya penelitian terbaru oleh Christakis et al (2013) menunjukkan bahwa menonton acara TV yang mempromosikan perilaku prososial seperti empati dan kerjasama terkait dengan kompetensi sosial dan perilaku yang baik dibandingkan menonton acara TV yang mempromosikan agresi dan

kekerasan. Semua penelitian ini mengungkapkan bahwa program televisi benar-benar memiliki dampak serius bagi pemirsa muda yang menonton program secara teratur. Jika dicermati maka dapat disimpulkan bahwa dampak yang ditimbulkan televisi bersifat jangka panjang karena itu akan melibatkan anak usia dini, remaja sampai dengan dewasa nanti. Jika berbagai dampak tersebut diklasifikasikan maka tampaknya bahwa dampak ini termasuk dalam dampak sosial, psikologis, pendidikan, fisik, moral terhadap masyarakat.

Sinetron

Sinetron yang menjadi singkatan dari sinema elektronik ini sesungguhnya adalah sejenis Soap Opera (Opera Sabun) yang dalam Wikipedia dijelaskan bahwa “ Soap Opera, Soapie is a serial drama on TV or radio

which features related story lines about the lives of multiple character. The stories typically focus on emotional relationship to the point of melodrama. ”Menyimak sinetron atau yang biasa disebut sebagai drama seri di berbagai televisi ini maka dapat ditemukan characteristic yang sama dengan soap opera yaitu: “ an emphasis on family life, personal relationships, sexual dramas, emotional and moral conflicts.”

Dari sudut pandang sastra maka dapat dilihat bahwa sinetron ini memiliki unsur-unsur utama yang terdapat dalam karya sastra yaitu karakter atau tokoh dengan gambaran personality atau kepribadiannya, setting, tema, serta konflik, dengan demikian seharusnya sinetron juga mengandung nilai-nilai seperti yang di cantumkan dalam handout tentang values of literature seperti berikut ini:

Literature has	If reading it
entertainment value	is an enjoyable way to pass the time
political value	can change the way people live with and influence each other
artistic value	helps us contemplate the nature of beauty and human creativity
cultural value	sheds light on the place and time of the author of the work
historical value	helps one understand the past and how the world has evolved
philosophical value	explores human knowledge, how we know and what we know
moral value	teaches a lesson that will inspire the reader to live a better life
ethical value	helps us ask question related to the standards of a “good” life

Dari delapan jenis nilai-nilai yang dikandung suatu karya sastra penulis tertarik untuk membahas nilai moral yang dikaitkan dengan nilai etis dari tayangan sinetron televisi pada umumnya karena nilai moral mengajarkan kita tentang baik dan buruk

serta nilai etika mengajarkan tentang penerapannya dalam kehidupan.

d. Nilai Moral dan Etika

Undang Undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 mewajibkan bagi lembaga penyiaran untuk bertanggung jawab dalam

menjaga nilai moral, tata susila, budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa setiap acara yang ditayangkan oleh stasiun televisi di Indonesia harus memenuhi standard yang ditentukan atau yang menjadi acuan bagi pembangunan moral masyarakat. Nilai-nilai moral sangat penting dalam kehidupan manusia seperti yang dinyatakan dalam (English Literature for Secondary Schools - Moral Values.htm).. "Moral values are important in life. Moral values readers make judgments on which actions are right or wrong based on certain virtues, qualities, and principles. These virtues are universally accepted. Honesty is a virtue which is upheld by all societies. There are many other positive qualities that would help us become a better person." By learning about the moral value presented in a literary work, the reader will become more aware about life.

Kutipan di atas menjelaskan bahwa nilai-nilai moral sangat penting dalam kehidupan manusia. Bagi yang mencari nilai-nilai moral dalam suatu karya akan melakukan penilaian apakah tindakan yang dilakukan para tokoh dalam cerita merupakan tindakan yang benar atau salah berdasarkan pandangan tertentu yaitu kualitas dan prinsip-prinsip yang diterima secara universal misalnya, kejujuran adalah suatu nilai yang dijunjung oleh masyarakat. Dengan belajar tentang nilai moral yang disajikan dalam karya sastra, pembaca akan menjadi lebih paham tentang kehidupan. Nilai moral tidak dapat dipisahkan dari nilai etika karena perilaku yang dianggap etis atau memenuhi etika

sesungguhnya perilaku yang secara moral dianggap benar yaitu perilaku yang memenuhi standard moral yang dikenal dengan norma-norma yang berlaku pada masyarakatnya.

Dari uraian di atas penulis dapat menyimpulkan bahwasebenarnya karya sastra dapat mengajarkan pembaca tentang nilai etika melalui apa yang dilakukan tokoh dalam menjalani hidupnya. Bagaimanapun, para pembaca harus berhati-hati dalam memahami ide-ide yang dibawa oleh penulis dalam karyanya agar dapat mengambil pelajaran yang bermanfaat.

e. Acara Primetime 4 televisi favorit di Indonesia

Secara umum ada empat hal penting yang harus dipertimbangkan untuk tayangan primetime yaitu: di masyarakat Indonesia yang mayoritas adalah muslim maka jam primetime yang dimulai pukul 18:00 bertepatan dengan waktu sholat Maghrib sehingga akan berpotensi mengganggu kekhusyukan beribadah khususnya bagi anak-anak dan remaja yang sangat tertarik untuk menonton tayangan televisi yang mereka sukai; yang kedua adalah sekitar pukul 18:00 – 20:00, merupakan saat makan malam sehingga tayangan televisi yang menarik akan mengganggu pola makan terutama bagi anak dan remaja karena mereka akan cenderung menunda waktu makan demi acara yang disukainya dan dalam jangka waktu yang panjang akan menimbulkan gangguan pencernaan; yang ketiga adalah terganggunya konsentrasi belajar dan jadwal belajar anak dan remaja karena pada sekitar pukul

18:00 – 21:00 adalah waktu yang umumnya digunakan anak dan remaja untuk belajar dan yang keempat adalah kenyataan dalam masyarakat Indonesia pada umumnya jam tayang primetime ini sesungguhnya merupakan saat yang efektif bagi seluruh anggota keluarga untuk berkumpul karena pada pagi sampai dengan sore hari seluruh keluarga disibukkan dengan pekerjaan dan sekolah sehingga apabila waktu ini justru dihabiskan untuk menonton TV, maka

sudah dapat dipastikan bahwa komunikasi antar anggota keluarga tidak akan berlangsung dengan baik karena masing-masing individu akan terlarut dalam tontonan yang dinikmatinya. Ditinjau dari materi siaran yang ditayangkan pada primetime, penulis juga melihat berbagai dampak negative yang berpotensi ditimbulkan oleh primetime TV. Berikut ini penulis mencantumkan table acara TV pada primetime di 6 stasiun yang dipilih sebagai sampel.

Tabel 1

Hari	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu
Stasiun TV						
RCTI	KNY JIL TBNH 7MH CHSI	KNY JIL TBNH 7MH CHSI	KNY JIL TBNH 7MH CHSI	KNY JIL TBNH 7MH CHSI	KNY JIL TBNH 7MH CHSI	KNY JIL TBNH 7MH CHSI
SCTV	BTJC DDS GGS EIPKM	BTJC DDS GGS EIPKM	BTJC DDS GGS EIPKM	BTJC DDS GGS EIPKM	BTJC DDS GGS EIPKM	BTJC DDS GGS EIPKM
MNC	DAT MH B	DAT MH B	DAT MH B	DAT MH B	DAT MH B	DAT MH B
ANTV	AOH N JA MB R MD	AOH N JA MB R MD	AOH N JA MB R MD	AOH N JA MB R MD	AOH N JA MB R MD	JA MB R

Keterangan:

KNY : Kita Nikah Yuk

TBNH : Tukang Bubur Naik Haji

CHSI : Catatan Hati Seorang Istri

DDS : Diam Diam Suka

DAT : Disini Ada Tuyul

B : Badai

JA : Jhoda Akbar

MB : Mahabarata

EIPKM : Emak Ijah Pngen Ke Mekah

JIL : Jilbab In Love

7MH : 7 Manusia Harimau

BTJC : Didadari Takut Jatuh Cinta

GGS : Ganteng Ganteng Srigala

MH : Manusia Harimau

AOH : Adventure of Hatim

N : Navya

MD : Mahadewa

R : Ramayana

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa primetime didominasi oleh tayangan sinetron yaitu 12 sinetron Indonesia dan 6 sinetron India. Untuk sinetron Indonesia

dapat dipilah berdasarkan genre yaitu Sinetron drama Religi (Tukang Bubur Naik Haji, Mak Ijah Pngen ke Mekah); Sinetron drama remaja (Jilbab in Love, Diam Diam

Suka); Sinetron drama (Kita Nikah Yuk, Catatan Hati seorang Istri); Sinetron Drama Legenda (7 Manusia Harimau, Sinetron Drama Fantasi (Bidadari takut Jatuh Cinta, Badai, Manusia Harimau, Ganteng Ganteng Srigala), Drama Komedi (Disini Ada Tuyul)

Dalam kategori drama religi *Tukang Bubur Naik Haji* dikategorikan sebagai drama religi komedi. Kedua sinetron ini berhasil merebut perhatian penonton terbukti dengan berhasilnya *Tukang Bubur Naik Haji* memenangkan Panasonic Gobel Award untuk kategori drama seri dua tahun berturut-turut yaitu 2013 dan 2014, sementara *Mak Ijah Pngen ke Mekah* memenangkan SCTV Award sebagai drama seri terbaik. Disamping itu para pemain kedua sinetron ini juga berhasil memenangkan sebagai aktris atau aktor terbaik. Kemenangan kedua sinetron ini menunjukkan bahwa dua sinetron ini telah berhasil menarik para pemirsa untuk menonton. Sebagai drama religi ternyata penulis menemukan berbagai hal yang tidak sepatutnya beberapa yang menonjol penulis kemukakan disini sebagai berikut:

1. Kedua sinetron ini menampilkan tokoh keluarga Haji yang berperilaku buruk. Dengan kekayaannya mereka bisa naik haji dan melaksanakan umrah dengan keluarganya namun mereka selalu memamerkan kekayaannya serta menghina keluarga lain yang miskin. Keluarga Haji Sholeh dan Hajah Ida dalam *Mak Ijah Pngen ke Mekah*, selalu melakukan intrik untuk memfitnah keluarga *Mak Ijah* sementara Haji Muhidin dan Hajah Maemunah selalu memusuhi keluarga Haji Sulam si tukang bubur tanpa suatu alasan yang jelas.
2. Tokoh pendukung ibu-ibu yang bergosip di warung juga muncul di kedua sinetron ini.
3. Tokoh anak, Mancung dan Wakwaw dalam *Mak Ijah Pngen ke Mekah* menggambarkan perilaku anak yang tidak sopan, hal ini terlihat dari cara bicara mereka yang ceplas ceplos terhadap orang tua dan cenderung tampak tidak sopan.
4. Di tinjau dari segi pemakaian bahasa, *Sinetron Mak Ijah Pngen ke Mekah* ini banyak mengandung Verbal Agression yaitu tindak tutur yang bersifat menghina, melecehkan, kasar, melakukan pembandingan dengan hal yang buruh seperti mengatakan kepala bang Ocit seperti pantat panci, dll.
5. Beberapa adegan juga tidak menunjukkan perilaku yang santun, misalnya ketika Babe Frenky meninggal jenasah tidak diperlakukan dengan baik.
6. Perilaku buruk lain ditunjukkan oleh Ocit dengan meraung-raung ketika babe Frenky meninggal dan juga memukul kepala para hansip sementara itu ajaran Islam tidak membenarkan seseorang menangisi jenasah dengan meraung-raung.

Masih banyak lagi perilaku dan ajaran yang buruk dipertontonkan dalam sinetron ini di setiap episodenya sehingga menurut penulis sinetron ini sama sekali tidak memberikan pelajaran moral yang positif bagi para penontonnya bahkan sebaliknya memberikan contoh-contoh buruk bagi penonton anak-anak dan remaja. Sebagai sinetron religi islam kedua sinetron ini tidak memberikan contoh bagaimana menjalani agama dengan baik dan benar. Sementara dalam pasal 5 poin b Undang Undang Penyiaran tahun 2002 dikatakan bahwa

penyiaran diarahkan untuk “menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa”.

Lebih lanjut dalam bab II tentang Asas, Tujuan, Fungsi, dan Arah pada pasal 3 dicantumkan bahwa “Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa . . .”. Mengacu pada pasal 3 ini penulis sangat yakin bahwa sinetron religi seperti Mak Ijah Pengen ke Mekah dan Tukang Bubur Naik Haji tidak akan memungkinkan terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa dan sekaligus juga tidak akan mencerdaskan anak bangsa karena sinetron ini tidak mengandung ajaran moral yang baik yang dapat diteladani para penonton. Untuk sinetron Drama Remaja terdapat judul *Jilbab in Love* dan *Diam Diam Suka*. Dalam kedua sinetron ini terdapat satu gaya hidup yang tidak mendidik yaitu persaingan antar geng di sekolah, dimana anggota geng yang terdiri dari siswa wanita bersaing untuk saling eksis, saling mendahului mengikuti tren seperti music, idola, tempat tongkrongan dan saling bersaing untuk jadi primadona. Persaingan ini menjadi semakin buruk karena dibumbui dengan bullying mulai dari sekedar mengejek sampai dengan penghinaan dan kekerasan. Untuk kategori sinetron drama terdapat dua judul sinetron yaitu *Kita Nikah Yuk* dan *Catatan Hati seorang Istri*. Seperti umumnya sinetron drama Indonesia maka drama ini memiliki cerita yang berbelit. Untuk *Kita Nikah Yuk* cenderung kearah komedi sementara *Catatan Hati seorang Istri* begitu terasa mengeksploitasi penderitaan seorang wanita

baik. Sinetron 7 *Manusia Harimau* dan *Manusia Harimau* sarat dengan adegan kekerasan yang sudah menjurus pada sadisme karena itu dapat dipastikan akan menimbulkan pengaruh buruk bagi penonton anak-anak dan remaja. Perlu diingat bahwa pada pukul 21:00 – 22:00 masih mungkin ada penonton anak-anak dan remaja yang menyaksikannya, begitu juga halnya dengan *Ganteng Ganteng Sigala*. Disini Ada Tuyul yang termasuk kategori drama komedi, mengandung adegan yang dipandang rentan ditiru anak-anak dan akan membahayakan bagi mereka sehingga melalui surat bernomor 1696/K/KPI/07/14 tertanggal 21 Juli 2014, KPI memberikan teguran tertulis karena melanggar Undang Undang No 32 Tahun 2002 dalam hal pelanggaran pedoman perilaku Penyiaran dan Standar program Siaran.

Primetime di stasiun televisi ANTV didominasi oleh tayangan sinetron India dengan 5 judul sinetron yaitu: *Mahabarata*, *Ramayana*, *Navya*, *Jhoda Akbar*, serta *Mahadewa*. Kelima sinetron ini ternyata sangat memikat para penonton perempuan baik remaja maupun perempuan dewasa. Antusiasme penonton yang luar biasa terhadap tayangan sinetron India ini telah melahirkan satu acara reality show berjudul *Panah Asmara Arjuna*. Sinetron *Jhoda Akbar* mengisahkan pernikahan di bawah umur dimana tokoh Adham Khan digambarkan telah melecehkan Tasneem, anak pelayan yang masih dibawah umur, namun ibunya justru menganggap Adham Khan adalah orang baik karena telah memberikan hadiah yang mahal. Tampak disini bahwa materi mengalahkan moralitas seorang ibu yang seharusnya melindungi kehormatan anaknya.

Lebih jauh lagi dalam salah satu episodenya terdapat adegan Jhoda berhubungan intim. Disamping itu sinetron India ini juga mengandung banyak adegan kekerasan. Dari uraian di atas penulis berpendapat bahwa tayangan sinetron India ini sangat tidak pantas bagi penonton remaja dan wanita Indonesia karena penuh dengan adegan kekerasan dan mengumbar adegan berbau seksual. Namun dalam kenyataannya sinetron India sangat digandrungi para wanita Indonesia karena para pemain pria yang tampan. Keberadaan aktor India ini terutama pemain Mahabarata telah membangkitkan female gaze yaitu sikap dimana perempuan menjadikan laki-laki sebagai subjek dari nafsu atau keinginan dan kenikmatan yang didapatkan dengan cara memandang (Mulvey:2009).

Begitu banyak perempuan Indonesia tergila-gila pada ketampanan wajah dan fisik pemeran Arjuna, Shaheer Sheikh dan hal ini dimanfaatkan oleh stasiun televisi dengan menggelar acara berjudul Maha Cinta dan Panah Asmara Arjuna. Acara Panah Asmara Arjuna ini merupakan tontonan reality show yang diikuti oleh puluhan perempuan dari berbagai daerah. Dalam acara ini para peserta, berlomba-lomba mendapatkan cinta Arjuna.

Para perempuan ini berlaku sebagai perempuan mencari jodoh dimana mereka diharuskan melakukan banyak hal selama masa karantina 70 hari diantaranya kencan dengan Shaheer Sheikh. Dalam upaya memenangkan hati Arjuna maka terjadi persaingan yang kadang menimbulkan perkelahian antar perempuan ketika melihat kemesraan atau perhatian yang diberikan Shaheer Sheikh pada peserta lain. Perlu

dicatat pula bahwa sepanjang kegiatan ini para perempuan ini cenderung mengenakan pakaian yang ketat, rok mini, celana pendek, dan baju tanpa lengan yang seksi. Semua ini menunjukkan perempuan Indonesia telah kehilangan harkat kewanitaannya.

Dalam tayangan acara ini juga diselipkan permainan kuis yang diikuti penonton, salah satunya adalah seorang penonton perempuan yang naik ke panggung dan dalam keadaan mata tertutup, diminta untuk mencari benda yang dikenakan di tubuh sang Arjuna dengan cara meraba-raba tubuh sang Arjuna. Bagi masyarakat Indonesia tentu tayangan ini sangat tidak beretika apalagi mengingat masyarakat Indonesia adalah muslim sehingga bersentuhan, saling merayu, bermesraan masih merupakan hal yang dapat dipandang tabu.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa tayangan primetime televisi Indonesia khususnya pada enam stasiun yang penulis ambil sebagai sample berpotensi memberikan dampak negative bagi anak-anak, remaja dan wanita. Dampak buruk ini terlihat dengan terjadinya banyak kekerasan yang dilakukan anak dan remaja. Dalam hal gaya hidup, seperti gaya berpakaian anak sekolah juga tampak pengaruh tayangan televisi. Dewasa ini dapat dilihat banyak sekolah khususnya sekolah swasta memilih seragam dengan motif kotak-kotak seperti yang banyak terlihat di dalam sinetron televisi, begitu pula hal dengan gaya berpakaian para pemain sinetron yang ditiru oleh para pemirsanya. Perilaku remaja dan wanita juga menunjukkan suatu perubahan

yang dipengaruhi oleh berbagai acara televisi. Adalah suatu kenyataan bahwa berpacaran sudah bukan hal yang tabu bagi anak-anak remaja bahkan di usia sangat dini.

Bagi para wanita baik remaja maupun wanita dewasa tampak tidak lagi canggung mempertontonkan female gaze dengan berteriak-teriak ketika pemunculan actor tampan. Sering tampak para wanita berebut memegang, memeluk, bahkan mencium aktor idola mereka. Tayangan sinetron India jelas telah sangat mempengaruhi penonton wanita baik remaja maupun dewasa. Hal ini dapat dilihat dengan berkembangnya gaya pakaian India dilengkapi dengan asesoris bahkan dalam internet bisa dilihat beberapa pasangan menyelenggarakan pernikahan ala India. Memperhatikan hal ini penulis berpendapat kiranya perlu dilakukan

Berbagai dampak negatif ini tentu tidak terlepas dari pengaruh banyaknya tayangan kekerasan, tayangan berbau seksual, tayangan pergaulan remaja yang tidak sesuai dengan moral dan etika bangsa Indonesia. Begitu intensnya penayangan pada primetime dimana suatu sinetron akan tayang setiap hari maka sudah dapat dipastikan pengaruhnya akan sangat besar bagi anak-anak, remaja, dan wanita. Dari segi bahasa juga tampak pengaruh buruk yang diberikan oleh berbagai sinetron yang tayang pada primetime. Gaya bahasa anak-anak dan remaja tampak meniru bahasa Indonesia dengan dialek Jakarta seperti yang selalu dipakai dalam sinetron, namun yang perlu diwaspadai adalah suatu kebiasaan melakukan verbal aggression dalam berkomunikasi seperti pemakaian makian, hinaan, dll.

DAFTAR PUSTAKA

- Ary, Donald and Jacob, C. Razavich A. 1990. *Introduction to Research in Education (4th edition)*. Orlando: Harcourt Brace College Publisher.
- Bogdan, R. and S. Biklen. 1982. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Method, Second Edition*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.
- Christakis et al. 2005. Association between Media Viewing and Language Development in Children Under Age 2 Years. *Journalsconsultapp.elsevier-eprints.com*.
- Christakis, Dimitri A and Zimmerman, Frederick J. 2013. *The Elephant in the Living Room: Make Television Work for Your Kids*, Kobo Edition. Pennsylvania: Rodale Inc
- Manganello, J. A amnd Taylor, C. A. 2009. Television Exposure as A Risk Factor for Aggressive Behavior Among 3-year-old Children. *Archieves of Pediatrics and Adolescent Medicine*, 163, 1037-1045.
- Mulvey, Laura. 2009. Visual Pleasure and Narrative Cinema. *Visual and Other Pleasures. Ed. II*. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 14-27
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- <http://www.veryinvolvedparents.com/the-influence-of-mass-media-on-teenagers/>
- (wps.pearsoncustom.com/wps/media/object/s/2974/3046126/Ch04.pdf)
- http://en.wikipedia.org/wiki/Prime_time#Indonesia
- <http://www.businessdictionary.com/definition/prime-time.html#xzz3KbvvmqoM>
- English Literature for Secondary Schools - Moral Values.htm)

**REYOG PONOROGO BERBASIS SEKOLAH; STRATEGI PENGEMBANGAN SENI REYOG
PONOROGO MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASIA**

Oleh :

RIDO KURNIANTO¹⁾

NIKEN LESTARINI²⁾

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

Email: kurnianto.mama@gmail.com¹⁾

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pengembangan seni Reyog Ponorogo melalui pembelajaran di sekolah-sekolah di Kabupaten Ponorogo. Dua belas sekolah yang diteliti telah melakukan pendidikan karakter *Konco Reyog* (siswa) yang digali dari makna simbol seni Reyog Ponorogo yang selanjutnya dikaji basis relevansinya dengan pendidikan Islam, yang selama ini belum tersentuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh dari orang kunci (*key person*), yakni; tokoh warok, yayasan Reyog, para pengampu pembelajaran Reyog, dan para seniman pendamping dideskripsikan secara analitis kualitatif untuk menemukan basis pengembangan Reyog Ponorogo melalui jalur pendidikan sekolah. Temuan pokok penelitian ini adalah bahwa dalam seni Reyog Ponorogo terdapat sejumlah simbol, baik terkait dengan instrumen perangkat seni maupun ragam tarinya, yang di dalamnya sarat dengan nilai dan makna, diantaranya adalah nilai pendidikan. Nilai-nilai tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat dengan sejumlah nilai yang terkandung di dalam pendidikan Islam, sehingga sangat dimungkinkan menjadi semakin kuat daya pencerahnya apabila mampu dipadukan dalam aktifitas pembelajaran. Nilai-nilai pendidikan inilah yang selanjutnya diturunkan kepada *Konco Reyog* (pelaku seni Reyog Ponorogo) untuk menjadi tuntunan hidup melalui penanaman karakter dalam pembelajaran di sekolah. Pada perkembangannya, nilai-nilai pendidikan dalam seni Reyog Ponorogo ditanamkan secara sistematis melalui lembaga pendidikan sekolah. Posisinya cukup kuat karena masuk dalam kurikulum intrakurikuler sebagai muatan lokal berbasis kearifan lokal. Nilai-nilai pendidikan berbasis seni Reyog Ponorogo ini sangat dimungkinkan menjadi alternatif model pendidikan karakter dalam rangka menanamkan nilai dan makna hidup luhur berbasis pendidikan Islam, sekaligus menjadi strategi penguatan eksistensi seni Reyog Ponorogo sebagai pesona wisata bergengsi menuju masyarakat ekonomi Asia.

Kata Kunci: *Konco Reyog, Pembelajaran Sekolah, Pendidikan Karakter, Pendidikan Islam, MEA.*

PENDAHULUAN

Fakta yang cukup unik, bahwa seni reyog Ponorogo telah dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, baik intra maupun ekstra kurikuler. Dimasukkannya seni Reyog Ponorogo ke dalam pembelajaran di sekolah, disamping karena tuntutan seni, juga adanya fakta tentang maraknya pentas Reyog Ponorogo yang sarat dengan perilaku “kontra produktif” dengan nilai-nilai luhur yang terbabar dalam simbol-simbol budayanya. (Kurnianto, 2013: 52) Perilaku kontra

produktif tersebut antara lain; mabuk-mabukan (minum *khamr*), ritual sesaji menjelang pentas, *saweran* (memberi hadiah berupa uang kepada penari jathil yang dilakukan penonton pria dengan menyentuk bagian tubuh “sensitif” penari), adopsi kekuatan mistik, dan sebagainya yang kesemuanya dianggap bertentangan dengan norma sosial maupun terutama norma agama (Islam). Tradisi mabuk-mabukan, bahkan sudah menjadi rahasia umum di kalangan *Konco Reyog* Ponorogo. Beberapa oknum

Konco Reyog terkadang masih memiliki rasa malu dan karena itu mereka memilih meminum khamr itu jauh sebelum pentas dan dilakukan di tempat yang tersembunyi, tetapi tidak sedikit mereka yang secara terang-terangan meminum khamr di area pentas. Bahkan ada “norma ilegal” dibakukannya tradisi minum khamr ini sebagai modal memperkuat pentas (adanya keyakinan bahwa reaksi minuman keras tersebut akan berpengaruh pada keberanian dan kekuatan pada saat mementaskan seni Reyog Ponorogo). Sementara, ada fakta unik lainnya seiring dengan maraknya apresiasi masyarakat terhadap seni Reyog Ponorogo, bahwa dengan kenyataan terjadinya perilaku *Konco Reyog* “menyimpang” sebagaimana dipaparkan diatas, di negerinya sendiri – Ponorogo, kesenian ini ternyata kurang mendapatkan apresiasi yang sebanding dengan kebesarannya di tingkat nasional (Kurnianto, 2013: 52-53).

Dengan demikian, terjadi semacam “apresiasi semu” yang disebabkan oleh adanya “gap” antara pesan-pesan mulia yang diusung oleh seni adiluhung ini dengan pementasan yang justru bertolak belakang dengan simbol-simbol seni yang dipentaskan *Konco Reyog*. Karena itu, berdasarkan fakta ini, sangat dimungkinkan, melalui pembelajaran di sekolah, pesan-pesan luhur seni Reyog Ponorogo melalui simbol-simbol seninya yang potensial itu akan teraktualisasikan secara baik, sehingga transformasi nilai-nilai pendidikan (Islam) di kalangan *Konco Reyog* terjadi dengan baik. Fakta ini muncul, paling tidak dilatari oleh dua alasan; (1) maraknya kerusakan moral yang melanda masyarakat secara luas, termasuk di

kalangan anak-anak usia sekolah, sehingga seni Reyog ini menjadi pilihan sebagai media menangkal dekadensi moral melalui aktualisasi potensi pesan-pesan luhur pada seni budayanya; (2) saratnya pesan moral dan nilai pendidikan yang terdapat di dalam instrumen dan tari Reyog Ponorogo, hingga meniscayakan perlunya mengelola aspek ini secara baik, guna penanaman karakter mulia pada *Konco Reyog* dan masyarakat luas, sehingga sangat dimungkinkan, kecenderungan berseni Reyog seperti ini akan berkembang menjadi pilihan pelestarian dan pengembangan seni Reyog Ponorogo. Watak (karakter), seperti ditulis Zuhdi merupakan seperangkat sifat yang selalu dikagumi sebagai tanda-tanda kebaikan, kebijakan, dan kematangan moral seseorang (Zuhdi, 2008: 39).

Berdasar inilah watak seseorang dididik, dibina, dan dikembangkan ke arah penguatan agar berkembang dalam citra yang baik. Dalam praktik, pembangunan atau pendidikan karakter selalu dikaitkan dengan nilai (Fronidizi, 2011: 1-3) atau tradisi yang berkembang di tengah masyarakat, yang menurut mereka perlu diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Sejumlah nilai pendidikan yang melekat dalam seni Reyog Ponorogo bisa ditransformasikan kepada *Konco Reyog* mengingat seni ini cukup memperoleh apresiasi dari masyarakat luas, termasuk masyarakat pendidikan.

Tujuan pendidikan karakter, sebagaimana ditulis Zuhdi (2008: 77) adalah mengajarkan nilai-nilai tradisional tertentu, yang diterima secara luas sebagai landasan perilaku yang baik dan bertanggungjawab. Hal ini untuk menumbuhkan rasa hormat,

tanggungjawab, rasa kasih sayang, disiplin, loyalitas, keberanian, toleransi, keterbukaan, etos kerja, dan kecintaan kepada Tuhan dalam diri seseorang. Menurut Ratna, keseluruhan karya sastra, seni, dan budaya adalah salah satu sumber pendidikan karakter (Ratna, 2014: 195). Di tengah-tengah banyak orang sudah tidak lagi percaya kepada orang tua, pemimpin, dan pemerintah, bahkan dengan agama sekalipun, maka tidak menutup kemungkinan karya sastra, seni, dan budaya menjadi sumber terpenting pendidikan karakter. Ratna menambahkan bahwa, sesuatu yang disampaikan secara estetis, etis, dan logis, akan membuat manusia lebih percaya terhadap seni budaya dibandingkan dengan narasi-narasi ilmu pengetahuan, termasuk agama (Ratna, 2014: 195-196).

Salah satu pesona Ponorogo adalah seni Reyog Ponorogo itu sendiri. Sebagai sebuah seni budaya yang telah menjadi *branding* Ponorogo, sudah barang tentu ia akan menjadi aspek utama dalam menentukan nilai tawar untuk beragam kepentingan. Oleh karena itu, posisi dan kondisi seni Reyog Ponorogo secara langsung akan berdampak pada keunggulan Ponorogo. Kehadiran seni Reyog Ponorogo dalam dunia sekolah menjadi sesuatu yang sangat penting, karena selama ini seni adiluhung ini dilestarikan dan dikembangkan lebih cenderung pada aspek seni nya saja, dalam belum banyak yang menyentuh pada penggalian dan penanaman makna luhur yang digali dari makna simbolnya. Seni Reyog dengan *Konco Reyog* yang berkualitas, baik dari sisi integritas keilmuan maupun integritas kepribadian tentu akan menjadi jaminan untuk bias melakukan

pengembangan seni ini dalam lingkup jaman yang melingkupi, sehingga keberadaannya akan menjadi dibutuhkan dan tidak sekedar ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi budaya. Data penelitian digali dari orang-orang kunci (*key person*), yakni para tokoh Reyog Ponorogo (Warok), Yayasan Reyog Ponorogo, Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga, para pengampu mulok Reyog Ponorogo disekolah-sekolah yang diteliti, serta para seniman pendamping. Metode pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipan aktif, dan diskusi terfokus.

Sedangkan analisis data menggunakan deskriptif kualitatif atau juga sering disebut dengan deskriptif-analitis. Pembahasan dalam tulisan ini dibagi dalam beberapa sub bab, yakni;

pertama, memaparkan secara ringkas tentang nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam seni Reyog Ponorogo;

kedua, mengidentifikasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam seni Reyog Ponorogo sebagai pilar pendidikan karakter di sekolah-sekolah melalui pembelajaran di sekolah;

ketiga; strategi internalisasi nilai-nilai pendidikan dalam seni Reyog Ponorogo melalui kurikulum intrakurikuler dan ekstrakurikuler di sekolah.;

dan keempat, menganalisis strategi Reyog berbasis sekolah dalam rangka menyongsong masyarakat ekonomi Asia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai-Nilai Pendidikan dalam Seni Reyog Ponorogo

Pemilihan instrumen Reyog Ponorogo, yakni kepala harimau dan burung merak oleh para leluhur Ponorogo, nampaknya tidak main-main. Dua binatang belantara yang mewakili dua karakter binatang rimba (kuat dan indah) ini, dipih jelas bukan tanpa tujuan, tetapi terdapat nilai/makna yang mengarah pada pembentukan karakter “*wong*” (orang) Ponorogo. Harimau memberikan pesan kekuatan diri (lahir-batin), sedangkan burung merak memberikan kesan keindahan. Apabila dikumpulkan di dalam sebuah karakter kepribadian, paduan dua binatang berbeda karakter itu akan membentuk perpaduan sosok pribadi yang kuat lahir-batinnya dan mulia budi pekertinya. Nilai-nilai pendidikan pada seni Reyog Ponorogo meliputi; Pertama, Pendidikan Keimanan.

Nilai pendidikan ini terbabar di dalam ritual menjelang pentas, yakni permohonan (doa) yang dilakukan *Konco Reyog* meminta kekuatan dan perlindungan terhadap pentas yang digelar. Di dalam instrumen Reyog nilai ini tersimpulkan di dalam simbol *Pecut Samandiman* yang di dalamnya terdiri dari lima ikat dalam satu pilar, yang bermakna rukun iman yang lima (lima ikat) dan syahadat tauhid, keesaan Tuhan (satu pilar); Kedua, Pendidikan Budi Pekerti. Pendidikan budi pekerti terpapar di dalam simbol burung merak dan tari warok; burung merak bermakna keindahan atau akhlak mulia; tari warok bermakna kepribadian paripurna yakni selalu menjaga diri dari perbuatan yang tidak pantas dan selalu berbuat kemanfaatan dan kebermaknaan. Ketiga, Pendidikan Jasmani

dan Ruhani. Aspek ini terbabar di dalam seluruh makna simbol pada ragam tari seni Reyog Ponorogo dan perangkat kepala harimau. Seluruh tari dalam ragam tari Reyog Ponorogo mengandung gerak yang sangat mendukung terhadap pemeliharaan kesehatan fisik. Sedangkan pada simbol kepala harimau mengandung makna kekuatan lahir yang penuh dengan dinamika dalam menghadapi kerasnya belantara. Kekuatan yang tersimbolkan di dalam simbol kepala harimau ini diharapkan menjadi kepribadian *Konco Reyog* yang selalu beraktifitas dalam kehidupan ini dengan penuh semangat karena didukung dengan kesehatan dan kekuatan fisik yang prima, serta didukung dengan kekuatan batin yang sangat kuat. Keempat, Pendidikan Kepemimpinan. Makna ini terbabar di dalam tari dan figure Kelanasewandana. Posisi Kelanasewandana sebagai raja setengah dewa di mata rakyatnya, mengandung makna bahwa ia memiliki sesuatu yang unggul untuk seorang pemimpin, yakni sebuah kesaktian sempurna dengan dukungan senjata pamungkas yang sakti *mandraguna*.

Kebijaksanaan dan keadilannya dalam memimpin telah membuat posisinya menjadi sangat disegani rakyatnya. Nilai keunggulannya melekat pada diri dan kepribadiannya yang selalu memutuskan sesuatu dengan prinsip kejujuran dan keadilan dengan landasan Alqur'an dan Assunnah, sehingga sabdanya menjadi “*sabda pandhita ratu*” (“ucapan dan perintahnya harus dijunjung tinggi”) dan inilah yang dimaksud dengan “*sami'na wa atha'na*” – rakyatnya akan patuh setia dibawah kepemimpinan yang dipayungi oleh aturan

dan norma dari Allah Swt. Kelima, Pendidikan Kewiraan. Makna ini terbabar di dalam tari jathil. Gerak tari yang trengginas, lincah, dan perkasa, memberikan makna yang dalam bagi sebuah kepribadian yang diturunkan dari tarian ini. Tari ini melahirkan makna bahwa hidup dan kehidupan ini selalu akan berhadapan dengan tantangan dan hambatan menuju kesuksesan hidup. Karenanya membutuhkan pribadi yang penuh semangat, harapan dan cita-cita yang tinggi, dan kerja keras yang tiada henti. Keenam, Pendidikan kesabaran dan Optimisme. Nilai ini terbabar di dalam tari pujangganong. Gerak tari yang terkesan jenaka, dengan dinamika gerak tari yang lincah, memberikan makna yang dalam bagi sebuah cara untuk menghadapi kehidupan yang memang penuh dengan ujian hidup. Betapapun keras dan hebatnya ujian kehidupan yang diterima, hendaklah disikapi dengan kesabaran dan kepasrahan kepada Tuhan Yang Kuasa, sehingga dengan sikap seperti ini, ujian akan berlalu dan tergantikan dengan kebahagiaan. Sikap optimis sangat penting agar tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah Swt.

Makna simbol dalam seni Reyog Ponorogo, sebagaimana dipaparkan di atas, sudah barang tentu akan menjadi kekuatan luar biasa bagi eksistensi dan pengembangan seni adiluhung ini, ketika ditanamkan kepada *Konco Reyog* dengan baik. Internalisasi nilai dan makna simbol Reyog Ponorogo melalui pembelajaran di sekolah, sudah barang tentu akan melahirkan harapan besar seni ini menjadi kearifan lokal yang berkemajuan, karena berada dan dilakukan oleh *Konco Reyog* yang memahami makna seni yang digelutinya.

Pilar Pendidikan Islam Berbasis Seni Reyog Ponorogo

Berdasarkan uraian tentang nilai-nilai pendidikan pada seni Reyog Ponorogo, maka secara spesifik di dalamnya terkandung pilar pendidikan Islam, yakni; akidah, ibadah, dan akhlak yang terbabar di dalam makna simbol, baik yang terkandung di dalam instrumen alatnya maupun ragam tarinya. Pilar pendidikan *akidah* (keimanan) terbabar di dalam dua aspek, yakni pembuka pentas dan pada simbol senjata "Pecut Samandiman" (senjata milik raja Kelanasewandana berbentuk sejenis cemeti). Pembuka pentas seni Reyog menjadi pendidikan keimanan, karena ketika *Konco Reyog* mengawali pentas, mereka mengawalinya dengan memanjatkan doa kepada Allah Swt., melalui berbagai kreasi (sikap, syair lagu (tembang), tari, dan sebagainya). Di semua sekolah yang telah penulis teliti (12 sekolah) mengawali pentas dimana dan dalam bentuk apapun dengan berdoa bersama. Sementara pilar pendidikan keimanan yang terbabar dalam makna simbol Pecut Samandiman, terbaca dalam komposisi Pecut, yakni terdapat lima ikat dan satu pilar. Lima ikat dimaksudkan sebagai rukun Islam yang lima (syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji). Sedangkan satu pilar berupa cemeti adalah simbol tauhid (keesaan Tuhan). Karena itu, di dalam pentas, ketika senjata ini dipergunakan untuk melawan Singabarong (dhadhak merak) yang konon kuat tidak terkalahkan, tidak mampu ditahannya, bahkan semesta di sekelilingnya ikut terkena dampak yang sangat merusakkan. Hal ini dimaksudkan sebagai gambaran bahwa, ketika seseorang telah beriman dengan kuat kepada Tuhan disertai dengan pengamalan rukun Islam,

maka tidak akan ada kekuatan apapun di semesta ini yang bisa melemahkannya, karena dirinya telah terpaut kuat dengan kekuatan Tuhan Yang Maha Kuasa. Secara rinci pilar-

pilar pendidikan, baik yang terkandung di dalam instrumen maupun ragam tari seni Reyog Ponorogo sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1: Identifikasi Simbol dan Makna Seni Reyog Ponorogo

Unsur & Nama Simbol	Makna Simbol	Relevansi dengan Pendidikan Islam
Instrumen : Reyog/ Dhadhak Merak Kendang	Berasal dari bahasa Arab <i>"riyaqun"</i> berarti: "keindahan, kebaikan yang mengagumkan" Berasal dari bahasa Arab <i>"qada'a"</i> yang berarti : mengendalikan/mencegah	Manusia harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dengan ketaatan kepada Nya, sehingga mampu melalui hidup dan mengakhirinya dengan tetap berada di jalan Nya. QS. Ali Imran: 102 : <i>"Bertaqwalah kepada Allah dengan sebenar-benar taqwa dan janganlah sekali-kali kamu mati, kecuali dalam keadaan memeluk Islam"</i> . Manusia harus pandai mengendalikan hawa nafsunya agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang tercela, melanggar aturan/norma agama, merugikan orang lain, dan seterusnya.
Ketipung	Berasal dari bahasa Arab <i>"katifun"</i> yang berarti : balasan	Manusia harus hati-hati dengan setiap perbuatan yang dilakukannya, karena semuanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan akan memperoleh balasan yang setimpal di pengadilan akhirat nanti. Oleh karena itu harus diupayakan agar semua perbuatannya baik dan sesuai dengan tuntunan agama.
Kenong	Berasal dari bahasa Arab <i>"qana'a"</i> yang berarti : menerima pemberian Tuhan dengan lapang dada.	Manusia wajib berusaha untuk memperoleh kehidupan yang terbaik. Bersamaan dengan itu, manusia juga harus menyadari dengan sepenuhnya, bahwa setiap upaya akan menemui kepastian hasil sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, manusia harus menerima dengan ikhlas apapun hasil yang ditentukan oleh Tuhan dengan banyak bersyukur dan bersabar. Tuntunan ini ada dalam sebuah hadis: <i>"Sungguh beruntung orang yang masuk Islam, diberi kecukupan, dan Allah menjadikannya orang yang ridha terhadap apa yang diberikan kepadanya"</i> (HR. Muslim).
Kethuk	Berasal dari bahasa Arab <i>"khatha"</i> yang berarti : salah	Manusia harus menyadari sepenuhnya, bahwa sebaik apapun manusia, mestilah ia akan berbuat kesalahan/dosa. Karena itu sebaik-baik manusia, bukanlah orang yang tidak bersalah/berdosa, karena hal itu tidak mungkin, tetapi manusia yang baik adalah orang yang melakukan kesalahan/dosa kemudian segera bertaubat kepada Allah.
Angklung	Berasal dari bahasa Arab <i>"intiqa"</i> , yang berarti: bergerak, berhijrah	Manusia harus senantiasa melakukan hijrah (bergerak/berpindah) dari keburukan/kejahatan (melanggar aturan, norma, ketaatan) menuju kepada kebaikan (terpuji)
Terompet	Berasal dari bahasa Arab <i>"shuwarun"</i> artinya : suara,	Manusia harus selalu menyadari bahwa hidupnya menuju kematian, dan perjalanan hidupnya seiring usianya yang terus berkurang akan semakin mendekati kematian. Karena itu manusia harus menyiapkan bekal yang cukup

	peringatan	agar kelak ketika ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan, ia menerima kebaikan dan pahala dari Tuhan dengan kenikmatan surga Nya.
Kempul	Berasal dari Bahasa Arab " <i>kafulun</i> " yang berarti: bertanggungjawab	Setiap manusia harus bertanggungjawab terhadap amal perbuatannya. Perbuatan buruk akan dibalas dengan keburukan berupa siksa dan penderitaan. Demikian halnya setiap perbuatan baik akan memperoleh balasan kebaikan berupa kebahagiaan.
Kolor/U sus-usus	Berasal dari bahasa Arab " <i>ususun</i> " yang berarti: dasar, asas	Agar hidup manusia sempurna, maka ia harus memegang erat tali Allah (<i>hablun min Allah</i>) dengan ketataan/pengabdian yang sempurna. Bersamaan dengan itu, manusia juga harus memegang tali untuk membangun hubungan antar sesama (<i>hablun min al-nas</i>), hubungan dengan sesama manusia. Kedua tali (vertical dan horizontal) ini menjadi syarat manusia akan menjadi <i>insan kamil</i> (manusia yang sempurna/mulia).
Baju Penadon	Berasal dari bahasa Arab " <i>fanadun</i> " yang berarti : membuktikan bersalah	Manusia harus sadar, bahwa setiap manusia memiliki kelemahan, yakni sifat salah. Oleh karena itu, ia tidak layak berbuat sombong, apalagi jika kesombongan itu ditujukan kepada Tuhan.
Udheng (Ikat Kepala)	Berasal dari bahasa Arab " <i>ud'u</i> " yang berarti: mengajak, menganjurkan	Manusia harus saling mengajak, saling menganjurkan melalui doa dan dakwah. QS. Al-'Ashr : 1-3: " <i>Demi masa. Sesungguhnya manusia akan mengalami kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal salih, saling menasihati dalam hal kebaikan dan saling menasihati dalam hal kesabaran.</i> "
Merak	Keindahan	Makna merak adalah perkataan yang baik. Hal ini dijelaskan dalam al-Baqarah: 263: " <i>Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan caci maki</i> " Manik tasbeih yang ada di paruh burung Merak merupakan ilustrasi dari sarana berzikir (mengingat Allah dengan menyebut nama Nya), yang selalu mengingatkan manusia agar senantiasa melakukannya di setiap saat. Diantara landasan Qur'aninya adalah QS. Al-Ahzab (33):41-42: " <i>ya ayyuhalladzina amanu udzkuru Allaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa ashilan</i> " ("Wahai orang-orang yang beriman berdzikirlah (dengan menyebut nama Allah), dzikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya di waktu pagi dan petang").
Harimau	Kekuatan fisik dan psikis (lahir dan batin)	Makna harimau adalah keberanian (<i>syaja'ah</i>). Islam mengajarkan agar manusia berani membela kebenaran. Rasulullah menegaskan bahwa orang yang mempertahankan kehormatan diri, harta, dan jiwanya dari orang-orang dhalim, maka aksinya itu dimasukkan dalam kategori jihad di jalan Allah.
Pecut/C emeti Samandi man	Kesakralan, kesucian, dan kekuatan	Pecut Samandiman memiliki makna Alqur'an dan Assunnah. Pemimpin yang menjadikan Alqur'an dan Assunnah sebagai pedoman dalam kepemimpinannya inilah yang

		<p>harus ditaati oleh rakyatnya – sebuah ketaatan untuk mendukung tugas <i>khilafah</i> di muka bumi dan bukan untuk mengkultuskannya, sebagaimana firman Allah QS. An-Nisa(4):59: "...<i>athi'u Allaha wa athi'u ar-rasula wa uli al-amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddhu ila Allahi wa ar-Rasuli...</i>" ("Ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul-Nya dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul-Nya (As-sunnah)").</p>
Ragam Tari Tari Warok	Kehati-hatian (menjaga kesucian diri lahir dan batin), kebijaksanaan	<p>Warok adalah figur yang bisa diteladani. Di dalam diri seorang warok telah terkumpul kepribadian yang kuat . Hal ini dilandaskan pada QS. Al-Hasyr : "... <i>Kazar'in akhraja syat'ahu fa azarahu fa istaghladha fa istawa 'ala suqihi yu'jib al-zurra'a</i>" ("... tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya, tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya ...").</p>
Tari Jathil	Kesiap siagaan, Kewaspadaan	<p>Sikap patriotisme pada tarian <i>jathil</i> ini dilandaskan pada firman Allah, misalnya QS. Al-Anfal(8):60: "<i>wa a'iddu lahum ma istatha'tum min quwwatin wa min ribathi al-khairi turhibuna bihi 'aduww Allah wa 'aduwwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum, Allahu ya'lamuhum, wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tudhlamun.</i>" ("Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggetarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya").</p>
Tari Dhadak Merak	Pertaubatan, <i>I'tiraf</i> , menuju kebaikan dan pencerahan diri	<p>Kesadaran atas keniscayaan adanya ujian hidup dan kesiapan untuk menghadapinya. Di dalamnya juga mengandung kesadaran dan pengakuan atas kelemahan diri dan berbenah menuju kebaikan dan kemuliaan hidup.</p>
Tari Pujangga a nong	Optimisme	<p>Nilai atau makna dari Tari Pujangganong (Pujangga Anom) yang terkesan lucu, banyak ulah, dan selalu membuat sensasi sebagai simbol bahwa hidup di dunia ini tidaklah selalu mulus dan lurus. Banyak hambatan dan cobaan dengan beragam jenis. Bahkan di dalam Islam telah menggariskan pemeluknya, bahwa semakin seseorang berkualitas kemusliman dan kemukminannya, maka semakin berat dan beraneka ragam cobaan atau ujian yang bakal diterimanya. Hamba yang memiliki keimanan tinggi, takkan larut oleh segala jenis ujian hidup, tetapi semuanya dihadapi dengan ketegaran hati yang terbalut optimisme tinggi. Hal ini dilandaskan pada firman Allah dalam QS. Yusuf(12): 87: "<i>wa la ta'asu min rawh Allah innahu la ya'asu min rawh Allah illa al-qawm al-kafirun</i>" ("Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah,</p>

sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum kafir”).

Tari Kelanase wandon o	Kepemimpinan, Ketaatan terhadap <i>ulil amri</i>	Ketaatan pada seorang pemimpin ditentukan oleh kualitas/integritas keilmuan dan kepribadian pemimpin yang bersangkutan. Diantara indikator pemimpin yang berkualitas adalah ketaatan mereka terhadap perintah Tuhan Yang Maha Kuasa melalui Kitab Suci dan Sunnah Rasul Nya.
---------------------------------	--	--

Pilar-pilar pendidikan Islam yang terbabar di dalam seni Reyog Ponorogo, sangat strategis untuk mengembangkan model pembelajaran pendidikan Islam, terutama di sekolah. Secara garis besar tujuan pendidikan Islam, sebagaimana dipaparkan di dalam Alqur'an diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yakni; menjadikan hamba Allah yang beriman, mengantar anak didik menjadi khalifah, dan memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tujuan pendidikan karakter berbasis seni Reyog Ponorogo bukanlah tujuan pendidikan Islam, akan tetapi sangat relevan dengan tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan karakter sebagaimana terbabar di dalam nilai dan makna simbol seni Reyog sangat memberi peluang untuk terealisirnya nilai-nilai Alqur'an yang menjadi tujuan pendidikan Islam.

Menurut an-Nahlawi (1989), metode pendidikan Islam yang diturunkan dari Alqur'an dan Hadis sangat menyentuh perasaan, mendidik jiwa, dan membangkitkan semangat. Metode tersebut adalah sebagai berikut : (1) metode *hiwar* (percakapan) Qur'ani dan nabawi; (2) metode kisah; (3) metode *amtsal* (perumpamaan); (4) metode keteladanan; (5) metode pembiasaan dan pengamalan; (6) metode *ibrah* dan *mau'izah*, metode *targhib* dan *tarhib*. Beberapa metode yang disarankan An-Nahlawi ini telah

dipergunakan dalam pembelajaran karakter seni Reyog Ponorogo, terutama metode kisah, pembiasaan, dan keteladanan.

Strategi Internalisasi Nilai-Nilai

Pendidikan Seni Reyog Ponorogo

Penanaman karakter melalui pembelajaran dan dimasukkan sebagai muatan lokal mulai tahun 2006/2007 sampai sekarang. Pembelajaran Reyog di sekolah ini dilakukan melalui intrakurikuler dan diwajibkan bagi kelas satu. Sedangkan di kelas dua dan tiga disampaikan melalui ekstrakurikuler. Karakter yang diturunkan, melalui pembelajaran seni Reyog, sebagaimana disampaikan meliputi; religius, jujur, toleransi, disiplin, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggungjawab, menghargai prestasi, bersahabat, dan komunikatif. Pendidikan karakter berbasis seni Reyog Ponorogo, memang belum intens dan sistematis, di semua sekolah yang diteliti, terutama di sekolah menengah yang disampaikan secara integral melalui latihan dan pentas seni Reyog Ponorogo. Karakter warok, misalnya dijelaskan menjelang tari warok diajarkan/dipentaskan. Penanaman karakter, sebagaimana dipaparkan di atas, memang

belum secara sistematis mengikuti model pendidikan karakter seperti di anjurkan oleh para tokoh pendidikan karakter. Menurut Bukhori, misalnya, proses penanaman nilai budi pekerti/karakter berlangsung secara bertahap. Ada lima fase yang harus dilalui oleh peserta didik untuk memiliki moral atau karakter. Pertama, *knowing*, yaitu mengetahui nilai-nilai. Kedua, *comprehending* yaitu memahami nilai-nilai. Ketiga, *accepting* yaitu menerima nilai-nilai. Keempat, *internalizing* yaitu menjadikan nilai sebagai sikap dan keyakinan. Kelima, *implementing* yaitu mengamalkan nilai-nilai (Bukhori, 2002: 10).

Sementara menurut David R. Krathwohl (1973: 36), tahapan atau fase transformasi karakter meliputi; *receiving* (menyimak), *responding* (menanggapi), *valuing* (memberi nilai), *organization* (mengorganisasikan nilai), dan *characterization* (karakterisasi nilai). Proses transformasi tersebut melibatkan empat unsur afektif, yaitu; minat (*interest*), sikap (*attitude*), nilai (*value*), dan apresiasi (*appreciation*). Proses pendidikan karakter melalui seni Reyog Ponorogo dilakukan dengan tahapan yang belum sistemik seperti pada teori di atas. Proses mengetahui dan memahami nilai dilakukan secara terpadu di dalam praktik tari. Oleh karena itu, dengan kondisi seperti ini detail-detail karakter tidak tersampaikan secara lengkap, terutama dari segi epistemologi dibalik makna simbol Reyog tersebut. Proses transformasi karakter mulai dari menyimak, merespon, memberi nilai, mengorganisasi nilai, dan mengkarakterisasi nilai, dengan demikian, dilakukan dalam tahapan yang sangat umum, yakni melalui pembelajaran/praktik tari. Pengetahuan dan

pemahaman lebih dominan pada aspek sejarah, legenda, dan varian seni Reyog Ponorogo. Proses transformasi, seperti di sarankan Krathwohl, di kalangan *Konco Reyog* bertitik temu pada minat tinggi mereka untuk melakukan seni Reyog Ponorogo. Kecintaan *Konco Reyog* Ponorogo terhadap seni Reyog ini melahirkan apresiasi yang sangat tinggi, sehingga sekalipun pendidikan karakter belum dilakukan secara maksimal, nilai-nilai karakter tertanam dengan kuat pada *Konco Reyog* Ponorogo. Dengan demikian, pendidikan karakter berbasis seni Reyog Ponorogo sangat relevan mendukung program pemerintah, terkait dengan pendidikan karakter. Karakter yang berhasil ditanamkan melalui seni Reyog Ponorogo ini meliputi; (1) cinta Tuhan dengan indikator ketaatan *Konco Reyog* untuk melakukan ibadah melalui berdoa dan menghentikan latihan untuk melakukan shalat sesuai waktu shalat yang hadir di saat latihan atau pentas; (2) kemandirian dan tanggungjawab nampak pada tugas yang diberikan kepada *Konco Reyog*, mereka secara individual maupun kelompok terbiasa untuk memikul tugas atau amanat yang diberikan oleh sekolah, baik yang terkait dengan seni Reyog Ponorogo maupun lainnya dari pihak sekolah ataupun guru dengan penuh tanggungjawab; (3) karakter gotong royong atau kerjasama terbentuk secara baik. Dalam latihan kerjasama ini terlihat di dalam budaya saling mengingatkan terhadap peran yang keliru. Sementara di dalam keseharian, karakter ini mewujudkan di dalam perilaku saling mengingatkan terhadap tugas-tugas studi maupun perilaku yang harus dilakukan atau

tidak boleh dilakukan sesuai norma dan tata tertib sekolah.

Reyog Berbasis Sekolah; Strategi Menyongsong MEA

Diantara kekuatan dan daya jual seni Reyog Ponorogo adalah komponen-komponen seninya yang sarat makna luhur. Makna luhur simbol Reyog Ponorogo ini sulit terungkap apalagi tertanam dalam sistem kepribadian *Konco Reyog* apabila tidak disampaikan melalui pembelajaran yang baik. Sementara seni Reyog yang lazim eksis di Ponorogo adalah seni Reyog yang lebih dominan menyampaikan misi menghibur dan tidak untuk pelajaran atau tuntunan hidup. Oleh karena itu, kenyataan tentang masuknya seni Reyog Ponorogo dalam dunia pendidikan sekolah melahirkan mimpi menuju pencerahan bagi *Konco Reyog* Ponorogo. Harapan besar terhadap seni Reyog berbasis sekolah ini terutama pada transformasi dan internalisasi nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam komponen seni nya, sebagaimana dipaparkan di atas. Pemahaman *Konco Reyog* terhadap pilar-pilar nilai luhur yang disampaikan melalui cara yang sangat menarik, jelas akan melahirkan komunitas seni Reyog (*Konco Reyog*) Ponorogo yang cerdas.

Selanjutnya melalui tangan *Konco Reyog* di sekolah ini, pengembangan seni Reyog Ponorogo akan berjalan lebih dinamis dan dengan nuansa akademik yang kental. Kondisi seni budaya yang seperti inilah, diharapkan akan mampu menghadapi pasar global, terutama lingkup masyarakat Asia yang dalam waktu dekat akan segera terwujud. Dalam dunia yang semakin mengglobal, sebuah seni budaya tidak cukup

hanya mengandalkan sisi kemenarikannya dari sudut pandang seni (*art*) nya, tetapi lebih bagaimana para pelaku seni budaya itu mampu berkreasi secara dinamis berbasis konteks masyarakat yang mendunia itu. Seni Reyog Ponorogo memang tidak diragukan telah mampu melahirkan kemenarikan itu dari dalam dirinya sendiri, tetapi kemenarikan itu akan cepat hilang ketika masyarakat pengagumnya tidak lagi mau mengapresiasinya karena alasan konvensional dan stagnan (tidak bisa mengikuti konteks perkembangan jaman). Dengan demikian, seni Reyog Ponorogo akan mampu menjawab tuntutan jaman (terutama menyongsong MEA) di tangan *Konco Reyog* yang memiliki dasar pendidikan yang baik. Pendidikan karakter *Konco Reyog* melalui pembelajaran di sekolah, lebih jauh akan melahirkan generasi seni Reyog Ponorogo yang memiliki kepribadian dan karakter yang kuat untuk menghadapi kehidupan mendunia, khususnya MEA. Hal ini karena masyarakat Indonesia secara umum seperti masyarakat Asia Tenggara pada umumnya akan sangat mudah terkena perubahan, yang tidak jarang perubahan itu justru menghilangkan karakter dan kepribadian Indonesia nya, yang menjunjung persatuan dan kesatuan di bawah nilai-nilai agama (Islam) yang sangat kental.

Dalam hal ini, Omar Farouk dalam Muzani (1995: 23-24) menyebut tiga karakter watak masyarakat Asia, yakni; pertama, memiliki komitmen yang sangat besar dan dalam, baik secara spiritual maupun psikologis; kedua, secara intelektual Muslim Asia Tenggara selalu bersikap terbuka dan reseptif terhadap proses islamisasi yang berlangsung secara terus menerus; ketiga,

Muslim Asia Tenggara merupakan masyarakat yang mudah terkena oleh perubahan yang mengganggu mereka dari waktu ke waktu.

KESIMPULAN

Di dalam seni Reyog Ponorogo terkandung sejumlah nilai edukasi yang bisa dimanfaatkan untuk membentuk karakter luhur *Konco Reyog* Ponorogo, terutama bagi *Konco Reyog* di sekolah melalui pembelajaran. Nilai-nilai pendidikan dalam seni Reyog Ponorogo, meliputi; pendidikan keimanan, pendidikan akhlak, pendidikan kepemimpinan, dan sebagainya. Nilai-nilai pendidikan tersebut ternyata sangat relevan dengan nilai-nilai pendidikan Islam, sehingga dalam perspektif ini, pendidikan karakter *Konco Reyog* bisa dititik muarkan pada nilai-nilai ajaran Islam, mengingat basis keagamaan *Konco Reyog* sebagai pemeluk Islam. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalam seni Reyog Ponorogo telah diupayakan untuk ditransformasikan melalui pendidikan karakter di sekolah-sekolah di Ponorogo, baik melalui intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Dalam praktik, pendekatan pembelajaran yang digunakan meliputi praktis dan teoritis. Hanya saja sementara ini masih dominan menggunakan pendekatan praktis, sehingga hasilnya sekalipun sudah cukup baik, tetapi belum optimal. Sementara penyajian secara teoritis belum dipergunakan secara maksimal, padahal pada model penyajian ini akan sangat mendukung penyajian praktis, karena sebagaimana ditulis Ratna (Ra2014: 196-197), bahwa penyajian teoritis dianggap lebih penting, sebab dilakukan melalui proses yang terstruktur, bahkan menggunakan teori dan metode.

Disamping itu juga dilakukan secara formal di dalam kelas, melalui diskusi, Tanya jawab, dan seterusnya. Juga dilakukan melalui pembimbingan, yakni melalui guru, dosen, dan para instruktur lainnya. Pendidikan karakter melalui nilai-nilai karakter yang dikandung dalam seni Reyog Ponorogo, satu sisi, bisa dipergunakan untuk menanamkan nilai-nilai karakter kepada *Konco Reyog* dengan sangat mudah, karena berbasis seni budaya (Reyog Ponorogo) yang secara implisit sudah mengandung kemenarikan. Sementara pada sisi yang lain, pendidikan karakter berbasis seni Reyog Ponorogo ini juga bisa dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan karakter di Indonesia, disamping juga dapat dipergunakan sebagai salah satu cara atau strategi untuk menguatkan upaya pelestarian dan pengembangan seni Reyog Ponorogo, mengingat seni budaya ini telah menjadi *branding* peradaban Ponorogo, khususnya dan Indonesia pada umumnya. Pelestarian dan pengembangan Reyog Ponorogo yang bersifat konvensional, dimungkinkan akan tergilas oleh perubahan jaman, terutama praktik negara-negara yang akan mendunia dalam waktu dekat, khususnya MEA. Dengan demikian, dibutuhkan upaya cerdas yang mampu menjamin bahwa keberadaan seni Reyog Ponorogo ini tidak sekedar menjadi subyek perubahan, tetapi justru menjemput perubahan itu dengan keunggulan. Seni Reyog Ponorogo akan mampu melayani tuntutan jaman dan menjadi penyambut MEA dengan keunggulan itu di tangan *Konco Reyog* yang memiliki integritas keilmuan sekaligus kepribadian yang unggul.

DAFTAR PUSTAKA

- Alqur'an dan Terjemahnya, (Madinah Munawwarah: Muja'mma' al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mushaf asy-Syarif)
- Al Bukhari, Imam Abi 'Abdillah, tt. *Sahih Bukhari*, Semarang: Toha Putra.
- Abdurrahman, An-Nahlawi, 1989. *Prinsip-Prinsip Dasar Metode Pendidikan Islam dalam Keluarga, di Sekolah, dan di Masyarakat*, Terj. Herry Noer Ali, Bandung: Diponegoro).
- Fronidizi, Risieri, 2011. *Pengantar Filsafat Nilai*, terjemahan Cuk Ananta Wijaya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lickona, Thomas, 1992. *Educating for Character; How Our School Can Teach Respect and Responsibility*, New York: Bantam Books.
- Munawwir, AW., 1984. *Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Progressif.
- Omar Farouk, 1995. "Muslim Asia Tenggara dari Sejarah Menuju kebangkitan Islam", dalam Saiful Muzani (Ed.), *Pembangunan dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta: LP3ES).
- Ranta, Nyoman Kutha, 2014. *Karya Sastra, Seni, dan Budaya dalam Pendidikan Karakter*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Roqib, Moh. 2007. *Harmoni dalam Budaya Jawa (Dimensi Edukasi dan Keadilan Gender)*, Purwokerto: STAIN Purwokerto Press.
- Sunan Ibnu Majah, tt., Semarang: Penerbit Toha Putra.
- Zuchdi, Darmiyati, 2008. *Humanisasi Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

PENGEMBANGAN MODEL PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS MUSIK
(Studi Etnografi Pendidikan Di SD Muhammadiyah Terpadu Ponorogo)

Oleh :
RUDIANTO¹⁾
SUGENG WIBOWO²⁾
SUMAJI³⁾

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
Email: alrujika@gmail.com¹⁾

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui a) karakteristik jenis-jenis musik latar yang diperdengarkan untuk membangun karakter siswa di Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu Ponorogo. b) karakteristik pembelajaran yang diiringi dengan musik latar; c) model pembentukan karakter siswa melalui pendidikan berbasis musik dan d) karakter Siswa Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu setelah mendapat pendidikan karakter berbasis musik. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *fenomenologis*. Peneliti ingin mendeskripsikan kondisi lapangan sesuai dengan fenomena yang ada, tanpa rekayasa apapun dari peneliti. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses pengumpulan data yang dilakukan secara santai dan penuh kekeluargaan, agar makna, struktur kognitif, pikiran, emosional, cita-cita, pengalaman spiritual, penghayatan, penilaian, kebahagiaan dan suasana hatinya dapat diungkap lebih dalam dan lebih utuh. Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan. Lokasi penelitian ini adalah Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu Ponorogo, maka sumber datanya yaitu kepala sekolah, para guru, siswa, orangtua, dan masyarakat, peristiwa yang terjadi di lapangan, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode deskriptif yang dilandaskan pada pola berpikir *induktif dan induktif* melalui proses interaktif antara pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara perpanjangan keikutsertaan dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik jenis musik latar yang diperdengarkan siswa di sekolah sangat bervariasi. Hal ini menyesuaikan dengan jadwal kegiatan sekolah antara lain saat ketangan siswa, waktu pembelajaran di kelas, waktu istirahat, shalat dhuha, kegiatan di luar kelas, dan musik saat kepulangan. Kegiatan pembelajaran yang diberi musik latar membuat siswa lebih tenang dan damai. Model pembentukan karakter berbasis musik latar yang diselingi pesan-pesan moral dan nilai-nilai agama yang didasarkan pada al-Quran dan al-Hadits. Karakter siswa Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu Ponorogo tampak jelas perkembangannya pada rasa kesadaran diri, percaya diri, aktualisasi diri, tanggung jawab sosial, hubungan interpersonal, dan empaty terbangun dengan sangat baik.

Kata Kunci: *Pendidikan, Karakter, Dan Musik*

PENDAHULUAN

Semangat untuk menjadi bangsa yang berkarakter ditegaskan oleh Soekarno dengan mencanangkan *nation and character building* dalam rangka membangun dan mengembangkan karakter bangsa Indonesia guna mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Secara spesifik

Soekarno menegaskan dalam amanat Pembangunan Semesta Berencana tentang pentingnya karakter ini sebagai *mental investment*, yang mengatakan bahwa kita jangan melupakan aspek mental dalam pelaksanaan pembangunan dan mental yang dimaksud adalah mental Pancasila. Keinginan untuk mewujudkan cita-cita bangsa tersebut sampai saat ini masih sebatas pada wacana

yang terus menjadi bahan pemikiran khususnya para pelaku pendidikan. Pada era pemerintahan Jokowi yang mempunyai program revolusi mental bangsa menuju bangsa yang berkarakter. Sebelum panjang lebar untuk berbicara tentang karakter para pelaku pendidikan harus mengetahui dan memahami arti sebuah karakter itu sendiri. Karakter adalah sebuah sistem keyakinan dan kebiasaan yang mengarahkan tindakan seorang. Antara karakter dan akhlak tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Keduanya sebagai suatu tindakan yang terjadi tanpa ada pemikiran lagi karena sudah tertanam dalam pikiran bawah sadarnya. Pembentukan karakter anak harus dimulai dari perubahan *mindset* mereka. Karena hampir setiap perilaku anak dimulai dari pola pikirannya. Pikiran yang positif akan menghasilkan perilaku positif dan sebaliknya. Untuk merubah pikiran seseorang harus diberi pengetahuan, pemahaman, pembinaan, pengawasan secara intensif dan berkelanjutan. Ketika terjadi penyimpangan perilaku seseorang harus segera diluruskan dengan cara baik dan penuh kasih sayang. Untuk itu diperlukan seorang pendidik yang memiliki kemampuan dan pengalaman tentang cara mendidik karakter bagi peserta didiknya. Banyak tokoh nasional hasil didikan dari pondok pesantren yang ada di Ponorogo. Seperti: Nurcholis Madjid, Hasyim Muzadi, Din Syamsuddin, Hidayat Nurwahid, Luqman Hakim Syaifudin, dan lain-lain. Secara umum mereka memiliki karakter positif dan memiliki kemampuan menjadi pemimpin yang baik. Terdapat salah satu sekolah swasta yang bernama SD Muhammadiyah Terpadu (SDMT) yang berada di Ponorogo,

mempunyai motto "Character Building School" yang melaksanakan proses pendidikan dengan memfokuskan pada pembentukan karakter anak. Sekolah yang baru berdiri pada tahun 2003 yang lalu telah berhasil mencetak para siswanya menjadi anak-anak yang berkarakter.

Nilai-nilai karakter yang ditanamkan terdiri atas enam pilar utama yaitu mendidik karakter kesadaran diri, percaya diri, aktualisasi diri, tanggung jawab sosial, hubungan interpersonal, dan membangun jiwa *empaty*. Peneliti merasa kagum dan terharu ketika melihat penampakan para siswa dan para alumninya yang memiliki perilaku sangat positif baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Dalam kesehariannya di sekolah hampir tidak dijumpai adanya siswa berkelahi antar teman, pembicaraan kotor, dan sejenisnya. Justru yang terlihat pada anak-anak adalah bersikap baik, sopan santun terhadap guru, orangtua, dan orang lain, bersikap dewasa, memiliki tanggung jawab, percaya diri, suka menolong temanya yang kesulitan, mandiri, dan penuh kesadaran diri. Sikap percaya diri tampak ketika anak-anak ditunjuk dan ditugasi oleh guru tanpa ragu-ragu mereka siap menjalankan tanpa banyak alasan. Berdasarkan pengamatan, peneliti mendatangi sekolah dan terdengar suara-suara musik teman belajar sepanjang hari. Suara musik itu sangat bervariasi dan menyesuaikan dengan kegiatan sekolah. Ketika siswa datang terdengar musik ceria selamat pagi dengan volume tinggi. Saat pembelajaran di dalam kelas terdengar musik kleningan, musik klasik, musik-musik Islami yang berupa instrumental dengan volume

rendah. Musik-musik yang mengiringi kepulangan siswa berupa musik riang gembira yang memotivasi siswa untuk ingin berjumpa lagi di esok harinya dengan volume suara cukup keras. Selain itu juga terdengar pesan-pesan moral agama dan etika yang bertujuan untuk membentuk karakter anak. Misalnya tentang adab makan, manfaat silaturahmi, suka menolong, rajin belajar, berbuat baik kepada guru dan orangtua, dan lain-lain. Masalahnya sekarang adalah bagaimana pendidikan karakter anak-anak di SDMT Ponorogo dilaksanakan sehingga mampu membentuk kepribadian yang baik tersebut?

Oleh karena itu tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) karakter jenis-jenis musik yang diperdengarkan kepada anak-anak saat berada di sekolah; 2) karakter pembelajaran yang diiringi dengan musik latar; 3) model pembentukan karakter anak sehingga menjadi baik.

METODE PENELITIAN

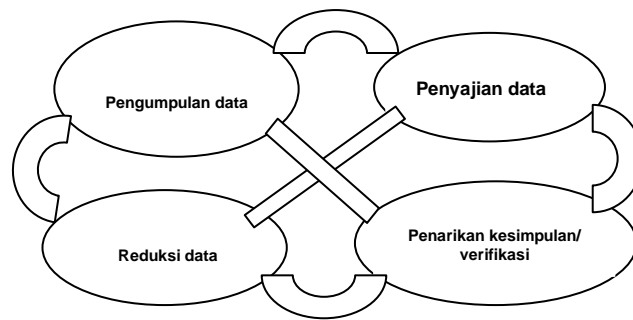
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *fenomenologis*. Peneliti ingin mendiskripsikan kondisi lapangan sesuai dengan fenomena yang ada, tanpa rekayasa apapun dari peneliti. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan datanya adalah menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Proses pengumpulan data yang dilakukan secara santai dan penuh kekeluargaan, agar makna, struktur kognitif, pikiran, emosional, cita-cita, pengalaman spiritual, penghayatan, penilaian, kebahagiaan dan suasana hatinya

dapat diungkap lebih dalam dan lebih utuh. (Moleong, 1993:170).

Peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan. Kehadiran peneliti di lapangan sangat menentukan obyektivitas data. Pada saat di lapangan, kedudukan peneliti sebagai siswa. (Spredly (2007:70).

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa karakteristik jenis musik yang digunakan sebagai latar dalam kegiatan sekolah, karakter pembelajaran dan pendidikan karakter dengan musik latar dan pesan-pesan moral, dan model pembentukan karakter siswa yang dilaksanakan di sekolah. Lokasi penelitian ini adalah Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu Ponorogo, maka sumber data yang diperlukan antara lain dari informan yaitu kepala sekolah, para guru, siswa, orangtua, dan masyarakat. Selain itu juga peristiwa yang terjadi di lapangan berupa aktifitas guru dan siswa baik di dalam maupun di luar kelas, rekaman, dokumen atau arsip yang ada di lapangan. (Sutopo, 2002:50).

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan metode deskriptif yang dilandaskan pada pola berpikir *induktif* melalui proses empat tahapan yang digambarkan sebagai berikut:



Analisis data kualitatif di atas merupakan komponen-komponen analisis data model alir. Analisis data kualitatif juga diartikan sebagai upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus. Masalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berturutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang susul menyusul seperti digambarkan pada gambar model analisis interaktif. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan cara-cara : (1) Perpanjangan keikutsertaan; 2) Triangulasi.

KAJIAN TEORI

Pendidikan Karakter

Pendidikan karakter adalah proses pemberi nuntunan kepada peserta didik untuk menjadi manusia seutuhnya yang berkarakter dalam dimensi hati, pikir, raga rasa dan karsa. (Muchlas Samani dan Hariyanto, 2012:45).

Dan tujuan pendidikan adalah untuk pembentukan karakter yang terwujud dalam kesatuan esensial subjek dengan perilaku dan sikap hidup yang dimilikinya. (Maksudin, 2013:54).

Ada 18 nilai dalam pendidikan karakter menurut Departemen Pendidikan Nasional adalah: Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri,

demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/ komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab. (Agus Zaenal Fitri, 2012:40).

Ada beberapa alasan perlunya pendidikan karakter, di antaranya: (1) Banyaknya generasi muda saling melukai karena lemahnya kesadaran pada nilai-nilai moral, (2) Memberikan nilai-nilai moral pada generasi muda merupakan salah satu fungsi peradaban yang paling utama, (3) Peran sekolah sebagai pendidik karakter menjadi semakin penting ketika banyak anak-anak memperoleh sedikit pengajaran moral dari orangtua, masyarakat, atau lembaga keagamaan, (4) masih adanya nilai-nilai moral yang secara universal masih diterima seperti perhatian, kepercayaan, rasa hormat, dan tanggung jawab, (5) Demokrasi memiliki kebutuhan khusus untuk pendidikan moral karena demokrasi merupakan peraturan dari, untuk dan oleh masyarakat, (6) Tidak ada sesuatu sebagai pendidikan bebas nilai. Sekolah mengajarkan pendidikan bebas nilai. Sekolah mengajarkan nilai-nilai setiap hari melalui desain ataupun tanpa desain, (7) Komitmen pada pendidikan karakter penting manakala kita mau dan terus menjadi guru yang baik, dan (8) Pendidikan karakter yang efektif membuat sekolah lebih beradab,

peduli pada masyarakat, dan mengacu pada performansi akademik yang meningkat. (Maksudin, 2013:52).

Untuk itu diperlukan sebuah pendekatan yang harus diterapkan diseluruh komponen sekolah (*school-wide approach*), yaitu: 1) Sekolah/ madrasah harus dipandang sebagai lingkungan yang diibaratkan seperti pulau dengan bahasa dan budayanya sendiri. Namun, sekolah juga harus memperluas pendidikan karakter buka saja kepada guru, staf, dan siswa tetapi juga kepada keluarga, lingkungan masyarakat. 2) Dalam menjalankan kurikulum karakter sebaiknya, pengajaran tentang nilai-nilai berhubungan dengan sistem sekolah secara keseluruhan, diajarkan sebagai subjek yang tidak berdiri sendiri namun diintegrasikan dalam kurikulum sekolah secara keseluruhan, seluruh komponen sekolah/madrasah menyadari dan mendukung tema nilai yang diajarkan; 3) Penekanan ditempatkan untuk merangsang bagaimana siswa menterjemahkan prinsip nilai ke dalam bentuk perilaku prososial. (Abdul Majid, 2012:112).

Pengembangan Budaya Sekolah dan Pusat Kegiatan Belajar, dilakukan melalui kegiatan pengembangan diri, yaitu: 1) Kegiatan rutin, Kegiatan rutin yaitu kegiatan yang dilakukan peserta didik secara terus menerus dan konsisten setiap saat. Misalnya kegiatan upacara hari Senin, upacara besar kenegaraan, pemeriksaan kebersihan badan, piket kelas, shalat berjamaah, berbaris ketika masuk kelas, berdoa sebelum pelajaran dimulai dan diakhiri. (Masnur Muslich, 2011:176).

Teori Pengkondisian

Pengkondisian, Pengkondisian yaitu penciptaan kondisi yang mendukung keterlaksanaan pendidikan karakter, misalnya kondisi toilet yang bersih, tempat sampah, halaman yang hijau dengan pepohonan, suara musik, poster kata-kata bijak yang dipajang di lorong sekolah dan di dalam kelas. (Muchlas Samani dan Hariyanto, 2012:147).

Tokoh Classical Conditioning dan bapak teori belajar Modern, Ivan Petrovich Pavlov dilahirkan di Ryazan Rusia desa tempat ayahnya Peter Dmitrievich Pavlov menjadi seorang pendeta pada 18 September tahun 1849 dan meninggal di Leningrad pada tanggal 27 Pebruari 1936. Ia dididik di sekolah gereja dan melanjutkan ke Seminari Teologi. Ayahnya seorang pendeta, dan awalnya Pavlov sendiri berencana menjadi pendeta, namun dia berubah pikiran dan memutuskan untuk menekuni fisiologi. Diasebenarnya bukanlah sarjana psikologi dan tidak mau disebut sebagai ahli psikologi, karena dia adalah seorang sarjana ilmu faal yang fanatik. Tahun 1870, ia memasuki Universitas Petersburg untuk mempelajari sejarah alam di Fakultas Fisika dan Matematika. (Hergenhahn, B.R. & Matthew H. Olson, 1997:161).

Eksperimen-Eksperimen Ivan Petrovich Pavlov dalam tahun-tahun terakhir dari abad ke 19 dan tahun-tahun permulaan abad ke-20, Pavlov dan kawan-kawan mempelajari proses pencernaan dalam anjing. Selama penelitian mereka para ahli ini memperhatikan perubahan dalam waktu dan kecepatan pengeluaran air liur. Dalam eksperimen-eksperimen ini Pavlov dan kawan-kawannya menunjukkan, bagaimana belajar dapat mempengaruhi perilaku yang

selama ini disangka refleksif dan tidak dapat dikendalikan, seperti pengeluaran air liur. (Dahar, Ratna Wilis, 1988:28). Anjing dioperasi kelenjar ludahnya sedemikian rupa sehingga memungkinkan penyelidik mengukur dengan teliti air ludah yang keluar dengan pipa sebagai respons terhadap perangsang makanan (berupa serbuk daging) yang disodorkan ke mulutnya. Eksperimen Pavlov diulang beberapa kali hingga akhirnya diketahui bahwa air liur sudah keluar sebelum makanan sampai ke mulut. Artinya, air liur telah keluar saat anjing melihat piring tempat makanan, melihat orang yang biasa memberi makanan bahkan saat mendengar langkah orang yang biasa memberi makanan. (G.A. Kimble, N. Garnezy & E. Zigler, 1974:208).

Dalam eksperimennya, tanda atau signal selalu diikuti datangnya makanan. Berkat latihan-latihan selama eksperimen, anjing akan mengeluarkan air liurnya bila melihat atau mendengar signal-sinyal yang persis sama dengan signal-signal yang digunakan dalam eksperimen. Apabila dikaji secara mendalam menurut psikologi, refleks bersyarat merupakan hasil belajar atau latihan. Namun, sebagai seorang ahli fisiologi, Pavlov tidak tertarik pada masalah tersebut karena lebih tertarik pada masalah fungsi otak. Dengan mendapatkan reflex bersyarat, Pavlov berkeyakinan bahwa ia telah menemukan sesuatu yang baru dibidang fisiologi. Dia ingin mengetahui proses terbentuknya refleks bersyarat melalui penyelidikan mengenai fungsi otak secara tidak langsung. (Muhibbin Syah, 2006:30-33).

Dalam usahanya memahami fungsi otak, Pavlov mengulangi eksperimen seperti

di atas dengan berbagai variasi. Adapun langkah langkah eksperimennya adalah: 1) Anjing dibiarkan lapar, Pavlov membunyikan metronom dan anjing mendengarkannya dengan sungguh-sungguh. Variasi lain dilakukan dengan menyalakan lampu dalam kamar gelap dan anjing memperhatikan lampu menyala. Setelah metronom berbunyi atau lampu menyala selama 30 detik, makanan (serbuk daging) diberikan dan terjadilah refleks pengeluaran air liur. 2) Percobaan tersebut, baik dengan membunyikan metronom maupun menyalakan lampu, diulang berkali-kali dengan jarak 15 menit. 3) Setelah diulang 32 kali, bunyi metronom atau nyala lampu selama 30detik dapat menyebabkan keluarnya air liur dan semakin bertambah deras jika makanan diberikan. (Sumadi Suryabrata, 2006:264).

Pendidikan Musik dan Citra Diri

Melalui program-program yang menyenangkan dan berkualitas tinggi, dengan didukung oleh guru professional dan menggunakan alat-alat yang berkualitas tinggi, siswa akan belajar berkelompok melantunkan musik. Bukti menunjukkan bahwa dengan musik siswa akan mengembangkan beberapa sikap dan watak : (1) Citra diri; (2) Percaya diri; (3) Ketrampilan sosial; (4) Sikap positif terhadap pendidikan; (5) Kemampuan musik. (Munson, M., Brinson, B. A., & Demorest, S. M., 2013:23)

Musik Dan Perilaku Kreatif

Ketika kita berhubungan dengan musik entah sebagai pendengar, penyanyi, atau pengarang lagu sesungguhnya kita sedang melibatkan dunia emosi dari dalam yang akan mendorong perilaku yang ekspresif dan

imajinasi yang kreatif. Karenanya seorang penikmat musik membuat suatu pernyataan unik bahwa bahasa musik lebih mampu mengungkapkan berbagai kerumitan dengan utuh, jauh dari reduksi. Kemampuan ini adalah kemampuan istimewa karena tidak dimiliki oleh bahasa apapun. Sastra misalnya, kerap diasumsikan sebagai hasil kreasi manusia yang mampu mengatasi berbagai ketidakmungkinan bahasa biasa di dalam mengungkapkan suatu kenyataan. (Inayat Khan, Hazrat, 2002: 6).

Musik Menghilangkan Strees

Waktu mememang menjadi musuh nomor satu dari ingatan. Akan tetapi, waktu melakukannya dengan cara yang halus. Waktu menghapus ingatan secara diam-diam atau hamper tanpa disadari. Di sisi lain, stress adalah musuh ingatan yang brutal. Bahkan, stress dapat membunuh secara harfiah. Stress yang berlebihan dapat merusak beberapa wilayah otak dan menghancurkan sel-selnya. Stress bisa menghalangi penerimaan, mencegah penyimpanan, serta menghambat proses mengingat informasi. (Scott Hagwood, t.t: 201).

Jenis Musik Berpengaruh Terhadap Perasaan

Sebenarnya kesadaran bahwa musik berpengaruh terhadap emosi bukanlah hal yang baru. Sudah berabad-abad yang lampau masyarakat menyadari hal ini. Aristoteles misalnya, menyusun pengaruh berbagai modus terhadap emosi. Lebih dari itu, beberapa peneliti telah menemukan potensi musik untuk mengubah perasaan, mengubah perilaku konsumen, menjadi alat terapi bagi ketidakseimbangan emosi. (Marcel Zentner,

Didier Grandjean, and Klaus R. Scherer, 2008:494)

Bahkan daerah otak yang diaktivasi oleh musik emosional secara tentative sama dengan yang diaktivasi oleh hal-hal yang kuat seperti seks, makanan, serta obat-obat terlarang. Walaupun demikian, taksonomi yang sistematis terhadap hubungan antara musik dan emosi belum bisa disusun secara pasti. Lebih jauh, Zentner dkk, menemukan bahwa tidak semua individu bereaksi secara emosional terhadap musik. (Marcel Zentner, Didier Grandjean, and Klaus R. Scherer, 2008: 494).

Musik Latar Meningkatkan Konsentrasi Belajar

Beberapa penelitian memperlihatkan bahwa belajar sambil mendengarkan musik favorit akan meningkatkan konsentrasi belajar sebagian siswa. Wiebe menemukan bahwa dengan mendengarkan musik kesukaannya, seorang remaja yang didiagnosa mengidap *Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder* (ADHD), sebuah gejala kurang perhatian yang disertai hiperaktifitas, mampu meningkatkan konsentrasi belajar di sekolah maupun saat mengerjakan pekerjaan rumah, meningkatkan kemampuan mengingat informasi, menumbuhkan sikap positif terhadap tugas sekolah. (Joni Erin Webe, ADHD, 2007:ii).

Hasil penelitian Bieger, ohrmann dan Wiegel. Mereka menemukan bahwa siswa yang telah mendapatkan penjelasan mengenai AIDS dapat lebih mendalami topik mengenai HIV melalui animasi komputer yang dilengkapi dengan musik latar. Sebaliknya siswa yang belum mendapatkan penjelasan mengenai AIDS dapat lebih efektif mendalami

topik mengenai HIV melalui animasi komputer yang tidak dilengkapi musik latar. (Silvia Beeger, Silvia ohrmann, dan Beate Wiegel, 2004:4227).

Musik Menstimulus Otak Kanan Anak

Otak manusia terdiri dari dua bagian, yakni otak kiri dan otak kanan. Otak kiri bekerja untuk fungsi logika, *sequence*, dan analisa, sedangkan otak kanan bekerja untuk tugas visual, kreatifitas, emosi, *mood*, dan lain-lain. Musik yang bagus akan menghasilkan *mood* dan emosi yang bagus. Musik yang dapat diperdengarkan kepada anak-anak harus memperhatikan aktivitas dan karakter anaknya sendiri. Misalnya anak hiperaktif harus diperdengarkan musik-musik yang lembut, tempo rendah dengan harapan emosinya dapat dipengaruhi oleh suara musik tersebut. Sebaliknya anak-anak yang terlalu pasif, jenis musik yang diberikan harus dapat merangsangnya agar mereka aktif. (Esthi Endah Ayuning Tyas, 2008, 152-153).

Musik Memberikan Rangsangan Terhadap Aspek Kognitif

Dikemukakan Campbell (2001:16) dalam bukunya "Efek Mozart" mengatakan musik Barok (Bach, Handel dan Vivaldi) dapat menciptakan suasana yang merangsang pikiran dalam belajar. Musik klasik (Haydn dan Mozart) mampu memperbaiki konsentrasi ingatan dan persepsi spasial. Masih banyak lagi jenis-jenis musik lain mulai dari *Jazz*, *New Age*, *Latin*, *Pop*, *lagu-lagu*, *Gregorian* bahkan gamelan yang dapat mempertajam pikiran dan meningkatkan kreativitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Karakteristik Musik-Musik Teman

Belajar

Karakteristik jenis musik latar yang digunakan untuk mendukung proses kegiatan pendidikan karakter di SD Muhammadiyah Terpadu Ponorogo berlangsung setiap hari dan sepanjang hari kecuali hari libur. Musik dibunyikan mulai pukul 06.45 pagi sampai dengan perpulangan siswa pukul 14.30 WIB. Gagasan ini muncul karena ingin menciptakan suasana kenyamanan anak-anak selama berada di sekolah. Berangkat dari pemikiran itulah maka gagasan itu muncul dari para pendiri sekolah ini yang didukung oleh yayasan setempat untuk membuat sekolah yang menyenangkan agar anak-anak yang datang ke sekolah merasa nyaman, senang, dan betah di sekolah. Berawal dari gagasan itu kemudian muncul pemikiran untuk menyelipkan pesan-pesan moral, agama, yang dinukilkan dari ayat-ayat al-Quran dan al-Hadits Rasulullah SAW. Jenis-jenis musik yang diperdengarkan menyesuaikan dengan kondisi dan situasi kegiatan siswa sejak siswa datang, siswa masuk kelas, siswa menghafal al-Quran di pagi hari, kegiatan belajar mengajar, saat istirahat, saat upacara bendera, dan saat perpulangan. Dengan pengaturan jenis musik inilah akhirnya kegiatan belajar mengajar tidak terganggu dan suasana sekolah menjadi hidup, seluruh warga sekolah merasa senang dan mendorong semua warga sekolah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Musik selamat datang

Musik paket selamat datang selalu bervariasi antara lain: Selamat Datang, Pagi Yang Cerah, Ahlan Wa Sahlan, Ya Nabi Salam, Asmaul Husna. Secara bergantian jenis musik latar yang diperdengarkan dalam satu minggu diprogram bervariasi. Selang beberapa saat ketika jam masuk kelas sudah dikumandangkan, jenis musik yang dilantunkan adalah “tilawatil al-qur’an” hasil rekaman santri Jamiatul Qura siswa-siswi SD Muhammadiyah Terpadu Ponorogo. Abas adalah salah satu wali murid kelas II mengatakan bahwa “anak saya setiap hari di rumah selalu menghafalkan al-Quran seperti yang terdengar di sekolah melalui musik. Untuk itu saya mendorong kepada anak saya untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler “tartil” setiap hari selasa sore. Dan anak saya tidak merasa tertekan walaupun keseharian penuh dia berada di sekolah sampai jam lima sore”. Ketrampilan hidup yang baik seperti diungkapkan oleh Efendi Qosim, guru dan pembimbing siswa mengatakan : “ketrampilan hidup yang ditanamkan kepada anak-anak di SD ini adalah enam pilar yaitu kesadaran diri, percaya diri, aktualisasi diri, tanggung jawab social, hubungan interpersonal yang baik, dan melakukan empathy. Dengan dibekali enam hal tersebut diharapkan lulusannya memiliki karakter akhlakul karimah, baik saat di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat”.

Musik sebagai pembatas waktu

Yang dimaksud dengan musik pembatas waktu di sini adalah spot musik yang diprogram sesuai dengan kegiatan

sekolah antara lain untuk mengatur jam masuk kelas, jam istirahat, jam shalat, jam makan siang, upacara bendera, dan kegiatan sekolah lainnya. Spot musik tersebut direkam dan dimasukkan ke dalam program radio komunitas sekolah yang diintegrasikan dengan computer kantor administrasi, secara otomatis akan menyesuaikan sendiri sesuai dengan yang direncanakan.

Musik Pembelajaran

Yang dimaksud musik pembelajaran adalah bunyi-bunyian musik yang digunakan sebagai latar yang mengiringi proses kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan. Azis Iwan Muttaqin kepala SDMT Ponorogo mengatakan bahwa “untuk menciptakan suasana sekolah atau kelas yang kondusif sekolah menyertakan bunyi musik latar sepanjang hari. Hanya saja untuk menentukan jenis musik apa yang akan disampaikan menyesuaikan dengan kegiatan anak-anak di sekolah. Untuk musik latar kegiatan pembelajaran di kelas dilantunkan musik klasik instrumentalia tanpa sair. Volume musik latar tidak melebihi suara orang bicara, sehingga tidak mengganggu konsentrasi belajar anak”. Di antara jenis musik klasik yang digunakan untuk mengiringi kegiatan belajar mengajar di dalam kelas adalah musik yang memiliki tempo lambat dan berupa instrumentalia tanpa syair. Jenis lagunyapun bukan merupakan lagu favorit anak-anak karena akan mengganggu konsentrasi anak-anak. Menurut data yang diperoleh bahwa musik-musik klasik yang

diperdengarkan di SD Muhammadiyah Terpadu saat pembelajaran berlangsung di antaranya adalah : *Musik Mozart, Bettoven, Symphony, Sonata, Canon, Adagio in G. Minor*, Baurouq, dan musik degung, dan jenis lain yang bertempo rendah lainnya.

Musik menemani kegiatan fisik

Yang dimaksud dengan kegiatan fisik adalah seluruh kegiatan yang melibatkan fisik secara langsung fisik anak. Misalnya olah raga, berlibur (bersih lingkungan), kerja bakti, dan kegiatan ekstra kurikuler. Musik latar yang diperdengarkan saat kegiatan fisik ini adalah musik keras, bertempo tinggi, volume musik relative keras. Musik di sini digunakan untuk menemani aktivitas fisik yang bertujuan untuk meningkatkan sinkronisasi otak, misalnya dengan *brain gym*.

Musik untuk penutup

Yang dimaksud dengan musik penutup adalah jenis iringan musik yang digunakan untuk menciptakan suasana yang menyenangkan ketika anak-anak keluar kelas untuk pulang. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa suasana siswa saat kepulangan tampak sangat gembira. Kegembiraan mereka ditunjukkan oleh para siswa berjalan pulang dengan tertib sambil menirukan lagu-lagu yang diperdengarkan. Jenis lagu yang diperdengarkan adalah lagu riang, gembira, tempo keras, bersyair, dan bersemangat. Jenis musik penutup mengantar siswa-siswi pulang adalah musik yang bersyair, bersemangat, keras, dan tempo tinggi misalnya musik sayonara, terima kasih guruku, dan lagu

lain yang memotivasi siswa untuk membangkitkan emosi ingin kembali lagi di esok harinya.

Karakteristik Pembelajaran yang Diiringi Musik.

Menurut Farid Ma'ruf, guru dan pembimbing ekstrakurikuler mengatakan bahwa kegiatan anak-anak di sekolah berlangsung sejak pukul 07.00 sampai pukul 14.00 WIB. Dalam rentang waktu 7 jam, diasumsikan siswa akan mengalami kejenuhan, kebosanan, lelah, tidak bergairah lagi dalam mengikuti kegiatan sekolah. Untuk itu dilakukan inovasi pembelajaran yang disertai dengan musik latar. Alfi Marsidah adalah guru Bahasa Arab mengatakan bahwa "proses belajar Bahasa Arab sambil diiringi musik tidak ada masalah bagi anak-anak. Mereka tetap berkonsentrasi mengikuti perintah guru, tidak terpengaruh oleh suara musik. Azizah adalah siswa kelas V ketika ditanya apakah suka musik, dia menjawab suka sekali dan dia tidak merasa terganggu dengan adanya musik latar di sekolah saat mengikuti kegiatan belajar di kelas. Justru ketika musiknya dimatikan rasanya tidak enak".

Membangun Karakter Percaya Diri

Efendi Qosim adalah guru dan pembimbing siswa mengatakan bahwa "untuk menumbuhkan rasa percaya diri kepada anak-anak seluruh guru wajib memberi contoh yang baik. Jika anak diwajibkan untuk mematuhi aturan dan adab Islam, guru wajib memberi contoh terlebih dahulu. Seperti ketika anak-anak diperintahkan untuk menjadi petugas upacara bendera setiap hari senin, guru juga berkewajiban memberikan

contohnya. Maka yang berlaku di SDMT secara bergantian guru berkewajiban menjadi petugas upacara hari senin sekali dalam sebulan. Jadi dalam satu bulan sekali seluruh petugas upacara bendera adalah dari gurunya. Ini bertujuan untuk memberikan contoh kepada anak-anak dan sekaligus pembelajaran bagi mereka dan guru juga ikut merasakan bagaimana rasanya menjadi petugas upacara dan berusaha untuk sebaik-baiknya karena harus beraksi di depan murid-muridnya". Farid, guru dan pembimbing keagamaan di SDMT menyampaikan bahwa untuk melatih anak menjadi berani, beliau menjadwalkan setiap anak menjadi imam dalam shalat dhuha. Walaupun semestinya shalat dhuha tidak boleh dikeraskan suaranya, akan tetapi untuk pendidikan pada kelas III ke bawah, beliau melatih anak menjadi imam shalat, mengatur shof, merapikan barisan, dan mengeraskan bacaan. Ketika terjadi kesalahan bacaan beliau membenarkannya dengan cara bijaksana. Hal itu semata-mata untuk melatih anak memiliki keberanian dan rasa percaya diri. Selain itu juga melatih anak menjadi muadzin sebelum shalat dhuha dimulai dan seluruh jamaah siswa lainnya duduk dengan rapi dan menjawab suara adzan dengan bimbingan ustadz yang ada. Dampak yang ditimbulkan siswa tidak merasa takut baik untuk menjadi imam maupun muadzin. Efendi menyampaikan bahwa "untuk membentuk karakter anak-anak tentang adab makan atau minum, budaya antri, taawun, solidaritas sosial, empaty, hubungan interpersonal, datang tepat waktu, segera

pergi ke masjid, dan sebagainya, semua guru berkewajiban untuk mengingatkan dengan cara bijaksana. Dan pengingatan ini sangat dibantu dengan adanya media musik dan pesan-pesan yang disampaikan melalui radio komunitas tersebut. Sehingga guru hanya sekedar bicara sekali saja anak-anak sudah tanggap".

Membangun Karakter Kesadaran Diri

Kesadaran diri menjadi salah satu kunci sukses bagi seseorang. Metode yang diterapkan di SDMT dalam membangun kesadaran diri menuju pada karakter yang lebih baik antara lain dilakukan dengan memahami diri sendiri, memahami situasi, dan berbicara pada diri sendiri. Misalnya Farid Ma'ruf adalah guru Pendidikan Agama dan pembina keagamaan di sekolah menjelaskan bahwa "untuk membangun kesadaran diri siswa dilatih melalui budaya-budaya sekolah yang telah diprogramkan. Misalnya. Bersih lingkungan, antri makan, antri di kantin, antri wudlu, antri di toilet dan kegiatan lain yang sejenis. Dengan mencanangkan program tersebut dan mengawalinya secara intensif, akhirnya menjadi kebiasaan secara otomatis."

Membangun Karakter Aktualisasi Diri

Agus Amsya, guru dan pembina ekstrakurikuler di sekolah menjelaskan bahwa "untuk menyalurkan bakat, minat, dan kemampuan siswa sekolah memprogram banyak kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya, Tapak Suci, Kepanduan, Teater, Tartil al-Quran, Seni Tari, futsal, dan lain-lain. Setiap siswa diberi kesempatan untuk menentukan pilihannya sendiri maksimal dua jenis

kegiatan dalam satu semester. Kemudian jika dalam semester berikutnya ingin ganti pilihan juga diperbolehkan dan tetap memberikan arahan sesuai dengan bakat dan kemampuan anak. Semua jenis kemampuannya tersebut digelar dalam panggung ekspresi yang digelar satu tahun sekali yang disaksikan di depan orangtua dan masyarakat umum”.

Membangun Karakter Tanggung Jawab Sosial

Alfi Marsidah, guru dan wali kelas II menjelaskan “anak-anak dilatih untuk mencuci piring sendiri setelah makan siang, petugas piket mengurus makan siang, petugas piket bersih lingkungan, mengurus zakat fitrah, panitia penyembelihan hewan qurban, kepramukaan, dan kegiatan sekolah lainnya. Hal ini bertujuan untuk mendidik anak-anak bertanggungjawab”.

Membangun Karakter Hubungan Interpersonal

Rika, guru dan penanggung jawab panggung ekspresi di SDMT menjelaskan bahwa “untuk membangun hubungan interpersonal digelar panggung ekspresi setiap tahun sekali di awal tahun ajaran. Pagelaran panggung ekspresi dilakukan bersamaan dengan penutupan MOS (Masa Orientasi Siswa) baru. Masing-masing siswa memerankan sesuai dengan perannya masing-masing di panggung besar. Tidak satupun siswa yang tidak tampil. Hal ini untuk melatih siswa berani tampil dan membangun rasa percaya diri”.

Membangun Karakter Empaty

Empaty artinya perasaan dimana kita ikut merasakan dan memahami orang

lain. Farid Ma’rud adalah guru dan pembimbing keagamaan di SDMT menjelaskan bahwa “untuk menumbuhkan empathy bagi anak-anak antara lain dilakukan dengan cara menjenguk teman yang sakit, ta’ziah jika ada saudara atau keluarga teman meninggal dunia, membagikan zakat, infaq, shadaqah kepada fakir miskin, membantu teman yang kesulitan, dan kegiatan lain yang sejenis. Hal itu akan dapat menumbuhkan rasa empathy bagi anak-anak”.

Jenis Musik Berbeda Mempengaruhi Emosi Yang Berbeda

Perubahan zaman akan merubahan jenis musik. Mungkin pada zaman kita tidak sama dengan zaman generasi setelah kita. Adan jenis musik anak-anak yang berlaku pada zamannya, maka jenis musik anak-anak zaman kita dahulu tidak sama dengan kanak-kanak zaman sekarang. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Zenner, Grandjean dan Scherer menemukan bahwa genre musik yang berbeda dapat menyebabkan timbulnya emosi yang berbeda pula. (Marcel Zentner, Didier Grandjean, and Klaus R. Scherer, 2008:498). Musik berpengaruh terhadap emosi seseorang karena mendengarkan musik sama halnya dengan memfungsikan perasaan. Perasaan yang ditimbulkan oleh musik bisa positif dan sebaliknya. Banyak factor yang mempengaruhinya mungkin musik yang diperdengarkan bukan musik kesenangannya sehingga akan mengganggu perasaan dirinya. Factor lain mungkin karena volume musik yang terlalu keras sehingga membuat perasaannya tidak nyaman.

Musik Mengubah Emosi

Anak-anak merasa senang belajar dan bermain di sekolah. Salah satu siswa bernama Vira, kelas II rumahnya di dekat lokasi sekolah. Ketika jam sekolah sudah selasai dan waktunya pulang, dia pulang sebentar ganti baju kemudian kembali lagi bermain di sekolah. Itu dilakukan hampir setiap hari kecuali hari libur. Ketika ditanya mengapa kembali lagi ke sekolah, Vira menjawab saya suka main di sekolah. Ada beberapa kemungkinan apa yang dilakukan oleh Vira antara lain Vira merasa senang dan nyaman berada dan bermain-main di sekolah. Ancor yang melekat pada otak kanannya mengatakan di sekolah lebih nyaman dari pada di rumah. Akan tetapi juga dimungkinkan Vira tidak memiliki teman bermain di rumah, kemudian ia memilih untuk dating ke sekolah. Sebenarnya musik berpengaruh terhadap emosi bukanlah hal yang baru Aristoteles misalnya, menyusun pengaruh berbagai modus terhadap emosi. Lebih dari itu, beberapa peneliti telah menemukan potensi musik untuk mengubah perasaan, mengubah perilaku konsumen, menjadi alat terapi bagi ketidakseimbangan emosi. (Peter Tze Ming Chou, 2010:12)

Bahkan daerah otak yang diaktivasi oleh musik emosional secara tentative sama dengan yang diaktivasi oleh hal-hal yang kuat seperti seks, makanan, serta obat-obat terlarang. Walaupun demikian, taksonomi yang sistematis terhadap hubungan antara musik dan emosi belum bisa disusun secara pasti. Lebih jauh, Zentner dkk, menemukan bahwa tidak

semua individu bereaksi secara emosional terhadap musik. (Marcel Zentner, Didier Grandjean, and Klaus R. Scherer, 2008:494)

Musik Tidak Mengganggu Belajar

Siswa dan guru tidak merasa terganggu dengan adanya suara musik latar yang menyertainya. Azizah adalah siswa kelas V mengatakan “aku suka musik, kalau tidak mendengarkan musik rasanya tidak enak, dan saya tidak terganggu kalau belajar sambil mendengarkan musik, malah lebih semangat, karena merasa ada teman”.

Dikemukakan Campbell dalam bukunya “Efek Mozart” menyebutkan musik Barok (Bach, Handel dan Vivaldi) dapat menciptakan suasana yang merangsang pikiran dalam belajar. Musik klasik (Haydn dan Mozart) mampu memperbaiki konsentrasi ingatan dan persepsi spasial. Masih banyak lagi jenis-jenis musik lain mulai dari Jazz, New Age, Latin, Pop, lagu-lagu, Gregorian bahkan gamelan yang dapat mempertajam pikiran dan meningkatkan kreativitas. (Campbell, Don. 2001:26)

Penelitian sama dilakukan Bakti Dwi Sugesti tentang pemberian teknik distraksi (musik klasik) pada Tn. S dalam menurunkan kecemasan telah dilakukan selama 2 hari pengelolaan, hasilnya menunjukkan terjadi penurunan nilai kecemasan pada pasien Tn.S dari nilai kecemasan HARS 28 (berat) menjadi nilai 18 (ringan) dan respon pasien selama dilakukan tindakan pemberian terapi musik pasien tampak tenang dan rileks. (Bakti Dwi Sugesti 2014:72)

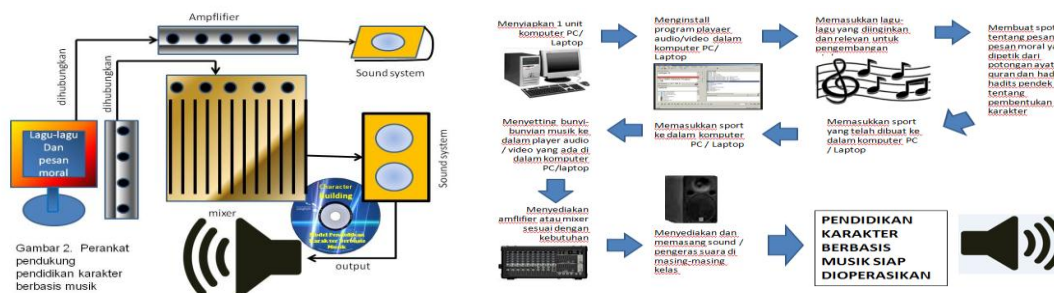
Musik perangsang Otak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa SDMT Ponorogo mayoritas suka mendengarkan musik. Jenis musik yang disukai musik islami, lagu anak-anak, kleningan, instrumentalia, nasyid, dan sejenisnya. Secara umum anak-anak tidak menyukai jenis musik dangdut. Penelitian yang dilakukan oleh Fathu Rahman Rasyadi tentang Pengaruh Musik Terhadap Kenyamanan Membaca terdapat pengaruh yang sangat signifikan antara musik dan rasa nyaman. (Fathu Rahman Rasyadi, 2008:iv). Musik akan menjadi perangsang otak apabila seseorang memiliki pengalaman tertentu dan pengalaman tersebut bersamaan dengan mendengarkan suara musik tertentu. Maka jika mereka lupa akan pengalaman apa yang pernah dialami dirinya, ketika diperdengarkan musik yang menyertai pengalamannya itu akan teringat kembali kejadian atau peristiwa yang pernah dialaminya. Itulah musik akan sangat membantu memunculkan memori yang telah terpendam lama sekalipun. Jenis musik yang dapat digunakan untuk membantu dalam membentuk karakter dan merangsang otak anak seperti disampaikan oleh Dian Natalina, 2013:28 antara lain : Brandenburg Concertos no. 1

dan no. 2 in F Major – JS Bach; 2) Cantatas BWV 1,61, 62, 132 – JS Bach; 3) Jesu, Joy of man's desiring – JS Bach; 4) Water Musik – George Frideric Handel; dan lain-lain. (Dian Natalina, 2013:58-59).

Menciptakan Suasana Menyenangkan Di Sekolah

Berdasarkan hasil penelitian di SDMT Ponorogo sebagaimana disampaikan oleh Azis, bahwa sekolah memperdengarkan musik latar sepanjang hari dan setiap hari bertujuan untuk menciptakan rasa nyaman para siswa dan seluruh warga sekolah. Dengan perasaan nyaman mereka akan bertahan (krasan. Jw.) berada di sekolah baik murid maupun guru-gurunya. Diharapkan dengan itu seluruh program-program sekolah dalam berjalan dan diselesaikan dengan baik. Teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham H. Maslow pada intinya bahwa manusia diantaranya mempunyai kebutuhan rasa aman (*safety needs*), tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi juga mental, psikologikal dan intelektual, kebutuhan akan kasih sayang (*love needs*) dan lain-lain. Dan kebutuhan manusia itu tidak hanya bersifat materi, akan tetapi bersifat psikologikal, mental, intelektual dan bahkan juga spiritual. (Maslow, A. H, 1998:56).



Model Rancangan Pendidikan Karakter dengan Musik

Membangun Karakter Percaya Diri

Penanaman rasa percaya diri kepada anak-anak di SDMT Ponorogo seperti disampaikan oleh Azis, yang menjabat sebagai kepala sekolah yaitu “seluruh siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler yang ditawarkan oleh sekolah dalam setiap satu semester berjalan. Masing-masing siswa wajib mengambil program ekstrakurikuler maksimal dua jenis kegiatan. Hal ini mampu menumbuhkan sikap percaya diri yang sangat signifikan”. Pembentukan karakter anak tentang rasa percaya diri menjadi kunci kesuksesan anak di masa depan. Rian adalah siswa kelas IV SD. Secara fisik dia mempunyai kekurangan, ketika ditanya tentang penampilan dirinya dalam acara pentas seni yang digelar oleh sekolah, dengan tanpa ragu-ragu menyampaikan peran dirinya dalam acara pentas seni tersebut, walaupun ia hanya ikut menjadi peserta latar untuk group menyanyi koor. Rian merasa bangga ketika ditanya oleh orangtuanya tentang penampilan dirinya dalam acara pentas seni di sekolah. Pagelaran pentas seni dilaksanakan setahun sekali bersamaan dengan peresmian siswa baru”.

Membangun Keyakinan dan Keteladanan

Efendi Qosim adalah guru dan pembimbing siswa mengatakan bahwa “untuk menumbuhkan rasa percaya diri kepada anak-anak seluruh guru wajib memberi contoh yang baik. Jika anak diwajibkan untuk mematuhi aturan dan adab Islam, guru wajib memberi contoh terlebih dahulu. Seperti ketika anak-anak diperintahkan untuk menjadi petugas upacara bendera setiap hari

senin, guru juga berkewajiban memberikan contohnya. Maka yang berlaku di SDMT secara bergantian guru berkewajiban menjadi petugas upacara hari senin sekali dalam sebulan. Jadi dalam satu bulan sekali seluruh petugas upacara bendera adalah dari gurunya. Ini bertujuan untuk memberikan contoh kepada anak-anak dan sekaligus pembelajaran bagi mereka dan guru juga ikut merasakan bagaimana rasanya menjadi petugas upacara dan berusaha untuk sebaik-baiknya karena harus beraksi di depan murid-muridnya”. Rasulullah saw membangun masyarakat Arab hingga menjadi manusia yang berkarakter mulia memakan waktu yang cukup panjang. Pembinaan ini dimulai dari membangun akidah bangsa Arab selama lebih kurang sepuluh tahun nabi melanjutkan pembentukan karakter dengan mengajarkan syariah Islam untuk beribadah dan bermuamalah. Dengan diawali penanaman akidah dan syariah serta didukung dengan keteladanan sikap dan perilakunya, nabi berhasil membangun bangsa Arab berkarakter mulia. (Marzuki, 2015:45)

Membangun karakter dengan stimulus

Bahwa untuk melatih anak-anak di SDMT menjadi berani tampil, sekolah menjadwalkan setiap anak mulai dari kelas satu hingga kelas enam untuk menjadi imam dalam shalat dhuha. Kemudian dalam rangka pembelajaran anak-anak untuk kelas tiga ke bawah bacaan shalat dhuha dikeraskan oleh imam. Tetapi untuk kelas IV ke atas shalat dhuha dilaksanakan seperti yang disyariatkan dalam agama. Ketika terjadi kesalahan bacaan imam, beliau membenarkannya dengan cara bijaksana. Hal itu semata-mata untuk

melatih anak memiliki keberanian dan rasa percaya diri. Selain itu juga melatih anak menjadi muadzin sebelum shalat dhuha dimulai dan seluruh jamaah siswa lainnya duduk dengan rapi dan menjawab suara adzan dengan bimbingan ustadz yang ada. Dampak yang ditimbulkan siswa tidak merasa takut baik untuk menjadi imam maupun muadzin". Watson mempelajari penyesuaian organisme terhadap lingkungannya, khususnya stimuli khusus yang menyebabkan organisme tersebut memberikan respons. Kebanyakan dari karya-karya Watson adalah komparatif yaitu membandingkan perilaku berbagai binatang. Karya-karyanya sangat dipengaruhi karya Ivan Pavlov. Namun pendekatan Watson lebih menekankan pada peran stimuli dalam menghasilkan respons karena pengkondisian, mengasimilasikan sebagian besar atau seluruh fungsi dari refleksi. Karena itulah, Watson dijuluki sebagai pakar psikologi S - R (*stimulus-response*). (Fajar, S. 2008:4)

Mendidik Karakter Melalui Keteladanan

Seperti yang dilakukan di SDMT Ponorogo sebagaimana diungkapkan oleh Efendi Qosim bahwa "memberikan pujian kepada anak berdasarkan tindakannya, bukan pada diri anak, dilakukan langsung setelah kegiatan selesai. Jadi tidak menundanya dalam waktu yang lama dan hal itu berdampak positif terhadap semangat dan memotivasi teman lainnya untuk ikut menampilkan dirinya". Para tokoh yang memberikan pengaruh kuat pada aliran ini adalah Ivan Pavlov dengan teorinya yang disebut *classical conditioning*, John B. Watson yang dijuluki behavioris S-R (Stimulus-Respons), Edward Thorndike (dengan

teorinya *Law of Effect*), dan B.F. Skinner dengan teorinya yang disebut *operant conditioning*. (Fajar, S. 2008:4).

Membangun Karakter Kedisiplinan

Menanamkan sifat disiplin kepada anak, yang dilakukan oleh SDMT Ponorogo seperti yang disampaikan oleh Azis kepala sekolah dimulai dari hal-hal yang paling kecil sekalipun seperti memotong kuku selalu dikontrol setiap Jum'at, kelengkapan pakaian seragam, makan minum sambil duduk, makan dengan tangan kanan, budaya antri mengambil makan siang, antri membeli jajan, antri mengambil air wudlu, dan aktivitas-aktivitas yang lain. Hal ini awalnya sangat susah mengatur anak-anak, akan tetapi lama-lama menjadi kebiasaan dan tidak lagi diperintah sudah melakukannya sendiri". Dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, anak didik tidak dapat dibiarkan begitu saja berkembang dengan sendirinya. Tetapi tidak mungkin selalu ditekan dan dirintangi kehendaknya. Anak hendaklah diajarkan menyesuaikan diri yang berarti dapat menerima dan mematuhi peraturan-peraturan, mana yang harus dituruti ataupun yang harus ditentang. Untuk itu seorang pendidik tidak boleh terlalu keras terhadap anak didiknya. Sebaliknya sikap terlalu lunak dan lemah juga tidak dapat dibenarkan karena anak akan berbuat sekehendak hatinya, tidak tahu dan tidak dapat mematuhi peraturan yang ditentukan. (Ngalim Purwanto, 1998:139).

Berangkat dari pengalaman itulah SDMT Ponorogo memiliki cara yang cukup efektif selain pengawalan dan peringatan yang dilaksanakan secara langsung oleh guru juga didukung dengan media musik dan pesan-

pesan moral melalui radio sekolah yang dikumandangkan sepanjang hari. Seperti kita ketahui bahwa musik dapat dijadikan sebagai terapi stress, memberikan nutrisi otak kanak, dan membuat rileks bagi semua orang termasuk anak-anak.

Memperbanyak interaksi dengan anak

Efendi menyampaikan bahwa “untuk membentuk karakter anak-anak tentang adab makan atau minum, budaya antri, taawun, solidaritas sosial, empathy, hubungan interpersonal, dating tepat waktu, segera pergi ke masjid, dan sebagainya, semua guru berkewajiban untuk mengingatkan dengan cara bijaksana. Dan pengingatan ini sangat dibantu dengan adanya media musik dan pesan-pesan yang disampaikan melalui radio komunitas tersebut. Sehingga guru hanya sekedar bicara sekali saja mereka anak-anak sudah tanggap”. Beberapa teori tentang kelekatan banyak dikemukakan oleh para pakar psikologi anak. Istilah kelekatan (*attachment*) untuk pertamakalinya dikemukakan oleh seorang psikolog dari Inggris pada tahun 1958 bernama John Bowlby. Kemudian formulasi yang lebih lengkap dikemukakan oleh Mary Ainsworth pada tahun 1969 (Mc Cartney dan Dearing, 2002).

Kelekatan merupakan suatu ikatan emosional yang kuat yang dikembangkan anak melalui interaksinya dengan orang yang mempunyai arti khusus dalam kehidupannya, biasanya orang tua. (Haditono, S.R., dkk, 1994:65).

Membangun Karakter Kesadaran Diri

Farid Ma'ruf adalah guru Pendidikan Agama dan pembina keagamaan di sekolah menjelaskan bahwa “untuk membangun

kesadaran diri siswa dilatih melalui budaya-budaya sekolah yang telah diprogramkan. Misalnya. Bersih lingkungan, antri makan, antri di kantin, antri wudlu, antri di toilet dan kegiatan lain yang sejenis. Dengan mencanangkan program tersebut dan mengawalinya secara intensif, akhirnya menjadi kebiasaan secara otomatis.” Untuk membangun karakter anak di SDMT Ponorogo seperti disampaikan oleh Efendi Qosim, guru sekaligus sebagai pembimbing siswa menjelaskan bahwa “untuk membangun rasa kesadaran diri siswa diajak ke daerah-daerah pinggiran kota untuk ditunjukkan kondisi orang fakir miskin. Mereka diberi tugas untuk menyampaikan zakat fitrah dan hewan qurban. Hal ini bertujuan untuk melatih anak membayangkan bagaimana kehidupan orang fakir miskin itu. Akhirnya akan tumbuh rasa kesadaran diri dan bersyukur dengan kondisi yang ada pada diri dan keluarganya”. Agus Amsya, guru dan pembina ekstrakurikuler di sekolah menjelaskan bahwa “untuk menyalurkan bakat, minat, dan kemampuan siswa sekolah memprogram banyak kegiatan ekstrakurikuler. Misalnya, Tapak Suci, Kepanduan, Teater, Tartil al-Quran, Seni Tari, futsal, dan lain-lain. Setiap siswa diberi kesempatan untuk menentukan pilihannya sendiri maksimal dua jenis kegiatan dalam satu semester. Kemudian jika dalam semester berikutnya ingin ganti pilihan juga diperbolehkan dan tetap memberikan arahan sesuai dengan bakat dan kemampuan anak. Semua jenis kemampuannya tersebut digelar dalam panggung ekspresi yang digelar satu tahun sekali yang disaksikan di depan orangtua dan masyarakat umum”. Untuk menanamkan rasa tanggungjawab kepada

anak-anak SDMT, seperti disampaikan oleh Alfi Marsidah, guru dan wali kelas II menjelaskan “anak-anak dilatih untuk mencuci piring sendiri setelah makan siang, petugas piket mengurus makan siang, petugas piket bersih lingkungan, mengurus zakat fitrah, panitia penyembelihan hewan qurban, kepramukaan, dan kegiatan sekolah lainnya. Hal ini bertujuan untuk mendidik anak-anak bertanggungjawab”.

Membangun Karakter Hubungan Interpersonal

Farid Ma’rud adalah guru dan pembimbing keagamaan di SDMT menjelaskan bahwa “untuk menumbuhkan empathy bagi anak-anak antara lain dilakukan dengan cara menjenguk teman yang sakit, ta’ziah jika ada saudara atau keluarga teman meninggal dunia, membagikan zakat, infaq, shadaqah kepada fakir miskin, membantu teman yang kesulitan, dan kegiatan lain yang sejenis. Hal itu akan dapat menumbuhkan rasa empathy bagi anak-anak”.

Karakter Siswa Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu Ponorogo

Berdasarkan kesaksian yang disampaikan oleh wali murid kelas III tentang sikap dan perilaku anaknya di rumah seperti yang disampaikan oleh Puryono anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, beliau mengatakan: “Alhamdulillah anak saya sekarang kelihatan mandiri. Saya sudah tidak lagi memerintahkan dia sudah sadar dan tahu sendiri. Misalnya waktunya shalat tidak perlu diperintah sudah sadar sendiri, kemudian waktunya ngaji sudah ngaji sendiri sehabis shalat maghrib rutin, dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti mandi, makan dengan duduk, bahkan sering mengingatkan adik-adiknya

mengenai adab makan tersebut”. Kesadaran terkait dengan tindakan jiwa yang menyadari dan memahami sesuatu yang terjadi pada diri dan lingkungan sekitarnya. Kesadaran identik dengan fungsi pikiran (akal). Sehingga kesadaran yang baik, menunjukkan fungsi pikiran yang baik. Sebaliknya, kesadaran yang jelek menunjukkan fungsi pikiran yang jelek. (M. Masri muadz, 2014:134).

Kesadaran rasional adalah kesadaran yang dihasilkan dengan menggunakan logika yang juga disebut kesadaran ilmiah. (M. Masri muadz, 2014:136). Kesadaran indrawi adalah kemampuan memahami dan merasakan suatu interaksi yang berfungsi tat kala seseorang melakukan interaksi tertentu dengan lingkungannya. (M. Masri muadz, 2014:136).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul majid, et al., (2012), *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
- Agus Zaenal Fitri, (2012), *Pendidikan Karakter Berbasis Nilai dan Etika di Sekolah*, Jojakarta; Ar-Ruzz Media.
- Bekti Dwi Sugesti (20140, *Pemberian Teknik Distraksi (Musik Klasik) Terhadap Penurunan Kecemasan pada Asuhan Keperawatan*, STIKES Kusuma Husada, Surakarta,
- Campbell, Don. (20010. “*Efek Mozart, Memanfaatkan Kekuatan Musik untuk Mempertajam Pikiran, Meningkatkan Kreativitas, dan Menyehatkan Tubuh*”. Penerjemah T. Hermaya, Cetakan I Januari, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Campbell, Don. 2001. *Efek Mozart, Memanfaatkan Kekuatan Musik untuk Mempertajam Pikiran, Meningkatkan Kreativitas, dan Menyehatkan Tubuh*. Penerjemah T. Hermaya. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama Cetakan I Januari,
- Dahar, Ratna Wilis, (1988), *Teori-teori Belajar*. Jakarta: DepDikBud.

- Dian Natalina, (2013), *Terapi Musik Bidang Keperawatan*, Jakarta: Mitra Wacana Media,
- Esthi Endah Ayuning Tyas, 2008, *Cerdas Emosional Dengan Musik*, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran
- Fajar, S. 2008, Teori Belajar. *Makalah FKIP, Universitas Negeri Surakarta*
- Fathu Rahman Rasyadi, (2008), *Hasil Penelitian tentang Pengaruh Musik terhadap Kenyamanan Membaca Pengguna Perpustakaan Fakultas Bahasa dan Seni*, Universitas Negeri Yogyakarta
- G.A. Kimble, N. Garmezy & E. Zigler, (1974), *Principles of General Psychology*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Grandjean, and Klaus R. Scherer, (2008), *Emotions Evoked by the Sound of Musik: Characterization, Classification, and Measurement, Emotion*, Vol.8, no. 4
- Hergenhahn, B.R. & Matthew H. Olson, (1997), *An Introduction To Theories Of Learning*. London: Prentice-Hall International.
- Inayat Khan, Hazrat, 2002, *Dimensi mistik musik dan bunyi*, Terj. Sabagijono dan Fungky Kusnaedy Timur, Yogyakarta: Pustaka Sufi
- Joni Erin Webe, ADHD, *the Classroom and Music: A Case Study, Thesis*, University of Saskatchewan, Saskatoon, 2007),
- Maksudin, (2013), *Pendidikan Karakter Non Dikotomik*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Marcel Zentner, Didier Grandjean, and Klaus R. Scherer, 2008, *Emotions Evoked by the Sound of Musik: Characterization, Classification, and Measurement, Emotion*, Vol.8, no. 4,
- Marcel Zentner, Didier Grandjean, and Klaus R. Scherer, 2008, *Emotions Evoked by the Sound of Musik: Characterization, Classification, and Measurement, Emotion*, Vol.8, no. 4
- Marzuki, (2015), *Pendidikan karakter Islam*, (Jakarta, AMZAH)
- M. Masri muadz, 2014, *The life integrity code, menyingkap pesan, visi, strategi dan integritas kehidupan Islam dibalik kode angka 7 dalam konstruksi alquran, manusia dan alam*. Jakarta, IPGH.
- Maslow, A. H, (1998), *Motivasi dan Keperibadian: Teori Motivasi Dengan Rancangan Hirarki Kebutuhan Manusia*. Alih bahasa: Aris Saputra. Jakarta
- Masnur Muslich, (2011), *Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Mc Cartney, K. & Dearing, E., (Ed). 2002. *Child Development*. Mc Millan Reference USA
- Moleong, L.J., 2002, *Metode penelitian kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya
- Muchlas Samani dan Hariyanto, (2012), *Pendidikan Karakter Konsep dan Model*, Bandung: Rosdakarya.
- Munson, M., Brinson, B. A., & Demorest, S. M., 2013, *Choral Music: Methods and Materials*.
- Ngalim Purwanto, (1998), *Psikologi Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung,
- Peter Tze – Ming Chou, 2010, Attention drainage effect: How background musik effects concentration in Taiwanese college students, *Journal of the Scholarship of Teaching and Learning*, Vol. 10 no. 1, January,
- Scott Hagwood, *Memory Power, you can develop a great memory America's grand master shows you how*, Penerjemah : Abdul Qodir Shaleh, Yogyakarta, IRCiSoD
- Silvia Beeger, Silvia ohrmann, dan Beate Wiegel, (2004) *Computer Animations in Science Education: Is Background Music Beneficial or Detrimental?*, proceedings of ED-MEDIA,
- Spradly, J. P., 1997, *Metode Etnografi*. alih bahasa Misbah Zulfa Elizabeth. "Metode Etnografi.
- Suryabrata, Sumadi, (2006), *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutopo, H. B, (2002), *Metode penelitian kualitatif*. Surakarta: Sebelas Maret University.
- Syah, Muhibbin. (2006). *Psikologi Belajar*. Edisi 5. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

**WANITA SEBAGAI NADZIR
(Model Manajemen Wakaf Pengurus Daerah Aisyiah (PDA) Ponorogo Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ummat)**

Oleh:

NURUL IMAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

Email: cahayaiman66@gmail.com

ABSTRAK

Dalam pengelolaan wakaf yang melibatkan banyak pihak seperti wakif, nadzir, *mauquf 'alaih* (penerima), dan juga penggarap/pengelola lokal, konflik sangat dimungkinkan terjadi. Keberhasilan Pengurus Daerah Aisyiah Ponorogo dalam mengelola dan mengembangkan wakafnya selama ini dimungkinkan karena keberhasilannya mengelola konflik-konflik berkenaan dengan wakaf dan aset-aset yang dimiliki. Berdasarkan pemikiran tersebut, penelitian yang akan dilakukan di Pengurus Daerah Aisyiah Ponorogo ditujukan untuk menggali pengalaman “berharga” lembaga ini dalam mengelola wakaf dan aset-asetnya terutama berkenaan dengan pengelolaan wakaf dan konflik di dalamnya. Fokus permasalahan penelitian ini adalah manajemen pengelolaan wakaf dan aset-asetnya yang dilakukan PD Aisyiah Ponorogo, serta kelebihan dan kekurangan manajemen tersebut. Penelitian tentang nadzir wakaf wanita ini merupakan penelitian kualitatif yang mengambil lokasi di Ponorogo (PD Aisyiah Ponorogo). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun analisa temuan data dilakukan secara deskriptif analitis melalui proses induksi-interpretasi-konseptualisasi. Diantara temuan penelitian ini adalah: 1) pengelolaan aset wakaf pada PD Aisyiah Ponorogo secara manajemen dilakukan melalui dua hal: a) secara langsung, praktis, dan operasional dilakukan oleh pengurus amal usaha (AUM) dan dipertanggung jawabkan kepada PD Aisyiah melalui majlis-majlis yang menaunginya; b) secara tidak langsung, khususnya berkenaan dengan pengamanan dan sertifikasi aset dilakukan oleh PD Muhammadiyah Ponorogo melalui Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. 2) Tidak terjadi konflik dalam pengelolaan wakaf di PD Aisyiah Ponorogo. Perbedaan-perbedaan pendapat dapat diselesaikan melalui musyawarah dan pertemuan. Keuletan dan ketelatenan para pengurus PD Aisyiah serta pengorbanan mereka dalam mengelola amal usaha menjadi inspirasi perjuangan dalam mengembangkan amal usaha dan organisasi Muhammadiyah. 3) Kelebihan usaha PD Aisyiah Ponorogo dalam pengelolaan wakaf dan asetnya melalui amal usaha adalah keseriusan, ketelatenan, pengorbanan dan semangat perjuangan para pengurus, hal mana sering tidak terjadi pada kepengurusan lembaga-lembaga non profit.

Kata Kunci : *wakaf, kesejahteraan, ummat*

PENDAHULUAN

Wakaf secara bahasa berasal dari bahasa Arab *al-Waqf* diartikan sebagai “*habs al-mal ‘an al-tasharruf*” yakni “mencegah sesuatu dari dibelanjakan (az-Zuhaili, 1996: 133). Secara istilah, terdapat berbagai definisi yang ditawarkan para ulama tentang wakaf. Abu Hanifah mengartikannya sebagai “*habs al-‘ain ‘ala hukm milk al-waqif, wa at-tashadduq bi al-manfa‘ah ‘ala jihat al-khair*” yang berarti “menahan harta di bawah

kepemilikan wakif dan bersedekah dengan manfaatnya”. Dalam definisi yang populer, wakaf diartikan sebagai “*tahbis al-ashl wa tasbil as-tsamrah*” atau “menahan pokok harta, dan mengalirkan manfaatnya”. Kedua definisi tersebut memberikan banyak pemahaman, diantaranya bahwa aspek “mengalirkan manfaat” menjadi poin penting dalam mendayagunaan aset wakaf sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat sesuai dengan sebutan wakaf sebagai *sadaqah*

jariyah atau sedekah yang mengalir terus pahalanya seiring terus dimanfaatkannya *'ain al-sadaqah* (aset sedekah). Berkenaan dengan ini, Jaih Mubarak menyebut wakaf sebagai bentuk *siyasah maliyah* (kebijakan dalam membelanjakan harta) disebabkan posisi sentral wakaf dalam kegiatan ekonomi berupa: a) hubungan erat wakaf dengan ekonomi kerakyatan, karena harta yang diwakafkan tidak boleh diperjualbelikan; b) hubungan wakaf dengan ekonomi negara, karena harta wakaf tidak lagi milik perorangan, tetapi milik umum; c) hubungan wakaf dengan ekonomi keluarga, karena wakaf dapat dibedakan menjadi wakaf *khairi* (umum) dan wakaf *ahly* (keluarga). Berkenaan dengan mengalirkan manfaat, pengelolaan wakaf dan pengembangan asetnya, maka posisi nadzir –baik perorangan maupun lembaga-- menjadi penting. Nadzir yang diartikan sebagai *al-waliy 'ala al-waqf* (pengelola wakaf) menurut as-Syu'aib (2006: 58) merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam mengendalikan harta-harta pokok wakaf (menjaga, melindungi, memperbaiki, dan mengembangkannya), mengelola aset dan mendistribusikan hasilnya, serta melakukan akad atau kontrak atas nama wakaf untuk memproduktifkannya sesuai dengan kebutuhan. Dalam pengelolaan wakaf dan aset-asetnya di Ponorogo khususnya di lingkungan Muhammadiyah, Pengurus Daerah Muhammadiyah ditengarai telah berhasil mengembangkan dengan baik amal-amal usaha yang berada di bawah tanggungjawab dan koordinasinya tercermin dari keberadaan satu buah Rumah Sakit Aisyiah Ponorogo, satu buah BP/RB Aisyiah di Jetis, satu buah Pondok

Pesantren Aisyiah Nyi Ahmad Dahlan, satu Panti Asuhan Terpadu Tuna Netra, satu Panti Asuhan Putri Nyi Ahmad Dahlan, dan delapan puluhan Bustanul Athfal Aisyiah (BA/TK). Keberhasilan pengelolaan mayoritas amal usaha yang dijalankan dengan menggunakan aset wakaf tersebut, setidaknya menunjukkan keberhasilan manajemen wakaf dan amal usaha Pengurus Daerah Aisyiah Ponorogo tersebut. Dalam makalah ini akan dibahas model manajemen wakaf Pengurus Daerah Aisyiah Ponorogo dalam mengelola dan mengembangkan asetnya.

METODE PENELITIAN

Fokus penelitian tentang Model Manajemen PD Aisyiah Ponorogo adalah pada pengelolaan aset-aset wakaf yang dikelola oleh Pengurus Daerah Aisyiah Ponorogo. Untuk mengungkap data digunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Ciri khas pendekatan ini terletak pada tujuannya dalam mendeskripsikan keutuhan masalah dengan memahami makna dan gejala. Penelitian kualitatif ini dapat dipandang sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 1994: 3).

Penggalan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi dan studi dokumen. Wawancara atau interview digunakan secara langsung terhadap para informan yang terdiri dari pengurus amal usaha PDA, para nadhir, para wakif, dan para penggarap tanah wakaf tersebut. Observasi digunakan berupa pengamatan secara langsung terhadap kajian yang akan diteliti serta mengadakan catatan sistematis.

Sedangkan dokumentasi akan dipakai untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan gambaran umum. Dokumen dapat digunakan sebagai sumber data karena memiliki sifat yang tetap, sehingga jika terdapat ketidak sesuaian dapat dilakukan klarifikasi lebih lanjut. Secara formal, informasi akan dilihat dari dokumen PDA dan lembaga-lembaga yang menagai pengelaan wakafnya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, melalui proses induksi-interpretasi-konseptualisasi. Dalam hal ini, analisis data yang demikian mengikuti apa yang dikemukakan Bogdan dalam Muhadjir (1999:171), yakni analisis akan dilakukan baik di lapangan maupun setelah meninggalkan lapangan. Selanjutnya diadakan penyederhanaan data menjadi beberapa unit informasi yang rinci tetapi sudah terfokus. Dengan demikian laporan lapangan yang detail akan mudah dipahami, dicarikan makna sehingga ditemukan model manajemen antisipasi dan penyelesaian konflik wakaf (interpretasi) dan akhirnya dapat diciptakan suatu konsep (konseptualisasi)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengelolaan Wakaf PD Aisyiah Ponorogo

Aisyiyah adalah sebuah gerakan perempuan Muhammadiyah yang lahir hampir bersamaan dengan lahirnya organisasi Islam terbesar di Indonesia ini. Dalam kiprahnya hampir satu abad di Indonesia, saat ini 'Aisyiyah telah memiliki 33 Pimpinan Wilayah "Aisyiyah (setingkat Propinsi), 370 Pimpinan Daerah 'Aisyiyah (setingkat kabupaten), 2332

Pimpinan Cabang 'Aisyiyah (setingkatKecamatan) dan 6924 Pimpinan Ranting 'Aisyiyah (setingkat Kelurahan). Selain itu, Aisyiyah juga memiliki amal usaha yang bergerak diberbagai bidang yaitu : pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Amal Usaha dibidang pendidikan saat ini berjumlah 4560 yang terdiri dari Kelompok Bermain, Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Kanak-Kanak, Tempat Penitipan Anak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan lain-lain. Sedangkan amal usaha di bidang Kesehatan yang terdiri dari Rumah Sakit, Rumah Bersalin, Badan Kesehatan Ibu dan Anak, Balai Pengobatan dan Posyandu berjumlah hingga 280 yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai gerakan yang peduli dengan kesejahteraan sosial kemasyarakatan, 'Aisyiyah hingga kini juga memiliki sekitar 459 amal usaha yang bergerak di bidang ini meliputi : Rumah Singgah Anak Jalanan, Panti Asuhan, Dana Santunan Sosial, Tim Pengrukti Jenazah dan Posyandu. 'Aisyiyah menyadari, bahwa harkat martabat perempuan Indonesia tidak akan meningkat tanpa peningkatan kemampuan ekonomi di lingkungan perempuan. Oleh sebab itu, berbagai amal usaha yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi ini diantaranya koperasi, Baitul Maal wa Tamwil, Toko/kios, BU EKA, Simpan Pinjam, home industri, kursus ketrampilan dan arisan. Jumlah amal usaha tersebut hingga 503 buah (<http://id.wikipedia.org/wiki/Aisyiyah>).

Aisyiah sebagai organisasi perempuan keagamaan terbesar di Indonesia juga memiliki beragam kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat khususnya penyadaran terhadap kehidupan bermasyarakat muslim Indonesia. Hingga saat ini kegiatan yang mencakup pengajian, Qoryah Thayyibah, Kelompok Bimbingan Haji (KBIH), badan zakat infaq dan shodaqoh serta musholla berjumlah 3785. Kegiatan-kegiatan organisasi Aisyiah Ponorogo diselenggarakan dengan menggunakan/ memanfaatkan aset wakaf dan organisasi, meskipun aspek legal formal dan administrasi wakaf dilakukan dengan menggunakan "satu pintu" yakni lewat Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pengurus Daerah (Wawancara Samuri, 12-6-2014). Pengelolaan amal usaha (AUM) Aisyiah Ponorogo dengan mempergunakan aset-aset tanah wakaf Muhammadiyah telah berkembang dan sukses, sehingga dapat turun mengemban misi dan dakwah organisasi. Berkenaan dengan hal ini, faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah ketelatenan pengurus, fokus, tertib administrasi, integritas, dan ketaatan pada aturan organisasi sebagaimana tergambar dari ungkapan A. Muslih berikut ini:

"Ibu-ibu lebih telaten dan memiliki banyak waktu di banding bapak-bapak. Berdasar pada kenyataan tersebut maka wajar jika pengelolaan wakaf oleh Aisyiah dapat disebut lebih berjalan tertib dan teratur yang berakibat pada produktifitas pengelolaan aset lebih baik. Karenanya, nampak bahwa hasil dan perkembangan lembaga-lembaga PDA

terus mengalami peningkatan. Faktor ketertiban administrasi, faktor ketaatan pada aturan amal usaha, serta integritas (kejujuran) para pengelola juga turut mempengaruhi kesuksesan pengelolaan tersebut (Wawancara, 4 Juni 2014).

Pernyataan tersebut diamini oleh Umi Farida selaku anggota Majelis Kesehatan yang mengurus Rumah Sakit, yang menyatakan adanya pertemuan rutin dan setiap minggunya, dan kesediaan untuk turut rapat/musyawarah hingga larut malam. Semangat pengorbanan dan perjuangan *lillahi ta'ala* mendasari kesediaan tersebut. Dalam hal ini Umi Farida menyatakan:

"di dalam Majelis kami, alhamdulillah para pengurus selalu menyempatkan diri untuk rutin bertemu setiap Selasa dan Jum'at sore (Pukul 13.30 sd selesai). Selain itu, berkenaan dengan pengelolaan Rumah Sakit Aisyiah, kami bahkan harus menyempatkan diri untuk rapat beserta jajaran RS pada malam sampai dini hari, dikarenakan mereka (pengelola) adalah para dokter yang tetap praktik hingga malam. Karenanya, kami seringkali ketika selesai rapat dengan RS, diantar pulang ke rumah masing-masing karena waktu yang sudah larut. Semuanya menggambarkan semangat juang dan pengorbanan para pengurus *lillahi ta'ala*. Dalam majlis-majlis lain, pengorbanan itu bermacam-macam" (Wawancara, 6 Juni 2014).

Sedangkan Sri Susanti, pengurus cabang Aisyiah Siman, menyebut faktor-faktor lain

yang menunjang kesuksesan pengelolaan AUM, seperti kerja keras pengelola, disiplin, kejujuran, keterbukaan diri, dan kepandaian membaca peluang. Menurutnya, aturan-aturan manajemen profesional dan modern hendaknya dapat diterapkan dengan baik, untuk menjaga amanah organisasi dan keberlanjutan perjuangan (Wawancara, 8 Juni 2014).

Senada dengan Susanti tentang penerapan manajemen modern, Rochimin, pegawai RSU Aisyiah Ponorogo, juga menambahkan faktor ketegasan pengelola dalam mengambil kebijakan. Dalam ini Rochimin menyatakan:

“...banyak (faktor), seperti halnya ketekunan dan keseriusan pengurus dalam mengembangkan Rumah Sakit. Selain itu ada dukungan organisasi RS dan manajemen modern. Dalam beberapa hal, dukungan organisasi dan manajemen tersebut menjadi solusi bagi problem-problem yang muncul, karena meniscayakan adanya evaluasi dan data yang baik. Karena itu, pengurus dalam menyikapi pegawai yang harus diberhentikan misalnya, memiliki informasi lengkap sebelum mengambil kebijakan” (Wawancara, 8 Juni 2014).

Uraian-uraian tersebut mengaskan bahwa kemajuan dan kesuksesan pengelolaan aset wakaf oleh AUM ditentukan oleh para pengelolanya, baik di tingkat organisasi AUM maupun pengurus yang menaunginya. Masing-masing memiliki peran besarnya dalam rangka pengelolaan tersebut. Dalam praktik pengelolaan AUM dan aset wakaf, seringkali kesuksesan PD

Aisyiah dikesankan lebih disebut lebih menonjol dibandingkan PD Muhammadiyah sendiri. Kenyataan ini menurut A. Muslih tidak sebenarnya betul, karena ukuran kesuksesan selalu seringkali berbeda dan realitanya ditemukan banyak AUM yang ditangani bapak-bapak juga maju, jika dikelola dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini ia menyatakan:

“Ibu-ibu lebih telaten dan memiliki banyak waktu di banding bapak-bapak. Berdasar pada kenyataan tersebut maka wajar jika pengelolaan wakaf oleh Aisyiah dapat disebut lebih berjalan tertib dan teratur yang berakibat pada produktifitas pengelolaan aset lebih baik. Karenanya, nampak bahwa hasil dan perkembangan lembaga-lembaga PDA terus mengalami peningkatan. Tetapi sebenarnya wakaf yang ditangani bapak-bapak PDM juga terus berkembang pesat. Ada rumah sakit Muhamamdiyah yang dikelola bapak-bapak PCM kota dan Surya Swalayan yang terus berkembang. Saya kira, bahwa faktor pengurus selaku nadzir wakaf langsung yang bersentuhan dengan kebijakan-kebijakan usaha, banyak mempengaruhi” (Wawancara, 4 Juni 2014).

Banyaknya waktu yang dimiliki ibu-ibu PD Aisyiah dan ketelatenan mereka juga berdampak pada kemampuan mereka untuk menyelesaikan dan mengelola perbedaan dan konflik yang terjadi. Apalagi pada tingkat AUM, pengelolaan institusi telah dilakukan secara

profesional. Dalam hal ini Farida menyatakan:

“Selama ini tidak ada, kecuali perbedaan pendapat, terutama pada lingkup pengurus Majelis Kesehatan PD Aisyiah Ponorogo. Setiap perbedaan Karena adanya pertemuan yang intens setiap minggu dua kali, selalu dapat diselesaikan lewat musyawarah. Sedangkan dalam AUM seperti rumah sakit yang pendekatan manajemennya lebih modern dan profesional, maka masalah yang muncul dapat diselesaikan dan tidak sampai menjadi konflik” (Wawancara, 8 Juni 2014).

Faktor pengorbanan dan keikhlasan *lillahi ta'ala* imbuh Farida dalam kepengurusan AUM juga turut mengawal perbedaan tersebut.

B. Analisis Data

Dari uraian terdahulu dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf khususnya pada banyak amal usaha Muhammadiyah (AUM) di lingkungan PD Aisyiah Ponorogo secara umum dapat disebut dilakukan secara profesional dengan mengacu pada teori Djunaedi (2008: 1116) yang mempersyaratkan sistem manajemen berupa kelembagaan, pengelolaan operasional, kehumasan, sistem keuangan. Sebuah AUM secara institusional ditangani oleh berbagai lembaga-lembaga yang menaunginya di tingkat PD Aisyiah maupun PD Muhammadiyah, dengan porsi tanggung jawab dan tugas masing-masing. Amal usaha tersebut juga tetap memiliki kebebasannya untuk menerapkan manajemen usahanya senyampang dapat

dipertanggung jawabkan kepada pengurus di atasnya. Sedangkan berkenaan dengan terjadinya konflik di dalam pengelolaan wakaf, PD Aisyiah Ponorogo telah melakukan *controlling conflict* (pengelolaan konflik) sesuai dengan ungkapan Griffin dalam Sule (2006: 292), dengan keaktifan dan ketelatenan para pengurusnya di dalam pengembangan Amal usaha. Adanya jadwal *ngantor* yang rutin serta kesediaan untuk bertemu/ bermusyawarah bahkan hingga larut malam menjadikan perbedaan-perbedaan pendapat diantara pengurus majlis maupun pengurus AUM menjadi terselesaikan, sehingga tidak berkembang menjadi konflik yang dapat mengganggu pengelolaan organisasi. Dengan memperhatikan pengelolaan AUM dan aset wakaf yang dimiliki serta pengelolaan konflik yang dapat dilakukan oleh Pengurus Daerah Aisyiah Ponorogo, maka potensi perkembangan amal usaha Muhammadiyah pada masa depan sangatlah besar, sehingga kemanfaatannya bagi ummat juga semakin terasa. Hal tersebut akan berdampak pada kesejahteraan umat melalui Muhammadiyah, amal usaha, dan aset-aset wakafnya akan dapat pula menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari uraian terdahulu dapat disimpulkan beberapa hal:

1. Pengelolaan aset wakaf pada PD Aisyiah Ponorogo secara manajemen dilakukan melalui dua hal: a) secara langsung,

- praktis, dan operasional dilakukan oleh pengurus amal usaha (AUM) dan dipertanggung jawabkan kepada PD Aisyiah melalui majlis-majlis yang menaunginya; b) secara tidak langsung, khususnya berkenaan dengan pengamanan dan sertifikasi aset dilakukan oleh PD Muhammadiyah Ponorogo melalui Majlis Wakaf dan Kehartabendaan.
2. Tidak terjadi konflik dalam pengelolaan wakaf di PD Aisyiah Ponorogo. Perbedaan-perbedaan pendapat dapat diselesaikan melalui musyawarah dan pertemuan. Keuletan dan ketelatenan para pengurus PD Aisyiah serta pengorbanan mereka dalam mengelola amal usaha menjadi inspirasi perjuangan dalam mengembangkan amal usaha dan organisasi Muhammadiyah.
 3. Kelebihan usaha PD Aisyiah Ponorogo dalam pengelolaan wakaf dan asetnya melalui amal usaha adalah keseriusan, ketelatenan, pengorbanan dan semangat perjuangan para pengurus, hal mana sering tidak terjadi pada kepengurusan lembaga-lembaga non profit. Sikap-sikap tersebut melahirkan soliditas para pengurus dan menjadi teladan bagi para pemegang amanat amal-amal usaha Muhammadiyah.

Saran

Berkenaan dengan selesainya pembahasan ini, penulis merekomendasikan beberapa saran, diantaranya:

1. Dalam rangka memproduktifkan aset-aset wakaf, asas-asas manajemen profesional sedapat mungkin dapat harus diterapkan.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka segenap pengurus yang terlibat diharapkan dapat mencapai pemahaman bersama, agar manfaat dan keberadaan aset wakaf lebih besar dan terasa.

2. Perbedaan pandangan dan pendapat dalam mengelola aset wakaf sedapat mungkin harus dikelola agar tidak menjadi konflik yang berkepanjangan yang dapat menghambat produktifitas. Adanya aturan yang jelas tentang hak, tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf mutlak adanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Maleong, Lexy. 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.
- Mubarok, Jaih, 2008, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Muhajir, Noeng, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Sule, Ernie Tisnawati & Saifullah, Kurniawan. 2006. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana.
- Syu'aib al-, Khalid Abdullah, 2006, *Al-Naz}a>rat 'ala> al-Waqf*, Kuwait: al-Ama>nah al-Ammah li al-Auqa>f.
- Zuhaili az-, Wahbah, 1996, *Al-Wasa>ya wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Isla>mi*, Beirut: Da>r al-Fikri al-Mu'a>sir.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Aisyiyah>, diakses 10 Agustus 2014

**MATERI OTENTIK DALAM PENELITIAN TINDAKAN KELAS BAHASA INGGRIS
PADA PROGRAM STUDI MANAJEMEN**

Oleh ;

NIKEN RETI INDRIASTUTI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

Email: nikenreti@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian tindakan kelas (PTK) merupakan salah satu alternative bagi pengajar untuk menyelesaikan permasalahan di kelas. Salah satu permasalahan yang sering muncul dalam proses pembelajaran Bahasa Inggris adalah materi pembelajaran yang kurang efektif. Maka seagai pengajar Bahasa Inggris untuk program studi Manajemen (English for Specific Purposes) penulis juga mengalami permasalahan tersebut, sehingga penulis terdorong untuk melakukan PTK guna meningkatkan prestasi Bahasa Inggris mahasiswa Manajemen Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan menerapkan materi otentik. Materi otentik adalah materi pembelajaran dari sumber otentik dan dibuat bukan untuk tujuan pembelajaran. PTK ini dilakukan dalam 2 siklus dengan subyek penelitian mahasiswa Manajemen yang sedang mengambil mata kuliah Business English khususnya kelas B pada semester genap tahun akademik 2014/2015. Instrumen yang dipakai adalah catatan lapangan, ceklis pengamatan, wawancara, kuisioner, dan tes. Sementara analisa data dilakukan dengan cara penghitungan prosentasi dan deskripsi interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembelajaran dan prestasi belajar Bahasa Inggris (Business English) mahasiswa Manajemen mengalami peningkatan khususnya setelah materi otentik tersebut diterapkan dengan menggunakan strategi berpasangan. Hal ini dikarenakan jumlah mahasiswa yang cukup besar sementara penataan kursi juga sulit dilakukan ulang. Dengan berpasangan meminimalisir mahasiswa yang cenderung tidak mau aktif dalam proses pembelajaran. Dan dalam menyelesaikan tugas ketika jumlah kelompok lebih kecil mahasiswa cenderung lebih bertanggung jawab dibandingkan jika mereka berada dalam kelompok besar.

Kata Kunci: *prestasi Bahasa Inggris, materi otentik*

PENDAHULUAN

Sebagai pengajar Bahasa Inggris di Fakultas Ekonomi penulis memiliki pengalaman tentang kesulitan-kesulitan dalam proses pembelajaran. Bahasa Inggris yang merupakan mata kuliah minor di fakultas ekonomi baik di prodi akuntansi maupun manajemen memang sedikit banyak mempengaruhi animo mahasiswa untuk sungguh-sungguh menekuni mata kuliah ini sehingga mereka akan memiliki prestasi yang memadai. Yang kedua yaitu input kemampuan bahasa Inggris yang berbeda-beda sehingga menyulitkan juga bagi pengajar untuk mendesain pembelajaran yang sesuai dengan

semua kebutuhan mahasiswa. Pada semester genap tahun akademik 2014/2015 penulis memiliki tugas mengajar Bahasa Inggris pada prodi Manajemen. Secara keseluruhan penulis akan mengajar empat rombel di mana dalam satu rombel terdiri dari 30 mahasiswa. Secara umum keempat kelas ini sebenarnya memiliki permasalahan yang hamper sama, yaitu seperti yang dinyatakan di atas yang kemudian berdampak pada prestasi Bahasa Inggris yang dimiliki sebagian besar mahasiswa masih jauh dari memuaskan yaitu 60% masih dibawah nilai 70, keaktifan mahasiswa selama proses pembelajaran juga rendah yaitu kurang dari 50%, walaupun

sebagian besar mahasiswa bersikap positif terhadap Bahasa Inggris tetapi mereka masih kurang termotivasi untuk mempelajari Bahasa Inggris dengan lebih tekun. Berdasarkan pengalaman penulis di kelas akuntansi penulis berusaha membuat variasi model pembelajaran dan bahan/materi pelajaran, untuk menjadikan proses pembelajar menarik dan menghindari kebosanan. Dari berbagai variasi tersebut penggunaan materi/bahan ajar otentik mendapat respon yang lebih baik dibandingkan materi non otentik, sementara untuk model pembelajaran yang paling tinggi mendapat respon adalah diskusi kelompok dan presentasi hasil kelompok. Dari hasil pengamatan tersebut penulis menduga bahwa dengan bahan/materi pembelajar otentik mahasiswa merasakan situasi riil untuk penggunaan Bahasa Inggris tersebut sementara presentasi hasil diskusi menunjukkan bahwa mereka juga memiliki pengalaman tentang aplikasi nyata dari Bahasa Inggris sebagai alat untuk berkomunikasi. Untuk itu penulis berkeinginan untuk menggunakan bahan/materi otentik untuk memecahkan masalah pembelajaran Bahasa Inggris di kelas manajemen. Pemilihan ini dilakukan atas pertimbangan bahwa materi pembelajaran dapat diterapkan dengan model pembelajaran yang bervariasi sehingga suasana kelas tidak monoton. Materi otentik adalah materi pembelajaran yang tidak dirancang untuk keperluan pembelajaran tetapi peruntukkannya untuk keperluan kehidupan sehari-hari. Menurut Heitler (2005) materi pembelajaran otentik akan membawa pembelajar Bahasa Inggris kontak langsung dengan level pemakaian bahasa Inggris yang

nyata. Tomlinson menyatakan bahwa prasyarat bagi pemerolehan bahasa (language acquisition) adalah pengalaman yang banyak tentang bahasa dalam penggunaannya, dan materi yang baik bagi semua level pembelajar adalah yang memberikan exposure/pemajangan bagi penggunaan bahasa Inggris yang otentik baik dalam bentuk lisan maupun tertulis yang dapat meningkatkan pembelajarannya secara kognitif maupun afektif (2008: 4). Sedangkan materi otentik dalam pembelajaran Bahasa Inggris bisa berupa audio, video, dan teks tertulis. Untuk penelitian ini penulis akan memakai ketiga jenis materi tersebut yang diambil dari sumber internet. Hal ini dipilih dengan pertimbangan kemudahan akses sumber belajar baik secara waktu dan tempat. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang hasil akhirnya tidak hanya berupa produk suatu proses tetapi menjelaskan bagaimana suatu produk pembelajaran bisa dihasilkan dari proses pembelajaran, karena inti PTK itu adalah memperbaiki atau menyelesaikan masalah dalam proses pembelajaran. PTK memiliki paradigma bahwa proses pembelajaran yang baik akan menghasilkan produk pembelajaran yang baik pula. Maka berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini memiliki tujuan untuk menemukan strategi yang tepat dalam penerapan materi otentik untuk meningkatkan pembelajaran Bahasa Inggris pada kelas manajemen B angkatan tahun 2014 pada semester genap tahun akademik 2014/2015. Sehingga hasil dari PTK ini selain untuk perbaikan proses pembelajaran sekaligus dapat menambah materi ajar dan pengembangan kurikulum Bahasa Inggris

pada program studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang mana peneliti berperan juga sebagai guru dalam kelas yang diteliti. Penelitian jenis ini merupakan penelitian yang sistematis dilakukan oleh guru, kepala sekolah, konsultan sekolah, atau stakeholder untuk mengumpulkan informasi tentang bagaimana sekolah dijalankan, bagaimana guru mengajar, dan bagaimana murid mereka belajar. Penelitian secara umum memiliki tujuan untuk memecahkan persoalan pembelajaran dalam kelas dan sekaligus untuk memperbaiki proses pembelajaran. PTK dilakukan dalam serangkaian aktifitas yang terbentuk dalam siklus, setiap siklus memiliki aktifitas sebagai berikut: (1) planning; (2) acting; (3) observing; dan (4) reflecting. Dalam proses penelitian minimal harus dilakukan dalam 2 siklus apabila hasilnya sudah menunjukkan keberhasilan dari target yang telah ditentukan. Apabila belum tercapai maka siklus berikutnya harus dilakukan. Penelitian ini dilakukan di semester genap tahun akademik 2014/2015.

Subyek penelitian adalah mahasiswa semester 2 B program studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Sementara itu untuk data yang digunakan dalam PTK ini berupa: hasil observasi berupa keaktifan siswa dalam kelas, hasil wawancara berupa respon siswa, hasil kuisioner juga untuk respon siswa, dan nilai tes siswa untuk

mengukur peningkatan Bahasa Inggris mereka.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Siklus pertama dilakukan dalam empat kali pertemuan. Materi ajar yang disajikan ada dua topic masing-masing topic disampaikan dalam dua kali pertemuan. Materi pertama diambil dari Wikipedia yaitu tentang profil TELKOM sedangkan materi kedua berupa artikel dari The Jakarta Post dengan judul *Demand for White Collar Professionals to Grow in Indonesia*. Secara materi mahasiswa terbantuan dengan profil Telkom, namun demikian mereka masih mengalami kendala dalam penguasaan kosa kata. Sementara untuk topic kedua mahasiswa mengalami kesulitan tidak hanya penguasaan kosa kata tetapi juga kekompleksan teks secara struktur dan grammar.

Dilihat dari metode pembelajaran maka sebaliknya pemakaian kelompok diskusi berdasarkan deret kursi tempat duduk tidak efektif karena jumlah anggota terlalu banyak dan tempat duduk yang tidak bisa ditata melingkar. Sehingga keaktifan hanya didominasi mahasiswa tertentu. Pada siklus pertama hasilnya dibawah target sehingga dilanjutkan ke siklus kedua. Pada siklus kedua dilakukan perbaikan rencana yaitu pemilihan materi yang lebih menarik dan juga merubah strategi pembelajaran. Materi otentik pada siklus kedua adalah video iklan *Nike Fuelband* dan lowongan kerja dari *The Jakarta Post*.

Materi video iklan cukup membuat mereka lebih memperhatikan dan focus terhadap penyajian materi. Demikian juga untuk lowongan kerja mereka juga cukup aktif menanyakan istilah-istilah yang tidak

dipahami. Mereka juga antusias mengerjakan tugas dan selesai tepat waktu. Dengan merubah strategi dari kelompok menjadi berpasangan membuat keaktifan mereka juga meningkat. Dan hasil siklus kedua juga meningkat menjadi lebih baik karena target PTK ini tercapai. Progres pencapaian hasil dari siklus 1 ke siklus 2 diuraikan seperti berikut ini. Berdasarkan catatan lapangan kelancaran proses pembelajaran mengalami peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2. Dengan berbagai macam variasi materi dan strategi pembelajaran mahasiswa menjadi semakin aktif baik dalam bertanya, mengerjakan tugas, presentasi maupun menjawab pertanyaan. Dari ceklis pengamatan maka hasilnya seiring dengan hasil catatan lapangan yaitu nilai keaktifannya dari 54% pada siklus 1 meningkat menjadi 84,4% pada siklus ke dua.

Demikian pula berdasarkan wawancara dengan mahasiswa pada siklus pertama mereka merasa kesulitan dan tidak menikmati menjadi merasa senang dan antusias untuk mencari informasi sendiri. Tanggapan positif terhadap pelaksanaan penerapan materi otentik berdasarkan hasil kuisioner juga mengalami peningkatan dari 55% di siklus 1 menjadi 89% pada siklus 2. Sedangkan hasil akhir atas keberhasilan proses pembelajaran ini bisa dilihat pada nilai tes mahasiswa yang dalam siklus satu masih 60% mahasiswa yang mendapat nilai minimal yang ditetapkan yaitu 75 maka pada siklus kedua seluruh mahasiswa berhasil mencapai atau melebihi nilai minimal tersebut.

KESIMPULAN

Maka berdasarkan pembahasan di atas disimpulkan bahwa penerapan materi otentik

dapat meningkatkan pembelajaran Bahasa Inggris pada program studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan pembuktian sebagai berikut: (1) mahasiswa menikmati proses pembelajaran; (2) mahasiswa menyukai materi dan metode yang dipakai; (3) mahasiswa mengalami peningkatan pada nilai tes mereka. Sedangkan pencapaian hasil tersebut diperoleh dengan memenuhi kriteria berikut: (2) interaksi dosen dan mahasiswa dilakukan lebih intens dan lebih dekat; (2) jenis materi ajar dibuat bervariasi dan menarik; (3) penerapan strategi pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Depdiknas. 2008. *Panduan Pengembangan Bahan Ajar*
- Heitler, David. 2005. *Teaching with Authentic Material*. London: Pearson Education
- Kitao, Kenji and Kitao, S.K. 1997. Selecting and Developing Teaching Learning Materials. *The Internet TESL Journal*, Vol. IV, No. 4
- Prastowo, Adi. 2011. *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*. Jojakarta: Diva Press
- Tomlinson, Brian. 2008. *Material Development in Language Teaching*. Cambridge University Press

**PENINGKATAN KEMAMPUAN SISWA MEMBUAT MODEL MATEMATIKA
DARI SOAL CERITA DENGAN BANTUAN 'KEYWORD'**

Oleh:
IUMADI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
Email: jumsfkumpo@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu tahapan dalam penyelesaian masalah matematika (problem solving) adalah membuat model matematika. Sebagian besar siswa kesulitan pada saat mengubah soal cerita menjadi kalimat matematika. Salah satu cara efektif yang dapat mempermudah siswa membuat model matematika adalah dengan mengidentifikasi kata kunci dari soal yang disajikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Tindakan kelas untuk meningkatkan kemampuan siswa membuat model matematika. Hasil dari penelitian yang dilakukan selama dua siklus dengan materi yang berbeda diperoleh bahwa kemampuan identifikasi kata kunci dapat meningkatkan kemampuan menyusun model matematika dari soal cerita.

Kata Kunci : model matematika, soal cerita, kata kunci

PENDAHULUAN

Dalam rangka memasuki era Masyarakat Ekonomi Asean, menuntut bidang pendidikan sebagai sector penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing untuk mengambil peran dengan strategi yang efektif. Salah satu strategi tersebut adalah tuntutan pembelajaran disemua bidang ilmu dengan inovatif dan tepat sasaran. Bidang matematika sebagai bidang ilmu dasar dari bidang lain memegang peranan penting sebagai alat menyelesaikan permasalahan dan tantangan. Sumber daya yang bermutu mempunyai ketrampilan yang handal dalam penyelesaian masalah baik secara matematis maupun tidak dan dilatih secara bertahap dalam pembelajaran. Soal cerita sebagai studi kasus sederhana yang digunakan untuk melatih ketrampilan siswa dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Sebagian besar siswa kesulitan menghubungkan antara konsep matematika dengan permasalahan pada soal cerita

yang disajikan. Hal ini terlihat bahwa sebagian besar siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang sudah disajikan secara angka namun kesulitan pada permasalahan yang disajikan secara soal cerita. Beberapa faktor yang mempengaruhi adanya kesulitan tersebut adalah kurang pahami siswa terhadap konteks soal yang diberikan, contoh pada materi aritmatika social, siswa tidak memahami bahwasanya bunga bank dihitung dari besarnya uang yang ditabung (Bahmeai, 2011).

Hal ini tidak menutup kemungkinan karena siswa belum mempunyai wawasan dalam hal bunga bank. Sehingga dalam melatih ketrampilan pemecahan masalah siswa sebaiknya mempunyai pengetahuan tentang konteks yang ada pada soal cerita. Faktor lain yang mempengaruhi adalah penyajian soal cerita yang kurang tepat. Permasalahan soal cerita dibagi menjadi beberapa tipe (Galbraith&Stillman, 2001) yakni :

1. Permasalahan yang mengada ada, yakni permasalahan yang kurang masuk akal namun bisa didapatkan penyelesaiannya secara angka. Contoh : *Satu orang dapat menggali lubang tanah pada kedalaman tertentu dalam waktu 3 jam. Berapa waktu yang diperlukan 10 orang untuk menggali lubang tanah dengan kedalaman yang sama?*. Permasalahan tersebut dapat dicari penyelesaiannya secara matematika namun kurang masuk akal.

Jenis permasalahan yang lain: Permasalahan berkonteks sebagian, Permasalahan terapan, Permasalahan Pemodelan. Faktor lain yang menyebabkan siswa tidak berhasil menyelesaikan soal cerita adalah kemampuan mentransfer pengetahuan verbal dari soal cerita menjadi kalimat matematika. Kebiasaan bekerja dengan menghafal cara dalam menyelesaikan permasalahan matematika rupanya menjadikan kebanyakan siswa menjadi kurang kreatif dan kurang peka. Terutama pada permasalahan dalam bentuk soal cerita. Siswa dapat menyelesaikan suatu permasalahan dalam kalimat matematika, namun menjadi kesulitan jika harus menelaah terlebih dahulu permasalahan dalam bentuk bahasa. Kesulitan menyelesaikan soal cerita menjadi penghambat seorang siswa mencapai kompetensi yang ada pada kurikulum.

Hal tersebut terjadi pula pada sebagian besar siswa SMP Terpadu Ponorogo. Pada siswa kelas IX pun beberapa masih mendapati permasalahan tersebut. Berkaitan dengan masalah tersebut selama ini guru hanya memberikan banyak latihan. Guru beranggapan faktor utama penyebabnya adalah kemampuan anak dalam berbahasa.

Namun hal itu tidak akan dengan segera menyelesaikan persoalan. Memberikan banyak latihan hanya dapat membiasakan anak pada kasus yang sama. Permasalahan dalam bentuk soal cerita sangatlah variatif. Siswa akan tetap kesulitan jika menemui persoalan dalam bentuk lain. Selain faktor kemampuan bahasa, penyebab lain adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan siswa terhadap tema pada soal cerita. Contohnya adalah soal cerita pada bahasan aritmatika sosial berikut. *Rani menabung Rp. 900.000,- ke Bank 'BMI' yang memberikan bunga 12% per tahun. Sejak itu ia tidak menambah uang tabungannya. Pada suatu ketika ia mendapatkan saldo akhirnya adalah Rp.972.000,-? Sudah berapa bulankah tabungan Rani di bank 'BMI'?*

Contoh berikutnya adalah sebagai berikut:

Pak Warno hendak membagikan warisan kepada ketiga anaknya. Anak pertama mendapat $\frac{2}{5}$ bagian. Anak kedua mendapat $\frac{1}{4}$ bagian. Anak ketiga mendapat warisan senilai Rp 35.000.000,-. Senilai berapakah warisan yang diterima anak pertama?

Pada contoh soal diatas beberapa siswa mengambil langkah bahwa persen bunga dikalikan dengan jumlah saldo akhir. Hal ini dikarenakan pada soal kebanyakan 2 tidak memberitahukan bahwa persen bunga dikalikan dengan tabungan awal. Demikian pula pada contoh soal yang kedua, beberapa siswa mengalikan $\frac{2}{5}$ dengan Rp. 35.0000.000,-.

Fenomena menjadi mengkhawatirkan apabila siswa tidak merasa menemui kesulitan atau merasa sudah melakukan yang benar namun mendapatkan penyelesaian yang

tidak tepat. Salah satu alternative yang dapat diupayakan oleh guru adalah mengubah pola pembelajaran dimulai dengan siswa menyusun sendiri sebuah permasalahan. Tentukan hal ini diawali dengan memberikan ketentuan ketentuan khusus sebagai bantuan supaya siswa tidak kesulitan. Dengan begitu diharapkan siswa dapat lebih mudah memahami persoalan yang disusun oleh orang lain.

Pendekatan semacam ini lebih dikenal sebagai pendekatan *problem posing*. Pembelajaran matematika dengan pendekatan *problem posing* merupakan pembelajaran matematika yang dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan masalah-masalah. Salah satu dari variasi dalam problem posing yaitu penggunaan keyword untuk menyusun soal cerita akan diambil sebagai tindakan dalam penelitian ini. Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini mengangkat permasalahan 'Bagaimanakah peningkatan kemampuan siswa dalam membuat model matematika dari soal cerita dengan melalui kata kunci/'keyword'?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Terpadu Ponorogo dan waktu penelitian bulan April - September 2015. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII Newton SMP Terpadu Ponorogo Semester Ganjil tahun pelajaran 2015/2016 yang terdiri atas 34 siswa dengan rincian 15 siswa laki-laki dan 19 siswa perempuan. Diambilnya subjek ini atas dasar pertimbangan bahwa:

(1) Dalam proses pembelajaran guru masih cenderung meminimalkan keterlibatan

siswa. Dominasi guru (*teacher oriented*) dalam proses pembelajaran menyebabkan kecenderungan siswa lebih bersifat pasif sehingga mereka lebih banyak menunggu sajian guru daripada mencari dan menemukan sendiri pengetahuan, keterampilan atau sikap yang mereka butuhkan,

(2) Aktivitas belajar siswa kurang dalam proses pembelajaran. Hal ini akibat guru mendominasi pembelajaran sehingga mengurangi aktivitas belajar siswa dalam memahami konsep yang dipelajari,

(3) Metode yang diterapkan dalam pembelajaran matematika masih didominasi dengan metode konvensional dan

(4) Dalam menyelesaikan masalah siswa kurang bisa memahami informasi yang diberikan sehingga dalam penyelesaian masalah tersebut tidak seperti yang diharapkan. Penelitian ini dibagi dalam dua siklus dengan masing-masing siklus terdiri dari empat tahapan. Penelitian tindakan kelas ini menggunakan model Kemmis dan Mac Taggart yang terdiri dari empat komponen, yaitu:

- 1) perencanaan,
- 2) pelaksanaan tindakan,
- 3) observasi/evaluasi, dan
- 4) refleksi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Strategi pembelajaran yang pertama dengan focus kemampuan membuat model matematika adalah dengan mengenalkan beberapa kata kunci pada soal cerita dan operasi hitung yang bersesuaian. Tentu pada tahap ini sebelumnya sudah ditanamkan pengetahuan yang berhubungan konteks

materi yang dibahas. Tidak terlalu mengalami kesulitan pada tahap ini. Siswa cukup mudah mengidentifikasi kata kunci pada soal cerita dan menemukan operasi hitung yang bersesuaian. Tahap berikutnya adalah mengajak siswa menyusun soal cerita sesuai dengan model matematika yang bersesuaian. Pada tahap ini siswa mulai mengalami kesulitan. Beberapa harus mendapat pendampingan dari guru Pembelajaran ke 3 mengajak siswa untuk membuat model matematika dan selanjutnya menyusun sendiri soal cerita yang bersesuaian. Pada saat menyusun model matematika sebagian besar siswa tidak mengalami kesulitan, namun pada saat menyusun soal cerita yang sesuai mereka butuh waktu yang agak lama. Bahkan mengubah model matematika yang sudah disusun guna mendapatkan soal cerita yang lebih mudah. Pada siklus dua, aturan pembelajaran diperketat dengan model yang sudah disusun tidak dapat dirubah lagi. Namun hasil kurang begitu menggembirakan ternyata hanya sekitar 53% yang dapat menyusun soal cerita yang sesuai.

Pada pembelajaran yang ke -4 pada siklus satu dan dua, siswa diminta membuat model matematika berdasarkan soal cerita yang disusun oleh siswa lain. Pada siklus satu, sekitar sebagian siswa menyusun soal cerita mirrp dengan soal cerita yang ada pada buku. Sebagian lagi menyusun soal mirip dengan susunan pada pertemuan sebelumnya. Walaupun mereka dapat menentukan model matematikanya namun terlihat kreativitas berpikirnya masih kurang. Hal ini membaik ketika pada siklus dua mereka dilarang untuk memegang buku teks pada saat pembelajaran. Hasil tes akhir silus dua menunjukkan bahwa

sekitar 86% siswa telah benar dalam menyusun model matematika sesuai soal yang disajikan.

KESIMPULAN

Salah satu hambatan siswa dalam menyelesaikan masalah soal cerita adalah kesulitannya membuat model matematika. Melalui identifikasi kata kunci memudahkan siswa untuk menyusun model matematika dengan benar sehingga didapatkan penyelesaian yang tepat. Pada topic topic materi lain memungkinkan melakukan sedikit penyesuaian untuk membangun pengethauan siswa sesuai konteks yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Galbraith, P., &Stillman, G. (2001). Assumptions and context: *Pursuing their role inmodelling activity*. -
- Bahmeai, Farzad, (2011), *Mathematical Modeling In Primary School, Advantages And Challenges*, Journal of Mathematical Modelling and Application

**PERGESERAN PERAN DAN FUNGSI SUAMI
TERHADAP PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA
TENAGA KERJA WANITA (TKW) DI LUAR NEGERI**

Oleh :

EKAPTI WAHIUNI¹⁾

SLAMET SANTOSO²⁾

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

ABSTRAK

Adanya motivasi untuk mengubah nasib maupun adanya daya tarik upah yang relatif tinggi di luar negeri, mengakibatkan banyak tenaga kerja (khususnya para wanita) rela menjadi tenaga kerja di luar negeri, bahkan para wanita yang telah bersuamipun telah banyak menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri. Dengan bekerjanya istri ke luar negeri, beban suami menjadi semakin besar karena selain setiap hari harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mengatur pekerjaan di dalam rumah juga harus mampu untuk mendidik, mengasuh dan mengawasi anak-anaknya. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pergeseran peran dan fungsi suami terhadap pendidikan anak dalam keluarga tenaga kerja wanita (TKW) luar negeri di Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Teknik Indepth Interview dan didukung dengan data-data yang diperoleh di kantor desa. Teknik penentuan informan dengan menggunakan Teknik Snow Ball dan untuk menganalisis data dengan menggunakan Model Intraktif Analisis Data. Kesimpulan hasil penelitian menunjukkan bahwa a) Terdapat dua faktor yang mendorong ibu rumah tangga atau istri di Desa Polorejo untuk menjadi TKW di luar negeri, yaitu keinginan dari dalam dirinya sendiri dan dorongan dari luar diri; b) Peran dan fungsi suami dalam pemenuhan kebutuhan keluarga sangat didukung atau dibantu oleh anggota keluarga, sehingga peran ganda suami (ayah) menjadi tidak terlalu berat dan dapat menekan konflik peran sebagai kepala keluarga; dan c) Dampak kepergian ibu rumah tangga (istri) menjadi TKW di luar negeri terhadap pendidikan anak sangat besar pengaruhnya. Dalam hal ini keterlibatan suami secara aktif sangat menentukan keberhasilan pendidikan anak.

Kata Kunci : *Pergeseran Peran dan Fungsi Suami, Keluarga TKW*

PENDAHULUAN

Sejalan dengan perkembangan jaman modern menuju era globalisasi, kaum wanita menuntut adanya emansipasi wanita, yaitu usaha untuk melepaskan diri dari peranan wanita yang terbatas untuk mendapatkan status baru di dalam ataupun di luar keluarga (masyarakat luas). Adanya emansipasi wanita tersebut, mengakibatkan tugas wanita tidak hanya untuk mengurus rumah tangga tetapi mempunyai hak yang sama dengan laki-laki untuk aktif berperan di luar rumah, baik karena tuntutan kebutuhan ekonomi keluarga maupun tuntutan kariernya. Menurut Ibnu Ahmad Dahri (1992: 31), motif yang

mendasari wanita untuk bekerja di luar rumah adalah : a) Motif Ekonomi. Seorang wanita yang karena penghasilan orang tua atau suaminya tidak mencukupi dan terpaksa turut bekerja; b) Motif sebagai Alternatif. Seorang wanita yang bekerja bukan semata-mata karena uang, karena penghasilan suaminya sudah cukup untuk menghidupi keluarganya. Sedangkan hasil penelitian S.R. Parker (1990: 72) menunjukkan bahwa kebanyakan wanita sudah menikah menyatakan bahwa bekerja akan memberi mereka tambahan pendapatan untuk menutupi kekurangan ekonominya; namun dalam kebanyakan kasus, tekanan ekonomi

bukanlah alasan yang utama, tetapi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi atau pun untuk memenuhi kebutuhan sekolah anak-anaknya. Selain itu, keinginan mengatasi kebosanan dan kesepian di rumah serta keinginan untuk berteman juga merupakan motivasi lain yang mendorong wanita untuk bekerja; tetapi beberapa wanita memilih bekerja karena memang senang dengan pekerjaan tersebut. Mengejar status merupakan salah satu motivasi lain dari wanita bersuami untuk bekerja lagi. Selanjutnya Parker mengungkapkan bahwa berkembangnya kesempatan bagi wanita bersuami untuk bekerja di luar rumah mengakibatkan pola kekeluargaan menjadi berubah dan muncul yang disebut sebagai “*dualisme karier*”. Permasalahan dualisme karier tersebut dapat membawa dampak antara lain : a) Over Load (beban berlebihan). Suami-istri dibebani terlalu banyak tanggung jawab. Pembantu rumah tangga bukanlah merupakan suatu jawaban, sebab kehadirannya sering menimbulkan suatu ketegangan baru dalam keluarga; b) Adanya Sanksi Lingkungan. Mungkin seorang istri yang masuk ke dalam suatu pekerjaan dimana istri tidak diterima secara keseluruhan atau menjadi subyek kritik, karena mengabaikan anak-anaknya; c) Identitas pribadi dan Harga Diri. Baik suami maupun istri harus mampu mengatasi kritik-kritik yang didasarkan pada tradisi permasalahan peran berdasarkan jenis kelamin; d) Dilema Hubungan Sosial. Hubungan antara keluarga dengan tetangga menjadi renggang, karena baik suami maupun istri masing-masing sibuk dengan pekerjaan di luar rumahnya; dan e) Konflik Peran Ganda. Terdapat konflik baik

bagi suami maupun istri diantara kepentingan pekerjaan (**S.R. Parker; 1990: 75**).

Di Indonesia, seorang ayah dianggap sebagai kepala keluarga yang diharapkan mempunyai sifat-sifat kepemimpinan yang mantap menurut ajaran-ajaran tradisional. Menurut Ki Hajar Dewantara, pemimpin harus dapat memberikan teladan yang baik (*Ing Ngarso Sung Tulodo*), memberikan semangat sehingga pengikutnya kreatif (*Ing Madyo Mbangun Karso*) dan mampu membimbing (*Tut Wuri Handayani*). Sebagai seorang pemimpin di dalam rumah tangga, seorang ayah harus mengerti serta memahami kepentingan-kepentingan dari keluarga yang dipimpinnya. Pengaruh ayah terhadap anggota keluarga sangat besar, yaitu apabila ayah, sebagai pemegang kekuasaan, bersifat terlalu keras dan tidak obyektif atau sebaliknya bersifat terlalu lemah maka akan dapat menimbulkan dampak yang kurang baik terhadap keluarganya. Dalam keluarga, wanita pada umumnya masih merupakan penanggung jawab dan pelaku utama bagi terlaksananya tugas-tugas rumah tangga, fungsi reproduksi dan pembinaan sumber daya manusia, serta berbagai tugas keluarga lainnya. Tugas-tugas rumah tangga meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan pemeliharaan atau penyediaan alat-alat rumah tangga, sandang dan pangan, urusan dalam rumah dan perkarangan. Sedangkan reproduksi dan pembinaan sumber daya manusia meliputi : hamil, melahirkan dan menyusui serta membesarkan, mendidik dan melindungi anak (**Suwiyah Alwi AS; 1997: 144**). Keluarga mempunyai peranan penting, dimana kunci motivasi dan keberhasilan anak untuk melakukan sosialisasi dalam memenuhi

kebutuhan-kebutuhan dasar yang terdiri dari kebutuhan sandang, pangan dan papan, kebutuhan keselamatan jiwa dan harta benda, kebutuhan harga diri, kebutuhan kesempatan mengembangkan potensi, dan kebutuhan kasih sayang. Dalam masalah pendidikan anak, wanita dapat dikatakan sebagai ibu pendidik pertama dan utama dari anak-anak, dan suaminya sebagai bapak dari anak-anak mereka yang mempunyai tanggung jawab bersama terhadap tumbuh berkembangnya anak-anak mereka secara optimal. Peran dan tanggung jawab wanita (istri) dalam menciptakan keluarga sakinah sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari peran dan tanggung jawab pria (suami). Tidak dapat dikatakan yang satu dominan dan lebih menentukan, sedangkan yang lain sekedar pelengkap. Keduanya saling melengkapi dan saling mendukung. Pria dan wanita, katakanlah ibu dan ayah, adalah *team-work* atau *team-mate* dalam menciptakan keluarga sakinah, ditambah dengan peran-peran edukatif dan sosialisasi positif dari lingkungan yang lebih luas (**Ainun B.J. Habibie; 1997: 219**).

Proses pendidikan berada dan berkembang bersama proses perkembangan hidup dan kehidupan manusia mulai dari kehidupan dalam keluarga sampai dengan kehidupan dalam masyarakat luas. Pendidikan dalam keluarga berlangsung secara otomatis dan alami, serta memberikan kesan yang membekas sepanjang masa kehidupan dan merupakan dasar pembentukan kepribadian anak pada usia muda. Rumah tangga atau keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama bagi anak, sehingga orang tua mempunyai tanggung

jawab dan peranan yang penting dalam pembentukan sikap dan tingkah laku anak. Menurut hasil penelitian dari Henderson pada tahun 1988 (**dalam Soemiarti Patmonodewo; 2000: 126**), menunjukkan bahwa prestasi anak akan meningkat apabila para orang tua peduli terhadap anak mereka. Yang dibutuhkan dalam pendidikan di keluarga adalah besarnya perhatian orang tua yang diberikan dalam usaha pendidikan anak-anaknya dan banyaknya waktu yang diberikan dalam memperhatikan, membina dan mendidik anak. Hal tersebut penting artinya karena dalam masa perkembangan anak-anak sangat membutuhkan perhatian orang tuanya sebagai tempat untuk menerima kasih sayang, bertanya dan mencontoh perilaku sehingga anak-anak akan dapat berkembang baik jasmani maupun rohaninya secara baik. Adanya ketimpangan kesempatan kerja di dalam negeri, yaitu berkembangnya angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja, mengakibatkan para pencari kerja mengambil alternatif lain untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Dengan motivasi untuk mengubah nasib maupun adanya daya tarik upah yang relatif tinggi di luar negeri, mengakibatkan banyak tenaga kerja (khususnya para wanita) rela menjadi tenaga kerja di luar negeri, bahkan para wanita yang telah bersuamipun telah banyak menjadi tenaga kerja wanita (TKW) di luar negeri. Menurut Ignas Bethan (**1993: 801**), bahwa sebagian wanita Indonesia bersedia berangkat ke Saudi Arabia untuk menjadi tenaga kerja wanita karena ingin mengubah nasib. Memang diakui bahwa di satu sisi, secara ekonomi remitan yang kembali ke keluarga

cukup besar sehingga mampu untuk membuat rumah, membeli tanah, perabotan rumah tangga, kendaraan dan lain-lain. Tetapi di sisi lain, keluarga yang ditinggal mengalami berbagai masalah baik antara suami dengan anak-anaknya maupun dengan anggota keluarga yang lain. Khususnya dalam masalah pendidikan anak di rumah, dengan bekerjanya istri ke luar negeri, beban suami menjadi semakin besar karena selain setiap hari harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mengatur pekerjaan di dalam rumah juga harus mampu untuk mendidik, mengasuh dan mengawasi anak-anaknya agar dapat menjadi anak yang pintar, berbakti pada orang tua dan bertingkah laku yang baik. Dalam keluarga yang ditinggalkan isteri kerja ke luar negeri maka semua peran dan fungsi isteri dalam keluarga diambil alih oleh suami. Hal ini ditunjukkan dengan ukuran sebagai berikut, yaitu a) Ayah atau suami seharusnya menjadi pendorong finansial utama bagi anaknya; b) Ayah atau suami harus menyisihkan banyak waktunya untuk menjaga anak-anaknya; c) Ayah atau suami lebih banyak bertanggungjawab untuk membuat peraturan bagi anak-anaknya; d) Ditambah dengan pekerjaan domestik, seperti memasak, menyapu atau membersihkan rumah, menyeterika, mencuci yang semula merupakan pekerjaan sistem sehari-hari. Ayah harus dapat menanamkan nilai dan norma yang memegang teguh prinsip tanggung jawab, kejujuran dan sikap tidak tergantung di dalam diri anak; dan e) Seorang ayah diharapkan memiliki kekuasaan dan kewibawaan yang dapat dikagumi oleh anggota keluarga. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk

mendiskripsikan pergeseran peran dan fungsi suami terhadap pendidikan anak dalam keluarga tenaga kerja wanita (TKW) luar negeri di Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Polorejo, yang merupakan salah satu dari 19 desa yang berada di wilayah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. Pertimbangan pemilihan lokasi penelitian tersebut adalah bahwa di Desa Polorejo terdapat banyak kaum perempuan bekerja menjadi tenaga kerja wanita ke luar negeri dan dari yang tenaga kerja wanita yang berangkat ke luar negeri tersebut mayoritas sudah bersuami (berkeluarga) dan mempunyai anak. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *Teknik Indepth Interview* (Wawancara Mendalam). Disamping itu, juga membutuhkan data sekunder (dokumentasi) yang diperoleh di Kantor Desa Polorejo Kecamatan babadan, yang digunakan sebagai data pendukung. Dalam menentukan informan penelitian digunakan *Teknik Snow Ball* (Teknik Bola Salju). Proses bola salju ini berlangsung terus sampai peneliti memperoleh data yang cukup sesuai kebutuhan (**Arikunto; 2002: 15**). Berdasarkan pola azas penelitian kualitatif, maka aktifitas analisis data dilakukan di lapangan dan bahkan bersamaan dengan proses pengumpulan data dalam wawancara mendalam. Reduksi data dan sajian data merupakan dua komponen dalam analisis data. Penarikan kesimpulan dilakukan jika pengumpulan data dianggap cukup memadai dan dianggap selesai. Jika terjadi kesimpulan

yang dianggap kurang memadai maka diperlukan aktifitas verifikasi dengan sasaran yang lebih terfokus. Ketiga komponen aktifitas tersebut saling berinteraksi sampai diperoleh kesimpulan yang mantap. Menurut Sutopo (2002), proses analisis data tersebut dinamakan *Model Intraktif Analisis Data*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Polorejo (data tahun 2005) merupakan salah satu dari 19 desa yang berada di wilayah Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo, dengan luas wilayah desa seluas 339,525 hektar. Secara geografis, Desa Polorejo berbatasan dengan Desa Sukosari (batas sebelah utara), Desa Cekok (batas sebelah timur), Desa Gupolo (batas sebelah selatan), Desa Ngunut (batas sebelah barat), dan terletak di sebelah utara Kota Ponorogo. Jumlah penduduk Desa Polorejo sebanyak 4.973 jiwa, yang terbagi menjadi 2.606 penduduk laki-laki dan 2.367 penduduk perempuan, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.191 kepala keluarga. Mayoritas mata pencaharian penduduk di Desa Polorejo adalah di bidang pertanian, yaitu sebagai petani sebanyak 1.936 orang dan sebagai buruh tani sebanyak 154 orang, sedangkan mata pencaharian yang lainnya adalah sebagai pegawai negeri sebanyak 46 orang dan sebagai pedagang sebanyak 78 orang. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, dapat diketahui beberapa faktor yang mendorong para ibu (istri) yang sudah berumah tangga untuk pergi ke luar negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW). Beberapa faktor tersebut terbagi menjadi dua, yaitu : 1) Faktor dari Dalam. Faktor dari dalam merupakan motivasi yang ada di dalam

diri ibu (istri) yang sudah berumah tangga untuk menjadi TKW di luar negeri. Faktor tersebut adalah keinginan merubah nasib dan faktor tersebut dipengaruhi oleh berbagai motivasi, yaitu mencari modal, demi masa depan anak-anaknya, tekanan ekonomi, mampu hidup mandiri, dan membuat rumah; dan 2) Faktor dari Luar. Faktor dari luar adalah pengaruh, baik dari teman, tetangga maupun kerabat yang sudah sukses menjadi TKW di luar negeri dan status sosial ekonominya meningkat. Selain itu juga terdapat dorongan dari suaminya sendiri. Beberapa tujuan yang diinginkan antara lain supaya menjadi orang yang mampu dan rumah tangganya berkecukupan. Dari hasil penuturan para informan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa faktor pendorong seorang ibu rumah tangga untuk menjadi TKW di luar negeri sangat bervariasi dan kompleks. Motivasi dari dalam dan dari luar saling mempengaruhi dalam membuat keputusan untuk menjadi TKW di luar negeri. Hal ini sesuai dengan pendapat Ignas Bethan (1993: 80) bahwa "Sebagian wanita Indonesia bersedia berangkat menjadi TKW ke luar negeri untuk merubah nasib". Beberapa dampak dari ibu rumah tangga yang menjadi TKW di luar negeri adalah : 1) Terjadinya perubahan sosial ekonomi. Besarnya remitan sangat mempengaruhi terhadap peningkatan pendapatan dan perbaikan ekonomi rumah tangga. Dengan remitan tersebut mereka mampu membuka dan memperluas usaha ekonomi (toko dan berdagang), mampu membeli tanah dan membuat rumah yang cukup bagus, mampu membeli kendaraan atau peralatan elektronik, dan mampu menyekolahkan anak-anaknya;

dan 2) Terjadi perubahan sosial budaya. Terdapat sikap berani dalam menghadapi berbagai permasalahan terkait pro dan kontra terhadap TKW di luar negeri dan peningkatan rasa sosial dan keagamaan, yaitu misalnya membantu pembangunan sekolah maupun pembangunan masjid di desanya. Suami sebagai kepala keluarga, ketika ditinggal istri menjadi TKW ke luar negeri, maka fungsi-fungsi sebagai ibu rumah tangga harus mampu dipenuhi oleh sang suami tersebut, baik menyangkut pemberian kasih sayang sampai dengan pendidikan anak-anaknya di dalam rumah. Hasil wawancara dengan informan, menunjukkan bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan kasih sayang sampai dengan pendidikan anak-anaknya, ketika istri harus menjadi TKW di luar negeri, maka suami dibantu oleh anggota keluarga yang lain, misalnya kakek dan nenek, paman dan bibi, adik kandung dan adik ipar. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa ikatan keluarga tradisional masih cukup kuat dalam membantu memenuhi fungsi dan peran keluarga. Para suami yang ditinggal istrinya menjadi TKW di luar negeri tidak sepenuhnya menganggur tetapi mempunyai pekerjaan walaupun tidak tetap sehingga mereka masih mempunyai penghasilan disamping mendapatkan kiriman dari istrinya. Sedangkan untuk urusan sosial kemasyarakatan, karena sebagian besar warga Desa Polorejo banyak yang menjadi TKW di luar negeri, maka permasalahan istri yang menjadi TKW tidak terdapat permasalahan. Kiriman dari para istri dapat dimanfaatkan, baik untuk membangun rumah maupun membuka usaha pertokoan di rumah. Dampak yang sering muncul dalam keluarga

yang istrinya bekerja sebagai TKW di luar negeri adalah terjadinya konflik peran. Hal ini disebabkan, karena banyaknya peran yang harus dijalankan oleh suami. Konflik bisa terjadi secara langsung, yaitu suami dihadapkan pada konflik peran yang harus dilaksanakan secara bersama-sama, misalnya mengurus pekerjaan domestik dan mengurus anak-anak yang masih kecil. Sedangkan konflik yang tidak secara langsung adalah kondisi psikologis keluarga, baik dalam masalah landasan keagamaan, kesabaran dan pemberian kasih sayang. Kasus perjudian, perselingkuhan, menelantarkan anak dan menghambur-hamburkan uang kiriman istri sering terjadi pada keluarga yang istrinya menjadi TKW di luar negeri. Dampak yang sangat berpengaruh terhadap anak-anak yang ibunya menjadi TKW di luar negeri adalah karena kurang perhatian, anak menjadi bandel, nakal dan semaunya sendiri. Dan hal ini semakin meningkat jika di keluarga tersebut terjadi kekerasan dan perceraian orang tuanya. Dampak negatif yang diuraikan di atas akan mampu ditekan jika peran suami, termasuk dalam menggantikan peran istri, dapat dilaksanakan dengan baik. Disamping itu, juga tergantung motivasi yang ada dalam diri suami untuk merelakan istrinya bekerja sebagai TKW di luar negeri. Dengan adanya kiriman yang cukup besar dari istri, kebutuhan anak menjadi tercukupi, baik untuk biaya sekolah, membelikan kendaraan maupun kebutuhan uang saku anak. Oleh sebab itu, peran suami menjadi yang utama untuk mendidik dan mengarahkan anak-anaknya agar tidak terjerumus pada kemewahan dan berperilaku negatif. Dari penuturan informan di lapangan, diketahui

bahwa tidak semua suami menyelewengkan kewajibannya setelah ditinggal istrinya bekerja di luar negeri. Masih banyak suami yang tetap memperhatikan kepentingan dan kebutuhan keluarga, terutama dalam hal pendidikan anak-anaknya. Tidak dapat dipungkiri bahwa tugas suami menjadi lebih berat, baik dalam mendidik anak-anaknya, memberi kasih sayang dan pengertian, serta bertanggung jawab untuk mengurus keluarga, pada saat istri harus bekerja di luar negeri. Dalam bidang pendidikan di Desa Polorejo sudah banyak anak yang sekolah sampai jenjang SLTA. Banyak penuturan, bahwa khususnya anak perempuan setelah tamat SLTA nanti akan mengikuti jejak ibunya bekerja di luar negeri sehingga akan mampu membantu perekonomian keluarga maupun untuk masa depan mereka sendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut : a) Terdapat dua faktor yang mendorong ibu rumah tangga atau istri di Desa Polorejo untuk menjadi TKW di luar negeri, yaitu *pertama*, keinginan dari dalam dirinya sendiri dengan tujuan merubah nasib, meningkatkan kesejahteraan keluarga dan memenuhi kebutuhan keluarga, dan *kedua*, dorongan dari luar diri, yaitu terpengaruh oleh teman, kerabat, tetangga, dan dorongan dari suami, dengan tujuan untuk membuat rumah, mencukupi perabot, kendaraan dan mencari modal usaha untuk masa depan; b) Peran dan fungsi suami dalam pemenuhan kebutuhan keluarga sangat didukung atau dibantu oleh anggota keluarga, terutama kakek-nenek, paman-bibi, adik

kandung atau adik ipar, sehingga peran ganda suami (ayah) menjadi tidak terlalu berat dan dapat menekan konflik peran sebagai kepala keluarga; dan c) Dampak kepergian ibu rumah tangga (istri) menjadi TKW di luar negeri terhadap pendidikan anak sangat besar pengaruhnya. Dalam hal ini keterlibatan suami secara aktif sangat menentukan keberhasilan pendidikan anak, baik dalam pendidikan formal (sekolah) maupun perhatian dan pemenuhan kebutuhan material dalam upaya mencapai prestasi anak secara mental dan spiritual. Sedangkan saran yang dapat diajukan adalah : a) Bagi ibu rumah tangga (istri), khususnya yang sudah mempunyai anak, dalam memutuskan menjadi TKW di luar negeri hendaknya mendapat persetujuan baik oleh suami maupun anak yang tertua, sehingga dapat menghindari ketidakharmonisan keluarga karena terdapat kesadaran akan cita-cita bersama yang menjadi harapan keluarga; b) Bagi suami (ayah), yang ditinggal oleh istrinya bekerja di luar negeri, hendaknya memenuhi kewajibannya sebagai ayah dan sekaligus sebagai ibu yang baik, dihormati oleh anak-anaknya, dan penuh dengan pengertian, kesadaran, dan keikhlasan dalam menjaga, memelihara, mengasahsayangi, dan memberi perhatian kepada anak-anaknya, sehingga pendidikan anak dapat dicapai dengan baik dan berguna bagi masa depannya; c) Bagi pemerintah dan pialang tenaga kerja, hendaknya memberikan jaminan keamanan dan perlindungan terhadap para TKW di luar negeri, mulai dari berangkat, di tempat kerja dan sampai dengan pada saat mereka pulang; dan d) Bagi masyarakat yang mempunyai keinginan menjadi TKW di luar negeri

hendaknya melalui jalan yang resmi atau formal (Depnaker atau PJTKI resmi) sehingga tidak terjadi penipuan dan akhirnya dideportasi dan tidak mendapatkan perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2002, “ *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek* “, Penerbit Rineka Cipta, Cetakan Keduabelas, Edisi Revisi V, Jakarta.
- Ainun B.J. Habibie, 1997, “*Peran Wanita dalam Menciptakan Keluarga Sakinah*”, dalam Membincang Feminisme, Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita, Penerbit Pustaka Hidayah, Bandung.
- Ibnu Ahmad Dahri, 1992, “*Peran Ganda Wanita*”, Penerbit Pustaka Al Kautsar, Jakarta.
- Ignas Bethan, 1993, “*TKW di Jawa Timur*”, Penerbit Grafikatama Jaya, Jakarta.
- Soemiarti Patmonodewo, 2000, “*Pendidikan Anak Prasekolah*”, Diterbitkan bersama Penerbitan Pembukuan Depdikbud dan PT Rineka Cipta, Jakarta.
- S.R. Parker, 1990, “*Industri dan Pendidikan*” dalam Sosiologi Industri, disadur oleh G. Kartasapoetra, SH., Cetakan II, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- , 1990, “*Industri dan Keluarga*” dalam Sosiologi Industri, disadur oleh G. Kartasapoetra, SH., Cetakan II, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Sutopo, 2002, “*Penelitian Kualitatif*”, Penerbit Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- Suwinah Alwi AS, 1997, “*Peran Wanita dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia*”, dalam Membincang Feminisme, Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita, Penerbit Pustaka Hidayah, Bandung.

PENGEMBANGAN KOMIK ELEKTRONIK SEBAGAI MEDIA PENDIDIKAN KARAKTER DI SEKOLAH AGAR MAMPU BERSAING DI DUNIA PENDIDIKAN INTERNASIONAL

Oleh :

EDI SUNJAYANTO MASYKURI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOREJO

Email : esunjayanto@gmail.com

ABSTRAK

Dalam satu dekade ini kita dipusingkan dengan sekelumit fakta tentang pelajar di Indonesia. Salah satu permasalahannya adalah krisis jati diri atau *self-character*. Hal ini dibuktikan dengan melihat tingkat kejujuran pelajar, bahkan tingkat religi pun masih kurang. Dalam persaingan global negara-negara asia, seharusnya *self-character* dipersiapkan sejalan dengan usaha sekolah unggulan untuk berkompetisi. Yang kita perlukan adalah inovasi yang harus dilakukan sekolah untuk menguatkan karakter siswa. Suatu media yang dapat memunculkan imajinasi mampu mengoptimalkan fungsi otak kanan melalui visualisasi (teks, gambar, warna). Peneliti menggunakan penggabungan komik dan media elektronik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Bagaimana pengembangan media pembelajaran berupa komik elektronik? (2) Apakah implementasi komik elektronik dalam pembelajaran karakter? (3) Apakah pengembangan komik elektronik dapat meningkatkan prestasi belajar siswa?

Penelitian ini termasuk penelitian pengembangan dan metode penelitian kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan pengetahuan-pengetahuan baru melalui '*basic research*', atau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan khusus tentang masalah-masalah yang bersifat praktis melalui '*applied research*', yang digunakan untuk meningkatkan praktik-praktik pendidikan dan untuk melihat keterlaksanaan pembelajaran, respon siswa serta hasil ketuntasan belajar siswa terhadap multimedia yang dikembangkan. Perangkat pembelajaran yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah komik elektronik

Kata Kunci: *Komik elektronik, Media Pembelajaran dan Pendidikan Karakter.*

PENDAHULUAN

Dunia pendidikan Indonesia sekarang dihadapkan pada persoalan kualitas. Banyaknya berita kasus kriminal yang dilakukan pelajar seringkali muncul di media elektronik maupun media cetak. Hal ini menunjukkan fakta bahwa kualitas sikap dan moral para siswa semakin menurun, dapat kita lihat dari banyaknya fenomena perkelahian antar pelajar, penggunaan obat-obatan terlarang, kurangnya sopan santun, dan lain-lain. Hal tersebut selaras dengan pendapat Mulyasa (2006: 19) yang menyatakan bahwa pendidikan nasional dewasa ini sedang dihadapkan pada berbagai krisis yang perlu mendapat penanganan

secepatnya, diantaranya berkaitan dengan masalah moral peserta didik. Menyikapi hal tersebut diperlukan penanganan yang serius terhadap peserta didik yang merupakan penerus bangsa.

Para orang tua menghendaki adanya sikap dan perilaku anak-anak yang lebih berkarakter, menjunjung tinggi kejujuran, memiliki integritas yang merupakan cerminan budaya bangsa, berperilaku sopan dan ramah tamah dalam pergaulan keseharian. Selain itu diharapkan pula generasi muda tetap memiliki sikap mental dan semangat juang yang menjunjung tinggi etika, moral, dan melaksanakan ajaran agama. Pemerintah dewasa ini mengembangkan kurikulum

pendidikan yang mengedepankan perlunya membangun karakter bangsa dan juga membimbing siswa agar bersikap positif terhadap segala hal untuk kebaikan masa depan mereka sendiri. Upaya tersebut dilakukan dengan cara mensosialisasikan kurikulum berkarakter kepada seluruh warga sekolah, bahkan kepada masyarakat, dan orang tua siswa. Sosialisasi ini bertujuan agar semua warga sekolah mengenal dan memahami visi dan misi sekolah, serta kurikulum berkarakter yang dikembangkan dan dilaksanakan. Melihat kenyataan di atas, dapat diambil simpulan bahwa pelajar di Indonesia kurang percaya diri, tingkat kejujurannya masih rendah, bahkan tingkat religi pun masih kurang. Usaha sekolah selama tiga tahun mendidik peserta didiknya agar menjadi pribadi yang berkarakter menjadi sia-sia dikarenakan melakukan kecurangan pada saat Ujian Nasional. Oleh karena itu diperlukan suatu inovasi yang harus dilakukan sekolah untuk menguatkan karakter siswa. Sosialisasi pendidikan karakter yang berupa himbauan saja, akan mudah terlupakan oleh siswa agar sosialisasi tertanam dalam benak siswa dalam waktu yang lama. Oleh karena itu diperlukan suatu media yang dapat memunculkan imajinasi pada siswa. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan fungsi otak kanan baik melalui visualisasi (teks, gambar dan warna). Hal tersebut sesuai dengan teorinya Bobby Deporter (2002: 14) yang mengatakan bahwa untuk memicu memori jangka panjang dapat dilakukan dengan cara penggunaan warna, rima dan lagu, gambar, dan animasi. Salah satu media yang menggunakan teks, gambar, dan warna adalah

komik. Media komik adalah bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan memerankan suatu cerita dalam urutan yang erat dihubungkan dengan gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan kepada para pembaca. Karakter yang dipakai adalah wayang yang sudah dimodifikasi sehingga sesuai dengan perubahan jaman. Penggunaan wayang juga dimaksudkan agar pembaca dapat menggali sisi budaya dan nilai moral. Penggunaan kata 'fantasi' bermakna futuristik, fiktif dan imajinatif. Keunikannya yaitu sebagai media pendidikan dan hiburan dapat memberikan pengaruh terhadap perolehan pengetahuan sebagai hasil belajar, karena mampu menarik minat dan perhatian dalam menyampaikan informasi. Oleh karena itu peneliti menggunakan media elektronik, dalam hal ini komputer sebagai media perantara sehingga komik dalam penelitian dinamakan komik elektronik. Komik elektronik berisi tentang cerita terkait dengan kejadian-kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian disisipkan nilai-nilai karakter. Tokoh-tokoh dalam cerita diambil dari nama-nama wayang Jawa yang ada dalam kehidupan sehari-hari seperti Petruk, Bagong, Bima, Prabu duryudana, dan Naruda. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Tampilan desain menggunakan teks, gambar, pewarnaan dan efek gambar. Dengan demikian diharapkan siswa akan tertarik dengan media tersebut dan penanaman karakter yang di ada di dalam cerita akan tertanam mendalam di benak siswa.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian pengembangan dan metode penelitian kuantitatif. Menurut Borg and Gall dalam

Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan, yang dimaksud dengan model penelitian dan pengembangan adalah “*a process used develop and validate educational product*”. Kadang-kadang penelitian ini juga disebut ‘*research based development*’, yang muncul sebagai strategi dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain untuk mengembangkan dan memvalidasi hasil-hasil pendidikan, *Research and Development* juga bertujuan untuk menemukan pengetahuan-pengetahuan baru melalui ‘*basic research*’, atau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan khusus tentang masalah-masalah yang bersifat praktis melalui ‘*applied research*’, yang digunakan untuk meningkatkan praktik-praktik pendidikan. Penelitian pengembangan ini digunakan untuk mengembangkan komik elektronik pembelajaran Bahasa Inggris berbasis pendekatan kontekstual. Sedangkan metode penelitian kuantitatif untuk melihat keterlaksanaan pembelajaran, respon siswa serta hasil ketuntasan belajar siswa terhadap komik elektronik yang dikembangkan. Perangkat pembelajaran yang akan dikembangkan dalam penelitian ini adalah komik elektronik pembelajaran. Dalam metode penelitian kuantitatif digunakan penelitian eksperimental semu. Penelitian eksperimental ini bertujuan untuk melihat keefektifan pembelajaran pada siswa yang menggunakan komik elektronik hasil pengembangan dengan siswa yang tidak menggunakan komik elektronik.

Subjek dan objek penelitian

1. Lokasi Penelitian : SMP IT ULUL ALBAB Kab. Purworejo

2. Subjek Penelitian : Subjek penelitian adalah siswa kelas IV
3. Objek Penelitian: Objek penelitian adalah untuk melihat keefektifan hasil pengembangan komik elektronik

Prosedur Pengembangan

Prosedur pengembangan dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah yang telah dibuat dalam model pengembangan Borg and Gall yang kemudian dikelompokkan ke dalam tiga tahapan pengembangan. Ketiga tahapan pengembangan meliputi:

- a. Studi pendahuluan, meliputi:

- 1) Studi pustaka

Mengkaji teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kegiatan studi pustaka meliputi mengumpulkan berbagai informasi mengenai kenakalan remajasecara umum.

- 2) Studi lapangan

Melakukan survei, mengkaji karakter subyek penelitian, dan melihat kemungkinan-kemungkinan jika media komik elektronik diterapkan. Peneliti melakukan survei dan wawancara ke beberapa siswa SMP untuk memperoleh informasi kenakalan apa saja yang muncul di dunia remaja.

- b. Pengembangan, meliputi:

- 1) Analisis tujuan

Merumuskan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian pengembangan yang akan dilakukan.

- 2) Analisis kemampuan

Memperkirakan dana, tenaga, dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian pengembangan.

3) Prosedur pengembangan

a) Membuat desain produk yang akan dikembangkan.

Kegiatan yang dilakukan peneliti dalam membuat desain produk adalah dengan membuat skenario cerita, menentukan tokoh karakter, dan menggambar komik.

b) Menentukan sarana dan prasarana penelitian yang akan digunakan.

Kegiatan yang dilakukan peneliti dalam tahapan ini adalah memastikan kondisi prasarana di kelas memenuhi kelayakan untuk pembelajaran dengan komik elektronik.

c) Menentukan tahap-tahap pelaksanaan uji desain di lapangan.

Kegiatan yang dilakukan peneliti adalah melakukan musyawarah dengan sekolah untuk membuat jadwal pelaksanaan uji coba produk.

d) Validasi ahli

Melakukan validasi dengan melibatkan ahli media dan ahli materi, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah komik elektronik sudah layak untuk di uji cobakan.

c. Uji lapangan, meliputi:

1) Uji coba awal

Uji coba awal dalam penelitian ini akan melibatkan 6 siswa yang dipilih secara acak yang terdiri dari 2 siswa SMP kelas VII, 2 siswa kelas VIII, dan 2 siswa IX. Setelah dilakukan uji lapangan

terbatas dilakukan revisi yang dimaksudkan agar komik elektronik yang dikembangkan layak untuk di uji kembali pada uji lapangan yang lebih luas.

2) Uji coba lapangan utama

Uji lapangan dalam penelitian ini akan melibatkan 9 siswa yang dipilih secara acak yang terdiri dari 3 siswa SMP kelas VII, 3 siswa VIII, dan 3 siswa kelas IX (siswa yang dipilih berbeda dengan siswa pada pengujian awal). Dalam hal ini juga dilakukan uji terhadap efektifitas produk yang dikembangkan. Setelah dilakukan uji lapangan yang lebih luas, dilakukan revisi hasil uji lapangan yang lebih luas lagi untuk mengurangi kekurangan dari produk dan produk komik elektronik tersebut layak untuk diuji kembali pada uji operasional yang lebih luas.

3) Uji coba lapangan operasional

Uji lapangan operasional dalam penelitian ini akan melibatkan 15 siswa yang dipilih secara acak yang terdiri dari 5 siswa kelas VII, 5 siswa 5 kelas VIII, dan 5 kelas IX (siswa yang berbeda dengan siswa pada uji produk sebelumnya). Uji operasional diharapkan dapat menghasilkan model desain yang siap diterapkan, baik dilihat dari substansi maupun metodologi. Setelah kelompok besar, revisi dilakukan kembali untuk mengurangi tingkat kekurangan dari produk komik elektronik yang dikembangkan sehingga produk tersebut layak digunakan sebagai media pengembangan karakter siswa.

ANALISIS DATA DAN HASIL DISKUSI

Peneliti menggunakan beberapa tahapan sebelum proses analisis data benar-benar sempurna, tahapan itu adalah tahapan observasi, analisis kebutuhan siswa, analisis konsep, analisis tugas. Wawancara dilakukan pada minggu ke tiga bulan April 2015 dengan sekolah yang siswanya sesuai panduan observasi dan wawancara. Dari hasil observasi, ada hal yang menarik, yaitu 60% siswa SMP menyukai komik dan 20% yang menyukai dunia pewayangan, sisanya menyukai baik komik dan dunia pewayangan. Dalam penelitian ini ditawarkan pemahaman dunia wayang dengan media komik berbasis multimedia sebagai bentuk pembelajaran alternatif yang diharapkan akan memberikan kontribusi besar dalam pembelajaran budaya Jawa dengan tujuan penanaman nilai karakter bangsa. Dan hasilnya lebih dari 70% setuju dengan pembelajaran menggunakan penggabungan komik dan media elektronik. Siswa membutuhkan alat dan alat yang paling populer digunakan siswa adalah tablet. Kami juga menemukan permasalahan terkait kesiapan sekolah dalam prasarana. Maka dalam analisis ini 30 % siswa lebih memilih menggunakan pembelajaran klasikal dengan alasan kesiapan prasarana siswa.

HASIL SIMPULAN DAN SARAN

Pengembangan komik melalui media elektronik baik visualisasi teks, gambar dan warna, terbukti mengurangi aktivitas yang tidak perlu dilakukan siswa. pengembangan komikelektronik merupakan salah satu cara untuk pengoptimalkan diri siswa. media elektronik merupakan hasil karya untuk

pengembangan pembelajaran berupa komik atau sejenisnya. Dengan pengembangan komik elektronik dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Siswayang enjoy dalam belajar secara otomatis menaikan minat belajar siswa. Tidak kalah penting peran pendidik terus menerus yang membutuhkan inovasi untuk andil menguatkan karakter siswa. Bagi pemangku kepentingan, hal ini bisa menjadi perhatian, khususnya dalam peningkatan sarana dan prasarana yang lebih maju agar dapat bersaing di kancah pendidikan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmani, Jamal Ma'aur. 2011. *Buku Pedoman Internalisasi Pendidikan Karakter di Sekolah*. Yogyakarta: diva press.
- Bahri, Syaiful Djamarah dan Aswan Zain. 2006. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta Rineka Cipta.
- Bobbi, Deporter dan Mike, Hernacki. 2002. *Quantum Learning Membiasakan Belajar Nyaman dan Menyenangkan*. Bandung : Kaifa.
- Borg, Walter R & Gall. 1983. *Educational Research An Introduction (4ed)*. New York&London: Longman.
- Faisal, Amir dan Zulfanah. 2011. *Mengembangkan Gairah Anak untuk Berpres-tasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Maharsi, Indiria. 2010. *Komik Dunia Kreatif Tanpa Batas*. Yogyakarta: Kata Buku.
- Mulyasa. 2006. *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Maslich, Mansur. 2011. *Pendidikan Karakter menjawab tantangan Krisis Multidimensional*. Jakarta
- Sadiman. 2003. *Media Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafinfo Persada
- Sudjana, Nana dan Ahmad Rivai. 2002. *Media Pengajaran*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

- Rohman, Muhammad. 2012. *Kurikulum Berkarakter*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Tim. 2010. *Pendidikan Karakter di SMP*. Jakarta: Kementrian Pendidikan Nasional.
- Tim. 2003. *Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya*. Yogyakarta: Media Wacana.

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS *HOME INDUSTRY* KRUPUK DENGAN MENGGUNAKAN MESIN PRODUKSI TEPUNG TAPIOKA

Oleh :

SUDARNO¹⁾

FADELAN²⁾

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

Email : darnotec_umpo@yahoo.co.id¹⁾

ABSTRAK

Tujuan utama kegiatan pengabdian ini adalah membuat mesin untuk memproduksi sendiri tepung tapioka secara efektif. Hal ini agar produsen krupuk dapat memenuhi kebutuhan bahan baku tepung tapioka secara mandiri sehingga tidak tergantung pada produk industri yang harganya relatif mahal. Melalui upaya ini produsen krupuk akan memperoleh keuntungan yang semakin meningkat, karena selain mendapat keuntungan dari memproduksi sendiri tepung tapioka, mereka juga dapat meningkatkan kapasitas produksinya dan melakukan diversifikasi produk, sesuai dengan peluang pasar yang masih sangat luas. Target kegiatan pengabdian ini adalah terwujudnya mesin produksi tepung tapioka yang efektif (pemarut, pemeras dan penyaring), terpenuhinya bahan baku berupa tepung tapioka secara mandiri, peningkatan kapasitas produksi, upaya diversifikasi produk, dan terwujudnya sebuah usaha sehat (melalui pendidikan manajemen, kontrol kualitas, dan terbukanya akses permodalan). Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah pendidikan – pelatihan (diklat), pembimbingan, dan pendampingan. Teknik pelaksanaan kegiatan dengan cara memberikan motivasi usaha, pembimbingan manajemen usaha, pelatihan ketrampilan kerja terkait dengan penggunaan alat, pendampingan produksi, dan pendampingan diversifikasi produk. Berdasarkan hasil diskusi bersama mitra, disepakati bahwa proses pemerasan dilakukan dengan menggunakan alat pres sistem ulir. Hal ini mengingat sifat ampas parutan ketela berbentuk partikel halus sehingga dengan model pengeringan *spinner* dengan lubang saringan minimal 1,2 mm, banyak ampas yang mengalir keluar bersama sari pati. Berdasarkan evaluasi, bahwa mesin produksi tepung tapioka yang dihasilkan bekerja dengan baik, yang ditandai dengan adanya stabilitas kerja mesin dan kualitas produk yang dihasilkan.

Kata Kunci: *mesin produksi tepung tapioka, produktivitas home industry krupuk*

PENDAHULUAN

Tumbuhnya industri-industri strategis dalam masyarakat khususnya yang berskala kecil dan menengah perlu terus didukung guna membangkitkan perekonomian masyarakat. Salah satu industri rumah tangga yang perlu mendapatkan dukungan adalah industri krupuk. Krupuk merupakan salah satu produk tradisional yang cukup masyarakat di wilayah kabupaten Ponorogo dan sekitarnya. Produk ini sangat mudah di jumpai di pasar-pasar tradisional, warung-warung, dan toko-toko tradisional. Mengingat harganya yang relatif murah maka

krupuk sebagian besar biasa dikonsumsi masyarakat kelas menengah kebawah. Begitu memasyarakatnya sehingga krupuk selalu tersedia dimeja makan baik di rumah-rumah maupun di warung-warung makan, yang berfungsi sebagai pelengkap menu makan. Bagi masyarakat Ponorogo meskipun krupuk hanya berfungsi sebagai menu pelengkap namun seolah-olah krupuk merupakan menu wajib yang harus ada diatas meja makan, karena apapun menunya belum lengkap kalau belum ada krupuknya. Bahkan krupuk bisa menjadi menu utama khususnya untuk makanan khas Ponorogo yang cukup

terkenal yaitu Pecel Ponorogo. Usaha ini mempunyai prospek yang cukup baik di Ponorogo, mengingat permintaan pasar dari waktu ke waktu semakin meningkat dan kadang produsen kesulitan untuk memenuhinya. Masalah yang selama ini dihadapi oleh produsen adalah bahan baku, yaitu berupa perubahan harga bahan baku yang tidak menentu, bahkan cenderung terus mengalami kenaikan. Sedangkan harga jual sulit untuk dinaikkan mengikuti kenaikan harga bahan baku, sehingga meskipun permintaan meningkat namun tidak otomatis linier dengan pendapatan. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu upaya agar bisa mendapatkan bahan baku dengan harga yang relatif murah. Upaya dimaksud adalah memproduksi sendiri bahan baku berdasarkan pertimbangan potensi yang ada di wilayah Kabupaten Ponorogo.

Wilayah Kabupaten Ponorogo dengan tofografi hampir 40 % daerah dataran tinggi maka mempunyai potensi yang cukup besar dalam menghasilkan ketela pohon. Berdasarkan data statistik Kabupaten Ponorogo tahun 2012 bahwa Kabupaten Ponorogo yang terdiri dari 21 kecamatan, ternyata semua wilayah berpotensi memproduksi ketela pohon. Rata-rata luas area produksi ketela pohon sebesar 26,362 hektar dengan total produksi rata-rata sebesar 3.640.362 kwintal pertahun. Luas area produksi ketela tersebut hampir 50 % dari luas area produksi padi, yaitu sebesar 64,241%. Dengan nilai produksi tersebut maka jika semua produksi ketela pohon di Ponorogo di produksi menjadi tepung tapioka, akan mampu dihasilkan tepung tapioka sebanyak 1.092.108 kwintal. Dengan

demikian jika ditinjau dari segi ketersediaan bahan baku dapat dikategorikan cukup melimpah.

Bahan baku utama krupuk produksi mitra, terdiri dari tepung tapioka dan tepung terigu, dengan komposisi 65% tepung tapioka, 35%tepung terigu. Harga tepung tapioca saat ini berkisar Rp. 7000/kg, sedangkan tepung terigu berkisar Rp. 6000/kg. Harga ketela pohon sebagai bahan baku tepung tapioca di Ponorogo saat ini berkisar Rp. 1400/kg. Perhitungan secara ekonomi jika memproduksi sendiri tepung tapioka dengan asumsi harga sebagaimana tersebut diatas, maka untuk 1 kwintal ketela pohon yang akan menghasilkan 30 kg tepung tapioka, dapat dihitung bahwa keuntungan yang diperoleh oleh produsen perkwintal ketela pohon sebesar Rp. 70.000. Keuntungan tersebut jika dihitung per kg tepung tapioka sebesar Rp. 2.330/kg atau terjadi penghematan sebesar 33,3%. Dengan demikian jika bahan baku tepung tapioka diproduksi sendiri maka keuntungan produsen akan semakin meningkat dan dipastikan akan berdampak pada semakin menguatnya usaha mereka.

Mengingat keberadaan bahan baku tepung tapioka yang melimpah di Kabupaten Ponorogo, mereka mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memproduksi sendiri. Hal ini mereka lakukan agar usaha mereka tidak banyak terpengaruh oleh fluktuasi harga bahan baku yang tidak menentu, sehingga usaha mereka terus berkembang dan semakin menguntungkan secara ekonomi.

Berdasarkan uraian tersebut maka solusi yang ditawarkan adalah membuat

mesin produksi tepung tapioka yang dapat digunakan untuk memproduksi sendiri secara efektif. Melalui program pengabdian ini diharapkan dapat diwujudkan : 1) alat berupa mesin produksi tepung tapioka yang tepat, terdiri dari mesin pamarut dan pemeras sekaligus penyaring. Dengan model tersebut mesin akan lebih efektif, baik dalam upaya pemenuhan kuantitas maupun kualitas produksi tepung tapioka yang dihasilkan; 2) terpenuhinya bahan baku berupa tepung tapioka secara mandiri, sehingga produsen tidak tergantung pada pasar; 3) diperolehnya keuntungan yang semakin meningkat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mereka. Hal ini karena selain produsen mendapat keuntungan dari memproduksi sendiri tepung tapioka, mereka juga tidak perlu membeli tepung tapioka pabrikan dengan harga yang mahal; 4) peningkatan kapasitas produksi, mengingat peluang pasar masih sangat luas. Dengan bahan baku memproduksi sendiri maka mereka punya peluang yang sangat besar untuk meningkatkan produksinya.

Meningkatnya produktivitas *home industry* krupuk Sari Rasa dan Senyum Rasa di Desa Tanjungsari Jenangan Ponorogo akan mampu membangkitkan industri-industri sejenis seperti industri stik, industri roti dan industri-industri lain seperti industri pengemasan, pengawetan dan pemasaran. Hal ini akan memberikan dampak positif berupa perluasan lapangan kerja dan juga menumbuhkan jiwa wirausaha baru yang mandiri. Jika usaha-usaha ini diikuti dengan pendidikan manajemen dan kontrol kualitas yang baik, maka sangat dimungkinkan usaha ini akan

tumbuh dan berkembang menjadi usaha besar.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Kerangka Pemecahan Masalah

Setelah menganalisa situasi usaha dan memperhatikan permasalahan yang dihadapi maka pemecahannya dapat diusahakan sebagai berikut: 1) Melakukan diskusi dengan mitra untuk menentukan prioritas utama kegiatan dan teknis pelaksanaan kegiatan. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar dengan hasil sesuai dengan harapan mitra. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi mitra maka prioritas utama kegiatan adalah pembuatan mesin produksi tepung tapioka yang efektif. Terkait dengan hal tersebut maka perlu disepakati bersama khususnya menyangkut kapasitas produksi yang diharapkan; 2) Melakukan perencanaan dan analisis kebutuhan alat untuk membuat mesin produksi tepung tapioka; 3) Penyediaan bahan dan proses *manufactur*. 4) Melakukan uji coba mesin dan penyempurnaan; 5) Pengujian langsung pada *home industry* dan penyerahan alat; 6) Pendampingan penggunaan alat; 7) Pendampingan diversifikasi produk; 8) Pembimbingan manajemen usaha; 9) Evaluasi.

Pelaksanaan Kegiatan

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah dengan cara tatap muka, yaitu mendatangi atau anjangsana kepada mitra. Teknik pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan memberi penjelasan dan pengarahan terkait dengan motivasi usaha, manajemen usaha, teknologi dan ketrampilan

kerja terkait dengan penggunaan mesin. Dengan demikian secara garis besar metode yang digunakan adalah metode tanya-jawab, diskusi, demonstrasi, latihan praktek dan pendampingan pemakaian mesin produksi tepung tapioka.

Tanya-jawab dan diskusi dilakukan oleh anggota tim pelaksana dengan mitra, dengan materi sebagai berikut: a) Memberikan motivasi usaha, motivasi penting dilakukan agar mereka selalu bersemangat dalam mengelola dan mengembangkan usaha mereka. Pemberian motivasi usaha diarahkan pada wawasan bahwa masih terbukanya peluang usaha sekaligus kemungkinan pengembangannya; b) Manajemen usaha, manajemen usaha merupakan upaya tindak lanjut setelah diberikan motivasi usaha. Manajemen usaha mutlak diperlukan untuk setiap pengusaha baik pengusaha kecil, menengah maupun besar dalam rangka terus mengembangkan usaha mereka. Manajemen usaha yang diberikan adalah manajemen usaha sederhana, hal ini disesuaikan dengan usaha mereka yang berskala rumahan. Fokus pembinaan dititik beratkan pada pentingnya menjaga kualitas produk, pembukuan, tertib administrasi dan upaya perluasan pasar; c) Peran teknologi, peranan teknologi sangat besar dalam upaya mengembangkan usaha mereka, baik pada saat produksi maupun proses pemasaran. Pada saat produksi peran teknologi sangat dominan terutama terkait dengan upaya pemenuhan kapasitas produksi maupun kualitas produksi, dimana kedua hal tersebut akan memberikan dampak nyata secara ekonomi. Terpenuhinya kapasitas produksi dan kualitas produksi

berarti menjamin peningkatan omset penjualan. Pada satu sisi omset penjualan meningkat dan pada sisi lain dengan bantuan mesin akan meningkatkan efisiensi tenaga kerja. Dengan demikian kehadiran teknologi akan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.

Metode demonstrasi, latihan praktek dan pendampingan pemakaian mesin produksi tepung tapioka, dilakukan dengan tahapan; 1) Demonstrasi operasional mesin, metode ini dimaksudkan agar mereka betul-betul memahami bagaimana teknik operasional mesin sekaligus teknik perawatannya. Hal ini penting dilakukan agar mereka dengan segera secara mandiri mampu menggunakan mesin untuk kepentingan pemenuhan bahan baku berupa tepung tapioka; 2) Latihan praktek, latihan praktek dilakukan setelah mereka dianggap mampu dan menguasai operasional mesin. Pada tahap ini mereka dilepaskan untuk mengoperasikan mesin sedangkan peran dari tim hanya mengamati dan memberikan masukan jika terjadi kesalahan; 3) Pendampingan pemakaian mesin, pendampingan dilakukan oleh tim pada saat mereka mulai menggunakan mesin produksi tepung tapioka untuk kepentingan produksinya. Proses pendampingan dilakukan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung penggunaan mesin dalam proses produksi mereka.

Dalam pendampingan tersebut dilakukan pengamatan, meliputi ketrampilan dalam penggunaan mesin, kemampuan kerja mesin dan evaluasi terhadap hasil produksi mereka.

Rancangan Evaluasi

Program pengabdian ini dilaksanakan mengacu pada tujuan yang ditetapkan dan untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan maka perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi telah dilakukan secara kontinyu, yaitu sekali dalam satu minggu. Kegiatan evaluasi dilakukan dalam dua tahapan, yaitu tahapan proses dan tahapan hasil. Tahapan proses meliputi *performance* alat dan ketrampilan *home industry* menggunakan alat, sedangkan tahapan hasil meliputi kemampuan mitra dalam mengoperasikan dan memanfaatkan mesin produksi tepung tapioka dalam usahanya, kapasitas hasil produksi, dan kualitas produk yang dihasilkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Proses pembuatan krupuk *home industry* mitra

Proses pembuatan krupuk oleh *home industry* mitra, dilakukan dengan alur sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan bahan baku, untuk 10 kg adonan dengan perbandingan tepung tapioca 6.5 kg, tepung terigu 3.5 kg, air 3.5-5 liter, udang kering secukupnya, bawang putih 200-300 gram, trasi secukupnya, dan STTP (obat pengenyal adonan) sebagai pengganti blem, karena blem tidak dianjurkan digunakan pada makanan;
- 2) Pencampuran adonan; a) menumbuk dan menghaluskan bumbu-bumbu, terdiri dari udang kering, bawang putih, trasi, dan STTP); b) Bumbu yang telah dihaluskan dimasukkan ke dalam bak plastik atau ember yang

telah diisi 65% tepung tapioka dan 35% tepung terigu serta air secukupnya; c) Setelah semua bahan baku dimasukkan maka dilanjutkan dengan proses pengadukan hingga diperoleh campuran adonan yang homogen. Untuk proses pengadukan tersebut digunakan mesin pengaduk; d) Proses pengadukan adonan dilakukan secara terus menerus sampai diperoleh adonan yang homogen;



- 3) Proses pencetakan, adonan yang sudah bercampur secara homogen dimasukkan ke dalam kantung plastik berbentuk silinder dengan diameter 3-5 mm dan panjang 25-30 cm;



- 4) Proses perebusan, adonan yang sudah di cetak dimasukkan ke dalam tungku perebusan dan dipanaskan sampai masak, waktu perebusan 1-2 jam tergantung diameter krupuk. Untuk ukuran/ diameter kecil memerlukan waktu perebusan sekitar

1 jam sedangkan untuk ukuran/
diameter besar sekitar 2 jam;



- 5) Proses pendinginan, setelah masak, kemudian ditiriskan dan dilanjutkan dengan proses pendinginan atau dibiarkan selama 24 jam. Tujuan proses pendinginan adalah agar adonan yang telah masak tadi dapat mengembang secara optimal didalam cetakan plastik wadahnya. Setelah didiamkan selama 24 jam adonan menjadi padat dan kenyal sehingga siap untuk dilakukan proses perajangan;



- 6) Proses perajangan, setelah dingin, padat, dan kenyal maka proses berikutnya adalah perajangan atau pemotongan. Adonan yang sudah masak berbentuk silinder tersebut selanjutnya diiris tipis-tipis dengan tebal 2-3 mm. Agar diperoleh potongan yang seragam dan waktu pemotongan yang cepat maka untuk proses tersebut di gunakan mesin perajang atau pemotong;



- 7) Proses pengeringan: a) Proses pengeringan masih dilakukan secara manual, yaitu di bawah sinar matahari langsung; b) Proses pengeringan memerlukan waktu kurang lebih selama 2-3 hari jika cuaca cerah, namun jika cuaca mendung atau musim hujan bisa mencapai 3 sampai 4 hari; c) Agar pengeringan merata maka perlu dilakukan proses pembalikan;



- 8) Proses pengemasan: a) Krupuk mentah yang sudah kering selanjutnya dilakukan pengemasan; b) Kemasan dari kantong plastik transparan dengan ukuran bervariasi mulai dari 0.2 kg sampai 5 kg; c) Untuk proses pengemasan menggunakan alat pres plastik elektrik;



b. Jenis Produk

Jenis produk yang dihasilkan oleh kedua mitra adalah sama, yaitu krupuk dengan bentuk silinder dengan campuran dan rasa yang sama. Varian rasa ada dua macam yaitu rasa bawang dan rasa udang. Jenis produk masing-masing mitra sebagai berikut:

- Krupuk Sari Rasa, kemasan dari 0.25-5 kg dengan harga sekitar Rp. 9000,-/kg untuk rasa bawang dan Rp. 10.000,-/kg untuk rasa udang.
- Krupuk Senyum Rasa, kemasan dari 0.2-5 kg dengan harga sekitar Rp. 9000,-/kg untuk rasa bawang dan Rp. 10.000,-/kg untuk rasa udang.

c. Pemasaran

Krupuk mentah yang sudah dikemas dalam kantung plastik tersebut siap untuk dipasarkan, proses pemasaran dengan dua cara yaitu diambil kerumah atau diantar ke distributor atau agen. Kedua mitra sudah memiliki pelanggan tetap sehingga berapapun jumlah produk yang dihasilkan selalu habis terjual. Pasar dari masing-masing mitra sebagai berikut:

- Krupuk Sari Rasa, produk habis di pasarkan di dua tempat, yaitu pasar Ponorogo dan pasar Madiun.
- Krupuk Senyum Rasa, produk habis dipasarkan di dua toko yang ada di Ponorogo, yaitu toko Ratna dan toko Hasan. Namun produk pernah juga

diekspor pada beberapa negara, diantaranya Taiwan (lebih dari 1 ton), Australia, dan Saudi Arabia.

d. Desain dan pembuatan mesin

Hasil kajian bersama mitra, digunakan untuk menentukan desain dan rancang bangun mesin sehingga benar-benar mampu menjadi solusi untuk memproduksi sendiri tepung tapioka sebagai bahan baku krupuk. Pembuatan model merupakan upaya tindak lanjut setelah didapatkan desain dari mesin pamarut, pemeras, dan penyaring yang tepat. Pembuatan model dilakukan di laboratorium Proses Produksi Program Studi Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Model mesin produksi tepung tapioka yang dihasilkan, terdiri dari mesin pamarut dan pemeras sekaligus penyaring. Proses pamarutan dengan sistem rol yang digerakkan oleh motor bensin dengan daya 5.5 HP, sedangkan proses pemerasan dan penyaringan dengan sistem pres ulir yang digerakkan secara manual. Mesin pamarut dengan spesifikasi: 1) daya motor 5,5 hp; 2) putaran mesin 1400 rpm; 3) diameter *pully* 1 (motor) 65 mm; 4) diameter *pully* 2; 5) 200 mm; 5) kapasitas mesin 100 kg/jam parutan singkong; 6) dimensi mesin pamarut tinggi 1000 mm, lebar 500 mm, panjang 500 mm. Alat pemeras berbentuk persegi dan silinder, dengan dimensi tinggi 750 mm dan lebar 500 mm.

e. Pengujian mesin

Pengujian mesin menggunakan bahan ketela pohon yang masih segar sesuai ketentuan pembuatan tepung

tapioka. Pengujian dilakukan dalam satu tahapan proses, yaitu selama total waktu kurang lebih 30 menit. Fokus pengamatan adalah kerja mesin pada setiap komponen dan hasil produksi tepung tapioka. Proses pengujian mesin dilakukan dengan urutan:

1. Mengontrol bahwa semua komponen mesin terpasang dengan baik;
2. Menghidupkan motor penggerak, mengatur putaran *roll* pamarut dan putaran tabung pemeras sentrifugal sesuai yang diinginkan;
3. Singkong yang sudah dikupas dan dicuci dimasukkan kedalam tempat penampungan pada mesin pamarut secara kontinyu. Mesin pamarut berbentuk silinder bergigi yang berputar;
4. Untuk membantu proses pamarutan, perlu ditambahkan air agar hasil parutan tidak menempel pada silinder pamarut;
5. Ketela hasil parutan langsung masuk pada mesin pemeras, dan proses pemerasan dapat dilakukan sesuai dengan yang diinginkan. Untuk mempermudah pengaturan pemerasan maka pada mesin pemeras dilengkapi dengan saklar tersendiri;
6. Larutan sari pati ketela hasil perasan dialirkan pada alat penyaring pada mesin tersebut dan selanjutnya sari pati hasil saringan ditampung dalam bak penampung;
7. Melakukan proses pengendapan untuk mendapatkan sari pati (tepung tapioka), setelah tepung tapioka mengendap airnya dipisahkan.

Selanjutnya melakukan pengamatan hasil produksi tepung tapioka;

8. Dengan cara yang sama, proses pengujian mesin diulang beberapa kali untuk memastikan mesin berfungsi dengan baik;

Berdasarkan hasil uji coba mesin pamarut dan alat pemeras, menunjukkan hasil yang sangat baik. Setiap komponen mesin bekerja dengan baik, yang ditandai dengan adanya stabilitas gerak mesin. Sedangkan untuk pengujian kualitas produksi tepung tapioka juga menunjukkan hasil yang cukup baik. Keadaan ini dapat dilihat dari warna dan tingkat kebersihan produk tepung tapioka yang dihasilkan, yang menunjukkan warna yang putih bersih.

f. Penyerahan dan pelatihan penggunaan Mesin

Setelah yakin bahwa mesin produksi tepung tapioka yang dihasilkan benar- benar sudah siap maka langkah selanjutnya adalah menyerahkan mesin tersebut dan sekaligus memberikan pelatihan terhadap operasional mesin. Mesin diserahkan langsung kepada industri mitra dan kemudian diikuti dengan pelatihan operasional dan perawatan mesin. Pelatihan operasional dilakukan dalam 1 hari dengan target industri mitra mampu untuk mengoperasikan sendiri.



g. Pendampingan dan evaluasi pemakaian mesin

Setelah industri mitra memahami dan menguasai operasional mesin, langkah selanjutnya adalah melakukan pendampingan dan evaluasi secara periodik. Evaluasi difokuskan dalam tiga hal, yaitu ketrampilan pemakaian mesin, kemampuan kerja mesin dan hasil produksi tepung tapioka. Berdasarkan evaluasi terkait dengan ketiga hal tersebut diatas, diperoleh hasil sebagai berikut: 1) Evaluasi terhadap ketrampilan pemakai mesin, menunjukkan bahwa mereka sudah cukup trampil dan mampu mengoperasikan mesin produksi tepung tapioka secara mandiri; 2) Evaluasi terhadap kemampuan kerja mesin, setelah dipakai dalam 1 hari operasi, diperoleh hasil bahwa semua komponen mesin berfungsi dengan baik, yang ditandai dengan adanya stabilitas gerak mesin; 3) Evaluasi terhadap produksi tepung tapioka, juga menunjukkan hasil yang cukup baik, baik ditinjau dari segi kuantitas maupun kualitas produksi. Untuk segi kuantitas, mesin ini mampu menghasilkan 100 kg/jam parutan ketela dan 30 kg/jam sari pati. Dengan kapasitas tersebut sudah mampu memenuhi kebutuhan bahan baku tepung tapioka industri mitra. Kondisi ini akan menjamin bahwa industri mitra akan lebih mampu memenuhi permintaan kebutuhan pasar, sehingga peluang perluasan pasar menjadi

lebih besar. Sedangkan untuk segi kualitas juga menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, yang ditunjukkan dengan warna putih bersih pada produk tepung tapioka yang dihasilkan dan tidak kalah dengan produk industri. Berdasarkan evaluasi, menunjukkan adanya dampak positif terhadap penggunaan mesin maka dipastikan secara ekonomi akan lebih menguntungkan. Dengan bahan baku dapat diproduksi sendiri maka akan meningkatkan pendapatan yang berujung pada peningkatan kesejahteraan mereka.

h. Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan yang dimaksudkan adalah evaluasi secara umum terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, yang dibagi dalam dua tahapan, yaitu tahapan proses dan tahapan hasil.

Evaluasi tahapan proses; diawali dari proses desain dan rancang-bangun dari mesin produksi tepung tapioka sampai dengan proses uji laboratorium dan uji lapangan. Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat performa dari mesin produksi tepung tapioka yang dihasilkan. Berdasarkan hasil evaluasi bahwa mesin produksi tepung tapioka, baik pamarut maupun pemeras berfungsi secara optimal. Hal ini ditandai dengan adanya stabilitas kerja mesin.

Evaluasi tahap hasil diawali setelah tahapan proses, indikator keberhasilan silan pada tahapan ini dapat dilihat sejauhmana industri mitra mampu mengoperasikan dan memanfaatkan mesin produksi tepung tapioka dalam

usahnya. Berdasarkan pemantauan tim selama kegiatan berlangsung, menunjukkan adanya antusiasme dari industri mitra yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari tingkat perhatian mereka dalam mengikuti tahapan-tahapan kegiatan ini, mulai penyampaian motivasi usaha, manajemen usaha sampai kegiatan praktek lapangan. Tingkat perhatian dan keingin tahuan mereka juga terlihat dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika diskusi berlangsung.

i. Pendorong

Secara umum pelaksanaan kegiatan pengabdian ini berjalan dengan lancar. Kelancaran program ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Selama ini semua bahan baku krupuk mengandalkan produk industri yang harganya berfluktuasi dan cenderung terus meningkat. Sementara harga produksi krupuk sulit untuk ditingkatkan. Hal ini tentu akan berdampak terhadap tingkat keuntungan usaha yang cenderung terus berkurang. Dengan adanya mesin produksi tepung tapioka akan berdampak positif terhadap pengembangan usaha mereka kedepan, karena disamping dapat memproduksi sendiri kebutuhan bahan baku krupuk berupa tepung tapioka, mereka juga akan mampu memenuhi permintaan kebutuhan pasar. Dengan adanya peluang tersebut maka akan semakin menggairahkan semangat usaha mereka.
2. Semua mesin dapat diselesaikan dan diserahkan tepat waktu sesuai jadwal

yang telah direncanakan, yaitu pada bulan Juli 2015.

j. Kendala

Kendala utama dalam produksi tepung tapioka adalah pengaruh musim, karena musim panen ketela tidak sepanjang tahun dan daya tahan ketela setelah dipanen maksimal 24 jam.

KESIMPULAN

Mesin produksi tepung tapioka pamarut, pemeras dan penyaring hasil kegiatan, mampu memberikan dampak positif secara nyata terhadap usaha mitra. Mesin produksi tepung tapioka ini mampu memarut ketela sebesar 100 kg/jam dengan kapasitas produksi tepung tapioka sebesar dari 30 kg/jam. Dengan kapasitas produksi tersebut sangat membantu produsen dalam memenuhi kebutuhan tepung tapioka secara mandiri dan tidak tergantung pada pasar yang harganya cenderung lebih mahal.

SARAN

1. Perlu adanya kepedulian dari para akademisi dalam rangka mengembangkan usaha- usaha mereka, baik berupa pemikiran maupun informasi teknologi baru yang terjangkau dalam rangka diversifikasi produk.
2. Perlu adanya dukungan, baik dari instansi pemerintah maupun swasta terkait dengan dana, sarana, dan prasarana pendukung produksinya.
3. Perlu adanya pengembangan dalam bidang manajemen usaha dan pemasaran yang lebih intensif, agar lebih produktif dan mampu membuka peluang pasar yang lebih luas.

4. Perlu ditindak lanjuti dengan kegiatan magang kewirausahaan sehingga disamping akan selalu terjalin komunikasi dengan industri mitra juga akan membuka wawasan mahasiswa untuk berwira usaha.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ditlitabmas Ditjen Dikti Kementerian Ristek dan Dikti, yang telah mendanai seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Pengabdian Kepada Masyarakat mono tahun Tahun Anggaran 2015 Nomor: 028/SP2H/K7/KM/2015 tanggal 2 April 2015.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo. 2012. Ponorogo dalam Angka.
- G. Niemen. 1996. Elemen Mesin, Jilid I Desain dan Kalkulasi Sambungan Bantalan dan Poros. Erlangga : Jakarta
- GH. Martin. 1985. Kinematika dan Dinamika Teknik. Erlangga : Jakarta
- Jac. Stolk, C. Kros. 1986. Elemen Mesin, Konstruksi dan Bangunan Mesin. PT. Pradnya Paramita : Jakarta
- Joseph E. Sigly. 1991. Perencanaan Teknik Mesin. Erlangga : Jakarta
- Sularso Kiyokatsu Suga. 1980. Dasar Perencanaan dan Pemilihan Elemen Mesin. PT. Pradnya Paramita : Jakarta
- Umar Sukrisno. 1984. Bagian-Bagian Mesin dan Merencana. Erlangga : Jakarta

**AIR BERSIH
SEBAGAI SARANA PENINGKATAN KUALITAS HIDUP
MASYARAKAT DUSUN JURUGAN DESA KARANG PATIHAN PULUNG PONOROGO**

Oleh :

**NURUL SRI WAHYUNI¹⁾
ANDY TRIYANTO PUJO RAHARJO²⁾**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

Email: hauraalmash2@yahoo.com¹⁾

ABSTRAK

Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk membentuk kemitraan sehat antara komunitas akademik Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK) Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan komunitas Dusun Jurugan Karang Patihan Pulung Ponorogo dalam rangka sosialisasi dan pemanfaatan obat tradisional untuk mengatasi masalah flu tulang serta penyediaan sarana air bersih. Desain untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan membangun kemitraan sehat dengan cara melakukan Penyuluhan Kesehatan atau *Health Education* terkait masalah flu tulang, melatih kader kesehatan di masyarakat dalam pemanfaatan obat tradisional, serta pembuatan sarana air bersih berupa teknologi filterisasi. Kegiatan IbM ini diawali dengan membuat kerjasama secara formal dengan Kepala Desa Karang Patihan Pulung Ponorogo. Berdasarkan hasil koordinasi tim pelaksana dengan Kepala Desa Karang Patihan, ternyata permasalahan tersebut masih sangat diperlukan di 4 (empat) dusun, tidak hanya di Dusun Jurugan. Tiga Dusun dimaksud adalah Dusun Karang Patihan, Krajan, dan Selodono. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan kader telah dilaksanakan selama 4 (empat) kali mulai tanggal 26-29 Juni 2015. Materi utama pelatihan ini adalah Konsep Dasar Penyakit Flu Tulang yang meliputi pengertian, etiologi atau penyebab, tanda gejala, cara pencegahan dan penanganan, serta komplikasi yang mungkin muncul. Pelaksanaan kegiatan tersebut telah dilakukan bersamaan dengan kegiatan keagamaan yang ada di masyarakat yaitu di Dusun Jurugan, Selodono, Krajan, dan Karang Patihan dengan rata-rata jumlah peserta yang hadir 35 orang. Sedangkan pelatihan penggunaan dan penyerahan alat filterisasi air serta blender multi fungsi telah dilaksanakan pada tanggal 7 November 2015. Keberhasilan program pengabdian masyarakat ini dinilai berdasarkan perubahan pengetahuan, sikap tentang penyakit flu tulang dan peningkatan ketrampilan dalam pemanfaatan filterisasi air bersih dan ketrampilan dalam pembuatan obat tradisional utk flu tulang, baik pada kader kesehatan dan warga masyarakat. Hasil kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini diharapkan dapat berkelanjutan dan berkesinambungan, sehingga direkomendasikan untuk dapatnya dibuat program strategis antara komunitas akademik dengan mitra dengan melibatkan komponen yang terkait baik untuk masalah yang sama ataupun yang berbeda, yang masih berkaitan dengan masalah kesehatan

Kata Kunci : *Health education, penyakit flu tulang, komunitas akademik, filterisasi air bersih*

PENDAHULUAN

Permasalahan khusus yang sedang dihadapi masyarakat Dusun Jurugan ini adalah rentan terserang penyakit flu tulang. Hal tersebut didukung dengan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit yang ditunjang pula dengan rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya hygiene sanitasi termasuk sarana air bersih, dan dari sosial ekonomi tergolong masyarakat miskin.

Dari hasil wawancara dengan kepala desa bahwa setiap satu minggu sekali masyarakat Dusun Jurugan mendapat *supply* air PDAM dari pemerintah sebanyak tiga tangki. Strategi untuk mencegah masalah ini adalah meningkatkan pengetahuan tentang hidup bersih dan sehat, dimana tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penyakit flu tulang dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan obat herbal

untuk mencegah dan mengatasi masalah penyakit flu tulang tersebut. Program ini dapat dilakukan dengan membangun kemitraan sehat dengan Kepala Desa Karang Patihan Pulung Ponorogo, tim FIK Universitas Muhammadiyah Ponorogo dengan melibatkan mahasiswa Prodi Keperawatan. Kader kesehatan di masyarakat merupakan Tim Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat yang akan dilatih dalam pemanfaatan obat tradisional, yang dalam pelaksanaannya akan dibantu tim FIK Universitas Muhammadiyah Ponorogo selaku Tim Ahli. Selain itu Tim Ahli juga akan memberikan penyuluhan */health education* kepada masyarakat terkait penyakit flu tulang. Karakteristik mitra adalah sebagai berikut: Dusun Jurugan terletak di Desa Karang Patihan, Kecamatan Pulung. Akses menuju Dusun Jurugan tergolong sangat sulit karena selain jalannya rusak juga harus melewati hutan yang berada di sebelah barat yang berbatasan dengan Desa Candi, Mlarak. Dan sebelah timur Desa Pulung Merdiko. Jumlah warga yang berada di Dusun Jurugan kurang lebih 650 jiwa yang terdiri dari 3 RW. Setiap RW terdiri dari 3 RT, sedangkan salah satu RW terpisah oleh sungai sehingga aksesnya harus melewati jembatan. Hal ini merupakan salah satu alasan tim ahli hanya mengambil RW I dan RW II saja sebagai mitra. Mayoritas tingkat pendidikan masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan minim sekitar umur 20-80 tahun ke atas tamat SD dan SMP. Sekitar 20% SMA dan 0,8% S₁. Terlihat dari mata pencahariannya atau jenis pekerjaannya yang hanya petani, tidak ada masyarakat yang maju atau mengembangkan suatu usaha, maka kehidupannyapun tergolong miskin dan

menengah. Kondisi tingkat kesehatan ketahanan tubuh masyarakat Dukuh Jurugan sangat rentan terjangkit penyakit di karenakan konsumsi air minum dan segala kebutuhan yang menggunakan air berasal dari irigasi sawah yang bersumber dari pegunungan pudak melalui luas lahan persawahan yang *notabene* telah tercemar pupuk kandungan kimia, hal ini sesuai dengan banyak pengakuan masyarakat yang mempunyai keluhan kesehatan seperti pegel linu dan tekanan darah tinggi, yang menurut hemat kami di akibatkan air konsumsi yang mengandung logam dan kombinasi bahan kimiatersebut serta dampak buruk lain untuk keehatan tubuh, selanjutnya masyarakat masih belum memahami obat atas penyakit yang di derita dan biasanya membeli obat pada pengecer yang tidak diketahui kadar dosisnya tanpa resep dokter, selanjutnya kondisi kesehatan mata rabun jauh dan dekat yang belum mengetahui seperti apa solusinya serta cara menjaga kesehatan melalui pengobatan alternatif bekam dengan mengeluarkan darah kotor yang dapat menghilangkan berbagai macam penyakit dan merupakan pengobatan terdahulu ala Rasullaloh.

METODE DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan Mitra adalah dengan membangun kemitraan sehat yang strategis dengan 3 komponen utama adalah mitra utama terdiri atas (1) Kepala Desa Karang Patihan Pulung Ponorogo, dan (2) adalah Ketua RW I, II, III, dan IV Desa Jurugan Karang Patihan Pulung Ponorogo, serta didukung Tim Ahli dari FIK UNMUH Ponorogo. Untuk

menjalankan kemitraan ini pada tahap awal dilakukan kegiatan penyuluhan atau *health education* terkait penyakit flu tulang dan pelatihan pembuatan obat tradisional untuk mencegah dan mengatasi penyakit flu tulang, dan pelatihan pemanfaatan filterisasi sarana air bersih pada kader kesehatan. Kegiatan penyuluhan atau *health education* dan pelatihan diberikan kepada seluruh warga masyarakat RW I, II, III, dan IV Desa Karang Patihan Pulung Ponorogo, yang pelaksanaannya bersamaan dengan kegiatan keagamaan di masyarakat. Dalam pelaksanaan kegiatan, rata-rata diikuti 35 orang tiap RW.

Sedangkan tahapan Penyelesaian Masalah sebagaia berikut:

- a. Tahap I: Koordinasi Tim Pengabdian dengan Mitra I dan II serta mitra strategis/ahli, target yang diharapkan adalah kesepakatan permasalahan prioritas Mitra I dan II dan disetujuinya pembagian kerja antara Tim Pengabdian dengan Mitra I, II
- b. Tahap II: Pelaksanaan kegiatan kemitraan secara langsung, yaitu penyuluhan /*health education* tentang penyakit flu tulang kepada seluruh warga RW I, II, III, dan IV Desa Karang Patihan pada kegiatan keagamaan yang ada di masyarakat. Dilanjutkan dengan kegiatan Pelatihan kader tentang pemanfaatan alat filterisasi sarana air bersih dan pelatihan pembuatan obat tradisional untuk mencegah dan mengatasi penyakit flu tulang. Pelatihan telah dilaksanakan sebanyak 4 kali. Peserta pelatihan berasal dari Mitra I, II, III, dan IV dengan peserta rata-rata 35 orang setiap RW. Target yang di harapkan adalah peningkatan pengetahuan

masyarakat tentang penyakit flu tulang dan peningkatan kemampuan kader dalam pemanfaatan obat tradisional dan pemanfaatan alat filterisasi air bersih.

- c. Tahap III: kader melakukan penyuluhan terkait dengan masalah penyakit flu tulang, pemanfaatan obat tradisional dan pemanfaatan filterisasi sarana air bersih langsung ke masyarakat RW I, II, III, dan IV dengan bantuan mahasiswa Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Kesehatan Unmuh Ponorogo.
- d. Tahap IV : Evaluasi. Kegiatan ini akan dilakukan Tim bersama Mitra untuk mengevaluasi pelaksanaan kemitraan. Dari evaluasi ini akan diketahui tingkat keberhasilan kegiatan pengabdian. Target pertama yang diharapkan adalah diketahuinya kekurangan atau permasalahan kegiatan kemitraan. Target kedua yang diharapkan adalah dapat di ketahui kelemahan dan kekurangan kemitraan sehingga secara cepat ditentukan solusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tim pengabdian masyarakat dari UNMUH Ponorogo bersama dengan mitra menganalisis permasalahan yang sedang dihadapi, dan menentukan prioritas yang akan diselesaikan terlebih dahulu. Hasil analisa situasi dengan Mitra menghasilkan kesepakatan prioritas masalah, yaitu peringkat 1: masalah penyakit flu tulang, peringkat 2: penyediaan sarana air bersih, dan peringkat 3: pemanfaatan obat tradisional. Setelah menentukan permasalahan prioritas pada Mitra langkah selanjutnya adalah menentukan model solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Solusi

yang diputuskan bersama Mitra adalah membentuk kemitraan strategis antara komunitas masyarakat RW I, II, III, dan IV Desa Karang Patihan Pulung Ponorogo. Hal tersebut dilaksanakan berdasarkan permohonan Kepala Desa Karang Patihan Pulung Ponorogo, bahwa tidak hanya terbatas pada 2 RW, namun berkembang menjadi 4 RW. Hal tersebut juga berdampak terhadap pengadaan alat filterisasi air bersih dan blender multi fungsi yang direncanakan sebanyak 2 (dua) unit menjadi 4 (empat) unit. Tahapan Penyelesaian Masalah sebagai berikut:

- a. Tahap I: Telah dilakukan Koordinasi Tim Pengabdian dengan Mitra serta mitra strategis/ahli, target yang diharapkan adalah kesepakatan permasalahan prioritas Mitra I, II, III, dan IV dan disetujuinya pembagian kerja antara Tim Pengabdian dengan Mitra I, II, III, dan IV
- b. Tahap II: Telah dilaksanakan kegiatan kemitraan secara langsung, yaitu penyuluhan */health education* tentang penyakit flu tulang kepada seluruh warga RW I, II, III, dan IV pada kegiatan keagamaan yaitu pada tanggal 26-29 Juni 2015, di Dusun Karang Patihan, Krajan, dan Selodono. Dilanjutkan dengan kegiatan pembuatan alat filterisasi air di laboratorium produksi Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Ponorogo, dimana alat tersebut sudah termasuk dalam kategori alat madya, yaitu bukan lagi merupakan alat filterisasi air yang sederhana, tetapi sudah menggunakan bahan jenis pabrikan. Hal tersebut dikarenakan sudah menggunakan zeolit dan karbon aktif sebagai komponen dalam

alat tersebut dan dapat dilakukan pencucian ulang menggunakan *electric pump*. Alat filterisasi air terdiri dari dua tabung yang saling berhubungan. Tabung pertama urutan dari bawah berisi kerikil, pasir silika, dan karbon aktif. Sedangkan tabung kedua dari urutan dari bawah berisi kerikil, pasir silika, dan zeolit. Kedua tabung tersebut dihubungkan dengan kran katup (buka tutup) dan *electric pump* dengan arah semburan dari bawah keatas. Semburan tersebut dimaksudkan untuk mencuci bahan penyusun alat filterisasi air tanpa merusak susunannya. Pembuatan alat tersebut melibatkan anggota tim dari mahasiswa Fakultas Teknik dengan memanfaatkan laboratorium produksi fakultas teknik. Sedangkan pelatihan kader tentang pemanfaatan filterisasi sarana air bersih dan pelatihan pemanfaatan obat tradisional untuk mencegah dan mengatasi penyakit flu tulang. telah dilaksanakan banyak 4 kali. Peserta pelatihan berasal dari Mitra I, II, III, dan IV rata-rata dihadiri 35 orang setiap RW. Target yang diharapkan adalah peningkatan pengetahuan masyarakat tentang penyakit flu tulang dan peningkatan kemampuan kader dalam pembuatan obat tradisional dan pemanfaatan alat filterisasi air bersih.

- c. Tahap III: kader melakukan penyuluhan terkait dengan masalah penyakit flu tulang, pemanfaatan obat tradisional dan pembuatan filterisasi sarana air bersih langsung ke masyarakat RW I, II, III, dan IV dengan bantuan mahasiswa FIK Unmu Ponorogo. Pada tahap ini, telah dilakukan juga penyerahan alat filterisasi air lengkap

dengan *pump electric*, blender multifungsi, masing-masing sebanyak 4 (empat) unit.

- d. Tahap IV : Evaluasi. Kegiatan ini diadakan oleh Tim bersama Mitra untuk mengevaluasi pelaksanaan kemitraan. Dari evaluasi ini diketahui tingkat keberhasilan kegiatan pengabdian.

Dari keempat tahap tersebut, dapat diperoleh hasil kegiatan pengabdian sebagai berikut :

- a. Setelah dilakukan kegiatan penyuluhan/*health education* telah terjadi peningkatan pengetahuan masyarakat tentang penyakit flu tulang yang meliputi pengertian, penyebab, tanda gejala, komplikasi dan perawatan, pengetahuan masyarakat tentang pembuatan obat tradisional dan pemanfaatan alat filterisasi air bersih.
- b. Alat yang dihasilkan merupakan alat tingkat madya, karena merupakan alat dengan menggunakan bahan pabrikan. Bahan dimaksud adalah pasir silika, zeolit dan karbon aktif. Pasir silika atau yang biasa disebut pasir kwarsa merupakan bahan yang berfungsi sebagai penyaring kotoran yang berukuran kecil yang terbawa bersama air. Hal tersebut sesuai dengan kondisi air di beberapa tempat mitra yang masih kotor dan berwarna coklat susu.

Bahan kedua adalah zeolit, merupakan bahan yang berfungsi untuk menghilangkan kandungan Ca^{2+} dan Mg^{2+} . Dimana kedua senyawa tersebut dapat menurunkan kualitas air, atau dengan bahasa sederhana dinamakan air sadah. Air tersebut menjadi berbau, dan berasa seperti kapur. Bahan ketiga adalah karbon aktif, yang berfungsi untuk menghilangkan bau pada air. Selain itu

berfungsi juga sebagai penyerap kaporit atau chlorine pada air. Meskipun sebenarnya kaporit atau chlorine tersebut diperlukan tubuh untuk kesehatan tulang, namun jika dalam jumlah yang berlebihan akan berdampak terhadap kejadian keropos tulang. Hal tersebut identik dengan masalah yang dihadapi mitra yaitu relatif tingginya angka nyeri sendi, yang sering dinamakan masyarakat mitra sebagai penyakit flu tulang. Namun demikian, kegiatan pengabdian ini masih ditemukan beberapa kelemahan baik pada mitra maupun dari tim ahli. Kelemahan yang ditemukan yang berasal dari mitra adalah masalah peningkatan pengetahuan mitra tentang penyakit flu tulang, pembuatan obat tradisional dan pemanfaatan filterisasi air bersih. Hal tersebut dikarenakan pengetahuan seseorang sejalan dengan tingkat pendidikan. Sementara tingkat pendidikan mitra rata-rata Sekolah Dasar (SD). Selain itu juga dipengaruhi oleh keyakinan bahwa obat yang manjur adalah obat dari toko, bukan dari obat tradisional. Namun demikian masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan penyuluhan yang dilakukan tim ahli. Sedangkan kendala dari tim ahli terdapat pada pengadaan alat filterisasi air bersih. Kendala dimaksud adalah pada pengadaan bahan zeolit, pasir silika, dan karbon aktif harus melalui proses order di Bandung. Sedangkan pipa paralon memerlukan ukuran yang relatif besar, yaitu sebesar 8 inchi agar kapasitas filterisasi air lumayan banyak. Sedangkan pengadaan paralon tersebut juga harus melalui proses order ke wilayah Madiun. Demikian juga untuk pengadaan tutup paralon dan lem tabung yang harus melalui proses order juga

ke wilayah Surabaya. Namun demikian, alat tersebut memiliki keunggulan yaitu

- a. Fungsi penyaringan tidak berubah atau rusak karena untuk pembersihan dari endapan kotoran dapat dilakukan dengan proses pencucian, yaitu dengan menggunakan aliran balik dengan bantuan pompa air (*pump electric*)
- b. Material tabung terbuat dari paralon yang sangat kuat sehingga mempunyai umur yang relatif panjang asalkan tidak terkena sinar matahari langsung.
- c. Sambungan-sambungan sangat kuat karena menggunakan lem berkualitas tinggi
- d. Proses pembuatan sangat mudah dan sederhana sehingga memungkinkan masyarakat dapat membuat secara mandiri.
- e. Kualitas air hasil filterisasi sangat jernih, sehingga memenuhi kriteria air bersih secara fisik.

SIMPULAN DAN SARAN

Dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenal adanya masalah kesehatan, memang dipandang sangat perlu dilakukan sosialisasi kesehatan kepada masyarakat. Dengan kemampuan mengenal adanya masalah kesehatan akan membantu masyarakat dalam mengambil keputusan yang tepat jika ada masalah kesehatan dalam keluarga, mampu merawat anggota keluarga yang sakit, mampu memodifikasi lingkungan serta mampu memanfaatkan sarana kesehatan yang ada di masyarakat. Sesuai dengan analisis situasi yang telah dilakukan tim, didapatkan bahwa di Desa Karang Patihan merupakan salah satu

penghasil empon-empon yang dapat dimanfaatkan sebagai obat tradisional terutama untuk keluhan flu tulang. Dimana dalam jangka pendek dapat untuk pengobatan tradisional keluarga, sedangkan untuk jangka panjang dapat diproyeksikan Desa Karang Patihan sebagai penghasil obat tradisional. Berdasarkan hasil diskusi bersama mitra, diharapkan bahwa kegiatan IbM ini tidak hanya berhenti sampai disini, tetapi dapat menyentuh beberapa aspek kehidupan, khususnya pada masalah kesehatan. Dari kesimpulan diatas, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya kepedulian dari para akademisi (Perguruan Tinggi) dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengenal adanya masalah kesehatan, mengambil keputusan yang tepat jika ada masalah kesehatan dalam keluarga, mampu merawat anggota keluarga yang sakit, mampu memodifikasi lingkungan serta mampu memanfaatkan sarana kesehatan yang ada di masyarakat.
2. Perlu adanya dukungan, baik dari instansi pemerintah maupun swasta terkait dengan dana, sarana, dan prasarana pendukung.
3. Perlu pendampingan berkelanjutan dalam mewujudkan mitra sebagai penghasil obat tradisional sehingga dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Depkes RI (2003) Pedoman Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, edukasi (KIE) Kesehatan, Depkes RI, Jakarta.
- Gwatkin, D.R., Guillot, M., (2000) The Burden of Disease among the Global Poor Current Situation, Future Trends, and Implication for Strategy. Washington, D.C: The World Bank.

Wagstaff,A. (2002)Poverty and health sector inequalities. Bulletin of the World Health Organization, 80:97-105

**IPTEKS BAGI MASYARAKAT (IbM) PETANI LELE MAKMUR MELALUI PEMBUATAN
PROBIOTIK DI DESA SIDOHARJO, KECAMATAN
POLANHARJO, KABUPATEN KLATEN**

Oleh :

MUH.WASKITO ARDHI¹⁾

PUJIATI²⁾

MISLAN SASONO³⁾

IKIP PGRI MADIUN

Email: waskitoardhi@gmail.com¹⁾

poesky86@gmail.com²⁾

mislan_fis03@yahoo.com³⁾

ABSTRAK

Kualitas lele semakin menurun berupa penurunan bobot per satuan waktu pemeliharaan, penurunan ketahanan terhadap berbagai penyakit diantaranya cacar dan luka kulit, sungut keriting dan putus, insang merah/hitam, sirip geripis, perut buncit dan merah, hilang keseimbangan, jamur, dan bau kolam mengakibatkan produktivitas panen ikan lele tidak maksimal. Di samping itu terjadinya peningkatan bahan pakan lele (pelet) yang terus meningkat mengakibatkan biaya pakan semakin tinggi. Keadaan-keadaan tersebut tidak dibarengi dengan produktivitas yang tinggi dari hasil panen lele sehingga menyebabkan para petani lele Makmur desa Sidoharjo mengalami kerugian. Masalah-masalah diatas mendorong peneliti untuk melakukan penerapan ipteks bagi masyarakat. Tujuan dan target luaran IbM adalah; (1) mengurangi kegagalan dalam budidaya ikan lele; (2) penyuluhan dan pembuatan probiotik yang dapat mengendalikan penyakit pada budidaya ikan lele (3) menurunkan biaya produksi pakan melalui pemakaian probiotik; (4) meningkatkan hasil produksi panen ikan lele; (5) mengurangi polusi air dan bau pada limbah air kolam lele. Metode yang digunakan dalam IbM adalah menggunakan pendekatan penyuluhan dan workshop pembuatan probiotik serta aplikasi langsung pada kolam ikan lele ukuran 3 x 4 sebanyak 5 kolam milik kelompok petani lele makmur Bapak Ponadi dan Bapak Sinom anggota Kelompok Tani Lele Makmur di Desa Sidoharjo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. IbM dilaksanakan selama 6 bulan dengan rencana kegiatan dan prosedur kerja sebagai berikut; (1) pembuatan sampel produk probiotik; (2) penyuluhan cara menghadapi permasalahan-permasalahan dalam budidaya ikan lele (3) aplikasi probiotik pada kolam ikan lele sebagai percontohan. Penyuluhan pada nomor 2 belum cukup dan harus diikuti aplikasi riil ke lapangan karena warga petani tidak akan percaya tanpa ada bukti nyata yang dapat dilihat secara langsung. Rencana selanjutnya dari kegiatan penelitian ini adalah publikasi pada seminar nasional Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan di Kopertis VII Jawa Timur pada bulan September 2015.

Kata Kunci : *Probiotik, Lele, Kualitas.*

PENDAHULUAN

Desa Sidoharjo, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten diperoleh data bahwa usaha pembibitan dan pembesaran ikan lele merupakan salah satu usaha yang digeluti oleh sebagian masyarakat desa tersebut. Hal ini disebabkan karena Desa Sidoharjo dekat dengan Desa Janti yang merupakan basis penjualan ikan lele untuk konsumsi dan

pemancingan yang sangat terkenal di daerah soloraya. Di desa janti terdapat sekitar 50 rumah makan sekaligus tempat pemancingan yang menjual produk olahan lele diantaranya dalam bentuk lele goreng dan lele bakar yang setiap minggunya rata-rata menghabiskan 1,5-2 ton ikan lele. Melihat kondisi kebutuhan ikan yang sangat tinggi maka sebagian masyarakat desa Sidoharjo berusaha untuk

menyediakan akan kebutuhan ikan lele melalui budidaya ikan sehingga dapat membantu akan kebutuhan ekonomi rumah tangganya serta secara langsung ikut menopang akan kebutuhan lele khususnya di Kecamatan Polanharjo. Di samping itu letak yang strategis dan dekat dengan janti sebagai tempat pemancingan dan rumah makan harga lele juga relatif tinggi yaitu Rp. 15.000,- atau lebih per kilogramnya. Budidaya ikan lele di desa Sidoharjo selama ini menggunakan pelet ikan lele untuk mencukupi kebutuhan pakan lele tersebut. Namun, salah satu tantangan budidaya lele adalah harga pakan yang terus meningkat, ketergantungan yang tinggi terhadap pakan pabrikan, kondisi ini dipicu oleh tidak adanya pakan alternatif yang dapat menggantikan pakan pabrikan. Biaya pakan memakan sekitar 60-70% dari total biaya produksi perikanan.

Permasalahan yang ditemui adalah harga pakan selama ini cenderung tinggi dan terus-menerus naik, sehingga pembudidaya ikan harus mengencangkan ikat pinggang karena harga panen mereka yang tidak kunjung naik. Selain masalah pakan yang semakin mahal pembudidaya lele juga dihadapkan pada permasalahan lain yaitu kualitas lele semakin menurun, berupa penurunan bobot per satuan waktu pemeliharaan, penurunan ketahanan terhadap berbagai penyakit diantaranya cacar dan luka kulit, sungut keriting dan putus, insang merah/hitam, sirip geripis, perut buncit dan merah, hilang keseimbangan, jamur, dan bau kolam karena amoniak. Khusus amoniak disebabkan karena bercampurnya sisa pakan dengan kotoran ikan lele. Oleh karena itu perlu adanya inovasi

untuk menjawab masalah-masalah di atas. Permasalahan-permasalahan yang kompleks di atas sering muncul dan menjadi momok bagi petani lele untuk membudidaya ikan lele. Kerugian sering kali melanda bagi para petani lele karena hasil panen tidak sesuai dengan biaya produksi yang mengakibatkan petani lele menjadi tekor. Permasalahan-permasalahan tersebut harus segera diatasi mengingat dampak strategis dari desa sidoharjo yang dekat dengan area pemancingan janti sehingga memotivasi petani lele desa sidoharjo berperan dalam penyediaan kebutuhan ikan sehingga dapat meningkatkan perekonomian petani lele di desa tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan solusi di dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi petani lele. Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas adalah dengan penggunaan probiotik ikan lele.

Probiotik merupakan makanan tambahan (suplemen) berupa sel-sel mikroorganisme hidup yang memiliki pengaruh menguntungkan bagi hewan inang yang mengkonsumsinya melalui penyeimbangan flora mikroorganisme intestinal dalam saluran pencernaan (Irianto, 2007).

Menurut Irianto (2003), pemberian organism probiotik dalam akuakultur dapat diberikan melalui pakan, air, maupun melalui perantaraan pakan hidup seperti *rotifera* atau *artemia*. Pemberian probiotik dalam pakan, berpengaruh terhadap keceptan fermentasi pakan dalam saluran pencernaan, sehingga akan sangat membantu proses penyerapan makanan dalam pencernaan ikan. Fermentasi pakan mampu mengurai senyawa kompleks

menjadi sederhana sehingga siap digunakan ikan, dan sejumlah mikroorganisme mampu mensistensa vitamin dan asam-asam amino yang dibuthkan oleh larva hewan akuatik. Pemberian probiotik pada pelet dengan cara disemprotkan dapat menimbulkan terjadinya fermentasi pada pelet dan meningkatkan kecepatan pencernaan. Selanjutnya akan meningkatkan konversi pakan ikan, peternak dapat memproduksi lele ukuran layak jual dalam waktu lebih singkat (60-70) hari sehingga dapat menekan biaya produksi. Probiotik organik merupakan teknologi penyeimbang lingkungan hidup yang paling aman.

Keunggulan yang di dapat pada sistem budi daya probiotik organik adalah biaya pakan pada budi daya lele dapat mencapai 60-70% dari keseluruhan total biaya produksi. Karena itu, setiap terjadi kenaikan harga pakan sangat mempengaruhi pembudidaya lele. Manfaat dari probiotik adalah mengatur lingkungan mikroba pada usus, menghalangi mikroorganisme pathogen usus dan memperbaiki efisiensi pakan dengan melepas enzim-enzim yang membantu proses pencernaan makanan (Dhingra, 1993).

Probiotik bekerja dengan cara mengontrol perkembangan dan populasi mikroorganisme “jahat” sehingga menghasilkan lingkungan tumbuh yang optimal bagi mikroorganisme “baik”. Hingga akhirnya, mikroorganisme “baik” akan mendominasi dan membuat habitat yang nyaman bagi pertumbuhan makhluk hidup di lingkungan tersebut. Penggunaan probiotik pada akuakultur adalah antisipasi sebagai strategi yang paling baik untuk pencegahan dari infeksi mikrobial dan untuk mengganti

serta kemoterapi. Keuntungan dan keamanan yang didapatkan dari industri diluar akuakultur tentang bakteri asam laktat telah mempercepat diterimanya probiotik dalam bidang akuakultur (Zizhong Qi *et al*, 2009).

Amiri (2009), menyatakan bahwa probiotik dalam akuakultur berperan dalam meningkatkan laju pertumbuhan, meningkatkan sistem imun dengan perubahan komunitas bakteri intestinalnya. Keuntungan menggunakan probiotik organik dalam budidaya ikan lele: (1) Kepadatan kolam lebih tinggi. Umumnya semakin tinggi kepadatan kolam, semakin lambat laju pertumbuhannya namun, dengan adanya teknologi probiotik organik, asupan pakan alami probiotik organik dan *azolla microphylla* membuat laju pertumbuhannya tetap tinggi dan kondisinya sehat, pakan tersebut memiliki kandungan asam amino esensial yang tinggi; (2) Serangan penyakit menurun dan kematian bibit rendah. Pemberian pakan berupa kombinasi pakan probiotik organik, *azolla microphylla*, dan nutrisi yang terdapat dalam air dapat menjaga ikan tetap sehat serta menurunkan tingkat kematian menjadi sangat rendah (2-3%, bahkan ada yang bisa dibawah 2%) ; (3) Lele yang dihasilkan lebih berkualitas. Beberapa keunggulannya adalah bobot lele lebih padat, kesat, kenyal, dan tidak ada penyusutan bobot dan selain itu daging lele lebih gurih dan tidak hancur saat di goreng; (4) Melestarikan danmenstabilkan lingkungan. Polusi air dapat berkurang karena semua bahan pakan dan *azolla microphylla* berasal dari sumber alami yang juga dapat menyeimbangkan pH air.

TARGET DAN LUARAN

Jenis Luaran yang akan dihasilkan dalam kegiatan ini antara lain:

1. Tumbuhnya antisipasi petani ikan lele terhadap penyakit yang menyerang pada pembudidayaan ikan lele di desa Sidoharjo.
2. Probiotik dapat dijadikan sebagai alternatif makanan tambahan (suplemen).
3. Menurunkan biaya produksi melalui pemakaian probiotik.
4. Meningkatkan produktivitas hasil panen ikan lele.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang ditawarkan

- a. Penyuluhan tentang manfaat probiotik bagi petani lele. Penyuluhan diberikan kepada 40 orang masyarakat desa Sidoharjo yang terdiri dari pengurus desa, pengurus dan anggota kelompok tani Makmur I dan II desa Sidoharjo. Penyuluhan ini akan menggunakan metode ceramah tentang pentingnya untuk terus berusaha dalam budidaya dan manfaat probiotik di dalam meningkatkan produktifitas ikan lele dengan LCD. Penyuluhan bertempat di Balai Desa Sidoharjo.



- b. Pembuatan sampel probiotik. Langkah-langkah pembuatan probiotik sesuai.



- c. Penggandaan Probiotik

Setelah probiotik jadi untuk menghemat waktu dan tenaga probiotik dapat digandakan atau diperbanyak

- d. Aplikasi probiotik kolam sebagai percontohan.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program pengabdian masyarakat ini dimulai dengan melakukan penyuluhan di Balai Desa Sidoharjo tentang

pengenalan dan potensi probiotik dalam proses budidaya lele. Penyuluhan diberikan kepada 40 orang masyarakat desa Sidoharjo yang terdiri dari pengurus desa dan anggota kelompok tani Makmur I dan II desa Sidoharjo. Setelah melakukan penyuluhan selanjutnya masyarakat di ajak dalam pembuatan probiotik secara mandiri dengan memanfaatkan bahan-bahan dari sekitar yang mudah di cari. Sumber utama mikroorganisme probiotik diperoleh dari ekstrak pelepah pisang dan menambahkan bahan-bahan lain sebagai sumber karbon. Ekstrak pelepah pisang dan sumber karbon di fermentasi kurang lebih selama 1 minggu dan hasil ini yang akan disebut sebagai starter probiotik. Tahap selanjutnya adalah praktek penggandaan probiotik dengan menggunakan molase sebagai sumber karbon.

Praktek penggandaan probiotik ini dimaksudkan untuk memberikan solusi kepada masyarakat tentang penyediaan probiotik secara mandiri sehingga ke depannya bisa meminimalisir pengeluaran. Pelatihan dilanjutkan dengan tata cara penggunaan probiotik selama budidaya ikan lele. Aplikasi probiotik ke lingkungan di lakukan dengan menyiapkan 6 kolam lele berbentuk bulat dengan diameter 3 m. setiap kolam di berikan kurang lebih 1500 bibit lele. Dari 6 kolam yang dipakai sebagai percontohan menunjukkan hasil yang signifikan karena pemakaian probiotik lele ini. Hasil signifikan tersebut dapat dilihat dari masa panen yang lebih cepat, pasokan pakan yang berkurang dan kondisi ikan lele yang sehat (gesit). Kemudian prosentase ukuran lele sama lebih tinggi (tidak rucah) dan jumlah kematian berkurang dari 40-50 % menjadi

20-30% dilihat dari perbandingan bibit yang ditebarkan dengan hasil panen, dari 1500 ekor per kolam di dapat hasil 100-120 Kg dengan asumsi 1 kg berisi 8-9 maka jumlah kematian kurang lebih 400-500.

Pada proses pelaksanaan program abdimas dari awal sampai akhir masyarakat terlihat selalu antusias dalam mengikuti program ini karena sebagian besar masyarakat juga ingin mengubah pola budidaya mereka dengan menggunakan probiotik. Setelah melakukan pelatihan pembuatan probiotik Tim abdimas juga mensosialisasikan cara komersialisasi probiotik ini sehingga dapat meningkatkan penghasilan tambahan masyarakat petani lele makmur ini, karena mereka sudah dibekali cara pembuatan starter probiotik dan cara penggandaan probiotik. Jika komersialisasi probiotik ini berkembang maka dapat dijadikan sebagai *home industry*.

Berdirinya *home industry-home industry* probiotik ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Sidoharjo, Kecamatan Polanharjo, Klaten sehingga nantinya bisa disebut sebagai Desa Mandiri. Target luaran selanjutnya adalah pendampingan pengemasan probiotik untuk menunjang proses produksi dan pemasaran. Pendampingan pengemasan probiotik ini perlu dilakukan karena di rasa perlu demi terwujudnya *home industry* probiotik. Setelah semua program abdimas dilapangan terlaksana maka target selanjutnya adalah pembuatan buku tentang "*budidaya lele dengan probiotik*" dan publikasi pada seminar nasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah dicapai sebanyak 70% dari kegiatan pengabdian masyarakat ini maka dapat disimpulkan:

1. Program pengabdian masyarakat tentang pembuatan probiotik ini terdiri dari beberapa tahap dimulai dengan penyuluhan, pendampingan di lapangan dan pembuatan buku pembudidayaan.
2. Antusiasme masyarakat terhadap program ini sangat tinggi hal ini dibuktikan dengan adanya peran serta masyarakat langsung dalam proses kegiatan awal sampai tahap ini.

Saran

Saran dari penelitian ini adalah:

1. Perlu adanya kajian lebih lanjut tentang pemanfaatan probiotik ini pada ikan air tawar lainnya sehingga program IbM pembuatan probiotik ini tidak hanya dilakukan pada budidaya lele saja akan tetapi untuk budidaya ikan air tawar potensial lainnya.
2. Sasaran program IbM tidak hanya para petani lele saja akan tetapi masyarakat secara umum sehingga ketrampilan tentang produksi dan pembuatan probiotik dapat disebar luaskan secara merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiri, M. S. dan Yousefian M. (2009). A Review of The Use Of Prebiotic In Aquaculture for Fish and Shrimp. *African Journal Of Biotechnology* Vol. 8 (25), pp. 7313-7318.
- Irianto, A. (2003). Probiotik Akuakultur. Gajahmada University Press. Yogyakarta.

- _____. (2007). Potensi Mikroorganisme: Di atas Langit ada langit. Ringkasan orasi ilmiah Fakultas Biologi Universitas Jendral Soedirman. Tanggal 12 Mei.
- Dhingra, M.M. (1993). Probiotic In Poultry Diet Livestock Production and Management. Sania Enterprises Indore. 452001, India
- Zhizong, Q., Z. Xiao-Hua, N. Boon and P. Bossier. (2009). Probiotics In Aquaculture Of China- Current State, Problems And Prospect. *Aquaculture* 290:15-21.

IBM DESA TAMBAKMAS DALAM PENYEDIAAN PAKAN LELE MANDIRI MELALUI BUDIDAYA CACING SUTERA (*Tubifex* sp.) DENGAN MEDIA LIMBAH AIR KOLAM LELE

Oleh :

FARIDA HURIAWATI¹⁾

NURUL KUSUMA DEWI²⁾

WACHIDATUL LINDA YUHANNA³⁾

IKIP PGRI MADIUN

Email: frd21pfisae@gmail.com¹⁾

nurul.kusuma.d@mail.ugm.ac.id²⁾

yuhan_bee_club@yahoo.com³⁾

ABSTRAK

Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari merupakan salah satu sentra budidaya ikan lele di Kabupaten Madiun dengan memanfaatkan pekarangan rumah warga untuk meningkatkan perekonomian keluarga dan untuk diversifikasi pangan keluarga secara mandiri. Permasalahan yang kemudian berkembang di kalangan peternak ikan adalah kebutuhan pakan benih berupa cacing sutera yang semakin meningkat pada saat pembenihan. Hal ini mendorong tim mencari solusi untuk permasalahan tersebut dengan membekali peternak lele dalam penyediaan pakan lele mandiri melalui budidaya cacing sutera (*Tubifex* sp.) dengan media limbah air kolam lele. Solusi ini menjawab permasalahan tidak tersedianya cacing sutera di alam sepanjang tahun, terutama pada saat musim penghujan, dimana pada saat itu kegiatan pembenihan lele banyak dilakukan. Solusi ini memiliki keuntungan ganda, karena selain memenuhi kebutuhan pakan lele, juga mengatasi masalah limbah air kolam lele. Pembuangan air limbah organik menjadi masalah pada saat pemanenan ikan lele, biasanya air ini ditampung pada kolam yang kurang produktif, padahal limbah air kolam lele dapat dimanfaatkan sebagai media budidaya cacing sutera (*Tubifex* sp.). Kegiatan penyuluhan terhadap peternak lele Tambakmas telah dilakukan untuk kedua kelompok peternak ikan Desa Tambakmas yang meliputi pelatihan pembuatan pakan dan media untuk budidaya cacing sutera. Dilanjutkan dengan pelatihan berupa cara budidaya dan pelatihan berupa metode panen. Masyarakat kelompok peternak ikan sangat antusias dengan adanya pelatihan ini.

Kata Kunci: *cacing sutera, budidaya, limbah air kolam ikan lele*

PENDAHULUAN

Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari merupakan salah satu wilayah yang dikembangkan Pemerintah Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, Jawa Timur sebagai sentra budidaya ikan lele dengan memanfaatkan pekarangan rumah warga untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dengan luas wilayah 421,59 Ha. Pengembangan Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari menjadi minapolitan atau sentra ikan air tawar, khususnya jenis lele bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan

perekonomian keluarga tetapi juga pemanfaatan pekarangan untuk diversifikasi pangan keluarga secara mandiri. Pengembangan budidaya lele dengan memanfaatkan pekarangan rumah tersebut sudah dilakukan sejak tahun 2012.

Pembinaan dan bantuan benih untuk tahun pertama dilakukan oleh Dinas Peternakan dan perikanan setempat. Pada awal budidaya dikembangkan hanya sekitar enam kolam saja, tetapi pada akhir tahun kedua telah ada sekitar 22 kolam ikan lele yang tersebar hampir di seluruh Desa Tambakmas. Hal tersebut telah membuat

warga desa setempat memiliki penghasilan tambahan di luar sektor pertanian yang selama ini sudah ditekuni. Potensi desa ini sebagai sentra budidaya ikan lele cukup besar. Dalam sekali panen bisa dihasilkan hingga 2 ton ikan lele. Warga juga tidak kesulitan menjualnya karena banyak pedagang pengepul ataupun langsung disetorkan ke pasar. Dalam setahun, bisa tiga hingga empat kali panen. Selain jumlah kolam yang bertambah, anggota kelompok budidaya lele juga semakin banyak. Jika pada awal didirikan hanya beranggotakan beberapa orang saja, pada tahun kedua, kelompok tani ikan tersebut telah beranggotakan 15 orang.

Data Dinas Peternakan dan Perikanan setempat mencatat, sejak dikembangkan minapolitan atau sentra budidaya ikan, telah terjadi peningkatan signifikan produksi perikanan di Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun selama beberapa tahun terakhir. Dimana untuk wilayah Kabupaten madiun pada tahun 2008 produksi ikan air tawar hanya 588 ton dan pada akhir 2012 telah menjadi 1.796 ton per tahun. Permasalahan yang kemudian berkembang di kalangan peternak ikan adalah kebutuhan pakan yang semakin meningkat. Lele merupakan jenis ikan yang mudah dibudidayakan tetapi rawan mengalami kematian pada saat pembenihan. Hal inilah yang mendorong tim mencari solusi untuk permasalahan tersebut dengan membekali peternak lele dalam penyediaan pakan lele mandiri melalui budidaya cacing sutera (*Tubifex* sp.) dengan media limbah air kolam lele. Cacing sutera (*Tubifex* sp.) mengandung nutrisi yang sangat dibutuhkan sebagai pakan alami dalam kegiatan unit perbenihan, terutama pada fase awal (larva)

karena memiliki kandungan nutrisi (protein 57% dan lemak 13%) yang baik untuk pertumbuhan ikan dan ukurannya sesuai dengan bukaan mulut larva, disamping itu harganya lebih murah dibanding artemia.

Cacing sutera relatif mudah dibudidayakan karena dapat berkembang biak pada media yang mempunyai kandungan oksigen terlarut berkisar antara 2–5 ppm. Cacing ini dapat dibudidayakan dan digunakan langsung untuk larva ikan. Cacing ini dapat juga di simpan dalam bentuk beku (*fresh*) maupun kering (*oven*). Sementara ketersediaannya masih mengandalkan pencarian tangkapan alam yaitu dari parit saluran air yang banyak mengandung bahan organik sisa limbah pasar atau limbah rumah tangga yang mengalir di saluran pembuangan. Permasalahannya adalah cacing sutera di alam tidak selalu tersedia sepanjang tahun, terutama pada saat musim penghujan, dimana pada saat itu kegiatan pembenihan lele banyak dilakukan.

Bagi Desa Tambakmas Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun yang banyak kegiatan pembenihan dan pembesaran, tetapi sulit memperoleh cacing sutera, maka budidaya ini perlu menjadi salah satu solusi yang perlu menjadi pertimbangan. Solusi ini memiliki keuntungan ganda, karena selain memenuhi kebutuhan pakan lele, juga mengatasi masalah limbah air kolam lele. Pada saat pemanenan ikan lele konsumsi timbul masalah membuang air limbah organik, biasanya air ini ditampung pada kolam yang kurang produktif, padahal limbah air kolam lele dapat dimanfaatkan sebagai media budidaya cacing sutera (*Tubifex* sp.).

BAHAN DAN ATAU CARA KERJA

Dalam budidaya cacing sutera dengan metode bersusun diperlukan sarana dan prasarana sebagai berikut:

1. Wadah atau nampan plastik yang telah dilubangi salah satu sisinya (lubang sebagai tempat sirkulasi air).
2. Kerangka penopang sebagai tempat wadah akan disusun. Kerangka penopang terbuat dari bambu petung yang ketika terkena air tidak mudah lapuk. Pembuatan kerangka penopang seperti pembuatan rak.
3. Setelah kerangka penopangnya siap, wadah akan disusun di atasnya.
4. Alat yang terakhir adalah aerator sebagai alat pengatur sirkulasi air dalam media budidaya cacing sutera.

Persiapan selanjutnya adalah persiapan media hidup cacing sutera. Bahan-bahan yang perlu disiapkan antara lain lumpur halus, ampas tahu, dedak, kotoran ayam petelur, probiotik dan molase. Perlu diingat lumpur yang digunakan adalah lumpur yang halus bebas dari bebatuan dan kotoran lain. Lumpur tersebut bisa diperoleh dari sawah. Proses fermentasi terjadi dengan pemberian probiotik dan molase. Perubahan Kimia Pada Substrat Organik, terjadi karena aksi katalisator biokimiaya yaitu Enzim. Adanya Aktivitas Mikroba Penyebab Fermentasi pada Substrat yang sesuai.

Fermentasi dilakukan pada media untuk tujuan Meningkatkan nilai gizinya lebih baik kualitasnya dari bahan bakunya, Mengubah protein menjadi asam-asam amino, dan secara tidak langsung akan menurunkan kadar serat kasar (Dengan aktivator ragi (East) menyederhanakan partikel bahan). Energi dalam substrat/ pakan dapat

dimanfaatkan oleh cacing sutera. Bahan Media/Pakan tersebut dirombak menjadi komponen yang sederhana. Pembuatan media cacing sutera adalah sebagai berikut:

1. Campurkan semua bahan dengan rata.
2. Semua bahan yang telah tercampur rata tempatkan dalam wadah tertutup yang hanya ada satu lubang yang terhubung dengan air dalam botol (Proses fermentasi berlangsung dalam 5 hari)
3. Setelah lima hari hasil yang telah terfermentasi dimasukkan dalam wadah.
4. Setelah itu biarkan media lumpur dan bahan lain yang telah terfermentasi disusun dalam rangka selama 7 hari.
5. Coba aliri air limbah kolam lele media yang ada di rangkaian rak selama 1 harian untuk melakukan tes konstruksi.



Gambar 1. Media Tumbuh Cacing Sutera

Pembuatan makanan untuk cacing sutera terbuat dari ampas tahu yang telah tiris yang dicampur dengan probiotik dan molase. Campuran makanan ini harus mengalami proses fermentasi terlebih dahulu sebelum digunakan.



Gambar 2. Makanan Cacing Sutera

Selama masa pemeliharaan cacing, air limbah kolam lele diusahakan tetap mengalir kecil dengan ketinggian air pada 5-10 cm. Setelah 10 hari biasanya bibit cacing sutera mulai tumbuh halus dan merata di seluruh permukaan lumpur dalam kolam. Ulangi lagi proses penambahan air buangan panen ikan lele ke dalam kolam budidaya cacing sutera maka setelah 2-3 bulan cacing mulai dapat dipanen. Cacing akan tumbuh setelah 2 minggu biang cacing sutera ditebar. Panen pertama dapat dilakukan setelah cacing berumur > 75 hari. Untuk selanjutnya dapat dipanen setiap 15 hari. Ciri kolam budidaya cacing yang siap untuk dipanen adalah apabila lumpur sebagai media pemeliharaan terasa kental bila dipegang. Panen cacing sutera dilakukan pada pagi/sore hari dengan cara menaikkan ketinggian air sampai 50-60 cm agar cacing naik sehingga mudah dipanen (Suwigno, 2005).

Cacing dan lumpur di keruk/aduk dengan caduk/garu dimasukkan dalam baskom kemudian dicuci dalam saringan. Cacing yang terangkat masih bercampur lumpur, selanjutnya dimasukkan dalam ember/bak yang berisi air dengan ketinggian lebih kurang 1(satu) cm di atas media lumpur.

Ember ditutup agar bagian dalam menjadi gelap dan dibiarkan selama 1 – 2 jam. Cacing akan bergerombol di atas media dan dapat diambil dengan tangan untuk dipisahkan dari media/lumpur. Cacing tersebut dimasukkan dalam bak pemberokan selama 10-12 jam. Cacing siap diberikan kepada benih ikan ataupun dijual.

PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan terhadap peternak lele Tambakmas dilakukan dalam beberapa sesi yaitu tanggal 10, 17, dan 31 Mei 2015 dengan peserta dari kelompok peternak ikan Mandiri Jaya dan kelompok peternak ikan Makmur. Ada 3 lokasi yang menjadi tempat penyuluhan yaitu balai desa Tambakmas, kediaman bapak Manggis selaku ketua kelompok peternak ikan Mandiri Jaya dan kediaman bapak Wandoyo selaku ketua kelompok peternak ikan Makmur. Pada tanggal 10 Mei, kedua kelompok peternak ikan Desa Tambakmas mendapatkan pelatihan pembuatan pakan dan media untuk budidaya cacing sutera. Peserta sangat antusias mengikuti pelatihan tersebut. Pakan dan media untuk budidaya cacing sutera memanfaatkan limbah yang ada di sekitar dan mudah didapat, antara lain limbah air kolam lele, limbah pabrik tahu (ampas tahu), dan limbah pabrik gula (molase). Teori tentang pakan dan media untuk budidaya cacing sutera tersebut diberikan di balai desa Tambakmas dilanjutkan dengan praktek lapangan.

Dilanjutkan pada tanggal 17 Mei 2015 mereka mendapatkan pelatihan berupa cara budidaya yang terdiri dari penyiapan kolam, pengendapan air, penebaran benih dan

perawatan. Untuk penyiapan kolam, kolam yang kurang produktif (tidak dipakai untuk budidaya lele) di areal usaha pembesaran ikan lele dapat diperuntukan untuk budidaya cacing sutera dengan luas 60–100 m² (d disesuaikan dengan areal yang ada). Kolam ini dikeringkan dan diolah. Air limbah kolam pembesaran lele diaduk-aduk untuk selanjutnya dimasukkan dengan pompa (dengan menyedot) ke kolam budidaya cacing sutera. Selain menggunakan kolam, kelompok peternak ikan juga diajari cara budidaya dengan menggunakan baskom atau nampan sebagai alternative (Efendi, M 2010).

Pada proses pengendapan air, air yang masuk diendapkan selama 3-5 hari, selanjutnya bagian atas endapan air dibuang/diturunkan mencapai 5–10 cm dari permukaan lumpur. Lumpur diratakan dengan sorok/kayu untuk selanjutnya dibiarkan selama beberapa hari. Proses ini diulangi 2–3 kali hingga lumpur halus yang ada di kolam cukup banyak. Kemudian ditebarkan bibit cacing indukan sebanyak 10 gelas (2-3 liter), kemudian diairi dengan ketinggian 5-7 cm. Selama masa pemeliharaan cacing, air diusahakan tetap mengalir kecil dengan ketinggian air pada 5-10 cm. Setelah 10 hari biasanya bibit cacing sutera mulai tumbuh halus dan merata di seluruh permukaan lumpur dalam kolam. Diulangi lagi proses penambahan air buangan panen ikan lele ke dalam kolam budidaya cacing sutera maka setelah 2-3 bulan cacing mulai dapat dipanen.

Pelatihan berikutnya pada tanggal 31 Mei mereka mendapatkan pelatihan berupa metode panen. Panen dapat dilakukan setiap 2 minggu sekali. Metode panen yang diberikan

adalah metode kering dan metode basah. Metode kering adalah dengan mengeringkan media budidaya dari air dan tunggu beberapa saat (kurang lebih 2-3jam) dengan demikian cacing sutera akan naik di permukaan media karena mencari oksigen, setelah itu cacing siap diambil. Untuk metode basah adalah langsung mengambil cacing dalam aliran air dan permukaan media budidaya cacing. Berdasarkan pengalaman metode panen yang mudah adalah metode kering. Sampai saat ini, monitoring masih berlangsung. Masyarakat kelompok peternak ikan sangat antusias dengan adanya pelatihan ini.



Gambar 3. Kegiatan Pelatihan Budidaya Cacing Sutera

PENUTUP

Kesimpulan

Pelatihan berupa cara budidaya yang terdiri dari penyiapan kolam, pengendapan air, penebaran benih dan perawatan. Untuk penyiapan kolam, kolam yang kurang produktif (tidak dipakai untuk budidaya lele) di areal usaha pembesaran ikan lele dapat diperuntukan untuk budidaya cacing sutera dengan luas 60–100 m² (d disesuaikan dengan areal yang ada). Selain menggunakan kolam, kelompok peternak ikan juga diajari cara budidaya dengan menggunakan baskom atau

nampan sebagai alternative. Pakan dan media untuk budidaya cacing sutera memanfaatkan limbah yang ada di sekitar dan mudah didapat, antara lain limbah air kolam lele, limbah pabrik tahu (ampas tahu), dan limbah pabrik gula (molase).

Saran

Budidaya cacing sutera dengan media baskom atau nampan sangat membantu peternak ikan yang memiliki kolam ikan terbatas. Untuk budidaya dengan menggunakan nampan, pembuatan rak penyangga lebih baik menggunakan bambu petung karena tahan terhadap air, semakin lama terendam semakin kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, M. 2010. *Beternak Cacing Sutera Cara Modern*. Penebar Swadaya.
- Suwigno, S. Widigdo, B. Wardiatno, Y. Krisanti, M. 2005. *Avertebrata Air*. Penebar Swadaya.
- Tim KP4K Kulon Progo. 2013. *Panduan Praktis Budidaya Cacing Sutera*. KP4K Kulon Progo

PENGARUH FILTER BENซิน UNITECH TERHADAP EMISI GAS BUANG

Oleh:

NANANG SUFFIADI¹⁾

MOH MUKSIN²⁾

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

ABSTRAK

Perkembangan teknologi pada era globalisasi sangatlah pesat, khususnya dunia otomotif. Perkembangan ini perlu diimbangi dengan perkembangan berbagai komponen pendukungnya. Salah satu komponen pendukung dalam sistem Filter Bensin Unitech pada Sepeda Motor 4 Tak. Kesempurnaan proses pembakaran akan mempengaruhi konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang dari motor. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Eksperimen akan dilakukan pada sepeda motor 4 tak yaitu Supra X 125 CC dengan memvariasikan pada putaran. Untuk mengetahui pengaruhnya akan digunakan uji statistik, berupa analisa varian dan uji t. Diharapkan dari penelitian dapat diketahui efektivitas penggunaan filter bensin sebagai upaya penghematan bahan bakar dan upaya menekan dampak pencemaran lingkungan.

Kata Kunci : *Filter bensin Unitech, sepeda motor empat tak, emisi gas buang*

PENDAHULUAN

Saat ini tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor meningkat tajam khususnya sepeda motor karena harganya yang cenderung terjangkau dengan bertambahnya jumlah motor secara otomatis bahan bakar yang dibutuhkan bertambah dan gas buang / asap yang dihasilkan juga bertambah dan bagaimana cara meminimalisir pengeluaran bahan bakar/menghemat bahan bakar, Dari berbagai sektor yang potensial dalam mencemari udara, pada umumnya sector transportasi memegang peran yang sangat besar dibandingkan dengan sector lainnya. Di kota-kota besar, kontribusi gas buang kendaraan bermotor sebagai sumber polusi udara mencapai 60-70%. Sedangkan kontribusi gas buang dari cerobong asap industry hanya berkisar 10-15%, sisanya berasal dari sumber pembakaran lain,

Misalnya dari rumah tangga, pembakaran sampah, kebakaran hutan, dan

lain-lain untuk mengurangi polusi tersebut maka dibutuhkan alat yang bias mengurangi emisi gas buang pada sepeda motor. Seiring hal tersebut kami adakan penelitian tentang filter bensin UNITECH . Sehingga bias mengetahui apakah ada perbedaan antara sepeda motor standart dengan sepeda motor yang telah dipasang filter bensin UNITECH terhadap emisi gas buang.

Anggapan sementara kami dengan dipasang filter bensin UNITECH barat orang dengan antri tiket bila antri secara rapi tentu pakaiannya tidak lusuh, badan tidak berkeringat dan cepat memperoleh layanan. Begitu juga dengan bahan bakar yang mengalir, unsur karbondan hydrogen akan tertata saat melintasi UNITECH hingga kedua unsur tidak lagi tercampur. dengan kata lain pembakaran akan sempurna

TINJAUAN PUSTAKA

Bahan Bakar

Bahan bakar merupakan factor penting bagi instalasi motor bakar. Dalam mesin sepeda motor hal yang penting berperan untuk mendapatkan daya adalah proses pembakaran. Pembakaran terjadi pada ruang bakar yang terletak pada kepala silinder. Pembakaran juga membutuhkan campuran bahan bakar dan udara yang seimbang.

Dari tiap-tiap bahan bakar yang perlu diketahui ialah pembakaran, untuk memperoleh daya yang cukup dalam motor. Nilai pembakaran dapat ditentukan dengan sebuah kalorimeter.

Pada bahan bakar gas nilai pembakaran dinyatakan dalam kal/M^3 , zat-zat penting yang terkandung dalam bakar gas berupa CO , H_2 dan ikatan C dan H , umpamanya C_2H_2 (asetylen) dan C_2H_4 (aethylen) dan CH_4 (methan).

Kecepatan pembakaran menentukan putaran maksimum yang dapat dicapai, misalnya, waktu mulai pembakaran ± 40 derajat putaran engkol. Pembakaran

$$\text{adalah } \frac{40}{360} \times \frac{60}{n} \text{ detik}$$

Syarat-syarat bahan bakar untuk motor bakar
Tidak mudah detonasi, nilai octane rendah (untuk solar) dan nilai oktan tinggi (untuk bensin)

Mudah dikabutkan

Mudah di start

Mudah mengalir

Titik penguapan rendah $\pm 36^\circ \text{C}$

Kecepatan pembakaran tinggi

Tidak membentuk endapan

Tidak membentuk jelaga dan endapan sisi bahan bakar

Tidak corrosive, kadar sulfur harus serendah mungkin

Nilai bakar harus tinggi

Batas penyalaan tinggi

Gas Buang

Jadi pengertian gas buang itu sendiri adalah gas yang keluar dari knalpot dari hasil pembakaran dari karburator. Gas ini sangat mengganggu kesehatan manusia, dan gas inilah yang selama ini dipermasalahkan bagi kalangan banyak masyarakat. Gas bekas umumnya terdiri dari gas yang tidak beracun N_2 (Nitrogen), CO_2 (Gas karbon) dan H_2O (Uap air) dan sebagian kecil merupakan gas yang beracun seperti : CO , HC dan NO_x (Oksidan Nitrogen) yang sekarang sangat populer dalam gas bekas maupun gas buang adalah beracun.

Karbonmonoksida (CO)

Banyaknya karbon monoksida (CO) dari gas buang tergantung pada perbandingan campuran bahan bakar dan udara. Hanya pada pembakaran sempurna nilai CO dapat dikatakan nol. Hal ini dapat terjadi secara teori antara perbandingan bahan bakar dan udara, dalam perbandingan ini selama perjalanan jarang dapat dipertahankan, karena kualitas campuran selalu berubah sesuai dengan frekuensi putaran dan pembebanan motor.

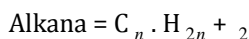
Zat Hidrokarbon (HC)

Dalam gas buang juga terdapat pula HC yang masih belum terbakar. Banyaknya HC tergantung pada keadaan waktu berjalan. Keadaan hampa pada silinder dan katup gas

tertutup disebabkan oleh nilai harga dari campuran jumlah HC yang tidak terbakar sangat banyak. Pada waktu motor direm kehampaan dibawah katup gas lebih tinggi dari putaran stasioner hal ini menyebabkan prosentase HC sangat besar.

Perbandingan antara bensin dan udara

Telah kita ketahui dimuka yaitu bahan bakar, bahwa bensin adalah merupakan campuran normal heptane dan oktana. Normal heptanadaniso oktana adalah suatu hidrokarbonjernih yang termasuk dalam golongan alkana. Untuk alkane rumus molekulny adapat dituliskan secara umum sebagai berikut.



Begitu juga campuran antara keduanya terlepas dari kecepatan pembakaran, ternyata bahwa kemungkinan besar untuk terbakar sendiri itu menurut teori adalah pada perbandingan 1: 14,8 bila campurannya lebih kaya atau lebih miskin, berkuranglah nilainya untuk terbakar sendiri. Bahwa pemiskinan campuranakan meningkatkan terbakar sendiri, hal ini diakibatkan lebih lamanya waktu pembakaran dari gas yang miskin sehingga bagian motor tertentu akan sangat panas. Dengan demikian akan terdapat dampak yang sama seperti pada pengapian lambat.

Emisi, Macam, sifat dan pengaruh gas buang terhadap manusia.

Emisi adalah zat kimia yang terdapat pada gas buang. Seperti sudah diterangkan tadi bahwa dari bermacam-macam gas buang yang sering dipersoalkan adalah CO, HC, Nox,

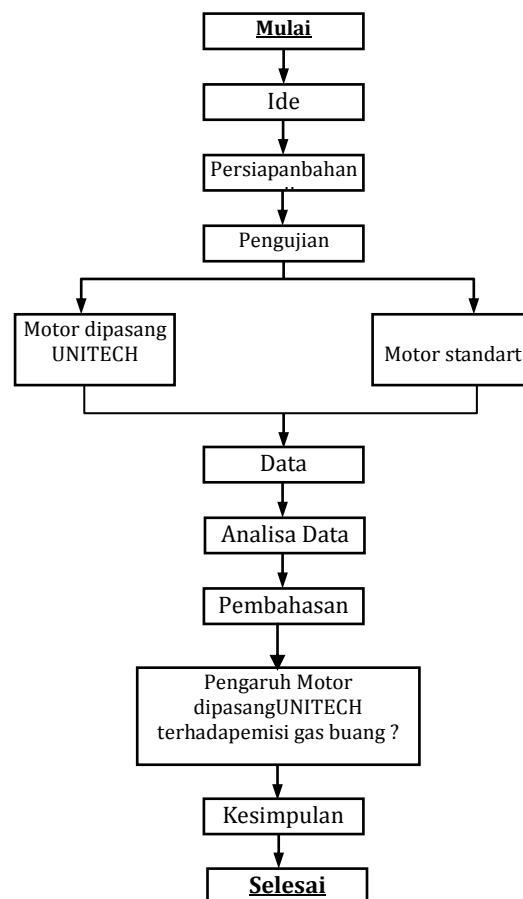
dari ketiga macam ini tentang sifatnya, sebab-sebab terjadinya maupun pengaruh keburukannya

METODE PENELITIAN

Untuk mencapai tujuan maka digunakan model penelitian eksperimental yang akan dilaksanakan di laboratorium Fakultas Teknik Jurusan Mesin Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Diagram Alir/urutan Penelitian

Secara umum urutan penelitian dilakukan sebagai berikut:



HASIL YANG DICAPAI

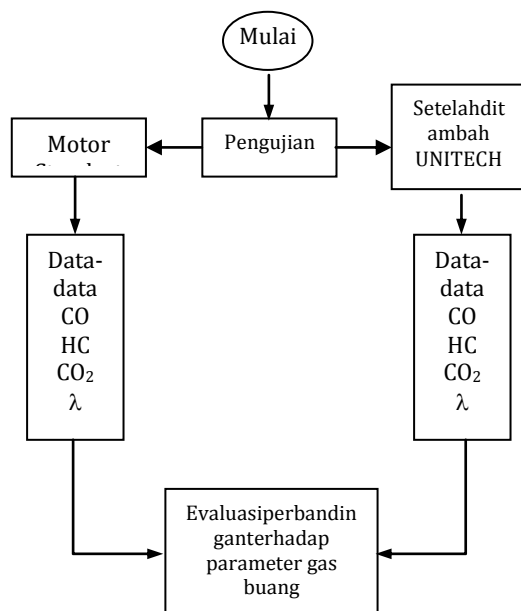
Metode memperoleh data.

Langkah-langkah yang digunakan dalam pengujian untuk memperoleh data adalah sebagai berikut:

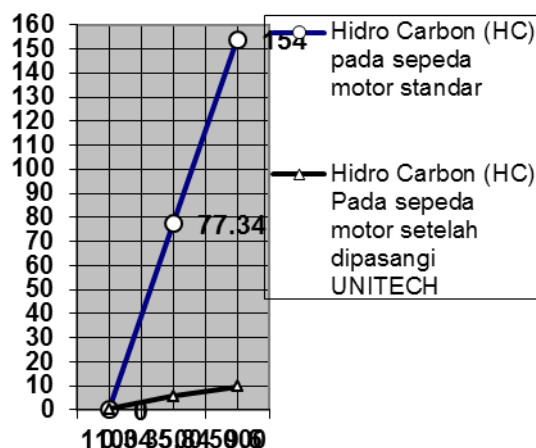
Langkah pengambilan data sebagai berikut :

1. Sepede motor dipanasi dahulu
2. Cek emisi gas buang pada putaran 1100 rpm, 3500rpm, dan 5000rpm sebelum menggunakan alat tersebut.
3. Cek emisi gas buang pada putaran 1100rpm, 3500rpm, dan 5000rpm setelah dipasang pada alat tersebut.

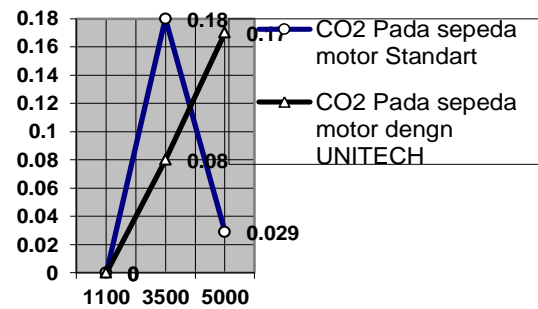
Yang pada akhirnya didapat sebuah hasil gas buang darike dua pengujian alat tersebut.



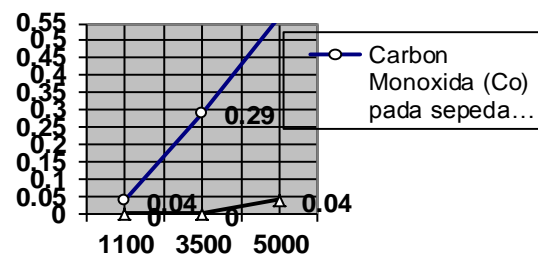
Grafik Hidro Carbon standart dan setelah dipasang Unitech.



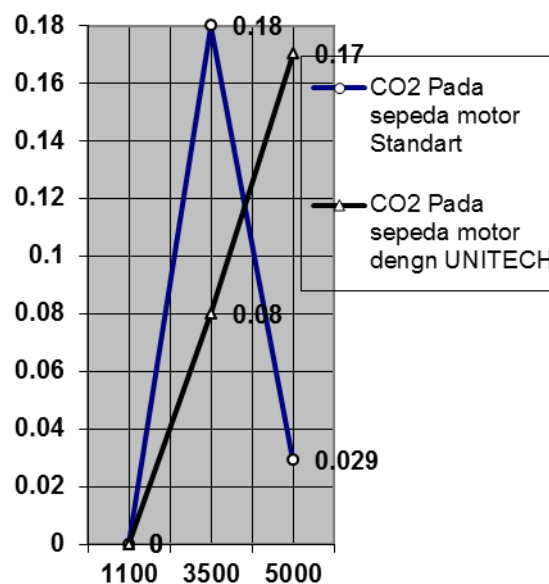
Grafik CO₂ Standar dan setelah dipasang filter bensin UNITECH



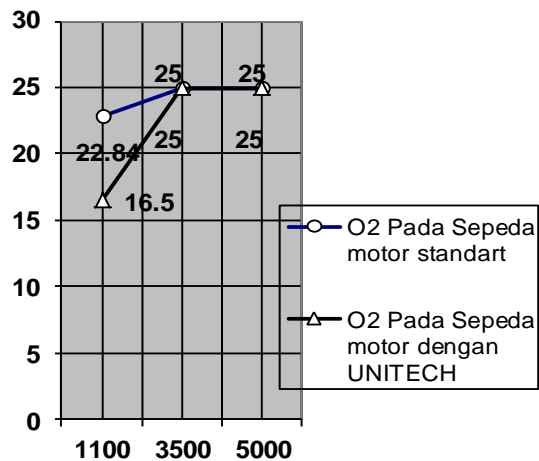
Grafik Carbon monoxida (CO) standart dan setelah dipasang Unitech



Grafik CO₂ Standar dan setelah dipasang filter bensin UNITECH



Grafik O₂ Standart dan setelah dipasang UNITECH



DAFTAR PUSTAKA

- Crouse, W.H. (2006). *Automotive Electric Equipment*, USA : Mc Graw Hill Book Company Inc
- Heywood, J.B. (2007). *Internal Combustion Engine Fundamentals* : Mc. Graw Hill
- Iswardono, Drs., Sp., MA. (2007). *Sekelumit analisa Regresi dan Korelasi*, Universitas Gajah Mada.
- Robert Bosch. (2005). *Automotive Hand Book*. Bosch German.
- Schwaller, A.E. (2008). *Motor Automotive Mecanics*, New York : Delmar Publisher Inc.
- Singgih Santoso, (2005). *Statistik dengan SPSS*. Jakarta : Gramedia.
- Trihendradi, C. (2008). *Step by Step SPSS 16 Analisis Data Statistik*. Yogyakarta : Penerbit Andi offset.

www.habmigern2003.info



Maju dan Terus dan Berprestasi



Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Ponorogo
Jl. Budi Utomo 10 Ponorogo 63481 Telp. (0352) 481124 Faks. (0352) 461796
Website fe.umpo.ac.id